



KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH
KABUPATEN NAGAN RAYA

2025-2045

PEMERINTAH KABUPATEN NAGAN RAYA
DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Kuta Padang, Kec. Suka Makmue, Kabupaten Nagan Raya, Aceh 23671





KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Nagan Raya telah dapat disusun dan disajikan menjadi salah satu dokumen lingkungan yang penting.

Dengan telah tersusunnya dokumen KLHS Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Nagan Raya oleh Pemerintah Kabupaten Nagan Raya maka satu tahapan penting telah terlalui dalam upaya untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program.

Kajian Lingkungan Hidup Strategis ini bertujuan untuk memastikan aspek lingkungan hidup telah terintegrasi dalam kebijakan, rencana dan program yang disusun dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Nagan Raya tahun 2025-2045. Terintegrasinya aspek lingkungan hidup ditujukan untuk menjamin pembangunan berkelanjutan dapat terwujud melalui rencana tata ruang dan meminimalisir konflik pemanfaatan ruang pada masa yang akan datang.

Selanjutnya kami menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah terlibat dan mendukung tersusunnya dokumen ini. Dalam penyusunan dokumen ini, kami mengakui masih jauh dari sempurna. Untuk itu saran dan kritik yang membangun ke arah penyempurnaan dokumen ini kami terima dengan tangan terbuka.

Akhir kata, besar harapan kami dokumen ini dapat berguna dan membantu semua pihak yang membaca dan membutuhkan hasil **Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Nagan Raya**.

Kabupaten Nagan Raya, Februari 2024
Pj. Bupati Kabupaten Nagan Raya,

Fitriany Earhas AP. S.Sos., M.Si.



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GAMBAR	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Dasar Hukum	4
1.3. Maksud dan Tujuan	7
1.4. Ruang Lingkup	8
1.5. Sistematika Pembuatan KLHS-RPJPD	9
BAB II DASAR TEORI	9
2.1. Rencana Pembangunan Daerah Jangka Panjang	9
2.2. Kajian Lingkungan Hidup Strategis	10
2.3. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)	14
2.3.1. Tinjauan Umum Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)	14
2.3.2. Indikator TPB	16
2.3.3. Forum Politik Tingkat Tinggi Terkait SDGs/TPB	21
2.3.4. Dokumentasi Penting Terkait TPB/SDGs	22
2.3.5. Pelaksanaan SDGs/TPB di Indonesia	23
2.4. Teori Perkembangan Wilayah	26
2.5. Perkembangan Wilayah Kabupaten Nagan Raya	28
BAB III KONDISI UMUM DAERAH	29
3.1. Sejarah Kabupaten Nagan Raya	29
3.2. Kondisi Geografis	29
3.2.1. Luas dan Batas Administrasi	32
3.2.2. Topografi	34
3.2.3. Geologi	34
3.2.4. Hidrologi	36
3.2.5. Klimatologi	37
3.2.6. Penggunaan Lahan	41
3.2.7. Potensi Pengembangan Wilayah	43
3.2.8. Kerentanan Wilayah Terhadap Bencana	45
3.2. Kondisi Demografis	47



PEMERINTAH KABUPATEN NAGAN RAYA

KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS (KLHS)

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD)

3.2.1. Struktur dan Distribusi Penduduk	48
3.2.2. Tingkat Kelahiran dan Kematian	55
3.2.3. Migrasi Penduduk	62
3.3. Keuangan Daerah	64
3.3.1. Kinerja Capaian Keuangan Daerah	64
3.3.2. Pendapatan Asli Daerah	65
3.3.3. Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahun 2021-2022	69
3.4. Profil Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup	77
3.4.1. Ambang Batas dan Status DDDTLH Penyedia Pangan	77
3.4.2. Ambang Batas dan Status Penyedia Air Bersih	80
3.4.3. Ambang Batas dan Status Resiko Bencana	83
3.4.4. Ambang Batas dan Status DDLH Biodiversitas	85
3.5. Peran Para Pihak Dalam Pencapaian TPB/SDGs	88
BAB IV ANALISIS TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN (TPB)	97
4.1. Gambaran Umum Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)	97
4.2. Penyediaan Data TPB/SDGs	98
4.3. Kondisi Umum Capaian Target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)	101
4.4. Identifikasi Pencapaian Indikator TPB	153
4.5. Analisis Indikator TPB Berdasarkan Pilar	156
4.6. Analisis Indikator TPB Pilar Sosial	159
4.6.1. Analisis Indikator TPB Pilar Ekonomi	159
4.6.2. Analisis Indikator TPB Pilar Lingkungan	160
4.6.3. Analisis Indikator TPB Pilar Hukum dan Tatakelola	161
4.7. Analisis Gap Capaian TPB	162
4.8. Perumusan Isu Pembangunan Berkelanjutan	163
4.8.1. Tahap Pra Pelingkungan	163
4.8.2. Tahap Pelingkupan	171
4.8.3. Isu Paling Strategis Pembangunan Berkelanjutan	179
BAB V ANALISIST CAPAIAN INDIKATOR TPB PADA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	181
5.1. Penapisan Organisasi Perangkat Daerah yang Relevan	181
5.1.1. Dinas Lingkungan Hidup (DLH)	183
5.1.2. Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	186
5.1.3. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	189
5.1.4. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR)	191
5.1.5. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	195



PEMERINTAH KABUPATEN NAGAN RAYA

KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS (KLHS)

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD)

5.1.6. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	195
5.1.7. Badan Penanggulangan Bencana Daerah	197
5.1.8. Dinas Kelautan, Perikanan dan Pangan	200
5.1.9. Dinas Pertanian dan Peternakan	203
5.1.10. Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Gampong, Pengendalian Penduduk dan Pemberdayaan Perempuan	205
5.1.11. Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik	208
5.1.12. Dinas Sosial	211
5.1.13. Badan Pusat Statistik (BPS)	214
5.1.14. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	217
5.1.15. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	219
5.1.16. Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah	222
5.1.17. Badan Pengelola Keuangan Daerah	222
5.1.18. Dinas Perkebunan	224
5.1.19. Dinas Kesehatan	224
5.1.20. Inspektorat	228
5.1.21. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	231
5.1.22. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	233
5.1.23. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	234
5.1.24. Dinas Perhubungan	236
5.1.25. Dinas Syari'at Islam	238
5.1.26. Dinas Pendidikan	238
5.1.27. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	241
BAB VI PERUMUSAN ALTERNATIF SKENARIO DAN REKOMENDASI	242
6.1. Penentuan Isu Strategis TPB	245
6.1.1. Isu Strategis TPB	245
6.1.2. Isu Pembangunan Daerah Strategis	246
6.2. Keterkaitan Isu Straretgis dengan Pencapaian TPB	248
6.3. Penentuan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Prioritas	250
6.4. Skenario Pencapaian Indikator TPB Prioritas	253
6.5. Alternatif Skenario Capaian TPB Prioritas	258
6.6. Proyeksi Capaian Indikator TPB	258
6.6.1. Metode Proyeksi Capaian Indikator TPB	258
6.6.2. Proyeksi Capaian Indikator Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/ sederajat.	260
6.6.3. Proyeksi Capaian Indikator Angka Partisipasi Kasar APK SMP/MTs/ sederajat.	263



6.6.4.	Proyeksi Capaian Indikator Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup.	265
6.6.5.	Proyeksi Capaian Indikator Prevalensi Penduduk Dengan Kerawanan Pangan Sedang Atau Berat, Berdasarkan Pada Skala Pengalaman Kerawanan Pangan.	267
6.6.6.	Proyeksi Capaian Indikator Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/ sederajat.	269
6.6.7.	Proyeksi Capaian Indikator Persentase kabupaten/kota yang mencapai 80% imunisasi dasar lengkap pada bayi.	272
6.6.8.	Proyeksi Capaian Indikator Persentase merokok pada penduduk umur ≤ 18 tahun.	274
6.6.9.	Proyeksi Capaian Indikator Tingkat Pengangguran Terbuka Berdasarkan Jenis Kelamin Dan Kelompok Umur.	275
6.6.10.	Proyeksi Capaian Indikator Persentase Peningkatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota)	277
6.6.11.	Proyeksi Capaian Indikator Persentase Penduduk yang Hidup di Bawah Garis Kemiskinan Nasional, menurut Jenis Kelamin dan Kelompok Umur.	280
6.7.	Permasalahan Pencapaian Indikator TPB	282
6.8.	Arahan Kebijakan RPJPD Kabupaten Nagan Raya Tahun 2025-2045	288
6.8.1.	Misi Daerah Tahun 2025-2045	288
BAB VII	KESIMPULAN DAN SARAN	317
7.1.	Kesimpulan	317
7.2.	Rekomendasi	319
7.2.1.	Rekomendasi Berdasarkan Capaian TPB	319
7.2.2.	Rekomendasi Secara Keseluruhan	320
DAFTAR PUSTAKA		321
LAMPIRAN		322



DAFTAR TABEL

Tabel 3.1.	Luas Wilayah Administrasi Menurut Kecamatan di Kabupaten Nagan Raya	30
Tabel 3.2.	Jumlah Desa/Gampong dan Kemukiman Menurut Kecamatan di Kabupaten Nagan Raya	31
Tabel 3.3.	Geologi Di Kabupaten Nagan Raya	35
Tabel 3.4.	Hidrologi Kabupaten Nagan Raya	36
Tabel 3.5.	Klimatologi di Kabupaten Nagan Raya	38
Tabel 3.6.	Jumlah Curah Hujan dan Hari Hujan dan Penyinaran Matahari Menurut Bulan di Kabupaten Nagan Raya Tahun 2022	39
Tabel 3.7.	Rata-rata Suhu dan Kelembaban Udara Menurut Bulan di Kabupaten Nagan Raya Tahun 2022	40
Tabel 3.8.	Rata-Rata Kecepatan Angin dan Tekanan Udara Menurut Bulan Di Kabupaten Nagan Raya Tahun 2022	41
Tabel 3.9.	Penggunaan Lahan Eksisting Kabupaten Nagan Raya	42
Tabel 3.10.	Luas Kawasan Hutan Lindung dan Budidaya Kabupaten Nagan Raya	44
Tabel 3.11.	Luas Kawasan Hutan Lindung dan Budidaya Menurut Kecamatan di Kabupaten Nagan Raya	45
Tabel 3.12.	Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Nagan Raya Tahun 2013-2022	49
Tabel 3.13.	Jumlah Penduduk berdasarkan kelompok umur di Kabupaten Nagan Raya Tahun 2013-2022	50
Tabel 3.14.	Laju Pertumbuhan penduduk di Kabupaten Nagan Raya Tahun 2013-2022	51
Tabel 3.15.	Kepadatan penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Nagan Raya Tahun 2013-2022	52
Tabel 3.16.	Rasio Jenis Kelamin Menurut Kecamatan di Kabupaten Nagan Raya Tahun 2013-2022	53
Tabel 3.17.	Jumlah Angkatan Kerja di Kabupaten Nagan Raya tahun 2013-2022	54
Tabel 3.18.	Komposisi Penduduk dan Angka Ketergantungan Kabupaten Nagan Raya tahun 2013-2022	55
Tabel 3.19.	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 Kelahiran Hidup di Kabupaten Nagan Raya Tahun 2012-2022	58
Tabel 3.20.	Angka Kematian Neonatal per 1000 Kelahiran Hidup di Kabupaten Nagan Raya Tahun 2012-2022	61
Tabel 3.21.	Target dan Realisasi Pendapatan Kabupaten Nagan Raya Tahun 2021	65
Tabel 3.22.	Target dan Realisasi Pendapatan Kabupaten Nagan Raya Tahun 2022	68
Tabel 3.23.	Proporsi Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Nagan Raya Tahun 2017-2019	69



PEMERINTAH KABUPATEN NAGAN RAYA

KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS (KLHS)

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD)

Tabel 3.24.	Target Realisasi Pendapatan Kabupaten Nagan Raya Tahun 2021-2022	71
Tabel 3.25.	Target dan Realisasi Belanja Kabupaten Nagan Raya 2021-2022	74
Tabel 3.26.	Target Realisasi Pembiayaan Kabupaten Nagan Raya Tahun 2021-2022	76
Tabel 3.27.	Daya Dukung Jasa Penyediaan Pangan Kabupaten Nagan Raya menurut Ekoregion, 2019	77
Tabel 3.28.	Daya Dukung Jasa Penyediaan Pangan Kabupaten Nagan Raya menurut Tutupan Lahan, 2019	78
Tabel 3.29.	Daya Dukung Jasa Penyediaan Pangan Kabupaten Nagan Raya menurut Kecamatan, 2019	79
Tabel 3.30.	Daya Dukung Jasa Penyediaan Air Bersih Kabupaten Nagan Raya menurut Ekoregion, 2019	80
Tabel 3.31.	Daya Dukung Jasa Penyediaan Air Bersih Kabupaten Nagan Raya menurut Tutupan Lahan, 2019	81
Tabel 3.32.	Daya Dukung Jasa Penyediaan Air Bersih Kabupaten Nagan Raya menurut Kecamatan, 2019	82
Tabel 3.33.	Daya Tampung Jasa Pengaturan Pencegahan dan Perlindungan dari Bencana Kabupaten Nagan Raya menurut hasil perhitungan Ekoregion 2019	83
Tabel 3.34.	Daya Tampung Jasa Pengaturan Pencegahan dan Perlindungan dari Bencana Kabupaten Nagan Raya menurut hasil perhitungan Tutupan Lahan 2019	84
Tabel 3.35.	Daya Tampung Jasa Pengaturan Pencegahan dan Perlindungan dari Bencana Kabupaten Nagan Raya menurut hasil perhitungan Kecamatan 2019	84
Tabel 3.36.	Daya Dukung dan Daya Tampung Jasa Pendukung Biodiversitas (Perlindungan Plasma Nutfah) Kabupaten Nagan Raya menurut Ekoregion, 2019	86
Tabel 3.37.	Daya Dukung dan Daya Tampung Jasa Pendukung Biodiversitas (Perlindungan Plasma Nutfah) Kabupaten Nagan Raya menurut Penutupan Lahan, 2019	86
Tabel 3.38.	Biodiversitas (Perlindungan Plasma Nutfah) Kabupaten Nagan Raya Menurut Kecamatan, 2019	87
Tabel 3.39	Peran para pihak (pemangku kepentingan) yang aktif menjalankan aktifitasnya dalam pencapaian TPB di Kabupaten Nagan Raya berjumlah	89
Tabel 3.40.	Kegiatan Mitra Pemerintah menurut TPB	94
Tabel 4.1.	Target dan Indikator TPB sesuai Perpres 59/2017	100
Tabel 4.2.	Identifikasi Pelaksanaan TPB Ke-1 Mengakhiri Kemiskinan Dalam Segala Bentuk Dimanapun	122
Tabel 4.3.	Identifikasi Pelaksanaan TPB ke-2. Menghilangkan Kelaparan, Mencapai Ketahanan Pangan dan Gizi yang Baik	124
Tabel 4.4.	Identifikasi Pelaksanaan TPB ke-3. Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Sejahtera	125
Tabel 4.5.	Identifikasi Pelaksanaan TPB ke-4. Menjamin Pendidikan yang Berkualitas	129



PEMERINTAH KABUPATEN NAGAN RAYA

KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS (KLHS)

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD)

Tabel 4.6.	Identifikasi Pelaksanaan TPB ke-5. Mencapai Kestaraan Gender dan Memberdayakan Kaum Perempuan	131
Tabel 4.7.	Identifikasi Pelaksanaan TPB ke-6. Menjamin Ketersediaan Air Bersih dan Sanitasi yang Berkelanjutan	133
Tabel 4.8.	Identifikasi Pelaksanaan TPB ke-7. Menjamin Akses Energi yang Terjangkau, Andal, Berkelanjutan dan Modern	135
Tabel 4.9.	Identifikasi Pelaksanaan TPB ke-8. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan	136
Tabel 4.10.	Identifikasi Pelaksanaan TPB ke-9. Membangun Infrastruktur Tangguh, Industri Berkelanjutan dan Inovasi	138
Tabel 4.11.	Identifikasi Pelaksanaan TPB ke-10. Mengurangi Kesenjangan	140
Tabel 4.12.	Identifikasi Pelaksanaan TPB ke-11. Menjadikan Kota dan Permukiman Inklusif, Aman, Tangguh & Berkelanjutan	141
Tabel 4.13.	Identifikasi Pelaksanaan TPB ke-12. Menjamin Pola Produksi dan Konsumsi yang Berkelanjutan	143
Tabel 4.14.	Identifikasi Pelaksanaan TPB ke-13. Mengambil Tindakan Cepat untuk Mengatasi Dampak Perubahan Iklim	144
Tabel 4.15.	Identifikasi Pelaksanaan TPB ke-14. Melestarikan dan memanfaatkan secara berkelanjutan sumber daya kelautan dan samudera untuk pembangunan berkelanjutan	145
Tabel 4.16.	Identifikasi Pelaksanaan TPB ke-15. Melindungi, Merestorasi dan Meningkatkan Pemanfaatan Berkelanjutan Ekosistem Daratan, Mengelola Hutan secara Lestari, Menghentikan Penggurunan, Memulihkan Degradasi Lahan, serta Menghentikan Kehilangan Keanekaragaman Hayati	145
Tabel 4.17.	Identifikasi Pelaksanaan TPB ke-16. Memperkuat Masyarakat yang Inklusif dan Damai, Menyediakan Akses Keadilan untuk Semua, dan Membangun Kelembagaan yang Efektif, Akuntabel, & Inklusif di Semua Tingkatan	146
Tabel 4.18.	Identifikasi dan Pelaksanaan TPB ke-17. Memperkuat Sarana Pelaksanaan dan Merevitalisasi Kemitraan Global untuk Pembangunan Berkelanjutan	149
Tabel 4.19.	Jumlah Indikator TPB Kewenangan Kabupaten	152
Tabel 4.20.	Jumlah Capaian Indikator TPB Berdasarkan Kategori	155
Tabel 4.21.	Gambaran Indikator TPB Berdasarkan Pilar	157
Tabel 4.22.	Capaian Indikator TPB Berdasarkan Pilar	158
Tabel 4.23.	Analisis Gap Capaian TPB Kabupaten Nagan Raya	163
Tabel 4.24.	Daftar Panjang Isu Pembangunan Berkelanjutan KLHS RPJPD Kabupaten Nagan Raya Tahun 2025-2045	164
Tabel 4.25.	Hasil Verifikasi dan Klasifikasi Isu-Isu Pendek PB	172
Tabel 4.26.	Isu Pembangunan Berkelanjutan Strategis	174



PEMERINTAH KABUPATEN NAGAN RAYA

KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS (KLHS)

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD)

Tabel 4.27.	Isu-Isu PB yang Masuk Kriteria Strategis	176
Tabel 4.28.	Isu PB Paling Strategis Prioritas	180
Tabel 5.1.	Jumlah Indikator TPB Relevan Berdasarkan OPD di Kabupaten Nagan Raya	182
Tabel 5.2.	Kategori Capaian Indikator TPB Dinas Lingkungan Hidup Nagan Raya, 2022.	184
Tabel 5.3.	Rekap Capaian Indikator TPB pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nagan Raya	186
Tabel 5.4.	Capaian Indikator TPB pada Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Nagan Raya, Tahun 2022.	187
Tabel 5.5.	Rekap Capaian Indikator TPB pada Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Nagan Raya	188
Tabel 5.6.	Capaian Indikator TPB pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	189
Tabel 5.7.	Rekap Capaian Indikator TPB pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Nagan Raya.	191
Tabel 5.8.	Capaian Indikator TPB pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	192
Tabel 5.9.	Rekap Capaian Indikator TPB pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Nagan Raya.	194
Tabel 5.10.	Capaian Indikator TPB pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	196
Tabel 5.11.	Rekap Capaian Indikator TPB pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	197
Tabel 5.12.	Capaian Indikator TPB pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah	198
Tabel 5.13.	Rekap Capaian Indikator TPB pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Nagan Raya.	200
Tabel 5.14.	Capaian Indikator TPB pada Dinas Kelautan, Perikanan dan Pangan	201
Tabel 5.15.	Rekap Capaian Indikator TPB pada Dinas Kelautan, Perikanan dan Pangan	202
Tabel 5.16.	Capaian Indikator TPB pada Dinas Pertanian dan Peternakan	203
Tabel 5.17.	Rekap Capaian Indikator TPB pada Dinas Pertanian dan Peternakan	204
Tabel 5.18.	Capaian Indikator TPB pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	205
Tabel 5.19.	Rekap Capaian Indikator TPB pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	207
Tabel 5.20.	Capaian Indikator TPB pada Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik	209
Tabel 5.21.	Rekap Capaian Indikator TPB pada Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik	211
Tabel 5.22.	Capaian Indikator TPB pada Dinas Sosial	212
Tabel 5.23.	Rekap Capaian Indikator TPB pada Dinas Sosial Kabupaten Nagan Raya.	214
Tabel 5.24.	Kategori Capaian Indikator TPB Badan Pusat Statistik Nagan Raya, 2022.	215



PEMERINTAH KABUPATEN NAGAN RAYA

KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS (KLHS)

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD)

Tabel 5.25.	Rekap Capaian Indikator TPB pada Badan Pusat Statistik Kabupaten Nagan Raya.	216
Tabel 5.26.	Capaian Indikator TPB pada Dinas Perdagangan dan Industri Kabupaten Nagan Raya, Tahun 2022.	217
Tabel 5.27.	Rekap Capaian Indikator TPB pada Dinas Perdagangan dan Industri Kabupaten Nagan Raya	219
Tabel 5.28.	Capaian Indikator TPB pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Nagan Raya, Tahun 2022.	220
Tabel 5.29.	Rekap Capaian Indikator TPB Pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Nagan Raya	221
Tabel 5.30.	Capaian Indikator TPB pada Badan Keuangan Kabupaten Nagan Raya.	223
Tabel 5.31.	Rekap Capaian Indikator TPB pada Badan Keuangan Kabupaten Nagan Raya	224
Tabel 5.32.	Capaian Indikator TPB pada Dinas Kesehatan Kabupaten Nagan Raya.	225
Tabel 5.33.	Rekap Capaian Indikator TPB pada Dinas Kesehatan Kabupaten Nagan Raya.	226
Tabel 5.34.	Capaian Indikator TPB pada Inspektorat	229
Tabel 5.35.	Rekap Capaian Indikator TPB pada Inspektorat Kabupaten Nagan Raya.	231
Tabel 5.36.	Capaian Indikator TPB pada Dinas PRKP	231
Tabel 5.37.	Rekap Capaian Indikator TPB pada Dinas PRKP	233
Tabel 5.38.	Capaian Indikator TPB pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	234
Tabel 5.39.	Rekap Capaian Indikator TPB pada Dinas PMPT	235
Tabel 5.40.	Capaian Indikator TPB pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	236
Tabel 5.41.	Rekap Capaian Indikator TPB pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	237
Tabel 5.42.	Capaian Indikator TPB pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	239
Tabel 5.43.	Rekap Capaian Indikator TPB pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	240
Tabel 6.1.	Isu PB Strategis Prioritas Kabupaten Nagan Raya	246
Tabel 6.2.	Isu Pembangunan Daerah Strategis Kabupaten Nagan Raya	246
Tabel 6.3.	Keterkaitan Isu-isu Strategis dengan TPB	248
Tabel 6.4.	Pembobotan Kriteria yang Digunakan Untuk Menentukan TPB Strategis	250
Tabel 6.5.	Pembobotan Untuk Menentukan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Prioritas	251
Tabel 6.6.	Pembobotan Untuk Menentukan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Prioritas	252
Tabel 6.7.	Pembobotan Menentukan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Prioritas Tinggi.	253



PEMERINTAH KABUPATEN NAGAN RAYA

KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS (KLHS)

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD)

Tabel 6.8.	Indikator yang Belum Mencapai Target Nasional (SB) dalam TPB Prioritas (SD)	254
Tabel 6.9.	Proyeksi Capaian Indikator TPB	261
Tabel 6.10.	Proyeksi Capaian Indikator TPB	263
Tabel 6.11.	Proyeksi Capaian Indikator TPB	265
Tabel 6.12.	Proyeksi Capaian Indikator TPB	267
Tabel 6.13.	Proyeksi Capaian Indikator TPB	270
Tabel 6.14.	Proyeksi Capaian Indikator TPB	272
Tabel 6.15.	Proyeksi Capaian Indikator TPB	274
Tabel 6.16.	Proyeksi Capaian Indikator TPB	276
Tabel 6.17.	Proyeksi Capaian Indikator TPB	278
Tabel 6.18.	Proyeksi Capaian Indikator TPB	280
Tabel 6.19.	Arah Kebijakan dan Sasaran Pokok sesuai Tahapan Periode Pembangunan Tahun 2025 -2045	291
Tabel 6.20.	Rekomendasi Umum Arah Kebijakan dan Skenario Alternatif	298
Tabel 6.21.	Pengintegrasian Rekomendasi KLHS dalam RPJPD Kabupaten Nagan Raya	300



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Empat Pilar Tujuan Pembangunan berkelanjutan	20
Gambar 2.2.	Hirarki Pendekatan geografi dan analisis keruangan	28
Gambar 3.1.	Persentase Luas Wilayah Kabupaten Nagan Raya Menurut Kecamatan	31
Gambar 3.2.	Jumlah Desa/Gampong Menurut Kecamatan di Kabupaten Nagan Raya	32
Gambar 3.3.	Peta Administrasi Kabupaten Nagan Raya	33
Gambar 3.4.	Peta Hidrologi Kabupaten Nagan Raya	37
Gambar 3.5.	Peta Klimatologi Kabupaten Nagan Raya	38
Gambar 3.6.	Peta Rawan Bencana Kabupaten Nagan Raya	47
Gambar 3.7.	Angka Kelahiran hidup diantara 1000 penduduk Kabupaten Nagan Raya	55
Gambar 3.8.	Angka Kematian Ibu per 100.000 kelahiran hidup Kab. Nagan Raya Tahun 2012–2022	57
Gambar 3.9.	Perkembangan Angka Harapan Hidup Kabupaten Nagan Raya Tahun 2010-2022 (BPS, 2023)	59
Gambar 3.10.	Posisi Relatif Angka Harapan Hidup Kabupaten Nagan Raya dengan Daerah lain	61
Gambar 3.11.	Proporsi Penduduk Berstatus Migran Seumur Hidup Antar Kab/Kota Menurut Generasi	63
Gambar 3.12.	Proporsi Penduduk Berstatus Migran Risen Antar Kab/Kota Menurut Generasi	64
Gambar 3.13.	Peta Daya Dukung dan Daya Tampung Penyediaan Pangan di	79
Gambar 3.14.	Peta Daya Dukung Jasa Penyediaan Air Bersih di Kabupaten Nagan Raya	82
Gambar 3.15.	Peta Daya Dukung Jasa Pengaturan Pencegahan dan Perlindungan dari Bencana Kabupaten Nagan Raya	85
Gambar 3.16.	Peta Daya Dukung dan Daya Tampung Jasa Pendukung Biodiversitas (Perlindungan Plasma Nutfah) Kabupaten Nagan Raya	88
Gambar 4.1.	Tujuan, Target dan Indikator TPB	97
Gambar 4.2.	Indikator Global dan Indikator Nasional	99
Gambar 4.3.	Metode Penyelenggaraan KLHS RPJPD	101
Gambar 4.4.	Jumlah Indikator TPB Kewenangan Kabupaten	153
Gambar 4.5.	Jumlah Capaian Indikator TPB Berdasarkan Kategori	156
Gambar 4.6.	Jumlah Capaian Indikator TPB Berdasarkan Kategori	157
Gambar 4.7.	Jumlah Capaian Indikator TPB Berdasarkan Pilar	158
Gambar 4.8.	Capaian Indikator TPB Pilar Sosial	159
Gambar 4.9.	Capaian Indikator TPB Pilar Ekonomi	160
Gambar 4.10.	Capaian Indikator TPB Pilar Lingkungan	161
Gambar 4.11.	Capaian Indikator TPB Pilar Hukum dan Tatakelola	162
Gambar 5.1.	Persentase Capaian Indikator TPB pada DLH Kabupaten Nagan Raya	185
Gambar 5.2.	Persentase Capaian Indikator TPB pada Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Nagan Raya	188



PEMERINTAH KABUPATEN NAGAN RAYA

KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS (KLHS)

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD)

Gambar 5.3.	Persentase Capaian Indikator TPB pada DLH Kabupaten Nagan Raya	190
Gambar 5.4.	Persentase Capaian Indikator TPB pada DLH Kabupaten Nagan Raya	193
Gambar 5.5.	Persentase Capaian Indikator TPB pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Nagan Raya	196
Gambar 5.6.	Persentase Capaian Indikator TPB pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Nagan Raya	199
Gambar 5.7.	Persentase Capaian Indikator TPB pada Dinas Kelautan, Perikanan dan Pangan Kabupaten Nagan Raya	202
Gambar 5.8.	Persentase Capaian Indikator TPB pada Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Nagan Raya	204
Gambar 5.9.	Persentase Capaian Indikator TPB pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Nagan Raya	206
Gambar 5.10.	Persentase Capaian Indikator TPB pada Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Kabupaten Nagan Raya	210
Gambar 5.11.	Persentase Capaian Indikator TPB pada Dinas Sosial Kabupaten Nagan Raya	213
Gambar 5.12.	Persentase Capaian Indikator TPB pada BPS Kabupaten Nagan Raya	216
Gambar 5.13.	Persentase Capaian Indikator TPB pada Dinas Perdagangan dan Industri	218
Gambar 5.14.	Persentase Capaian Indikator TPB pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Nagan Raya	221
Gambar 5.15.	Persentase Capaian Indikator TPB pada Badan Keuangan	223
Gambar 5.16.	Persentase Capaian Indikator TPB pada Dinas Kesehatan Kabupaten Nagan Raya	225
Gambar 5.17.	Persentase Capaian Indikator TPB pada Inspektorat Kabupaten Nagan Raya	229
Gambar 5.18.	Persentase Capaian Indikator TPB pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Nagan Raya	232
Gambar 5.19.	Persentase Capaian Indikator TPB pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Nagan Raya	235
Gambar 5.20.	Persentase Capaian Indikator TPB pada Dinas Perhubungan Kabupaten Nagan Raya	237
Gambar 5.21.	Persentase Capaian Indikator TPB pada Dinas Pendidikan	239
Gambar 6.1.	Kategori Capaian Indikator TPB	242
Gambar 6.2.	Alur Rumusan Alternatif Skenario	245
Gambar 6.3.	Perancangan Model Sistem Dinamik (Tasrif, 2006)	260
Gambar 6.4.	Proyeksi Data Awal dan Dengan Upaya Tambahan Indikator APM (SMP/MTs/Sederajat)	262
Gambar 6.5.	Diagram Indikator APM (SMP/MTs/Sederajat)	262



PEMERINTAH KABUPATEN NAGAN RAYA

KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS (KLHS)

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD)

Gambar 6.6.	Proyeksi Data Awal dan Dengan Upaya Tambahan Indikator APK (SMP/MTs/Sederajat)	264
Gambar 6.7.	Diagram Indikator APK (SMP/MTs/Sederajat)	264
Gambar 6.8.	Proyeksi Data Awal dan Dengan Upaya Tambahan Indikator AKB	266
Gambar 6.9.	Diagram Indikator AKB Per 1000 Kelahiran Hidup	266
Gambar 6.10.	Proyeksi Data Awal dan Dengan Upaya Tambahan Indikator Prevalensi Penduduk dgn Kerawanan Pangan	268
Gambar 6.11.	Diagram Indikator Prevalensi Penduduk dgn Kerawanan Pangan	268
Gambar 6.12.	Proyeksi Data Awal dan Dengan Upaya Tambahan Indikator APK (SD/MI/Sederajat)	270
Gambar 6.13.	Diagram Indikator APK (SD/MI/Sederajat).	270
Gambar 6.14.	Proyeksi Data Awal dan Dengan Upaya Tambahan Indikator Persentase Kab/Kota yg Mencapai 80% Imunisasi Dasar Lengkap Pada Bayi	273
Gambar 6.15.	Diagram Indikator Persentase Kab/Kota yg Mencapai 80% Imunisasi Dasar Lengkap Pada Bayi	273
Gambar 6.16.	Proyeksi Data Awal dan Dengan Upaya Tambahan Indikator Persentase Merokok pada Penduduk Umur < 18 Tahun	275
Gambar 6.17.	Diagram Indikator Persentase Merokok pada Penduduk Umur < 18 Tahun	275
Gambar 6.18.	Proyeksi Data Awal dan Dengan Upaya Tambahan Indikator Tingkat Pengangguran Terbuka	276
Gambar 6.19.	Diagram Indikator Tingkat Pengangguran Terbuka	276
Gambar 6.20.	Proyeksi Data Awal dan Dengan Upaya Tambahan Indikator Persentase Peningkatan SAKIP Kementerian/Lembaga	278
Gambar 6.21.	Diagram Indikator Persentase Peningkatan SAKIP Kementerian/Lembaga	278
Gambar 6.22.	Proyeksi Data Awal dan Dengan Upaya Tambahan Indikator Persentase Penduduk yg Hidup di Bawah Garis	281
Gambar 6.23.	Diagram Indikator Persentase Penduduk yg Hidup di Bawah Garis	281



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain (Peraturan Presiden RI, 2009). Seiring dengan penambahan penduduk yang semakin meningkat pada saat ini, permasalahan lingkungan juga semakin kompleks. Berdasarkan hal tersebut maka diperlukan peningkatan kesadaran masyarakat guna mengutamakan kegiatan-kegiatan pembangunan yang selalu mengutamakan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan.

Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) khususnya pada pasal 15 ayat 1 mewajibkan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah untuk melaksanakan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam penyusunan atau evaluasi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang berpotensi menimbulkan dampak dan risiko bagi lingkungan. Selanjutnya UU No. 6 tentang Cipta Kerja Pasal 63 ayat 3, dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pemerintah Daerah kabupaten/kota sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat bertugas dan berwenang: menetapkan dan melaksanakan KLHS tingkat kabupaten/kota.

Berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 263 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, wilayah, sesuai dengan wewenangnya, diwajibkan menyusun rencana pembangunan daerah sebagai bagian integral dari sistem perencanaan pembangunan nasional. Pemerintah daerah diharuskan merancang dan menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk periode 20 tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk masa 5 tahun, serta Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk pembangunan tahunan sesuai dengan prosedur dan langkah langkah yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Pada tanggal 5 Juli 2022, melalui surat Dirjen Bina Bangda Kemendagri No. 550/5113/Bangda perihal Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJPD dan KLHS RPJM, Pemerintah Pusat menginstruksikan agar Pemerintah



PEMERINTAH KABUPATEN NAGAN RAYA

KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS (KLHS)

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD)

Daerah wajib melaksanakan KLHS Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan Jangka Menengah Daerah.

Pengertian Kajian Lingkungan Hidup Strategis atau disingkat KLHS dalam UU PPLH Pasal 1 (angka 10) dan dalam Permendagri No 86 tahun 2017 pasal 1 (angka 66) disebutkan bahwa KLHS adalah sebagai “rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program”. KLHS ini sangat penting karena pada saat ini kita dihadapkan pada permasalahan degradasi lingkungan hidup yang semakin mengkhawatirkan, sehingga dalam setiap program pembangunan saat ini wajib memperhatikan dampak lingkungan yang akan ditimbulkan. Sedangkan Pengertian secara umum Kajian Lingkungan Hidup Strategi (KLHS) atau *Strategic Environmental Assesment* (SEA) adalah instrumen pendukung perencanaan pembangunan berkelanjutan melalui upaya internalisasi kepentingan lingkungan hidup dan prinsip-prinsip pembangunan tersebut.

Sebagai daerah yang saat ini sedang menyusun RPJPD yakni untuk periode tahun 2025-2045, maka Pemerintah Kabupaten Nagan Raya wajib melaksanakan KLHS terhadap RPJPD yang sedang disusun tersebut. KLHS ini dilakukan pada tahap awal dari proses penyusunan Rancangan Awal RPJPD Kabupaten Nagan Raya Tahun 2025-2045, sehingga dapat diprakirakan dampak terhadap lingkungan hidup apabila Kebijakan, Rencana dan Program (KRP) dalam RPJPD dimaksud akan dilaksanakan. (Asdak, 2012) menyatakan bahwa KLHS tidak mengkaji dampak sebuah proyek, melainkan mengkaji dampak sebuah Kebijakan, Rencana dan Program (KRP). Karenanya hasil dari kajian ini tentunya bersifat strategis, untuk memberikan rekomendasi penyempurnaan KRP yang tertuang dalam RPJPD Kabupaten Nagan Raya Tahun 2025-2045. Dengan kata lain, dengan adanya pertimbangan terhadap aspek lingkungan melalui KLHS diharapkan permasalahan lingkungan yang diperkirakan terjadi dapat diminimalisasi sehingga pembangunan yang berkelanjutan yang seimbang antara pertumbuhan ekonomi dan lingkungan dapat diwujudkan di Kabupaten Nagan Raya.

KLHS ini disusun sebagai satu kesatuan dari penyusunan RPJPD agar perencanaan pembangunan daerah memperhatikan aspek lingkungan dan keberlanjutan. KLHS digunakan untuk merencanakan dan mengevaluasi kebijakan, rencana, dan program yang akan atau sudah ditetapkan. Dalam penyusunan kebijakan, rencana dan/atau program, KLHS digunakan untuk



PEMERINTAH KABUPATEN NAGAN RAYA

KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS (KLHS)

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD)

menyiapkan alternatif penyempurnaan kebijakan, rencana dan/atau program agar dampak dan/atau risiko lingkungan yang tidak diharapkan dapat diminimalkan, sedangkan dalam evaluasi kebijakan, rencana dan/atau program, KLHS digunakan untuk mengidentifikasi dan memberikan alternatif penyempurnaan kebijakan, rencana dan/atau program yang menimbulkan dampak dan/atau risiko negatif terhadap lingkungan.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, sejalan dengan (Peraturan Presiden RI, 2022) tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan ini sebagai operasionalisasi penyusunan KLHS RPJPD Kabupaten Nagan Raya bertujuan untuk memandu pemerintah daerah dalam merumuskan skenario pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dengan indikator-indikatornya yang menjadi bagian dalam penyusunan RPJPD. Melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018, diharapkan akan terwujud pembangunan Kabupaten Nagan Raya yang mensejahterakan, dengan mengedepankan prinsip keberlanjutan pembangunan serta keberlangsungan lingkungan hidup.

KLHS RPJPD sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, sangat dibutuhkan dalam pemenuhan kualitas penyusunan RPJPD, dimana didalamnya substansi rencana pembangunan didasarkan pada analisis Daya Dukung dan Daya Tampung lingkungan serta mengarahkan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Berdasarkan pemetaan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup berbasis jasa ekosistem terhadap Tujuan Pembangunan Berkelanjutan maka diharapkan sumbangan KLHS RPJPD Kabupaten Nagan Raya dapat memastikan integrasi pembangunan berkelanjutan dalam Kebijakan, Rencana, dan Program, dan mendukung percepatan pencapaian 17 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau *Sustainable Development Goals* (SDGs) merupakan agenda internasional yang menjadi kelanjutan dari Tujuan Pembangunan Milenium atau *Millennium Development Goals* (MDGs). SDGs/TPB disusun oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dengan melibatkan 194 negara, *civil society*, dan berbagai pelaku ekonomi dari seluruh penjuru dunia. Agenda ini dibuat untuk menjawab tuntutan



PEMERINTAH KABUPATEN NAGAN RAYA

KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS (KLHS)

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD)

kepemimpinan dunia dalam mengatasi kemiskinan, kesenjangan, dan perubahan iklim dalam bentuk aksi nyata. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan merupakan komitmen Pemerintah dalam pelaksanaan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang terdiri 17 (tujuh belas) Tujuan dan 220 (dua ratus dua puluh) indikator wewenang kabupaten, baik indikator global dan indikator nasional yang menjadi proksi Global. Memberikan amanah kepada Bupati Menyusun Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

Kemudian sesuai dengan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 660/5113/Bangda tanggal 6 Juli 2022 perihal Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), maka pemerintah Kabupaten Nagan Raya berkomitmen menjalankan pembuatan KLHS RPJPD Kabupaten Aceh Barat 2025 – 2045 yang akan diintegrasikan dalam RPJPD Kabupaten Nagan Raya 2025 - 2045. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, RPJPD 2025 – 2045 nantinya akan digunakan sebagai pedoman calon kepala daerah yang akan mengikuti pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak pada tahun 2024 untuk Menyusun visi, misi dan program, serta sebagai pedoman penyusunan RPJMD.

RPJPD Kabupaten Nagan Raya tahun 2005-2025 ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah/Qanun Daerah Nomor 25 Tahun 2004, dimana tahun ini merupakan tahun keempat perodesasi RPJPD, maka sesuai Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, RPJPD Kabupaten Nagan Raya harus dilakukan evaluasi sebagai syarat untuk menyusun Rancangan Awal (Ranwal) RPJPD periode 2025-2045 yang akan datang. Dari arahan Kementerian Dalam Negeri, Kabupaten Nagan Raya melaksanakan evaluasi pada akhir tahun 2022 hingga awal tahun 2023. Oleh karena itu, Kabupaten Nagan Raya akan melakukan penyusunan Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJPD Tahun 2025 – 2045.

1.2. Dasar Hukum

Dasar hukum dari Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Nagan Raya Tahun 2025 - 2045 meliputi :

- a) Undang Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.
- b) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan



PEMERINTAH KABUPATEN NAGAN RAYA

KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS (KLHS)

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD)

- Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- c) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 - d) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
 - e) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 - f) Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2023, tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
 - g) Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 - h) Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan KLHS;
 - i) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 - j) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - k) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
 - l) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.
 - m) Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
 - n) Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan,

Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

- o) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 69 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis;
- p) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 07 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pembuatan dan Pelaksanaan dalam penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
- q) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- r) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- s) Permendagri No. 900.1.15.5-13 17 tahun 2023 tentang perubahan Permendagri No. 050-58-89 tahun 2021 tentang hasil verifikasi klasifikasi perencanaan pembangunan;
- t) Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 660/5113/Bangda tanggal 6 Juli 2022 perihal Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD);
- u) Surat Edaran Kemendagri No 600.11.2/8754/BANGDA/Tanggal 7 Agustus 2023 tentang pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD;
- v) Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Aceh Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Provinsi Aceh Tahun 2012 Nomor 9);
- w) Qanun Aceh Nomor 19 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Aceh Tahun 2013-2033 (Lembaran Daerah Provinsi Aceh Tahun 2013 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Aceh Nomor 62);
- x) Peraturan Bupati Nagan Raya Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Nagan Raya Tahun 2005-2025 (Berita Daerah Kabupaten

Nagan Raya Tahun 2011 Nomor 8).

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan KLHS RPJPD Kabupaten Nagan Raya Tahun 2025-2045 adalah untuk memastikan bahwa Kebijakan, Rencana dan Program atau disingkat KRP yang termuat di dalam dokumen RPJPD Kabupaten Nagan Raya Tahun 2025-2045 telah terintegrasi dengan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. Sedangkan yang menjadi tujuan penyusunan KLHS adalah sebagai berikut:

1. Untuk memastikan bahwa KRP yang termuat di dalam Rancangan RPJPD Kabupaten Nagan Raya Tahun 2025-2045 telah mengintegrasikan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan yakni: (a) saling ketergantungan (*interdependency*), yaitu meliputi saling ketergantungan antar wilayah, antar sektor, antar pemangku kepentingan dan antar kesatuan ekosistem; (b) prinsip keseimbangan (*equilibrium*), yaitu keselarasan proporsional antara kepentingan ekonomi, sosial-budaya, dan lingkungan hidup/ ekologi; dan (c) prinsip keadilan (*justice*) yaitu keadilan dalam memperoleh manfaat pembangunan baik antar generasi maupun antar kelompok masyarakat dalam satu generasi di daerah.
2. Meningkatkan kualitas RPJPD Kabupaten Nagan Raya Tahun 2025-2045 sebagai upaya Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) dengan cara memberikan kontribusi perbaikan materi rancangan awal Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Nagan Raya Tahun 2025-2045 melalui:
 - a. Pengkajian pengaruh rumusan visi, misi, tujuan dan sasaran, strategi dan arah kebijakan, kebijakan umum dan program pembangunan daerah Kabupaten Nagan Raya 2025-2045 terhadap prinsip pembangunan berkelanjutan.
 - b. Perumusan mitigasi dampak dan/atau alternatif program serta saran penyempurnaan rumusan visi, misi, tujuan dan sasaran, strategi dan arah kebijakan dan kebijakan umum pembangunan jangka panjang Kabupaten Nagan Raya periode tahun 2025-2045.
 - c. Pengintegrasian rekomendasi ke dalam rancangan awal RPJPD Kabupaten Nagan Raya Tahun 2025-2045.
 - d. Peningkatkan kapasitas perencana pembangunan daerah Kabupaten Nagan Raya dalam melaksanakan KLHS.

1.4. Ruang Lingkup

Ruang lingkup kegiatan KLHS RPJPD Kabupaten Nagan Raya Tahun 2025-2045 tetap mengacu Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 67 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan atau Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah dan Peraturan Menteri LHK Nomor 69 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan atau Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah, serta Surat Edaran Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia No. SE. 04/MENLHK-II/2015 tentang Pelaksanaan KLHS meliputi :

- a. Pembentukan tim pembuat KLHS RPJPD
 - a). Pemerintah daerah membentuk tim pembuat KLHS RPJPD ditetapkan dengan keputusan kepala daerah yang dikoordinasikan oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Nagan Raya Bersama dengan Bappeda dan dengan Dinas Lingkungan Hidup.
 - b) Tim pembuat KLHS RPJMD beranggotakan perangkat daerah terkait sesuai dengan kompetensi dan kebutuhan dalam pembuatan KLHS RPJPD.
 - c) Dalam melaksanakan tugasnya tim pembuat KLHS RPJPD melibatkan organisasi masyarakat, filantropi, pelaku usaha, akademisi dan pihak terkait lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- b. Pengkajian pembangunan berkelanjutan dilakukan oleh tim mencakup:
 - a) Kondisi umum daerah memuat kondisi daya dukung dan daya tampung, geografis, demografi dan keuangan daerah.
 - b) Capaian indikator TPB berupa analisis kondisi pencapaian tujuan Pembangunan berkelanjutan
 - c) Pembagian peran berupa analisis kontribusi dari pemerintah, pemerintah daerah, serta organisasi masyarakat, filantropi, pelaku usaha, akademisi dan pihak terkait lainnya sesuai ketentuan perundang-undangan dalam pembangunan daerah.
3. Perumusan skenario pembangunan berkelanjutan

Perumusan skenario mengacu pada analisa perkembangan pencapaian indikator TPB di daerah, proyeksi capaian indikator TPB tahun 2030, analisis gap antara target TPB dengan proyeksi capaian TPB di daerah, menentukan isu strategis berdasarkan indikator TPB, analisis permasalahan dalam pencapaian indikator TPB serta menentukan sasaran pencapaian.
4. Penjaminan kualitas, pendokumentasian dan validasi KLHS RPJPD



Penjaminan kualitas KLHS RPJPD dilakukan oleh kepala daerah dan ditandatangani oleh kepala daerah tersebut. Laporan KLHS RPJPD bersifat terbuka dan dapat diakses oleh publik. Validasi KLHS RPJPD dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah melalui Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Aceh.

1.5. Sistematika Pembuatan KLHS-RPJPD

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis; dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 07 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pembuatan dan Pelaksanaan dalam Sistematika penulisan laporan pelaksanaan KLHS RPJPD Kabupaten Nagan Raya Tahun 2025-2045 adalah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini membahas mengenai latar belakang, tujuan KLHS, lingkup kegiatan pelaksanaan KLHS, kendala-kendala dalam pelaksanaan KLHS dan sistematika penulisan laporan.

BAB II : DASAR TEORI

Bab ini membahas tentang dasar-dasar teori terkait dengan penyusunan KLHS dan RPJPD Kabupaten Nagan Raya, peran para pihak dan sejarah Kabupaten Nagan Raya.

BAB III : KONDISI UMUM DAERAH

Bab ini menguraikan terkait dengan letak geografis, kondisi fisik, kondisi lingkungan hidup, sampai dengan kondisi keuangan daerah Kabupaten Nagan Raya.

BAB IV : ANALISIS TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

Bab ini menguraikan terkait dengan kondisi TPB, Capaian target indikator TPB berdasarkan Pilar, sampai dengan Rumusan isu prioritas di Kabupaten Nagan Raya.

BAB V : ANALISIS CAPAIAN INDIKATOR TPB PADA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (OPD)

Bab ini menguraikan capaian indikator TPB pada organisasi perangkat daerah di Kabupaten Nagan Raya.

BAB VI : ALTERNATIF SKENARIO DAN REKOMENDASI



PEMERINTAH KABUPATEN NAGAN RAYA

KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS (KLHS)

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD)

Menjelaskan tentang Alternatif Skenario dan Rekomendasi yang telah dilakukan:

- Perumusan Skenario Pembangunan Berkelanjutan
- Skenario Alternatif dan Rekomendasi TPB tanpa Upaya Tambahan
- Skenario Alternatif dan Rekomendasi dengan Upaya Tambahan

BAB VII : KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Berisi mengenai kesimpulan dan rekomendasi

BAB II

DASAR TEORI

2.1. Rencana Pembangunan Daerah Jangka Panjang

Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dengan tegas mewajibkan pemerintah pusat dan juga pemerintah daerah agar membuat dan melaksanakan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program. Selanjutnya dalam Pasal 2 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dengan jelas menyebutkan bahwa KLHS yang dimaksud wajib dilaksanakan ke dalam penyusunan RPJP Nasional dan juga RPJP Daerah. Adapun yang dimaksud dengan RPJP juga dijelaskan dalam PP No. 46 tersebut, RPJP adalah dokumen perencanaan Pembangunan untuk periode 20 (dua puluh) tahun.

Selanjutnya Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 dalam Pasal 11 Ayat (2) menyebutkan bahwa Rencana Pembangunan Daerah terdiri dari RPJPD, RPJMD dan RKPD. Selanjutnya Pasal 19 Ayat (1) menyebutkan juga bahwa penyusunan rancangan awal RPJPD diantaranya harus mencakup KLHS. Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 selanjutnya mengatur dengan rinci tata cara penyusunan RPJPD dan RPJMD. Permendagri tersebut juga menjelaskan bahwa tujuan rencana pembangunan daerah adalah untuk mewujudkan pembangunan daerah dalam rangka peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan pelayanan publik serta menumbuhkan dan meningkatkan daya saing daerah. Rencana pembangunan daerah dilaksanakan berlandaskan prinsip: 1) merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional; 2) dilakukan pemerintah daerah bersama para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing; 3) mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana pembangunan daerah; dan 4) dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki masing-masing daerah, sesuai dengan dinamika perkembangan daerah dan nasional.

Permendagri No. 86 juga menjelaskan tentang rencana pembangunan daerah, dirumuskan secara; a) transparan; b) responsif; c) efisien; d) efektif; e) akuntabel; f) partisipatif; g) terukur; h) berkeadilan; i) berwawasan lingkungan; dan j) berkelanjutan. Adapun tentang tata

cara perencanaan pembangunan daerah dijelaskan pada pasal 7, 8, 9 dan 10, yaitu perencanaan pembangunan yang berorientasi pada proses menggunakan pendekatan: 1) teknokratik; 2) partisipatif; 3) politis; dan 4) atas-bawah dan bawah-atas.

Sedangkan perencanaan pembangunan daerah yang berorientasi pada substansi menggunakan pendekatan: 1) holistic-tematik; 2) integrative; dan 3) spasial. Untuk memastikan penyusunan RPJPD telah memperhatikan tujuan pembangunan berkelanjutan dan potensi timbul dampak lingkungan, maka pemerintah melalui UU Nomor 32 Tahun 2009 dan PP Nomor 46 Tahun 2016 mewajibkan penyusunan/pembuatan KLHS, yang memberikan rekomendasi perbaikan berupa antisipasi, mitigasi, adaptasi dan/atau kompensasi program bagi yang terdampak kegiatan pembangunan.

2.2. Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Sebagaimana ditetapkan dalam UUPPLH No. 32 Tahun 2009 (Pasal 15, ayat 3) Kajian Lingkungan Hidup Strategis disingkat KLHS dilaksanakan dengan mekanisme:

1. Pengkajian pengaruh kebijakan, rencana, dan/atau program terhadap kondisi lingkungan hidup di suatu wilayah;
2. Perumusan alternatif penyempurnaan kebijakan, rencana, dan/atau program;
3. Rekomendasi perbaikan untuk pengambilan keputusan kebijakan, rencana, dan/atau program yang mengintegrasikan prinsip pembangunan berkelanjutan.

Dalam praktiknya, ketiga mekanisme utama di atas perlu didukung dengan beberapa kegiatan atau langkah. Langkah pertama yang perlu dilakukan adalah merancang proses KLHS, agar proses dan hasil KLHS dapat benar-benar efektif dan efisien sesuai dengan tujuan KLHS. Dalam merancang proses KLHS ini, beberapa hal yang perlu disiapkan adalah pentingnya memahami konteks penyusunan dan evaluasi KRP, sehingga proses KLHS nya nanti dapat diintegrasikan dalam proses kebijakan rencana dan program (KRP) dengan baik. Dalam memahami konteks penyusunan dan evaluasi KRP ini, salah satu yang penting adalah mengetahui jenis KRP-nya sendiri.

Karena penyelenggaraan KLHS dituntut partisipatif, maka proses KLHS harus melibatkan berbagai pemangku kepentingan dan masyarakat. Dalam konteks ini, perlu diidentifikasi pemangku kepentingan dan masyarakat untuk setiap proses penyusunan dan evaluasi KRP, dan berdasar identifikasi ini, kemudian dapat ditentukan siapa saja pemangku kepentingan dan masyarakat yang akan dilibatkan dalam proses KLHS.

Setelah pemangku kepentingan dan masyarakat ini ditentukan, maka mereka dapat dilibatkan dalam proses lebih lanjut yaitu identifikasi dan penentuan isu-isu pembangunan berkelanjutan di wilayah dimana KRP tersebut akan disusun. Proses ini perlu didukung dengan data *based* yang baik, agar proses penentuan isu-isu pembangunan berkelanjutan ini dapat secara rasional dilakukan.

Kajian Lingkungan Hidup Strategis di Indonesia juga diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis yang mengamanatkan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah wajib membuat KLHS untuk memastikan bahwa prinsip Pembangunan Berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau Kebijakan, Rencana, dan/atau Program.

Selanjutnya, dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara perencanaan, Pengendalian dan evaluasi pembangunan Daerah, tata cara evaluasi rancangan Perda tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka panjang Daerah, serta tata cara perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, dan Rencana Kerja Perangkat Daerah mengamanatkan bahwa Rencana Pembangunan Daerah Pemerintah daerah dapat menyusun KLHS RPJPD dalam rangka mewujudkan RPJPD sesuai dengan prinsip berkelanjutan. Hal ini tentu berkaitan dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) yang mengamanatkan bahwa untuk mencapai sasaran TPB mengarahkan Pemerintah Daerah untuk menyusun dokumen perencanaan salah satunya Rencana Aksi Daerah (RAD) TPB Provinsi, sehingga dihasilkan rencana aksi TPB yang terukur dan jelas dalam periode waktu tertentu.

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah wajib melaksanakan dan menyusun Kajian Lingkungan Hidup Strategis. Ketentuan tersebut sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana yang tertuang pada Pasal 15 sampai dengan pasal 18 sebagai berikut :

Pasal 15 (UU No. 32 Tahun 2009)

- (1) Pemerintah dan pemerintah daerah wajib membuat KLHS untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program.

- (2) Pemerintah dan pemerintah daerah wajib melaksanakan KLHS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke dalam penyusunan atau evaluasi:
 - a. Rencana tata ruang wilayah (RTRW) beserta rencana rincinya, rencana pembangunan jangka panjang (RPJP), dan rencana pembangunan jangka menengah (RPJM) nasional, provinsi, dan kabupaten/kota; dan
 - b. Kebijakan, rencana, dan/atau program yang berpotensi menimbulkan dampak dan/atau risiko lingkungan hidup.
- (3) KLHS dilaksanakan dengan mekanisme:
 - a. Pengkajian pengaruh kebijakan, rencana, dan/atau program terhadap kondisi lingkungan hidup di suatu wilayah;
 - b. Perumusan alternatif penyempurnaan kebijakan, rencana, dan/atau program; dan
 - c. Rekomendasi perbaikan untuk pengambilan keputusan kebijakan, rencana, dan/atau program yang mengintegrasikan prinsip pembangunan berkelanjutan.

Pasal 16 (UU No. 32 Tahun 2009) KLHS memuat kajian antara lain:

- a. Kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk pembangunan;
- b. Perkiraan mengenai dampak dan risiko lingkungan hidup;
- c. Kinerja layanan/jasa ekosistem;
- d. Efisiensi pemanfaatan sumber daya alam;
- e. Tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim; dan
- f. Tingkat ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati.

Pasal 17 (UU No. 32 Tahun 2009)

- (1) Hasil KLHS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) menjadi dasar bagi kebijakan, rencana, dan/atau program pembangunan dalam suatu wilayah.
- (2) Apabila hasil KLHS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan bahwa daya dukung dan daya tampung sudah terlampaui,
 - a. kebijakan, rencana, dan/atau program pembangunan tersebut wajib diperbaiki sesuai dengan rekomendasi KLHS; dan
 - b. segala usaha dan/atau kegiatan yang telah melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup tidak diperbolehkan lagi.

Pasal 18 (UU No. 32 Tahun 2009)

- (1) KLHS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) dilaksanakan dengan melibatkan masyarakat dan pemangku kepentingan.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelenggaraan KLHS diatur dalam Peraturan Pemerintah.

KLHS atau Kajian Lingkungan Hidup Strategis adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program. KLHS merupakan salah satu Instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup. Selanjutnya untuk melaksanakan Pasal 18. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.

Dalam ketentuan tersebut sebagaimana dijelaskan pada Pasal 5, diatur bahwa Penyelenggaraan KLHS dilakukan dengan tahapan:

- a. Pembuatan dan pelaksanaan KLHS;
- b. Penjaminan kualitas dan pendokumentasian KLHS; dan
- c. Validasi KLHS.

Selanjutnya ketentuan mengenai pembuatan dan pelaksanaan KLHS diatur dengan pasal 6 sampai pasal 16, kemudian dilakukan penjaminan kualitas dengan memperhatikan ketentuan Pasal 19 dan Pasal 20 Hasil pembuatan dan pelaksanaan KLHS serta penjaminan kualitas KLHS tersebut didokumentasikan ke dalam laporan KLHS.

Laporan KLHS sebagaimana dimaksud memuat informasi tentang:

- a. Dasar pertimbangan Kebijakan, Rencana, dan/atau Program sehingga perlu dilengkapi KLHS;
- b. Metoda, teknik, rangkaian langkah-langkah dan hasil pengkajian pengaruh Kebijakan, Rencana, dan/atau Program terhadap kondisi Lingkungan Hidup;
- c. Metoda, teknik, rangkaian langkah-langkah dan hasil perumusan alternatif muatan Kebijakan, Rencana, dan/atau Program;
- d. Pertimbangan, muatan, dan konsekuensi rekomendasi perbaikan untuk pengambilan keputusan Kebijakan, Rencana, dan/atau Program yang mengintegrasikan prinsip Pembangunan Berkelanjutan;
- e. Gambaran pengintegrasian hasil KLHS dalam Kebijakan, Rencana, dan/atau Program;
- f. Pelaksanaan partisipasi masyarakat dan keterbukaan informasi KLHS; dan
- g. Hasil penjaminan kualitas KLHS.

Terhadap KLHS yang telah dilakukan penjaminan kualitas dilakukan validasi oleh Menteri, untuk Kebijakan, Rencana, dan/atau Program tingkat nasional dan provinsi; atau oleh gubernur, untuk Kebijakan, Rencana, dan/atau Program tingkat kabupaten/ kota. Validasi dilakukan untuk memastikan penjaminan kualitas telah dilaksanakan secara akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.

Ketentuan lebih rinci atau pedoman pelaksanaan selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Menteri. Pedoman pelaksanaan KLHS secara umum diatur pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan NO. P. 69/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis. Dalam pelaksanaan KLHS RPJMD diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Pembuatan Dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka panjang Daerah.

2.3. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)

2.3.1. Tinjauan Umum Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)

Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) ke 70 pada bulan September 2015 di New York, Amerika Serikat, menjadi titik sejarah baru dalam pembangunan global. Sebanyak 193 kepala negara dan pemerintahan dunia hadir untuk menyepakati agenda pembangunan universal baru yang tertuang dalam dokumen berjudul *Transforming Our World: the 2030 Agenda for Sustainable Development*—berisi 17 Tujuan dan 169 Sasaran yang berlaku mulai tahun 2016 hingga tahun 2030. Dokumen ini dikenal dengan istilah *Sustainable Development Goals* atau SDGs.

SDGs merupakan kelanjutan *Millennium Development Goals* (MDGs) yang disepakati oleh negara anggota PBB pada tahun 2000 dan berakhir pada akhir tahun 2015. Namun keduanya memiliki perbedaan yang mendasar, baik dari segi substansi maupun proses penyusunannya. MDGs yang disepakati lebih dari 15 tahun lalu hanya berisi 8 Tujuan, 21 Sasaran, dan 60 Indikator. Sasarannya hanya bertujuan mengurangi separuh dari tiap-tiap masalah pembangunan yang tertuang dalam tujuan dan sasaran.

MDGs memberikan tanggung jawab yang besar pada target capaian pembangunan bagi negara berkembang dan kurang berkembang, tanpa memberikan peran yang seimbang terhadap negara maju. Secara proses MDGs juga memiliki kelemahan karena penyusunan

hingga implementasinya eksklusif dan sangat birokratis tanpa melibatkan peran *stakeholder* non pemerintah, seperti *Civil Society Organization*, Universitas/Akademisi, sektor bisnis dan swasta, serta kelompok lainnya.

Berbeda dengan pendahulunya, SDGs mengakomodasi masalah-masalah pembangunan secara lebih komprehensif baik kualitatif (dengan mengakomodir isu pembangunan yang tidak ada dalam MDGs) maupun kuantitatif mentargetkan penyelesaian tuntas terhadap setiap tujuan dan sasarannya. SDGs juga bersifat universal memberikan peran yang seimbang kepada seluruh negara baik negara maju, negara berkembang, dan negara kurang berkembang untuk berkontribusi penuh terhadap pembangunan, sehingga masing-masing negara memiliki peran dan tanggung jawab yang sama antara satu dengan yang lain dalam mencapai SDGs.

Proses perumusan SDGs juga mengedepankan proses yang partisipatif. Terbukti sejak tahun 2013 Sekretaris Jenderal PBB memberikan ruang yang lebih luas kepada *stakeholder* non pemerintah untuk terlibat dalam proses penyusunan Agenda Pembangunan Pasca 2015. Yakni melalui diadakannya forum konsultasi antar *stakeholder* dan *my world survey*, yang merupakan survei yang dilaksanakan oleh PBB sebagai bahan masukan untuk penyusunan SDGs. *My world survey* adalah *global survey* bertujuan untuk menangkap pandangan dan aspirasi warga untuk menentukan agenda baru yang baik untuk dunia yang lebih baik. Hasil survei ini yang kemudian dijadikan salah satu pertimbangan untuk menentukan ke-17 tujuan yang ada di SDGs.

SDGs membawa 5 prinsip-prinsip mendasar yang menyeimbangkan dimensi ekonomi, sosial, dan lingkungan, yaitu 1) *People* (manusia), 2) *Planet* (bumi), 3) *Prosperity* (kemakmuran), 4) *Peace* (perdamaian), dan 5) *Partnership* (kerjasama). Kelima prinsip dasar ini dikenal dengan istilah 5 P dan menaungi 17 Tujuan dan 169 sasaran. Kepala negara dan pemerintahan yang menyepakati SDGs telah meneguhkan komitmen bersama untuk menghapuskan kemiskinan, menghilangkan kelaparan, memperbaiki kualitas kesehatan, meningkatkan pendidikan, dan mengurangi ketimpangan. Agenda pembangunan ini juga menjanjikan semangat bahwa tidak ada seorangpun yang akan ditinggalkan. Dijelaskan bahwa setiap orang dari semua golongan akan ikut melaksanakan dan merasakan manfaat SDGs, dengan memprioritaskan kelompok–kelompok yang paling termarginalkan.

SDGs tidak dirumuskan untuk berdiri sendiri. Terdapat kesepakatan–kesepakatan lain yang sejalan dan dapat menunjang agenda pembangunan berkelanjutan ini. Diantaranya terdapat (Sendai Framework, 2015) merupakan kesepakatan dari pertemuan Konferensi PBB

ketiga di Sendai, Jepang yang menyepakati soal penanganan kebencanaan hingga tahun 2030. Juga terdapat (Addis Ababa Action Agenda, 2015) yakni kesepakatan antara Kepala Negara dan Pemerintahan, serta Perwakilan dari berbagai Negara untuk mengatasi tantangan pembiayaan dan menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pembangunan berkelanjutan dalam semangat kemitraan dan solidaritas global. Satu kesepakatan lagi selain *Sustainable Development Goals* adalah *Paris Agreement*. *Paris Agreement* adalah konvensi atau kesepakatan berbagai pihak (Negara) yang tergabung dalam Konvensi PBB dalam hal perubahan iklim. Fokus kesepakatan ini adalah upaya bersama untuk mengatasi perubahan iklim yang jika terjadi di satu wilayah Negara akan memberikan dampak langsung maupun tidak langsung pada Negara lain.

2.3.2. Indikator TPB

Sidang umum PBB ke-70 menghasilkan *outcome document* SDGs. Diantara isi dari *outcome document* yakni 17 tujuan dan 169 sasaran, dan beberapa indikator yang kemudian memiliki mekanisme sendiri untuk dilengkapi. Penyusunan indikator dilakukan menurut masing-masing tujuan. Adalah *UN System Task Team on the Post-2015 Development Agenda* yang memberikan masukan substantif dan melakukan analisis sehingga menghasilkan *outcome document* yang memuat tujuan dan sasaran SDGs.

Guna mengukur hasil pembangunan yang ada dalam SDGs, dilakukan proses tindak lanjut dan pelaporan (*follow up and review*) dengan mendasarkan pada rangkaian indikator. Rangkaian indikator dipersiapkan baik pada level global, regional maupun nasional. Upaya mengidentifikasi kerangka indikator global untuk tujuan dan sasaran SDGs, Komisi Statistik PBB membentuk *Inter-Agency Expert Group (IAEG) on SDGs Indicators* pada bulan Maret 2015. Kelompok kerja ini bertujuan mempersiapkan usulan indikator global dan meta datanya sebagai pertimbangan untuk selanjutnya diajukan dalam Pertemuan Tahunan Komisi Statistik PBB yang dilaksanakan pada Maret 2016. Dalam proses penyusunannya, IAEG telah melakukan beberapa pertemuan dan konsultasi dengan berbagai pihak hingga akhirnya menghasilkan tepatnya 242 indikator global. Adapun jumlah target dan indikator global yang disetujui untuk tiap goal dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 2.1. Sasaran dan Indikator TPB/SDGs

	Goal 1	Goal 2	Goal 3	Goal 4	Goal 5	Goal 6	Goal 7	Goal 8	Goal 9	Goal 10	Goal 11	Goal 12	Goal 13	Goal 14	Goal 15	Goal 16	Goal 17	Jumlah
Sasaran	7	8	13	10	9	8	5	12	8	10	10	11	5	10	12	12	19	169
Indikator	12	14	2	11	14	11	6	17	12	11	15	13	7	10	14	2	2	173

TPB/SDGs merupakan komitmen global dan nasional dalam upaya untuk menyejahterakan masyarakat mencakup 17 tujuan, yaitu:

1. Mengakhiri segala bentuk kemiskinan di mana pun

Tujuan ini berbicara tentang meningkatkan pendapatan bagi penduduk miskin, menjamin akses terhadap pelayanan dasar dan melindungi seluruh masyarakat dari segala bentuk bencana.

2. Menghilangkan kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan gizi yang baik, serta meningkatkan pertanian berkelanjutan.

Tujuan ini berbicara tentang menjamin bahwa semua orang dapat menikmati makanan yang aman dan bernutrisi sepanjang tahun.

3. Menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan seluruh penduduk semua usia.

Tujuan ini berbicara tentang membantu masyarakat untuk hidup sehat dan panjang umur.

4. Menjamin kualitas pendidikan yang inklusif dan merata serta meningkatkan kesempatan belajar sepanjang hayat untuk semua.

Tujuan ini berbicara tentang memastikan pendidikan berkualitas yang layak dan inklusif serta mendorong kesempatan belajar seumur hidup bagi semua orang.

5. Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan kaum perempuan.

Tujuan ini berbicara tentang mengakhiri kekerasan dan diskriminasi terhadap perempuan dan memastikan mereka memiliki kesempatan yang sama dalam segala aspek kehidupan.

6. Menjamin ketersediaan serta pengelolaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua.

Tujuan ini berbicara tentang memastikan semua orang memiliki akses terhadap air bersih dan sanitasi.

7. Menjamin akses energi yang terjangkau, andal, berkelanjutan, dan modern untuk semua.

Tujuan ini berbicara tentang memastikan semua orang memiliki akses terhadap energi terbarukan.

8. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja yang produktif dan menyeluruh, serta pekerjaan yang layak untuk semua.

Tujuan ini berbicara tentang menciptakan pekerjaan yang layak dan peluang ekonomi bagi semua.

9. Membangun infrastruktur yang tangguh, meningkatkan industri inklusif dan berkelanjutan, serta mendorong inovasi.

Tujuan ini berbicara tentang memastikan keterpenuhan infrastruktur yang dibutuhkan oleh setiap orang agar dapat terhubung dengan seluruh dunia.

10. Mengurangi kesenjangan intra dan antarnegara.

Tujuan ini berbicara tentang mengurangi kesenjangan antara yang terkaya dan termiskin.

11. Menjadikan kota dan permukiman inklusif, aman, tangguh, dan berkelanjutan.

Tujuan ini adalah mengenai memposisikan kota-kota pada inti pembangunan berkelanjutan di tengah pesatnya urbanisasi.

12. Menjamin pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan.

Tujuan ini berbicara tentang mengurangi dampak lingkungan yang ditimbulkan terhadap Bumi melalui pola produksi dan konsumsi yang sewajarnya.

13. Mengambil tindakan cepat untuk mengatasi perubahan iklim dan dampaknya.

Tujuan ini berhubungan dengan cara menghadapi dampak dari pemanasan global

14. Melestarikan dan memanfaatkan secara berkelanjutan sumber daya kelautan dan samudera untuk pembangunan berkelanjutan.

Tujuan ini berhubungan dengan melindungi pantai dan lautan.

15. Melindungi, merestorasi, dan meningkatkan pemanfaatan berkelanjutan ekosistem daratan, mengelola hutan secara lestari, menghentikan penggurunan, memulihkan degradasi lahan, serta menghentikan kehilangan keanekaragaman hayati.

Tujuan ini berhubungan dengan melindungi sumber daya alam dan margasatwa.

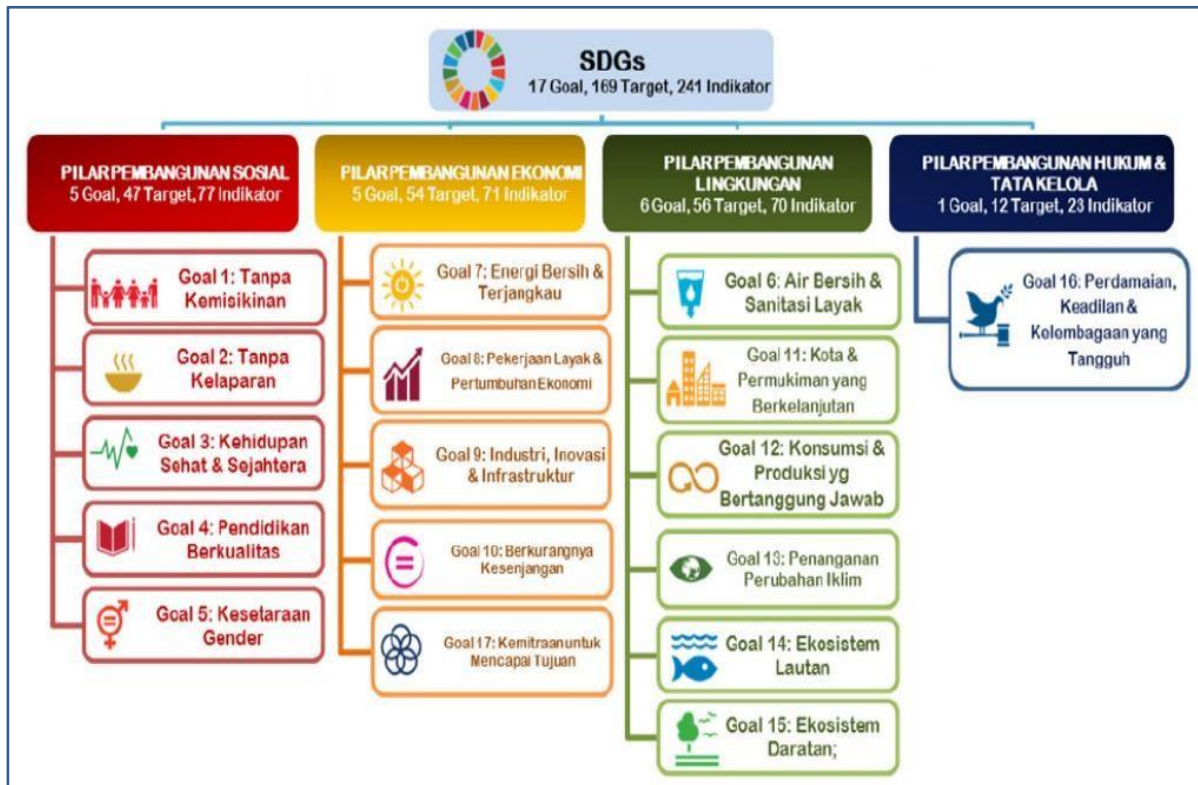
16. Memperkuat Masyarakat yang Inklusif dan Damai untuk Pembangunan Berkelanjutan, Menyediaan Akses Keadilan untuk Semua, dan Membangun Kelembagaan yang Efektif, Akuntabel, dan Inklusif di Semua Tingkatan

Tujuan ini berbicara tentang menjaga keamanan masyarakat dan, memastikan bahwa pemerintah bekerja secara adil dan efektif.

17. Memperkuat sarana pelaksanaan dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan.

Tujuan ini berbicara tentang bekerjasama pada tingkat global untuk mencapai SDGs dan mewujudkan Agenda Pasca 2015 yang telah disetujui.

17 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan tersebut mencerminkan 4 Pilar penting yang digambarkan sebagai berikut:



Gambar 2.1 Empat Pilar Tujuan Pembangunan berkelanjutan

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia adalah Pembangunan yang menjaga Keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat, Kualitas Lingkungan Hidup, Peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat dan Pembangunan yang menjamin keadilan dan terlaksananya Tata Kelola. Target dan Indikator dari Tujuan Pembangunan Berkelanjutan tersebut secara rinci dijelaskan dalam Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Pembuatan Dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka panjang Daerah, yang kemudian menjadi acuan dalam melakukan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Daerah dalam Penyusunan Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka panjang Daerah sesuai dengan kewenangan dan kemampuan daerah. Upaya pencapaian target TPB/SDGs menjadi prioritas pembangunan nasional, yang memerlukan sinergi kebijakan perencanaan di tingkat nasional dan di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.

Secara keseluruhan dokumen indikator dibagi menjadi tiga kategori tier: 1) Tier I merupakan kategori indikator yang secara konseptual sudah jelas, dengan metodologi dan standar yang telah tersedia dan data yang secara rutin dikeluarkan oleh negara; 2) Tier II merupakan kategori indikator yang secara konseptual sudah jelas, dengan memiliki metodologi dan standar namun negara tidak mengeluarkan data secara rutin; dan 3) Tier III, yang merupakan kategori indikator yang masih belum memiliki metodologi dan/atau standar atau masih dalam tahap penyusunan ataupun percobaan. Meskipun telah disetujui, indikator global ini masih memungkinkan mengalami perubahan terutama dalam pembahasan metodologis pada indikator global yang berada di Tier III. Hal tersebut dilakukan untuk memberikan kesepakatan atas definisi dan standar ditingkat internasional dalam pembahasan indikator global. Selain itu IAEG juga masih memiliki tugas untuk memberikan usulan mekanisme pelaporan kerangka indikator SDGs.

2.3.3. Forum Politik Tingkat Tinggi Terkait SDGs/TPB

Dokumen Agenda 2030 atau SDGs bukan lahir sebagai dokumen *legally binding*, sehingga negara-negara tidak memiliki kewajiban untuk memberikan pelaporan terhadap *progress* SDGs yang dilakukan ditingkat nasional, namun bukan berarti pelaksanaan SDGs lolos tanpa mekanisme pelaporan yang terstruktur dan transparan. *High Level Political Forum* (HLPF) dibentuk sebagai suatu forum terpadu yang difasilitasi oleh PBB dengan menghadirkan berbagai sektor stakeholder guna saling memantau *progress* masing-masing negara dalam pelaksanaan SDG sebagai salah satu mekanisme monitoring, tindak lanjut dan pelaporan di tingkat global.

HLPF sendiri merupakan forum lanjutan dari *Commission Sustainable Development* (CSD) yang dibentuk setelah Konferensi PBB tentang Lingkungan dan Pembangunan (UNCED) di tahun 1992. Sejak 24 September 2013, HLPF meneruskan tugas CSD dalam hal menindaklanjuti agenda internasional untuk pembangunan berkelanjutan, seperti yang termasuk dalam *Rio Declaration on Environment and Development and the Agenda 21* serta *Johannesburg Plan of Implementation* (JPOI). HLPF menggunakan mekanisme *national voluntary review* yang merupakan pelaporan negara secara sukarela. Setiap tahunnya tidak semua negara yang akan melaporkan perkembangan pelaksanaan SDGs. Seperti yang terjadi pada HLPF 2016 dimana ada sekitar 22 negara yang memberikan laporan global selama 8 hari. Banyak yang menilai bahwa waktu yang disediakan tidak cukup untuk menilai progres secara mendasar untuk keseluruhan 193 negara, 17 tujuan, 169 target dan 242 indikator.

Adapun pertemuan HLPF meliputi pertemuan tahunan yaitu ministerial Meeting yang dihadiri oleh *stakeholder* pemerintah dan non pemerintah yang diselenggarakan dibawah naungan Dewan Ekonomi dan Sosial PBB. Juga pertemuan empat tahunan yang merupakan pertemuan antar kepala Negara dinaungi Majelis Umum PBB. HLPF pertama setelah SDGs disepakati yang diselenggarakan pada bulan Juli 2016 mendorong penguatan komitmen politik negara dengan disepakatinya Deklarasi Menteri. HLPF menyimpulkan bahwa dibutuhkan pendekatan yang terintegrasi dalam implementasi SDGs dengan melibatkan semua *stakeholder*, baik pemerintah maupun non-pemerintah. HLPF juga menilai perlunya pemahaman baru untuk mereorientasikan kebutuhan ekonomi yang dapat mendorong pembangunan manusia, keberlanjutan bumi, dan mensejahterakan masyarakat. HLPF diselenggarakan pada bulan Juli di Markas Besar PBB di New York, Amerika Serikat, tahun ini mengangkat tema '*Ensuring that No One Left Behind*'. HLPF akan diselenggarakan setiap tahun untuk memastikan monitoring dan pelaporan implementasi SDGs di tingkat global. Misalnya untuk tahun 2017, HLPF dirancang dengan mengangkat tema '*Eradicating Poverty and Promoting Prosperity in a Changing World*'.

2.3.4. Dokumentasi Penting Terkait TPB/SDGs

Sejak penandatanganan *Transforming Our World: The 2030 Agenda for Sustainable Development* (September 2016) telah banyak dokumen yang diterbitkan baik oleh PBB, pemerintah, maupun actor lainnya. Dokumen-dokumen tersebut diantaranya:

1. Pada bulan Januari 2016 Sekretaris Jenderal PBB memberikan laporan berjudul *Critical Milestone Towards Coherent, Efficient and Inclusive Follow-Up and Review at the Global Level* sebagai dokumen persiapan HLPF 2016. Laporan ini disusun melalui konsultasi dengan negara-negara anggota PBB serta memberikan catatan penting terhadap tindak lanjut dan pelaporan yang koheren, efisien dan inklusif pada level global.
2. Pada bulan Februari 2016 *Inter-Agency Expert Group on SDGs Indicators* menyerahkan proposal *Global Indicators Framework* sebagai pertimbangan rancangan indikator global yang dibahas dalam *47th Session of the United Nations Statistical Commission* pada 8-11 Maret 2016 di New York.
3. Juni 2016 Laporan Sekjen PBB tentang perkembangan pelaksanaan SDGs ini berisi tentang ringkasan situasi global yang berkaitan dengan ketujuh belas Tujuan SDGs, merelasikan dengan indikator global yang telah disahkan melalui Komisi Statistik PBB.

Laporan ini merupakan sebuah langkah awal mempraktekkan pelaporan dengan indikator yang telah ada

4. Juli 2016 *Follow-up and Review of the 2010 Agenda for Sustainable Development at the Global Level* merupakan draft resolusi yang disusun oleh Presiden Sidang Umum sebagai tindak lanjut pengadopsian SDGs. *Global Sustainable Development Report 2016* adalah sebuah publikasi PBB sebagai dokumen HLPF 2016. GSDR merupakan publikasi tahunan untuk memperkuat sinergi antara politik dan ilmu pengetahuan serta dapat menyediakan instrumen *evidence-based* yang kuat untuk mendukung pembuat kebijakan dalam mendorong pengentasan kemiskinan dan pembangunan berkelanjutan.
5. Komisi Statistik PBB pada bulan Juli juga mengeluarkan *The Sustainable Development Goals Report 2016* merupakan laporan yang disusun oleh Divisi Statistik PBB, dibawah Departemen Ekonomi dan dan Sosial PBB (UN DESA). Laporan pertama ini merupakan langkah awal dan dimaksudkan sebagai baseline untuk memulai implementasi berdasarkan evaluasi yang akurat mengenai kondisi dunia saat ini. Laporan ini menyajikan ringkasan ketujuh belas Tujuan menggunakan data yang telah tersedia dengan menekankan pada *gaps* dan tantangan yang paling signifikan.

2.3.5. Pelaksanaan SDGs/TPB di Indonesia

SDGs merupakan inisiatif global yang bertujuan untuk menciptakan kehidupan manusia menjadi lebih baik dalam aspek sosial dan ekonomi serta dapat bersinergi dengan lingkungan. Pada penyusunannya, disadari penuh bahwa inisiatif global ini tidak dapat menampilkan adanya implementasi di tingkat regional dan nasional. SDGs di tingkat regional dan nasional pun perlu meneguhkan kembali semangat dan nilai SDGs yang inklusif dan partisipatif sebagaimana yang telah dibangun dalam SDGs tingkat global. Peran negara sangat krusial dalam memastikan bahwa pelaksanaan SDGs mendasarkan pada pendekatan dan strategi yang holistik antara pembangunan ekonomi, inklusi sosial, dan keberlanjutan lingkungan dengan tetap mengedepankan pada karakteristik dan prioritas tiap-tiap negara.

Belajar dari pengalaman MDGs sebelumnya, Indonesia kini berusaha menghindari keterlambatan pengimplementasian SDGs. Sebelumnya pelaksanaan MDGs di Inonesia mengalami keterlambatan sepuluh tahun dari pengesahannya di tahun 2000. Pemerintah Indonesia menjelaskan bahwa keterlambatan ini disebabkan karena Indonesia masih dalam pemulihan situasi ekonomi pasca krisis 1998.

Pemerintah telah menunjukkan keseriusan pelaksanaan SDGs yang tepat waktu, diawali dengan hadirnya Wakil Presiden Jusuf Kalla dalam Sidang Umum PBB untuk penandatanganan SDGs pada September 2015 lalu. Namun demikian, untuk mencapai 17 Tujuan dan 169 Sasaran SDGs pada tahun 2030 masih banyak hal lagi yang perlu dilakukan. Seperti mengharuskan utamakan SDGs dalam agenda pembangunan nasional; membuat pelaksanaan SDGs yang inklusif dan partisipatif baik di tingkat pusat maupun daerah; memastikan SDGs dilakukan dengan semangat transformatif.

Stakeholder lain juga terlihat sangat aktif berpartisipasi dan mendorong pemerintah untuk membuka ruang-ruang yang telah disediakan dalam proses SDGs global. Kelompok masyarakat sipil misalnya, yang telah bertemu dengan beberapa stakeholder kunci pemerintah untuk mendorong isu SDGs menjadi salah satu prioritas pembangunan nasional. Hal yang sama mulai dilakukan oleh stakeholder lainnya seperti sektor swasta dan bisnis serta kalangan akademisi.

Di Indonesia SDGs dipopulerkan dengan nama Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau disingkat dengan TPB (selanjutnya dalam paper ini akan tetap disebut SDGs, red). Pada bulan Desember 2015, Koalisi Masyarakat Sipil Indonesia untuk SDGs telah bertemu Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo. Dalam kesempatan tersebut, dalam kaitannya dengan implementasi SDGs di Indonesia, CSO menuntut tiga hal kepada Presiden yaitu; 1) menuntut pemerintah menyusun payung hukum untuk pelaksanaan SDGs; 2) menuntut pemerintah untuk menyusun Rencana Aksi Nasional bagi pelaksanaan SDGs; dan 3) menuntut pemerintah untuk membentuk panitia bersama bagi pelaksanaan SDGs.

Delapan belas tahun lalu, pada masa SDGs, kerangka hukum yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan di Indonesia adalah Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2010. Inpres ini memberikan haluan besar tentang pelaksanaan pembangunan yang berkeadilan untuk kesinambungan serta penajaman Prioritas Pembangunan Nasional yang ditujukan kepada beberapa kepala-kepala instansi dan lembaga pemerintah serta kepala daerah. Instruksi presiden yang bersifat himbuan individual dinilai kurang cukup kuat mengikat terhadap perencanaan di tingkat kementerian dan lembaga pemerintahan terkait untuk kewajiban melaksanakan MDGs serta kepala daerah tingkat II untuk mensukseskan pencapaian MDGs.

Sidang kabinet yang digelar pada akhir tahun 2015 lalu menghasilkan beberapa keputusan, diantaranya Presiden mengintruksikan menteri untuk segera menyiapkan draft dokumen kerangka hukum bagi pelaksanaan SDGs dalam bentuk Peraturan Presiden. Amanat

ini diembankan kepada Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional dengan berkoordinasi dengan Kepala Kantor Staff Presiden. Proses penyusunan kerangka hukum untuk SDGs ini telah dimulai sejak awal tahun 2016 dengan membuka partisipasi masyarakat melalui diskusi dan konsultasi yang dilakukan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, bersamaan dalam proses ini Koalisi Masyarakat Sipil untuk SDGs pun telah memberikan usulan Perpres di bawah koordinasi Kantor Staf Presiden. Perpres SDGs yang tengah disusun nantinya akan memuat dan menghasilkan beberapa keputusan diantaranya 1) Peta Jalan Nasional Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, yang merupakan dokumen rencana yang memuat kebijakan strategis tahapan dalam pencapaian Tujuan Pembangunan Nasional tahun 2016 hingga tahun 2030 yang sesuai dengan sasaran pembangunan nasional, yang akan berlaku maksimal 12 bulan sejak penetapan Perpres; 2) Rencana Aksi Nasional Tujuan Pembangunan Nasional, yang merupakan dokumen yang memuat program dan kegiatan rencana kerja lima tahunan untuk pelaksanaan berbagai kegiatan yang secara langsung dan tidak langsung mendukung pencapaian SDGs yang sesuai dengan sasaran pembangunan nasional, yang akan berlaku paling lama 6 bulan sejak penetapan Perpres; dan 3) Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, yang merupakan dokumen rencana kerja lima tahunan untuk pelaksanaan kegiatan yang secara langsung dan tidak langsung mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang sesuai dengan sasaran pembangunan daerah, yang akan berlaku paling lama 12 bulan sejak penetapan Perpres. Di luar muatan tentang strategi dan kerja yang akan dilaksanakan pemerintah dalam pencapaian SDGs.

Peraturan Presiden ini selain mengatur peran setiap Kementerian dan Lembaga dalam pelaksanaan SDGs juga mengatur peran tiap-tiap stakeholder non-pemerintah yang terlibat dalam pelaksanaan SDGs, seperti kelompok masyarakat sipil, akademisi, filantropi, dan pelaku usaha. Berkaitan dengan hal ini, presiden sekaligus mengatur pembentukan untuk pelaksanaan SDGs yang disebut Tim Koordinasi Nasional, yang akan terdiri dari Tim Pengarah, Tim Pelaksana, Kelompok-kelompok Kerja dan Dewan Pakar. Harapannya, stakeholder kunci yang terlibat dapat terwakili dalam tiap komponen Tim Koordinasi Nasional. Penyusunan indikator nasional untuk SDGs dilakukan dalam koordinasi terpusat oleh Bappenas bersama Badan Pusat Statistik sebagai penyedia data nasional. Hingga saat ini, proses penyusunan indikator nasional SDGs masih terus berjalan sehingga dapat diupayakan menjadi dokumen pendukung dalam Peraturan Presiden untuk Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Nasional. Penyusunan indikator nasional dilakukan dalam proses diskusi dan konsultasi publik dengan berbagai pihak,

diantaranya Kementerian/Lembaga terkait, kelompok masyarakat sipil, akademisi, filantropi, serta pelaku bisnis dan usaha.

2.4. Teori Perkembangan Wilayah

Suatu pembangunan membutuhkan strategi terkait dengan perubahan struktur ekonomi dan pranata sosial yang diupayakan menemukan solusi yang konsisten bagi persoalan yang dihadapi. Untuk itu dibutuhkan pendekatan terkait dengan isu-isu pembangunan. Melalui pendekatan tersebut, upaya-upaya yang ada dirumuskan dan diaplikasikan ke dalam kebijakan dan program pembangunan yang di dalamnya mempertimbangkan aspek wilayah dengan mengintegrasikan aspek sosial dan lingkungan menuju tercapainya suatu kesejahteraan yang optimal dan berkelanjutan.

Faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan wilayah antara lain dipengaruhi oleh aspek-aspek keputusan lokasional, terbentuknya sistem perkotaan, dan mekanisme aglomerasi. Istilah pertumbuhan wilayah dan perkembangan wilayah sesungguhnya tidak bermakna sama. Pertumbuhan dan perkembangan wilayah merupakan suatu proses kontinyu hasil dari berbagai pengambilan keputusan di dalam ataupun yang mempengaruhi suatu wilayah. Perkembangan wilayah senantiasa disertai oleh adanya perubahan struktural.

Wilayah tumbuh dan berkembang dapat didekati melalui teori sektor (*sector theory*) dan teori tahapan perkembangan (*development stages theory*). Teori sektor diadopsi dari Fisher dan Clark yang mengemukakan bahwa berkembangnya wilayah, atau perekonomian nasional, dihubungkan dengan transformasi struktur ekonomi dalam tiga sektor utama, yakni sektor primer (pertanian, kehutanan dan perikanan), serta sektor tersier (perdagangan, transportasi, keuangan dan jasa) (Jasman et al., 2023). Perkembangan ini ditandai oleh penggunaan sumber daya dan manfaatnya, yang menurun di sektor primer, meningkat di sektor tersier, dan meningkat hingga pada suatu tingkat tertentu di sektor sekunder. Sedangkan terkait dengan perkembangan, teori tahapan perkembangan (*the stages of economic growth*), dianggap lebih mengadopsi unsur spasial dan sekaligus menjembatani kelemahan teori sektor. Teori ini dikemukakan oleh para pakar seperti Rostow, Fisher, Hoover, Thompson dan lain- lain (John B. Parr, 2001).

Dalam banyak kepustakaan tentang pembangunan, terdapat beberapa pendekatan dan teori. Teori-teori pembangunan itu memuat berbagai pendekatan ilmu sosial, yang berusaha menangani masalah keterbelakangan. Sepanjang evolusinya, teori pembangunan menjadi semakin kompleks dan non-disipliner. Dengan demikian, tidak akan ada definisi baku dan final

mengenai pembangunan, yang ada hanyalah usulan mengenai apa yang seharusnya diimplikasikan oleh pembangunan dalam konteks tertentu, yaitu berdasarkan kepada kegiatan ekonomi dasar yang terjadi pada suatu wilayah.

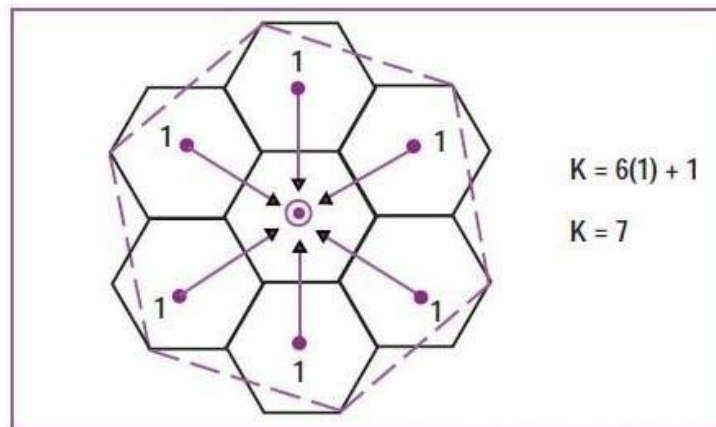
Arah pembangunan setiap kabupaten, harus mempedomani kebijakan pemerintah provinsi, demikian pula arah pembangunan provinsi harus berpedoman pada kebijakan yang ditentukan pemerintah pusat sebagai suatu kebijakan nasional, sebagaimana dituangkan dalam bentuk Rencana Kerja Pemerintah (RKP). Penanaman investasi tidak mungkin dilakukan pada setiap sektor di suatu wilayah secara merata, tetapi harus dilakukan pada sektor-sektor unggulan yang diharapkan dapat menarik kemajuan sektor lainnya. Sektor yang diunggulkan tersebut dinamakan sebagai *leading sektor*.

Sesungguhnya teori pembangunan terkait erat dengan strategi pembangunan, yakni perubahan struktur ekonomi dan pranata sosial yang diupayakan untuk menemukan solusi yang konsisten bagi persoalan yang dihadapi. Berbagai pendekatan menyangkut tema-tema kajian tentang pembangunan, satu diantaranya adalah mengenai isu pembangunan wilayah. Secara luas, pembangunan wilayah diartikan sebagai suatu upaya merumuskan dan mengaplikasikan kerangka teori ke dalam kebijakan ekonomi dan program pembangunan yang di dalamnya mempertimbangkan aspek wilayah dengan mengintegrasikan aspek sosial dan lingkungan menuju tercapainya kesejahteraan yang optimal dan berkelanjutan (Nugroho & Dahuri, 2004). Perencanaan pembangunan wilayah semakin relevan dalam mengimplementasikan kebijakan ekonomi dalam aspek kewilayahan.

Perkembangan pembangunan wilayah Kabupaten Nagan Raya sebagaimana pembangunan daerah-daerah di Indonesia pada umumnya terbentuk melalui pusat-pusat pertumbuhan yang didasarkan pada penerapan gabungan dari teori Christaller dan Perroux. Dalam pelaksanaannya, kegiatan pembangunan dipusatkan di wilayah-wilayah tertentu yang menurut hasil pengkajian para ahli diperkirakan sebagai kawasan sentral yang mampu menarik daerah-daerah di sekitarnya. Dari kawasan sentral sebagai pusat pertumbuhan ini, diharapkan proses pembangunan dan hasil-hasilnya akan menjalar ke seluruh wilayah yang kemudian tumbuh menjadi pusat pertumbuhan wilayah berupa kota dan mampu menciptakan pusat-pusat kesejahteraan rakyat dan masyarakat.

Salah satu cara untuk mengidentifikasi pusat-pusat pertumbuhan yaitu dengan menggunakan teori tempat sentral atau *Central Place Theory* (Christaller, 1933). Menurut Christaller, kota sentral merupakan pusat bagi daerah sekitarnya yang menjadi penghubung

perdagangan dengan wilayah lain. Selanjutnya, Christaller menyebutkannya sebagai tempat sentral karena tempat yang sentral tersebut tidaklah semata-mata hanya bergantung kepada aspek permukiman penduduk. Dalam teori ini digambarkan bahwa tempat sentral merupakan suatu titik simpul dari suatu bentuk heksagonal atau segi enam. Daerah segi enam ini merupakan wilayah-wilayah yang penduduknya mampu terlayani oleh tempat yang sentral tersebut. Tempat sentral dan daerah yang dipengaruhi (komplementer), pada Kabupaten Nagan Raya hirarki yang paling sesuai adalah hirarki 7 ($K=7$). Dimana pertumbuhan dan perkembangan wilayah Kabupaten Nagan Raya selain mempengaruhi wilayahnya sendiri, juga mempengaruhi seluruh bagian (satu bagian) masing-masing wilayah tetangganya. Wilayah ini disebut juga situasi administratif yang optimum. Situasi administratif yang dimaksud dapat berupa kota pusat pemerintahan. Pengaruh tempat yang sentral dapat diukur berdasarkan hirarki tertentu, dan bergantung pada luasan heksagonal yang dilingkupinya.



Gambar 2.2. Hirarki Pendekatan geografi dan analisis keruangan hirarki 7 dari Christaller

2.5. Perkembangan Wilayah Kabupaten Nagan Raya

Kabupaten Nagan Raya merupakan salah satu Kabupaten dari 23 Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh. Kabupaten yang beribukota Suka Makmue ini dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2002, tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Kabupaten Nagan Raya merupakan kabupaten baru sebagai hasil pemekaran Kabupaten Aceh Barat. Saat ini, secara administratif Kabupaten Nagan Raya dibagi menjadi 10 (sepuluh) kecamatan, 30 (tiga puluh) kemukiman dan 222 (dua ratus dua puluh dua) desa/gampong.



PEMERINTAH KABUPATEN NAGAN RAYA

KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS (KLHS)

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD)

Perkembangan Kabupaten Nagan Raya tidak terlepas dari kondisi geografisnya yang umumnya terletak berbatasan langsung dengan laut dan pegunungan. Melihat letak geografis ini, maka sangat wajar jika kemudian berkembang masyarakat dan peradaban di daerah ini. Sebagaimana perkembangan masyarakat dan peradaban lainnya, perkembangan kehidupan manusia tidak pernah jauh dari laut dan gunung, sehingga pengembangan masyarakat pun terarah pada potensi alam bidang pertanian, perkebunan, perikanan, tambang, kelautan dan pariwisata.

Kabupaten Nagan Raya dengan jumlah penduduk sampai akhir tahun 2021 sebesar 170.591 jiwa memiliki aneka potensi yang berlimpah dalam berbagai sektor sebagaimana yang telah disebutkan di atas. Tanaman pangan merupakan salah satu sub sektor penyuplai pangan dari luas panen masing-masing padi sawah pada tahun Tahun 2012, areal lahan yang ditanami padi sebesar 17.348 Ha. Luas lahan tanam padi tersebut meningkat drastis menjadi 25.969,4 Ha tahun 2015. Akhir tahun 2016, lahan sawah yang ditanami padi bertambah menjadi 34.527,1 Ha. Sementara produksi sayuran di Kabupaten Nagan Raya antara lain 224 Ha cabai, 110 Ha ketimun, 118 Ha kangkung, 123 Ha terung, 136 Ha kacang panjang, 122 Ha bayam dan 68 Ha tomat. Sektor perkebunan yang berkembang adalah kelapa sawit dengan luas tanam mencapai 52.228 Ha, dengan total produksi pada tahun 2021 sebanyak 98.620 ton. Sektor peternakan tertuju pada pengembangan sapi potong mencapai 12.816 ekor dan ternak kambing yaitu 15.473 ekor. Sistem peternakan di daerah ini masih tradisional. Sektor kelautan dan perikanan juga merupakan sektor andalan di Nagan Raya karena letak daratan umumnya langsung berbatasan dengan laut dan merupakan salah satu daerah tangkapan ikan (*fishing ground*). Produksi perikanan tangkap dalam berbagai spesies pada tahun 2021 adalah perikanan tangkap laut sebesar 549.760 kg, ikan Nila/Tilapia 754.400 kg, Ikan Lele 149 kg, Ikan Mas 189.900 kg (BPS Kabupaten Nagan Raya, 2023).



BAB III

KONDISI UMUM DAERAH

3.1. Sejarah Kabupaten Nagan Raya

Secara historis, Kabupaten Nagan Raya dulunya berada di bawah kekuasaan Kesultanan Aceh. Kerajaan tersebut dibangun pada abad ke-16 atas prakarsa Sultan Saidil Mukammil kemudian dilanjutkan oleh Sultan Iskandar Muda menurut laman resmi Pemkab Aceh Barat. Seiring dengan datangnya kolonial Belanda, Aceh menjadi salah satu wilayah yang keras dalam perlawanan terhadap penjajahan. Perang Aceh melawan Belanda berlangsung dari akhir abad ke-19 hingga awal abad ke-20. Setelah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia, berdasarkan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1956 tentang pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam lingkungan Provinsi Sumatera Utara, wilayah Aceh Barat dimekarkan menjadi 2 (dua) Kabupaten, yaitu Kabupaten Aceh Barat dan Kabupaten Aceh Selatan.

Kabupaten Nagan Raya dengan ibukota Suka Makmue yang berjarak sekitar 287 km atau 6 jam perjalanan dari Kota Banda Aceh (ibukota Provinsi Aceh). Kabupaten ini dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179). Kabupaten Nagan Raya merupakan kabupaten baru sebagai hasil pemekaran Kabupaten Aceh Barat, sejak tanggal 2 Juli 2002.

3.2. Kondisi Geografis

Kabupaten Nagan Raya secara administratif dibagi menjadi 10 (sepuluh) kecamatan, 30 (tiga puluh) kemukiman dan 222 (dua ratus dua puluh dua) desa/gampong. Wilayah administrasi kecamatan di lingkup Kabupaten Nagan Raya adalah: Darul Makmur, Kuala, Kuala Pesisir, Tadu Raya, Beutong, Seunagan, Suka Makmue, Seunagan Timur, Beutong Ateuh Banggalang dan Tripa Makmur. Wilayah kecamatan yang terluas adalah Kecamatan Darul Makmur dengan luas wilayah 102,79 ha atau 29,06% dari luas wilayah Kabupaten Nagan Raya,



PEMERINTAH KABUPATEN NAGAN RAYA
KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS (KLHS)
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD)

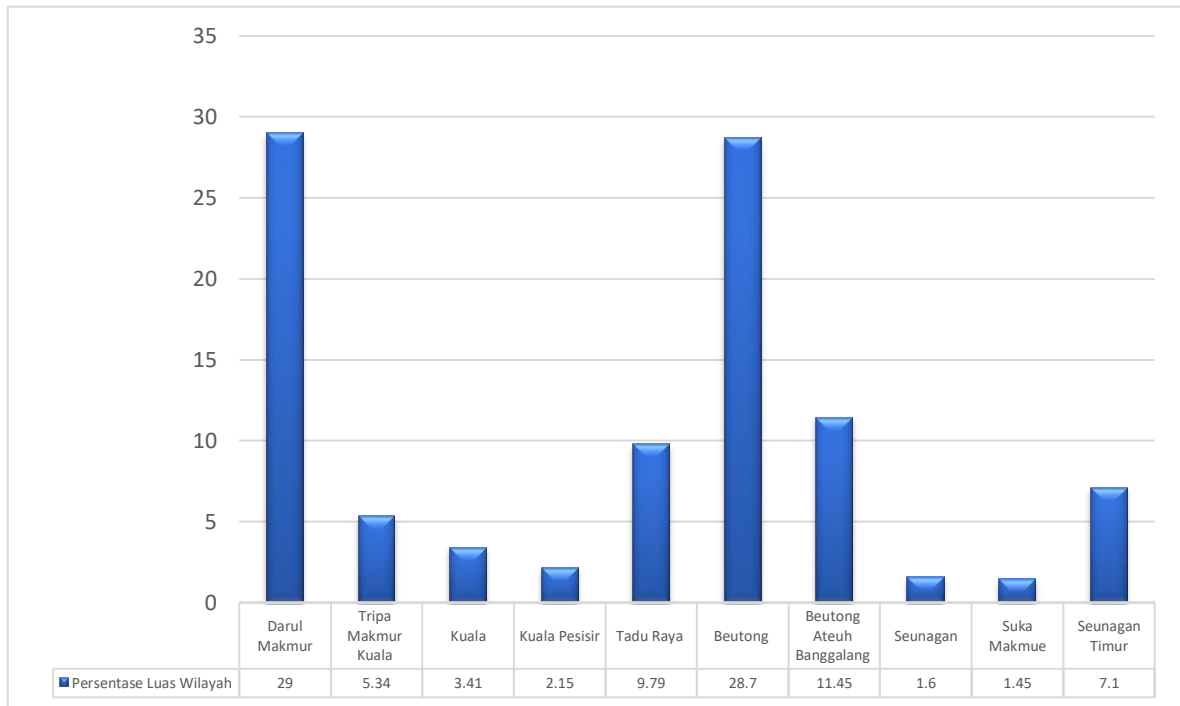
serta wilayah yang terkecil adalah Kecamatan Suka Makmue sebesar 51,56 ha atau 1,45% dari luas wilayah Kabupaten Nagan Raya.

Secara rinci luas wilayah setiap kecamatan dan jumlah desa/gampong di Kabupaten Nagan Raya tersaji pada Tabel berikut.

Tabel 3.1. Luas Wilayah Administrasi Menurut Kecamatan di Kabupaten Nagan Raya

No	Kecamatan	Ibu Kota	Luas Wilayah (ha)	Persentase Luas Wilayah
1	Darul Makmur	Alue Bilie	102,79	29.00
2	Tripa Makmur	Kabu	189,41	5.34
3	Kuala	Ujong Fatihah	120,89	3.41
4	Kuala Pesisir	Padang Rubek	76,34	2.15
5	Tadu Raya	Alue Bata	347,19	9.79
6	Beutong	Keude Seumot	1 017,32	28.70
7	Beutong Ateuh Benggalang	Kuta Teungoh	405,92	11.45
8	Seunagan	Jeuram	56,73	1.60
9	Suka Makmue	Lueng Baro	51,56	1.45
10	Seunagan Timur	Keude Linteung	251,61	7.10
Nagan Raya		Suka Makmue	3 544,90	100.00

Sumber: BPS Kabupaten Nagan Raya, 2023



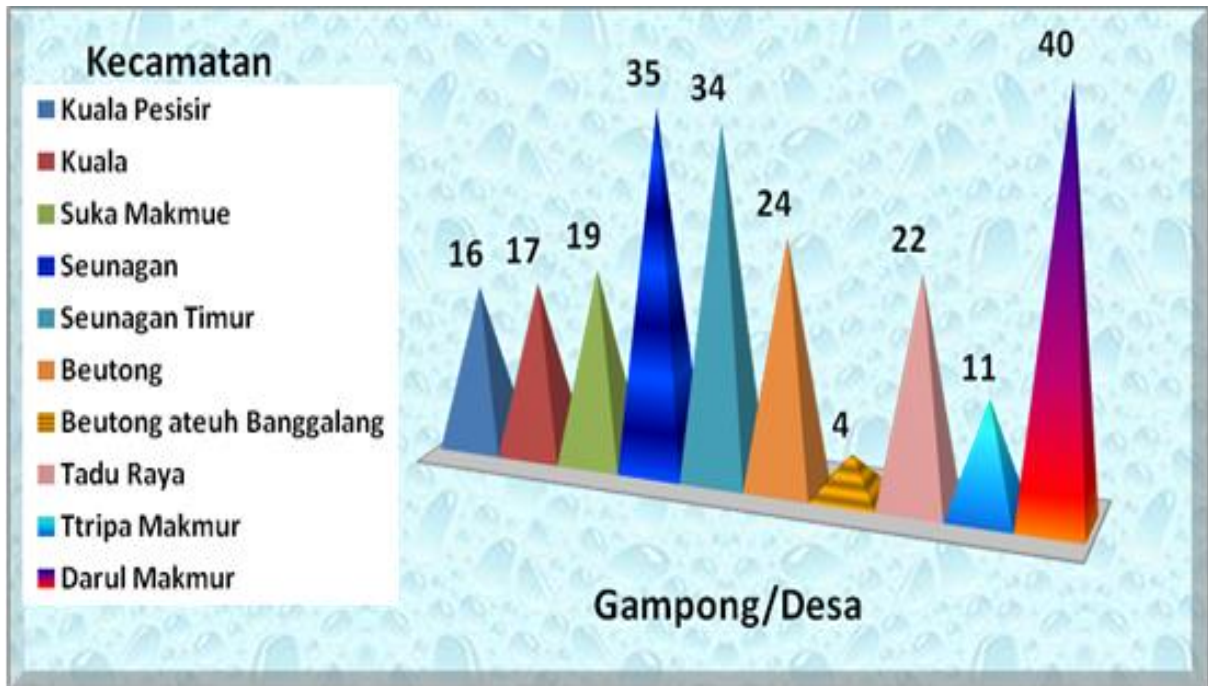
Sumber : PUPR Kabupaten Nagan Raya (RTRW Kabupaten Nagan Raya Tahun 2015-2035)

Gambar 3.1. Persentase Luas Wilayah Kabupaten Nagan Raya Menurut Kecamatan

Tabel 3.2. Jumlah Desa/Gampong dan Kemukiman Menurut Kecamatan di Kabupaten Nagan Raya

No	Kecamatan	Kemukiman	Gampong/Desa
1	Kuala Pesisir	3	16
2	Darul Makmur	5	40
3	Tripa Makmur	2	11
4	Kuala	2	17
5	Tadu Raya	2	22
6	Beutong	4	24
7	Beutong ateuh Banggalang	1	4
8	Seunagan	5	35
9	Suka Makmue	2	19
10	Seunagan Timur	4	34
Jumlah Total		30	222

Sumber: PUPR Kabupaten Nagan Raya (RTRW Kabupaten Nagan Raya Tahun 2015-2035)



Sumber: PUPR Kabupaten Nagan Raya (RTRW Kabupaten Nagan Raya Tahun 2015-2035)

Gambar 3.2. Jumlah Desa/Gampong Menurut Kecamatan di Kabupaten Nagan Raya

Dari 10 (sepuluh) wilayah administrasi kecamatan jumlah gampong terbanyak berada di Kecamatan Darul Makmur yaitu sebanyak 40 (empat puluh) gampong dan paling sedikit berada di Kecamatan Beutong Ateuh Banggalang yaitu sebanyak 4 (empat) gampong.

3.2.1. Luas dan Batas Administrasi

Secara astronomis Kabupaten Nagan Raya terletak pada lokasi 03° 43' 50" – 04° 37' 55" Lintang Utara (LU) dan 96° 11' 23" – 96° 47' 58" Bujur Timur (BT) dan memiliki luas wilayah 3.544,90 Km² atau 354.490 Ha atau sebesar 6,25 % dari luas Provinsi Aceh. Batas-batas wilayah administratif Kabupaten Nagan Raya sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Aceh Tengah dan Kabupaten Aceh Barat;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Aceh Barat;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Aceh Barat Daya dan Samudera Indonesia;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Aceh Tengah, Kabupaten Gayo Lues, dan Kabupaten Aceh Barat Daya.



besar terhadap pengembangan sektor pertanian dan perkebunan serta jenis tanaman yang cocok dikembangkan.

Jenis tanah tersebut pada umumnya relatif subur dan pada tanah tersebut sesuai untuk pengembangan pertanian dan perkebunan. Beberapa jenis tanah yang mempunyai sifat yang mempunyai resiko erosi yang tinggi dan mempunyai kedalaman efektif yang dangkal sehingga perlu dilindungi.

3.2.2. Topografi

Wilayah Kabupaten Nagan Raya memiliki Kemiringan lereng bervariasi antara 0–8% sampai dengan lebih dari 40% serta ketinggian antara 0 – 2775 meter di atas permukaan laut (mdpl), dengan ketinggian wilayah pemukiman 0 - 600 mdpl. Berdasarkan ketinggian, Kabupaten Nagan Raya dapat dikelompokkan sebagai berikut:

1. Wilayah dengan ketinggian 0-25 m dpl, tersebar dengan luas ± 64.636 Ha atau 65,31% dari luas wilayah Kabupaten Nagan Raya.
2. Wilayah dengan ketinggian 25-50 m dpl, tersebar dengan luas $\pm 1.525,20$ Ha atau 10,65% dari luas wilayah Kabupaten Nagan Raya. Wilayah dengan ketinggian 50-100 m dpl, tersebar dengan luas $\pm 10.196,40$ Ha atau 10,30% dari luas wilayah Kabupaten Nagan Raya.
3. Wilayah dengan ketinggian 100-200 m dpl, tersebar dengan luas ± 61.150 Ha atau 6,21% dari luas wilayah Kabupaten Nagan Raya.
4. Wilayah dengan ketinggian 200-300 m dpl, tersebar dengan luas $\pm 4.275,55$ Ha atau 4,32% dari luas wilayah Kabupaten Nagan Raya.
5. Wilayah dengan ketinggian 300 m dpl, tersebar dengan luas $\pm 2.180,20$ Ha atau 2,20% dari luas wilayah Kabupaten Nagan Raya.

3.2.3. Geologi

Kabupaten Nagan Raya terletak pada bagian Selatan dari Pegunungan Bukit Barisan (*Sumatran Volcanic Arc*) sampai kelautan Samudera Hindia. Daratan ini terbentuk akibat pertemuan Lempeng Indo-Australia dengan Lempeng Daratan Sunda sebagai bagian dari Lempeng Benua Asia-Eurasia. Zona Benioff sepanjang tepi dari Lempeng Sunda membentuk Cekungan/Paritan Sunda (*Sunda Trench*) sepanjang pantai Barat Sumatera. Generasi magma berasosiasi dengan hasil tumbukan tersebut, menyebabkan terbentuknya tinggian (*Sumatran*



PEMERINTAH KABUPATEN NAGAN RAYA
KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS (KLHS)
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD)

Volcanic Arc) berarah Barat Laut – Tenggara berumur Tersier sampai Sekarang yang mempengaruhi geologi pulau Sumatera. Pertemuan dua lempeng tersebut menyebabkan juga adanya tekanan miring (*oblique*) yang mengakibatkan pensesaran mendatar kekanan (*dextral parallel fault*) disebut sebagai Sistem Sesar Sumatra (Sumatra Fault System/SFS) yang memanjang sepanjang Pulau Sumatra sejajar dengan Pegunungan Barisan.

Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa struktur geologi daerah ini sangat dipengaruhi oleh sistem sesar sumatera (Sumatera Fault Sistem) yang berarah Barat Laut-Tenggara, yang menjadi salah satu penyebab utama terbentuknya struktur geologi. Berdasarkan hasil analisis peta geologi dan ditemukannya gejala-gejala geologi, diantaranya berupa Aluvium Muda, Anggota Batu gamping Reuengeuet dan Formasi Bale. Untuk lebih jelasnya mengenai detil geologis Kabupaten Nagan Raya dapat dilihat pada Tabel 3.3.

Tabel 3.3. Geologi Di Kabupaten Nagan Raya

No	Jenis Geologi	Hektar	Persentase
1	Aluvium Muda	30,066.66	8.47
2	Anggota Batugamping Reueng eu et	114.62	0.03
3	Batugamping Tak Terpisahkan	3,371.77	0.95
4	Formasi Bale	8,080.08	2.28
5	Formasi Batugamping Si Toptop	1,433.66	0.40
6	Formasi Geumpang	7,692.79	2.17
7	Formasi Gume	1,266.11	0.36
8	Formasi Gunung Api si Api	11,991.66	3.38
9	Formasi Kiema	843.33	0.24
10	Formasi Loser	1,154.72	0.33
11	Formasi Maonai	852.31	0.24
12	Formasi Meurah Buya	1,125.06	0.32
13	Formasi Penarum	4,474.72	1.26
14	Formasi Simellit	3.29	0.00
15	Formasi Tutut	98.94	0.03
16	Gabro Jamur Pisang	89.70	0.03
17	Granodiorit Tak Bernama	1,785.11	0.50
18	Intrusi Bas	233.84	0.07
19	Kelompok Woyla Tak Terpisahkan	80,517.12	20.70
20	Komplek Seumayam	842.19	0.24
21	Komplek Ultramafik Beatang	4,897.03	1.38
22	Meulaboh Formation	119,116.97	33.58
23	Pusat Gunung Api Telago	1,745.47	0.49
24	Serpentinit	1,583.75	0.45
25	Taloeng On-Calang	71,394.99	20.12



PEMERINTAH KABUPATEN NAGAN RAYA
KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS (KLHS)
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD)

No	Jenis Geologi	Hektar	Persentase
Total		354,775.90	100.00

Sumber: PUPR Kabupaten Nagan Raya (RTRW Kabupaten Nagan Raya Tahun 2015-2035)

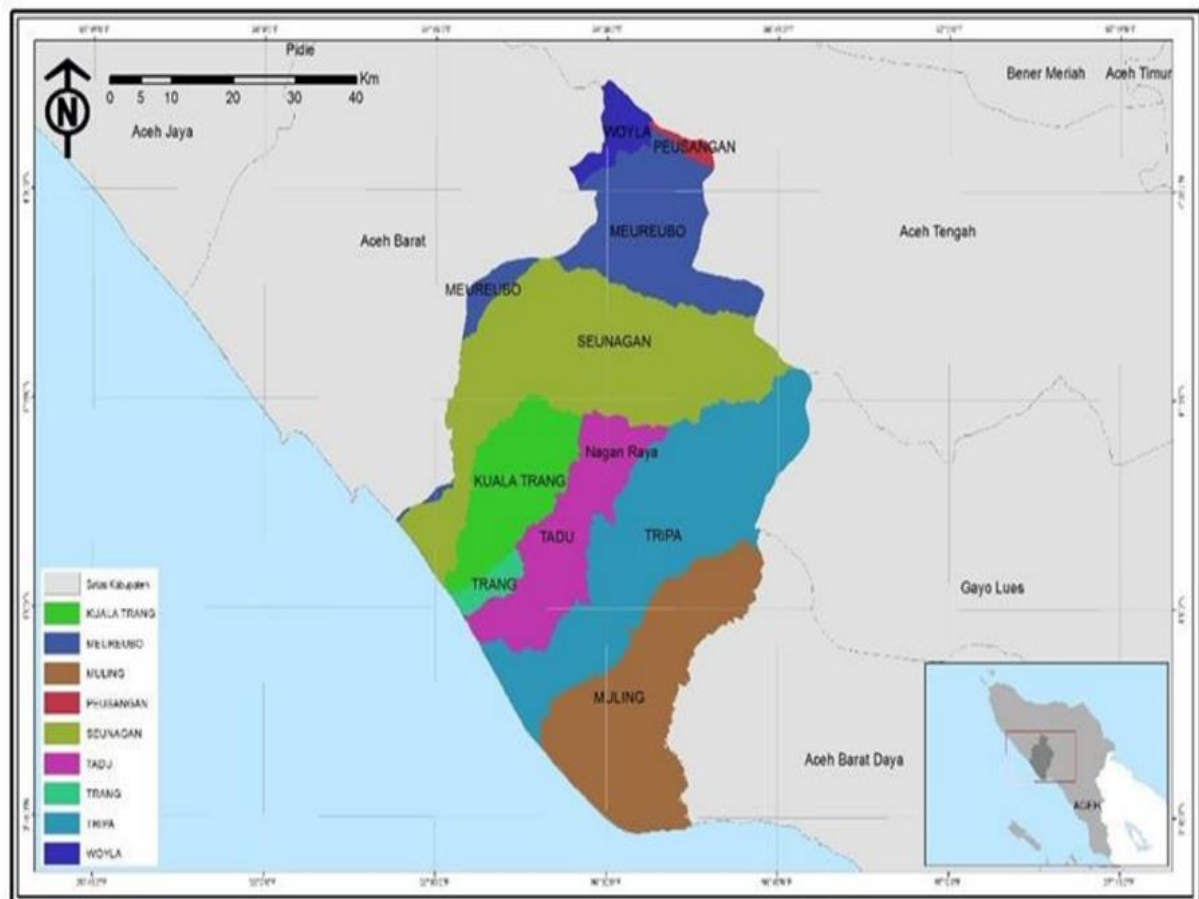
3.2.4. Hidrologi

Hidrologi adalah cabang ilmu Geografi yang mempelajari pergerakan, distribusi, dan kualitas air di seluruh Bumi, termasuk siklus hidrologi dan sumber daya air. Air merupakan salah satu kebutuhan pokok bagi setiap elemen kehidupan yang berada di muka bumi dan sangat berperan besar bagi semua makhluk hidup. Tidak hanya berperan besar bagi manusia, tetapi juga bagi para binatang, dan bahkan bagi hutan yang berisi berbagai macam pepohonan dan tumbuhan yang juga membutuhkan air untuk kelangsungan hidup seperti minum, melakukan proses fotosintesis dan banyak kepentingan lainnya. Hidrologi Kabupaten Nagan Raya dapat dilihat pada tabel 3.4 dan gambar 3.4.

Tabel 3.4. Hidrologi Kabupaten Nagan Raya

No	Nama DAS	Luas (Ha)	Persentase
1	Kuala Trang	29,639.53	8.35
2	Meureubo	44,843.76	12.64
3	Muling	59,628.67	16.81
4	Peusangan	1,894.05	0.53
5	Seunagan	91,956.31	25.92
6	Tadu	34,907.12	9.84
7	Trang	4,277.62	1.21
8	Tripa	80,398.99	22.66
9	Woyla	7,229.84	2.04
Jumlah		354,775.90	100

Sumber: PUPR Kabupaten Nagan Raya (RTRW Kabupaten Nagan Raya Tahun 2015-2035)



Sumber: PUPR Kabupaten Nagan Raya (RTRW Kabupaten Nagan Raya Tahun 2015-2035)

Gambar 3.4. Peta Hidrologi Kabupaten Nagan Raya

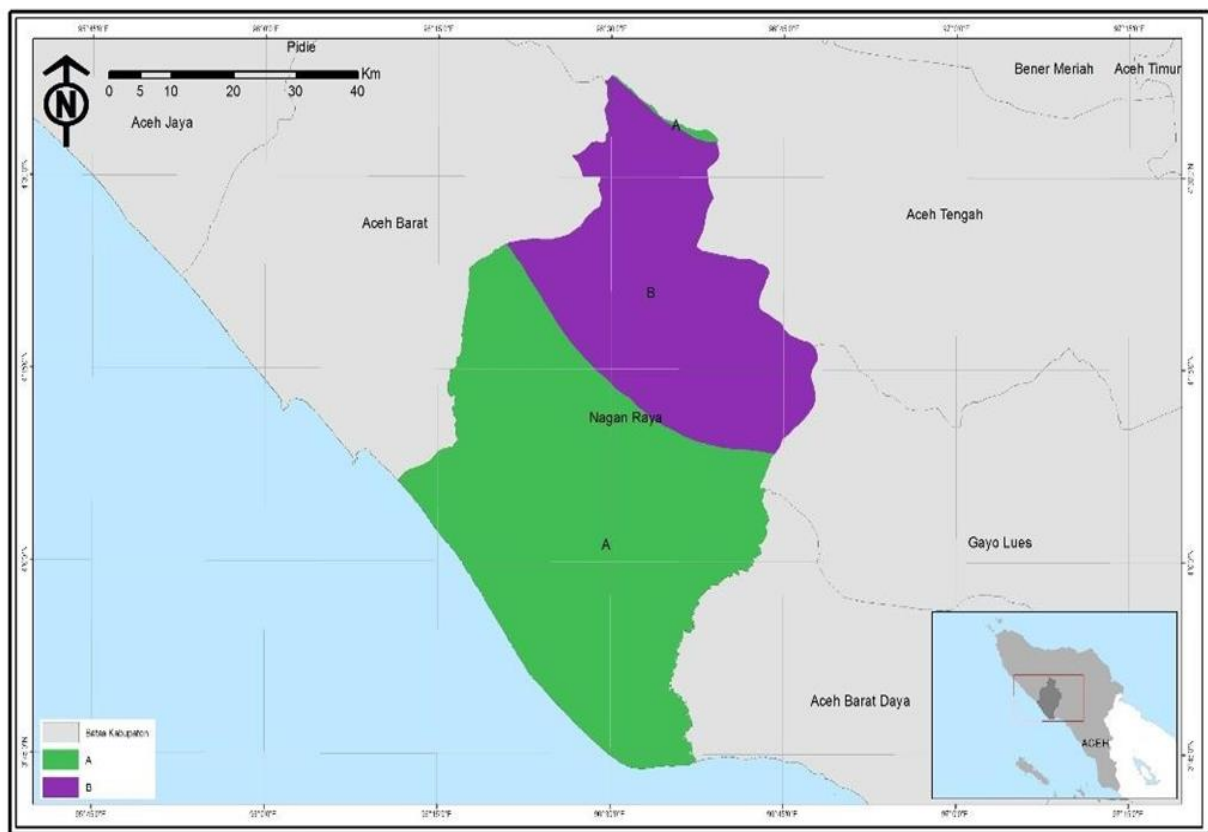
3.2.5. Klimatologi

Secara umum iklim di Indonesia dipengaruhi iklim tropis yang memiliki 2 musim yaitu musim kemarau dan musim hujan. Musim kemarau biasanya terjadi pada bulan Januari sampai dengan Juli, dan musim hujan berlangsung dari bulan Agustus sampai bulan Desember. Kabupaten Nagan Raya terletak didaerah khatulistiwa, dimana sinar matahari hampir selalu penuh, sehingga wilayah ini termasuk dalam iklim tropis (panas). Kabupaten Nagan Raya merupakan daerah yang beriklim tropis, tergolong ke dalam tipe iklim A dan B menurut Schmidt Ferguson.

Tabel 3.5. Klimatologi di Kabupaten Nagan Raya

No	Tipe Iklim	Luas (Ha)	Persentase
1	A	223,837.69	63.09
2	B	130,938.21	36.91
Jumlah		354,775.90	100

Sumber: PUPR Kabupaten Nagan Raya (RTRW Kabupaten Nagan Raya Tahun 2015-2035)



Sumber: PUPR Kabupaten Nagan Raya (RTRW Kabupaten Nagan Raya Tahun 2015-2035)

Gambar 3.5. Peta Klimatologi Kabupaten Nagan Raya

Ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi iklim suatu daerah, yaitu: temperatur udara, kelembaban udara, penyinaran matahari dan kecepatan angin. Faktor iklim ini menjadi salah satu pertimbangan pengambil kebijakan dalam membuat perencanaan, terutama pembangunan dalam bidang pertanian. Berdasarkan data faktor-faktor iklim yang telah disebutkan diatas, maka dilakukan analisis untuk membuat zonasi iklim wilayah tersebut.



Pembagian zona iklim ini mencerminkan kondisi dan frekuensi curah hujan yang terjadi di wilayah tersebut.

Kriteria zona iklim menurut Schmidt-Ferguson digolongkan dalam 9 zona, mulai dari tipe A hingga H, dengan dasar perhitungan nilai Q. Nilai Q adalah perhitungan jumlah bulan basah dan jumlah bulan kering yang diperoleh di wilayah studi per tahunnya. Persyaratan minimal untuk menentukan tipe iklim berdasarkan Schmidt-Ferguson adalah adanya data curah hujan yang terekam dalam 13 (tiga belas tahun) secara berturut-turut.

Jumlah curah hujan bulanan pada tahun 2022 berkisar 141,5 – 420,4 mm, dengan tingkat curah hujan tertinggi terjadi pada bulan Juni yang mencapai 420,4 mm, tingkat curah hujan terendah terjadi pada bulan April mencapai 141,5 mm. Kabupaten Nagan Raya memiliki suhu rata-rata, dimana pada bulan april dan bulan mei merupakan bulan terpanas dengan suhu mencapai 27,5 °C, dan bulan oktober adalah bulan dengan suhu terendah yaitu 26,2 °C. Rata-rata Keadaan kelembaban udara terbasah di Kabupaten Nagan Raya 91,4 % pada bulan November dan terkering 87,4 % terjadi pada bulan februari. Sedangkan nilai rata-rata Kecepatan angin tertinggi di Kabupaten Nagan Raya terjadi pada bulan maret yaitu 3,2 dan terendah terjadi pada bulan januari dan oktober yaitu 2,6. Untuk lebih jelasnya data-data tersebut dapat di lihat pada tabel 3.6, 3.7 dan tabel 3.8

Tabel 3.6. Jumlah Curah Hujan dan Hari Hujan dan Penyinaran Matahari Menurut Bulan di Kabupaten Nagan Raya Tahun 2022

Bulan Month	Jumlah Curah Hujan Number of Precipitation (mm)	Jumlah Hari Hujan (hari) Number of Rainy Days (day)	Penyinaran Matahari Duration of Sunshine (%)
(1)	(14)	(15)	(16)
Januari/January	221,14	25,0	7
Februari/February	151,2	25,0	6
Maret/March	378,0	28,0	5
April/April	141,5	29,0	7
Mei/May	246,1	28,0	5
Juni/June	420,4	27,0	5



PEMERINTAH KABUPATEN NAGAN RAYA
KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS (KLHS)
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD)

Bulan Month	Jumlah Curah Hujan Number of Precipitation (mm)	Jumlah Hari Hujan (hari) Number of Rainy Days (day)	Penyinaran Matahari Duration of Sunshine (%)
(1)	(14)	(15)	(16)
Juli/July	243,8	28,0	5
Agustus/August	408,1	29,0	4
September/September	374,5	30,0	5
Oktober/October	391,0	30,0	3
November/November	336,1	27,0	4
Desember/December	392,1	20,0	4

Sumber: BPS Kabupaten Nagan Raya, 2023

Tabel 3.7. Rata-rata Suhu dan Kelembaban Udara Menurut Bulan di Kabupaten Nagan Raya Tahun 2022

Bulan Month	Suhu/Temperature (°C)			Kelembaban/Humadity (%)		
	Minimum	Rata-rata Average	Maksimum Maximum	Minimum	Rata-rata Average	Maksimum Maximum
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Januari/January	21,9	27,4	33,6	69,0	88,3	98,0
Februari/February	21,5	27,0	33,0	66,0	87,4	99,0
Maret/March	22,0	27,2	32,6	64,0	88,3	99,0
April/April	20,2	27,5	33,0	67,0	88,0	98,0
Mei/May	22,0	27,5	33,6	68,0	89,2	100,0
Juni/June	21,6	26,6	32,6	71,0	89,5	98,0
Juli/July	21,4	27,0	33,9	66,0	88,9	98,0
Agustus/August	21,0	26,5	33,3	63,0	89,2	100,0
September/September	21,6	26,5	32,8	71,0	88,9	100,0
Oktober/October	21,8	26,2	32,6	71,0	90,7	99,0
November/November	22,0	26,3	32,0	75,0	91,4	100,0
Desember/December	21,7	26,5	32,2	75,0	90,9	98,0

Sumber: BPS Kabupaten Nagan Raya, 2023



Tabel 3.8. Rata-Rata Kecepatan Angin dan Tekanan Udara Menurut Bulan Di Kabupaten Nagan Raya Tahun 2022

Bulan <i>Month</i>	Kecepatan Angin (m/det) <i>Wind Velocity (m/sec)</i>			Tekanan Udara/ <i>Atmospheric Pressure</i> (mbar)		
	Minimum	Rata-rata <i>Average</i>	Maksimum <i>Maximum</i>	Minimum	Rata-rata <i>Average</i>	Maksimum <i>Maximum</i>
(1)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Januari/ <i>January</i>	0,0	2,6	9,0	1005,7	1009,8	1014,4
Februari/ <i>February</i>	0,0	3,0	20,0	1002,2	1008,8	1014,5
Maret/ <i>March</i>	0,0	3,2	14,0	1001,1	1008,8	1013,4
April/ <i>April</i>	0,0	2,8	13,0	1004,1	1009,0	1014,1
Mei/ <i>May</i>	0,0	2,8	13,0	1003,6	1008,8	1014,7
Juni/ <i>June</i>	0,0	2,9	13,0	1005,7	1009,4	1013,2
Juli/ <i>July</i>	0,0	3,0	18,0	1004,6	1008,6	1012,5
Agustus/ <i>August</i>	0,0	2,8	13,0	1005,6	1009,4	1013,2
September/ <i>September</i>	0,0	2,9	13,0	1006,8	1010,6	1014,7
Oktober/ <i>October</i>	0,0	2,6	13,0	1005,8	1010,6	1015,6
November/ <i>November</i>	0,0	2,7	12,0	1005,7	1009,8	1014,2
Desember/ <i>December</i>	0,0	3,0	14,0	1003,1	1009,0	1015,6

Sumber: BPS Kabupaten Nagan Raya, 2023

3.2.6. Penggunaan Lahan

Penggunaan lahan merupakan kenampakan biofisik di permukaan bumi yang dipengaruhi oleh aktivitas manusia, sedangkan tutupan lahan merupakan kenampakan eksisting biofisik tutupan lahan di permukaan bumi. Kondisi penggunaan dan tutupan lahan tersebut sering digunakan sebagai indikator pengelolaan sekaligus sebagai dasar dalam penyusunan rencana pengelolaan yang berbasis lahan. Kelas penggunaan lahan di Kabupaten Nagan Raya terdiri atas tubuh air, hutan, perkebunan, pertanian, sawah, semak belukar, dan lahan terbuka. Penggunaan lahan eksisting di Kabupaten Nagan Raya untuk lebih jelas dapat dilihat pada Tabel 3.9.



PEMERINTAH KABUPATEN NAGAN RAYA
KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS (KLHS)
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD)

Tabel 3.9. Penggunaan Lahan Eksisting Kabupaten Nagan Raya

No	Tutupan Lahan	Luas (Ha)	%
1	Bangunan Bukan Permukiman	116,57	0,03
2	Danau	164,67	0,05
3	Empang	66,35	0,02
4	Hamparan Pasir	13,14	0,00
5	Hutan	185.481,96	52,58
6	Kebun Campuran	3.401,30	0,96
7	Kolam	20,53	0,01
8	Lahan Terbuka	478,49	0,14
9	Landas Pacu (Runway)	9,63	0,00
10	Lapangan	20,62	0,01
11	Mangrove	5,43	0,00
12	Padang Rumput	31,06	0,01
13	Pasir/Bukit Pasir Darat	541,64	0,15
14	Perkebunan	140.785,47	39,91
15	Permukiman	4.345,13	1,23
16	Pertambangan	147,35	0,04
17	Rawa	2,90	0,00
18	Saluran Air	3,86	0,00
19	Sawah	7.522,93	2,13
20	Semak Belukar	5.295,17	1,50
21	Sungai	2.760,49	0,78
22	Taman Kota	6,94	0,00
23	Tambak	1,20	0,00
24	Tanah Terbuka	39,91	0,01
25	Tegalan/Ladang	1.489,66	0,42
26	Transportasi	7,21	0,00
Jumlah		352.759,61	100,00

Sumber : Hasil Digitasi Tahun 2023



3.2.7. Potensi Pengembangan Wilayah

3.2.7.1. Pengelolaan Kawasan Lindung

Sebagian Wilayah Kabupaten Nagan Raya merupakan Kawasan Lindung, sehingga dalam pemanfaatan kawasan harus mengacu pada pola pemanfaatan ruang kawasan lindung yang bertujuan untuk mewujudkan kelestarian lingkungan hidup, meningkatkan daya dukung lingkungan dan menjaga keseimbangan ekosistem antara wilayah guna mendukung proses pembangunan berkelanjutan. Berdasarkan pertimbangan tersebut, rencana pemanfaatan Kawasan Lindung di Kabupaten Nagan Raya bertujuan untuk:

- a) Mengarahkan fungsi kawasan lindung yang meliputi rencana pemanfaatan ruang kawasan yang memberikan perlindungan bagi kawasan di bawahnya, kawasan suaka alam, kawasan perlindungan setempat dan kawasan bencana;
- b) Mempertahankan kawasan-kawasan resapan air atau kawasan yang berfungsi hidrologis untuk menjamin ketersediaan sumber air;
- c) Mengendalikan pemanfaatan ruang di luar kawasan hutan sehingga tetap berfungsi lindung.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, rencana pemanfaatan kawasan lindung di Kabupaten Nagan Raya seluas 126.108,96 Ha adalah:

a) Kawasan lindung

Kawasan hutan lindung di Kabupaten Nagan Raya terdapat wilayah Kecamatan Seunagan Timur seluas 2.446,702 Ha berada di Gampong Pulo Teungoh; Kecamatan Beutong seluas 75.149,446 Ha berada di Gampong Blang Neang, Pante Ara, Pante Bayam, dan Ujong Blang; Kecamatan Beutong Ateuh Benggalang seluas 30.026,599 Ha berada di Gampong Babah Suak, Blang Meurandeh, Blang Puuk dan Kuta Teungoh; dan Kecamatan Darul Makmur seluas 21.486,159 Ha berada di Gampong Alue Rambot, Alue Waki, Krueng Alem dan Krueng Seumanyam.

b) Kawasan perlindungan setempat

Kawasan perlindungan setempat di wilayah Kabupaten Nagan Raya dibagi dalam tiga jenis yaitu kawasan sempadan pantai seluas 497,45 Ha, kawasan sempadan sungai seluas 8.961,28 Ha dan kawasan sekitar danau 156,71 Ha.



3.2.7.2. Pengelolaan Kawasan Budidaya

Pengembangan kawasan pemanfaatan ruang pada kawasan budidaya bertujuan untuk menjaga kualitas daya dukung Kabupaten Nagan Raya. Adapun kawasan budidaya diperuntukkan untuk: pemukiman, pertanian tanaman pangan, tanaman tahunan/perkebunan, peternakan, perikanan dan pariwisata, pengembangan hutan rakyat, industri, lahan basah, lahan kering dan transmigrasi. Luas areal kawasan lindung dan budidaya di Kabupaten Nagan Raya sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 3.10.

Tabel 3.10. Luas Kawasan Hutan Lindung dan Budidaya Kabupaten Nagan Raya

No	Uraian	Luas Areal Kawasan Lindung (Ha)
Kawasan Hutan Lindung		
1	Kawasan Hutan Lindung	126.108,96
Kawasan Yang Memberi Perlindungan Kawasan Bawahnya		
1	Kawasan Rawa gambut	11.380,71
Kawasan Perlindungan Setempat		
1	Kawasan Spamdand Pantai	497,45
2	Kawasan Spamdand Sungai	8.961,28
3	Kawasan sekitar Danau	156,71
Kawasan Hutan Produksi		
1	Hutan Produksi	16.348.253
2	Hutan Produksi Terbatas	6.637.598
3	Hutan Produksi Koversi	4.658,14
Kawasan Rawan Bencana Alam		
1	Kawasan Rawan Longsor	6.523,94
2	Kawasan Rawan Pasang dan Abrasi	15.702,08
3	Kawasan Rawan Kebakaran	1.363,60
4	Kawasan Rawan Banjir	92.352,28
Kawasan Pertanian		
1	Kawasan Lahan Basah	12.777,64
2	Kawasan Lahan Kering	64.520,71
Kawasan Perkebunan		
1	Perkebunan Besar	54.417,29
2	Perkebunan Rakyat	2.064,40
Kawasan Peternakan		
1	Peternakan Besar	113,33

Sumber: PUPR Kabupaten Nagan Raya (RTRW Kabupaten Nagan Raya Tahun 2015-2035)



PEMERINTAH KABUPATEN NAGAN RAYA
KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS (KLHS)
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD)

Tabel di atas memperlihatkan perbandingan lahan antara kawasan lindung dan kawasan budidaya, Status Penguasaan Lahan Budidaya di wilayah Kabupaten Nagan Raya saat ini yang teridentifikasi dapat digolongkan menjadi dua yaitu: Hak Guna tanah (HGU) dan Hak Milik. Penggunaan lahan yang termasuk status HGU diantaranya Hak Penguasaan Hutan (HPH). Perkebunan Besar dan Hutan Tanaman Industri (HTI). Pemanfaatan lahan juga untuk berbagai kegiatan pemukiman, pertanian, perkebunan, perdagangan dan jasa serta perkantoran.

Tabel 3.11. Luas Kawasan Hutan Lindung dan Budidaya Menurut Kecamatan di Kabupaten Nagan Raya

No	Kecamatan	Kawasan Hutan Lindung		Kawasan Budidaya	
		(Ha)	(%)	(Ha)	(%)
1	Darul Makmur	21.486.159	16,6	4.608,15	29,69
2	Kuala	-	-	-	-
3	Kuala Pesisir	-	-	-	-
4	Tadu Raya	-	-	-	-
5	Beutong	75.149.446	58,2	5.986,29	37,79
6	Seunagan	-	-	-	-
7	Suka Makmue	-	-	-	-
8	Seunagan Timur	2.446.702	1,9	5.246,36	33,12
9	Beutong Ateuh Banggalang	30.026.599	23,3	5.246,36	33,12
10	Tripa Makmur	-	-	-	-
Jumlah		129.108,96	100	1.584.080	100

Sumber: PUPR Kabupaten Nagan Raya (RTRW Kabupaten Nagan Raya Tahun 2015-2035)

3.2.8. Kerentanan Wilayah Terhadap Bencana

Pada umumnya kondisi geografis, geologis, hidrologis maupun demografis sangat mempengaruhi tingkat kerawanan bencana di suatu daerah. Bencana alam yang terjadi meliputi bencana akibat fenomena geologi (gempa bumi, tsunami, gerakan tanah dan letusan gunung api), bencana akibat kondisi hidrometeorologi (banjir, tanah longsor, kekeringan dan angin topan), bencana akibat faktor biologi (wabah penyakit manusia, penyakit tanaman/ternak) serta kegagalan teknologi (kecelakaan industri, kecelakaan transportasi, radiasi nuklir dan pencemaran bahan kimia). Bencana akibat ulah manusia terkait dengan konflik antar manusia, konflik dengan alam).



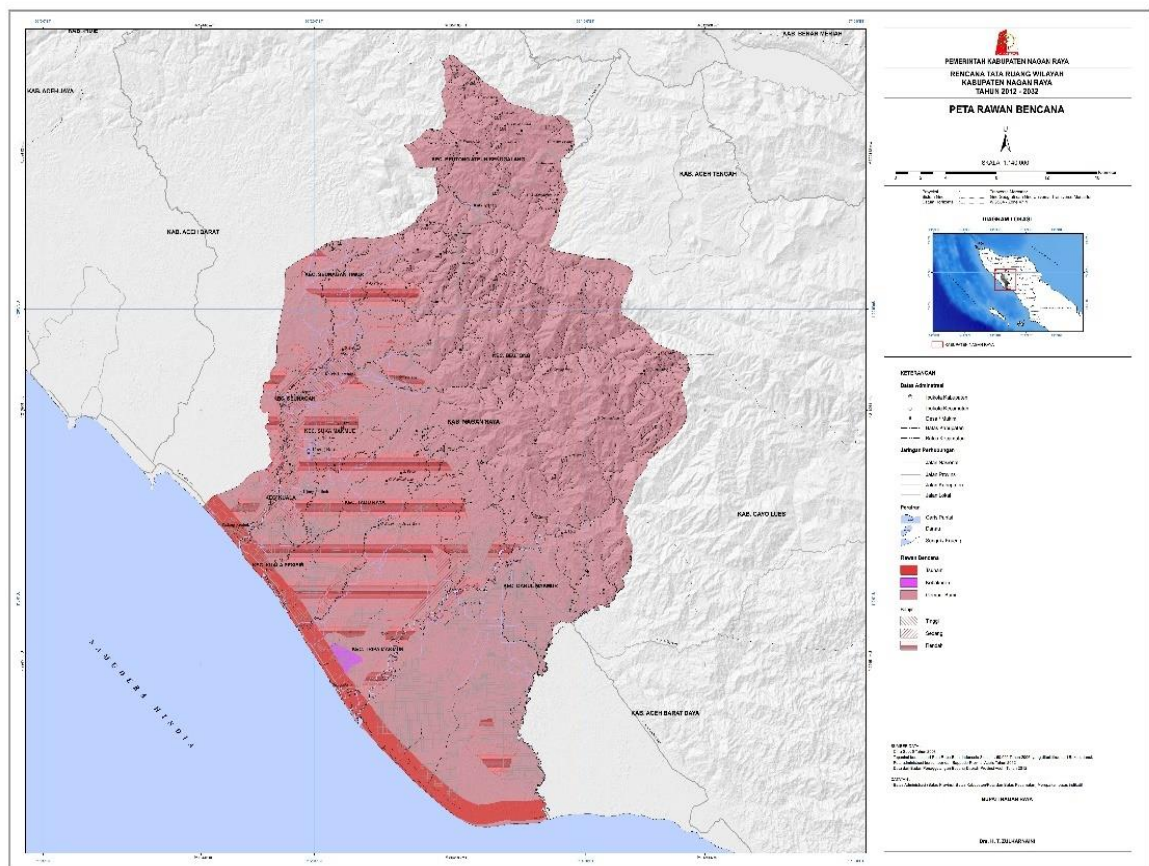
Dalam beberapa tahun terakhir, bencana yang terjadi di Kabupaten Nagan Raya antara lain: banjir genangan, abrasi pantai, longsor, erosi, dan kebakaran lahan. Banjir genangan merupakan bencana tahunan yang melanda beberapa kawasan yaitu Kecamatan Tripa Makmur, Tadu Raya, Kuala Pesisir dan Darul Makmur. Bencana tanah longsor juga sering terjadi di jalan Lintas Tengah Aceh yaitu di Kecamatan Beutong Ateuh Banggalang yang merupakan wilayah perbukitan yang curam (Singgah Mata). Selain itu, bencana kebakaran lahan yang diakibatkan baik oleh faktor alam yaitu cuaca ekstrim pada musim kemarau maupun faktor kesadaran manusia yang rendah akan kepeduliannya terhadap lingkungan.

Berdasarkan potensi rawan bencana di Kabupaten Nagan Raya dapat diklasifikasikan dalam beberapa kondisi yaitu :

1. Kawasan rawan longsor meliputi Kecamatan Beutong Ateuh Banggalang;
2. Kawasan rawan gelombang pasang meliputi Kecamatan Kuala Pesisir, Tadu Raya dan Tripa Makmur;
3. Kawasan rawan banjir meliputi Kecamatan Tadu Raya, Tripa Makmur, Kuala, Kuala Pesisir dan Darul Makmur;
4. Kawasan rawan kebakaran lahan meliputi Kecamatan Kuala Pesisir, Tadu Raya, dan Kuala.
5. Kawasan rawan tsunami ditetapkan dengan ketentuan kawasan pesisir yang memiliki resiko tinggi jika terjadi gempa bumi kuat yang disusul oleh tsunami meliputi daerah seluruh wilayah pesisir Kabupaten Nagan Raya.
6. Kawasan rawan polusi air, udara dan tanah yaitu kawasan sekitar industri, pelabuhan laut, pertambangan dan kawasan pusat kota.

Permasalahan utama dalam penanggulangan bencana di Kabupaten Nagan Raya terutama untuk bencana dengan skala menengah keatas antara lain belum terpadunya koordinasi antara unsur pemerintah dengan swasta dan masyarakat sipil lainnya. Hal lain yang membuat kurang optimalnya penyelenggaraan layanan penanggulangan bencana adalah partisipasi masyarakat dalam pengurangan resiko bencana masih terbatas hanya pada saat terjadinya bencana (fase tanggap darurat), serta sarana dan prasarana pendukung yang masih belum memadai.

Bencana lainnya yang berpotensi terjadi di kabupaten Nagan Raya adalah bersumber dari perilaku manusia atau aktifitas yang ditekuni oleh masyarakat itu sendiri. Bencana tersebut terjadi akibat faktor kelalaian, pengetahuan masyarakat yang rendah, ketidaktahuan dan lainnya. Bencana yang diakibatkan oleh ulah manusia seperti kebakaran, konflik sosial dan pencemaran lingkungan (polusi udara dan limbah industri). Eksplorasi dan eksploitasi Sumber Daya Alam seperti penambangan yang tidak dikelola dengan baik diperkirakan akan menimbulkan masalah baru terhadap kualitas lingkungan hidup. Peta rawan bencana Kabupaten Nagan Raya dapat dilihat pada Gambar 3.6.



Sumber :RTRW Kabupaten Nagan Raya Tahun 2015-2035

Gambar 3.6. Peta Rawan Bencana Kabupaten Nagan Raya

3.2 Kondisi Demografis

Perkembangan demografi dalam konteks pembangunan pada saat ini adalah sangat penting untuk diselesaikan dengan bijak. Penduduk yang diterjemahkan sebagai kumpulan manusia yang menempati wilayah geografi dan ruang tertentu memiliki tiga matra pokok, yaitu aspek kuantitas, kualitas, serta mobilitas penduduk. Sebagai salah satu modal dasar



pembangunan, penduduk perlu dioptimalkan dan dikelola dengan baik agar memiliki daya saing tinggi guna mencapai kesejahteraannya. Pembangunan di suatu wilayah akan berhasil apabila penduduk sebagai modal dasar pembangunan kondisinya kondusif, tidak hanya sisi jumlahnya yang mencukupi, struktur dan persebarannya yang menguntungkan, tetapi kualitasnya pun harus memadai.

3.2.1. Struktur dan Distribusi Penduduk

3.2.1.1. Jumlah Penduduk

Dalam pembangunan kependudukan, administrasi kependudukan sebagai suatu sistem merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari administrasi pemerintahan dan administrasi negara dalam rangka pemberian perlindungan terhadap hak-hak individu penduduk, melalui pelayanan publik dalam bentuk penerbitan dokumen kependudukan.

Penduduk adalah semua orang yang berdomisili di suatu wilayah selama 6 bulan atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 6 bulan tetapi bertujuan menetap. Dalam rentang waktu 10 tahun terakhir jumlah penduduk di Kabupaten Nagan Raya, mengalami kondisi fluktuatif. Distribusi penduduk tidak merata di setiap kecamatan, hal ini disamping terkonsentrasi penduduk pada kecamatan-kecamatan yang lebih luas juga akibat kondisi alam yang berbeda. Jumlah penduduk di Kabupaten Nagan Raya pada Tahun 2013 sebanyak 158.956 jiwa, Wilayah yang terbanyak jumlah penduduknya terdapat di Kecamatan Darul Makmur yakni sebanyak 44.946 jiwa, dan yang terkecil jumlah penduduknya terdapat di Kecamatan Beutong Ateuh Banggalang yakni 2.228 jiwa. Jumlah penduduk Kabupaten Nagan Raya pada Tahun 2022 sebanyak 173.213 jiwa, Wilayah yang terbanyak jumlah penduduknya terdapat di Kecamatan Darul Makmur yakni sebanyak 51.336 jiwa, dan yang terkecil jumlah penduduknya terdapat di Kecamatan Beutong Ateuh Banggalang yakni 2.039 jiwa. Untuk lebih jelasnya mengenai jumlah penduduk di Kabupaten Nagan Raya 10 tahun terakhir dapat dilihat pada **Tabel 3.12.**



PEMERINTAH KABUPATEN NAGAN RAYA
KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS (KLHS)
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD)

Tabel 3.12. Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Nagan Raya Tahun 2013-2022

Kecamatan	Jumlah Penduduk (Jiwa)									
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Darul Makmur	44.946	45.409	43.311	44.237	45.107	45.990	46.776	49.414	50.281	51.336
Tripa Makmur	9.066	9.190	8.763	8.955	9.130	9.309	9.468	9.038	9.108	9.208
Kuala	20.453	21.559	20.593	21.004	21.416	21.835	22.208	22.350	22.637	23.004
Kuala Pesisir	15.701	16.406	15.670	15.985	16.299	16.618	16.902	17.338	17.594	17.912
Tadu Raya	14.008	13.005	12.430	12.670	12.920	13.172	13.398	14.731	15.049	15.424
Beutong	13.756	14.585	13.916	14.203	14.482	14.765	15.017	13.701	13.746	13.837
Beutong Ateuh Banggalang	2.228	1.964	1.863	1.916	1.953	1.992	2.026	1.990	2.011	2.039
Seunagan	15.910	16.836	16.089	16.387	16.708	17.034	17.326	15.924	15.988	16.105
Suka Makmue	8.961	9.334	8.914	9.089	9.267	9.448	9.609	9.931	10.085	10.274
Seunagan Timur	13.927	14.160	13.521	13.777	1.407	14.320	14.564	13.997	14.092	14.254
Nagan Raya	158.956	162.448	155.070	158.223	148.689	164.483	167.294	168.414	170.591	173.393

Sumber: BPS Kabupaten Nagan Raya, 2023

3.2.1.2. Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur

Penduduk berdasarkan kelompok umur merupakan penduduk yang dikelompokkan menurut kelompok umur. Jumlah Penduduk menurut kelompok umur. Penyebutan satuan tahun pada umur penduduk dilakukan dengan pembulatan ke bawah. Contoh, seseorang dengan umur 4 tahun 10 bulan 25 hari dinyatakan dalam umur 4 tahun. Demikian juga untuk kelompok umur selanjutnya. Komposisi penduduk berdasarkan umur digunakan untuk mengelompokkan penduduk suatu daerah berdasarkan rentang usia tertentu. Pengelompokan ini biasanya ditunjukkan untuk menentukan jumlah penduduk dalam usia produktif dan usia produktif.

Pada tahun 2013 jumlah penduduk berdasarkan kelompok umur, jumlah penduduk tertinggi adalah kelompok usia 10 – 14 tahun yaitu mencapai 16.215 Jiwa, sedangkan terendah adalah kelompok usia 60-64 tahun yaitu 3.636 jiwa, Pada tahun 2022 jumlah penduduk berdasarkan kelompok umur, jumlah penduduk tertinggi adalah kelompok usia 5 – 9 tahun yaitu mencapai 16.097 Jiwa, sedangkan terendah adalah kelompok usia 60-64 tahun yaitu 6.075 jiwa dari jumlah penduduk Kabupaten Nagan Raya secara keseluruhan. Untuk lebih jelasnya Jumlah penduduk berdasarkan kelompok umur di Kabupaten Nagan Raya 10 tahun terakhir dapat dilihat pada Tabel 3.13.

Tabel 3.13. Jumlah Penduduk berdasarkan kelompok umur di Kabupaten Nagan Raya Tahun 2013-2022

Kelompok Umur	Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur (Jiwa)									
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
0-4	16.197	16.553	16.815	16.353	16.391	16.407	16.361	14.154	14.163	14.673
05-Sep	15.269	15.605	14.823	15.342	15.586	15.882	15.950	14.281	14.259	16.097
Oct-14	16.215	16.572	14.617	14.711	15.024	15.358	15.730	14.274	14.253	15.698
15-19	13.825	14.129	13.180	12.643	1.272	12.853	12.998	13.881	13.887	13.563
20-24	14.039	14.347	13.708	13.112	13.076	13.033	12.972	1.475	14.752	14.321
25-29	15.362	15.698	14.653	14.847	15.014	15.107	15.111	14.264	14.351	13.841
30-34	14.375	14.690	14.144	14.419	14.707	15.005	15.280	13.640	13.754	13.410
35-39	12.666	13.945	12.083	12.627	12.979	13.341	13.607	13.335	13.513	14.001
40-44	10.251	10.477	10.247	10.721	10.981	11.248	11.558	13.049	13.268	13.376
45-49	8.653	8.842	8.532	9.149	9.491	9.831	10.129	11.121	11.424	11.722
50-54	6.967	7.121	6.968	7.486	7.761	8.058	8.353	8.909	9.213	9.469
55-59	4.688	4.791	4.977	5.523	5.762	5.993	6.219	7.134	7.398	7.058
60-64	3.636	3.716	3.739	4.282	4.545	4.819	5.070	5.919	6.189	6.075
65+	6.813	6.963	6.584	7.008	7.290	7.608	7.956	9.686	10.167	9.523

Sumber: BPS Kabupaten Nagan Raya, 2023

3.2.1.3. Laju Pertumbuhan Penduduk

Laju pertumbuhan penduduk per tahun adalah angka yang menunjukkan rata-rata tingkat penambahan penduduk per tahun dalam jangka waktu tertentu. Angka ini dinyatakan sebagai persentase dari penduduk dasar. Metode penghitungan laju pertumbuhan penduduk yang digunakan oleh BPS adalah metode geometrik. Laju pertumbuhan penduduk adalah perubahan jumlah penduduk di suatu wilayah tertentu setiap tahunnya. Kegunaannya adalah memprediksi jumlah penduduk suatu wilayah di masa yang akan datang.

Laju pertumbuhan penduduk menurut kecamatan di Kabupaten Nagan Raya selama kurun waktu 2013-2022 cukup bervariasi. Laju pertumbuhan penduduk berfluktuatif. Laju Pertumbuhan penduduk yang rendah terjadi pada tahun 2020 yaitu 0,66 persen Sebaliknya pertumbuhan penduduk yang tinggi terjadi pada tahun 2015, yaitu 4,54 persen. Untuk lebih jelasnya Laju pertumbuhan pertumbuhan penduduk 10 tahun terakhir dapat dilihat pada Tabel 3.14.

Tabel 3.14. Laju Pertumbuhan penduduk di Kabupaten Nagan Raya Tahun 2013-2022

Kecamatan	Laju pertumbuhan penduduk (%)									
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Darul Makmur	4,13	2,05	-4,62	1,96	1,967	1,958	1,709	2,30	1,76	2,10
Tripa Makmur	1,65	1,73	-4,65	1,59	1,54	1,961	1,708	1,31	0,77	1,10
Kuala	8,89	5,41	-4,48	1,83	1,962	1,956	1,708	1,83	1,28	1,62
Kuala Pesisir	3,13	4,49	-4,49	1,84	1,964	1,957	1,709	2,01	1,48	1,81
Tadu Raya	1,7	-7,16	-4,42	1,92	1,973	1,950	1,716	2,70	2,16	2,49
Beutong	5,4	6,03	-4,59	2,11	1,964	1,954	1,707	0,86	0,33	0,66
Beutong Ateuh	0,32	-11,85	-5,14	1,4	1,931	1,997	1,707	1,59	1,06	1,39
Banggalang										
Seunagan	2,21	5,82	-4,44	2,44	1,959	1,951	1,714	0,93	0,40	0,73
Suka Makmue	3,85	4,16	-4,5	2,18	1,958	1,953	1,704	2,09	1,55	1,87
Seunagan Timur	5,25	1,67	-4,51	2,54	1,960	1,943	1,704	1,36	0,82	1,15
Nagan Raya	4,49	2,20	4,54	2,03	1,96	1,96	1,71	0,66	1,31	1,64

Sumber: BPS Kabupaten Nagan Raya, 2023

3.2.1.4. Kepadatan Penduduk

Kepadatan penduduk adalah ukuran persebaran penduduk yang menunjukkan jumlah penduduk untuk setiap kilometer persegi luas wilayah. Kepadatan penduduk terkait dengan perbandingan rata-rata jumlah penduduk di dalam satuan luas wilayah (jiwa/km²). Kepadatan kotor jumlah penduduk dalam suatu wilayah yang termasuk di dalamnya kawasan lindung dan budidaya, sedangkan kepadatan bersih jumlah penduduk dalam suatu wilayah efektif untuk kawasan budidaya saja. Adapun kriteria kepadatan penduduk dapat dilihat dalam tiga katagori:

- kepadatan tinggi : jika angka kepadatan suatu kecamatan lebih besar dari angka kepadatan wilayah kabupaten;
- kepadatan sedang: jika angka kepadatan suatu kecamatan sama besar dengan angka kepadatan wilayah kabupaten;
- kepadatan rendah: jika angka kepadatan suatu kecamatan lebih kecil dari angka kepadatan wilayah kabupaten.

Kepadatan penduduk di Kabupaten Nagan Raya diuraikan dalam dua jenis yaitu:

- Kepadatan Kotor adalah perbandingan jumlah penduduk per kecamatan dibagi luas wilayah kecamatan tersebut.
- Kepadatan Bersih adalah perbandingan jumlah penduduk per kecamatan dibagi luas lahan yang dimanfaatkan untuk permukiman.



PEMERINTAH KABUPATEN NAGAN RAYA
KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS (KLHS)
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD)

Kepadatan penduduk di Kabupaten Nagan Raya 10 tahun terakhir dapat dilihat pada Tabel 3.15.

Tabel 3.15. Kepadatan penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Nagan Raya Tahun 2013-2022

Kecamatan	Kepadatan penduduk (km ²)									
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Darul Makmur	44	44	42	43	43	45	46	48	48,91	50,24
Tripa Makmur	48	49	46	47	47	49	50	48	48,09	48,90
Kuala	169	178	170	174	174	181	184	185	187,25	191,42
Kuala Pesisir	206	215	205	209	209	218	221	227	230,47	235,99
Tadu Raya	40	37	36	36	36	38	39	42	43,35	44,69
Beutong	14	14	14	14	14	15	15	13	13,51	13,68
Beutong Ateuh Banggalang	5	5	5	5	5	5	5	5	4,95	5,05
Seunagan	280	297	284	289	289	300	205	281	281,83	285,58
Suka Makmue	174	181	173	176	176	183	186	193	195,60	200,42
Seunagan Timur	55	56	54	55	55	57	58	56	56,01	56,99
Nagan Raya	45	46	44	45	45	46	47	48	48,12	49,20

Sumber: BPS Kabupaten Nagan Raya, 2023

Dalam rentang waktu 10 tahun terakhir kepadatan penduduk di Kabupaten Nagan Raya, mengalami kondisi fluktuatif . Kepadatan penduduk Kabupaten Nagan Raya pada Tahun 2013 mencapai 45 Jiwa/Km². Sedangkan kecamatan dengan kepadatan penduduk tertinggi yaitu Kecamatan Seunagan mencapai 280 Jiwa/Km². Dan Kecamatan dengan kepadatan penduduk terkecil yaitu Kecamatan Beutong Ateuh Banggalang yaitu 5 Jiwa/Km².

Kepadatan penduduk Kabupaten Nagan Raya pada Tahun 2022 mencapai 49,20 Jiwa/Km². Sedangkan kecamatan dengan kepadatan penduduk tertinggi yaitu Kecamatan Seunagan mencapai 285,58 Jiwa/Km². Dan Kecamatan dengan kepadatan penduduk terkecil yaitu Kecamatan Beutong Ateuh Banggalang yaitu 5,05 Jiwa/Km².

3.2.1.5. Rasio Jenis Kelamin

Rasio jenis kelamin adalah perbandingan antara jumlah penduduk laki-laki dan jumlah penduduk perempuan pada suatu daerah dan waktu tertentu, yang biasanya dinyatakan dalam

banyaknya penduduk laki-laki per 100 perempuan. Jumlah rasio jenis kelamin penduduk perkecamatan tahun 2013 sebesar 99 ribu. jumlah rasio jenis kelamin penduduk perkecamatan tahun 2022 sebesar 102,02. Untuk lebih jelasnya data rasio jenis kelamin di kabupaten Nagan Raya 10 tahun terakhir dapat di lihat pada tabel 3.16 di bawah ini:

Tabel 3.16. Rasio Jenis Kelamin Menurut Kecamatan di Kabupaten Nagan Raya Tahun 2013-2022

Kecamatan	Rasio Jenis Kelamin (ribu)									
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Darul Makmur	99	102	105	105	105	05	105	103,57	102,68	103,57
Tripa Makmur	101	97	99	99	99	100	99	100,98	102,09	100,98
Kuala	101	100	103	102	103	103	103	102,32	102,41	102,32
Kuala Pesisir	106	101	103	103	103	103	103	105,06	104,75	105,06
Tadu Raya	99	104	106	106	107	107	107	103,52	101,81	103,52
Beutong	96	98	100	100	101	101	101	101,04	103,07	101,48
Beutong Ateuh Banggalang	101	103	105	105	105	106	105	103,48	103,96	103,48
Seunagan	98	96	98	98	98	99	98	98,83	100,65	98,83
Seunagan Tmur	97	98	101	100	101	101	101	98,30	97,86	98,30
Suka Makmue	96	93	95	95	95	95	95	98,73	99,72	98,73
Nagan Raya	99	99	102	102	102	102	102	102,02	102,06	102,02

Sumber: BPS Kabupaten Nagan Raya, 2023

3.2.1.6. Jumlah Angkatan Kerja

Angkatan kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) yang bekerja, punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja, dan pengangguran. Bekerja adalah kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh seseorang dengan maksud memperoleh atau membantu memperoleh pendapatan atau keuntungan dan lamanya bekerja paling sedikit 1 jam secara terus menerus dalam seminggu yang lalu (termasuk pekerja keluarga tanpa upah yang membantu dalam suatu usaha kegiatan ekonomi). Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) adalah persentase banyaknya angkatan kerja terhadap banyaknya penduduk yang berumur lima belas tahun ke atas. Semakin tinggi Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja menunjukkan bahwa semakin tinggi pula pasokan tenaga kerja (labour supply) yang tersedia untuk memproduksi barang dan jasa dalam suatu perekonomian. Dalam Aspek Ketenagakerjaan, jumlah angkatan kerja di

kabupaten Nagan Raya semakin meningkat selama 10 tahun terakhir, hanya pada tahun 2015 mengalami sedikit penurunan. Jumlah angkatan kerja di Kabupaten Nagan Raya pada tahun 2013 berjumlah 62.816 jiwa sedangkan pada tahun 2022 berjumlah 85.038 jiwa. Untuk lebih jelasnya jumlah angkatan kerja di Kabupaten Nagan Raya tahun 2013 – 2022 dapat dilihat pada **Tabel 3.17**.

Tabel 3.17. Jumlah Angkatan Kerja di Kabupaten Nagan Raya tahun 2013-2022

No	Uraian	Tahun									
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah Penduduk (Jiwa)	158.956	162.448	155.070	158.223	161.329	164.483	167.294	168.392	170.591	173.392
2	Jumlah Angkatan Kerja (Jiwa)	62.816	68.505	65.303	NA	70.079	72.102	74.669	81.989	81.535	85.038

3.2.1.7. Struktur dan Indeks Ketergantungan Penduduk

Angka Beban Tanggungan atau *Dependency Ratio* merupakan suatu ukuran untuk mengetahui produktivitas penduduk. Angka Beban Tanggungan merupakan angka yang menyatakan perbandingan antara banyaknya orang berumur tidak produktif (belum produktif/umur di bawah 15 tahun dan tidak produktif lagi/umur 65 tahun ke atas) dengan yang berumur produktif (umur 15–64 tahun). Angka ini dapat digunakan sebagai indikator yang secara kasar dapat menunjukkan keadaan ekonomi suatu daerah. Semakin tinggi persentase *dependency ratio* menunjukkan semakin tinggi beban yang harus ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai hidup penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi. Adapun persentase *dependency ratio* yang semakin rendah menunjukkan semakin rendahnya beban yang ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi.

Tabel 3.18. Komposisi Penduduk dan Angka Ketergantungan Kabupaten Nagan Raya tahun 2013-2022

Tahun	0-14 tahun	15-64	65 + tahun	Jumlah penduduk	Angka ketergantungan (%)
1	2	3	4	5	6
2013	47.681	104.462	6.813	158.956	52,17
2014	48.730	107.756	6.963	162.448	51,68
2015	46.255	102.231	6.584	155.070	51,68
2016	46.406	104.811	7.008	158.223	50,96
2017	47.001	107.038	7.290	161.329	50,72
2018	47.587	109.288	7.608	164.483	50,50
2019	48.041	111.297	7.956	167.294	50,31
2020	42.709	115.997	9.686	168.392	45,17
2021	42.675	117.749	10.167	170.591	44,88
2022	46.468	116.836	9.523	172.827	47,9

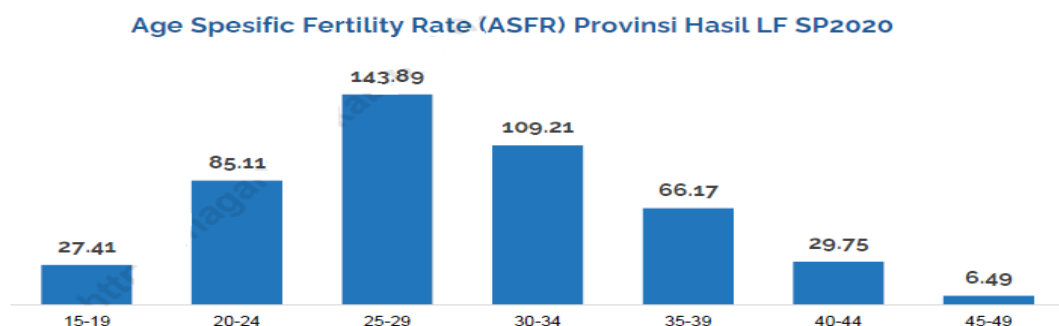
Sumber: BPS Kabupaten Nagan Raya, 2023

Dari tabel diatas terlihat bahwa Angka ketergantungan bisa didapat dari penjumlahan kelompok umur < 0-14 tahun + < 15-64 tahun / 65 tahun +, Angka ketergantungan Kabupaten Nagan Raya bervariasi untuk tahun 2013 adalah 52,17 % dan untuk tahun 2022 adalah 47,9 %. Meningkatnya proporsi penduduk produktif dibandingkan proporsi penduduk tua serta penurunan penduduk usia remaja, berimplikasi positif terhadap perubahan angka ketergantungan secara keseluruhan. Dengan kata lain, struktur umur penduduk Kabupaten Nagan Raya berada pada tahap transisi antara penduduk muda menjadi penduduk tua.

3.2.2. Tingkat Kelahiran dan Kematian

3.2.2.1. Angka Kelahiran Menurut Kelompok Umur (ASFR)

Hasil Long Form SP2020 mencatat terdapat 18,97 kelahiran hidup diantara 1000 penduduk Kabupaten Nagan Raya.



Gambar 3.7. Angka Kelahiran hidup diantara 1000 penduduk Kabupaten Nagan Raya



Puncak ASFR terletak pada Wanita umur 25-29 tahun. Terdapat 143 kelahiran dari 1000 perempuan umur 25-29 tahun. Pola ASFR berbentuk U terbalik. Angka kelahiran sebesar 27 kelahiran diantara 1000 perempuan umur 15-19 tahun. Meningkat tajam menjadi 85 kelahiran per 1000 perempuan umur 20-24. lalu mencapai puncaknya pada kelompok umur 25-29 tahun. Pada kelompok umur selanjutnya, angka kelahiran menurun hingga sebesar 6 kelahiran per 1000 perempuan umur 45-49 tahun. Berdasarkan generasi, kelahiran didominasi oleh perempuan generasi millennial (kisaran umur 26-41 tahun).

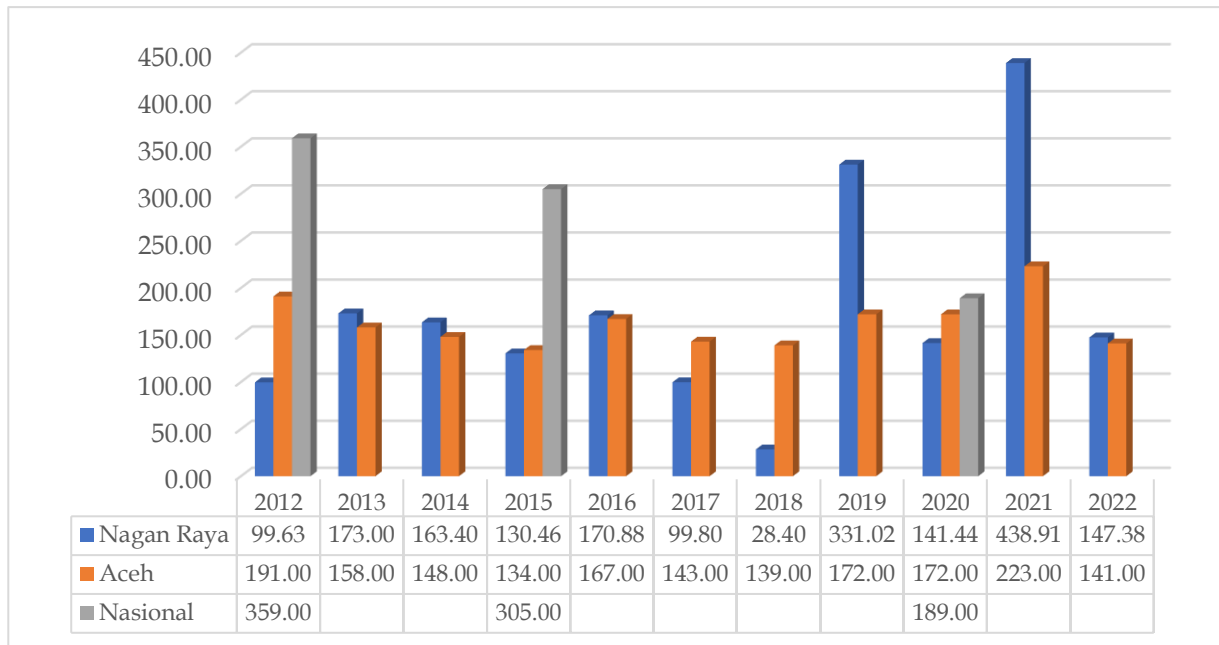
3.2.2.1. Angka Kematian Ibu (AKI)

Angka Kematian Ibu (AKI) adalah rasio ibu yang meninggal dari suatu penyebab kematian terkait dengan gangguan kehamilan atau penanganannya (tidak termasuk kecelakaan, bunuh diri atau kasus insidental) selama kehamilan, melahirkan, dan dalam masa nifas (42 hari setelah melahirkan) tanpa memperhitungkan lama kehamilan per 100.000 kelahiran hidup.

Angka Kematian Ibu (AKI) di Indonesia masih menjadi permasalahan utama bidang kesehatan serta masih jauh dari target global SDGs. Dari hasil Survei Penduduk Antar Sensus (SUPAS) 2015 menyebutkan AKI 305/100.000 Kelahiran Hidup (KH), dan target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2024 untuk AKI sebesar 183/100.000 Kelahiran Hidup. Salah satu target dalam SDGs adalah untuk mengurangi Angka Kematian Ibu (AKI) menjadi 70 kematian per 100.000 kelahiran hidup pada tahun 2030.

Angka Kematian Ibu (AKI) merupakan salah satu indikator untuk melihat keberhasilan pembangunan bidang kesehatan, terutama dalam upaya capaian dalam penilaian kesehatan ibu. Indikator ini tidak hanya mampu menilai program kesehatan ibu, tetapi juga mampu menilai derajat Kesehatan masyarakat dikarenakan sensitifitasnya terhadap perbaikan pelayanan kesehatan, baik dari sisi aksesibilitas maupun kualitas. Indikator ini secara langsung digunakan untuk memonitor kematian terkait dengan kehamilan, persalinan, dan nifas. AKI dipengaruhi oleh beberapa faktor termasuk status kesehatan secara umum, pendidikan, ekonomi, sosial budaya dan pelayanan kesehatan selama kehamilan dan melahirkan. AKI Kabupaten Nagan Raya dalam kurun waktu tahun 2012 sampai dengan tahun 2022 mengalami mengalami fluktuasi yang sangat mencolok, dengan kisaran antara 28,40 - 438,91 atau rata-rata 174,94 kematian ibu per 100.000 kelahiran hidup. Angka ini masih di atas kematian ibu Provinsi Aceh

yang rata-rata 162,55 kematian ibu per 100.000 kelahiran hidup tetapi masih lebih rendah dibandingkan dengan AKI Nasional yang mencapai 189,00 pada tahun 2020.



Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Nagan Raya Tahun 2022 dan BPS Tahun 2022

Gambar 3.8. Angka Kematian Ibu per 100.000 kelahiran hidup Kab. Nagan Raya Tahun 2012–2022

Penyebab kematian ibu terbagi dua, pertama disebabkan oleh penyebab langsung obstetric (*direct*) yaitu kematian yang diakibatkan langsung oleh kehamilan dan persalinannya. Penyebab kedua adalah kematian yang disebabkan oleh penyebab tidak langsung (*indirect*) yaitu kematian yang terjadi pada ibu hamil yang disebabkan oleh penyakit dan bukan oleh kehamilan atau persalinannya. Penyebab langsung kematian ibu di Aceh disebabkan diakibatkan oleh perdarahan, eklamsi ataupun pre-eklamsi. Hasil penelitian oleh Bappeda Aceh (2016) menunjukkan bahwa faktor keterlambatan pengambilan keputusan, terlambat mencapai tempat rujukan dan terlambat mendapatkan pelayanan di fasilitas Kesehatan merupakan faktor utama kematian yang terjadi baik pada ibu dan bayi.

Beberapa strategi yang dianggap efektif untuk menurunkan AKI antara lain peningkatan akses dan kualitas pelayanan Kesehatan, pemberdayaan perempuan dan wajib belajar 12 tahun, pencegahan pernikahan anak, peningkatan peran perempuan dalam sosial ekonomi, peningkatan kesehatan reproduksi remaja dan calon pengantin, serta peningkatan ketahanan keluarga, peran keluarga, tokoh agama dan masyarakat.



3.2.2.1. Angka Kematian Bayi (AKB)

Angka Kematian Bayi (AKB) adalah jumlah bayi yang meninggal sebelum mencapai usia tepat 1 tahun yang dinyatakan per 1000 kelahiran hidup (KH). AKB digunakan untuk mencerminkan tingkat pembangunan kesehatan dari suatu negara serta kualitas hidup dari masyarakat. AKB merupakan salah satu indikator *Development Goal* (SDGs) Goal SDGs ke tiga yaitu *Good Health and Well-being* menjelaskan bahwa salah satu dampak yang diharapkan yaitu dituntaskannya kematian bayi yang dapat dicegah, yang ditargetkan pada tahun 2030. Semua negara diharapkan berpartisipasi untuk menekan angka kematian bayi menjadi 12/1.000 KH. Makin tinggi angka kematian ibu dan bayi di suatu negara maka dapat dipastikan bahwa derajat kesehatan negara tersebut buruk.

Tabel 3.19. Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 Kelahiran Hidup di Kabupaten Nagan Raya Tahun 2012-2022

No	Uraian	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1.	Jumlah Kematian Bayi (berumur kurang 1 tahun) pada satu tahun tertentu	33	31	33	27	17	33	39	22	52	52	20
2.	Jumlah Kelahiran Hidup pada satu tahun tertentu	2.804	2.726	3.060	3.065	3.011	2.926	3.088	3.021	2.828	2.734	2.714
Angka Kematian Bayi per 1000 kelahiran hidup		11,77	11,37	10,78	8,81	5,65	11,00	11,00	7,28	18,38	19,01	7,30

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Nagan Raya Tahun 2022

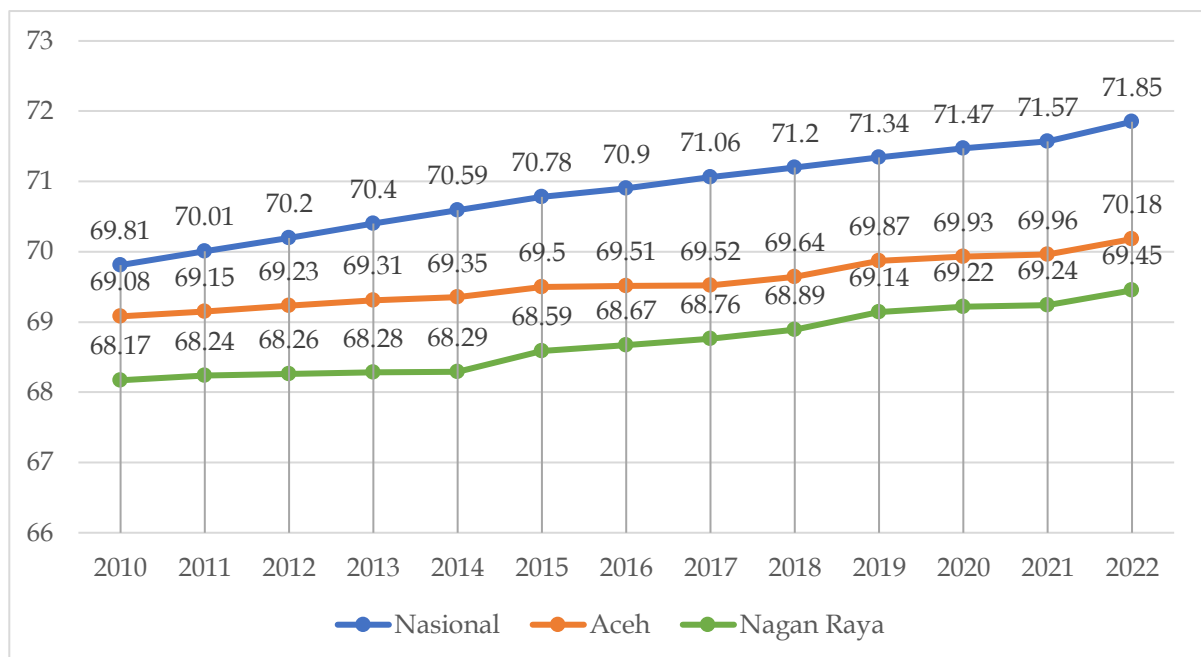
Angka kematian bayi per 1000 kelahiran hidup di Kabupaten Nagan Raya pada rentang waktu 2012-2022 berkisar antara 5,65-19,01/1000 KH, dengan rata-rata 11,12/1000 KH. Angka-rata ini sedikit lebih rendah dari angka rata-rata Provinsi Aceh (11,20/1.000 KH) dan AKB nasional pada tahun 2020 (16,85/1.000 KH). Pada Tahun 2020 dan 2021 terjadi peningkatan angka kematian bayi per 1000 KH (18.38 dan 19.01/1000 KH). Hal ini diduga ada kaitanya dengan kasus COVID-19, baik langsung maupun tidak langsung. Selanjutnya pada tahun 2022 angka kematian bayi per 1000 KH embali turun (7,3/1000 KH).

Berbagai upaya yang dinilai mempunyai dampak cukup besar terhadap penurunan AKB dapat dilakukan untuk mencegah kematian bayi oleh determinan umur, paritas dan tempat persalinan adalah dengan menikah pada usia > 20 tahun, meningkatkan pendidikan kesehatan

reproduksi pada remaja putri melalui penyuluhan di sekolah-sekolah atau penyuluhan pada ibu-ibu pengajian, meningkatkan cakupan penggunaan Kontap (Kontrasepsi mantap) pada ibu yang memiliki > 4 orang, meningkatkan kualitas pelayanan khususnya pelayanan kebidanan di fasilitas kesehatan, menyediakan alat-alat medis penunjang persalinan yang memadai dan meningkatkan kenyamanan lingkungan fasilitas kesehatan serta meningkatkan jangkauan fasilitas kesehatan dengan mengoptimalkan fungsi polindes dan bidan desa.

3.2.2.3. Angka Usia Harapan Hidup Kabupaten Nagan Raya

Angka harapan hidup (AHH) pada waktu lahir adalah suatu perkiraan rata-rata lamanya hidup sejak lahir yang akan dicapai oleh penduduk. Angka harapan hidup merupakan alat untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk pada umumnya, dan meningkatkan derajat kesehatan pada khususnya. AHH yang rendah disuatu daerah harus diikuti dengan program pembangunan kesehatan, dan program sosial lainnya termasuk kesehatan lingkungan, kecukupan gizi dan kalori dan program pemberantasan kemiskinan.



Gambar 3.9. Perkembangan Angka Harapan Hidup Kabupaten Nagan Raya Tahun 2010-2022 (BPS 2023)

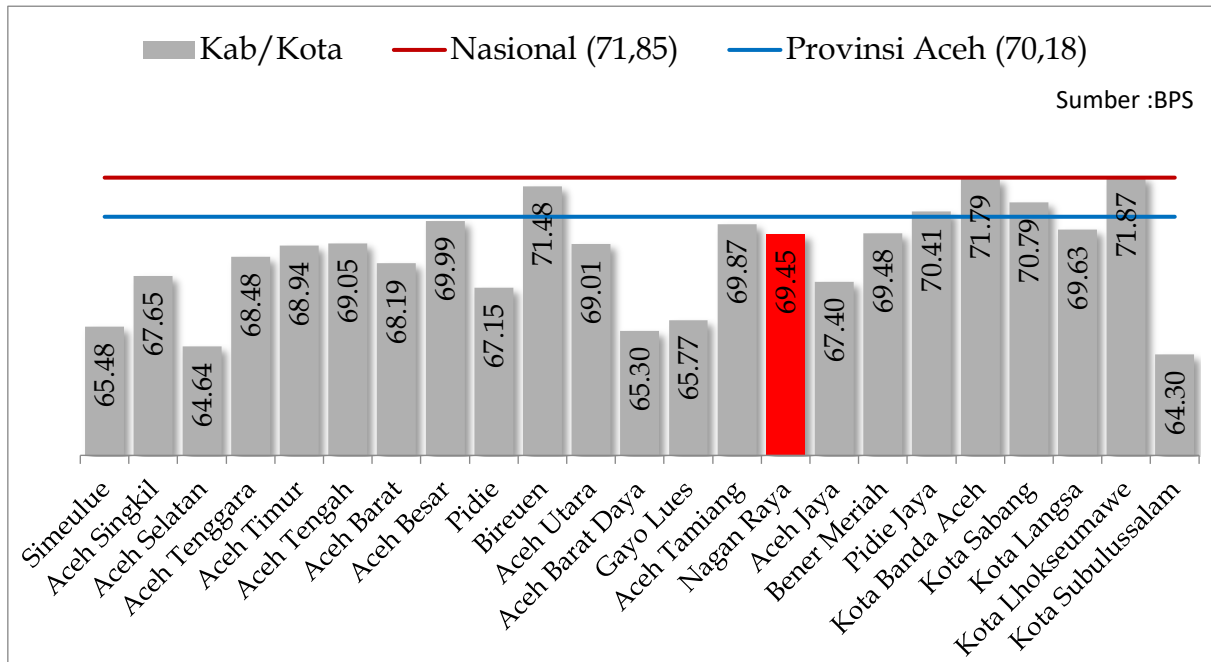
AHH berkorelasi negatif dengan angka kemiskinan, dimana semakin tinggi AHH maka akan mengurangi tingkat kemiskinan, dimana berbagai hasil penelitian menyatakan AHH



memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan di Indonesia, ini memiliki arti ketika AHH semakin tinggi (umur rata-rata harapan hidup) maka akan mengurangi tingkat kemiskinan. Dimana AHH mencerminkan kualitas kesehatan meningkat, yang tentunya akan meningkatkan sumber daya manusia sehingga dengan kualitas sumber daya yang baik akan menyumbang pengurangan tingkat kemiskinan di suatu daerah serta berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi.

Dalam kurun waktu 12 (dua belas) tahun, pada 2010 – 2022 AHH Kabupaten Nagan Raya, seperti halnya AHH nasional dan provinsi, terus menunjukkan tren peningkatan, yang berkisar antara 68,17 (2010) – 69,45 (2022). Tetapi angka tersebut masih berada dibawah AHH Provinsi Aceh dan Nasional yang pada tahun 2022 masing-masing 70,18 dan 71,85. Pada tahun 2022 AHH Kabupaten Nagan Raya dengan angka 69,45 apabila dibandingkan dengan beberapa kabupaten tetangga relative lebih baik, seperti Kabupaten Aceh Barat (68,19), Aceh Tengah (69,05) dan Aceh Barat Daya (65,3).

Kecenderungan meningkatnya AHH Kabupaten Nagan Raya dalam kurun waktu 2010-2022, seiring dengan meningkatnya PDRB perkapita, rata-rata lama sekolah, akses dan pelayanan Kesehatan yang semakin baik, dan juga perilaku hidup bersih dan sehat pengetahuan penduduk terhadap kesehatan. Pendapatan yang digambarkan dalam pedapatan domestik regional bruto (PDRB), tingkat Pendidikan digambarkan dalam rata rata lama sekolah (RLS), dan gambaran fasilitas kesehatan dilihat dari jumlah dokter yang tersebar.



Gambar 3.10. Posisi Relatif Angka Harapan Hidup Kabupaten Nagan Raya dengan Daerah lain

3.2.2.4. Angka Kematian Neonatal (AKN)

Angka kematian neonatal adalah jumlah bayi (usia 0 – 28 hari) yang meninggal di suatu wilayah pada kurun waktu tertentu yang dinyatakan dalam 1000 kelahiran hidup pada waktu yang sama. Penyebab utama kematian pada Neonatal / Neonatus adalah asfiksia, bayi berat lahir rendah dan infeksi.

Tabel 3.20. Angka Kematian Neonatal per 1000 Kelahiran Hidup di Kabupaten Nagan Raya Tahun 2012-2022

No	Uraian	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1.	Jumlah Kematian Bayi (berumur kurang 1 bulan) pada satu tahun tertentu	10	24	50	35	43	23	31	30	37	38	48
2.	Jumlah Kelahiran Hidup	2.804	2.726	3.060	3.065	3.011	2.947	3.121	2.256	2.8282	2.734	2.714



PEMERINTAH KABUPATEN NAGAN RAYA
KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS (KLHS)
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD)

No	Uraian	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	pada satu tahun tertentu											
3	Angka Kematian Neonatal per 1000 kelahiran hidup	3.57	8.80	16.34	11.42	14.28	7.8	9.93	13.3	13.08	13.89	17.68

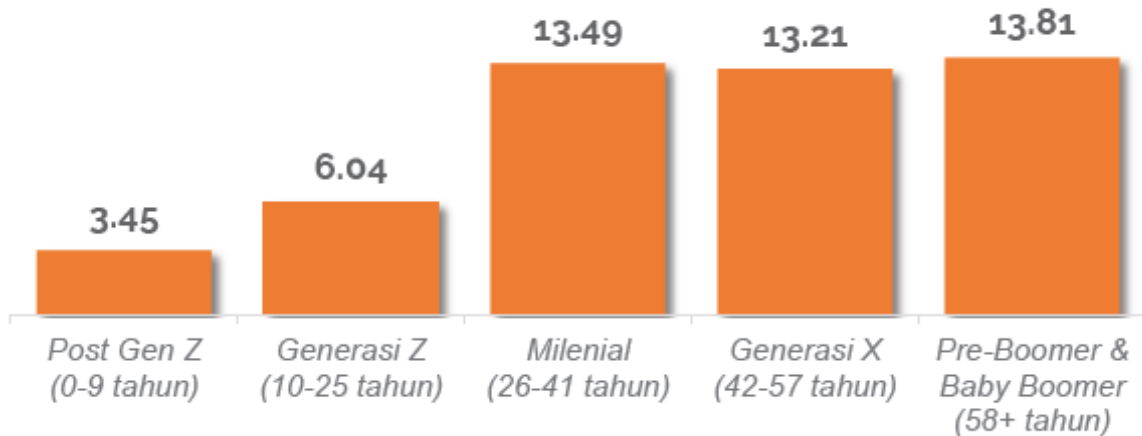
Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Nagan Raya Tahun 2022

Angka kematian neonatal per 1000 kelahiran hidup di Kabupaten Nagan Raya dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2022 terus mengalami peningkatan secara fluktuatif, pada 2012 angka kematian neonatal sebesar 3,57 jiwa dan merupakan angka terendah dalam kurun waktu sepuluh tahun terakhir. Dan pada tahun 2022 angka kematian neonatal adalah sebesar 17,68 jiwa, ini merupakan angka kematian neonatal tertinggi dalam kurun waktu sepuluh tahun terakhir. Terjadinya peningkatan angka kematian neonatal dalam kurun waktu lima tahun terakhir mengindikasikan adanya permasalahan dalam pelayanan pasca bersalin di Kabupaten Nagan Raya, untuk itu perlu dilakukan peningkatan pelayanan pasca bersalin baik terhadap bayi maupun terhadap ibu, dan mencari tahu penyebab lainnya yang mengakibatkan terus meningkatnya angka kematian neonatal di Kabupaten Nagan Raya.

3.2.3. Migrasi Penduduk

3.2.3.1. Migran Seumur Hidup Antar Kabupaten/Kota

Pada Tahun 2022 sekitar 9 dari 100 penduduk Nagan Raya lahir di luar Kabupaten Nagan Raya. Komposisi migran seumur hidup antar kabupaten/kota lebih dari setengah migran seumur hidup di Kabupaten Nagan Raya berjenis kelamin laki-laki (52,10%), dan sisanya perempuan (47,90%).



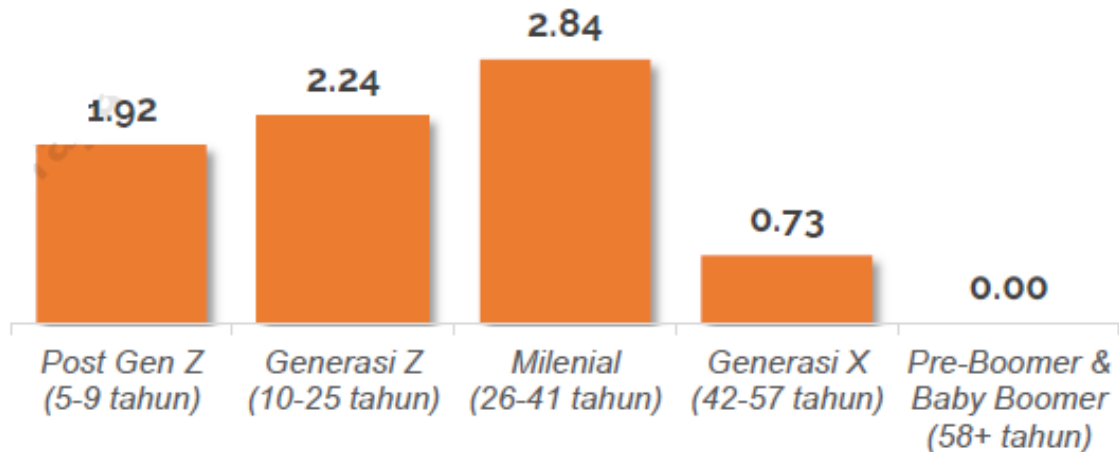
Sumber: Hasil long form Sensus Penduduk Nagan Raya 2023

Gambar 3.11. Proporsi Penduduk Berstatus Migran Seumur Hidup Antar Kab/Kota Menurut Generasi

Berdasarkan Gambar 3.11 menunjukkan bahwa proporsi penduduk berstatus migran seumur hidup pada generasi x dan generasi yang lebih muda lebih rendah daripada generasi pre-boomer dan baby boomer. Sebanyak sekitar 13 dari 100 penduduk pre-boomer dan baby boomer lahir di luar Kabupaten Nagan Raya.

3.2.3.2. Migran Risen Antar Kabupaten/Kota

Pada Tahun 2022, sekitar 1 dari 100 penduduk berumur 5 tahun ke atas di Nagan Raya bertempat tinggal di Kabupaten/Kota lain pada 5 tahun sebelumnya. Lebih dari setengah migran risen di Nagan Raya berjenis kelamin Perempuan 54,36% dan sisanya laki-laki 45,64%.



Sumber: Hasil long form Sensus Penduduk Nagan Raya 2023

Gambar 3.12. Proporsi Penduduk Berstatus Migran Risen Antar Kab/Kota Menurut Generasi

Berdasarkan Gambar 3.12 menunjukkan bahwa sebanyak lebih kurang 2 dari 100 penduduk generasi milenial di Nagan Raya merupakan migran risen. Generasi yang lebih muda (post gen z, generasi z, dan milenial) memperlihatkan proporsi migran risen lebih tinggi daripada generasi yang lebih tua (generasi x, pre-boomer, dan baby boomer).

3.3. Keuangan Daerah

3.3.1. Kinerja Capaian Keuangan Daerah

Kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Nagan Raya dapat dinilai dari sejauhmana realisasi dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah dalam pelaksanaan seluruh program dan non program serta kegiatan dalam APBK setiap tahunnya. Lingkup keuangan daerah itu sendiri sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 meliputi:

- Hak daerah untuk memungut pajak daerah dan retribusi daerah serta melakukan pinjaman;
- Kewajiban daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah dan membayar tagihan pihak ketiga;
- Penerimaan daerah;
- Pengeluaran daerah;
- Kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan daerah; dan



- f) Kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah daerah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan daerah dan/atau kepentingan umum.

3.3.2. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih yang meliputi semua penerimaan uang melalui rekening Kas Umum Daerah dan menambah ekuitas dana lancar, serta menjadi hak Daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh Pemerintah Daerah. Pendapatan dimaksud dikelompokkan ke dalam tiga komponen utama, yakni:

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang terdiri atas pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah;
2. Dana Perimbangan, yang terdiri dari atas dana bagi hasil pajak, dana bagi hasil bukan pajak (sumberdaya alam), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (non fisik/fisik); dan
3. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah, bersumber dari pendapatan hibah, dana darurat, bantuan dana kontigensi, dana bagi hasil provinsi, dana penyesuaian dan otonomi khusus serta bantuan keuangan dari provinsi.

Selama tahun 2021, jumlah pendapatan yang diterima Pemerintah Kabupaten Nagan Raya disajikan pada Tabel 3.21.

Tabel 3.21. Target dan Realisasi Pendapatan Kabupaten Nagan Raya Tahun 2021

No.	Uraian	Jumlah (dalam 000)		Capaian (%)
		Target	Realisasi	
1	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	100.132.542,9	96.135.476,2	96,01
	a. Pajak daerah	12.937.919,3	14.796.064,5	114,35
	b. Retribusi daerah	1.085.098,6	1.051.604,4	96,91
	c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	1.200.000,0	2.447.755,2	203,98
	d. Zakat/infaq/sedekah	7.363.000,0	6.760.839,7	91,82
	e. Lain-lain PAD yang sah	77.546.524,8	71.079.212,2	91,66
2 (a)	Pendapatan Transfer (Pemerintah Pusat)	959.671.646,9	954.162.662,0	99,43
	a. Dana perimbangan	663.408.208,4	661.319.226,3	99,68
	b. Dana insentif daerah	26.023.813,0	26.023.813,0	100,00
	c. Dana otonomi khusus	94.368.230,5	90.948.227,6	96,38



PEMERINTAH KABUPATEN NAGAN RAYA
KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS (KLHS)
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD)

No.	Uraian	Jumlah (dalam 000)		Capaian (%)
		Target	Realisasi	
	dan tambahan infrastruktur			
	d. Dana desa	175.871.395,0	175.871.395,0	100,00
2 (b)	Pendapatan Transfer (Antardaerah)	63.376.495,8	29.233.056,6	46,26
3	Pendapatan daerah yang sah	20.654.085,2	20.523.088,0	99,37
	Jumlah pendapatan	1.141.577.293,1	1.100.054.282,8	96,36

Sumber: BKPD Nagan Raya, 2022

Dari Tabel 3.21 di atas dapat dilihat bahwa pendapatan yang diterima Pemerintah Kabupaten Nagan Raya bersumber dari PAD (pendapatan asli daerah), pendapatan dalam bentuk transfer (dari pusat dan antar daerah), serta pendapatan daerah yang sah. PAD itu sendiri bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, zakat/infaq/sedekah, dan dari lain-lain PAD yang sah. Target dana insentif daerah sebanyak

Pada tahun 2021, sumber pendapatan yang berasal dari PAD mampu direalisasikan sebesar 96,01 persen dari yang ditargetkan, yaitu sebesar Rp 96.135.476,2 ribu. Artinya, terdapat sebesar Rp 3.997.066 ribu lagi yang tidak terealisasi. Dari komponen PAD, sumber dari pajak daerah mengalami kenaikan penerimaan yang melampaui target, yaitu dicapai 114,35 persen. Demikian pula dengan sumber dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, juga naik sangat signifikan hampir mencapai 204,00 persen. Sementara, komponen PAD retribusi daerah hanya terealisasi sebesar 96,91 persen.

Untuk pendapatan daerah yang bersumber dari transfer pemerintah pusat berupa dana perimbangan, dana insentif daerah, dan dana otonomi khusus, serta dana desa secara keseluruhan terealisasi hampir sepenuhnya, yakni 99,43 persen. Dana perimbangan, misalnya, mampu direalisasi sebesar 99,68 persen (Rp 954.162.662,0 ribu dari Rp 959.671.646,9 ribu yang ditargetkan).

Dana insentif daerah sebesar 26.023.813,0 ribu sepenuhnya (100 persen) dapat direalisasikan sesuai dengan target. Begitu pula dengan jumlah penerimaan dana desa, mampu



PEMERINTAH KABUPATEN NAGAN RAYA
KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS (KLHS)
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD)

teralisasi sebesar 100,0 persen (Rp 175.871.395,0 ribu). Sedangkan untuk penerimaan yang bersumber dari dana otonomi khusus hanya terealisasi 96,38 persen, atau hanya sebesar Rp 90.948.227,6 ribu dari Rp 94.368.230,5 ribu yang ditargetkan.

Pendapatan yang bersumber dari transfer antar daerah pada tahun 2021 terealisasi relatif minim, yaitu hanya 46,26 persen atau sekitar Rp 29.233.056,6 ribu dari yang ditargetkan sebesar Rp 63.376.495,8. Terakhir, pendapatan daerah yang sah terealisasi sebesar Rp 20.523.088,0, atau sekitar 99,37 persen dari yang ditargetkan (Rp 20.654.085,2).

Untuk tahun 2022, besaran pendapatan Kabupaten Nagan Raya direncanakan mengalami kenaikan dalam semua sumber pendapatan seperti disajikan pada Tabel 3.2, yaitu sekitar Rp 1.145.834.771,0 ribu, naik 0,37 persen, sedikit lebih besar dibanding pendapatan tahun 2021 (yang sebesar Rp 1.141.577.293,1 ribu). Terlihat bahwa jumlah penerimaan PAD Kabupaten Nagan Raya pada tahun 2022 diperkirakan dapat dicapai sebesar Rp 97.577.293,1 ribu. Penyumbang terbesar PAD bersumber dari pajak daerah dan lain-lain pendapatan yang sah. Pajak daerah diperkirakan dapat menyumbang sebesar Rp 20.312.887,5 ribu, sementara penerimaan dari komponen lain-lain pendapatan yang sah dapat menghasilkan sekitar Rp 68.107.212,5 ribu.

Dari seluruh komponen pendapatan transfer dari pemerintah pusat ditargetkan dapat diperoleh sebesar Rp 986.934.976,9 ribu. Pos penerimaan tersebar berasal dari dana perimbangan, yakni sebesar Rp 700.628.551,6 ribu, kemudian diikuti oleh penerimaan dari dana otonomi khusus dan tambahan infrastruktur sebesar Rp 88.637.484,5 ribu. Pos penerimaan berupa dana desa juga berkontribusi signifikan dalam pendapatan daerah, yaitu mencapai Rp 175.871.395,0 ribu.

Selanjutnya, untuk pos pendapatan transfer antardaerah ditargetkan diperoleh sebesar Rp 57.026.949,6 ribu, atau lebih sedikit dibanding tahun sebelumnya (Rp 63.376.495,8 ribu). Terakhir, penerimaan yang bersumber dari pendapatan daerah yang sah untuk tahun 2022 tidak ditargetkan penerimaannya, sedangkan tahun 2021 lalu pos ini menerima sekitar Rp 20.523.088,0 ribu.

Realisasi pendapatan dari seluruh pos penerimaan ini hingga disusunnya dokumen Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Nagan Raya Tahun 2023-2026 masih relatif minim,



PEMERINTAH KABUPATEN NAGAN RAYA
KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS (KLHS)
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD)

yaitu hanya sekitar 3,43 persen. Hal ini terjadi karena pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan masih pada masa awal tahun anggaran.

Tabel 3.22. berikut menyajikan target dan realisasi pendapatan Kabupaten Nagan Raya pada tahun 2022.

Tabel 3.22. Target dan Realisasi Pendapatan Kabupaten Nagan Raya Tahun 2022

No.	Uraian	Jumlah (dalam 000)		Capaian (%)
		Target	Realisasi ¹⁾	
1	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	97.577.293,1	152.404,6	0,16
	a. Pajak daerah	20.312.887,5	136.774,6	0,67
	b. Retribusi daerah	1.520.857,6	15.630,0	1,03
	c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	3.107.626,0	-	-
	d. Zakat/infaq/sedekah	4.566.782,7	-	-
	e. Lain-lain PAD yang sah	68.107.212,5	-	-
2 (a)	Pendapatan Transfer (Pemerintah Pusat)	986.934.976,9	39.117.825,0	3,96
	a. Dana perimbangan			
	b. Dana insentif daerah	700.628.551,6	39.117.825,0	5,58
	c. Dana otonomi khusus dan tambahan infrastruktur	21.797.545,7	-	-
		88.637.484,5	-	-
	d. Dana desa	175.871.395,0	-	-
2 (b)	Pendapatan Transfer (Antardaerah)	57.026.949,6	-	-
3	Pendapatan daerah yang sah	-	-	-
	Jumlah pendapatan	1.145.834.771,0	39.270.229,6	3,43

Sumber: BKPD Kabupaten Nagan Raya, 2022



¹⁾. Angka capaian sementara.

Dilihat dari proporsi pendapatan yang selama ini diterima oleh Pemerintah Kabupaten Nagan Raya sebagian besar bersumber dari pos dana perimbangan. Pos ini rata-rata berkontribusi sebesar 60,79 persen terhadap pendapatan daerah, kemudian disusul oleh pos Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah dengan kontribusi rata-rata sebesar 31,15 persen. Terakhir, pos PAD dengan kontribusi rata-rata sebesar 8,06 persen selama kurun waktu 2017-2019. Tabel 3.23 berikut menyajikan kontribusi dari masing-masing pos penerimaan daerah Kabupaten Nagan Raya.

Tabel 3.23. Proporsi Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Nagan Raya Tahun 2017-2019

Jenis Penerimaan	Tahun (%)			
	2017	2018	2019	Rata-rata
Pendapatan Asli Daerah	6,50	9,89	7,79	8,06
Dana Perimbangan	54,56	67,97	59,84	60,79
Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah	38,94	22,14	32,37	31,15
Total	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Kab. Nagan Raya Tahun 2017-2019 (*audited*) BPKD Kabupaten Nagan Raya.

3.3.3. Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahun 2021-2022

3.3.3.1. Pendapatan Kabupaten Nagan Raya Tahun 2021-2022

Capaian Kinerja Keuangan ada dua tabel yang disajikan yaitu capaian kinerja keuangan selama kurun waktu tahun 2018-2020 dan capaian kinerja keuangan tahun 2021-2022, hal dikarenakan ada nomenklatur yang berbeda atas perubahan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan negara dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Pendapat Kabupaten Nagan Raya Tahun 2021 sebesar Rp1.100.054.282.888,30 dari target Rp1.145.834.771.001,00 dengan persentase capaian cukup baik sebesar 96 %. Pendapatan tersebut terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer, dan Pendapatan Daerah Yang Sah.



PEMERINTAH KABUPATEN NAGAN RAYA
KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS (KLHS)
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD)

Pendapatan Asli Daerah (PAD) Rp96.135.476.225,30 mendekati target PP 100.132.542.939,00 dengan persentase mencapai 96%. Kemudian Pajak Daerah dari target Rp12.937.919.380,00 dapat direalisasikan melebihi dari target yaitu sebesar Rp 14.796.064.566,00 dengan capaian persentase 114%. Retribusi daerah juga sudah baik realisasi mendekati target yaitu Rp1.051.604.400,00 dari target Rp1.085.098.683,00 dengan persentasi mencapai 97%. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan dari target Rp1.200.000.000,00 dapat dicapai sangat baik melebihi jauh dari target yaitu sebesar Rp2.447.755.261,00 dengan pencapaian persentase sampai 204%. Pendapatan yang bersumber dari Zakat/Infaq/Sadaqah masih belum tercapai sesuai target Rp7.363.000.000,00 dengan realiasi Rp 6.760.839.742,00 dengan persentase 92%. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah juga belum tercapai sesuai target realisasinya sebesar Rp71.079.212.256,30 dari target Rp77.546.524.876,00 setara 92%.

Target dan Realisasi Pendapatan Kabupaten Nagan Raya pada tahun 2021 dan tahun 2022 dapat dilihat pada tabel 3.24 sebagai berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN NAGAN RAYA
KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS (KLHS)
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD)

Tabel 3.24. Target Realisasi Pendapatan Kabupaten Nagan Raya Tahun 2021-2022

No	Uraian	Tahun			Capaian (%)	Capaian RPJMK Saat Ini (2021)
		Target		Realisasi		
		2021	2022	2021		
1	PENDAPATAN	1.145.834.771.001,00	1.141.577.293.137,56	1.100.054.282.888,30	96	
1,1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	100.132.542.939,00	97.615.366.579,67	96.135.476.225,30	96	Realisasi mendekati target
1.1.1	Pajak Daerah	12.937.919.380,00	20.312.887.561,20	14.796.064.566,00	114	Sudah Tercapai
1.1.2	Retribusi daerah	1.085.098.683,00	1.520.857.687,89	1.051.604.400,00	97	Realisasi mendekati target
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	1.200.000.000,00	3.107.626.057,04	2.447.755.261,00	204	Sudah Tercapai
1.1.4	Zakat/Infaq/Sadaqah	7.363.000.000,00	4.566.782.704,53	6.760.839.742,00	92	Belum tercapai sesuai target
1.1.5	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	77.546.524.876,00	68.107.212.569,01	71.079.212.256,30	92	Belum tercapai sesuai target
1,2	PENDAPATAN TRANSFER	1.045.702.228.062,00	1.043.961.926.557,89	1.003.918.806.663,00	96	
1.2.1	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	959.671.646.957,00	986.934.976.893,59	954.162.662.034,00	99	
1.2.1.1	Dana Perimbangan	663.408.208.438,00	700.628.551.649,51	661.319.226.353,00	100	
1.2.1.1.1	Dana Bagi Hasil Pajak	22.127.926.173,00	9.171.894.117,91	28.098.761.913,00	127	Sudah Tercapai
1.2.1.1.2	Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (SDA)	8.328.905.265,00	3.369.379.432,00	9.091.687.565,00	109	Sudah Tercapai
1.2.1.1.3	Dana Alokasi Umum	477.108.051.000,00	493.093.267.078,50	477.108.051.000	100	Sudah Tercapai



PEMERINTAH KABUPATEN NAGAN RAYA
KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS (KLHS)
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD)

No	Uraian	Tahun			Capaian (%)	Capaian RPJMK Saat Ini (2021)
		Target		Realisasi		
		2021	2022	2021		
1.2.1.1.4	Dana Alokasi Khusus (Fisik)	88.666.040.000,00	90.892.531.586,61	85.916.660.975,00	97	Realisasi mendekati target
1.2.1.1.5	Dana Alokasi Khusus (Non Fisik)	67.177.286.000,00	104.101.479.434,49	61.104.064.900,00	91	Belum tercapai sesuai target
1.2.1.2	Dana Insentif Daerah (DID)	26.023.813.000,00	21.797.545.768,80	26.023.813.000,00	100	Sudah Tercapai
1.2.1.3	Dana Otonomi Khusus dan Tambahan Infrastruktur	94.368.230.519,00	88.637.484.475,28	90.948.227.681,00	96	Realisasi mendekati target
1.2.1.4	Dana Desa (DD)	175.871.395.000,00	175.871.395.000,00	175.871.395.000,00	100	Sudah Tercapai
1.2.2	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	65.376.495.840,00	57.026.949.664,30	29.233.056.629,00	45	
1.2.2.1	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	65.376.495.840,00	32.026.949.664,30	29.233.056.629	45	Belum tercapai sesuai target
1.2.2.2	Bantuan Keuangan Umum dari Pemerintah Provinsi	0,00	25.000.000.000,00			
1.3	PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	20.654.085.265,00	-	20.523.088.000,00	99	Realisasi mendekati target
1.3.1	Lain-lain Pendapatan sesuai ketentuan peraturan Perundang-undangan	20.654.085.265,00	0,00	20.523.088.000,00	99	
1.3.2	Lain-lain Pendapatan	0,00	0,00			
	JUMLAH PENDAPATAN	1.145.834.771.001,00	1.141.577.293.137,56	1.100.054.282.888,30	96	



Pemerintah Nagan Raya mendapatkan pendapatan transfer pada tahun 2021 sebesar Rp1.003.918.806.663,00 dari target perkiraan Rp1.045.702.228.062,00, setara dengan 96%, Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat mencapai 99% yaitu Rp954.162.662.034,00 dari target Rp959.671.646.957,00. Pendapatan transfer tersebut terdiri dari Dana Perimbangan sebesar Rp663.408.208.438,00 dari target Rp661.319.226.353,00, Dana Bagi Hasil Pajak dari pajak cukup baik melebihi dari target sebesar 127% yaitu sebesar Rp28.098.761.913,00 dari target Rp22.127.926.173,00. Sementara Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (SDA) juga cukup baik melebihi dari target yang realisasinya sebesar Rp9.091.687.565,00 dari target Rp8.328.905.265,00, setara dengan 109 %. Dana Alokasi Umum Kabupaten Nagan Raya mendapatkan sebesar Rp477.108.051.000,0 sesuai target Rp477.108.051.000. Dana Alokasi Khusus (Fisik) mendapat Rp85.916.660.975,00 dari target Rp 88.666.040.000,00, sementara Dana Alokasi Khusus (Non Fisik) dari target Rp67.177.286.000,00 mendapatkan Rp61.104.064.900,00 dengan persentase 91%. Dana Insentif Daerah (DID) Rp26.023.813.000,00 yang teralisasi mencapai Rp26.023.813.000,00, tercapai sesuai target yaitu 100%.

3.3.3.2. Belanja Kabupaten Nagan Raya Tahun 2021-2022

Target dan Realisasi Belanja Kabupaten Nagan Raya pada tahun 2021 dan tahun 2022 dapat dilihat pada tabel 3.25 sebagai berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN NAGAN RAYA
KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS (KLHS)
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD)

Tabel 3.25. Target dan Realisasi Belanja Kabupaten Nagan Raya 2021-2022

No	Uraian	Tahun			Capaian (%)	Capaian RPJMK Saat Ini (2021)
		Target		Realisasi		
		2021	2022	2021		
2	BELANJA	1.161.617.567.317,00	1.147.577.293.137,56	1.085.183.932.744,32	93	
2,1	BELANJA OPERASI:	683.330.273.699,00	568.397.700.659,73	631.918.131.022,01	92	
2.1.1	Belanja Pegawai	349.258.696.335,00	388.951.245.128,16	341.459.718.686,81	98	Realisasi mendekati target
2.1.2	Belanja Barang dan Jasa	317.985.219.004,00	170.721.321.446,12	276.291.912.840,20	87	Belum tercapai sesuai target
2.1.3	Belanja Subsidi	-	0,00	-		
2.1.4	Belanja Hibah	5.153.161.080,00	1.210.638.199,29	4.348.806.915,00	84	Belum tercapai sesuai target
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial	10.933.197.280,00	7.514.495.886,16	9.817.692.580,00	90	Belum tercapai sesuai target
2,2	BELANJA MODAL	231.338.885.193,00	333.880.871.347,07	222.646.463.547,31	96	Belum tercapai sesuai target
2,3	BELANJA TIDAK TERDUGA	6.525.000.000,00	2.511.053.484,36	3.931.761.000,00	60	Belum tercapai sesuai target
2,4	BELANJA TRANSFER:	240.423.408.425,00	242.787.667.646,40	226.687.577.175,00	94	
2.4.1	Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	2.911.653.813,00	3.697.303.534,40	1.579.482.150,00	54	Belum tercapai sesuai target
2.4.2	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kab./Kota dan Pemerintah Daerah Lainnya	237.511.754.612,00	239.090.364.112,00	225.108.095.025,00	95	Realisasi mendekati target
	JUMLAH BELANJA	1.161.617.567.317,00	1.147.577.293.137,56	1.085.183.932.744,32	93	
	SURPLUS (DEFISIT)	15.782.796.316,00	6.000.000.000,00	-14.870.350.143,98	-94	Belum tercapai sesuai target



Berdasarkan tabel 3.25 di atas dapat disampaikan bahwa Belanja Kabupaten Nagan Raya pada tahun 2021 dapat terealisasi sebesar Rp1.085.183.932.744,32 dari target Rp1.161.617.567.317,00, Belanja tersebut terdiri dari Belanja Operasi Rp 631.918.131.022,01 dari target Rp683.330.273.699,00, Belanja Pegawai Rp341.459.718.686,81 dari target 349.258.696.335,00, Belanja Barang dan Jasa Rp 276.291.912.840,20 dari target Rp317.985.219.004,00, Belanja Subsidi Rp0, Belanja Hibah Rp4.348.806.915,00 dari target Rp5.153.161.080,00, dan Belanja Bantuan Sosial Rp9.817.692.580,00 dari target Rp10.933.197.280,00.

Sedangkan belanja modal dapat direalisasikan sebesar Rp222.646.463.547,31 dari target 231.338.885.193,00, Belanja tidak terduga Rp3.931.761.000,00 dari target Rp6.525.000.000,00, belanja transfer Rp226.687.577.175,00 dari target Rp 240.423.408.425,00, Belanja bagi hasil kepada provinsi/kabupaten/kota dan pemerintah desa Rp1.579.482.150,00 dari target Rp2.911.653.813,00, belanja bantuan keuangan kepada provinsi/kab./kota dan pemerintah daerah lainnya Rp 225.108.095.025,00 Rp 237.511.754.612,00. Kabupaten Nagan Raya mengalami surplus (defisit) Rp-14.870.350.143,98 dari target Rp 15.782.796.316,00.

3.3.3.3. Pembiayaan Kabupaten Nagan Raya Tahun 2021-2022

Pembiayaan Kabupaten Nagan Raya Tahun 2021 dari penerimaan pembiayaan sebesar Rp16.782.796.316,34 dari target sebelumnya sebesar Rp16.782.796.316,00, penerimaan pembiayaan bersumber dari SILPA Tahun Anggaran sebelumnya yaitu sebesar Rp16.782.796.316,34. Target dan Realisasi Pembiayaan Kabupaten Nagan Raya pada tahun 2021-2022 dapat dilihat pada tabel 3.26 sebagai berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN NAGAN RAYA
KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS (KLHS)
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD)

Tabel 3.26. Target Realisasi Pembiayaan Kabupaten Nagan Raya Tahun 2021-2022

No	Uraian	Tahun			Capaian (%)	Capaian RPJMK Saat Ini (2021)
		Target		Realisasi		
		2021	2022	2021		
3	PEMBIAYAAN					
3,1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	16.782.796.316,00	6.000.000.000,00	16.782.796.316,34	100	Sudah Tercapai
3.1.1	SILPA Tahun Anggaran Sebelumnya	16.782.796.316,00	6.000.000.000,00	16.782.796.316,34	100	
3,2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	0,00	0,00			
3.2.1	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	1.000.000.000,00	0,00	1.000.000.000,00	100	Sudah Tercapai
	PEMBIAYAAN NETO	0,00	0,00			
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	0,00			



3.4. Profil Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup

Berdasarkan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup (DDDTLH), maka jasa ekosistem penyediaan merupakan barang yang dihasilkan oleh ekosistem dan dimanfaatkan secara langsung oleh manusia. Jasa ini dapat dibedakan atas (1) jasa penyediaan pangan, (2) jasa penyediaan air bersih, (3) Jasa Pengaturan Pencegahan dan Perlindungan dari Bencana Alam, (4) Jasa penyediaan Biodiversitas (Perlindungan Plasma Nutfah).

3.4.1. Ambang Batas dan Status DDDTLH Penyedia Pangan

Daya dukung lingkungan terhadap penyediaan pangan di Kabupaten Nagan Raya tergolong bervariasi mulai sangat tinggi hingga sangat rendah, dengan sebaran diberbagai sebaran dalam 6 ekoregion yang terdapat di Kabupaten Nagan Raya untuk setiap kategori. Ekoregion yang memberikan daya dukung jasa penyediaan pangan dengan kategori sedang adalah yang dominan/tertinggi yaitu 180.247,49 Ha (50,85%), pada ekoregion pegunungan lipatan dan dataran aluvial yang dominan, kategori sangat tinggi seluas 109.028, 53 Ha (30,76%) pada ekoregion dataran aluvial dan lahan gambut kemudian tinggi seluas 62.035,68 Ha (17,50%), selebihnya adalah kategori sangat rendah yang didominasi ekoregionnya adalah didataran alluvial (Tabel 3.27). Hal ini dapat dipahami karena sebagian besar topografi Kabupaten Aceh Nagan Raya merupakan wilayah dataran alluvial hingga pegunungan dibagian utara dan timur. Daya dukung jasa pangan yang sangat rendah terjadi hampir semua ekoregion meskipun jumlah sedikit kecuali di ekoregion Fluvimarin. Oleh karena luas untuk kategori sedang sangat tinggi dan tinggi didominasi pada dataran alluvial dan lahan gambut, maka belum perlu menintervensi teknologi (inovasi) pada ekoregion yang berdaya dukung sangat rendah, karena jumlahnya hanya sebagian kecil saja (kurang dari satu persen (0.87%).

Tabel 3.27. Daya Dukung Jasa Penyediaan Pangan Kabupaten Nagan Raya menurut Ekoregion, 2019

Nama Ekoregion	Kelas DDDTLH				Total
	1. SANGAT TINGGI	2. TINGGI	3. SEDANG	4. SANGAT RENDAH	
Dataran Aluvial	66.584,30	51.636,85	27.658,02	2.797,30	148.676,48
Dataran Fluvimarin	38,49				38,49
Lahan Gambut (Peat Land)	42.405,73	4.312,45	2.327,25	67,97	49.113,42
Pegunungan Lipatan		4.782,47	146.983,54	49,84	151.815,87
Perbukitan Lipatan		1.159,44	3.118,71	77,66	4.355,82



PEMERINTAH KABUPATEN NAGAN RAYA
KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS (KLHS)
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD)

Perbukitan Patahan		144,44	159,95	98,26	402,66
Total	109.028,53	62.035,68	180.247,49	3.091,05	354.402,76
	30.76%	17.50%	50.86%	0.87%	100.00%

Sumber: Dokumen Daya Dukung Dan Daya Tampung Kabupaten Nagan Raya Tahun 2019

Berdasarkan tutupan lahan, maka lahan diusahakan, pertanian lahan kering dan hutan tanaman, pemukiman dan tubuh air adalah jenis tutupan lahan yang memberikan kontribusi terbesar terhadap daya dukung jasa penyediaan pangan di Kabupaten Nagan Raya, dengan luas lahan mencapai 180.247,49 ha adalah pada kategori sedang. Sebaliknya, daya dukung sangat rendah terhadap penyediaan pangan dominan terjadi pada pertambangan seperti terlihat pada Tabel 3.28. Hutan tanaman dan lahan diusahakan memberikan daya dukung yang kategori sedang. Untuk meningkatkan penyediaan pangan kedepan, yang perlu dilakukan adalah meningkatkan intensifikasi pada tambak yang masih belum terlihat signifikan dan juga pertanian lahan kering, dan menambah inovasi teknologi budidaya pertanian.

Tabel 3.28. Daya Dukung Jasa Penyediaan Pangan Kabupaten Nagan Raya menurut Tutupan Lahan, 2019

Penutupan Lahan	Kelas DDDTLH				Total
	1. Sangat Tinggi	2. Tinggi	3. Sedang	4. Sangat Rendah	
Hutan Lahan Tinggi	2.990,80	1.751,88			4.742,69
Hutan Tanaman	7.770,32	3.536,39	129.746,90		141.053,62
Lahan Diusahakan	47.666,36		50.500,59		98.166,95
Lahan Terbuka		314,44			314,44
Permukiman		7.582,90		1.788,66	9.371,57
Pertambangan		64,82		1.302,38	1.367,20
Pertanian Lahan Kering	42.765,21	45.164,65			87.929,86
Tambak		412,57			412,57
Tubuh Air	7.835,82	3.207,99			11.043,81
Total	109.028,53	62.035,68	180.247,49	3.091,05	354.402,76

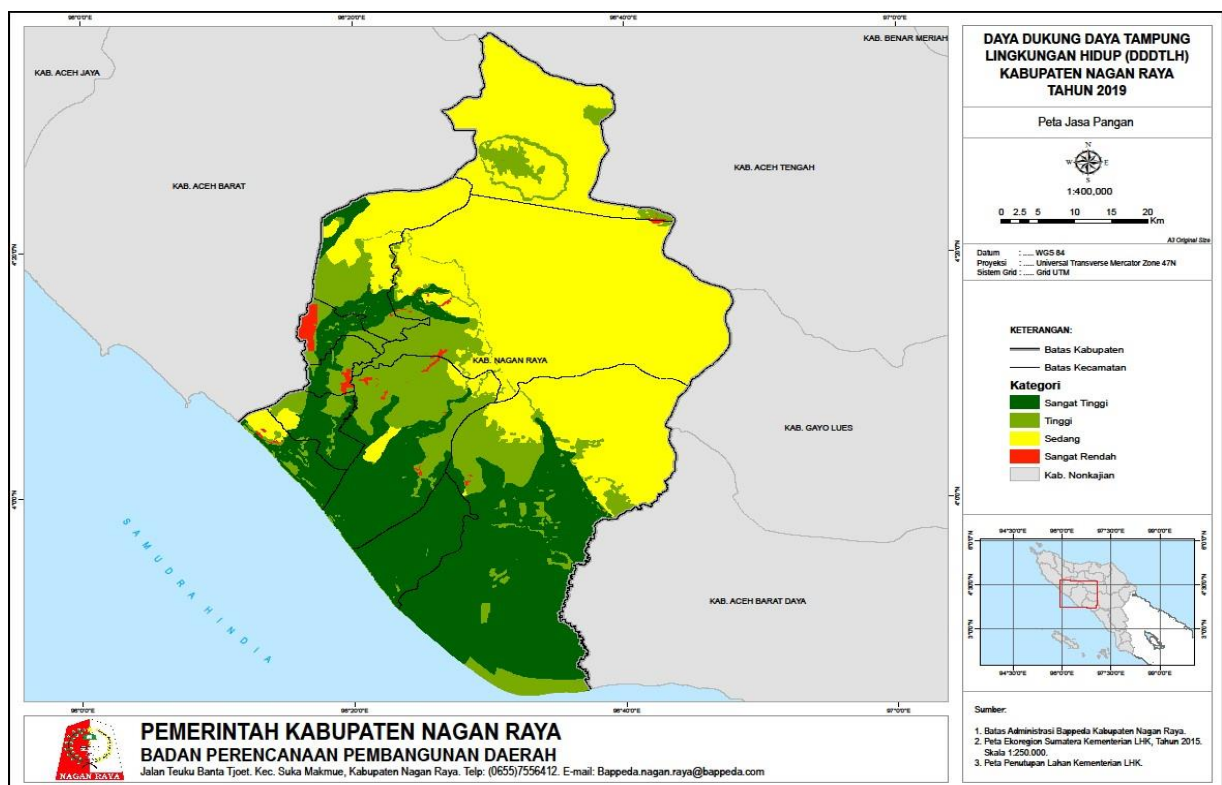
Sumber: Dokumen Daya Dukung Dan Daya Tampung Kabupaten Nagan Raya Tahun 2019

Daya dukung jasa penyediaan pangan tersebar di sebagian besar kecamatan yang ada di Kabupaten Nagan Raya, walaupun dengan luasan lahan yang bervariasi. Daya dukung tertinggi dominan berada di Kecamatan Darul Makmue, Kecamatan Tadu Raya, dan Kecamatan Tripa Makmur. Sebaliknya daya dukung terendah atau sangat rendah terjadi di Kecamatan Kuala, Kuala Pesisir, dan Seunagan Timur seperti yang terlihat pada Tabel 3.29.

Tabel 3.29. Daya Dukung Jasa Penyediaan Pangan Kabupaten Nagan Raya menurut Kecamatan, 2019

Kecamatan	Kelas DDDTLH				Total
	1. Sangat Tinggi	2. Tinggi	3. Sedang	4. Sangat Rendah	
Beutong	1.810,94	8.358,90	91.250,49	311,10	101731,4389
Beutong Ateuh	-	4.015,71	36.413,12	163,10	40.591,94
Banggalang					
Darul Makmur	56.936,60	16.714,65	33.921,74	64,39	107.637,40
Kuala	5.215,14	2.716,53	824,13	49,93	8.805,75
Kuala Pesisir	4.732,62	1.229,64	1.582,31	67,97	7.612,56
Seunagan	1.942,79	2.403,66	0,30	1.326,52	5.673,28
Seunagan Timur	4.346,31	7.299,15	13.445,54	70,01	25.161,02
Suka Makmue	1.545,17	3.115,76	-	495,36	5.156,31
Tadu Raya	18.795,44	15.856,45	2.807,83	542,63	38.002,36
Tripa Makmur	13.703,47	325,18	1,99	-	14.030,65
Total	109.028,53	62.035,68	180.247,49	3.091,05	354.402,76

Sumber : Dokumen Daya Dukung Dan Daya Tampung Kabupaten Nagan Raya Tahun 2019



Gambar 3.13. Peta Daya Dukung dan Daya Tampung Penyediaan Pangan di Kabupaten Nagan Raya

3.4.2. Ambang Batas dan Status Penyedia Air Bersih

Air bersih merupakan kebutuhan pokok manusia dan makhluk hidup lainnya. Ketersediaan air bersih menjadi faktor pembatas pembangunan dan pengembangan suatu wilayah. Kebutuhan air bersih tidak hanya untuk kebutuhan konsumsi namun lebih luas untuk keperluan industri dan investasi lainnya. Sebagai suatu daerah dataran rendah hingga sedang, daya dukung jasa penyediaan air bersih di Kabupaten Nagan Raya dinilai mencukupi. Namun, ketersediaan air bersih ini perlu dijaga agar *sustainable* dengan cara melestarikan sumber-sumber air yang ada; antara lain menjaga kelestarian hutan di daerah hulu dan daerah resapan air, dan daerah tampungan air seperti rawa dan gambung sebagai buffer cadangan air yang tersimpan pada lahan gambut. Dari Tabel 3.30 terlihat bahwa ekoregion pegunungan lipatan memiliki daya dukung yang terbesar namun kategori sedang terhadap penyediaan air bersih. Sebaliknya, daya dukung yang sangat rendah dominan terjadi hampir disemua ekoregion. Ekoregion dengan daya dukung sedang mendominasi dan terjadi di pegunungan lipatan, dengan luas lahannya 122.780,85 ha. Hal ini mudah dipahami karena dengan gravitasi bumi, air mengalir mencari dataran rendah, seperti dataran alluvial dan lahan gambut. Ekoregion lainnya yang berpotensi sebagai penyedia air bersih adalah dataran alluvial.

Tabel 3.30. Daya Dukung Jasa Penyediaan Air Bersih Kabupaten Nagan Raya menurut Ekoregion, 2019

Nama Ekoregion	Kelas DDDTLH					Total
	1.Sangat Tinggi	2. Tinggi	3. Sedang	4. Rendah	5. Sangat Rendah	
Dataran Aluvial	10.324,47	68.182,34	40.036,42		30.133,23	148.676,48
Dataran Fluviomarin	38,36	0,13				38,49
Lahan Gambut (Peat Land)	11.770,50	34.595,68	351,99		2.395,23	49.113,42
Pegunungan Lipatan		5.951,56	122.780,85	2.820,46	20.262,99	151.815,87
Perbukitan Lipatan		2.541,58	1.159,44		654,78	4.355,82
Perbukitan Patahan		118,34	138,92		145,39	402,66
Total	22.133,34	111.389,65	164.467,65	2.820,46	53.591,64	354.402,76

Sumber : Dokumen Daya Dukung Dan Daya Tampung Kabupaten Nagan Raya Tahun 2019

Berdasarkan tutupan lahan/liputan lahan, tutupan lahan hutan tanaman dan lahan diusahakan menyediakan daya dukung yang sangat tinggi dan tinggi terhadap penyediaan air



PEMERINTAH KABUPATEN NAGAN RAYA
KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS (KLHS)
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD)

bersih. Daya dukung sangat rendah terjadi di lahan yang diusahakan dan pemukiman seperti yang terlihat pada Tabel 3.31. Daya dukung kategori sedang terjadi di tutupan lahan diusahakan, sedangkan daya dukung rendah tidak ditemukan dalam ekoregion di Kabupaten Nagan Raya. Kedepan perlu adanya upaya peningkatan pengelolaan sumberdaya hutan (primer dan sekunder) yang lebih baik agar menjamin penyediaan air bersih di masa yang akan datang. Peran dan kapasitas lembaga adat seperti pawang uteun perlu ditingkatkan dan juga pengawasan serta penertiban kasus *illegal logging* dan sistem pertanian yang baik perlu dipertahankan, karena secara umum dominasi adalah ditutupi lahan yang diusahakan.

Tabel 3.31. Daya Dukung Jasa Penyediaan Air Bersih Kabupaten Nagan Raya menurut Tutupan Lahan, 2019

Penutupan Lahan	Kelas DDDTLH					Total
	1. Sangat Tinggi	2. Tinggi	3. Sedang	4. Rendah	5. Sangat Rendah	
Hutan Lahan Tinggi	2.990,80	1.751,88				4.742,69
Hutan Tanaman	11.306,71 3	8.316,55	121.430,34			141.053,62
Lahan Diusahakan		47.666,36			50.500,59	98.166,95
Lahan Terbuka		136,84	177,59			314,44
Permukiman		7.067,38	515,52		1.788,66	9.371,57
Pertambangan		64,82			1.302,38	1.367,20
Pertanian Lahan Kering		42.765,21	42.344,18	2.820,46		87.929,86
Tambak		412,57				412,57
Tubuh Air	7.835,82	3.207,99				11.043,81
Grand Total	22.133,34	111.389,65	164.467,65	2.820,46	53.591,64	354.402,76

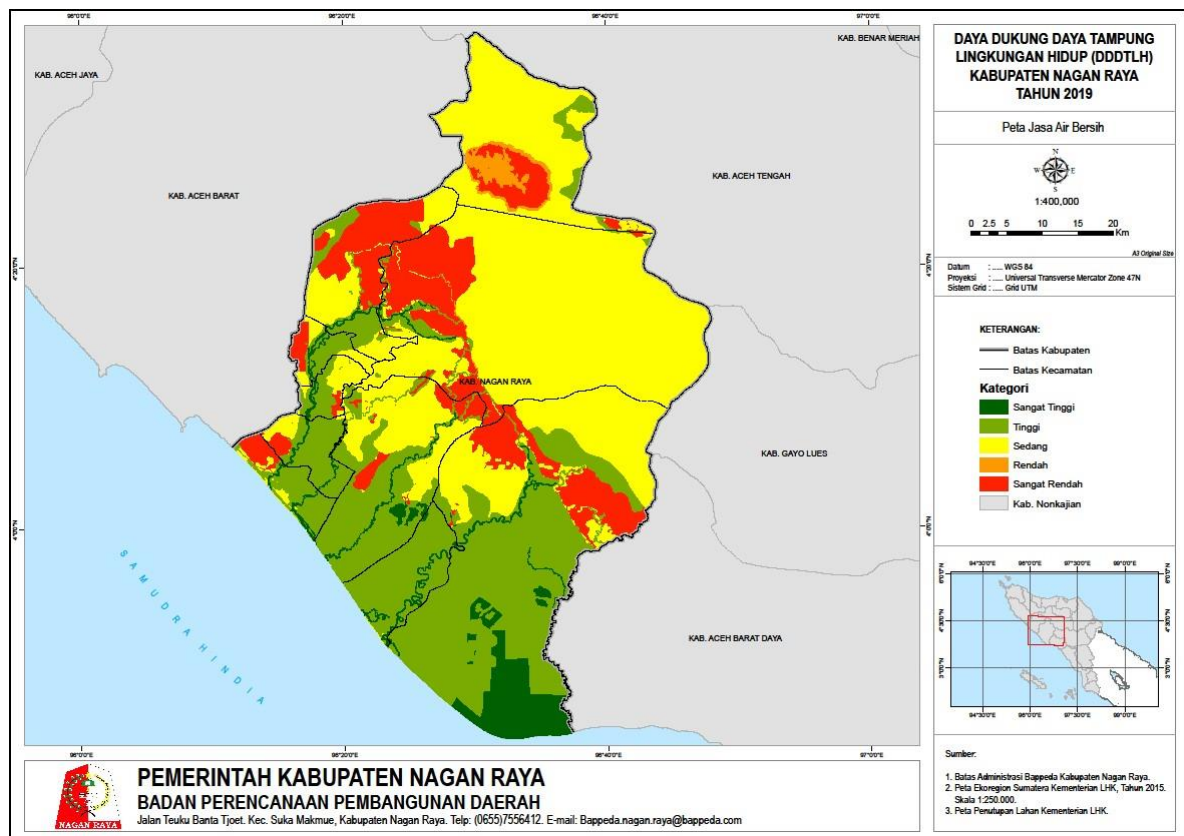
Sumber : Dokumen Daya Dukung Dan Daya Tampung Kabupaten Nagan Raya Tahun 2019

Dari tabel daya dukung berdasarkan kecamatan (Tabel 3.32) terlihat bahwa sebagian besar kecamatan di Kabupaten Nagan Raya memiliki daya dukung sedang, tinggi, sangat rendah, sangat tinggi dan rendah secara berurutan dari sisi luar secara total untuk semua kategori ekoregion terhadap jasa penyediaan air bersih. Hanya beberapa kecamatan saja yang memiliki daya dukung rendah seperti Beutong Atueh dan Darul makmur serta Beutong.

Tabel 3.32. Daya Dukung Jasa Penyediaan Air Bersih Kabupaten Nagan Raya menurut Kecamatan, 2019

Kecamatan	Kelas DDDTLH					Total
	1. Sangat Tinggi	2. Tinggi	3. Sedang	4. Rendah	5. Sangat Rendah	
Beutong	518,74	3.644,09	81.152,68	3,05	16.412,86	101.731,43
Beutong Ateuh		2.473,55	29.394,12	2.811,81	5.912,44	40.591,94
Banggalang						
Darul Makmur	15.238,24	53.734,04	26.161,04	5,60	12.498,47	107.637,40
Kuala	680,38	6.014,23	1.237,06		874,06	8.805,75
Kuala Pesisir	623,03	4.597,30	741,93		1.650,29	7.612,56
Seunagan	494,12	2.100,92	1.751,41		1.326,82	5.673,28
Seunagan Timur	385,03	5.054,61	8.652,55		11.068,82	25.161,02
Suka Makmue	395,17	2.137,38	2.128,38		495,36	5.156,31
Tadu Raya	2.232,23	19.222,02	13.197,63		3.350,47	38.002,36
Tripa Makmur	1.566,37	12.411,46	50,82		1,99	14.030,65
Total	22.133,34	111.389,65	164.467,65	2.820,46	53.591,64	354.402,76

Sumber : Dokumen Daya Dukung Dan Daya Tampung Kabupaten Nagan Raya Tahun 2019



Gambar 3.14. Peta Daya Dukung Jasa Penyediaan Air Bersih di Kabupaten Nagan Raya



3.4.3. Ambang Batas dan Status Resiko Bencana

Tabel 3.33 memperlihatkan bahwa sebesar 53,85% dari total wilayah Kabupaten Nagan Raya memiliki kemampuan yang tinggi dalam menyediakan jasa pengaturan pencegahan dan perlindungan dari bencana. Wilayah tersebut berada dominannya dalam ekoregion dataran aluvial (18,88%), dataran fluviomarin (6,8%) lahan gambut (12,98%), pegunungan lipatan (66,74%), perbukitan lipatan (0,06%), dan perbukitan patahan (1,89%). Sementara ekoregion pegunungan lipatan adalah tinggi kemampuannya menghasilkan jasa lingkungan pengaturan pencegahan dan perlindungan dari bencana.

Tabel 3.33. Daya Tampung Jasa Pengaturan Pencegahan dan Perlindungan dari Bencana Kabupaten Nagan Raya menurut hasil perhitungan Ekoregion 2019

Nama Ekoregion	Kelas DDDTLH					Total
	1. Sangat Tinggi	2. Tinggi	3. Sedang	4. Rendah	5. Sangat Rendah	
Dataran Aluvial	42.696,86	36.035,69	41.305,60	27.335,93	1.302,38	148.676,48
Dataran Fluviomarin	38,36	0,13				38,49
Lahan Gambut (Peat Land)	21.636,48	24.784,51	365,16	2.327,25		49.113,42
Pegunungan Lipatan		127.381,90	4.220,81	20.213,14		151.815,87
Perbukitan Lipatan		2.541,58	1.237,10	577,12		4.355,82
Perbukitan Patahan		118,34	237,18	47,13		402,66
Total	64.371,71	190.862,18	47.365,89	50.500,59	1.302,38	354.402,76

Sumber : Dokumen Daya Dukung Dan Daya Tampung Kabupaten Nagan Raya Tahun 2019

Bentuk tutupan lahan yang mendominasi dalam menyediakan jasa pengaturan Pencegahan dan Perlindungan dari Bencana ini adalah hutan tanaman dan pertanian lahan kering dengan katagori sangat tinggi dan tinggi. Dimana 47.666,36 ha hutan lahan diusahakan adalah tinggi kemampuannya dalam menyediakan jasa pengaturan ini, seperti terlihat dalam Tabel 3.33.

Tabel 3.34. Daya Tampung Jasa Pengaturan Pencegahan dan Perlindungan dari Bencana Kabupaten Nagan Raya menurut hasil perhitungan Tutupan Lahan 2019

Penutupan Lahan	Kelas DDDTLH					Total
	1. Sangat Tinggi	2. Tinggi	3. Sedang	4. Rendah	5. Sangat Rendah	
Hutan Lahan Tinggi	2.990,80	1.751,88				4.742,69
Hutan Tanaman	11.306,71	129.746,90				141.053,62
Lahan Diusahakan		47.666,36		50.500,59		98.166,95
Lahan Terbuka		314,44				314,44
Permukiman		7.582,90	1.788,66			9.371,57
Pertambangan		64,82			1.302,38	1.367,20
Pertanian Lahan Kering	42.238,36	526,85	45.164,65			87.929,86
Tambak			412,57			412,57
Tubuh Air	7.835,82	3.207,99				11.043,81
Grand Total	64.371,71	190.862,18	47.365,89	50.500,59	1.302,38	354.402,76

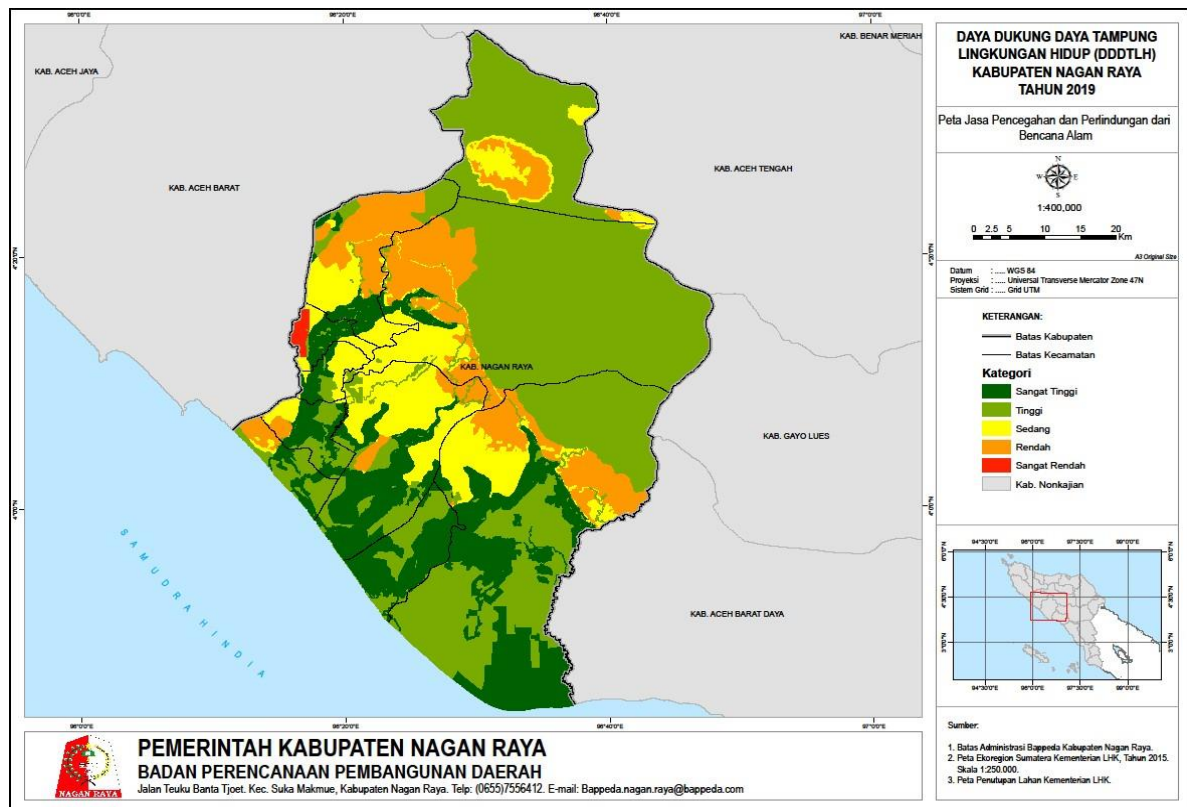
Sumber : Dokumen Daya Dukung Dan Daya Tampung Kabupaten Nagan Raya Tahun 2019

Sebaran luas perkecamatan untuk jasa ini tertera pada Tabel 3.34. Terlihat bahwa penyebarannya secara merata di semua kecamatan pada kategori daya dukung dan daya tamping jasa Pengaturan Tata Aliran Air dan Banjir di Kabupaten Nagan Raya. Selain sangat tinggi, tinggi, sedang, rendah, dan sangat rendah juga tersebar di semua kecamatan pada jasa ini. Rincian mengenai nilai jasa ini dapat dilihat pada Tabel 3.33 sampai Tabel 3.35.

Tabel 3.35. Daya Tampung Jasa Pengaturan Pencegahan dan Perlindungan dari Bencana Kabupaten Nagan Raya menurut hasil perhitungan Kecamatan 2019

Kecamatan	Kelas DDDTLH					Total
	1. Sangat Tinggi	2. Tinggi	3. Sedang	4. Rendah	5. Sangat Rendah	
Beutong	1.561,17	77.222,06	6.846,43	16.101,76		101.731,43
Beutong Ateuh Banggalang		30.663,77	4.178,82	5.749,34		40.591,94
Darul Makmur	28.874,46	56.254,49	10.074,36	12.434,08		107.637,40
Kuala	3.397,16	3.297,45	1.286,99	824,13		8.805,75
Kuala Pesisir	1.606,69	4.251,95	171,59	1.582,31		7.612,56
Seunagan	1.921,09	673,94	1.775,54	0,30	1.302,38	5.673,28
Seunagan Timur	2.718,85	4.834,95	6.608,41	10.998,80		25.161,02
Suka Makmue	1.545,17	927,68	2.683,44			5.156,31
Tadu Raya	13.903,74	7.550,52	13.740,27	2.807,83		38.002,36
Tripa Makmur	8.843,34	5.185,31		1,99		14.030,65
Total	64.371,71	190.862,18	47.365,89	50.500,59	1.302,38	354.402,76

Sumber : Dokumen Daya Dukung Dan Daya Tampung Kabupaten Nagan Raya Tahun 2019



Gambar 3.15. Peta Daya Dukung Jasa Pengaturan Pencegahan dan Perlindungan dari Bencana Kabupaten Nagan Raya

3.4.4. Ambang Batas dan Status DDLH Biodiversitas

Perlu dipahami bahwa keanekaragaman hayati atau biodiversitas merupakan sumber daya alam hayati karena merupakan bagian dari mata rantai tatanan lingkungan atau ekosistem, mampu merangkai satu unsur dengan unsur tatanan lingkungan yang lain, dan dapat menunjang tatanan lingkungan itu sehingga menjadikan lingkungan alam ini suatu lingkungan hidup yang mampu memberikan kebutuhan makhluk hidupnya. Dalam kajian daya dukung dan daya tampung, jasa ekosistem pendukung Biodiversitas atau perlindungan plasma nutfah perlu diperhitungkan. Suatu ekosistem akan memberikan jasa keanekaragaman hayati (biodiversity) di antara makhluk hidup dari semua sumber, termasuk diantaranya, daratan, lautan dan ekosistem akuatik lain serta kompleks-kompleks ekologi yang merupakan bagian dari keanekaragamannya; mencakup keanekaragaman di dalam spesies, antara spesies dan ekosistem yang menjadi habitat perkembangbiakan flora fauna. Semakin tinggi karakter biodiversitas maka semakin tinggi fungsi dukungan ekosistem terhadap perikehidupan.

Tabel 3.36. Daya Dukung dan Daya Tampung Jasa Pendukung Biodiversitas (Perlindungan Plasma Nutfah) Kabupaten Nagan Raya menurut Ekoregion, 2019

Nama Ekoregion	Kelas DDDTLH					Total
	1. Sangat Tinggi	2. Tinggi	3. Sedang	4. Rendah	5. Sangat Rendah	
Dataran Aluvial	14.396,63	73.146,18	61.133,66			148.676,48
Dataran Fluviomarin	38,36	0,13				38,49
Lahan Gambut (Peat Land)	193,49	11.582,75	10.313,83	26.482,23	541,11	49.113,42
Pegunungan Lipatan	611,50	13.0941,37	20.213,14	49,84		151.815,87
Perbukitan Lipatan		3.701,03	577,12	77,66		4.355,82
Perbukitan Patahan	5,51	251,75	47,13		98,26	402,66
Total	15.245,51	219.623,22	92.284,89	26.609,74	639,37	354.402,76

Sumber : Dokumen Daya Dukung Dan Daya Tampung Kabupaten Nagan Raya Tahun 2019

Berdasarkan kelas ekoregion, nilai DDDTLH jasa ekosistem biodiversitas di Kabupaten Nagan Raya dominan tinggi, kemudian sedang, dan rendah dengan tipe ekoregion dominan adalah pegunungan lipatan (151.815,87 Ha).

Tabel 3.37. Daya Dukung dan Daya Tampung Jasa Pendukung Biodiversitas (Perlindungan Plasma Nutfah) Kabupaten Nagan Raya menurut Penutupan Lahan, 2019

Penutupan Lahan	Kelas DDDTLH					Total
	1. Sangat Tinggi	2. Tinggi	3. Sedang	4. Rendah	5. Sangat Rendah	
Hutan Lahan Tinggi	4.742,69					4.742,69
Hutan Tanaman		141.053,62				141.053,6 2
Lahan Diusahakan			71.684,72	26.482,23		98.166,95
Lahan Terbuka			125,13		189,30	314,4439585
Permukiman			8.793,99	127,51	450,06	9.371,57
Pertambangan			1.367,20			1.367,20
Pertanian Lahan Kering		77.616,03	10.313,83			87.929,86
Tambak		412,57				412,57
Tubuh Air	10.502,82	540,99				11.043,81
Grand Total	15.245,51	219.623,22	92.284,89	26.609,74	639,37	354.402,76

Sumber : Dokumen Daya Dukung Dan Daya Tampung Kabupaten Nagan Raya Tahun 2019

Berdasarkan hasil analisis DDDTLH jasa ekosistem biodiversitas untuk penutupan lahan didapati bahwa nilai paling banyak berasal dari jenis penutupan vegetasi (hutan tanaman, lahan diusahakan, dan pertanian lahan kering) dan jenis penutupan badan air (tambak dan tubuh air).

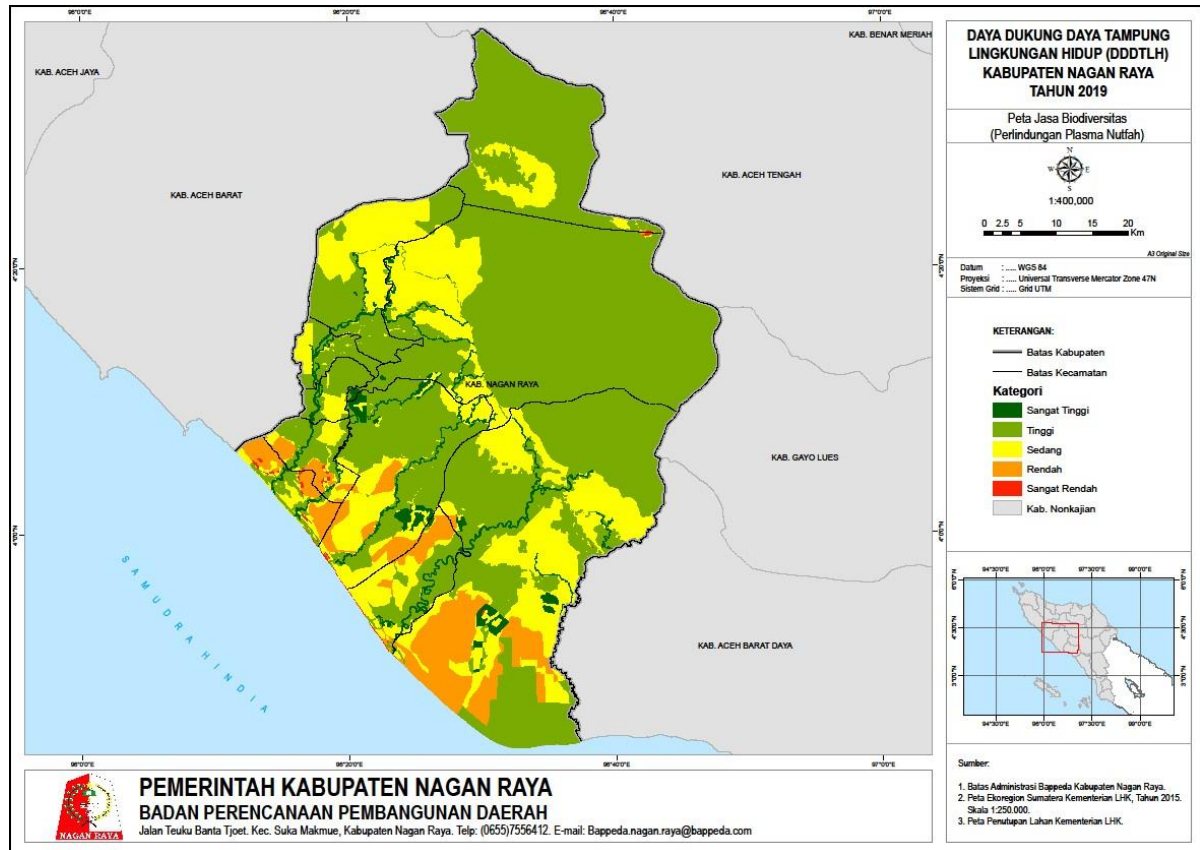
Tabel 3.38. Biodiversitas (Perlindungan Plasma Nutfah) Kabupaten Nagan Raya Menurut Kecamatan, 2019

Kecamatan	Kelas DDDTLH					Total
	1. Sangat Tinggi	2. Tinggi	3. Sedang	4. Rendah	5. Sangat Rendah	
Beutong	2.090,79	82.726,48	16.853,38	12,72	48,04	101.731,43
Beutong Ateuh Banggalang		34.679,49	5.749,34	114,33	48,77	40.591,94
Darul Makmur	4.746,99	54.759,95	33.097,64	1.5023,57	9,23	107.637,40
Kuala	681,12	3.456,39	2.735,07	1.873,81	59,34	8.805,75
Kuala Pesisir	411,52	1.362,58	1.986,28	3.638,29	213,87	7.612,56
Seunagan	538,6246716	3.178,38	1.956,27			5.673,28
Seunagan Timur	723,31	11.318,94	13.118,76			25.161,02
Suka Makmue	404,22	3.338,08	1.414,01			5.156,31
Tadu Raya	4.268,59	19.779,76	10.193,85	3.628,02	132,12	38.002,36
Tripa Makmur	1.380,32	5.023,12	5.180,25	2.318,97	127,97	14.030,65
Total	15.245,51	219.623,22	92.284,89	26.609,74	639,37	354.402,76

Sumber : Dokumen Daya Dukung Dan Daya Tampung Kabupaten Nagan Raya Tahun 2019

Kecamatan Beutong, Darul makmur, dan Beutong Ateuh Benggalang merupakan Kecamatan dengan nilai tinggi paling dominan untuk jasa ekosistem plasma nutfah, hal ini sangat dipengaruhi oleh kondisi penutupan lahan di Kecamatan tersebut yang dominan vegetasi dan badan air. Kecamatan dengan nilai dominan rendah dan sangat rendah adalah Kecamatan Tadu Raya dan Tripa Makmur, nilai sangat rendah dipengaruhi oleh jenis penutupan lahan yang dominan di Kecamatan tersebut, seperti jenis penutupan pemukiman sawah dan lahan terbuka.

Biodiversitas sangat berperan dalam menunjang kehidupan di atasnya, semakin tinggi nilainya maka semakin banyak hewan dan tumbuhan yang hidup di atas lahan tersebut maka semakin baik lingkungan tersebut untuk menunjang kehidupan manusia. Nilai DDDTLH jasa ekosistem biodeversitas Kabupaten Nagan Raya sangat tinggi dihasilkan dari jenis penutupan lahan yang dominan vegetasi dan badan air, sedangkan nilai rendah dan sangat rendah berasal dari kelas penutupan lahan pemukiman dan lahan terbuka.



Gambar 3.16. Peta Daya Dukung dan Daya Tampung Jasa Pendukung Biodiversitas (Perlindungan Plasma Nutfah) Kabupaten Nagan Raya

3.5. Peran Para Pihak Dalam Pencapaian TPB/SDGs

Peran adalah seperangkat tingkah laku yang diharapkan oleh orang lain terhadap seseorang sesuai kedudukannya dalam suatu sistem. Peranan merupakan aspek dinamis kedudukan. Ketika seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka orang tersebut telah menjalankan suatu peranan. Peranan dan kedudukan saling tergantung satu sama lain. Tidak ada peranan tanpa kedudukan, demikian pula tidak ada kedudukan tanpa peranan. Pembagian peran berupa analisis kontribusi dari Pemerintah, pemerintah daerah, serta organisasi masyarakat, filantropi, pelaku usaha, akademisi dan pihak terkait lainnya sesuai ketentuan perundang-undangan dalam pembangunan daerah. Upaya pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) harus melibatkan para pihak (*Stakeholder*) yang saling terkait, sehingga TPB tersebut tepat sasaran. Sehubungan dengan penyusunan KLHS RPJPD Kabupaten Nagan Raya, maka pelibatan para pihak multak



PEMERINTAH KABUPATEN NAGAN RAYA
KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS (KLHS)
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD)

diperlukan sesuai dengan kedudukan dan perannya masing-masing sebagaimana tertera dalam **Tabel 3.39**.

Tabel 3.39 Peran para pihak (pemangku kepentingan) yang aktif menjalankan aktifitasnya dalam pencapaian TPB di Kabupaten Nagan Raya berjumlah

No.	Nama Stakeholder	Peran	Bidang
PEMERINTAH			
1	Bupati Nagan Raya	Memimpin penyelenggaraan daerah berdasarkan peraturan per-UUngan dan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD kabupaten	umum
2	Sekretaris Daerah Kabupaten Nagan Raya	Memimpin penyelenggaraan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah sesuai ketentuan per-UUngan yang berlaku dan melaksanakan tugas lain yang diberikan	Umum
3	Dandim 0116 Nagan Raya	Memastikan pemeliharaan keamanan dan pertahanan	Hukum dan Ortala
4	Polres Nagan Raya	Memastikan pemeliharaan keamanan dan ketertiban	Hukum dan Ortala
5	Kejaksaan Negeri	Memastikan penerapan dan penegakan hukum dan per-UU-an	Hukum dan Ortala
6	Asisten Perekonomian dan Pembangunan	mengkoordinasikan pengumpulan data dan perumusan kebijakan bidang perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan, statistik, kerjasama, perhubungan, pekerjaan umum, kebudayaan dan pariwisata, pertanian, peternakan, perkebunan, kehutanan, pertambangan dan energi, lingkungan hidup, kelautan dan perikanan, koperasi dan UKM, penanaman modal, perindustrian dan perdagangan, serta hubungan masyarakat	Ekonomi
7	Dinas Lingkungan Hidup Kab. Nagan Raya	Penyusun Kebijakan, rencana, dan /atau program	lingkungan
8	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kab. Nagan Raya	Penyusun Kebijakan, rencana, dan /atau program	Umum
9	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kab. Nagan raya	ketersediaan data dan penentuan target capaian	Hukum dan Ortala
10	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kab. Nagan Raya	ketersediaan data dan penentuan target capaian	Ekonomi
11	Dinas Informatikan dan Statistik Kab. Nagan Raya	ketersediaan data dan penentuan target capaian	Umum



PEMERINTAH KABUPATEN NAGAN RAYA
KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS (KLHS)
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD)

12	Inspektorat Kab. Nagan Raya	ketersediaan data dan penentuan target capaian	Hukum dan Ortala
13	Dinas Syariat Islam Kab. Nagan Raya	ketersediaan data dan penentuan target capaian	Sosial
14	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	ketersediaan data dan penentuan target capaian	Ekonomi
15	Sekretariat Dewan Kab. Nagan Raya	ketersediaan data dan penentuan target capaian	Umum
16	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Nagan Raya	ketersediaan data dan penentuan target capaian	Sosial
17	Dinas Perpustakaan dan Arsip Kab. Nagan Raya	ketersediaan data dan penentuan target capaian	Umum
18	Dinas Pendidikan Kab. Nagan Raya	ketersediaan data dan penentuan target capaian	pendidikan
19	Dinas Kesehatan Kab. Nagan Raya	ketersediaan data dan penentuan target capaian	Kesehatan
20	Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Daerah Sultan Iskandar Muda Kab. Nagan Raya	ketersediaan data dan penentuan target capaian	Kesehatan
21	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kab. Nagan Raya	ketersediaan data dan penentuan target capaian	Ekonomi
22	Dinas Pertanian dan Peternakan Kab. Nagan Raya	ketersediaan data dan penentuan target capaian	Ekonomi
23	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Nagan Raya	ketersediaan data dan penentuan target capaian	Ekonomi
24	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Gampong, Pengendalian Penduduk dan Pemberdayaan Perempuan Kab. Nagan Raya	ketersediaan data dan penentuan target capaian	Sosial
25	Dinas Sosial Kab. Nagan Raya	ketersediaan data dan penentuan target capaian	Sosial
26	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Nagan Raya	ketersediaan data dan penentuan target capaian	Ekonomi
27	Dinas Kebudayaan, Parawisata, Pemuda dan Olah Raga Kab. Nagan Raya	ketersediaan data dan penentuan target capaian	Sosial
28	Dinas Kelautan, Perikanan dan Pangan Kab. Nagan Raya	ketersediaan data dan penentuan target capaian	Ekonomi dan Ketahanan Pangan



PEMERINTAH KABUPATEN NAGAN RAYA
KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS (KLHS)
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD)

29	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kab. Nagan Raya	ketersediaan data dan penentuan target capaian	Umum
30	Dinas Perhubungan Kab. Nagan Raya	ketersediaan data dan penentuan target capaian	Ekonomi
31	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Nagan Raya	ketersediaan data dan penentuan target capaian	Kesehatan
32	SATPOL PP dan Wilayatul Hisbah Kabupaten Nagan Raya	ketersediaan data dan penentuan target capaian	Ekonomi
33	Dinas Perkebunan Kab. Nagan Raya	ketersediaan data dan penentuan target capaian	Ekonomi
34	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Nagan Raya	ketersediaan data dan penentuan target capaian	Sosial dan Politik
35	Majelis Adat Aceh (MAA) Kab. Nagan Raya	ketersediaan data dan penentuan target capaian	Sosial dan Budaya
36	Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Kab. Nagan Raya	ketersediaan data dan penentuan target capaian	Agama
37	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan	ketersediaan data dan penentuan target capaian	Ekonomi
38	Dinas Sosial	ketersediaan data dan penentuan target capaian	Sosial
39	Dinas Ketenagakerjaan	ketersediaan data dan penentuan target capaian	Sosial
40	Dinas Perikanan	ketersediaan data dan penentuan target capaian	Ekonomi
41	Dinas Perkebunan	ketersediaan data dan penentuan target capaian	Ekonomi
42	Dinas Perumahan dan Permukiman	ketersediaan data dan penentuan target capaian	Ekonomi
43	Dinas Kebakaran dan Penyelamatan	ketersediaan data dan penentuan target capaian	Sosial
44	Satuan Polisi Pamong Praja dan Linmas	ketersediaan data dan penentuan target capaian	Hukum dan Ortala
45	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	ketersediaan data dan penentuan target capaian	Lingkungan, sosial
46	Kantor Departemen Agama	ketersediaan data dan penentuan target capaian	Sosial
47	PDAM Nagan Raya	ketersediaan data dan penentuan target capaian	Sosial, ekonomi



PEMERINTAH KABUPATEN NAGAN RAYA
KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS (KLHS)
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD)

48	Camat Di Lingkungan Kabupaten Nagan Raya	ketersediaan data dan penentuan target capaian	Lingkungan
PERGURUAN TINGGI			
1	Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Pelita Nusantara	informasi dan /atau keahlian (perorangan/ tokoh/ kelompok)	Umum
FILANTROPI			
1	YAYASAN TUWAH SYUHADA (YASYUDA)	informasi dan /atau keahlian (perorangan/ tokoh/ kelompok)	Umum
2	HIMPUNAN MAHASISWA ISLAM (HMI)	informasi dan /atau keahlian (perorangan/ tokoh/ kelompok)	Umum
3	LSM ANDALAS ACEH	informasi dan /atau keahlian (perorangan/ tokoh/ kelompok)	Umum
4	FORUM PEMUDA PEMUDI KEMUNGKIMAN KUALA BARO (FPPKKB) RIMUENG PILOK	informasi dan /atau keahlian (perorangan/ tokoh/ kelompok)	Umum
5	PERKUMPULAN PENYANDANG DISABILITAS INDONESIA (PPDI)	informasi dan /atau keahlian (perorangan/ tokoh/ kelompok)	Umum
6	DPD IKATAN KELUARGA MINANG KABAU (IKM)	informasi dan /atau keahlian (perorangan/ tokoh/ kelompok)	Umum
7	LEMBAGA GERAKAN MASYARAKAT PELESTARIAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN NAGAN RAYA	informasi dan /atau keahlian (perorangan/ tokoh/ kelompok)	Umum
8	YAYASAN TEUKU HAJI ABDUL MANAF (YASTAM)	informasi dan /atau keahlian (perorangan/ tokoh/ kelompok)	Umum
9	YAYASAN MENTARI SULHA	informasi dan /atau keahlian (perorangan/ tokoh/ kelompok)	Umum
10	LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT PELESTARIAN HUTAN LINDUNG UTARI NUSANTARA KABUPATEN NAGAN RAYA	informasi dan /atau keahlian (perorangan/ tokoh/ kelompok)	Umum
11	MAJELIS PENGKAJIAN TAUHID-TASAWUF INDONESIA (MPTT-I)	informasi dan /atau keahlian (perorangan/ tokoh/ kelompok)	Umum
12	LSM GERAKAN MASYARAKAT BAWAH INDONESIA (GMBI)	informasi dan /atau keahlian (perorangan/ tokoh/ kelompok)	Umum
13	PBD DPN-PERKASA KABUPATEN NAGAN RAYA	informasi dan /atau keahlian (perorangan/ tokoh/ kelompok)	Umum
14	PERSAUDARAAN SETIA HATI TERATE	informasi dan /atau keahlian (perorangan/ tokoh/ kelompok)	Umum
15	ASOSIASI PETANI KELAPA SAWIT INDONESIA (APKASINDO PERJUANGAN)	informasi dan /atau keahlian (perorangan/ tokoh/ kelompok)	Umum



PEMERINTAH KABUPATEN NAGAN RAYA
KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS (KLHS)
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD)

16	DPD PERKUMPULAN JARINGAN PENGAWAS KEBIJAKAN	informasi dan /atau keahlian (perorangan/ tokoh/ kelompok)	Umum
17	PEMERINTAH (JPKP)	informasi dan /atau keahlian (perorangan/ tokoh/ kelompok)	Umum
18	YAYASAN ZAINI MANTRI DOI	informasi dan /atau keahlian (perorangan/ tokoh/ kelompok)	Umum
19	YAYASAN PUTROE ACEH NANGGROE RAYA	informasi dan /atau keahlian (perorangan/ tokoh/ kelompok)	Umum
20	YAYASAN PESANTREN NURUL IKHWAH	informasi dan /atau keahlian (perorangan/ tokoh/ kelompok)	Umum
21	PERHIMPUNAN REMAJA MASJID DEWAN MASJID INDONESIA (PRIMA-DMI) KABUPATEN NAGAN RAYA	informasi dan /atau keahlian (perorangan/ tokoh/ kelompok)	Umum
22	GENERASI DIGITAL INDONESIA (GRADASI)	informasi dan /atau keahlian (perorangan/ tokoh/ kelompok)	Umum
23	YAYASAN BAITUSH SHALIHIN NEUPET	informasi dan /atau keahlian (perorangan/ tokoh/ kelompok)	Umum
24	FORUM KOMUNIKASI ANAK BANGSA (FORKAB)	informasi dan /atau keahlian (perorangan/ tokoh/ kelompok)	Umum
25	ORGANISASI KEPEMUDAAN TUNAS KARYA	informasi dan /atau keahlian (perorangan/ tokoh/ kelompok)	Umum
26	AL-JAM'IATUL WASHLIYAH NAGAN RAYA	informasi dan /atau keahlian (perorangan/ tokoh/ kelompok)	Umum
27	ALIANSI PEDULI LINGKUNGAN (APEL)	informasi dan /atau keahlian (perorangan/ tokoh/ kelompok)	Umum
28	YAYASAN DHARMA SHALIHAT (YDS)	informasi dan /atau keahlian (perorangan/ tokoh/ kelompok)	Umum
29	FORUM GEUCHIK KABUPATEN NAGAN RAYA	informasi dan /atau keahlian (perorangan/ tokoh/ kelompok)	Umum
30	LSM GEMPUR KABUPATEN NAGAN RAYA	informasi dan /atau keahlian (perorangan/ tokoh/ kelompok)	Umum
31	BADAN KOMUNIKASI PEMUDA REMAJA MESJID INDONESIA (BKPRMI)	informasi dan /atau keahlian (perorangan/ tokoh/ kelompok)	Umum
32	BADAN ADVOKASI INDONESIA (BAI) KABUPATEN NAGAN RAYA.	informasi dan /atau keahlian (perorangan/ tokoh/ kelompok)	Umum
33	YAYASAN SUFIMUDA	informasi dan /atau keahlian (perorangan/ tokoh/ kelompok)	Umum
PELAKU USAHA/KEGIATAN			
1	PT. BARA ENERGI LESTARI	informasi dan /atau <i>desk study</i>	Umum
2	PT. USAHA SEMESTA JAYA	informasi dan /atau <i>desk study</i>	Umum
3	PT. FAJAR BAIZURY & BROTHERS	informasi dan /atau <i>desk study</i>	Umum



PEMERINTAH KABUPATEN NAGAN RAYA
KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS (KLHS)
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD)

4	PT. SOCFINDO SEUMAYAM	informasi dan /atau <i>desk study</i>	Umum
5	PT. SAWIT NAGAN RAYA MAKMUR	informasi dan /atau <i>desk study</i>	Umum
6	PT. KHARISMA ISKANDAR MUDA	informasi dan /atau <i>desk study</i>	Umum
7	PT. BEURATA SUBUR PERSADA	informasi dan /atau <i>desk study</i>	Umum
8	PT. RAJA MARGA	informasi dan /atau <i>desk study</i>	Umum
9	PT. SOCFINDO SEUNAGAN	informasi dan /atau <i>desk study</i>	Umum
10	PT. KALLISTA ALAM	informasi dan /atau <i>desk study</i>	Umum
11	PT. SURYA PANEN SUBUR I	informasi dan /atau <i>desk study</i>	Umum
12	PT. SURYA PANEN SUBUR II	informasi dan /atau <i>desk study</i>	Umum
13	PT. UJONG NEUBOK DALAM	informasi dan /atau <i>desk study</i>	Umum
14	PT. WATU GEDE UTAMA	informasi dan /atau <i>desk study</i>	Umum
15	PT. INDONESIA PACIFIC ENERGY	informasi dan /atau <i>desk study</i>	Umum
16	PT. MEGA MULTI CEMERLANG	informasi dan /atau <i>desk study</i>	Umum
17	PT. BANK ACEH SYARIAH CABANG JEURAM	informasi dan /atau <i>desk study</i>	Umum
18	PT. WIRATACO MITRA MULIA	informasi dan /atau <i>desk study</i>	Umum
19	PT. SEUNAGAN ENERGI	informasi dan /atau <i>desk study</i>	Umum
20	PT. PLN (Persero) SEKTOR PEMBANGKIT NAGAN RAYA (PLTU 1-2 SUAK PUNTONG)	informasi dan /atau <i>desk study</i>	Umum
21	PT. AGRO SINERGI NUSANTARA	informasi dan /atau <i>desk study</i>	Umum
22	PT. ENSEM LESTARI JAYA	informasi dan /atau <i>desk study</i>	Umum

Tabel 3.40. Kegiatan Mitra Pemerintah menurut TPB

Program/Kegiatan	Indikator TPB	Aktor	Capaian
1	2	3	4
Meningkatnya Perekonomian Daerah	Pertumbuhan Ekonomi (PDRB)	-	-
Meningkatnya Nilai Investasi	Nilai realisasi Investasi Penanaman Modal dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA)	-	-
Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Industri dan Sektor Perdagangan terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah	Persentase pertumbuhan sektor Industri dan Sektor Perdagangan terhadap PDRB	-	-



PEMERINTAH KABUPATEN NAGAN RAYA
KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS (KLHS)
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD)

Meningkatnya Pemenuhan Infrastruktur Wilayah	Persentase ketercapaian pemenuhan infrastruktur wilayah	-	-
Meningkatnya Pemenuhan Infrastruktur Wilayah	Persentase ketercapaian pemenuhan infrastruktur strategis	-	-
	Persentase ketercapaian pemenuhan infrastruktur dasar	-	-
Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat yang merata	Indeks Gini	-	-
Menurunnya Angka Kemiskinan	Angka Kemiskinan	-	-
Menurunnya Pengangguran	Angka Pengangguran	-	-
Meningkatnya perekonomian daerah yang berkelanjutan	Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)	-	-
Meningkatnya pertumbuhan sektor unggulan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah	Persentase Pertumbuhan sektor pertanian, kehutanan dan perikanan; sektor pariwisata; sektor pertambangan dan penggalian terhadap PDRB	-	-
Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Indeks kualitas lingkungan hidup	-	-
Tujuan 3.1 : Meningkatkan kualitas layanan dan tata kelola pemerintahan	Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	-	-
Sasaran 3.1.1 : Meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan	Nilai SAKIP Daerah	-	-
	Opini atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	-	-
	Indeks profesionalitas ASN	-	-
	Nilai Indeks e- Government (SPBE)	-	-
Sasaran 3.1.2: Meningkatkan kualitas pelayanan publik	Nilai Pelayanan Publik	-	-
Tujuan 4.1: Meningkatkan kualitas SDM	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	-	-



PEMERINTAH KABUPATEN NAGAN RAYA
KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS (KLHS)
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD)

Sasaran 4.1.1: Meningkatnya akses dan kualitas pendidikan	Angka Harapan Lama Sekolah	-	-
	Angka rata-rata lama sekolah	-	-
Sasaran 4.1.2: Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Angka harapan hidup	-	-
Sasaran 4.1.3: Meningkatnya kesejahteraan masyarakat	Pengeluaran per Kapita	-	-
Tujuan 5.1: Meningkatnya pemberdayaan perempuan serta perlindungan perempuan dan anak	Indeks pemberdayaan gender	-	-
	Persentase penurunan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	-	-
Sasaran 5.1.1: Meningkatnya pemberdayaan perempuan serta perlindungan perempuan dan anak	Peningkatan Indeks pemberdayaan gender	-	-
	Persentase penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	-	-

BAB IV

ANALISIS TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN (TPB)

4.1. Gambaran Umum Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)

Indonesia merupakan salah satu negara anggota Perserikatan Bangsa Bangsa yang berperan aktif dalam penentuan sasaran Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) sebagaimana tertuang dalam dokumen Transforming Our World: The 2030 Agenda for Sustainable Development. Untuk memenuhi komitmen pemerintah dalam pelaksanaan pencapaian TPB, Pemerintah menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

TPB bertujuan untuk menjaga peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan, menjaga keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat, menjaga kualitas lingkungan hidup serta pembangunan yang inklusif dan terlaksananya tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas kehidupan dari satu generasi ke generasi berikutnya. TPB merupakan komitmen global dan nasional dalam upaya untuk menyejahterakan masyarakat mencakup 17 tujuan.



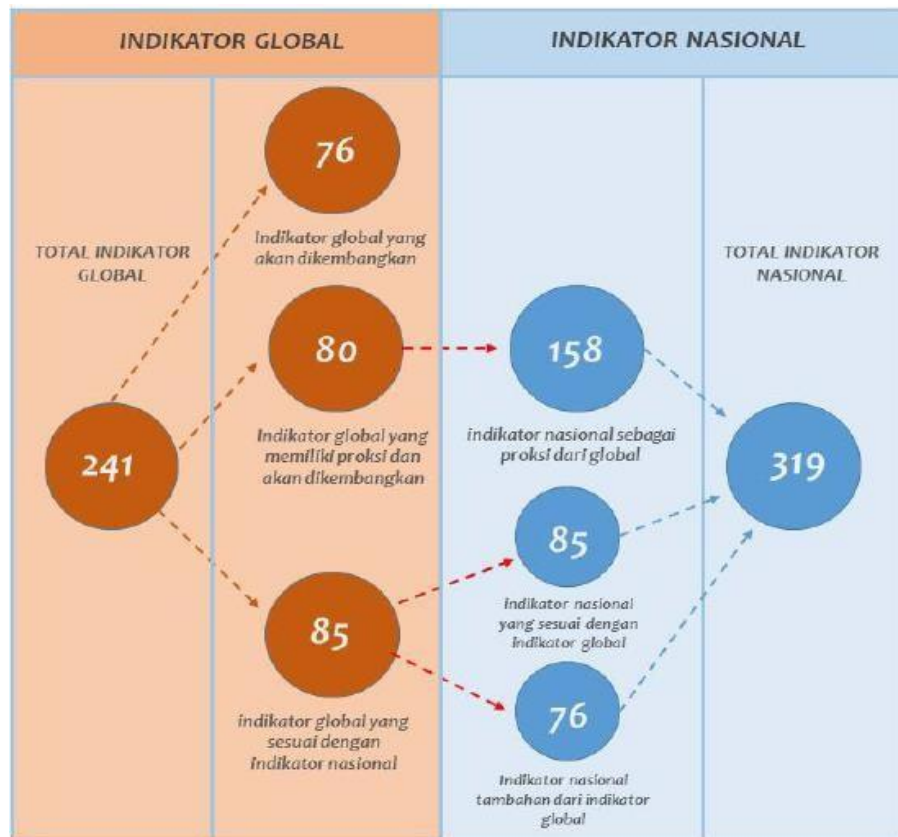
Gambar 4.1. Tujuan, Target dan Indikator TPB



Berdasarkan Perpres No. 59 Tahun 2017, Indonesia mengembangkan indikator TPB sebanyak 319 indikator dari 94 target/sasaran global dan 17 goals. Dari 319 indikator TPB Indonesia 21 indikator bersifat khusus untuk daerah tertentu dan 298 indikator bersifat umum, sehingga setiap daerah memiliki jumlah indikator yang berbeda sesuai dengan kewenangan dan kondisi wilayahnya. Beberapa faktor yang menentukan jumlah indikator TPB yang menjadi kewajiban daerah adalah: 1. Wewenang; 2. Kekhususan indikator; 3. Kondisi geografis; dan 4. Ketentuan indikator RPJPD.

4.2. Penyediaan Data TPB/SDGs

Dalam menjalankan amanat Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 59 Tahun 2017 yang kemudian diperbaharui dengan Perpres Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, BPS dan kementerian/lembaga (K/L) melakukan penyediaan dan pemutakhiran data untuk monitoring dan evaluasi pelaksanaan TPB/SDGs Indonesia di bawah koordinasi Kementerian PPN/Bappenas. Tersedianya data capaian indikator TPB/SDGs yang berkualitas bermanfaat bagi para pemangku kebijakan untuk melihat capaian serta menentukan intervensi untuk mencapai tujuan pada tahun 2030. Sejalan dengan prinsip TPB/SDGs *no one left behind*, kebutuhan atas data yang terdisagregasi pada tingkat yang lebih rinci juga sangat tinggi. Dengan data yang terdisagregasi lebih rinci, pemangku kebijakan lebih mudah untuk: (1) melihat target spesifik yang perlu mendapat perhatian khusus; (2) memahami kesenjangan antar wilayah; dan (3) menentukan kebijakan yang lebih sesuai untuk kelompok-kelompok tertentu.



Gambar 4.2. Indikator Global dan Indikator Nasional

Penyediaan data capaian indikator TPB/SDGs di Indonesia saat ini dilakukan berdasarkan Metadata TPB/SDGs Edisi II. Dari 289 indikator, sebanyak 67 indikator bersumber dari BPS, 47 indikator bersumber BPS dan K/L, dan 175 indikator bersumber dari K/L. Penyesuaian penyediaan data dengan metadata terbaru dilakukan pada tahun 2021 dan capaian 210 indikator TPB/SDGs telah disampaikan dalam Indonesia's Voluntary National Review (VNR) 2021 pada High-level Political Forum United Nations. Di tengah pemutakhiran dan penyempurnaan metadata TPB/SDGs nasional yang sedang berjalan pada tahun 2022, BPS dan K/L kembali berupaya untuk melakukan penyediaan dan pemutakhiran data capaian TPB/SDGs tahun 2021 yang disajikan pada laporan pelaksanaan pencapaian TPB/SDGs. Dari total data yang tersedia hingga September 2022, sebanyak 86 indikator bersumber dari BPS dan sisanya dari K/L lain.

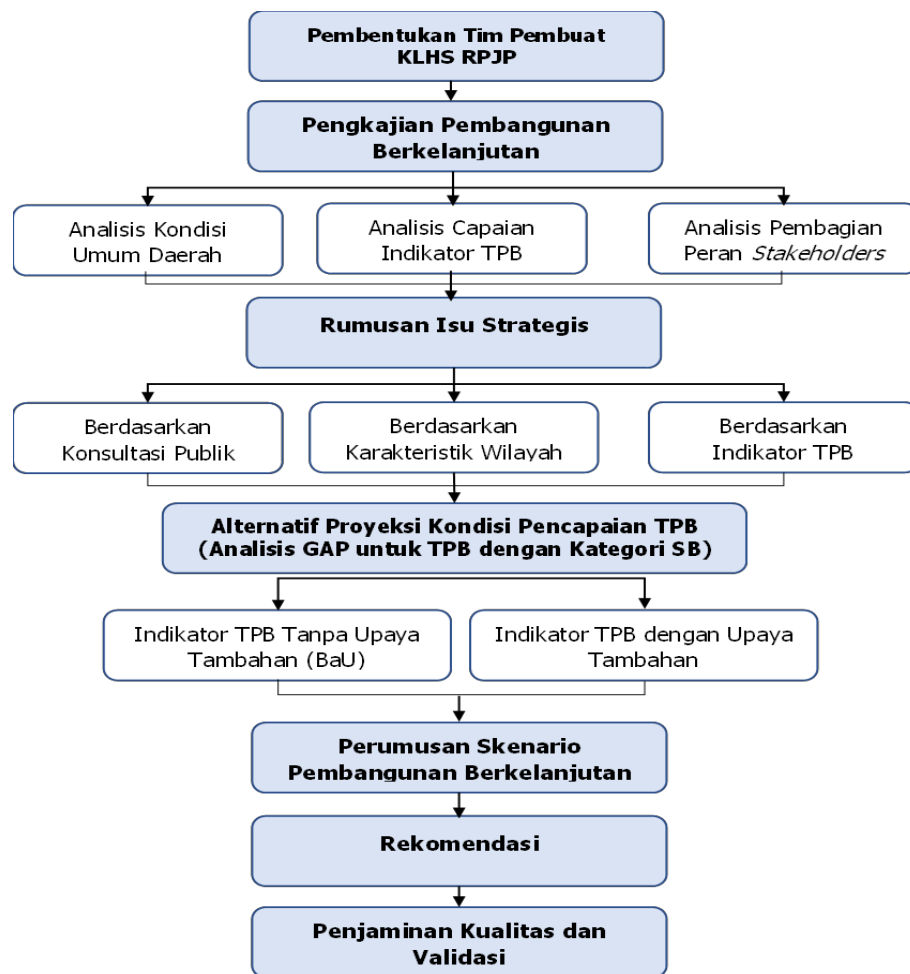
Tabel 4.1. Target dan Indikator TPB sesuai Perpres 59/2017

Indikator TPB	Goal 1	Goal 2	Goal 3	Goal 4	Goal 5	Goal 6	Goal 7	Goal 8	Goal 9	Goal 10	Goal 11	Goal 12	Goal 13	Goal 14	Goal 15	Goal 16	Goal 17	Jumlah
Metadata Edisi (2018)	26	13	38	18	16	29	6	20	17	16	21	7	4	9	13	34	32	319
Metadata Edisi (2020)	14	16	31	14	12	10	7	19	21	17	17	17	9	10	14	36	25	289

Dalam pengkajian, kegiatan yang dilakukan adalah melakukan identifikasi, pengumpulan, dan analisis data berupa kondisi umum daerah, capaian indikator TPB, dan pembagian peran. Sedangkan dalam perumusan skenario, kegiatan yang dilakukan adalah membuat alternatif proyeksi. Alternatif proyeksi dibagi dalam alternatif proyeksi tanpa upaya tambahan atau BAU (business as usual) dan alternatif proyeksi dengan upaya tambahan. Alternatif proyeksi ini dibuat berdasarkan isu strategis, permasalahan, serta sasaran strategis.

Pemanfaatan untuk RPJPD: KLHS RPJPD dapat dimanfaatkan sebagai gambaran umum, hasil identifikasi permasalahan dan isu strategis, serta penentuan tujuan dan sasaran dalam RPJPD. Dalam penyusunan RPJPD, KLHS berperan sebagai rancangan teknokratis yang digunakan sebagai rancangan awal. Rancangan awal RPJPD ditelaah kesesuaiannya dengan rancangan teknokratis sebelum menjadi rancangan dokumen rencana daerah (dokrenda). Rancangan dokrenda menjadi instrumen utama yang akan dibahas di musyawarah rencana pembangunan (musrenbang) daerah. Setelah dokumen mendapat masukan, kemudian dokumen tersebut ditetapkan sebagai rancangan akhir dan ditetapkan sebagai dokrenda.

Metode Penyelenggaraan KLHS RPJPD seperti disajikan pada Gambar dibawah ini.



Gambar 4.3. Metode Penyelenggaraan KLHS RPJPD

4.3. Kondisi Umum Capaian Target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)

Analisis capaian indikator dan evaluasi TPB di Kabupaten Nagan Raya dilakukan oleh Pokja KLHS RPJPD Kabupaten Nagan Raya. Pemetaan indikator tujuan pembangunan berkelanjutan (TPB) Kabupaten Nagan Raya didasarkan pada Metadata TPB nasional, Metadata TPB Kabupaten Nagan Raya yang disusun berdasarkan pemetaan dan pemadanan dari Indikator RPJPD Kabupaten Nagan Raya Tahun 2025-2045. Penilaian dan analisis mengenai capaian indikator TPB di daerah yang dikategorikan dalam 4 (empat) kategori yaitu: 1) Indikator TPB yang sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target nasional; 2) Indikator TPB yang sudah dilaksanakan tetapi belum mencapai target nasional; 3) Indikator TPB belum ada data dan belum dilaksanakan; 4) Indikator TPB yang tidak/bukan kewenangan kabupaten.



Tujuan dan sasaran dari pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan sebagaimana dituangkan dalam lampiran Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (17 tujuan, 158 target dan 289 indikator). Selanjutnya target dan indikator dari Tujuan Pembangunan Berkelanjutan tersebut secara rinci dijelaskan dalam Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Pembuatan Dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. Total secara keseluruhan terdapat 169 Target yang kemudian terbagi lagi menjadi 475 Indikator dalam Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) berdasarkan kewenangan terbagi dalam 4 (empat) kelompok kewenangan, dengan arahan penapisan jumlah masing-masing indikator meliputi:

- a) Jumlah Indikator TPB yang menjadi kewenangan Pusat: 308
- b) Jumlah Indikator TPB yang menjadi kewenangan Provinsi: 235
- c) Jumlah Indikator TPB yang menjadi kewenangan Kabupaten: 220
- d) Jumlah Indikator TPB yang menjadi kewenangan Kota: 222

Selain itu Pemerintah Kabupaten/Kota dapat menapiskan Indikator yang ada di Daerahnya sebagaimana arahan indikator inti dan/atau juga menambahkan Indikator Kewenangan Provinsi atau Pusat yang disesuaikan dengan Indikator yang ada dalam RPJPD di Daerah. Pelaksanaan indikator tujuan pembangunan berkelanjutan tersebut kemudian menjadi acuan dalam melakukan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Daerah dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah/Panjang Daerah sesuai dengan kewenangan dan kemampuan daerah. Uraian Identifikasi Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Kabupaten Nagan Raya pada Tahun 2022 masing-masing dikemukakan pada **Tabel 4.2** dibawah ini. Uraian Identifikasi Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Kabupaten Nagan Raya pada Tahun 2023 masing-masing dikemukakan pada tabel dibawah ini.

Tabel 4.2. Identifikasi Pelaksanaan TPB Ke-1 Mengakhiri Kemiskinan Dalam Segala Bentuk Dimanapun

URAIAN TARGET	INDIKATOR		TARGET	URUSAN	INSTANSI PELAKSANA
1.2 mengurangi setidaknya setengah proporsi laki-laki, perempuan dan anak-anak dari semua usia, yang hidup dalam kemiskinan di semua Pilar, sesuai dengan definisi nasional.	1.2.1*	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur.	Menurun 7% sd 8%	Sosial	Dinas Sosial
1.3 Menerapkan secara nasional sistem dan upaya perlindungan sosial yang tepat bagi semua, termasuk kelompok yang paling miskin dan rentan.	1.3.1(a)	Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan.	meningkat 95%	Kesehatan	Dinas Kesehatan
	1.3.1(b)	Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan (Pekerja Formal dan Pekerja Informal)	meningkat PF: 62,4 jt PI: 3,5 jt	Ketenagakerjaan	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
	1.3.1(c)	Persentase penyandang disabilitas yang miskin dan rentan yang terpenuhi hak dasarnya dan inklusivitas.	meningkat 17,2%	Sosial	Dinas Sosial
	1.3.1(d)	Jumlah rumah tangga yang mendapatkan bantuan tunai bersyarat / Program Keluarga Harapan.	menurun 2,8 juta	Sosial	Dinas Sosial
1.4 menjamin bahwa semua laki-laki dan perempuan, khususnya masyarakat miskin dan rentan, memiliki hak yang sama terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap pelayanan dasar, kepemilikan dan kontrol atas tanah dan bentuk kepemilikan lain, warisan, sumber daya alam, teknologi baru, dan jasa keuangan yang tepat, termasuk keuangan mikro.	1.4.1(a)	Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan.	meningkat 70%	Kesehatan	(tidak digunakan)
	1.4.1(b)	Persentase anak umur 12-23 bulan yang menerima imunisasi dasar lengkap.	meningkat 63%	Kesehatan	(tidak digunakan)
	1.4.1(c)	Prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada Pasangan Usia Subur (PUS) usia 15-49 tahun yang berstatus kawin.	meningkat 65%	Keluarga Berencana	(tidak digunakan)
	1.4.1(d)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak dan berkelanjutan.	meningkat 100%	Pemukiman	Dinas PRKP

URAIAN TARGET	INDIKATOR		TARGET	URUSAN	INSTANSI PELAKSANA
	1.4.1(e)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan.	meningkat 100%	Pemukiman	Dinas PRKP
	1.4.1(g)	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/ sederajat.	meningkat 94,78%	Pendidikan	Dinas PRKP
	1.4.1(h)	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/ sederajat.	meningkat 83,3%	Pendidikan	Dinas Pendidikan
	1.4.1(i)	Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/MA/ sederajat	meningkat 91,63%	Pendidikan	(tidak digunakan)
	1.4.1(j)	Persentase penduduk umur 0-17 tahun dengan kepemilikan akta kelahiran.	meningkat 77,4%	Kependudukan	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	1.4.1(k)	Persentase rumah tangga miskin dan rentan yang sumber penerangan utamanya listrik baik dari PLN dan bukan PLN.	meningkat 100%	Pemukiman	Dinas PRKP
1.5. membangun ketahanan masyarakat miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, dan mengurangi kerentanan mereka terhadap kejadian ekstrim terkait iklim dan guncangan ekonomi, sosial, lingkungan, dan bencana.	1.5.1*	Jumlah korban meninggal, hilang, dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.	menurun	Penanggulangan Bencana	BPBD
	1.5.1(a)	Jumlah lokasi penguatan pengurangan risiko bencana daerah.	meningkat	Pen. Bencana	BPBD
	1.5.1(b)	Pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana sosial.	meningkat	Sosial	Dinas Sosial
	1.5.1(c)	Pendampingan psikososial korban bencana sosial.	meningkat	Sosial	Dinas Sosial
	1.5.1(d)	Jumlah daerah bencana alam/bencana sosial yang mendapat pendidikan dilayanan khusus.	meningkat 450 kab	Pendidikan	(tidak digunakan)
	1.5.1(e)	Indeks risiko bencana pada pusat-pusat pertumbuhan yang berisiko tinggi.	menurun	Penanggulangan Bencana	(tidak digunakan)
	1.5.2(a)	Jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana.	menurun	Pen. Bencana	BPBD

URAIAN TARGET	INDIKATOR		TARGET	URUSAN	INSTANSI PELAKSANA
	1.5.3*	Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) daerah.	Ada	Pen. Bencana	BPBD
1.a Menjamin mobilisasi yang signifikan terkait sumber daya dari berbagai sumber, termasuk melalui kerjasama pembangunan yang lebih baik, untuk menyediakan sarana yang memadai dan terjangkau untuk melaksanakan program dan kebijakan mengakhiri kemiskinan di semua Pilar.	1.a.1*	Proporsi sumber daya yang dialokasikan oleh pemerintah secara langsung untuk program pemberantasan kemiskinan.	meningkat	Perencanaan Pembangunan	BAPPEDA
	1.a.2*	Pengeluaran untuk layanan pokok (pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial) sebagai persentase dari total belanja pemerintah.	meningkat	Perencanaan Pembangunan	BAPPEDA

Tabel 4.3. Identifikasi Pelaksanaan TPB ke-2. Menghilangkan Kelaparan, Mencapai Ketahanan Pangan dan Gizi yang Baik

URAIAN TARGET	INDIKATOR		TARGET	URUSAN	INSTANSI PELAKSANA
2.1 menghilangkan kelaparan dan menjamin akses bagi semua orang, khususnya orang miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, termasuk bayi, terhadap makanan yang aman, bergizi, dan cukup sepanjang tahun.	2.1.1 *	Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment).	menurun	Pangan	Dinas Kesehatan / DKPTPH
	2.1.1 (a)	Prevalensi kekurangan gizi (underweight) pada anak balita.	menurun 17%	Kesehatan	Dinas Kesehatan
	2.1.2 *	Prevalensi penduduk dengan kerawanan pangan sedang atau berat, berdasarkan pada Skala Pengalaman Kerawanan Pangan.	menurun	Pangan	Dinas Kesehatan / DKPTPH
	2.1.2 (a)	Proporsi penduduk dengan asupan kalori minimum di bawah 1400 kkal/kapita/hari.	menurun 8,5%	Pangan	Dinas Kesehatan / DKPTPH
2.2 menghilangkan segala bentuk kekurangan gizi, termasuk pada tahun 2025 mencapai target yang disepakati secara internasional untuk anak pendek dan kurus di bawah usia 5 tahun, dan	2.2.1 *	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah lima tahun/balita.	menurun	Kesehatan	Dinas Kesehatan
	2.2.1 (a)	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah dua tahun/baduta.	Menurun 28%	Kesehatan	Dinas Kesehatan

memenuhi kebutuhan gizi remaja perempuan, ibu hamil dan menyusui, serta manula.	2.2.2 *	Prevalensi malnutrisi (berat badan/tinggi badan) anak pada usia kurang dari 5 tahun, berdasarkan tipe.	menurun	Kesehatan	(tidak digunakan)
	2.2.2 (a)	Prevalensi anemia pada ibu hamil.	menurun 28%	Kesehatan	Dinas Kesehatan
	2.2.2 (b)	Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapatkan ASI eksklusif.	Meningkat 50%	Kesehatan	Dinas Kesehatan
	2.2.2 (c)	Kualitas konsumsi pangan yang diindikasikan oleh skor Pola Pangan Harapan (PPH) mencapai; dan tingkat konsumsi ikan. PPH: 92,5 Konsumsi Ikan: 54,5 kg/kpt/thn	Meningkat	Pangan	DKPTPH dan Dinas Perikanan
2.3 menggandakan produktivitas pertanian dan pendapatan produsen makanan skala kecil, khususnya perempuan, masyarakat penduduk asli, keluarga petani, penggembala dan nelayan, termasuk melalui akses yang aman dan sama terhadap lahan, sumber daya produktif, dan input lainnya, pengetahuan, jasa keuangan, pasar, dan peluang nilai tambah, dan pekerjaan nonpertanian	2.3.1 *	Nilai Tambah Pertanian dibagi jumlah tenaga kerja di sektor pertanian (rupiah per tenaga kerja).	meningkat	Tenaga Kerja	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Tabel 4.4. Identifikasi Pelaksanaan TPB ke-3. Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Sejahtera

URAIAN TARGET	INDIKATOR		TARGET	URUSAN	INSTANSI PELAKSANA
3.1 mengurangi rasio angka kematian ibu hingga kurang dari 70 per 100.000 kelahiran hidup.	3.1.1*	Angka Kematian Ibu (AKI).	Menurun 306	Kesehatan	Dinas Kesehatan
	3.1.2*	Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya ditolong oleh tenaga kesehatan	meningkat 95%	Kesehatan	Dinas Kesehatan

URAIAN TARGET	INDIKATOR		TARGET	URUSAN	INSTANSI PELAKSANA
		terlatih.			
	3.1.2(a)	Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan.	meningkat 85%	Kesehatan	Dinas Kesehatan
3.2. mengakhiri kematian bayi baru lahir dan balita yang dapat dicegah, dengan menurunkan Angka Kematian Neonatal setidaknya hingga 12 per 1000 Kelahiran Hidup dan Angka Kematian Balita 25 per 1000.	3.2.1*	Angka Kematian Balita (AKBa) per 1000 kelahiran hidup.	menurun	Kesehatan	Dinas Kesehatan
	3.2.2*	Angka Kematian Neonatal (AKN) per 1000 kelahiran hidup.	menurun	Kesehatan	Dinas Kesehatan
	3.2.2(a)	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup.	menurun 24	Kesehatan	Dinas Kesehatan
	3.2.2(b)	Persentase kabupaten/kota yang mencapai 80% imunisasi dasar lengkap pada bayi.	meningkat 95%	Kesehatan	Dinas Kesehatan
3.3. mengakhiri epidemi AIDS, tuberkulosis, malaria, dan penyakit tropis yang terabaikan, dan memerangi hepatitis, penyakit bersumber air, serta penyakit menular lainnya.	3.3.1(a)	Prevalensi HIV pada populasi dewasa.	menurun	Kesehatan	Dinas Kesehatan
	3.3.2(a)	Insiden Tuberkulosis (ITB) per 100.000 penduduk.	menurun	Kesehatan	Dinas Kesehatan
	3.3.3*	Kejadian Malaria per 1000 orang.	menurun	Kesehatan	Dinas Kesehatan
	3.3.3(a)	Jumlah kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria.	menurun	Kesehatan	(tidak digunakan)
	3.3.4(a)	Persentase kabupaten/kota yang melakukan deteksi dini untuk infeksi Hepatitis B.	meningkat	Kesehatan	(Tidak Digunakan)
	3.3.5*	Jumlah orang yang memerlukan intervensi terhadap penyakit tropis yang terabaikan (Filariasis dan Kusta).	menurun	Kesehatan	(Tidak Digunakan)
	3.3.5(a)	Jumlah provinsi dengan eliminasi Kusta.	meningkat	Kesehatan	(tidak digunakan)
	3.3.5(b)	Jumlah kab/kota dengan eliminasi filariasis (berhasil lolos dalam survei penilaian transmisi tahap I).	meningkat	Kesehatan	(tidak digunakan)
3.4. mengurangi hingga sepertiga angka kematian dini akibat penyakit tidak menular, melalui pencegahan dan pengobatan, serta	3.4.1(a)	Persentase merokok pada penduduk umur ≤18 tahun.	menurun	Kesehatan	(Tidak Digunakan)
	3.4.1(b)	Prevalensi tekanan darah tinggi.	menurun 24,3%	Kesehatan	Dinas Kesehatan

URAIAN TARGET	INDIKATOR		TARGET	URUSAN	INSTANSI PELAKSANA
meningkatkan kesehatan mental dan kesejahteraan.	3.4.1(c)	Prevalensi obesitas pada penduduk umur ≥ 18 tahun.	menurun	Kesehatan	(tidak digunakan)
	3.4.2*	Angka kematian (insidens rate) akibat bunuh diri.	menurun	Kesehatan	(tidak digunakan)
	3.4.2(a)	Jumlah kabupaten/kota yang memiliki puskesmas yang menyelenggarakan upaya kesehatan jiwa.	meningkat	Kesehatan	(tidak digunakan)
3.5 Memperkuat pencegahan dan pengobatan penyalahgunaan zat, termasuk penyalahgunaan narkotika dan penggunaan alkohol yang membahayakan.	3.5.1(e)	Prevalensi penyalahgunaan narkoba.	menurun	Kesehatan	(tidak digunakan)
	3.5.2*	Konsumsi alkohol (liter per kapita) oleh penduduk umur ≥ 15 tahun dalam satu tahun terakhir.	menurun	Kesehatan	(tidak digunakan)
3.7 menjamin akses universal terhadap layanan kesehatan seksual dan reproduksi, termasuk keluarga berencana, informasi dan pendidikan, dan integrasi kesehatan reproduksi ke dalam strategi dan program nasional.	3.7.1*	Proporsi perempuan usia reproduksi (15-49 tahun) atau pasangannya yang memiliki kebutuhan keluarga berencana dan menggunakan alat kontrasepsi metode modern.	meningkat 66%	Keluarga Berencana	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	3.7.1(a)	Angka prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada Pasangan Usia Subur (PUS) usia 15-49 tahun yang berstatus kawin.	meningkat 65%	Keluarga Berencana	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	3.7.1(b)	Angka penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP) cara modern.	meningkat 23,5%	Keluarga Berencana	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	3.7.2*	Angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR).	menurun 38	Kesehatan	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	3.7.2(a)	Total Fertility Rate (TFR).	menurun 2,28	Kel. Berencana	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
3.8 Mencapai cakupan kesehatan universal, termasuk perlindungan risiko keuangan, akses terhadap pelayanan kesehatan dasar yang baik, dan akses terhadap obat-obatan dan vaksin dasar yang	3.8.1(a)	Unmet need pelayanan kesehatan.	menurun 9,91%	Kesehatan	Dinas Kesehatan
	3.8.2*	Jumlah penduduk yang dicakup asuransi kesehatan atau sistem kesehatan masyarakat per 1000 penduduk.	meningkat 95%	Kesehatan	(tidak digunakan)

URAIAN TARGET	INDIKATOR		TARGET	URUSAN	INSTANSI PELAKSANA
aman, efektif, berkualitas, dan terjangkau bagi semua orang.	3.8.2(a)	Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).	meningkat 95%	Kesehatan	Dinas Kesehatan
3.9 secara signifikan mengurangi jumlah kematian dan kesakitan akibat bahan kimia berbahaya, serta polusi dan kontaminasi udara, air, dan tanah.	3.9.3(a)	Proporsi kematian akibat keracunan.	Menurun	Kesehatan	(tidak digunakan)
3.a Memperkuat pelaksanaan the Framework Convention on Tobacco Control WHO di seluruh negara sebagai langkah yg tepat.	3.a.1*	Persentase merokok pada penduduk umur ≥ 15 tahun.	Menurun	Kesehatan	(tidak digunakan)
3.b Mendukung penelitian dan pengembangan vaksin dan obat penyakit menular dan tidak menular serta menyediakan akses terhadap obat dan vaksin dasar yang terjangkau untuk melindungi kesehatan masyarakat, khususnya, menyediakan akses obat bagi semua.	3.b.1(a)	Persentase ketersediaan obat dan vaksin di Puskesmas.	meningkat	Kesehatan	Dinas Kesehatan
3.c Meningkatkan secara signifikan pembiayaan kesehatan dan rekrutmen, pengembangan, pelatihan, dan retensi tenaga kesehatan	3.c.1*	Kepadatan dan distribusi tenaga kesehatan.	meningkat	Kesehatan	Dinas Kesehatan

Tabel 4.5. Identifikasi Pelaksanaan TPB ke-4. Menjamin Pendidikan yang Berkualitas

URAIAN TARGET	INDIKATOR		TARGET	URUSAN	IDENTIFIKASI
4.1 menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah tanpa dipungut biaya, setara, dan berkualitas, yang mengarah pada capaian pembelajaran yang relevan dan efektif.	4.1.1*	Proporsi anak-anak dan remaja: (a) pada kelas 4, (b) tingkat akhir SD/kelas 6, (c) tingkat akhir SMP/kelas 9 yang mencapai standar kemampuan minimum dalam: (i) membaca, (ii) matematika.	meningkat	Pendidikan	Dinas Pendidikan
	4.1.1(a)	Persentase SD/MI berakreditasi minimal B.	meningkat	Pendidikan	(tidak digunakan)
	4.1.1(b)	Persentase SMP/MTs berakreditasi minimal B.	meningkat	Pendidikan	(tidak Digunakan)
	4.1.1(d)	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/ sederajat.	Meningkat 114,09%	pendidikan	Dinas Pendidikan
	4.1.1(e)	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/ sederajat.	meningkat 106,94%	Pendidikan	Dinas Pendidikan
	4.1.1(f)	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/ sederajat	Meningkat 91,63 %	Pendidikan	(tidak digunakan)
	4.1.1(g)	Rata-rata lama sekolah penduduk umur ≥ 15 tahun.	meningkat 8,8%	Pendidikan	Dinas Pendidikan
4.2 menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki memiliki akses terhadap perkembangan dan pengasuhan anak usia dini, pengasuhan, pendidikan pra- sekolah dasar yang berkualitas, sehingga mereka siap untuk menempuh pendidikan dasar.	4.2.2(a)	Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).	meningkat 77,2%	Pendidikan	Dinas Pendidikan
	4.3.1(a)	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/ sederajat	Meningkat	Pendidikan	(tidak digunakan)

URAIAN TARGET	INDIKATOR		TARGET	URUSAN	IDENTIFIKASI
4.3. menjamin akses yang sama bagi semua perempuan dan laki-laki, terhadap pendidikan teknik, kejuruan dan pendidikan tinggi, termasuk universitas, yang terjangkau dan berkualitas.			91,63 %		
	4.3.1(b)	Angka Partisipasi Kasar (APK) Perguruan Tinggi (PT).	Meningkat 36,73 %	Pendidikan	(tidak digunakan)
4.4 meningkatkan secara signifikan jumlah pemuda dan orang dewasa yang memiliki keterampilan yang relevan, termasuk keterampilan teknik dan kejuruan, untuk pekerjaan, pekerjaan yang layak dan kewirausahaan	4.4.1*	Proporsi remaja dan dewasa dengan keterampilan teknologi informasi dan komunikasi (TIK).	meningkat	Tenaga Kerja	Dinas Komunikasi dan Informastika / Dinas Pendidikan / Dinas Tenaga Kerja
4.5 menghilangkan disparitas gender dalam pendidikan, dan menjamin akses yang sama untuk semua tingkat pendidikan dan pelatihan kejuruan, bagi masyarakat rentan termasuk penyandang cacat, masyarakat penduduk asli, dan anak-anak dalam kondisi rentan.	4.5.1*	Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) perempuan/laki- laki di	meningkat	Pendidikan	Dinas Pendidikan
		(1) SD/MI/ sederajat;			
		(2) SMP/MTs/ sederajat;			
		(3) SMA/SMK/MA/ sederajat; dan			
		Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) perempuan/laki-laki di (4) Perguruan Tinggi.			
4.6 menjamin bahwa semua remaja dan proporsi kelompok dewasa tertentu, baik laki-laki maupun perempuan, memiliki kemampuan literasi dan numerasi.	4.6.1(a)	Persentase angka melek aksara penduduk umur ≥ 15 tahun.	meningkat 96,1%	Pendidikan	Dinas Pendidikan
	4.6.1(b)	Persentase angka melek aksara penduduk umur 15-24 tahun dan umur 15-59 tahun.	meningkat	Pendidikan	Dinas Pendidikan
4.a Membangun dan meningkatkan fasilitas pendidikan yang ramah anak, ramah penyandang cacat dan gender, serta menyediakan lingkungan belajar yang aman,	4.a.1*	Proporsi sekolah dengan akses ke: (a) listrik (b) internet untuk tujuan pengajaran, (c) komputer untuk tujuan pengajaran, (d) infrastruktur dan materi memadai bagi siswa disabilitas, (e) air minum layak, (f) fasilitas sanitasi dasar	meningkat	Pendidikan	Dinas Pendidikan

URAIAN TARGET	INDIKATOR		TARGET	URUSAN	IDENTIFIKASI
anti kekerasan, inklusif dan efektif bagi semua.		per jenis kelamin, (g) fasilitas cuci tangan (terdiri air, sanitasi, dan higienis bagi semua (WASH)).			
4.c secara signifikan meningkatkan pasokan guru yang berkualitas.	4.c.1*	Persentase guru TK, SD, SMP, SMA, SMK, dan PLB yang bersertifikat pendidik.	meningkat %	Pendidikan	Dinas Pendidikan

Tabel 4.6. Identifikasi Pelaksanaan TPB ke-5. Mencapai Kestaraan Gender dan Memberdayakan Kaum Perempuan

URAIAN TARGET	INDIKATOR		TARGET	URUSAN	INSTANSI PELAKSANA
5.1. Mengakhiri segala bentuk diskriminasi terhadap kaum perempuan dimanapun.	5.1.1*	Jumlah kebijakan yang responsif gender mendukung pemberdayaan perempuan.	bertambah	Pemberdayaan Perempuan	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA)
5.2 Menghapuskan segala bentuk kekerasan terhadap kaum perempuan di ruang publik dan pribadi, termasuk perdagangan orang dan eksploitasi seksual, serta berbagai jenis eksploitasi lainnya.	5.2.1*	Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan (fisik, seksual, atau emosional) oleh pasangan atau mantan pasangan dalam 12 bulan terakhir.	Menurun	Pemberdayaan Perempuan	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	5.2.1(a)	Prevalensi kekerasan terhadap anak perempuan.	menurun <20,48%	Pemberdayaan Perempuan	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	5.2.2*	Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan seksual oleh orang lain selain pasangan dalam 12 bulan terakhir.	Menurun	Pemberdayaan Perempuan	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	5.2.2(a)	Persentase korban kekerasan terhadap perempuan yang mendapat layanan komprehensif.	meningkat 70%	Pemberdayaan Perempuan	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

URAIAN TARGET	INDIKATOR		TARGET	URUSAN	INSTANSI PELAKSANA
5.3 Menghapuskan semua praktik berbahaya, seperti perkawinan usia anak, perkawinan dini dan paksa, serta sunat perempuan.	5.3.1*	Proporsi perempuan umur 20-24 tahun yang berstatus kawin atau berstatus hidup bersama sebelum umur 15 tahun dan sebelum umur 18 tahun.	menurun	Kependudukan	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	5.3.1(a)	Median usia kawin pertama perempuan pernah kawin umur 25-49 tahun.	meningkat 21 tahun	Pemberdayaan Perempuan	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	5.3.1(b)	Angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR).	menurun	Keluarga Berencana	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	5.3.1(c)	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/ sederajat	Meningkat 91,63 %	Pendidikan	(tidak digunakan)
5.5 Menjamin partisipasi penuh dan efektif, dan kesempatan yang sama bagi perempuan untuk memimpin di semua tingkat pengambilan keputusan dalam kehidupan politik, ekonomi, dan masyarakat.	5.5.1*	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di parlemen tingkat pusat, parlemen daerah dan pemerintah daerah.	meningkat	Pemberdayaan Perempuan	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	5.5.2*	Proporsi perempuan yang berada di posisi managerial.	meningkat	Pemberdayaan Perempuan	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
5.6 Menjamin akses universal terhadap kesehatan seksual dan reproduksi, dan hak reproduksi	5.6.1*	Proporsi perempuan umur 15-49 tahun yang membuat keputusan sendiri terkait hubungan seksual, penggunaan kontrasepsi, dan layanan kesehatan reproduksi.	meningkat	Keluarga Berencana	(tidak digunakan)
	5.6.1(a)	Unmet need KB (Kebutuhan Keluarga Berencana/KB yang tidak terpenuhi).	menurun 9,9%	Keluarga Berencana	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	5.6.1(b)	Pengetahuan dan pemahaman Pasangan Usia Subur (PUS) tentang metode kontrasepsi modern.	meningkat	Keluarga Berencana	(tidak digunakan)

URAIAN TARGET	INDIKATOR		TARGET	URUSAN	INSTANSI PELAKSANA
5.b. Meningkatkan penggunaan teknologi yang memampukan, khususnya teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan pemberdayaan perempuan.	5.b.1*	Proporsi individu yang menguasai/memiliki telepon genggam.	meningkat	Komunikasi dan Informasi	Dinas Komunikasi dan Informatika

Tabel 4.7. Identifikasi Pelaksanaan TPB ke-6. Menjamin Ketersediaan Air Bersih dan Sanitasi yang Berkelanjutan

URAIAN TARGET	INDIKATOR		TARGET	URUSAN	INSTANSI PELAKSANA
6.1. mencapai akses universal dan merata terhadap air minum yang aman dan terjangkau bagi semua.	6.1.1(a)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak.	meningkat 100%	Pemukiman	DPRKP
	6.1.1(b)	Kapasitas prasarana air baku untuk melayani rumah tangga, perkotaan dan industri, serta penyediaan air baku untuk pulau-pulau.	meningkat 118,6 m3/detik	Pemukiman	DPRKP
	6.1.1(c)	Proporsi populasi yang memiliki akses layanan sumber air minum aman dan berkelanjutan.	meningkat 100%	Pemukiman	DPRKP
6.2 mencapai akses terhadap sanitasi dan kebersihan yang memadai dan merata bagi semua, dan menghentikan praktik buang air besar di tempat terbuka, memberikan perhatian khusus pada kebutuhan kaum perempuan, serta kelompok masyarakat rentan.	6.2.1(a)	Proporsi populasi yang memiliki fasilitas cuci tangan dengan sabun dan air.	meningkat	Kesehatan	(tidak digunakan)
	6.2.1(b)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak.	meningkat 100%	Kesehatan	Dinas Kesehatan
	6.2.1(c)	Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM).	meningkat	Kesehatan	Dinas Kesehatan
	6.2.1(d)	Jumlah desa/kelurahan yang Open Defecation Free (ODF)/ Stop	meningkat	Kesehatan	Dinas Kesehatan

URAIAN TARGET	INDIKATOR		TARGET	URUSAN	INSTANSI PELAKSANA
		Buang Air Besar Sembarangan (SBS).			
	6.2.1(e)	Jumlah kabupaten/kota yang terbangun infrastruktur air limbah dengan sistem terpusat skala kota, kawasan dan komunal.	meningkat	Pemukiman	(tidak digunakan)
	6.2.1(f)	Proporsi rumah tangga yang terlayani sistem pengelolaan air limbah terpusat.	meningkat	Pemukiman	DPRKP
6.3 meningkatkan kualitas air dengan mengurangi polusi, menghilangkan pembuangan, dan meminimal-kan pelepasan material dan bahan kimia berbahaya, mengurangi setengah proporsi air limbah yang tidak diolah, dan secara signifikan meningkatkan daur ulang, serta penggunaan kembali barang daur ulang yang aman secara global.	6.3.1(a)	Jumlah kabupaten/kota yang ditingkatkan kualitas pengelolaan lumpur tinja perkotaan dan dilakukan pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT).	meningkat	Pemukiman	(tidak digunakan)
	6.3.1(b)	Proporsi rumah tangga yang terlayani sistem pengelolaan lumpur tinja.	meningkat	Pemukiman	DPRKP
	6.3.2(a)	Kualitas air danau.	meningkat	Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup
	6.3.2(b)	Kualitas air sungai sebagai sumber air baku.	meningkat	Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup
6.4 secara signifikan meningkatkan efisiensi penggunaan air di semua sektor, dan menjamin penggunaan dan pasokan air tawar yang berkelanjutan untuk mengatasi kelangkaan air, dan secara signifikan mengurangi jumlah orang yang menderita akibat kelangkaan air.	6.4.1(b)	Insentif penghematan air pertanian/perkebunan dan industri.	meningkat	Pekerjaan Umum	(tidak digunakan)
6.5 menerapkan pengelolaan sumber daya air terpadu di semua tingkatan, termasuk melalui kerjasama lintas batas yang tepat.	6.5.1(a)	Jumlah Rencana Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Terpadu (RPDAST) yang diinternalisasi ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).	ada	Pekerjaan Umum	(tidak digunakan)
	6.5.1(c)	Jumlah jaringan informasi sumber daya air yang dibentuk.	meningkat	Pekerjaan Umum	(tidak digunakan)

URAIAN TARGET	INDIKATOR		TARGET	URUSAN	INSTANSI PELAKSANA
	6.5.1(f)	Jumlah wilayah sungai yang memiliki partisipasi masyarakat dalam pengelolaan daerah tangkapan sungai dan danau.	meningkat	Pekerjaan Umum	(tidak digunakan)
	6.5.1(g)	Kegiatan penataan kelembagaan sumber daya air.	meningkat	Pekerjaan Umum	(tidak digunakan)

Tabel 4.8. Identifikasi Pelaksanaan TPB ke-7. Menjamin Akses Energi yang Terjangkau, Andal, Berkelanjutan dan Modern

URAIAN TARGET	INDIKATOR		TARGET	URUSAN	INSTANSI PELAKSANA
7.1. menjamin akses universal layanan energi yang terjangkau, andal dan modern	7.1.1*	Rasio elektrifikasi.	Meningkat 96,6%	Pemukiman	DPRKP
7.2 meningkat secara substansial pangsa energi terbarukan dalam bauran energi global.	7.2.1*	Bauran energi terbarukan.	meningkat 10-16%	Pemukiman	DPRKP
7.3 melakukan perbaikan efisiensi energi di tingkat global sebanyak dua kali lipat.	7.3.1*	Intensitas energi primer.	menurun 463,2 SBM	Pemukiman	DPRKP

Tabel 4.9. Identifikasi Pelaksanaan TPB ke-8. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan

URAIAN TARGET	INDIKATOR		TARGET	URUSAN	INSTANSI PELAKSANA
8.1 Mempertahankan pertumbuhan ekonomi per kapita sesuai dengan kondisi nasional dan, khususnya, setidaknya 7 persen pertumbuhan produk domestik bruto per tahun	8.1.1*	Laju pertumbuhan PDB per kapita.	meningkat	Perencanaan Pembangunan	BAPPEDA
	8.1.1(a)	PDB per kapita.	meningkat >50Jt	Perencanaan Pembangunan	BAPPEDA
8.2 Mencapai tingkat produktivitas ekonomi yang lebih tinggi, melalui diversifikasi, peningkatan dan inovasi teknologi, termasuk melalui fokus pada sektor yang memberi nilai tambah tinggi dan padat karya.	8.2.1*	Laju pertumbuhan PDB per tenaga kerja / Tingkat pertumbuhan PDB riil per orang bekerja per tahun.	meningkat	Tenaga Kerja	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
8.3 Menggalakkan kebijakan pembangunan yang mendukung kegiatan produktif, penciptaan lapangan kerja layak, kewirausahaan, kreativitas dan inovasi, dan mendorong formalisasi dan pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah, termasuk melalui akses terhadap jasa keuangan.	8.3.1*	Proporsi lapangan kerja informal sektor non-pertanian, berdasarkan jenis kelamin.	meningkat	Tenaga Kerja	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
	8.3.1(a)	Persentase tenaga kerja formal.	meningkat 51%	Tenaga Kerja	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
	8.3.1(b)	Persentase tenaga kerja informal sektor pertanian.	meningkat	Tenaga Kerja	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
	8.3.1(c)	Persentase akses UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) ke layanan keuangan.	Meningkat	UKM, Koperasi & Perindustrian	(tidak digunakan)
8.5 mencapai pekerjaan tetap dan produktif dan pekerjaan yang layak bagi semua perempuan dan laki-laki, termasuk bagi pemuda dan penyandang difabilitas, dan	8.5.1*	Upah rata-rata per jam pekerja.	meningkat	Tenaga Kerja	(tidak digunakan)
	8.5.2*	Tingkat pengangguran terbuka berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur.	menurun	Tenaga Kerja	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

URAIAN TARGET	INDIKATOR		TARGET	URUSAN	INSTANSI PELAKSANA
upah yang sama untuk pekerjaan yang sama nilainya.	8.5.2(a)	Tingkat setengah pengangguran.	menurun	Tenaga Kerja	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
8.6 secara substansial mengurangi proporsi usia muda yang tidak bekerja, tidak menempuh pendidikan atau pelatihan.	8.6.1*	Persentase usia muda (15-24 tahun) yang sedang tidak sekolah, bekerja atau mengikuti pelatihan (NEET).	Menurun	Tenaga Kerja	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
8.8 Melindungi hak-hak tenaga kerja dan mempromosikan lingkungan kerja yang aman dan terjamin bagi semua pekerja, termasuk pekerja migran, khususnya pekerja migran perempuan, dan mereka yang bekerja dalam pekerjaan berbahaya.	8.8.1 (a)	Jumlah perusahaan yang menerapkan norma K3.	Meningkat	Tenaga Kerja	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
8.9 menyusun dan melaksanakan kebijakan untuk mempromosikan pariwisata berkelanjutan yang menciptakan lapangan kerja dan mempromosikan budaya dan produk lokal	8.9.1*	Proporsi kontribusi pariwisata terhadap PDB.	Meningkat 8%	Pariwisata	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (DISBUDPAR)
	8.9.1 (a)	Jumlah wisatawan mancanegara.	Meningkat	Pariwisata	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (DISBUDPAR)
	8.9.1. (b)	Jumlah kunjungan wisatawan nusantara.	Meningkat	Pariwisata	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (DISBUDPAR)
	8.9.1 (c)	Jumlah devisa sektor pariwisata.	Meningkat	Pariwisata	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (DISBUDPAR)
	8.9.2.*	Jumlah pekerja pada industri pariwisata dalam proporsi terhadap total pekerja.	Meningkat	Pariwisata	(tidak digunakan)
	8.10.1*	Jumlah kantor bank dan ATM per 100.000 penduduk dewasa	Meningkat	Ekonomi	DPMPSTP

URAIAN TARGET	INDIKATOR		TARGET	URUSAN	INSTANSI PELAKSANA
8.10 Memperkuat kapasitas lembaga keuangan domestik untuk mendorong dan memperluas akses terhadap perbankan, asuransi dan jasa keuangan bagi semua.	8.10.1 (a)	Rata-rata jarak lembaga keuangan (Bank Umum).	Menurun	Ekonomi	DPMPTSP
	8.10.1 (b)	Proporsi kredit UMKM terhadap total kredit.	Meningkat	UKM, Koperasi & Perindustrian	(tidak digunakan)

Tabel 4.10. Identifikasi Pelaksanaan TPB ke-9. Membangun Infrastruktur Tangguh, Industri Berkelanjutan dan Inovasi

URAIAN TARGET	INDIKATOR		TARGET	URUSAN	INSTANSI PELAKSANA
9.1 Mengembangkan infrastruktur yang berkualitas, andal, berkelanjutan dan tangguh, termasuk infrastruktur regional dan lintas batas, untuk mendukung pembangunan ekonomi dan kesejahteraan manusia, dengan fokus pada akses yang terjangkau dan merata bagi semua.	9.1.1 (a)	Kondisi Mantap Jalan (Kabupaten)	Meningkat	Pekerjaan Umum	DPUPR
	9.1.1 (b)	Panjang pembangunan jalan tol.	Meningkat	Pekerjaan Umum	Dinas Perhubungan
	9.1.1 (c)	Panjang jalur kereta api.	Meningkat	Perhubungan	(tidak digunakan)
	9.1.2 (b)	Jumlah dermaga penyeberangan.	Meningkat	Perhubungan	Dinas Perhubungan
	9.1.2 (c)	Jumlah pelabuhan strategis.	Meningkat		(tidak digunakan)
9.2 Mempromosikan industrialisasi inklusif dan berkelanjutan, secara signifikan meningkatkan proporsi industri dalam lapangan kerja dan produk domestik bruto, sejalan dengan kondisi nasional, dan meningkatkan dua kali lipat proporsinya	9.2.1*	Proporsi nilai tambah sektor industri manufaktur terhadap PDB dan per kapita.	Meningkat	UKM, Koperasi & Perindustrian	Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian
	9.2.1 (a)	Laju pertumbuhan PDB industri manufaktur.	Lebih tinggi dari PDB	UKM, Koperasi & Perindustrian	Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian
	9.2.2 *	Proporsi tenaga kerja pada sektor industri manufaktur.	Meningkat	UKM, Koperasi & Perindustrian	Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian
9.3 Meningkatkan akses industri dan perusahaan skala kecil terhadap jasa keuangan, termasuk kredit terjangkau, dan mengintegrasikan ke dalam rantai nilai dan pasar.	9.3.1*	Proporsi nilai tambah industri kecil terhadap total nilai tambah industri.	Meningkat	UKM, Koperasi & Perindustrian	(tidak digunakan)
	9.3.2*	Proporsi industri kecil dengan pinjaman atau kredit.	Meningkat	UKM, Koperasi & Perindustrian	(tidak digunakan)

URAIAN TARGET	INDIKATOR		TARGET	URUSAN	INSTANSI PELAKSANA
9.5 Memperkuat riset ilmiah, meningkatkan kapabilitas teknologi sektor industri di semua negara, mendorong inovasi dan secara substansial meningkatkan jumlah pekerja penelitian dan pengembangan per 1 juta orang dan meningkatkan pembelanjaan publik dan swasta untuk penelitian dan pengembangan.	9.5.19	Proporsi anggaran riset pemerintah terhadap PDB.	Meningkat	Perencanaan Pembangunan	BAPPEDA
9.c Secara signifikan meningkatkan akses terhadap teknologi informasi dan komunikasi, dan mengusahakan penyediaan akses universal dan terjangkau internet	9.c.1*	Proporsi penduduk yang terlayani mobile broadband.	Meningkat	Perencanaan Pembangunan	Dinas Komunikasi & Informatika
	9.c.1 (a)	Proporsi individu yang menguasai/memiliki telepon genggam	Meningkat	Komunikasi dan Informasi	Dinas Komunikasi & Informatika
	9.c.c (b)	Proporsi individu yang menggunakan internet	Meningkat	Komunikasi dan Informasi	Dinas Komunikasi & Informatika

Tabel 4.11. Identifikasi Pelaksanaan TPB ke-10. Mengurangi Kesenjangan

URAIAN TARGET	INDIKATOR		TARGET	URUSAN	INSTANSI PELAKSANA
10.1 secara progresif mencapai dan mempertahankan pertumbuhan pendapatan penduduk yang berada di bawah 40% dari populasi pada tingkat yang lebih tinggi dari rata-rata nasional.	10.1.1*	Koefisien Gini.	Menurun 0,36	Perencanaan Pembangunan	BAPPEDA
	10.1.1(a)	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur.	menurun 7% - 8%	Sosial	Dinas Sosial
	10.1.1(b)	Jumlah daerah tertinggal yang terentaskan.	meningkat	Perencanaan Pembangunan	(tidak digunakan)
	10.1.1(c)	Jumlah desa tertinggal.	berkurang	Pemerintahan Desa	DPMPD
	10.1.1(d)	Jumlah Desa Mandiri.	meningkat	Pemerintahan Desa	DPMPD
	10.1.1(e)	Rata-rata pertumbuhan ekonomi di daerah tertinggal.	meningkat	Perencanaan Pembangunan	(tidak digunakan)
	10.1.1(f)	Persentase penduduk miskin di daerah tertinggal.	menurun	Perencanaan Pembangunan	(tidak digunakan)
10.2 memberdayakan dan meningkatkan inklusi sosial, ekonomi dan politik bagi semua, terlepas dari usia, jenis kelamin, difabilitas, ras, suku, asal, agama atau kemampuan ekonomi atau status lainnya.	10.2.1*	Proporsi penduduk yang hidup di bawah 50 persen dari median pendapatan, menurut jenis kelamin dan penyandang difabilitas.	menurun	Sosial	(tidak digunakan)
10.3 Menjamin kesempatan yang sama dan mengurangi kesenjangan hasil, termasuk dengan menghapus hukum,	10.3.1(a)	Indeks Kebebasan Sipil.	Meningkat	Sosial	(tidak digunakan)

URAIAN TARGET	INDIKATOR		TARGET	URUSAN	INSTANSI PELAKSANA
kebijakan dan praktik yang diskriminatif, dan mempromosikan legislasi, kebijakan dan tindakan yang tepat terkait legislasi dan kebijakan tersebut.					
	10.3.1(d)	Jumlah kebijakan yang diskriminatif dalam 12 bulan lalu berdasarkan pelarangan diskriminasi menurut hukum HAM Internasional.	Ada	Sosial	(tidak digunakan)
10.4 Mengadopsi kebijakan, terutama kebijakan fiskal, upah dan perlindungan sosial, serta secara progresif mencapai kesetaraan yang lebih besar.	10.4.1(b)	Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan.	meningkat	Tenaga Kerja	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Tabel 4.12. Identifikasi Pelaksanaan TPB ke-11. Menjadikan Kota dan Permukiman Inklusif, Aman, Tangguh & Berkelanjutan

URAIAN TARGET	INDIKATOR		TARGET	URUSAN	INSTANSI PELAKSANA
11.1 menjamin akses bagi semua terhadap perumahan yang layak, aman, terjangkau, dan pelayanan dasar, serta menata kawasan kumuh.	11.1.1(a)	Proporsi rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau (%)	meningkat	Pemukiman	DPRKP
	11.1.1(b)	Jumlah kawasan perkotaan metropolitan yang terpenuhi standar pelayanan perkotaan (SPP).	meningkat	Pemukiman	(tidak digunakan)
11.3 memperkuat urbanisasi yang inklusif dan berkelanjutan serta kapasitas partisipasi, perencanaan penanganan permukiman yang berkelanjutan dan terintegrasi di semua negara.	11.3.1(b)	Jumlah Metropolitan baru di luar Jawa sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN).	meningkat	Pemukiman	(tidak digunakan)
	11.3.2(b)	Jumlah lembaga pembiayaan infrastruktur.	meningkat	Pemukiman	(tidak digunakan)

URAIAN TARGET	INDIKATOR		TARGET	URUSAN	INSTANSI PELAKSANA
11.4 Mempromosikan dan menjaga warisan budaya dunia dan warisan alam dunia.	11.4.1(a)	Jumlah kota pusaka di kawasan perkotaan metropolitan, kota besar, kota sedang dan kota kecil.	meningkat	Pemukiman	(tidak digunakan)
11.5 secara signifikan mengurangi jumlah kematian dan jumlah orang terdampak, dan secara substansial mengurangi kerugian ekonomi relatif terhadap PDB global yang disebabkan oleh bencana, dengan fokus melindungi orang miskin dan orang-orang dalam situasi rentan.	11.5.1*	Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.	menurun	Penanggulang an Bencana	BPBD
	11.5.1(a)	Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI).	menurun 30%	Penanggulang an Bencana	BPBD
	11.5.1(c)	Jumlah sistem peringatan dini cuaca dan iklim serta kebencanaan.	ada	Penanggulang an Bencana	BPBD
	11.5.2(a)	Jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana.	menurun	Penanggulang an Bencana	BPBD
11.6 mengurangi dampak lingkungan perkotaan per kapita yang merugikan, termasuk dengan memberi perhatian khusus pada kualitas udara, termasuk penanganan sampah kota.	11.6.1(a)	Persentase sampah perkotaan yang tertangani.	Meningkat 80%	Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup
	11.6.1(b)	Jumlah kota hijau yang mengembangkan dan menerapkan green waste di kawasan perkotaan metropolitan.	meningkat	Pemukiman	(tidak digunakan)
11.7 menyediakan ruang publik dan ruang terbuka hijau yang aman, inklusif dan mudah dijangkau terutama untuk perempuan dan anak, manula dan penyandang difabilitas.	11.7.1(a)	Jumlah kota hijau yang menyediakan ruang terbuka hijau di kawasan perkotaan metropolitan dan kota sedang.	Ada / meningkat	Pemukiman	DPRKP
11.b meningkatkan secara substansial jumlah kota dan permukiman yang meng-adopsi dan	11.b.2*	Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat daerah.	ada	Penanggulang an	BPBD

URAIAN TARGET	INDIKATOR		TARGET	URUSAN	INSTANSI PELAKSANA
mengimplementasi kebijakan dan perencanaan yang terintegrasi tentang penyertaan, efisiensi sumber daya, mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim, ketahanan terhadap bencana, serta mengembangkan dan mengimplementasikan penanganan holistik risiko bencana di semua lini,				Bencana	

Tabel 4.13. Identifikasi Pelaksanaan TPB ke-12. Menjamin Pola Produksi dan Konsumsi yang Berkelanjutan

URAIAN TARGET	INDIKATOR		TARGET	URUSAN	INSTANSI PELAKSANA
12.4 mencapai pengelolaan bahan kimia dan semua jenis limbah yang ramah lingkungan, di sepanjang siklus hidupnya, sesuai kerangka kerja internasional yang disepakati dan secara signifikan mengurangi pencemaran bahan kimia dan limbah tersebut ke udara, air, dan tanah untuk meminimalkan dampak buruk terhadap kesehatan manusia dan lingkungan.	12.4.1(a)	Jumlah peserta PROPER yang mencapai minimal ranking BIRU.	meningkat	Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup
	12.4.2(a)	Jumlah limbah B3 yang terkelola dan proporsi limbah B3 yang diolah sesuai peraturan perundangan (sektor industri)	meningkat	Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup
12.5 secara substansial mengurangi produksi limbah melalui pencegahan, pengurangan, daur ulang, dan penggunaan kembali.	12.5.1(a)	Jumlah timbulan sampah yang didaur ulang.	meningkat 20 ton/hari	Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup
12.6 Mendorong perusahaan, terutama perusahaan besar dan	12.6.1(a)	Jumlah perusahaan yang menerapkan sertifikasi SNI ISO	meningkat	Lingkungan	Dinas Lingkungan Hidup

URAIAN TARGET	INDIKATOR		TARGET	URUSAN	INSTANSI PELAKSANA
transnasional, untuk mengadopsi praktek-praktek berkelanjutan dan mengintegrasikan informasi keberlanjutan dalam siklus pelaporan mereka.		14001 (sistem Manajemen Lingkungan)		Hidup	
12.7 Mempromosikan praktek pengadaan publik yang berkelanjutan, sesuai dengan kebijakan dan prioritas nasional.	12.7.1(a)	Jumlah produk ramah lingkungan yang teregister.	meningkat	UKM, Koperasi & Perindustrian	(tidak digunakan)
12.8 menjamin bahwa masyarakat di manapun memiliki informasi yang relevan dan kesadaran terhadap pembangunan berkelanjutan dan gaya hidup yang selaras dengan alam.	12.8.1(a)	Jumlah fasilitas publik yang menerapkan Standar Pelayanan Masyarakat (SPM) dan teregister.	meningkat	Pemukiman	DPRKP

Tabel 4.14. Identifikasi Pelaksanaan TPB ke-13. Mengambil Tindakan Cepat untuk Mengatasi Dampak Perubahan Iklim

URAIAN TARGET	INDIKATOR		TARGET	URUSAN	INSTANSI PELAKSANA
13.1 Memperkuat kapasitas ketahanan dan adaptasi terhadap bahaya terkait iklim dan bencana alam di semua negara.	13.1.1*	Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat nasional dan daerah.	ada	Penanggulangan Bencana	BPBD
	13.1.2*	Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.	menurun	Penanggulangan Bencana	BPBD

Tabel 4.15. Identifikasi Pelaksanaan TPB ke-14. Melestarikan dan memanfaatkan secara berkelanjutan sumber daya kelautan dan samudera untuk pembangunan berkelanjutan

URAIAN TARGET	INDIKATOR		TARGET	URUSAN	INSTANSI PELAKSANA
		(Urasan Kelautan merupakan Kewenangan Provinsi)			(indikator tidak digunakan)

Tabel 4.16. Identifikasi Pelaksanaan TPB ke-15. Melindungi, Merestorasi dan Meningkatkan Pemanfaatan Berkelanjutan Ekosistem Daratan, Mengelola Hutan secara Lestari, Menghentikan Penggurunan, Memulihkan Degradasi Lahan, serta Menghentikan Kehilangan Keanekaragaman Hayati

URAIAN TARGET	INDIKATOR		TARGET	URUSAN	INSTANSI PELAKSANA
15.1 menjamin pelestarian, restorasi dan pemanfaatan berkelanjutan dari ekosistem daratan dan perairan darat serta jasa lingkungannya, khususnya ekosistem hutan, lahan basah, pegunungan dan lahan kering, sejalan dengan kewajiban berdasarkan perjanjian internasional.	15.1.1(a)	Proporsi tutupan hutan terhadap luas lahan keseluruhan.	meningkat	Kehutanan	Dinas Lingkungan Hidup
15.2 meningkatkan pelaksanaan pengelolaan semua jenis hutan secara berkelanjutan, menghentikan deforestasi, merestorasi hutan yang terdegradasi dan meningkatkan secara signifikan aforestasi dan reforestasi secara global.	15.2.1.(d)	Jumlah Kesatuan Pengelolaan Hutan.	meningkat	Kehutanan	(tidak digunakan)

URAIAN TARGET	INDIKATOR		TARGET	URUSAN	INSTANSI PELAKSANA
15.3 menghentikan penggurunan, memulihkan lahan dan tanah kritis, termasuk lahan yang terkena penggurunan, kekeringan dan banjir, dan berusaha mencapai dunia yang bebas dari lahan terdegradasi.	15.3.1(a)	Proporsi luas lahan kritis yang direhabilitasi terhadap luas lahan keseluruhan.	menurun	Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup
15.6 Meningkatkan pembagian keuntungan yang adil dan merata dari pemanfaatan sumber daya genetik, dan meningkatkan akses yang tepat terhadap sumber daya tersebut	15.6.1*	Tersedianya kerangka legislasi, administrasi dan kebijakan untuk memastikan pembagian keuntungan yang adil dan merata.	ada	Perencanaan Pembangunan	(tidak digunakan)
15.9 mengintegrasikan nilai-nilai ekosistem dan keanekaragaman hayati ke dalam perencanaan nasional dan daerah, proses pembangunan, strategi dan penganggaran pengurangan kemiskinan.	15.9.1(a)	Dokumen rencana pemanfaatan keanekaragaman hayati.	ada	Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup

Tabel 4.17. Identifikasi Pelaksanaan TPB ke-16. Memperkuat Masyarakat yang Inklusif dan Damai, Menyediakan Akses Keadilan untuk Semua, dan Membangun Kelembagaan yang Efektif, Akuntabel, & Inklusif di Semua Tingkatan

URAIAN TARGET	INDIKATOR		TARGET	URUSAN	INSTANSI PELAKSANA
16.1 Secara signifikan mengurangi segala bentuk kekerasan dan terkait angka kematian dimanapun.	16.1.1(a)	Jumlah kasus kejahatan pembunuhan pada satu tahun terakhir.	Menurun	Sosial	Satpol PP– Damkar / Kesbangpol
	16.1.2(a)	Kematian disebabkan konflik per 100.000 penduduk.	Menurun	Sosial	Satpol PP– Damkar / Kesbangpol

URAIAN TARGET	INDIKATOR		TARGET	URUSAN	INSTANSI PELAKSANA
	16.1.3(a)	Proporsi penduduk yang menjadi korban kejahatan kekerasan dalam 12 bulan terakhir.	Menurun	Sosial	Satpol PP– Damkar / Kesbangpol
	16.1.4*	Proporsi penduduk yang merasa aman berjalan sendirian di area tempat tinggalnya.	Meningkat	Sosial	(tidak digunakan)
16.2 Menghentikan perlakuan kejam, eksploitasi, perdagangan, dan segala bentuk kekerasan dan penyiksaan terhadap anak.	16.2.1(a)	Proporsi rumah tangga yang memiliki anak umur 1-17 tahun yang mengalami hukuman fisik dan/atau agresi psikologis dari pengasuh dalam setahun terakhir.	menurun	Perlindungan Anak	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	16.2.1(b)	Prevalensi kekerasan terhadap anak laki-laki dan anak perempuan.	menurun	Perlindungan Anak	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	16.2.3(a)	Proporsi perempuan dan laki-laki muda umur 18-24 tahun yang mengalami kekerasan seksual sebelum umur 18 tahun.	menurun	Perlindungan Anak	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
16.5 Secara substansial mengurangi korupsi dan penyuapan dalam segala bentuknya.	16.5.1(a)	Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK).	Meningkat	Inspektorat	(tidak digunakan)
16.6 Mengembangkan lembaga yang efektif, akuntabel, dan transparan di semua tingkat.	16.6.1*	Proporsi pengeluaran utama pemerintah terhadap anggaran yang disetujui.	Meningkat	Kuangan	(tidak digunakan)
	16.6.1(a)	Persentase peningkatan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	meningkat	Kuangan	BPKAD
	16.6.1(b)	Persentase peningkatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) Pemerintah Daerah	mening kat 50 %	Kuangan	Bagian Organisasi
	16.6.1(c)	Persentase penggunaan E-procurement terhadap belanja pengadaan.	mening kat 80 %	Kuangan	BPKAD

URAIAN TARGET	INDIKATOR		TARGET	URUSAN	INSTANSI PELAKSANA
	16.6.1(d)	Persentase instansi pemerintah yang memiliki nilai Indeks Reformasi Birokrasi Baik Pemerintah Daerah	meningkat 45 %	Orgnasasi	Bagian Organisasi
	16.6.2(a)	Persentase Kepatuhan pelaksanaan UU Pelayanan Publik Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah	meningkat 80 %	Orgnasasi	Bagian Organisasi
16.7 Menjamin pengambilan keputusan yang responsif, inklusif, partisipatif dan representatif di setiap tingkatan.	16.7.1(a)	Persentase keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).	meningkat	Pemberdayaan Perempuan	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	16.7.1(b)	Persentase keterwakilan perempuan sebagai pengambilan keputusan di lembaga eksekutif (Eselon I dan II).	meningkat	Pemberdayaan Perempuan	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
16.9 memberikan identitas yang sah bagi semua, termasuk pencatatan kelahiran.	16.9.1*	Proporsi anak umur di bawah 5 tahun yang lahirnya dicatat oleh lembaga pen-catatan sipil, menurut umur.	meningkat	Kependudukan	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	16.9.1(a)	Persentase kepemilikan akta lahir untuk penduduk 40% berpendapatan bawah.	meningkat 77,4 %	Kependudukan	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	16.9.1(b)	Persentase anak yang memiliki akta kelahiran.	meningkat 85 %	Kependudukan	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
16.10 Menjamin akses publik terhadap informasi dan melindungi kebebasan	16.10.2(a))	Tersedianya Badan Publik yang menjalankan kewajiban sebagaimana diatur dalam UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.	meningkat	Kominfo dan Informasi	Dinas Komunikasi dan Informatika

URAIAN TARGET	INDIKATOR		TARGET	URUSAN	INSTANSI PELAKSANA
mendasar, sesuai dengan peraturan nasional dan kesepakatan internasional.	16.10.2(c)	Jumlah kepemilikan sertifikat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) untuk mengukur kualitas PPID dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagaimana diatur peraturan perundang-undangan.	meningkat	Kominfo dan Informasi	Dinas Komunikasi dan Informatika
16.b Menggalakkan dan menegakkan undang-undang dan kebijakan yang tidak diskriminatif untuk pembangunan berkelanjutan.	16.b.1(a)	Jumlah kebijakan yang diskriminatif dalam 12 bulan lalu berdasarkan pelarangan diskriminasi menurut hukum HAM Internasional.	ada	Hukum	(tidak digunakan)

Tabel 4.18. Identifikasi dan Pelaksanaan TPB ke-17. Menguatkan Sarana Pelaksanaan dan Merevitalisasi Kemitraan Global untuk Pembangunan Berkelanjutan

URAIAN TARGET	INDIKATOR		TARGET	URUSAN	INSTANSI PELAKSANA
17.1 Memperkuat mobilisasi sumber daya domestik, termasuk melalui dukungan internasional kepada negara berkembang, untuk meningkatkan kapasitas lokal bagi pengumpulan pajak dan pendapatan lainnya.	17.1.1*	Total pendapatan pemerintah sebagai proporsi terhadap PDB menurut sumbernya.	meningkat	Keuangan	BPKAD / BPPR
	17.1.1(a)	Rasio penerimaan pajak terhadap PDB.	meningkat 12 %	Pajak	BPKAD / BPPR
	17.1.2*	Proporsi anggaran domestik yang didanai oleh pajak domestik.	Meningkat	Pajak	(tidak digunakan)
17.6 Meningkatkan kerjasama terkait dan akses terhadap sains, teknologi dan inovasi, dan meningkatkan berbagi pengetahuan berdasar kesepakatan timbal balik, termasuk melalui koordinasi yang lebih baik antara mekanisme yang telah ada,	17.6.2(b)	Tingkat penetrasi akses tetap pitalebar (fixed broadband) di Perkotaan dan di Perdesaan.	meningkat	Kominfo dan Informasi	(tidak digunakan)
	17.6.2(c)	Proporsi penduduk terlayani mobile broadband Meningkat menjadi: Perkotaan 100% populasi; Perdesaan 52% populasi.	meningkat Perkotaan 100% Perdesaan 52%:	Kominfo dan Informasi	Dinas Komunikasi dan Informatika
	17.8.1*	Proporsi individu yang menggunakan internet.	meningkat	Kominfo dan	Dinas Komunikasi dan

URAIAN TARGET		INDIKATOR		TARGET	URUSAN	INSTANSI PELAKSANA
17.8 Mengoperasionalkan secara penuh bank teknologi dan sains, mekanisme pembangunan kapasitas teknologi dan inovasi dan meningkatkan penggunaan teknologi yang memungkinkan, khususnya teknologi informasi dan komunikasi.					Informasi	Informatika
		17.8.1(a)	Persentase kabupaten 3T yang terjangkau layanan akses telekomunikasi universal dan internet.	meningkat	Kominfo dan Informasi	(tidak digunakan)
	17.17 Mendorong dan meningkatkan kerjasama pemerintah-swasta dan masyarakat sipil yang efektif, berdasarkan pengalaman dan bersumber pada strategi kerjasama.	17.17.1(a)	Jumlah proyek yang ditawarkan untuk dilaksanakan dengan skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).	meningkat	Perencanaan Pembangunan	BPKAD
		17.17.1(b)	Jumlah alokasi pemerintah untuk penyiapan proyek, transaksi proyek, dan dukungan pemerintah dalam Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).	meningkat	Perencanaan Pembangunan	(tidak digunakan)
	17.18 meningkatkan dukungan pengembangan kapasitas untuk meningkatkan secara signifikan ketersediaan data berkualitas tinggi, tepat waktu dan dapat dipercaya, yang terpilah berdasarkan pendapatan, gender, umur, ras, etnis, status migrasi, difabilitas, lokasi geografis dan karakteristik lainnya yang relevan dengan konteks nasional.	17.18.1(a)	Persentase konsumen Badan Pusat Statistik (BPS) yang merasa puas dengan kualitas data statistik.	meningkat	Data Statistik	(tidak digunakan)
		17.18.1(b)	Persentase konsumen yang menjadikan data dan informasi statistik BPS sebagai rujukan utama.	meningkat	Data Statistik	(tidak digunakan)
		17.18.1(c)	Jumlah metadata kegiatan statistik dasar, sektoral, dan khusus yang terdapat dalam Sistem Informasi Rujukan Statistik (SIRuSa).	meningkat	Data Statistik	(tidak digunakan)
		17.18.1(d)	Persentase indikator SDGs terpilah yang relevan dengan target.	meningkat	Perencanaan Pembangunan	BAPPEDA
	17.19 mengandalkan inisiatif yang sudah ada, untuk mengembangkan pengukuran atas kemajuan pembangunan berkelanjutan yang melengkapi Produk Domestik Bruto, dan	17.19.2(b)	Tersedianya data registrasi terkait kelahiran dan kematian (Vital Statistics Register)	ada	Kependudukan	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		17.19.2(c)	Jumlah pengunjung eksternal yang mengakses data dan informasi statistik melalui website.	meningkat	Data Statistik	(tidak digunakan)

URAIAN TARGET		INDIKATOR		TARGET	URUSAN	INSTANSI PELAKSANA
	mendukung pengembangan kapasitas statistik	17.19.2(d)	Persentase konsumen yang puas terhadap akses data Badan Pusat Statistik (BPS).	meningkat	Data Statistik	(tidak digunakan)



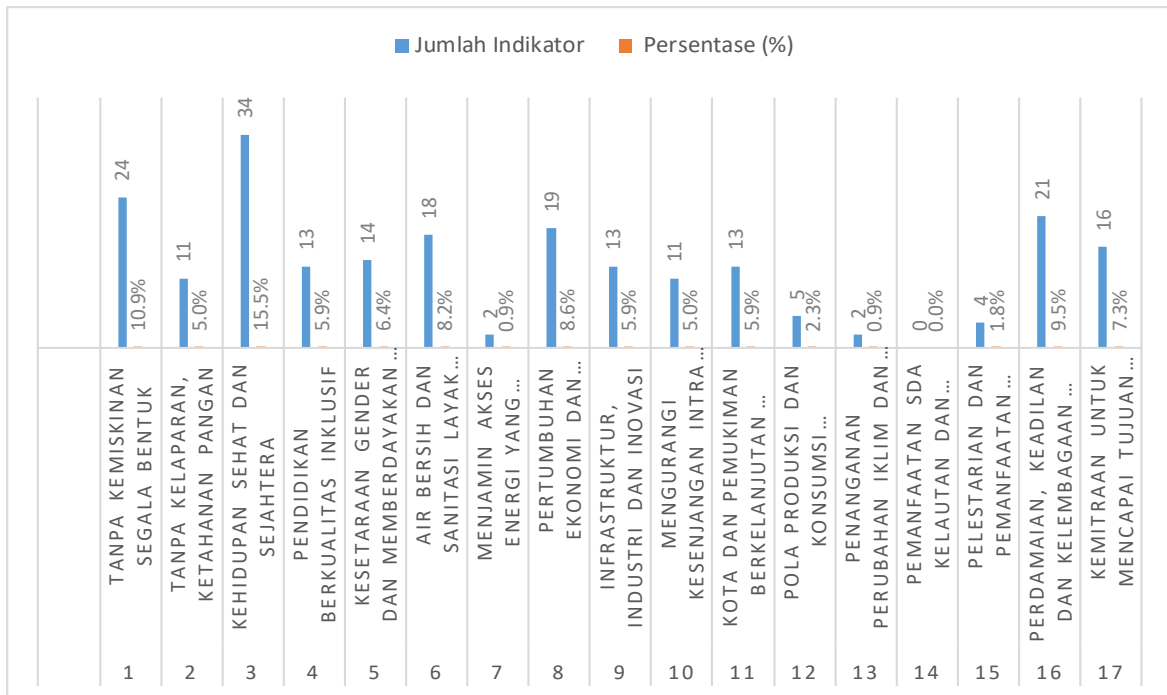
PEMERINTAH KABUPATEN NAGAN RAYA
KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS (KLHS)
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD)

Uraian Identifikasi Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Kabupaten Nagan Raya pada Tahun 2022 masing-masing dikemukakan pada **Tabel 4.19**.

Tabel 4.19. Jumlah Indikator TPB Kewenangan Kabupaten

No TPB	Tujuan TPB	Jumlah Indikator	Persentase (%)
1	Mengakhiri Kemiskinan dalam Segala Bentuk Dimanapun	24	10.91%
2	Menghilangkan Kelaparan, Mencapai Ketahanan Pangan dan Gizi yang Baik, serta Meningkatkan Pertanian Berkelanjutan	11	5.00%
3	Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia	34	15.45%
4	Menjamin Kualitas Pendidikan yang Inklusif dan Merata serta Meningkatkan Kesempatan Belajar Sepanjang Hayat untuk Semua	13	5.91%
5	Mencapai Kesetaraan Gender dan Memberdayakan Hayat untuk Semua	14	6.36%
6	Menjamin Ketersediaan serta Pengelolaan Air Bersih dan Sanitasi yang Berkelanjutan	18	8.18%
7	Menjamin Akses Energi yang Terjangkau, Andal, Berkelanjutan dan Modern	2	0.91%
8	Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, Kesempatan Kerja yang Produktif dan Menyeluruh, serta Pekerjaan yang Layak untuk Semua	19	8.64%
9	Membangun Infrastruktur yang Tangguh, Meningkatkan Industri Inklusif dan Berkelanjutan,serta Mendorong Inovasi	13	5.91%
10	Mengurangi Kesenjangan Intra- dan Antarneegara	11	5.00%
11	Menjadikan Kota dan Permukiman Inklusif, Aman, Tangguh dan Berkelanjutan	13	5.91%
12	Menjamin Pola Produksi dan Konsumsi yang Berkelanjutan	5	2.27%
13	Mengambil Tindakan Cepat untuk Mengatasi Perubahan Iklim dan Dampaknya	2	0.91%
14	Melestarikan dan Memanfaatkan secara Berkelanjutan Sumber Daya Kelautan dan Samudera untuk Pembangunan Berkelanjutan	0	0.00%
15	Melindungi, Merestorasi dan Meningkatkan Pemanfaatan Berkelanjutan Ekosistem Daratan, Mengelola Hutan secara Lestari, Menghentikan Penggurunan, Memulihkan Lestari, Menghentikan Penggurunan, Memulihkan Degradasi Lahan, serta Menghentikan Kehilangan Keanekaragaman Hayati.	4	1.82%
16	Menguatkan Masyarakat yang inklusif dan Damai untuk Pembangunan Berkelanjutan, Menyediakan Akses Keadilan untuk Semua, dan Membangunkan Kelembagaan yang Efektif, Akuntabel, dan Inklusif di Semua Tingkatan	21	9.55%
17	Menguatkan Sarana Pelaksanaan dan Merevitalisasi Kemitraan Global untuk Pembangunan Berkelanjutan	16	7.27%
	Jumlah	220	100%

Sumber: Hasil Analisis, 2023



Gambar 4.4. Jumlah Indikator TPB Kewenangan Kabupaten

4.4. Identifikasi Pencapaian Indikator TPB

Kabupaten Nagan Raya masih menghadapi tantangan dalam pelaksanaan pencapaian indikator TPB. Kendala utama yang dihadapi dalam pengkajian TPB adalah sulitnya koordinasi antar lembaga untuk dapat memberikan dukungan data. Hal tersebut dapat terjadi dikarenakan tidak adanya kegiatan pendukung atau keterbatasan kemampuan dalam menyediakan/mengumpulkan data. Dalam Pembuatan KLHS-RPJPD ini pengumpulan data dibatasi sampai penyusunan Laporan sehingga analisis dilakukan pada data-data yang tersedia saja.

Bila dilihat dari kewenangan sesuai dengan target dan indikator TPB sesuai Perpres 59/2017 yaitu 220 indikator. Berdasarkan pembagian kewenangan dan kekhususan indikator terkait kondisi geografis, terdapat 196 indikator TPB yang relevan bagi Kabupaten Nagan Raya. Dalam analisis ini, capaian setiap indikator TPB di Kabupaten Nagan Raya dibandingkan dengan target nasional tahun 2019 (dalam Lampiran Peraturan Presiden RI No. 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian TPB).

Dari 196 indikator TPB yang menjadi kewenangan Kabupaten Nagan Raya 66,0% yang diketahui capaiannya, sedangkan 34,0% masih belum dapat diketahui capaiannya karena belum



tersedianya data. Terdapat 4 (empat) kategori capaian TPB untuk setiap indikator, yaitu 1) Indikator TPB yang sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target nasional; 2) Indikator TPB yang sudah dilaksanakan tetapi belum mencapai target nasional; 3) Indikator TPB belum ada data dan belum dilaksanakan; 4) Indikator TPB yang tidak/bukan kewenangan kabupaten.

Kategori “tercapai (SS)” dan “belum tercapai (SB)” diberikan pada indikator yang telah dilaksanakan dengan capaian yang dibandingkan dengan target nasional sebagaimana tercantum pada Perpres 59 Tahun 2017. Sementara indikator “belum ada data (na)” merupakan indikator yang tidak sampai saat ini belum tersedia data atau target capaiannya belum terakomodir dalam pelaksanaan program kegiatan di RPJMD Kabupaten Nagan Raya. Kategori “bukan kewenangan (BK)” diberikan pada indikator yang bukan kewenangan Kabupaten Nagan Raya.

Tabel 4.20. Jumlah Capaian Indikator TPB Berdasarkan Kategori

No TPB	Nama TPB	Paser	Jumlah Indikator	Tercapai (SS)	%	Belum Tercapai (SB)	%	Belum Ada Data (na)	%	Bukan Kewenangan (BK)	%
1	Tanpa kemiskinan segala bentuk	24	24	12	50%	2	8%	10	42%	0	0%
2	Tanpa Kelaparan, ketahanan pangan	11	11	6	55%	1	9%	4	36%	0	0%
3	Kehidupan sehat dan sejahtera	34	34	20	59%	6	18%	8	24%	0	0%
4	Pendidikan berkualitas Inklusif	13	13	10	77%	1	8%	2	15%	0	0%
5	Kesetaraan gender dan memberdayakan perempuan	14	14	8	57%	2	14%	4	29%	0	0%
6	Air bersih dan sanitasi layak berkelanjutan	18	18	2	11%	2	11%	12	67%	2	11%
7	Menjamin akses energi yang terjangkau	2	2	0	0%	0	0%	0	0%	2	100%
8	Pertumbuhan ekonomi dan pekerjaan layak	19	19	10	53%	2	11%	4	21%	3	16%
9	Infrastruktur, industri dan inovasi	13	13	0	0%	0	0%	11	85%	2	15%
10	Mengurangi kesenjangan Intra antra negara	11	11	7	64%	2	18%	2	18%	0	0%
11	Kota dan pemukiman berkelanjutan inklusif	13	13	8	62%	2	15%	5	38%	9	69%
12	Pola produksi dan konsumsi berkelanjutan	5	5	3	60%	2	40%	3	60%	0	0%
13	Penanganan perubahan iklim dan dampaknya	2	2	1	50%	0	0%	1	50%	0	0%
14	Pemanfaatan SDA Kelautan dan Samudera	0	0	0	0%	0	0%	0	0%	4	0%
15	Pelestarian dan pemanfaatan berkelanjutan ekosistem darat	4	4	3	75%	0	0%	1	25%	0	0%
16	Perdamaian, keadilan dan kelembagaan yang kokoh	21	21	12	57%	0	0%	9	43%	0	0%
17	Kemitraan untuk mencapai tujuan pembangunan	16	16	14	88%	1	6%	1	6%	0	0%
	Jumlah	220	220	116	53%	23	10%	77	35%	22	10%

Sumber: Hasil Analisis, 2023

Berdasarkan **Tabel 4.20** diatas, terdapat 53% dari 220 indikator TPB di Kabupaten Nagan Raya yang telah mencapai target nasional pada tahun 2022. Untuk TPB yang sudah dilaksanakan belum mencapai target nasional di Kabupaten Nagan Raya sebesar 10% dan 34% untuk TPB yang belum tersedia data atau target capaiannya serta 5% TPB yang bukan kewenangan Kabupaten Nagan Raya.



Gambar 4.5. Jumlah Capaian Indikator TPB Berdasarkan Kategori

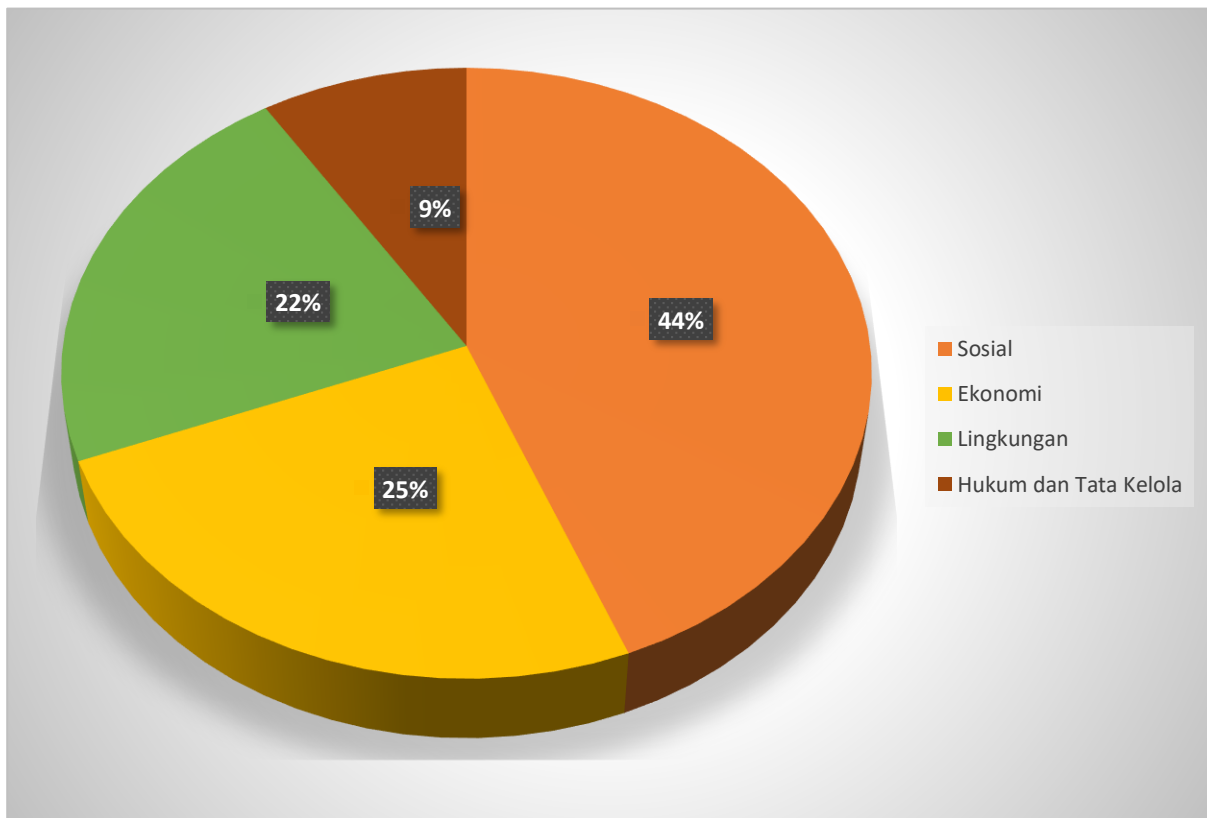
4.5. Analisis Indikator TPB Berdasarkan Pilar

Berdasarkan pilar, TPB dapat dikelompokkan menjadi 4 pilar yaitu pilar sosial, pilar ekonomi, pilar lingkungan, dan pilar hukum dan tata kelola. Pertama pilar sosial terdiri dari 97 indikator (44%) yaitu TPB 1 Tanpa Kemiskinan, TPB 2 Tanpa Kelaparan, TPB 3 Kehidupan Sehat dan Sejahtera, TPB 4 Pendidikan Berkualitas dan TPB 5 Kesenjangan Gender. Kedua pilar ekonomi terdiri dari 55 indikator (25%) mencakup TPB 7 Energi Bersih dan Terjangkau, TPB 8 Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi, TPB 9 Industri, Inovasi dan Infrastruktur, TPB 10 Berkurangnya Kesenjangan dan TPB 17 Kemitraan untuk Mencapai Tujuan. Ketiga pilar lingkungan terdiri dari 49 indikator (22%) yang terdiri dari TPB 6 Air Bersih dan Sanitasi Layak, TPB 11 Kota dan Pemukiman yang Berkelanjutan, TPB 12 Konsumsi dan Produksi Bertanggung Jawab, TPB 13 Penanganan Perubahan Iklim dan TPB 15 Ekosistem Darat. Keempat pilar hukum dan tata kelola terdiri dari 21 indikator (9%) yang mencakup TPB 16 Perdamaian, keadilan dan kelembagaan yang kokoh.

Tabel 4.21. Gambaran Indikator TPB Berdasarkan Pilar

No	Nama Pilar	Jumlah Indikator	Persentase
1	Sosial	96	44%
2	Ekonomi	55	25%
3	Lingkungan	49	22%
4	Hukum dan Tata Kelola	20	9%
Total		220	100%

Sumber : Hasil Analisis, 2023



Gambar 4.6. Jumlah Capaian Indikator TPB Berdasarkan Kategori

Capaian TPB Kabupaten Nagan Raya berdasarkan pilar terlihat pada **Tabel 4.21**. Pilar dengan capaian tertinggi adalah pilar sosial (56 indikator dengan kategori SS), diikuti dengan pilar ekonomi (27 indikator dengan kategori SS) dan pilar lingkungan (23 indikator dengan kategori SS). Kategori SB tertinggi juga berada pada pilar sosial dengan 9 indikator dengan

capaian SB. Sedangkan kategori na tertinggi berada pada pilar sosial dengan 27 indikator capaian na.

Tabel 4.22. Capaian Indikator TPB Berdasarkan Pilar

No	Nama Pilar	Jumlah Indikator	Capaian							
			SS	%	SB	%	na	%	BK	%
1	Sosial	96	56	58%	9	9%	27	28%	4	4%
2	Ekonomi	55	27	49%	2	4%	26	47%	0	0%
3	Lingkungan	49	23	47%	8	16%	12	24%	6	12%
4	Hukum dan Tata Kelola	20	10	50%	3	15%	7	35%	0	0%
Total		220	116		22		72		10	
Persentase			52.73%		10.00%		32.73%		4.55%	

Sumber : Hasil Analisis, 2023

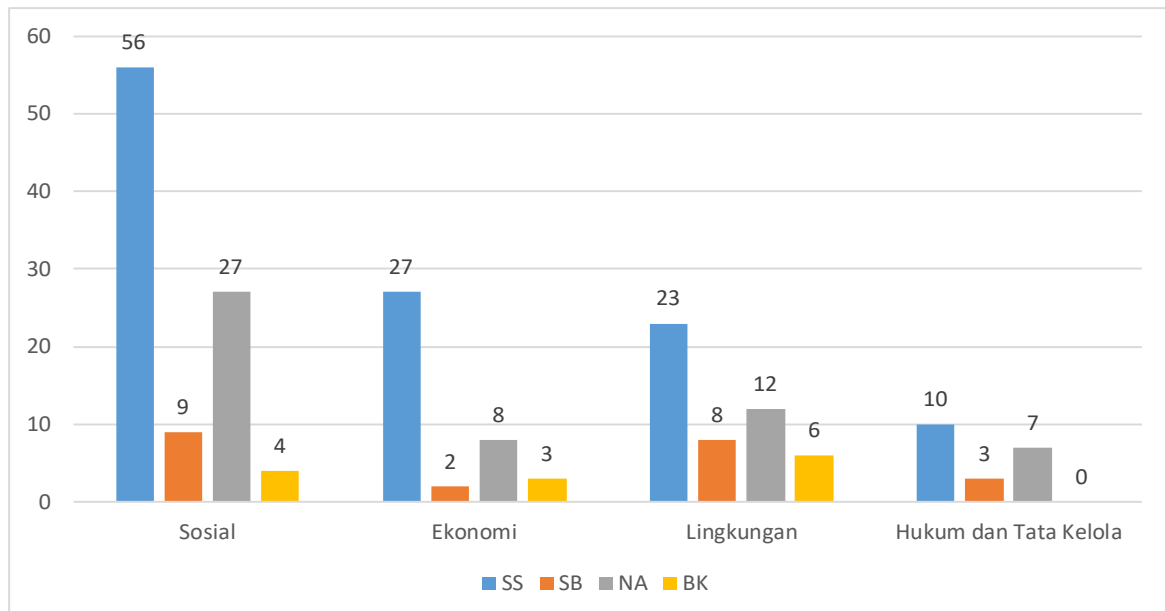
Ket.

SS = Indikator TPB yang sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target;

SB = Indikator TPB yang sudah dilaksanakan tetapi belum mencapai target;

na = Indikator TPB yang tidak ada data atau belum terlaksana;

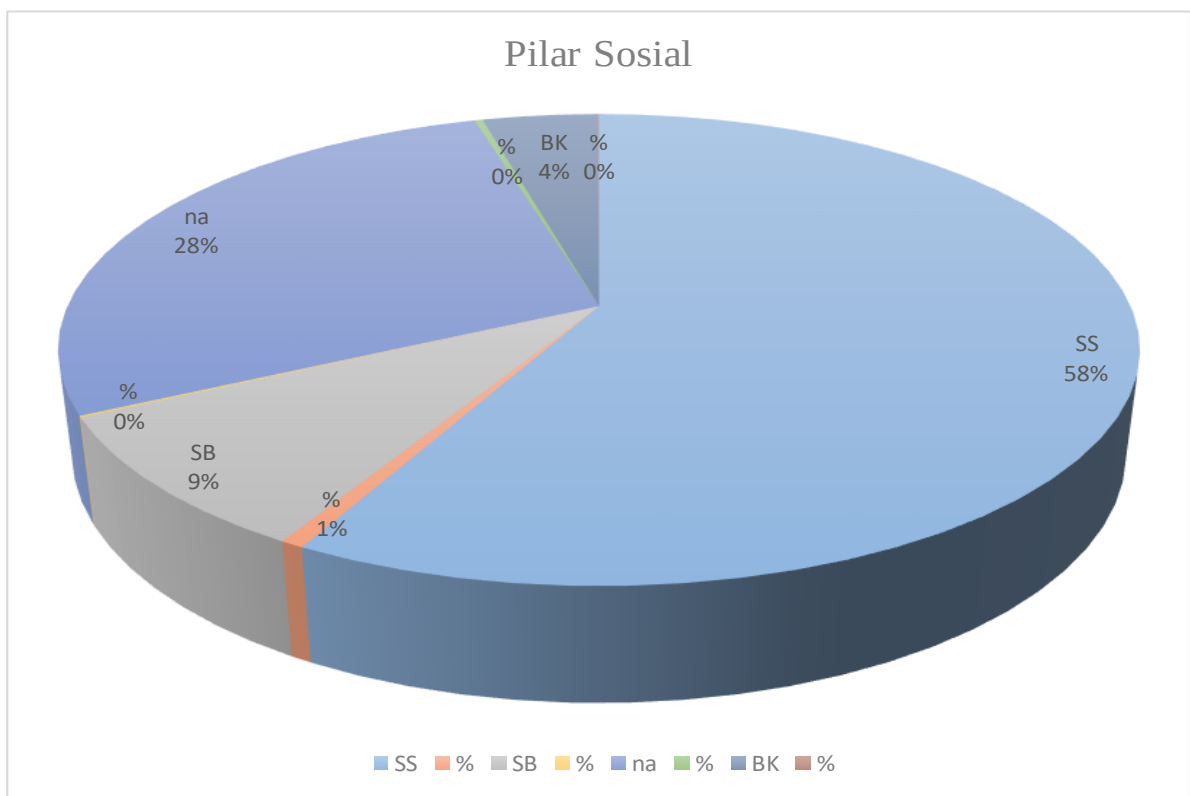
BK = Indikator TPB yang bukan kewenangan.



Gambar 4.7. Jumlah Capaian Indikator TPB Berdasarkan Pilar

4.6. Analisis Indikator TPB Pilar Sosial

Pilar Sosial berdasarkan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang termuat dalam lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 dipilah pada 5 tujuan yaitu pada tujuan TPB 1, TPB 2, TPB 3, TPB 4, dan TPB 5. Kelima TPB dalam pilar sosial tersebut terdiri dari 96 indikator yang menjadi kewenangan Kabupaten Nagan Raya. Persentase capaian indikator TPB Pilar Sosial di Kabupaten Nagan Raya ditunjukkan pada **Gambar 4.8** sebagian besar indikator TPB Pilar Sosial di Kabupaten Nagan Raya yaitu sebesar 58% telah mencapai target nasional, 9% sudah dilaksanakan belum mencapai target nasional, 28% tidak ada data dan belum dilaksanakan dan 4% bukan wewenang kabupaten. Indikator TPB Pilar Sosial yang belum mencapai target nasional dan belum dilaksanakan dan tidak ada data perlu menjadi perhatian karena merupakan gap/permasalahan di Kabupaten Nagan Raya.

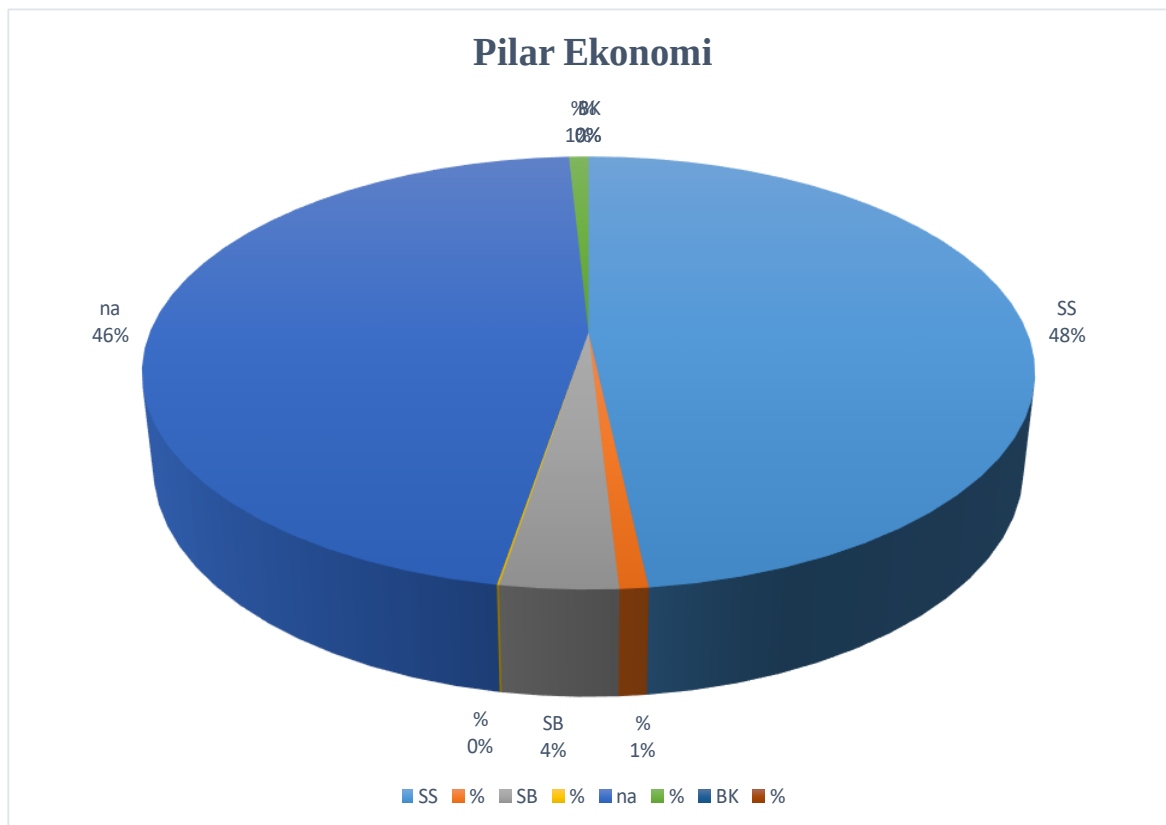


Gambar 4.8. Capaian Indikator TPB Pilar Sosial

4.6.1. Analisis Indikator TPB Pilar Ekonomi

Pilar Ekonomi berdasarkan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang termuat dalam lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 dipilah pada 5 tujuan yaitu

pada tujuan TPB 7, TPB 8, TPB 9, TPB 10, dan TPB 17. Kelima TPB dalam pilar ekonomi tersebut terdiri dari 55 indikator yang menjadi kewenangan Kabupaten Nagan Raya. Persentase capaian indikator TPB pilar ekonomi di Kabupaten Nagan Raya ditunjukkan pada **Gambar 4.9** sebagian besar indikator TPB pilar ekonomi di Kabupaten Nagan Raya, yaitu sebesar 49% telah mencapai target nasional, 4% sudah dilaksanakan belum mencapai target nasional, 47% tidak ada data dan belum dilaksanakan dan 0% bukan wewenang kabupaten. Indikator TPB pilar ekonomi yang belum mencapai target nasional dan belum dilaksanakan dan tidak ada data perlu menjadi perhatian karena merupakan gap/permasalahan di Kabupaten Nagan Raya.

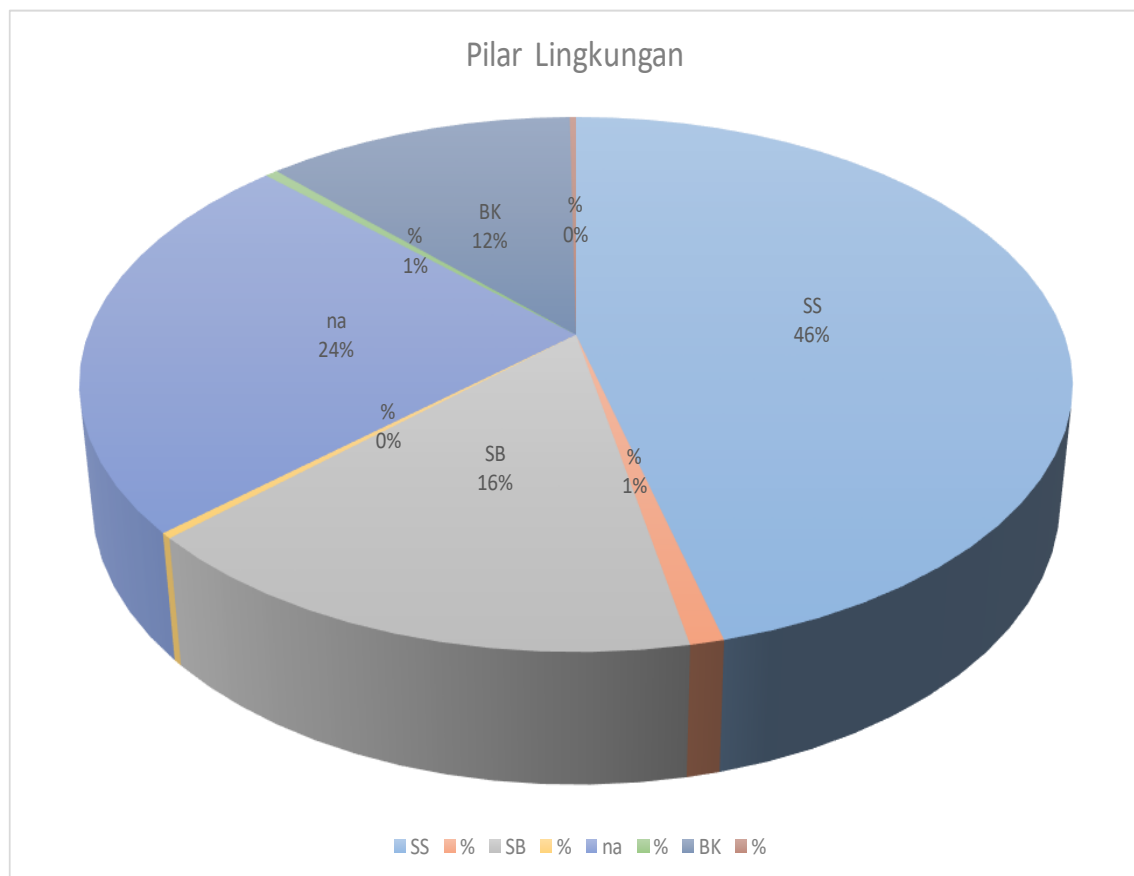


Gambar 4.9. Capaian Indikator TPB Pilar Ekonomi

4.6.2. Analisis Indikator TPB Pilar Lingkungan

Pilar lingkungan berdasarkan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang termuat dalam lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 dipilah pada 6 tujuan yaitu pada tujuan TPB 6, TPB 11, TPB 12, TPB 13, TPB 14 dan TPB 15. Keenam TPB dalam pilar lingkungan tersebut terdiri dari 49 indikator yang menjadi kewenangan Kabupaten Nagan

Raya. Persentase capaian indikator TPB pilar lingkungan di Kabupaten Nagan Raya ditunjukkan pada **Gambar 4.10** sebagian besar indikator TPB pilar lingkungan di Kabupaten Nagan Raya, yaitu sebesar 46% telah mencapai target nasional, 16% sudah dilaksanakan belum mencapai target nasional, 24% tidak ada data dan belum dilaksanakan dan 12% bukan wewenang kabupaten. Indikator TPB pilar lingkungan yang belum mencapai target nasional dan belum dilaksanakan dan tidak ada data perlu menjadi perhatian karena merupakan gap/permasalahan di Kabupaten Nagan Raya.

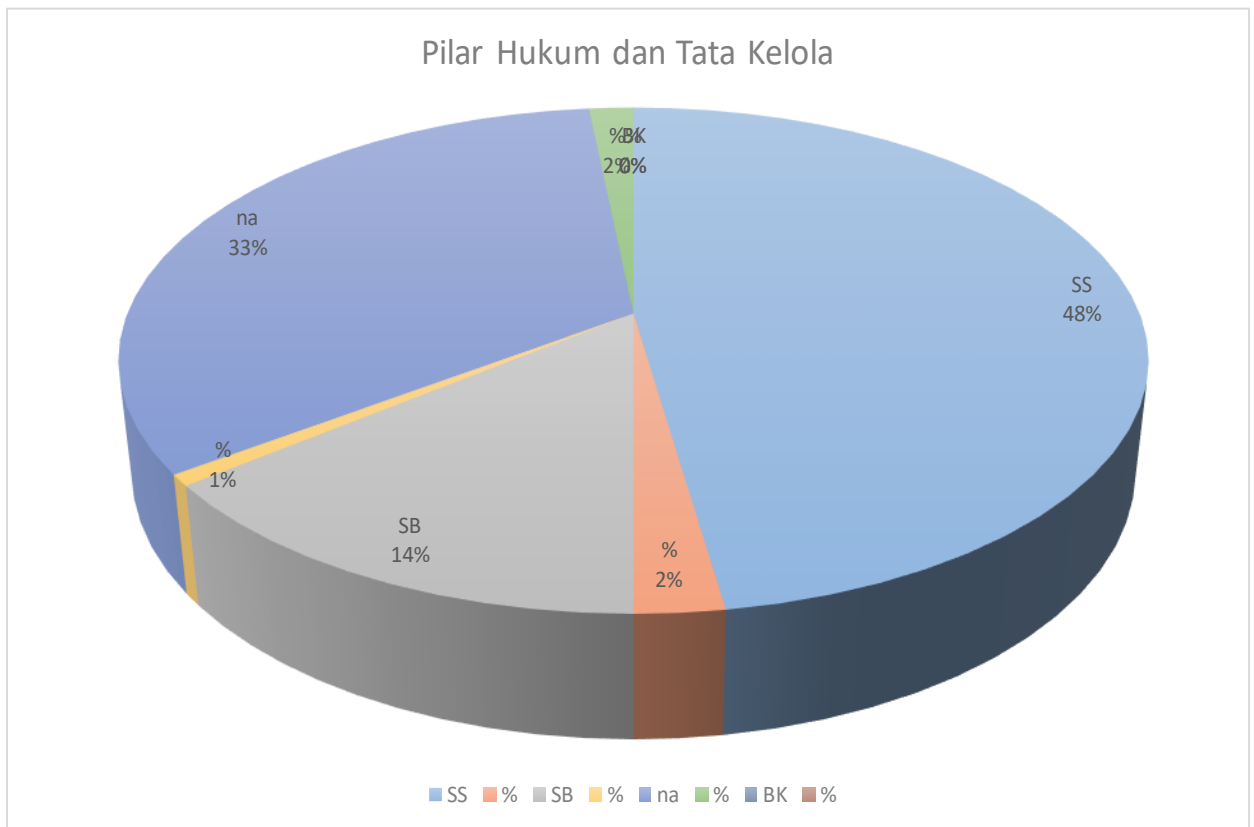


Gambar 4.10. Capaian Indikator TPB Pilar Lingkungan

4.6.3. Analisis Indikator TPB Pilar Hukum dan Tatakelola

Pilar hukum dan tatakelola berdasarkan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang termuat dalam lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 dipilah pada 1 tujuan yaitu pada tujuan TPB 16. Pada TPB 16 pilar dalam hukum dan tatakelola tersebut terdiri dari 20 indikator yang menjadi kewenangan Kabupaten Nagan Raya. Persentase capaian

indikator TPB pilar hukum dan tatakelola di Kabupaten Nagan Raya ditunjukkan pada **Gambar 4.11** sebagian besar indikator TPB hukum dan tatakelola di Kabupaten Nagan Raya, yaitu sebesar 48% telah mencapai target nasional, 14% sudah dilaksanakan belum mencapai target nasional, 33% tidak ada data dan belum dilaksanakan dan 0% bukan wewenang kabupaten. Indikator TPB pilar hukum dan tatakelola yang belum mencapai target nasional dan belum dilaksanakan dan tidak ada data perlu menjadi perhatian karena merupakan gap/permasalahan di Kabupaten Nagan Raya.



Gambar 4.11. Capaian Indikator TPB Pilar Hukum dan Tatakelola

4.7. Analisis Gap Capaian TPB

Analisis gap capaian TPB dilakukan dengan menghitung selisih relatif antara jumlah indikator TPB dengan jumlah indikator yang belum tercapai (SB) ditambah jumlah indikator belum terlaksana (na) di Kabupaten Nagan Raya. Angka relatif sama dengan dan lebih besar 50% dianggap TPB strategis. Semakin besar selisih/gap capaian indikator (lebih banyak belum mencapai target nasional), maka semakin berpotensi menjadi TPB strategis. Kriteria TPB



PEMERINTAH KABUPATEN NAGAN RAYA
KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS (KLHS)
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD)

strategis ini menjadi dasar dalam penentuan melakukan proyeksi capaian dan rumusan skenario pencapaian.

Tabel 4.23. Analisis Gap Capaian TPB Kabupaten Nagan Raya

No TPB	Nama TPB	Jumlah Indikator	Belum Tercapai (SB)	%	Belum Ada Data (na)	%	Gap TPB	% Gap	Kriteria
1	Tanpa kemiskinan segala bentuk	24	2	8%	10	42%	12	50%	TPB Strategis
2	Tanpa Kelaparan, ketahanan pangan	11	1	9%	4	36%	6	55%	TPB Strategis
3	Kehidupan sehat dan sejahtera	34	6	18%	8	24%	20	59%	TPB Strategis
4	Pendidikan berkualitas Inklusif	13	1	8%	2	15%	10	77%	TPB Strategis
5	Kesetaraan gender dan memberdayakan perempuan	14	2	14%	4	29%	8	57%	TPB Strategis
6	Air bersih dan sanitasi layak berkelanjutan	18	2	11%	12	67%	4	22%	TPB Tidak Strategis
7	Menjamin akses energi yang terjangkau	2	0	0%	0	0%	2	0%	TPB Tidak Strategis
8	Pertumbuhan ekonomi dan pekerjaan layak	19	2	11%	5	26%	12	63%	TPB Strategis
9	Infrastruktur, industri dan inovasi	13	0	0%	11	85%	2	15%	TPB Tidak Strategis
10	Mengurangi kesenjangan Intra antra negara	11	2	18%	2	18%	7	64%	TPB Strategis
11	Kota dan pemukiman berkelanjutan inklusif	13	2	15%	3	23%	8	62%	TPB Strategis
12	Pola produksi dan konsumsi berkelanjutan	5	1	20%	1	20%	3	60%	TPB Strategis
13	Penanganan perubahan iklim dan dampaknya	2	0	0%	1	50%	1	50%	TPB Strategis
14	Pemanfaatan SDA Kelautan dan Samudera	0	0	0%	0	0%	0	0%	TPB Tidak Strategis
15	Pelestarian dan pemanfaatan berkelanjutan ekosistem darat	4	0	0%	1	25%	3	75%	TPB Strategis
16	Perdamaian, keadilan dan kelembagaan yang kokoh	21	0	0%	9	43%	12	57%	TPB Tidak Strategis
17	Kemitraan untuk mencapai tujuan pembangunan	16	1	6%	1	6%	14	88%	TPB Strategis
	Jumlah	220	22	10%	74	34%		0%	

Sumber: Hasil Analisis, 2023

4.8. Perumusan Isu Pembangunan Berkelanjutan

4.8.1. Tahap Pra Pelingkungan

Tahapan Pra Pelingkungan dimulai dengan melakukan Diskusi Kelompok Terarah atau FGD terkait dengan isu permasalahan pembangunan yang dihadapi Kabupaten Nagan Raya ditinjau dari aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan hidup. Masing-masing peserta yang hadir, baik anggota Pokja PL KLHS RPJPD Kabupaten Nagan Raya maupun dari OPD/SKPD terkait yang secara sengaja diundang diminta pendapat secara langsung maupun tertulis. Selanjutnya dirangkum semua masukan untuk menjadi bahan diskusi.



PEMERINTAH KABUPATEN NAGAN RAYA
KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS (KLHS)
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD)

Sebelum pertemuan, sesuai dengan kesepakatan maka masing-masing anggota sesuai dengan tupoksinya (sosial, ekonomi, lingkungan hidup dan infrastruktur) melakukan verifikasi dan klarifikasi terhadap isu-isu pembangunan untuk dibahas kembali dalam pertemuan selanjutnya untuk mendapatkan isu-isu permasalahan pembangunan yang spesifik dari isu permasalahan utama yang ada. Hasilnya adalah terdapat isu/permasalahan dengan isu daftar panjang sebanyak 185 isu sebagaimana ditunjukkan dalam **Tabel 4.24**.

Tabel 4.24. Daftar Panjang Isu Pembangunan Berkelanjutan KLHS RPJPD Kabupaten Nagan Raya Tahun 2025-2045

TEMA ISU	No	ISU-ISU PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN
1. Aspek Sosial	1	Rendahnya daya tarik Investasi dan Penanaman Modal Swasta
Kesejahteraan Sosial	2	Adanya Tenaga kerja asing di perusahaan besar Nasional
	3	Maraknya tambang emas masyarakat tanpa izin
	4	Kawasan wisata masih telantar karena belum di kelola dengan baik
	5	Kerawanan pangan, Peningkatan kerentanan masyarakat.
	6	Peningkatan kelaparan dan gizi buruk
	7	Mubazir pangan (food loss & waste)
	8	Peran masyarakat adat semakin terpinggirkan
	9	Tingginya angka penyandang masalah kesejahteraan sosial
	10	Perlu menyusun peraturan tingkat gampong,
	11	Tingginya jumlah pengangguran terbuka
	12	Rendahnya Perlindungan dan kesejahteraan pekerja
	13	Masih banyak kawasan kumuh perkotaan, rumah yang tidak layak huni
	14	Kurang perhatian pemda terhadap pendidikan nonformal
	15	Masih rendahnya implementasi nilai islam serta fungsi pemda dalam penerapan syariat islam
	16	Peningkatan pemakaian narkoba/kasus narkoba
	17	Masalah gangguan keamanan dan ketertiban (Kantibmas)
Kesehatan	17	Pelayanan kesehatan terutama di daerah-daerah terpencil (susah/sulit akses) masih minim
	18	Masih banyaknya masyarakat gizi rendah
	19	Masih tinggi angka Stunting



PEMERINTAH KABUPATEN NAGAN RAYA
KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS (KLHS)
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD)

TEMA ISU	No	ISU-ISU PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN
	20	Peningkatan jumlah kejadian penyakit
	22	Masih adanya kasus penyakit menular
	23	Kurangnya sumber penyediaan air bersih bagi masyarakat
	24	Penggunaan air PDAM belum merata ke masyarakat
	25	Kurangnya akses dan kepemilikan Sanitasi
	26	Kurangnya informasi hidup sehat
	27	Program kesehatan belum menjadi prioritas
	28	Kepedulian masyarakat terhadap lingkungan masih rendah
	29	Kurangnya tenaga kesehatan di daerah terpencil
	30	Rendahnya partisipasi masyarakat untuk imunisasi
	31	Peningkatan stres akibat polusi suara
	32	Tingginya perokok aktif
Pendidikan	33	Masih rendahnya Sumberdaya Manusia
	34	Masih rendahnya SDM dalam pengelolaan lingkungan
	35	Rendahnya Kepedulian masyarakat terhadap lingkungan
	36	Dampak negatif kemajuan teknologi
	37	Perlunya dilakukan kajian akademis terhadap kelautan perikanan pertanian perkebunan
	38	Pendidikan akhlak agama masih kurang
	39	Rendahnya pemahaman dan kesadaran tentang pentingnya keanekaragaman hayati bagi kehidupan
	40	Masih adanya anak putus sekolah pada jenjang SD dan SLTP
	41	Perlu fokus pemda terhadap peningkatan kualitas pendidikan di daerah
	42	Masih kurangnya prasarana dan sarana sekolah seperti perpustakaan, laboratorium, sarana olah raga, toilet yang layak
	43	Masih adanya penduduk usia 15-60 tahun yang belum melek huruf
	44	Masih rendahnya pendidik PAUD yang berkualifikasi S1/D4
	45	Masih rendahnya pendidik TK yang memiliki sertifikasi
	46	Sebagian pendidik SD dan SLTP belum berkualifikasi S1/D4
	47	Masih rendahnya pendidik SD dan SLTP yang memiliki sertifikasi



PEMERINTAH KABUPATEN NAGAN RAYA
KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS (KLHS)
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD)

TEMA ISU	No	ISU-ISU PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN
	48	Penggunaan dana pendidikan masih rendah belum sesuai dengan harapan
	49	Guru daerah terpencil masih sedikit
	50	Rendahnya pendidikan akhlak dan budi pekerti
	53	Perlunya Peningkatan jumlah koperasi dan UMKM yang berbadan hukum melalui pengembangan kebijakan yang berpihak pada tumbuh kembangnya koperasi dan UMKM
2. Aspek Ekonomi		
Daya saing daerah	54	Berkurangnya dan menipisnya cadangan sumber daya alam.
	55	Masih ada Kesenjangan antar wilayah
	56	Pengembangan kawasan agropolitan dalam RTRW
	57	Banyaknya perizinan perusahaan batubara dikeluarkan
	58	Kurangnya pengawasan pada sektor pertambangan
	59	Perdagangan ilegal tumbuhan dan satwa liar
	60	Tingginya ilegal fishing di wilayah laut oleh nelayan asing
	61	Belum optimalnya kelembagaan Koperasi dalam menunjang ekonomi kerakyatan
	62	Masih minimnya penerapan dan penguasaan teknologi tepat guna untuk usaha ekonomi masyarakat gampong
	63	Belum terintegrasinya secara penuh antar SKPD teknis dalam hal pengelolaan perijinan
	64	Masih Kurangnya kesadaran investor terhadap perijinan
	65	Belum tersedianya sistem informasi pelayanan penanaman modal dan perijinan secara elektronik
	66	Belum optimalnya kapasitas SDM, Pertanian, Peternakan dan Perikanan
	67	Belum terintegrasi antara sistem produksi hulu dengan hilir
	68	Belum optimalnya pengelolaan destinasi wisata baru
	69	Belum optimalnya pemanfaatan sumberdaya energi dapat diperbaharui (PLTA)
	70	Belum adanya pusat-pusat perdagangan dan jasa yang representatif
	71	Masih kuatnya gravitasi ekonomi Kabupaten Aceh Barat dan Aceh Barat Daya
	72	Produktivitas kelapa sawit rakyat masih rendah



PEMERINTAH KABUPATEN NAGAN RAYA
KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS (KLHS)
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD)

TEMA ISU	No	ISU-ISU PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN
	73	Industri pengolahan hasil pertanian masih kurang
	74	Pendapatan Asli Daerah masih rendah (PAD)
	75	Maraknya kredit ribawi
	76	Gaya hidup konsumtif masyarakat
	77	Rendahnya SDM masyarakat
	78	Perlunya Peningkatan jumlah koperasi dan UMKM yang berbadan hukum melalui pengembangan kebijakan yang berpihak pada tumbuh kembangnya koperasi dan UMKM
Infrastruktur Daerah	79	Masih kurangnya bangunan yang ramah lingkungan
	80	Masih terdapat daerah yang belum memiliki prasarana dan sarana dasar yang layak
	81	Maraknya pembangunan toko-toko sampai ke pinggiran kota
	82	Pedagang dan pemilik toko jualan sampai mengganggu pengguna jalan
	83	Rendahnya konektivitas wilayah. Pembangunan infrastruktur di daerah terpencil jalan dan jembatan masih kurang
	84	Banyaknya infrastruktur jalan yang rusak ringan dan rusak berat
	85	Masih terdapat daerah terpencil akibat keterbatasan infrastruktur
	86	Adanya kerusakan tebing sungai, tebing jalan, tebing jembatan abutmen jembatan akibat abrasi sungai dan bencana
	87	Adanya perubahan/pergeseran arus sungai sehingga perlu normalisasi sungai
	88	Keterbatasan akses sarana penghubung jalan/jembatan kurang yang membatasi antar desa
	89	Adanya lahan pertanian yang belum cukup terairi/irigasi teknis
	90	Akses jalan usahatani belum memadai jumlah dan kualitas
	91	Pembangunan destinasi wisata tidak merata
	92	Belum berfungsi laboratorium daerah untuk analisis limbah industri dan limbah rumah tangga
	93	Infrastruktur, sarana dan prasarana belum merata antar wilayah
	94	Pencemaran lingkungan kawasan pelabuhan khusus batu bara, juga mengganggu kesehatan masyarakat sekitar
3. Aspek Ekologi		



PEMERINTAH KABUPATEN NAGAN RAYA
KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS (KLHS)
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD)

TEMA ISU	No	ISU-ISU PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN
Pencemaran Lingkungan	95	Meningkatnya dampak pencemaran terhadap ekosistem laut
	96	Pencemaran udara dan air oleh perusahaan batubara
	97	Masih ada pabrik membuang limbah ke sungai
	98	Perusahaan kelapa sawit mencemari lingkungan
	99	Penambangan emas tanpa izin mengganggu lokasi parawisata
	100	Pencemaran lingkungan oleh limbah Pabrik Kelapa Sawit (PKS)
	101	Peningkatan pencemaran tanah dan air oleh limbah
	102	Meningkatnya polusi plastik dan Mikroplastik
	103	Peningkatan suhu perkotaan
	104	Tampa emas rakyat tanpa izin merusak lingkungan
	105	Pencemaran air dari kegiatan rumah tangga dan home industry
	106	Limbah padat dan cair mengganggu lingkungan pasar
	107	Pencemaran udara oleh kegiatan industri (PLTU)
	108	Polusi udara oleh kegiatan pertambangan
	109	Pembukaan lahan dengan cara pembakaran
	110	Tingginya penggunaan pestisida perkebunan
	111	Pembuangan sampah belum selektif menurut sifat sampah
	112	Pengelolaan sampah belum optimal
	113	Sumber makanan tercemar
	114	Pencemaran lingkungan udara dan air oleh PKS
	115	Rendahnya bayaran pembebasan lahan
	116	Antisipasi ancaman bahaya keberadaan PLTA
Alih Fungsi Lahan	117	HGU di Nagan Raya umumnya belum ada dokumen sah
	118	Maraknya pertambangan ilegal
	119	Pembinaan terhadap kelompok masyarakat perkebunan masih kurang
	120	Peningkatan suhu udara akibat pengelolaan rawa gambut
	121	Pencemaran air sungai dari limbah industri kelapa sawit
	122	Alih fungsi ekosistem mangrove ke penggunaan lain



PEMERINTAH KABUPATEN NAGAN RAYA
KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS (KLHS)
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD)

TEMA ISU	No	ISU-ISU PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN
	123	Masih banyak tumpang tindih lahan antara masyarakat dengan perusahaan
	124	Reklamasi lahan HGU yang sudah dicabut oleh pemerintah utk masyarakat
	125	Masih luas lahan HGU perusahaan yang masih terlantar
	126	Maraknya pemanfaatan lahan ex HGU oleh masyarakat
	127	Maraknya penambang emas secara ilegal di Kecamatan Betong
	128	Belum optimalnya pengelolaan tata air di lahan gambut
	129	Kawasan industri belum dikaji DDDTLH
	130	Lahan sawah rusak akibat tambang emas ilegal di Kec. Seunagan timur dan di Kec Beutong
	131	Terjadinya alih fungsi lahan persawahan menjadi penggunaan lahan lainnya terutama perkebunan kelapa sawit
	132	Perlu adanya Qanun RPJPD pada masyarakat Publik
	133	Pemanfaatan area sempadan sungai untuk permukiman dan perkebunan
	134	Pemanfaatan area sempadan sungai untuk permukiman dan perkebunan
	135	Ahli fungsi lahan gambut menjadi perkebunan sawit
	136	Perubahan iklim berdampak pada lingkungan
	137	Perlu adanya Qahun RPJPD pada masyarakat Publik
	138	Sosialisasi IMB kurang, Sosialisasi UU Perkebunan Kurang
	139	Tuan tanah sangat berpengaruh terhadap alih fungsi lahan
	140	Penceramarn lingkungan oleh industri kelapa sawit
	141	Kerusakan lahan akibat kegiatan Pertambangan dan Perkebunan
	142	Lubang bekas tambang banyak belum direklamasi
Pengelolaan Lingkungan Hidup	143	Penyusunan Dokumen HCV (haig konservasi value) dan HSC (high stok carbon),
	144	Tingginya sampah domestik yang tidak terkelola
	145	Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) penuh
	146	Belum optimalnya pengelolaan limbah pabrik oleh pihak swasta
	147	Perambahan kawasan lindung (kawasan hutan lindung dan kawasan lindung



PEMERINTAH KABUPATEN NAGAN RAYA
KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS (KLHS)
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD)

TEMA ISU	No	ISU-ISU PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN
	148	Pelindungan terhadap keanekaragaman hayati dan satwa gajah
	149	Masih belum optimal pengelolaan lahan gambut
	150	Belum optimalnya keindahan dan kebersihan kota
	151	Penurunan kualitas air sungai
	152	Masih terdapatnya alat penangkap ikan yang tidak ramah lingkungan
	153	Pengelolaan perkebunan sawit diareal gambut
	154	Belum berfungsinya penertiban ahli fungsi lahan, sosialisasi RPJPD masih kurang
	155	Meningkatnya luas lahan kritis
	156	Masih kurang Sosialisasi dan kegiatan yang mendukung kelestarian lingkungan
	157	Deforestasi dan degradasi hutan, Degradasi lahan gambut, Peningkatan emisi
	158	Kawasan gambut kuala tripa berubah menjadi perkebunan sawit
Degradasi Lingkungan	159	Masih terjadi pencemaran tanah oleh sampah dan pestisida
	160	Masih ada tambang emas tanpa izin menggunakan mercury
	161	Degradasi kawasan konservasi,
	162	Kepunahan spesies, Kerusakan ekosistem dan habitat, Hilangnya plasma nutfah (sumber daya genetik),
	163	hilangnya cadangan sumber daya alam
	164	Kerusakan lahan bekas tambang
	165	DAS yang semakin kritis
	166	Kerusakan terumbu karang (coral bleaching)
	167	Peningkatan emisi gas rumah kaca (GRK),
	168	Degradasi lahan gambut,
	169	Kerusakan lahan akibat kegiatan pertambangan dan perkebunan
	170	Abrasi pantai
	171	Perambahan kawasan lindung (kawasan hutan lindung dan kawasan lindung gambut)
	172	Lahan gambut perlu dilindungi (rawa tripa), perlu konservasi lahan gambut



PEMERINTAH KABUPATEN NAGAN RAYA
KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS (KLHS)
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD)

TEMA ISU	No	ISU-ISU PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN
Bencana Alam	173	Kebakaran hutan dan lahan
	174	Peningkatan intensitas bencana hidrometeorologi (banjir, longsor, kekeringan, dll),
	175	Banjir di kecamatan Seunagan dan Seunagan Timur Nagan Raya
	176	Meningkatnya polusi udara dari sektor industri
	177	Masih kurangnya kesadaran akan bencana (sadar bencana)
	178	Perubahan iklim dan Peningkatan permukaan air laut
	179	Bencana Gempa bumi dan Tsunami
	180	Abrasi pantai di sekitar pelabuhan batubara
	181	Intrusi, pasang air laut, banjir rob dan erosi
	182	Masih minimnya jalur dan bangunan evakuasi
	183	Belum maksimalnya pelaksanaan program mitigasi bencana
	184	Peningkatan Frekuensi Kebakaran hutan dan lahan gambut
	185	Minim organisasi yg bergerak dibidang mitigasi bencana

Sumber: Hasil Pra Pelingkupan Pokja PL KLHS RPJPD Kab. Nagan Raya, 2023

Isu awal tersebut berdasarkan masukan dan tanggapan para pemangku kepentingan. Berdasarkan hasil FGD dan konsultasi publik, telah terangkum daftar panjang isu PB yang terkait dengan RPJPD. Secara lengkap hasil identifikasi usulan isu dari para pemangku kepentingan dan Pokja KLHS sebanyak 185 isu.

Dari 185 isu PB di atas dikelompokkan berdasarkan kesamaan sektor, tema dari isu-isu yang dijarah melalui FGD dan hubungan sebab akibat menjadi 15 isu PB. Hasil identifikasi awal dan masukan pemangku kepentingan diolah untuk menghasilkan isu pembangunan berkelanjutan strategis penyusunan KLHS RPJPD. Oleh karena itu ditentukan kriteria isu PB strategis yang menunjukkan tingkat pengaruh isu tersebut terhadap proses penyusunan revisi RPJPD. Kriteria yang digunakan dalam penapisan isu pembangunan berkelanjutan strategis prioritas adalah:

4.8.2. Tahap Pelingkupan

Tahapan ini dilakukan dalam bentuk *Focus Group Discussion/workshop* dengan mengundang para pemangku kepentingan guna melakukan verifikasi dan klasifikasi terhadap

daftar isu-isu panjang pembangunan berkelanjutan dengan menggunakan sistem pembobotan dan skoring terhadap kriteria yang telah ditetapkan yang kemudian menjadi isu-isu strategis.

a. Melakukan Verifikasi dan Klasifikasi

Verifikasi dan klarifikasi dilakukan dalam forum FGD untuk kembali mengidentifikasi daftar panjang hasil pra pelingkupan dengan melibatkan pemangku kepentingan yang telah disepakati pada tahap pra pelingkupan. Hasilnya diperoleh dari 185 macam isu panjang pembangunan berkelanjutan terkait dengan RPJPD Kabupaten Nagan Raya Tahun 2025-2045. Hasil verifikasi dan klasifikasi merupakan hasil; (1) penambahan dan atau pengurangan daftar panjang isu PB; (2) terjadi perubahan terhadap rumusan tema isu PB yang digunakan; dan (3) penggabungan tema isu PB. Hasilnya disajikan dalam **Tabel 4.25**.

Tabel 4.25. Hasil Verifikasi dan Klasifikasi Isu-Isu Pendek PB

No.	ISU-ISU YANG MASUK KRITERIA STRATEGIS
1	Masih tingginya angka penyandang masalah kesejahteraan sosial, tingkat pengangguran dan kemiskinan serta masih rendahnya angka IPM.
2	Belum Berkembangnya Industri Pengolahan Produk Berbahan Baku Hasil Pertanian berbasis keunggulan daerah
3	Belum terintegrasi antara sistem produksi hulu dengan hilir. Industri pengolahan hasil pertanian masih kurang
4	Belum adanya pusat-pusat perdagangan dan jasa yang representatif. Masih kuatnya gravitasi ekonomi Kabupaten Aceh Barat dan Aceh Barat Daya
5	Masih kurang Penyediaan Prasarana dan Sarana Sanitasi (air bersih, drainase, toilet, TPS, munculnya rumah kumuh)
6	Banyak terjadi pencemaran tanah, air, udara dan menimbulkan degradasi lingkungan Hidup. Masih rendah upaya pengelolaan dan upaya pemantauan lingkungan hidup.
7	Masih rendahnya prasarana dan sarana serta pengelolaan destinasi pariwisata alam kawasan pesisir pantai dan alam.
8	Rendahnya pemahaman dan kesadaran tentang pentingnya keanekaragaman hayati bagi kehidupan
9	Tingginya Illegal Fishing di Samudra India (kurangnya pengawasan terhadap kapal nelayan asing)



PEMERINTAH KABUPATEN NAGAN RAYA
KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS (KLHS)
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD)

No.	ISU-ISU YANG MASUK KRITERIA STRATEGIS
10	Masih terjadi Alih fungsi lahan gambut menjadi perkebunan kelapa sawit
11	Tingginya Alih fungsi Lahan Sawah menjadi Kebun Sawit dan Lahan Pertanian menjadi Lahan Non Pertanian.
12	Masih terjadinya Perambahan kawasan lindung (kawasan hutan lindung dan kawasan lindung)
13	Masih banyak daerah terisolir/rendahnya konektivitas wilayah, jalan dan jembatan banyak yang rusak.
14	Kepunahan spesies, Kerusakan ekosistem dan habitat, Hilangnya plasma nutfah (sumber daya genetik),
15	Masih kurang Pelindungan terhadap keanekaragaman hayati dan satwa liar/ gajah
16	Peningkatan intensitas bencana hidrometeorologi dan perubahan iklim (banjir, pasang air laut, angin badai, longsor, kekeringan, abrasi pantai dll).

b. Menetapkan Isu-Isu Strategis

Selanjutnya dilakukan penetapan Isu Strategis yang dihadiri oleh anggota Pokja PL KLHS RPJPD Kabupaten Nagan Raya dan Satuan Kerja Perangkat Daerah (OPD/SKPD) serta para pemangku kepentingan lainnya di lingkungan Kabupaten Nagan Raya. Penetapan isu strategis didasarkan pada 4 (empat) kriteria yaitu:

1. **Bersifat lintas wilayah** baik terdiri dari beberapa kabupaten/kota maupun terkait dengan wilayah sekitar Aceh sampai dengan nasional;
2. **Bersifat lintas sektor** dalam konteks hubungan sebab akibat memiliki dampak yang sangat luas;
3. **Bersifat lintas pemangku kepentingan** baik dalam konteks antar SKPD maupun lintas stakeholder yaitu pemerintah, swasta dan masyarakat; dan
4. **Bersifat lintas waktu** yang artinya dalam skala tahunan maupun periode masa pemerintahan.

Penilaian terhadap kriteria di atas dalam penyusunan isu strategis dilakukan setelah dilakukan pemusatan isu berdasarkan kesamaan isu dan hubungan sebab akibat. Penilaian terhadap hasil pemusatan isu tersebut dapat dilihat pada tabel berikut. Penjelasan terhadap



PEMERINTAH KABUPATEN NAGAN RAYA
KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS (KLHS)
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD)

masing-masing isu hasil pemusatan atau pengelompokkan menunjukkan status isu tersebut terhadap empat kriteria di atas.

Isu pembangunan berkelanjutan yang strategis artinya isu tersebut memenuhi seluruh kriteria di atas. Dari empat kriteria penapisan isu strategis prioritas di atas, dapat terpilih menjadi isu strategis apabila memiliki nilai skor 3 – 4, sedangkan skor 0 – 2 bukan merupakan isu pembangunan berkelanjutan strategis untuk konteks Kabupaten Nagan Raya.

Tabel 4.26. Isu Pembangunan Berkelanjutan Strategis

No.	ISU-ISU PB YANG MASUK KRITEIRIA STRATEGIS	KRITERIA ISU STRATEGI				PENILAIAN
		Lintang Sektor	Lintang Wilayah	Lintang OPD	Lintang Waktu	
1	Masih tingginya angka penyandang masalah kesejahteraan sosial, tingkat pengangguran dan kemiskinan serta masih rendahnya angka IPM.	√	√	√	√	4
2	Belum Berkembangnya Industri Pengolahan Produk Berbahan Baku Hasil Pertanian berbasis keunggulan daerah	√	-	√	√	3
3	Belum terintegrasi antara sistem produksi hulu dengan hilir. Industri pengolahan hasil pertanian masih kurang	√	-	√	√	3
4	Belum adanya pusat-pusat perdagangan dan jasa yang representatif. Masih kuatnya gravitasi ekonomi Kabupaten Aceh Barat dan Aceh Barat Daya	√	-	√	-	2
5	Masih kurang Penyediaan Prasarana dan Sarana Sanitasi (air bersih, drainase, toilet, TPS, munculnya rumah kumuh)	√	√	√	√	4
6	Banyak terjadi pencemaran tanah, air, udara dan menimbulkan degradasi lingkungan Hidup. Masih rendah upaya pengelolaan dan upaya pemantauan lingkungan hidup.	√	√	√	√	4
7	Masih rendahnya prasarana dan sarana serta pengelolaan destinasi pariwisata alam kawasan pesisir pantai dan alam.	√	√	√	√	4
8	Rendahnya pemahaman dan kesadaran tentang pentingnya keanekaragaman hayati bagi kehidupan	-	√	√	√	3



PEMERINTAH KABUPATEN NAGAN RAYA
KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS (KLHS)
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD)

No.	ISU-ISU PB YANG MASUK KRITEIRIA STRATEGIS	KRITERIA ISU STRATEGI				PENILAIAN
		Lintah Sektor	Lintas Wilayah	Lintas OPD	Lintas Waktu	
9	Tingginya Illegal Fishing di Samudra India (kurangnya pengawasan terhadap kapal nelayan asing)	-	√	√	√	3
10	Masih terjadi Alih fungsi lahan gambut menjadi perkebunan kelapa sawit	√	√	√	√	4
11	Tingginya Alih fungsi Lahan Sawah menjadi Kebun Sawit dan Lahan Pertanian menjadi Lahan Non Pertanian.	√	√	√	√	4
12	Masih terjadinya Perambahan kawasan lindung (kawasan hutan lindung dan kawasan lindung)	-	√	√	√	3
13	Masih banyak daerah terisolir/rendahnya konektivitas wilayah, jalan dan jembatan banyak yang rusak.	√	√	√	√	4
14	Kepunahan spesies, Kerusakan ekosistem dan habitat, Hilangnya plasma nutfah (sumber daya genetik),	-	√	√	√	3
15	Masih kurang Pelindungan terhadap keanekaragaman hayati dan satwa liar/gajah	-	√	√	√	3
16	Peningkatan intensitas bencana hidrometeorologi dan perubahan iklim (banjir, pasang air laut, angin badai, longsor, kekeringan, abrasi pantai dll),	√	√	√	√	4

Sumber: Hasil Pelingkupan, 2022

c. Kajian Identifikasi Isu Pembangunan Berkelanjutan Strategis

Berdasarkan dengan pasal 9 ayat 1 Pada PP No. 46 Tahun 2016 tentang unsur-unsur yang perlu dipertimbangkan dalam identifikasi isu pembangunan berkelanjutan paling sedikit menggunakan:

1. **Karakteristik wilayah**, berkaitan dengan kondisi kualitas lingkungan hidup, kondisi ekosistem, dan tingkat pelayanannya, kondisi sumber daya alam, pola aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat, dan kelembagaan pengelolaannya.
2. **Tingkat pentingnya potensi dampak** yaitu berdasarkan jumlah penduduk yang terdampak dari Kebijakan, Rencana, dan Program, luas penyebaran dampak, intensitas dan lama dampaknya berlangsung, banyaknya komponen lingkungan hidup yang

terkena dampak, dampak kumulatif, sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

3. **Keterkaitan antar isu strategis pembangunan berkelanjutan**, ditunjukkan dengan hubungan sebab akibat antar isu pembangunan berkelanjutan lainnya
4. **Keterkaitan dengan materi muatan Kebijakan, Rencana, dan atau/Program** yang dituangkan dalam RPJPD Kabupaten Nagan Raya Tahun 2025-2045.
5. **Muatan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup**), dalam hal ini tidak digunakan dalam prioritas isu karena dokumen RPPLH Kabupaten Nagan Raya belum disahkan
6. **Hasil KLHS dari KRP pada hirarki di atasnya** dengan menggunakan hasil dari KLHS RPJPD Provinsi Aceh Tahun 2025-2045, yang dapat dirujuk muatan isu pembangunan berkelanjutan.

Berdasarkan unsur-unsur di atas, maka matriks berikut merupakan penjelasan penyusunan isu pembangunan berkelanjutan strategis prioritas. Isu pembangunan berkelanjutan prioritas merupakan isu yang memiliki nilai 4 - 5 karena dapat memenuhi hampir seluruh dari unsur-unsur yang telah dijelaskan di atas. Sedangkan nilai 1 – 3 bukan merupakan isu prioritas.

Tabel 4.27. Isu-Isu PB yang Masuk Kriteria Strategis

No.	ISU-ISU PB YANG MASUK KRITERIA STRATEGIS	KRITERIA ISU STRATEGI					PENILAIAN
		Karakteristik Wilayah	Pentingnya Dampak	Keterkaitan Antar Isu	Keterkaitan dengan KRP	KLHS diatasnya	
1	Masih tingginya angka penyandang masalah kesejahteraan sosial, tingkat pengangguran dan kemiskinan serta masih rendahnya angka IPM.	√	√	√	√	√	5
2	Belum Berkembangnya Industri Pengolahan Produk Berbahan Baku Hasil Pertanian berbasis	√	√	√	-	-	3



PEMERINTAH KABUPATEN NAGAN RAYA
KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS (KLHS)
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD)

No.	ISU-ISU PB YANG MASUK KRITERIA STRATEGIS	KRITERIA ISU STRATEGI					PENILAIAN
		Karakteristik Wilayah	Pentingnya Dampak	Keterkaitan Antar Isu	Keterkaitan dengan KRP	KLHS diatasnya	
	keunggulan daerah						
3	Belum terintegrasi antara sistem produksi hulu dengan hilir. Industri pengolahan hasil pertanian masih kurang	-	√	-	√	√	3
4	Belum adanya pusat-pusat perdagangan dan jasa yang representatif. Masih kuatnya gravitasi ekonomi Kabupaten Aceh Barat dan Aceh Barat Daya	√	√	√	√	√	5
5	Masih kurang Penyediaan Prasarana dan Sarana Sanitasi (air bersih, drainase, toilet, TPS, munculnya rumah kumuh)	√	√	-	-	√	3
6	Banyak terjadi pencemaran tanah, air, udara dan menimbulkan degradasi lingkungan Hidup. Masih rendah upaya pengelolaan dan upaya pemantauan lingkungan hidup.	√	√	√	-	-	3
7	Masih rendahnya prasarana dan sarana serta pengelolaan destinasi	√	√	√	√	-	4



PEMERINTAH KABUPATEN NAGAN RAYA
KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS (KLHS)
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD)

No.	ISU-ISU PB YANG MASUK KRITERIA STRATEGIS	KRITERIA ISU STRATEGI					PENILAIAN
		Karakteristik Wilayah	Pentingnya Dampak	Keterkaitan Antar Isu	Keterkaitan dengan KRP	KLHS diatasnya	
	pariwisata alam kawasan pesisir pantai dan alam.						
8	Rendahnya pemahaman dan kesadaran tentang pentingnya keanekaragaman hayati bagi kehidupan	√	√	√	-	-	3
9	Tingginya Illegal Fishing di Samudra India (kurangnya pengawasan terhadap kapal nelayan asing)	√	√	-	-	√	3
10	Masih terjadi Alih fungsi lahan gambut menjadi perkebunan kelapa sawit	√	√	√	√	√	5
11	Tingginya Alih fungsi Lahan Sawah menjadi Kebun Sawit dan Lahan Pertanian menjadi Lahan Non Pertanian.	√	√	√	-	-	3
12	Masih terjadinya Perambahan kawasan lindung (kawasan hutan lindung dan kawasan lindung)	√	√	-	-	√	3
13	Masih banyak daerah terisolir/rendahnya konektivitas wilayah, jalan dan jembatan banyak yang rusak.	√	√	√	√	√	3



PEMERINTAH KABUPATEN NAGAN RAYA
KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS (KLHS)
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD)

No.	ISU-ISU PB YANG MASUK KRITERIA STRATEGIS	KRITERIA ISU STRATEGI					PENILAIAN
		Karakteristik Wilayah	Pentingnya Dampak	Keterkaitan Antar Isu	Keterkaitan dengan KRP	KLHS di atasnya	
14	Kepunahan spesies, Kerusakan ekosistem dan habitat, Hilangnya plasma nutfah (sumber daya genetik),	√	√	√	-	-	3
15	Masih kurang Pelindungan terhadap keanekaragaman hayati dan satwa liar/ gajah	√	√	√	-	-	3
16	Peningkatan intensitas bencana hidrometeorologi dan perubahan iklim (banjir, pasang air laut, angin badai, longsor, kekeringan, abrasi pantai dll),	√	√	√	√	√	5

Sumber: Hasil Analisis, 2023

4.8.3. Isu Paling Strategis Pembangunan Berkelanjutan

a. Identifikasi dan Perumusan Isu Paling Strategis

Uji Silang Hasil Identifikasi Isu Pembangunan Berkelanjutan Strategis Sesuai dengan Pasal 9 ayat (2) PP No. 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis, identifikasi isu pembangunan berkelanjutan strategis dianalisis dengan 10 muatan yaitu:

1. Kapasitas daya dukung dan daya tampung Lingkungan Hidup untuk pembangunan (Kapasitas D3TLH);
2. Perkiraan dampak dan risiko Lingkungan Hidup (Dampak LH);
3. Kinerja layanan atau jasa ekosistem (Kinerja JE);
4. Intensitas dan cakupan wilayah bencana (Intensitas Bencana);
5. Status mutu dan ketersediaan sumber daya alam (Status SDA);



PEMERINTAH KABUPATEN NAGAN RAYA
KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS (KLHS)
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD)

6. Ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati (Keanekaragaman hayati);
7. Kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim (Adaptasi PI);
8. Tingkat dan status jumlah penduduk miskin atau penghidupan sekelompok masyarakat serta terancamnya keberlanjutan penghidupan masyarakat (Kemiskinan);
9. Risiko terhadap kesehatan dan keselamatan masyarakat (Kesehatan);
10. Ancaman terhadap perlindungan terhadap kawasan tertentu secara tradisional yang dilakukan oleh masyarakat dan masyarakat hukum adat (Hukum tradisional)

Identifikasi diperoleh isu paling strategis prioritas sebagai berikut:

Tabel 4.28. Isu PB Paling Strategis Prioritas

No	Isu PB Paling Strategis	Isu Paling Strategis Prioritas
1.	Masih terjadi pencemaran dan degradasi lingkungan Hidup. Masih rendah upaya pengelolaan dan upaya pemantauan lingkungan hidup.	Pencemaran Lingkungan
2.	Alih fungsi kawasan hutan dan lahan gambut menjadi kawasan Budidaya dan penurunan biodiversiti.	Alih Fungsi Lahan
3.	Masih tingginya Intensitas Terjadi Bencana Alam, dampak perubahan iklim (Banjir, Pasang Air Laut, Angin Badai Longsor, Kebakaran Hutan/Gambut, Erosi, Abrasi pantai, dll) dan Masih Belum Optimal Manajemen Mitigasi Kebencanaan (belum tersedianya jalur evakuasi untuk daerah rawan bencana).	Bencana Alam
4.	Masih tingginya angka penyandang masalah kesejahteraan sosial, tingkat pengangguran, kemiskinan serta masih rendahnya angka IPM (Pendidikan dan Kesehatan).	Kesenjangan Sosial
5.	Masih rendahnya daya saing daerah, infrastruktur dan belum optimalnya pemanfaatan SDA (lahan dan laut).	Daya Saing Daerah
6.	Belum optimal pemanfaatan potensi kawasan wisata alam yang belum tertata dan Pengembangan kawasan industri berbasis komoditi unggulan daerah.	Penataan Kawasan Wisata dan Industri

Sumber: FGD Pokja, 2023



BAB V

ANALISIS CAPAIAN INDIKATOR TPB PADA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (OPD)

Untuk kondisi capaian indikator TPB yang ditangani oleh setiap OPD, berfokus kepada analisis capaian masing-masing indikator TPB yang sudah dilakukan setiap OPD. Capaian ini dilihat dari urusan yang ditangani oleh OPD, dimana hasil dari kondisi capaian dan analisis menjadi salah satu bahan dalam mengidentifikasi isu strategis Kabupaten Nagan Raya yang berkaitan dengan urusan yang ditangani oleh masing-masing OPD dan menjadi fokus utama yang harus dilaksanakan oleh setiap OPD.

5.1. Penapisan Organisasi Perangkat Daerah yang Relevan

Hasil analisis capaian indikator TPB pada Kabupaten Nagan Raya, terdapat 27 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan 6 organisasi pemerintah vertikal (Kantor, Badan, Satuan dan lain-lain) yang relevan dalam pelaksanaan dan pencapaian indikator TPB. Jumlah indikator TPB yang sudah dilaksanakan, belum dilaksanakan dan belum ada data masing-masing OPD dapat dilihat pada **Tabel 5.1**.



PEMERINTAH KABUPATEN NAGAN RAYA
KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS (KLHS)
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD)

Tabel 5.1. Jumlah Indikator TPB Relevan Berdasarkan OPD di Kabupaten Nagan Raya

No	OPD	Jumlah Indikator	Jumlah Indikator TPB		
			Sudah Dilaksanakan	Belum dilaksanakan/ Tidak ada data	Bukan Wewenang
1	Inspektorat	1	0	0	1
2	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	0	0	0	0
3	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	2	0	0	2
4	Dinas Pendidikan	17	4	13	0
5	Dinas Kesehatan	44	27	17	0
6	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	20	5	6	9
7	Dinas Sosial	11	8	3	0
8	Dinas Pertanian dan Peternakan	5	1	4	0
9	Dinas Syariat Islam	0	0	0	0
10	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	15	8	5	2
11	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	0	0	0	0
12	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM	5	0	5	0
13	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	5	2	2	1
14	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	9	2	7	0
15	Dinas Kelautan, Perikanan dan Pangan	5	0	5	0
16	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	11	2	8	1
17	Dinas Lingkungan Hidup	15	8	5	2
18	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	5	3	2	0
19	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Gampong, Pengendalian Penduduk dan Pemberdayaan Perempuan	23	6	17	0
20	Dinas Informatika dan Statistik	11	0	11	0
21	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	5	0	5	0
22	Dinas Perkebunan	0	0	0	0
23	Dinas Perhubungan	8	0	6	2
24	Dinas Perpustakaan dan Arsip	0	0	0	0
25	SATPOL PP dan Wilayahul Hisbah	0	0	0	0
26	Sekretariat Dewan	0	0	0	0
27	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	0	0	0	0
Total		217	76	121	20

Sumber: Hasil Analisis, 2023

Pada **Tabel 5.1** di atas dapat dilihat bahwa Dinas Kesehatan merupakan OPD dengan jumlah indikator TPB paling banyak yakni sebanyak 44 indikator. Dari indikator yang menjadi urusan Dinas Kesehatan tersebut, indikator yang sudah dilaksanakan sebanyak 27 indikator dan indikator yang belum dilaksanakan yakni sebanyak 17 indikator. Sedangkan ada beberapa dinas yang indikator TPB berjumlah nol adalah dinas/badan/satuan yang belum melaksanakan indikator TPB sesuai target nasional dan atau dinas/badan/satuan yang belum mempunyai data indikator TPB.

Jumlah indikator TPB keseluruhan OPD adalah 217 indikator. Dari jumlah tersebut 76 indikator sudah dilaksanakan, 121 indikator belum dilaksanakan atau belum tersedia data dan 20 indikator bukan wewenang Kabupaten Nagas Raya tapi wewenang provinsi atau pusat. Terkait banyaknya belum dilaksanakan atau belum tersedia data ini dapat disebabkan oleh sebahagian OPD belum mengelola data TPB dengan baik dan benar. Oleh karena kesulitan data maka tim penyusun melakukan kajian ini sesuai dengan data yang tersedia saat dokumen ini disusun.

Berdasarkan hasil analisis capaian indikator Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Sesuai Perpres No. 111 Tahun 2012 dari 217 indikator TPB yang relevan yang dikelola oleh 27 OPD/Badan/Kantor/Bagian di Kabupaten Nagas Raya akan dijelaskan sebagai berikut :

5.1.1. Dinas Lingkungan Hidup (DLH)

Dinas Lingkungan Hidup (DLH) memiliki tugas pokok dalam menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang lingkungan hidup. Jumlah indikator TPB yang menjadi tanggungjawab pada Dinas Lingkungan Hidup adalah 19 indikator TPB yang relevan dan menjadi kewenangan Dinas Lingkungan Hidup. Terkait pelaksanaan dalam upaya pencapaiannya, diketahui sebanyak 5 (27.78%) indikator sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target (SS); 2 (11.11%) indikator sudah dilaksanakan tetapi belum mencapai target (SB); 9 (50.00%) indikator tidak ada data dan belum dilakukan dan 2 (11.11%) indikator TPB bukan kewenangan Kabupaten Nagas Raya. Lebih rinci seperti disajikan pada **Tabel 5.2**.



Tabel 5.2. Kategori Capaian Indikator TPB Dinas Lingkungan Hidup Nagan Raya, 2022.

Kategori Capaian	Jumlah	Persen
Indikator TPB yang sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target (SS);	6	40.00%
Indikator TPB yang sudah dilaksanakan tetapi belum mencapai target (SB);	2	13.33%
Indikator TPB yang tidak ada data atau belum terlaksana (NA); dan	5	33.33%
Indikator TPB yang bukan kewenangan (BK).	2	13.33%
Jumlah	5	100%

Sumber: Hasil Analisis, 2023

Berdasarkan **Tabel 5.2** hasil analisis data status pencapaian TPB/SDGs di Kabupaten Nagan Raya menunjukan hasil yang cukup menarik, Dimana masih tingginya status dengan kategori tidak ada data (na) yaitu 50% dari keseluruhan indikator yang menjadi kewenangan Dinas Lingkungan Hidup Nagan Raya. Salah satu penyebab cukup tingginya status kategori na. ialah terjadi ketimpangan pelaksanaan TPB di Kabupaten Nagan Raya. Seperti halnya terjadi di beberapa daerah lain di Indonesia, dimana manajemen pengelolaan data pelaksanaan TPB, khususnya di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nagan Raya, maupun di tingkat OPD-OPD lain tidak terkelola dengan baik, sehingga berpengaruh terhadap ketersediaan data yang dibutuhkan dalam upaya analisis pelaksanaan TPB/SDGs. Selain itu terdapat gap kesenjangan data antar OPD yang timpang maupun dengan penyedia data seperti Badan Pusat Statistik (BPS). Berikut persentasi tingkat capaian per kriteria seperti terlihat pada **Gambar 5.1**.



Gambar 5.1. Persentase Capaian Indikator TPB pada DLH Kabupaten Nagan Raya
(Sumber: Hasil Analisis, 2023)

Adapun capaian indikator TPB pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nagan Raya secara lebih lengkap dapat dilihat pada **Tabel 5.3** dibawah ini.



PEMERINTAH KABUPATEN NAGAN RAYA
KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS (KLHS)
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD)

Tabel 5.3. Rekap Capaian Indikator TPB pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nagan Raya

No.	No. Indikator	Indikator TPB	Target Perpes 59/2017	Target 2022	Realisasi 2022	Kategori Capaian
1	6.3.2.(a)	Kualitas air danau.	Meningkat	na	na	na
2	6.3.2.(b)	Kualitas air sungai sebagai sumber air baku.	Meningkat	na	na	na
3	6.4.1.(b)	Insentif penghematan air pertanian/perkebunan dan industri.	ada	na	na	na
4	6.5.1.(f)	Jumlah wilayah sungai yang memiliki partisipasi masyarakat dalam pengelolaan daerah tangkapan sungai dan danau.	10 WS (skala nasional)	na	na	BK
5	6.5.1.(g)	Kegiatan penataan kelembagaan sumber daya air.	ada	na	na	na
6	7.2.1*	Bauran energi terbarukan.	10-16%	na	na	na
7	7.3.1*	Intensitas energi primer.	Menurun menjadi 463,2 SBM (skala nasional)	na	na	BK
8	11.6.1.(a)	Persentase sampah perkotaan yang tertangani.	Meningkat menjadi 80%	65	85	SS
9	11.6.1.(b)	Jumlah kota hijau yang mengembangkan dan menerapkan green	Meningkat/ada	6	6,37	SS
10	11.7.1.(a)	Jumlah kota hijau yang menyediakan ruang terbuka hijau di	Meningkat/ada	na	na	na
	12.4.1.(a)	Jumlah peserta PROPER.....		na	na	na
11	12.4.2.(a)	Jumlah limbah B3 yang terkelola dan proporsi limbah B3 yang diolah sesuai peraturan perundangan (sektor industri).	Meningkat menjadi 150 juta ton (skala nasional)	25	30	SB
12	12.5.1.(a)	Jumlah timbulan sampah yang didaur ulang.	20 ton per hari (skala nasional)	20	10	SB
13	12.6.1.(a)	Jumlah perusahaan yang menerapkan sertifikasi SNI ISO	Meningkat	na	na	na
14	12.7.1.(a)	Jumlah produk ramah lingkungan yang teregister.	Meningkat	na	na	na
15	12.8.1.(a)	Jumlah fasilitas publik yang menerapkan Standar Pelayanan	Meningkat	na	na	na
16	15.1.1.(a)	Proporsi tutupan hutan terhadap luas lahan keseluruhan.	Meningkat	34,40%	40%	SS
17	15.3.1.(a)	Proporsi luas lahan kritis yang direhabilitasi terhadap luas lahan	5,5 juta ha (skala nasional)	55	65	SS
18	15.6.1*	Tersedianya kerangka legislasi, administrasi dan kebijakan untuk memastikan pembagian keuntungan yang adil dan merata.	ada	na	na	na
19	15.9.1.(a)	Dokumen rencana pemanfaatan keanekaragaman hayati.	Ada/ Meningkatkan	ada	ada	SS

Sumber: Hasil Analisis, 2023

Tabel 5.3. diatas terlihat bahwa ada dua indikator TPB pada Dinas Lingkungan Hidup Nagan Raya yang sudah dilaksanakan tapi belum mencapai target yaitu nomor indikator 12.4.2.(a) dan nomor indikator 12.5.1.(a). Masih adanya Gap antara target dan realisasi yang besar, maka untuk mencapai target dibutuhkan upaya-upaya tambahan tidak cukup dengan usaha biasa (*Business as Usual*).

5.1.2. Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga

Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga memiliki tugas pokok dalam menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang Pariwisata, pemuda dan olah raga. Hasil analisis capaian TPB pada Dinas Pariwisata menunjukkan dari total 5 indikator TPB yang



PEMERINTAH KABUPATEN NAGAN RAYA
KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS (KLHS)
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD)

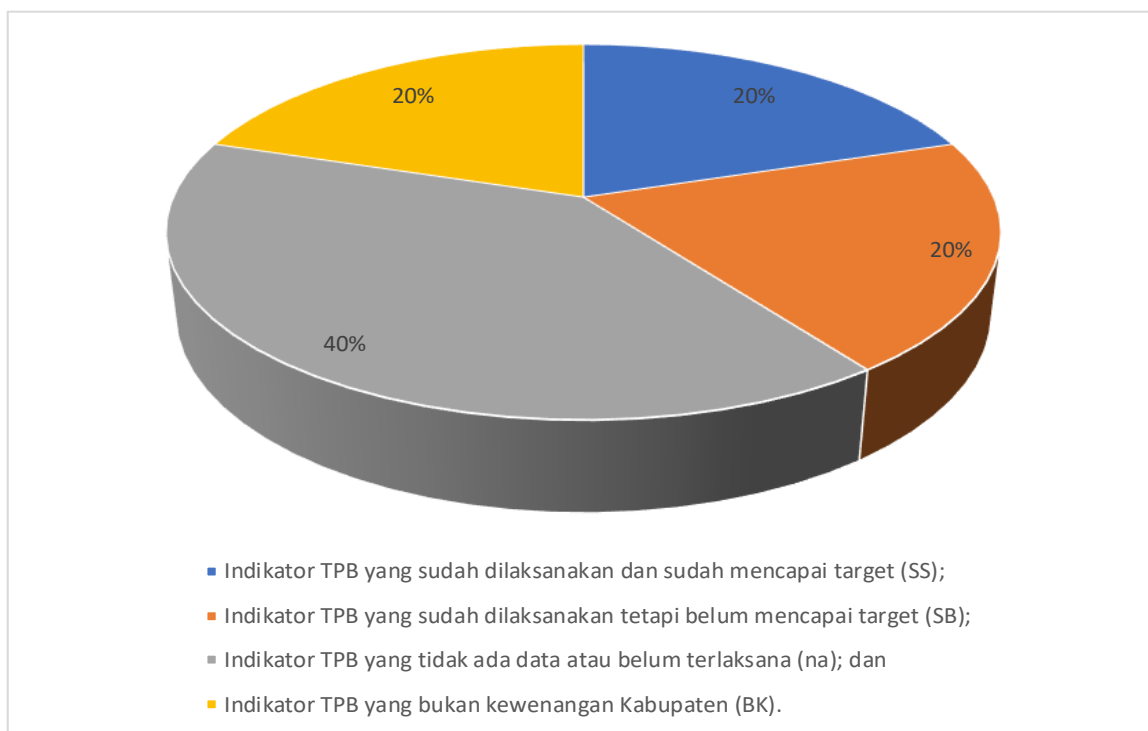
relevan dan menjadi kewenangan Dinas Pariwisata. Terkait pelaksanaan dalam upaya pencapaiannya, diketahui sebanyak 1 (20%) indikator sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target, 1 (20%) sudah dilaksanakan tetapi belum mencapai target, 2 (40%) indikator tidak ada data dan belum dilaksanakan dan 1 (25%) indikator TPB bukan kewenangan Kabupaten Nagan Raya. Lebih rinci seperti pada **Tabel 5.4**.

Tabel 5.4. Capaian Indikator TPB pada Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Nagan Raya, Tahun 2022.

Kategori Capaian	Jumlah	Persen
Indikator TPB yang sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target (SS);	1	20.00%
Indikator TPB yang sudah dilaksanakan tetapi belum mencapai target (SB);	1	20.00%
Indikator TPB yang tidak ada data atau belum terlaksana (NA); dan	2	40.00%
Indikator TPB yang bukan kewenangan (BK).	1	20.00%
Jumlah	5	100%

Sumber: Hasil Analisis, 2023

Berdasarkan **Tabel 5.4** diatas menunjukkan hasil analisis data status pencapaian TPB/SDGs di Kabupaten Nagan Raya menunjukkan hasil yang cukup menarik, Dimana cukup tingginya kategori dengan tidak ada data (na) yaitu 40 % dari keseluruhan indikator yang menjadi kewenangan kabupaten. Salah satu penyebab cukup tingginya status na. ialah dimana manajemen pengelolaan data pelaksanaan TPB, khususnya di Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga tidak terkelola dengan baik. Sedangkan kategori capaian lainnya masing-masing 1 indikator atau 20%. Persentasi tingkat capaian per kriteria seperti terlihat pada **Gambar 5.2**.



Gambar 5.2. Persentase Capaian Indikator TPB pada Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Nagan Raya
 (Sumber: Hasil Analisis, 2023)

Adapun capaian indikator TPB pada Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Nagan Raya secara lebih lengkap dan rinci dapat dilihat pada **Tabel 5.5** dibawah ini.

Tabel 5.5. Rekap Capaian Indikator TPB pada Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Nagan Raya

No.	No. Indikator	Indikator TPB	Target Perpes 59/2017	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Kategori Capaian
1	8.9.1*	Proporsi kontribusi pariwisata terhadap PDB.	Meningkat menjadi 8%	-	-	BK
2	8.9.1.(a)	Jumlah wisatawan mancanegara.	Meningkat	0	0	SB
3	8.9.1.(b)	Jumlah kunjungan wisatawan nusantara.	Meningkat	1.425	3.355	SS
4	8.9.1.(c)	Jumlah devisa sektor pariwisata.	Meningkat	-	-	na
5	8.9.2*	Jumlah pekerja pada industri pariwisata dalam proporsi terhadap total pekerja.	Meningkat	-	-	na

Sumber: Hasil Analisis, 2023

Tabel 5.5 diatas terlihat bahwa ada dua Indikator TPB Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Nagan Raya yang sudah dilaksanakan yaitu nomor indikator 8.9.1. (a) dan nomor indikator 8.9.1. (b). Satu indikator yaitu indikator 8.9.1. (a) sudah dilaksanakan

namun belum ada realisasi atau angka kosong atau tidak ada wisatawan manca negara yang berkunjung, maka untuk mencapai target dibutuhkan upaya-upaya tambahan tidak cukup dengan usaha biasa (*Business as Usual*). Salah satu upaya tambahan adalah peningkatan anggaran untuk promosi mengenalkan destinasi wisata.

5.1.3. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi memiliki tugas pokok dalam menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Hasil analisis capaian TPB pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi menunjukkan dari total 15 indikator TPB yang relevan dan menjadi kewenangan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Terkait pelaksanaan dalam upaya pencapaiannya, diketahui sebanyak 6 (40,00%) indikator sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target, 2 (13,33%) sudah dilaksanakan tetapi belum mencapai target, 2 (40%) indikator tidak ada data dan belum dilaksanakan dan 1 (25%) indikator TPB bukan kewenangan Kabupaten Nagan Raya. Lebih rinci seperti pada **Tabel 5.6**.

Tabel 5.6. Capaian Indikator TPB pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Kategori Capaian	Jumlah	Persen
Indikator TPB yang sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target (SS);	6	40.00%
Indikator TPB yang sudah dilaksanakan tetapi belum mencapai target (SB);	2	13.33%
Indikator TPB yang tidak ada data atau belum terlaksana (NA); dan	5	33.33%
Indikator TPB yang bukan kewenangan (BK).	2	13.33%
Jumlah	15	100%

Sumber: Hasil Analisis, 2023

Berdasarkan **Tabel 5.6** hasil analisis data status pencapaian TPB/SDGs di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi menunjukan hasil yang cukup baik, Dimana cukup tingginya persentase capaian kategori sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target (SS) yaitu 40 % (6 indikator TPB) dari keseluruhan indikator yang menjadi kewenangan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Kemudian masih tingginya status na. ialah dimana manajemen pengelolaan data pelaksanaan TPB, khususnya di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi tidak terkelola dengan

baik. Sedangkan kategori capaian lainnya masing-masing 2 indikator atau masing-masing 13,33%. Persentasi tingkat capaian per kriteria seperti terlihat pada **Gambar 5.3**.



Gambar 5.3. Persentase Capaian Indikator TPB pada DLH Kabupaten Nagan Raya
(Sumber: Hasil Analisis, 2023)

Adapun capaian indikator TPB pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Nagan Raya secara lebih lengkap dan rinci dapat dilihat pada **Tabel 5.7** dibawah ini.



PEMERINTAH KABUPATEN NAGAN RAYA
KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS (KLHS)
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD)

Tabel 5.7. Rekap Capaian Indikator TPB pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Nagan Raya.

No.	No. Indikator	Indikator TPB	Target Perpes 59/2017	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Kategori Capaian
1	1.3.1.(a)	Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan.	Meningkat menjadi 95%	50	65	SB
2	1.3.1.(b)	Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan.	Meningkat	65	70	SS
3	8.2.1*	Laju pertumbuhan PDB per tenaga kerja/Tingkat pertumbuhan PDB riil per orang bekerja per tahun.	Meningkat			na
4	8.3.1*	Proporsi lapangan kerja informal sektor non-pertanian, berdasarkan jenis kelamin.	Meningkat			BK
5	8.3.1.(a)	Persentase tenaga kerja formal.	51%	40	45	SB
6	8.3.1.(b)	Persentase tenaga kerja informal sektor pertanian.	Meningkat			na
7	8.3.1.(c)	Persentase akses UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) ke layanan	Meningkat menjadi 25%			na
8	8.5.1*	Upah rata-rata per jam pekerja.	Meningkat			SS
9	8.5.2*	Tingkat pengangguran terbuka berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur.	Menurun		5,84	SS
10	8.5.2.(a)	Tingkat setengah pengangguran.	Menurun			SS
11	8.9.2*	Jumlah pekerja pada industri pariwisata dalam proporsi terhadap total pekerja.	Meningkat			SS
12	8.10.1.(b)	Proporsi kredit UMKM terhadap total kredit.	Meningkat			BK
13	10.4.1.(b)	Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan.	Meningkat			SS
14	9.2.1*	Proporsi nilai tambah sektor industri manufaktur terhadap PDB per kapita	Meningkat PDRB ADHK			na
15	9.2.1 (a)	Laju pertumbuhan PDB industri manufaktur	Lebih tinggi dari PDB			na

Sumber: Hasil Analisis, 2023

Tabel 5.7. diatas terlihat bahwa ada dua Indikator TPB Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nagan Raya yang sudah dilaksanakan tapi belum mencapai target yaitu nomor indikator 1.3.1. (a) dan nomor indikator 8.3.1. (a). Masih adanya Gap antara target dan realisasi yang besar, maka untuk mencapai target dibutuhkan upaya-upaya tambahan tidak cukup dengan usaha biasa (*Business as Usual*).

5.1.4. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR)

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang memiliki tugas pokok dalam menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Hasil analisis capaian TPB pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang menunjukkan dari total 20 indikator TPB yang relevan dan menjadi kewenangan Dinas Pekerjaan Umum dan



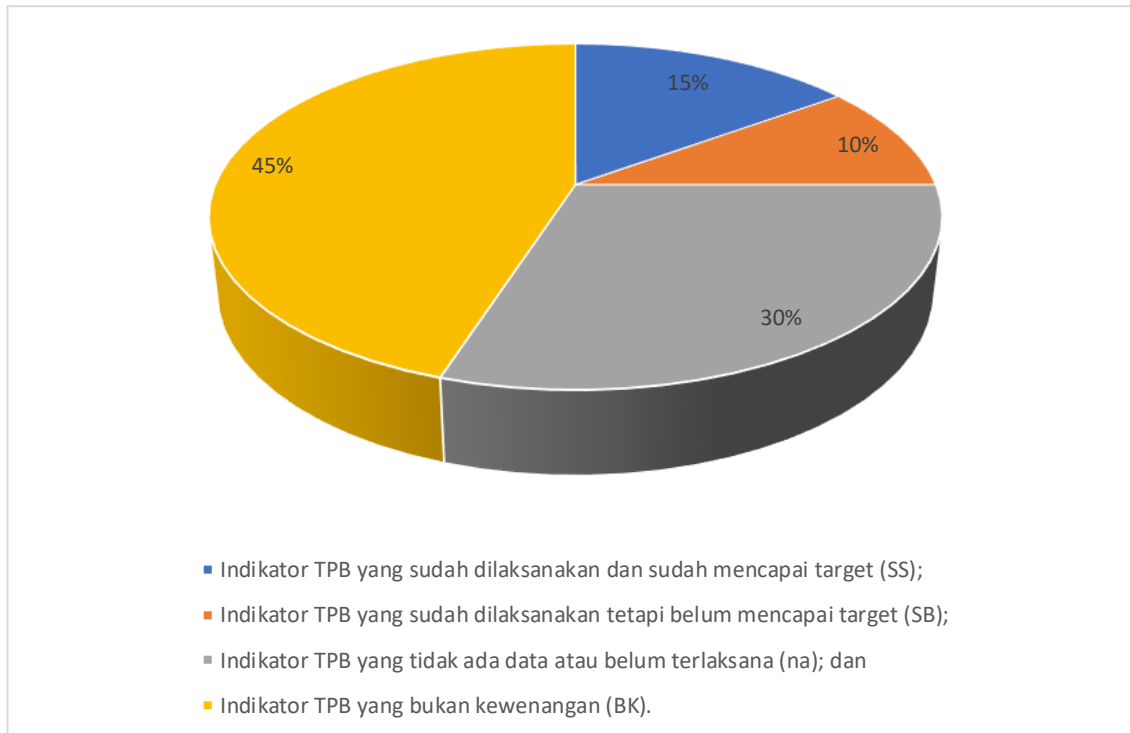
Penataan Ruang. Terkait pelaksanaan dalam upaya pencapaiannya, diketahui sebanyak 1 (5,00%) indikator sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target (SS), 3 (15,00%) sudah dilaksanakan tetapi belum mencapai target (SB), 7 (35,00%) indikator tidak ada data dan belum dilaksanakan (na) dan 95 (50,00%) indikator TPB bukan kewenangan Kabupaten Nagan Raya (BK). Lebih rinci seperti disajikan pada **Tabel 5.8**.

Tabel 5.8. Capaian Indikator TPB pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Kategori Capaian	Jumlah	Persen
Indikator TPB yang sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target (SS);	3	15.00%
Indikator TPB yang sudah dilaksanakan tetapi belum mencapai target (SB);	2	20.00%
Indikator TPB yang tidak ada data atau belum terlaksana (NA); dan	6	30.00%
Indikator TPB yang bukan kewenangan (BK).	9	45.00%
Jumlah	20	100%

Sumber: Hasil Analisis, 2023

Berdasarkan **Tabel 5.8** hasil analisis data status pencapaian TPB/SDGs di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang menunjukkan capaian yang kurang baik, dimana cukup tingginya persentase kategori wewenangan pusat dan provinsi artinya bukan wewenangan kabupaten (BK) yaitu 45 % (9 indikator TPB) dari keseluruhan indikator yang menjadi kewenangan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Kemudian masih tingginya status tidak punya data atau belum dilaksanakan (na) sebesar 30%. Indikator yang sudah dilaksanakan dan sudah tercapai (SS) sebesar 15% (3 indikator). Sedangkan indikator yang sudah dilaksanakan tapi belum tercapai (SB) adalah 2 indikator (10%). Persentase tingkat capaian per kriteria seperti terlihat pada **Gambar 5.4**.



Gambar 5.4. Persentase Capaian Indikator TPB pada DLH Kabupaten Nagan Raya

(Sumber: Hasil Analisis, 2023)

Adapun capaian indikator TPB pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Nagan Raya secara lebih lengkap dan rinci dapat dilihat pada **Tabel 5.9** dibawah ini.



PEMERINTAH KABUPATEN NAGAN RAYA
KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS (KLHS)
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD)

Tabel 5.9.Rekap Capaian Indikator TPB pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Nagan Raya.

No.	No. Indikator	Indikator TPB	Target Perpes 59/2017	Target Daerah 2022	Realisasi 2022	Kategori Capaian
1	1.4.1.(d)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak dan berkelanjutan.	Meningkat menjadi 100%	90.13	90.49	SS
2	6.1.1.(a)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak.	Meningkat menjadi 100%	90.13	90.49	SS
3	6.1.1.(b)	Kapasitas prasarana air baku untuk melayani rumah tangga, perkotaan dan industri, serta penyediaan air baku untuk pulau-pulau.	Meningkat Menjadi 118,6 m3/detik	0	0	na
4	6.1.1.(c)	Proporsi populasi yang memiliki akses layanan sumber air minum aman dan berkelanjutan.	Meningkat menjadi 100%	0	0	na
5	6.2.1.(e)	Jumlah kabupaten/kota yang terbangun infrastruktur air limbah dengan sistem terpusat skala kota, kawasan dan komunal.	Meningkat menjadi 438 kabupaten/kota.	0	0	na
6	6.2.1.(f)	Proporsi rumah tangga yang terlayani sistem pengelolaan air limbah terpusat.	Meningkat	0	0	na
7	6.3.1.(a)	Jumlah kabupaten/kota yang ditingkatkan kualitas pengelolaan lumpur tinja perkotaan dan dilakukan pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT).	Meningkat menjadi 409 Kabupaten /kota	-	-	BK
8	6.3.1.(b)	Proporsi rumah tangga yang terlayani sistem pengelolaan lumpur tinja.	Meningkat			SB
9	6.5.1.(a)	Jumlah Rencana Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Terpadu (RPDAST) yang diinternalisasi ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).	ada	ada	ada	SS
10	6.5.1.(c)	Jumlah jaringan informasi sumber daya air yang dibentuk.	8 WS			na
11	11.1.1.(b)	Jumlah kawasan perkotaan metropolitan yang terpenuhi standar pelayanan perkotaan (SPP).	12 kawasan perkotaan metropolita	-	-	BK
12	11.1.1.(c)	Jumlah kota sedang dan kota baru yang terpenuhi SPP.	Paling sedikit 20 kota sedang dan 10 kota baru (skala nasional)	-	-	BK
13	11.3.1.(a)	Jumlah kota sedang di luar Jawa yang diarahkan sebagai pengendali (buffer) arus urbanisasi dan sebagai pusat pertumbuhan utama.	Minimal 20 kota sedang (skala nasional)			BK
14	11.3.1.(b)	Jumlah Metropolitan baru di luar Jawa sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN).	5 metropolitan (skala nasional)			BK
15	11.3.2.(b)	Jumlah lembaga pembiayaan infrastruktur.	ada			SB
16	11.1.1.(b)	Jumlah kawasan perkotaan metropolitan yang terpenuhi standar pelayanan perkotaan (SPP).	12 kawasan perkotaan metropolit	-	-	BK
17	11.1.1.(c)	Jumlah kota sedang dan kota baru yang terpenuhi SPP.	Paling sedikit 20 kota sedang dan 10 kota baru (skala nasional)	-	-	BK
18	11.3.1.(a)	Jumlah kota sedang di luar Jawa yang diarahkan sebagai pengendali (buffer) arus urbanisasi dan sebagai pusat pertumbuhan utama.	Minimal 20 kota sedang (skala nasional)	-	-	BK
19	11.3.1.(b)	Jumlah Metropolitan baru di luar Jawa sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN).	5 metropolitan (skala nasional)	-	-	BK
20	11.3.2.(b)	Jumlah lembaga pembiayaan infrastruktur.	ada	0	0	na

Sumber: Hasil Analisis, 2023

Tabel 5.9 diatas terlihat bahwa ada dua Indikator TPB Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Nagan Raya yang sudah dilaksanakan tapi belum mencapai target yaitu nomor indikator 6.3.1.(b) dan nomor indikator 11.3.2(b). Masih adanya Gap antara target dan realisasi yang besar, maka untuk mencapai target dibutuhkan upaya-upaya tambahan tidak cukup dengan usaha biasa (*Business as Usual*).

5.1.5. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia memiliki tugas pokok dalam menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hasil analisis capaian TPB pada Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia menunjukkan dari total 0 indikator TPB yang relevan dan menjadi kewenangan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Terkait pelaksanaan dalam upaya pencapaiannya, diketahui sebanyak 0 (00%) indikator sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target (SS), 0 (00%) sudah dilaksanakan tetapi belum mencapai target (SB), 0 (00%) indikator tidak ada data dan belum dilaksanakan (na) dan 0 (00%) indikator TPB bukan kewenangan Kabupaten Nagan Raya (BK).

5.1.6. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil memiliki tugas pokok dalam menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang Kependudukan dan Catatan Sipil. Hasil analisis capaian TPB pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil menunjukkan dari total 5 indikator TPB yang relevan dan menjadi kewenangan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Terkait pelaksanaan dalam upaya pencapaiannya, diketahui sebanyak 3 (60,00%) indikator sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target (SS), 0 (00,00%) sudah dilaksanakan tetapi belum mencapai target (SB), 2 (40,00%) indikator tidak ada data (na) dan belum dilaksanakan dan 0 (00,00%) indikator TPB bukan kewenangan Kabupaten Nagan Raya (BK).

Tabel 5.10. Capaian Indikator TPB pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

Kategori Capaian	Jumlah	Persen
Indikator TPB yang sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target (SS);	3	60.00%
Indikator TPB yang sudah dilaksanakan tetapi belum mencapai target (SB);	0	00.00%
Indikator TPB yang tidak ada data atau belum terlaksana (NA); dan	2	40.00%
Indikator TPB yang bukan kewenangan (BK).	0	00.00%
Jumlah	5	100%

Sumber: Hasil Analisis, 2023

Berdasarkan **Tabel 5.10** hasil analisis data status pencapaian TPB/SDGs di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil menunjukkan hasil yang cukup baik, Dimana sudah tercapainya 3 (60,00%) indikator yang sudah dilaksanakan dan sudah tercapainya target. Masih adanya status na. yaitu 2 (40,00%) ialah dimana manajemen pengelolaan data pelaksanaan TPB, khususnya di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil tidak terkelola dengan baik. Sedangkan kategori sudah dilaksanakan tapi belum tercapai target tidak ada atau 0 indikator (0,00%).

Persentase tingkat capaian per kriteria lebih rinci seperti terlihat pada **Gambar 5.5**.



Gambar 5.5. Persentase Capaian Indikator TPB pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Nagan Raya
(Sumber: Hasil Analisis, 2023)

Adapun capaian indikator TPB pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Nagan Raya secara lebih lengkap dan rinci dapat dilihat pada **Tabel 5.11** dibawah ini.

Tabel 5.11. Rekap Capaian Indikator TPB pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

No.	No. Indikator	Indikator TPB	Target Perpes 59/2017	Target Daerah 2022	Realisasi 2022	Kategori Capaian
1	1.4.1.(j)	Persentase penduduk umur 0-17 tahun dengan kepemilikan akta kelahiran.	Meningkat menjadi 77,4%	80,65	87.655	SS
2	16.9.1*	Proporsi anak umur di bawah 5 tahun yang kelahirannya dicatat oleh lembaga pencatatan sipil, menurut umur.	Meningkat	-	-	na
3	16.9.1.(a)	Persentase kepemilikan akta lahir untuk penduduk 40% berpendapatan bawah.	Meningkat menjadi 77,4%	-	-	na
4	16.9.1.(b)	Persentase anak yang memiliki akta kelahiran.	Meningkat menjadi 85%	95,2	95,2	SS
5	17.19.2.(b)	Tersedianya data registrasi terkait kelahiran dan kematian (Vital Statistics Register)	Ada	Ada	ada	SS

Sumber: Hasil Analisis, 2023

Tabel 5.11. diatas terlihat bahwa tidak ada Indikator TPB Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Nagan Raya yang sudah dilaksanakan tapi belum mencapai target. Namun masih adanya status na (tidak ada data) sebanyak 2 (40,00%) indikator. Hal ini menunjukkan manajemen pengelolaan data pelaksanaan TPB, khususnya di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil tidak terkelola dengan baik.

5.1.7. Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Badan Penanggulangan Bencana Daerah memiliki tugas pokok dalam menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang Penanggulangan Bencana. Hasil analisis capaian TPB pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah menunjukkan dari total 11 indikator TPB yang relevan dan menjadi kewenangan Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Terkait pelaksanaan dalam upaya pencapaiannya, diketahui sebanyak 1 (9,09%) indikator sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target (SS), 1 (9,09%) sudah dilaksanakan tetapi belum mencapai target (SB), 8 (72,73%) indikator tidak ada data (na) dan belum dilaksanakan dan 1 (9,09%) indikator TPB bukan kewenangan Kabupaten Nagan Raya (BK). Lebih rinci seperti pada **Tabel 5.12.**

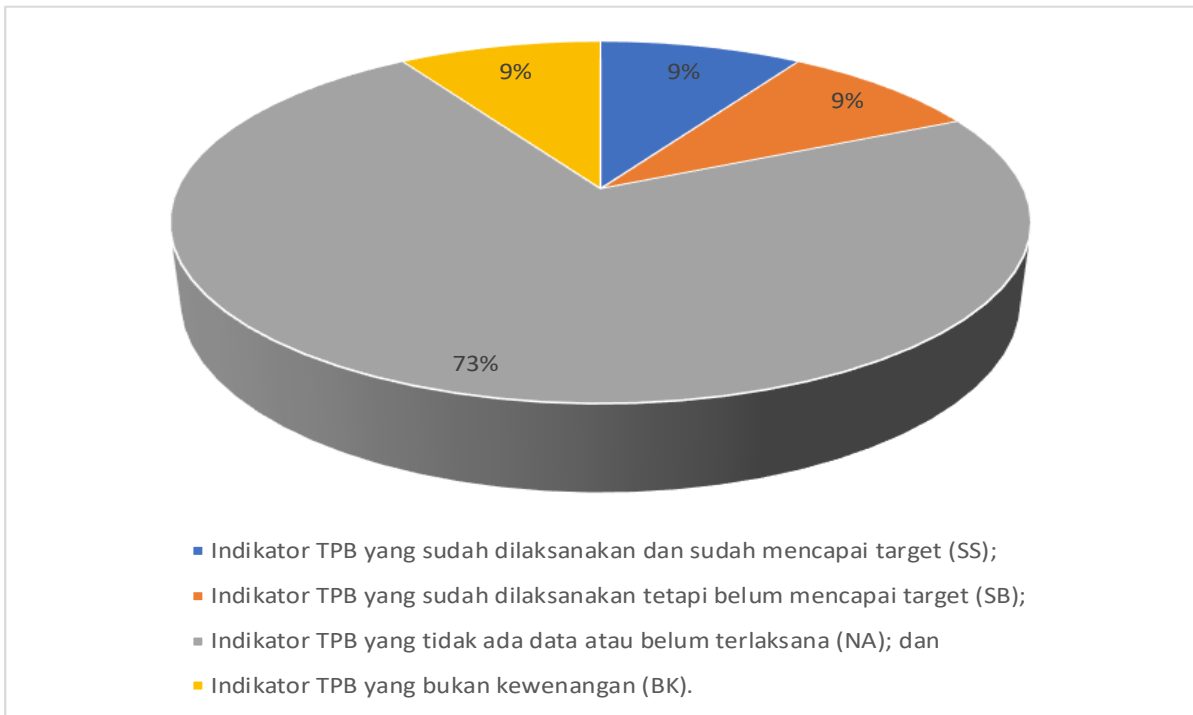


Tabel 5.12. Capaian Indikator TPB pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Kategori Capaian	Jumlah	Persen
Indikator TPB yang sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target (SS);	1	9.09%
Indikator TPB yang sudah dilaksanakan tetapi belum mencapai target (SB);	1	9.09%
Indikator TPB yang tidak ada data atau belum terlaksana (NA); dan	8	72.73%
Indikator TPB yang bukan kewenangan (BK).	1	9.09%
Jumlah	11	100%

Sumber: Hasil Analisis, 2023

Berdasarkan **Tabel 5.12** hasil analisis data status pencapaian TPB/SDGs di Badan Penanggulangan Bencana Daerah menunjukkan hasil yang kurang baik, Dimana masih tingginya persentase 8 (72,73%) indikator tidak ada data (na) dan belum dilaksanakan. Masih tingginya status na. ialah dimana manajemen pengelolaan data pelaksanaan TPB, khususnya di Badan Penanggulangan Bencana Daerah tidak terkelola dengan baik. Kemudian kategori sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target (SS) yaitu 9,09% (1 indikator TPB) dari keseluruhan indikator yang menjadi kewenangan Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Sedangkan kategori capaian sudah dilaksanakan tapi belum tercapai ada 1 indikator (9,09%) dan 1 indikator (9,09%) bukan kewenangan Kabupaten Nagan Raya. Persentasi tingkat capaian per kriteria lebih rinci seperti terlihat pada **Gambar 5.6**.



Gambar 5.6. Persentase Capaian Indikator TPB pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Nagan Raya

(Sumber: Hasil Analisis, 2023)

Adapun capaian indikator TPB pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Nagan Raya secara lebih lengkap dan rinci dapat dilihat pada **Tabel 5.13** dibawah ini.



PEMERINTAH KABUPATEN NAGAN RAYA
KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS (KLHS)
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD)

Tabel 5.13. Rekap Capaian Indikator TPB pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Nagan Raya.

No.	No. Indikator	Indikator TPB	Target Perpes 59/2017	Target Daerah 2022	Realisasi 2022	Kategori Capaian
1	1.5.1*	Jumlah korban meninggal, hilang, dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.	menurun	-	-	na
2	1.5.1.(a)	Jumlah lokasi penguatan pengurangan risiko bencana daerah.	Meningkat	-	-	na
3	1.5.1.(e)	Indeks risiko bencana pada pusat-pusat pertumbuhan yang berisiko tinggi.	Menurun menjadi 118,6	-	-	na
4	11.5.2.(a)	Jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana.	menurun	-	-	na
5	1.5.3*	Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat nasional dan daerah.	ada	-	-	na
6	11.5.1.(a)	Indeks risiko bencana indonesia (IRBI)	menurun 30%	200,08	200,08	SB
7	11.5.1.(b)	Jumlah kota tangguh bencana yang terbentuk	Meningkat	-	-	na
8	11.5.1.(c)	Jumlah sistem peringatan dini cuaca iklim dan kebencanaan	ada	ada	ada	SS
9	11.5.2.(a)	Jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana.	menurun	-	-	na
10	11.b.2*	Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat nasional.	ada	-	-	BK
11	13.1.2*	Jumlah korban meninggal hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.	menurun	-	-	na

Sumber: Hasil Analisis, 2023

Tabel 5.13. diatas terlihat bahwa ada satu Indikator TPB Badan Penanggulangan Bencana Daerah Nagan Raya yang sudah dilaksanakan tapi belum mencapai target yaitu nomor indikator 11.5.1. (a). Indikator ini memiliki status bencana tinggi. Masih adanya Gap antara target dan realisasi yang besar, maka untuk mencapai target dibutuhkan upaya-upaya tambahan dan tidak cukup dengan usaha biasa (*Business as Usual*).

5.1.8. Dinas Kelautan, Perikanan dan Pangan

Dinas Kelautan, Perikanan dan Pangan mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan bidang kelautan, perikanan dan pangan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah. Hasil analisis capaian TPB pada Dinas Kelautan, Perikanan dan Pangan menunjukkan dari total 5 indikator TPB yang relevan dan menjadi kewenangan Dinas Kelautan, Perikanan dan Pangan tersebut. Terkait pelaksanaan dalam upaya pencapaiannya, diketahui bahwa indikator sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target (SS) masih 0,00%, demikian juga indikator sudah dilaksanakan tetapi belum



mencapai target (SB) terlihat juga 0,00%. Selain itu, indikator yang tidak ada data (na) atau belum dilaksanakan mencapai 5 indikator (100%). Tidak ada indikator TPB yang bukan kewenangan Kabupaten Nagan Raya (BK), yaitu 0,00%. Lebih rinci disajikan pada **Tabel 5.14**.

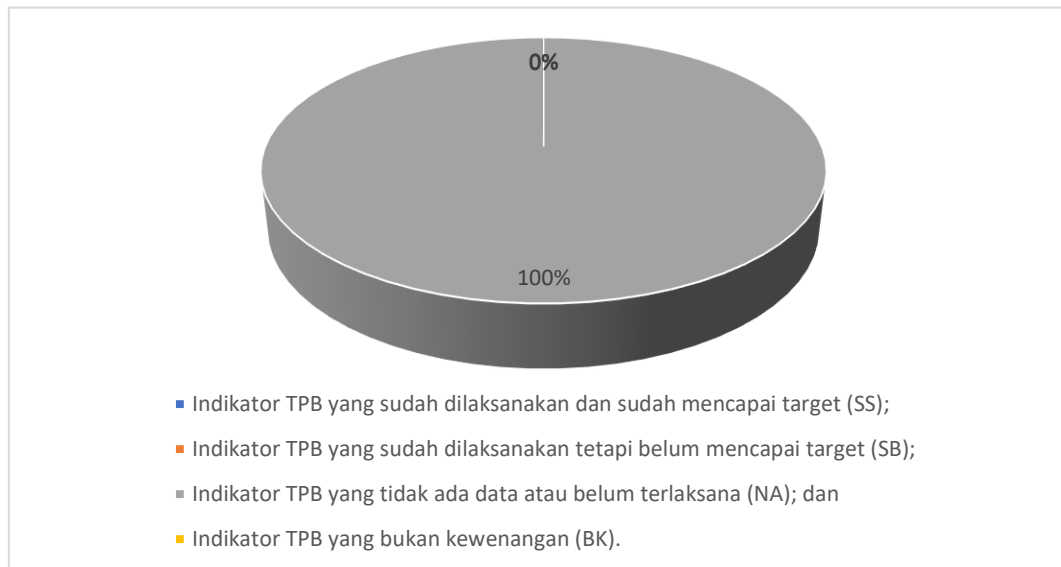
Tabel 5.14. Capaian Indikator TPB pada Dinas Kelautan, Perikanan dan Pangan

Kategori Capaian	Jumlah	Persen
Indikator TPB yang sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target (SS);	0	0.00%
Indikator TPB yang sudah dilaksanakan tetapi belum mencapai target (SB);	0	0.00%
Indikator TPB yang tidak ada data atau belum terlaksana (NA); dan	5	100.00%
Indikator TPB yang bukan kewenangan (BK).	0	0.00%
Jumlah	5	100%

Sumber: Hasil Analisis, 2023

Berdasarkan **Tabel 5.14** hasil analisis data status pencapaian TPB/SDGs di Dinas Kelautan, Perikanan dan Pangan menunjukkan hasil 0,00% baik SS, SB, bahkan masih terdapat status na (tidak ada data) pada 5 indikator artinya 100,00% indikator tersebut belum terlaksana. Hasil ini menunjukkan bahwa manajemen pengelolaan data pelaksanaan TPB, di Dinas Kelautan, Perikanan dan Pangan tidak terkelola dengan baik. Sedangkan kategori sudah dilaksanakan tapi belum tercapai target tidak ada atau 0 indikator (0,00%).

Persentasi tingkat capaian per kriteria lebih rinci seperti terlihat pada **Gambar 5.7**.



Gambar 5.7. Persentase Capaian Indikator TPB pada Dinas Kelautan, Perikanan dan Pangan Kabupaten Nagan Raya
 (Sumber: Hasil Analisis, 2023)

Adapun capaian indikator TPB pada Dinas Kelautan, Perikanan dan Pangan Kabupaten Nagan Raya secara lebih lengkap dan rinci dapat dilihat pada **Tabel 5.15** dibawah ini.

Tabel 5.15. Rekap Capaian Indikator TPB pada Dinas Kelautan, Perikanan dan Pangan

No.	No. Indikator	Indikator TPB	Target Perpes 59/2017	Target Daerah 2022	Realisasi 2022	Kategori Capaian
1		Produksi perikanan (ton produksi persentase terhadap target produksi Aceh)	Persen			na
2		Produksi perikanan Ikan	Ton	4.233,15		na
3		Perikanan tangkap	Ton	3.340,13		na
4		Perikanan budidaya	Ton	893,02		na
5		Cakupan bina kelompok nelayan	Persen	100		na

Sumber: Hasil Analisis, 2023

Tabel 5.15 di atas terlihat bahwa tidak ada Indikator TPB Dinas Kelautan, Perikanan dan Pangan Nagan Raya yang mencapai target, dikarenakan data tidak tersedia atau berstatus na (tidak ada data) realisasi. Hal ini menunjukkan manajemen pengelolaan data pelaksanaan TPB, khususnya di Dinas Kelautan, Perikanan dan Pangan tidak terkelola dengan baik.

5.1.9. Dinas Pertanian dan Peternakan

Dinas Pertanian dan Peternakan mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan bidang Pertanian dan peternakan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah. Hasil analisis capaian TPB pada Dinas ini menunjukkan bahwa terdapat 5 indikator TPB yang relevan dan menjadi kewenangan Dinas Pertanian dan Peternakan tersebut. Terkait pelaksanaan dalam upaya pencapaiannya, diketahui sebanyak 0 (00,00%) indikator sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target (SS), 1 (20,00%) sudah dilaksanakan tetapi belum mencapai target (SB), 4 (80,00%) indikator tidak ada data (na) dan belum dilaksanakan dan 0 (00,00%) indikator TPB bukan kewenangan Kabupaten Nagan Raya (BK). Lebih rinci disajikan pada **Tabel 5.16**.

Tabel 5.16.Capaian Indikator TPB pada Dinas Pertanian dan Peternakan

Kategori Capaian	Jumlah	Persen
Indikator TPB yang sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target (SS);	0	0.00%
Indikator TPB yang sudah dilaksanakan tetapi belum mencapai target (SB);	1	20.00%
Indikator TPB yang tidak ada data atau belum terlaksana (NA); dan	4	80.00%
Indikator TPB yang bukan kewenangan (BK).	0	0.00%
Jumlah	5	100%

Sumber: Hasil Analisis, 2023

Berdasarkan **Tabel 5.16** hasil analisis data status pencapaian TPB/SDGs di Dinas Pertanian dan Peternakan menunjukan hasil indikator yang sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target masih 0,00%, indikator yang sudah dilaksanakan dan belum tercapainya target 20,00%. Sebanyak 4 indikator tidak ada data (na) yaitu sebesar 80,00%, hal ini menunjukkan bahwa manajemen pengelolaan data pelaksanaan TPB, di Dinas Pertanian dan Peternakan tidak terkelola dengan baik.

Persentasi tingkat capaian per kriteria lebih rinci seperti terlihat pada **Gambar 5.8**.



Gambar 5.8. Persentase Capaian Indikator TPB pada Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Nagan Raya
(Sumber: Hasil Analisis, 2023)

Adapun capaian indikator TPB pada Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Nagan Raya secara lebih lengkap dan rinci dapat dilihat pada **Tabel 5.17** dibawah ini.

Tabel 5.17.Rekap Capaian Indikator TPB pada Dinas Pertanian dan Peternakan

No	No. Indikator	Indikator TPB	Target Perpes 59/2017	Target Daerah 2022	Realisasi 2022	Kategori Capaian
1	2.1.1*	Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment).	Menurun			na
2	2.1.2*	Prevalensi penduduk dengan kerawanan pangan sedang atau berat, berdasarkan pada Skala Pengalaman Kerawanan Pangan.	Menurun	Menurun	84	SB
3	2.1.2.(a)	Proporsi penduduk dengan asupan kalori minimum di bawah 1400 kkal/kapita/hari.	Menurun menjadi 8,50%			na
4	2.2.2.(c)	Kualitas konsumsi pangan yang diindikasikan oleh skor Pola Pangan Harapan (PPH) mencapai; dan tingkat konsumsi ikan.	Meningkat menjadi: skor PPH 92,5; tingkat konsumsi ikan 54,5 kg/kapita/tahun	71.8		na
5	2.3.1*	Nilai Tambah Pertanian dibagi jumlah tenaga kerja di sektor pertanian (rupiah per tenaga kerja).	Meningkat	Belum pernah melaksan akan	Belum pernah melaksan akan	na

Sumber: Hasil Analisis, 2023



Tabel 5.17 di atas memperlihatkan bahwa Indikator TPB Dinas Pertanian dan Peternakan Nagan Raya tentang Prevalensi penduduk dengan kerawanan pangan sedang atau berat, berdasarkan pada Skala Pengalaman Kerawanan Pangan terjadi penurunan namun realisasi tahun 2022 hanya mencapai pada point 84, artinya sudah dilaksanakan namun belum mencapai target. Selain itu masih adanya status na (tidak ada data). Indikator, bahkan Nilai tambah pertanian dibagi jumlah tenaga kerja di sektor pertanian (rupiah per tenaga kerja) belum pernah dilaksanakan. Hal ini menunjukkan manajemen pengelolaan data pelaksanaan TPB, di Dinas Pertanian dan Peternakan tidak terkelola dengan baik.

5.1.10. Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Gampong, Pengendalian Penduduk dan Pemberdayaan Perempuan

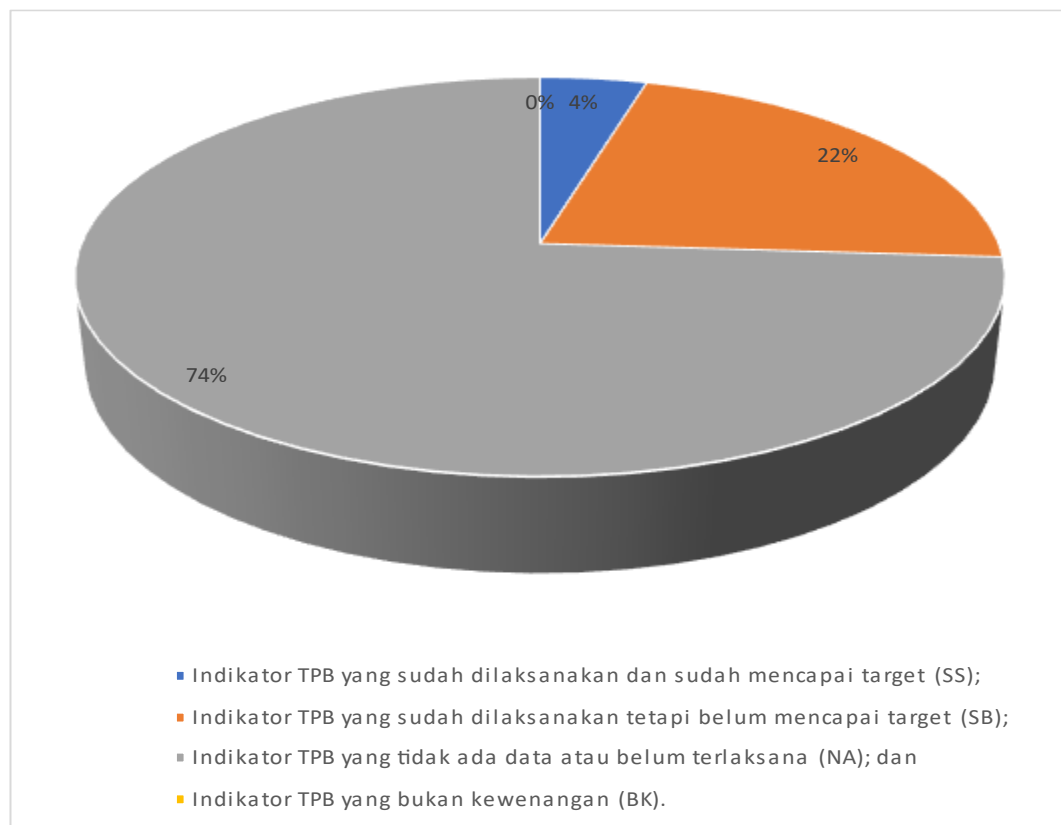
Lembaga pemerintahan ini mempunyai tugas pokok melaksanakan Urusan Pemerintah bidang Pemberdayaan gampong, Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah. Hasil analisis capaian TPB pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana menunjukkan bahwa terdapat 23 indikator TPB yang relevan dan menjadi kewenangan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana tersebut. Terkait pelaksanaan dalam upaya pencapaiannya, diketahui sebanyak 1 (4,35%) indikator sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target (SS), 5 (21,74%) sudah dilaksanakan tetapi belum mencapai target (SB), 17 (73,91%) indikator tidak ada data (na) dan belum dilaksanakan dan 0 (00,00%) indikator TPB bukan kewenangan Kabupaten Nagan Raya (BK). Lebih rinci disajikan pada **Tabel 5.18**.

Tabel 5.18. Capaian Indikator TPB pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Kategori Capaian	Jumlah	Persen
Indikator TPB yang sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target (SS);	1	4.35%
Indikator TPB yang sudah dilaksanakan tetapi belum mencapai target (SB);	5	21.74%
Indikator TPB yang tidak ada data atau belum terlaksana (NA); dan	17	73.91%
Indikator TPB yang bukan kewenangan (BK).	0	0.00%
Jumlah	23	100%

Sumber: Hasil Analisis, 2023

Berdasarkan **Tabel 5.18** hasil analisis data status pencapaian TPB/SDGs di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana menunjukkan hasil bahwa indikator yang sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target 4,35%, indikator yang sudah dilaksanakan dan belum tercapainya target 21,00%. Masih adanya status na. yaitu 17 (73,91%), hal ini menunjukkan bahwa manajemen pengelolaan data pelaksanaan TPB, di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana tidak terkelola dengan baik. Persentasi tingkat capaian per kriteria lebih rinci seperti terlihat pada **Gambar 5.9**.



Gambar 5.9. Persentase Capaian Indikator TPB pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Nagan Raya
(Sumber: Hasil Analisis, 2023)

Adapun capaian indikator TPB pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Nagan Raya secara lebih lengkap dan rinci dapat dilihat pada **Tabel 5.19** dibawah ini.



PEMERINTAH KABUPATEN NAGAN RAYA
KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS (KLHS)
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD)

Tabel 5.19. Rekap Capaian Indikator TPB pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

No.	No. Indikator	Indikator TPB	Target Perpes 59/2017	Target Daerah 2022	Realisasi 2022	Kategori Capaian
1	1.4.1.(c)	Prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada Pasangan Usia Subur (PUS) usia 15-49 tahun yang berstatus kawin.	Meningkat menjadi 65%			na
2	3.7.1*	Proporsi perempuan usia reproduksi (15-49 tahun) atau pasangannya yang memiliki kebutuhan keluarga berencana dan menggunakan alat kontrasepsi metode modern.	Meningkat menjadi 66%			na
3	3.7.1.(a)	Angka prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada Pasangan Usia Subur (PUS) usia 15-49 tahun yang berstatus kawin.	Meningkat menjadi 65%			na
4	3.7.1.(b)	Angka penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP) cara modern.	Meningkat menjadi 23,50%			na
5	5.1.1*	Jumlah kebijakan yang responsif gender mendukung pemberdayaan perempuan.	bertambah sebanyak 16		2	SB
6	5.2.1*	Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan (fisik, seksual, atau emosional) oleh pasangan atau mantan pasangan dalam 12 bulan terakhir.	Menurun		2/58301100-0.003 4	SB
7	5.2.1.(a)	Prevalensi kekerasan terhadap anak perempuan.	Menurun menjadi kurang dari 20,48%		226»100=0,037	SB
8	5.2.2*	Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan seksual oleh orang lain selain pasangan dalam 12 bulan terakhir.	Menurun		6/58.301x100=0,010	SB
9	5.2.2.(a)	Persentase korban kekerasan terhadap perempuan yang mendapat layanan komprehensif.	Meningkat menjadi 70%		100%	SS
10	5.3.1*	Proporsi perempuan umur 20-24 tahun yang berstatus kawin atau berstatus hidup bersama sebelum umur 15 tahun dan sebelum umur 18 tahun	Menurun			na
11	5.3.1.(a)	Median usia kawin pertama perempuan pernah kawin umur 25-49 tahun.	Meningkat menjadi 21 tahun		16%	SB
12	5.3.1.(b)	Angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR).	Menurun	0,8		na
13	5.5.1*	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di parlemen tingkat pusat, parlemen daerah dan pemerintah daerah.	Meningkat			na



PEMERINTAH KABUPATEN NAGAN RAYA
KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS (KLHS)
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD)

14	5.6.1*	Proporsi perempuan umur 15-49 tahun yang membuat keputusan sendiri terkait hubungan seksual, penggunaan kontrasepsi, dan layanan kesehatan reproduksi.	Meningkat			na
15	5.6.1.(a)	Unmet need KB (Kebutuhan Keluarga Berencana/KB yang tidak terpenuhi).	Menurun menjadi 9,90%			na
16	5.6.1.(b)	Pengetahuan dan pemahaman Pasangan Usia Subur (PUS) tentang metode kontrasepsi modern.	Meningkat menjadi 85%			na
17	16.2.1.(a)	Proporsi rumah tangga yang memiliki anak umur 1-17 tahun yang mengalami hukuman fisik dan/atau agresi psikologis dari pengasuh dalam setahun terakhir.	Menurun			na
18	16.2.1.(b)	Prevalensi kekerasan terhadap anak laki-laki dan anak perempuan.	Menurun			na
19	16.2.3.(a)	Proporsi perempuan dan laki-laki muda umur 18-24 tahun yang mengalami kekerasan seksual sebelum umur 18 tahun.	Menurun			na
20	16.7.1.(a)	Persentase keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).	Meningkat			na
21		Parsipasi perempuan di Lembaga Pemerintah	Persen	52,36		na
22		Proporsi kursi yang diduduki di DPR	Persen	16,00		na
23		Rasio KDRT	Persen	0,36		na

Sumber: Hasil Analisis, 2023

Tabel 5.19 di atas terlihat bahwa Indikator TPB Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Nagan Raya yang sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target hanya pada satu indikator yaitu Persentase korban kekerasan terhadap perempuan yang mendapat layanan komprehensif. memperlihatkan peningkatan dari target tahun 2022 70% menjadi 100%. Namun untuk indikator lain sebagian sudah dilaksanakan namun belum mencapai target dan masih banyak indikator yang belum ada data. Hal ini menunjukkan bahwa manajemen pengelolaan data pelaksanaan TPB di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana belum terkelola dengan baik.

5.1.11. Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik

Lembaga pemerintahan ini mempunyai tugas pokok melaksanakan Urusan Pemerintah Bidang Komunikasi, Informatika, dan Sosial yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah. Hasil analisis capaian TPB pada Dinas



PEMERINTAH KABUPATEN NAGAN RAYA
KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS (KLHS)
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD)

Komunikasi, Informatika, dan Statistik menunjukkan ada 9 indikator TPB yang relevan dan menjadi kewenangan Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik tersebut. Terkait pelaksanaan dalam upaya pencapaiannya, bahwa belum ada capaian yang sesuai target, bahkan 9 indikator tidak ada data (na) (100,00%). Lebih rinci disajikan pada **Tabel 5.20**.

Tabel 5.20. Capaian Indikator TPB pada Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik

Kategori Capaian	Jumlah	Persen
Indikator TPB yang sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target (SS);	0	0.00%
Indikator TPB yang sudah dilaksanakan tetapi belum mencapai target (SB);	0	0.00%
Indikator TPB yang tidak ada data atau belum terlaksana (NA); dan	9	100.00%
Indikator TPB yang bukan kewenangan (BK).	0	0.00%
Jumlah	9	100%

Sumber: Hasil Analisis, 2023

Berdasarkan **Tabel 5.20** hasil analisis data status pencapaian TPB/SDGs di Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik menunjukan secara umum tidak ada data (na), hal ini menunjukkan bahwa manajemen pengelolaan data pelaksanaan TPB, khususnya di Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik tidak terkelola dengan baik.

Persentasi tingkat capaian per kriteria lebih rinci seperti terlihat pada **Gambar 5.10**.



Gambar 5.10. Persentase Capaian Indikator TPB pada Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Kabupaten Nagan Raya

(Sumber: Hasil Analisis, 2023)

Adapun capaian indikator TPB pada Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Kabupaten Nagan Raya secara lebih lengkap dan rinci dapat dilihat pada **Tabel 5.21** dibawah ini.



PEMERINTAH KABUPATEN NAGAN RAYA
KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS (KLHS)
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD)

Tabel 5.21. Rekap Capaian Indikator TPB pada Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik

No.	No. Indikator	Indikator TPB	Target Perpes 59/2017	Target Daerah 2022	Realisasi 2022	Kategori Capaian
1	4.4.1*	Proporsi remaja dan dewasa dengan keterampilan teknologi informasi dan komunikasi (TIK).	Meningkat			na
2	5.b.1*	Proporsi individu yang menguasai/memiliki telepon genggam.	Meningkat			na
3	9.c.1*	Proporsi penduduk yang terlayani mobile broadband.	Meningkat			na
4	9.c.1.(a)	Proporsi individu yang menguasai/memiliki telepon genggam	Meningkat			na
5	9.c.1.(b)	Proporsi individu yang menggunakan internet	Meningkat			na
6	16.10.2.(c)	Jumlah kepemilikan sertifikat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) untuk mengukur kualitas PPID dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.	Meningkat			na
7	17.6.2.(b)	Tingkat penetrasi akses tetap pitalebar (fixed broadband) di Perkotaan dan di Perdesaan.	Meningkat			na
8	17.6.2.(c)	Proporsi penduduk terlayani mobile broadband	Meningkat			na
9	17.8.1*	Proporsi individu yang menggunakan internet.	Meningkat			na
10		Cakupan pengembangan dan pemberdayaan kelompok informasi masyarakat di Tingkat Kecamatan	Persen	0,51		na
11		Cakupan layanan telekomunikasi	Persen	95		na
12		Persentase penduduk yang menggunakan HP/Telepon	Persen	85		na

Sumber: Hasil Analisis, 2023

Tabel 5.21. di atas terlihat bahwa Indikator TPB Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Nagan Raya umumnya tidak ada data (na). Hal ini menunjukkan manajemen pengelolaan data pelaksanaan TPB, khususnya di Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik tidak terkelola dengan baik.

5.1.12. Dinas Sosial

Dinas Sosial memiliki tugas pokok dalam menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang sosial. Hasil analisis capaian TPB pada Dinas Sosial menunjukkan dari total 11 indikator TPB yang relevan dan menjadi kewenangan Dinas Sosial. Terkait pelaksanaan dalam upaya pencapaiannya, diketahui sebanyak 4 (44,00%) indikator sudah dilaksanakan dan sudah



PEMERINTAH KABUPATEN NAGAN RAYA
KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS (KLHS)
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD)

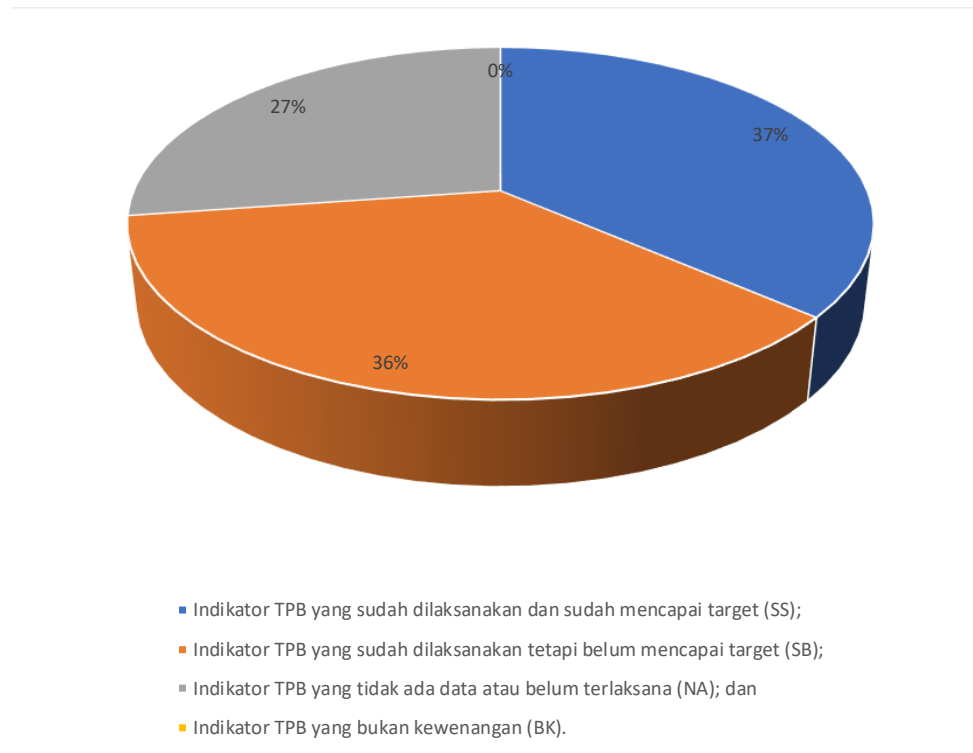
mencapai target (SS), 2 (22,00%) sudah dilaksanakan tetapi belum mencapai target (SB), 3 (33,33%) indikator tidak ada data dan belum dilaksanakan (na) dan 95 (50,00%) indikator TPB bukan kewenangan Kabupaten Nagan Raya (BK). Lebih rinci seperti disajikan pada **Tabel 5.22**.

Tabel 5.22. Capaian Indikator TPB pada Dinas Sosial

Kategori Capaian	Jumlah	Persen
Indikator TPB yang sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target (SS);	4	36.36%
Indikator TPB yang sudah dilaksanakan tetapi belum mencapai target (SB);	4	36.36%
Indikator TPB yang tidak ada data atau belum terlaksana (NA); dan	3	27.27%
Indikator TPB yang bukan kewenangan (BK).	0	0.00%
Jumlah	11	100%

Sumber: Hasil Analisis, 2023

Berdasarkan **Tabel 5.22** hasil analisis data status pencapaian TPB/SDGs di Dinas Sosial menunjukkan capaian yang cukup baik, dimana cukup tingginya indikator yang sudah dilaksanakan dan sudah tercapai target (SS) sebesar 36,36% (4 indikator). dari keseluruhan indikator yang menjadi kewenangan Dinas Sosial. Kemudian masih tingginya status yang sudah dilaksanakan tapi belum tercapai (SB) sebesar 36,36% (4 indikator). Sedangkan indikator yang tidak ada data atau belum dilaksanakan (na) adalah 3 indikator (27,27%) dan indikator TPB yang bukan kewenangan kabupaten Nagan Raya tidak ada (0%). Persentasi tingkat capaian per kriteria seperti terlihat pada **Gambar 5.11**.



Gambar 5.11. Persentase Capaian Indikator TPB pada Dinas Sosial Kabupaten Nagan Raya
(Sumber: Hasil Analisis, 2023)

Adapun capaian indikator TPB pada Dinas Sosial Kabupaten Nagan Raya secara lebih lengkap dan rinci dapat dilihat pada **Tabel 5.23** dibawah ini.



PEMERINTAH KABUPATEN NAGAN RAYA
KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS (KLHS)
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD)

Tabel 5.23. Rekap Capaian Indikator TPB pada Dinas Sosial Kabupaten Nagan Raya.

No.	No. Indikator	Indikator TPB	Target Perpes 59/2017	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Kategori Capaian
1	1.a.1*	Proporsi sumber daya yang dialokasikan oleh pemerintah secara langsung untuk program pemberantasan kemiskinan.	Meningkat	0	0	na
2	1.a.2*	Pengeluaran untuk layanan pokok (pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial) sebagai persentase dari total belanja pemerintah.	Meningkat	0	0	na
3	1.2.1*	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur.	Menurun menjadi 7-8%.	18,21	17,38	SB
4	1.3.1	Proporsi penduduk yang menerima program perlindungan sosial				SB
5	1.3.1.(c)	Persentase penyandang disabilitas yang miskin dan rentan yang terpenuhi hak dasarnya dan inklusivitas.	Meningkat menjadi 17,12%	66,77	67,63	SS
6	1.3.1.(d)	Jumlah rumah tangga yang mendapatkan bantuan tunai bersyarat/Program Keluarga Harapan.	Menurun menjadi 2,8 juta	5.202	5.202	SB
7	1.4.1.(k)	Persentase rumah tangga miskin dan rentan yang sumber penerangan utamanya listrik baik dari PLN dan bukan PLN.	Meningkat menjadi 100%	0	0	na
8	1.5.1.(b)	Pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana sosial.	Meningkat menjadi Rp 151 ribu	2.112.000	2.012.000	SS
9	1.5.1.(c)	Pendampingan psikososial korban bencana sosial.	Meningkat menjadi Rp 81,5 ribu	4.170.000	4.170.000	SS
10	3.8.2(a)	Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)	100%	35	40	SB
11	10.2.1*	Proporsi penduduk yang hidup di bawah 50 persen dari median pendapatan, menurut jenis kelamin dan penyandang difabilitas.	Menurun	18,37	17,62	SS

Sumber: Hasil Analisis, 2023

Tabel 5.23. diatas terlihat bahwa ada empat Indikator TPB Dinas Sosial Nagan Raya yang sudah dilaksanakan tapi belum mencapai target yaitu nomor indikator 1.2.1*, 1.3.1, 1.3.1(d) dan nomor indikator 3.8.2(a). Masih adanya Gap antara target dan realisasi yang besar, maka untuk mencapai target dibutuhkan upaya-upaya tambahan tidak cukup dengan usaha biasa (*Business as Usual*).

5.1.13. Badan Pusat Statistik (BPS)

Badan Pusat Statistik (BPS) memiliki tugas pokok dalam menyelenggarakan urusan pemerintah dalam hal mengumpulkan, mengolah, dan menyajikan data statistik di berbagai bidang, termasuk ekonomi, sosial, pertanian, industri, perdagangan, transportasi, lingkungan, keuangan, perbankan, dan ketenagakerjaan. Jumlah indikator TPB yang menjadi tanggungjawab pada Badan Pusat Statistik adalah 5 indikator TPB yang relevan dan menjadi

kewenangan dari Badan Pusat Statistik. Terkait pelaksanaan dalam upaya pencapaiannya, diketahui sebanyak 1 (20.00%) indikator sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target (SS); 4 (80.00%) indikator sudah dilaksanakan tetapi belum mencapai target (SB); 0 (0.00%) indikator tidak ada data dan belum dilakukan dan 0 (0.00%) indikator TPB bukan kewenangan Kabupaten Nagan Raya. Lebih rinci seperti disajikan pada **Tabel 5.24**.

Tabel 5.24. Kategori Capaian Indikator TPB Badan Pusat Statistik Nagan Raya, 2022.

No	Kategori Capaian	Jumlah	Persen
1	Indikator TPB yang sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target (SS);	1	20,00%
2	Indikator TPB yang sudah dilaksanakan tetapi belum mencapai target (SB);	4	80,00%
3	Indikator TPB yang tidak ada data atau belum terlaksana (NA); dan	0	0,00%
4	Indikator TPB yang bukan kewenangan (BK).	0	0,00%
	Jumlah	5	100%

Sumber: Hasil Analisis, 2023

Berdasarkan **Tabel 5.24** hasil analisis data status pencapaian TPB/SDGs di Kabupaten Nagan Raya menunjukkan hasil yang cukup menarik, Dimana masih tingginya status dengan kategori tidak ada data (na) yaitu 0% dari keseluruhan indikator yang menjadi kewenangan Badan Pusat Statistik Nagan Raya. Salah satu penyebab cukup tingginya status kategori na. ialah terjadi ketimpangan pelaksanaan TPB di Kabupaten Nagan Raya. Seperti halnya terjadi di beberapa daerah lain di Indonesia, dimana manajemen pengelolaan data pelaksanaan TPB, khususnya di Badan Pusat Statistik Nagan Raya, maupun di tingkat OPD-OPD lain tidak terkelola dengan baik, sehingga berpengaruh terhadap ketersediaan data yang dibutuhkan dalam upaya analisis pelaksanaan TPB/SDGs. Selain itu terdapat gap kesenjangan data antar OPD yang timpang maupun dengan penyedia data dari Badan Pusat Statistik (BPS) sendiri. Berikut persentasi tingkat capaian per kriteria seperti terlihat pada **Gambar 5.12**.



Gambar 5.12. Persentase Capaian Indikator TPB pada BPS Kabupaten Nagan Raya
(Sumber: Hasil Analisis, 2023)

Adapun capaian indikator TPB pada Badan Pusat Statistik Kabupaten Nagan Raya secara lebih lengkap dapat dilihat pada **Tabel 5.25** dibawah ini.

Tabel 5.25. Rekap Capaian Indikator TPB pada Badan Pusat Statistik Kabupaten Nagan Raya.

No.	No. Indikator	Indikator TPB	Target Perpes 59/2017	Target Daerah 2022	Realisasi 2022	Kategori Capaian
1	17.18.1.(a)	Persentase konsumen Badan Pusat Statistik (BPS) yang merasa puas dengan kualitas data V	Meningkat		92.78	SB
2	17.18.1.(b)	Persentase konsumen yang menjadikan data dan informasi statistik BPS sebagai rujukan utama.	Meningkat		100	SB
3	17.18.1.(c)	Jumlah metadata kegiatan statistik dasar, sektoral, dan khusus yang terdapat dalam Sistem Informasi Rujukan Statistik (SIRuSa).	Meningkat		132	SB
4	17.19.2.(c)	Jumlah pengunjung eksternal yang mengakses data dan informasi statistik melalui website.	Meningkat		8.366	SS
5	17.19.2.(d)	Persentase konsumen yang puas terhadap akses data Badan Pusat Statistik (BPS).	Meningkat		8100	SB

Sumber: Hasil Analisis, 2023

Tabel 5.25 diatas terlihat bahwa ada empat indikator TPB pada Badan Pusat Statistik Nagan Raya yang sudah dilaksanakan tapi belum mencapai target yaitu nomor indikator 17.18.1.(a), 17.18.1.(b), 17.18.1.(c) dan nomor indikator 17.19.2.(d). Masih adanya Gap antara target dan realisasi yang besar, maka untuk mencapai target dibutuhkan upaya-upaya tambahan tidak cukup dengan usaha biasa (*Business as Usual*).

5.1.14. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

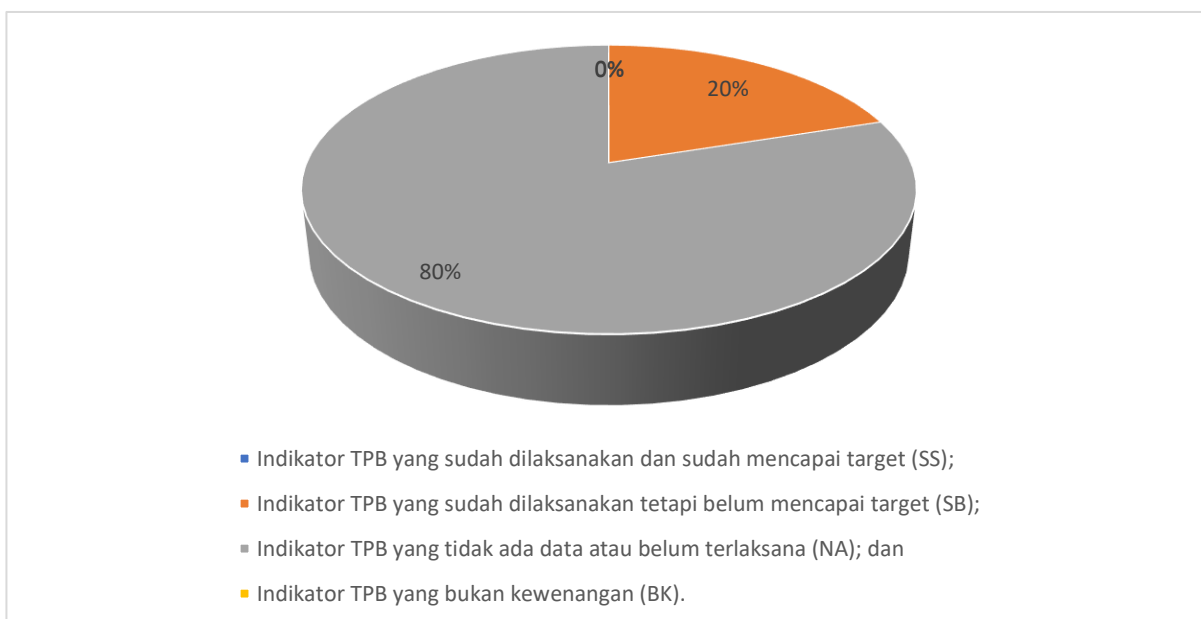
Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah memiliki tugas pokok dalam menyelenggarakan urusan pemerintah dalam bidang perdagangan, industri, investasi, standarisasi produk, pengembangan usaha kecil dan menengah, pengawasan kepatuhan terhadap regulasi, pengembangan ekspor, dan pengembangan pasar. Hasil analisis capaian TPB pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah menunjukkan dari total 5 indikator TPB yang relevan dan menjadi kewenangan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah. Terkait pelaksanaan dalam upaya pencapaiannya, diketahui sebanyak 0 (0,00%) indikator sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target, 1 (20,00%) sudah dilaksanakan tetapi belum mencapai target, 0 (0,00%) indikator tidak ada data dan belum dilaksanakan dan 4 (80,00%) indikator TPB bukan kewenangan Kabupaten Nagan Raya. Lebih rinci seperti pada **Tabel 5.26**.

Tabel 5.26.Capaian Indikator TPB pada Dinas Perdagangan dan Industri Kabupaten Nagan Raya, Tahun 2022.

Kategori Capaian	Jumlah	Persen
Indikator TPB yang sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target (SS);	0	0,00%
Indikator TPB yang sudah dilaksanakan tetapi belum mencapai target (SB);	1	20,00%
Indikator TPB yang tidak ada data atau belum terlaksana (NA); dan	4	80,00%
Indikator TPB yang bukan kewenangan (BK).	0	0,00%
Jumlah	5	100%

Sumber: Hasil Analisis, 2023

Berdasarkan **Tabel 5.26** hasil analisis data status pencapaian TPB/SDGs di Kabupaten Nagan Raya menunjukkan hasil yang cukup menarik, Dimana cukup tingginya kategori dengan tidak ada data (na) yaitu 80% dari keseluruhan indikator yang menjadi kewenangan kabupaten. Salah satu penyebab cukup tingginya status na. ialah dimana manajemen pengelolaan data pelaksanaan TPB, khususnya di Dinas Perdagangan dan Industri tidak terkelola dengan baik. Sedangkan kategori capaian lainnya masing-masing 1 dan 0 indikator atau 20% dan 0.00%. Persentasi tingkat capaian per kriteria seperti terlihat pada **Gambar 5.13**.



Gambar 5.13. Persentase Capaian Indikator TPB pada Dinas Perdagangan dan Industri Kabupaten Nagan Raya
(Sumber: Hasil Analisis, 2023)

Adapun capaian indikator TPB pada Dinas Perdagangan dan Industri Kabupaten Nagan Raya secara lebih lengkap dan rinci dapat dilihat pada **Tabel 5.27** dibawah ini.



PEMERINTAH KABUPATEN NAGAN RAYA
KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS (KLHS)
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD)

Tabel 5.27.Rekap Capaian Indikator TPB pada Dinas Perdagangan dan Industri Kabupaten Nagan Raya

No.	No. Indikator	Indikator TPB	Target Perpes 59/2017	Target Daerah 2022	Realisasi 2022	Kategori Capaian
1	9.2.1*	Proporsi nilai tambah sektor industri manufaktur terhadap PDB dan per kapita.	Meningkat	6,58		na
2	9.2.1.(a)	Laju pertumbuhan PDB industri manufaktur.	Lebih tinggi dari pertumbuhan PDB		4,09	SB
3	9.2.2*	Proporsi tenaga kerja pada sektor industri manufaktur.	Meningkat			na
4	9.3.1*	Proporsi nilai tambah industri kecil terhadap total nilai tambah industri.	Meningkat			na
5	9.3.2*	Proporsi industri kecil dengan pinjaman atau kredit.	Meningkat			na

Sumber: Hasil Analisis, 2023

Tabel 5.27 diatas terlihat bahwa ada dua Indikator TPB Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Nagan Raya yang sudah dilaksanakan tetapi belum tercapai yaitu nomor indikator 9.2.1.(a) Masih adanya Gap antara target dan realisasi yang besar, maka untuk mencapai target dibutuhkan upaya-upaya tambahan tidak cukup dengan usaha biasa (*Business as Usual*).

5.1.15. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) memiliki tugas pokok yang luas dalam menyelenggarakan urusan pemerintah terkait perencanaan dan pembangunan di tingkat daerah. Salah satu fokus utamanya adalah merumuskan kebijakan dan strategi pembangunan daerah, yang mencakup berbagai aspek seperti ekonomi, infrastruktur, lingkungan hidup, pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan masyarakat. Bappeda bertanggung jawab atas penyusunan rencana pembangunan jangka menengah dan jangka panjang, yang menjadi pedoman dalam pelaksanaan program-program pembangunan di daerah. Di samping itu, Bappeda juga terlibat dalam pengembangan sektor ekonomi, pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang berkelanjutan, serta peningkatan infrastruktur dasar seperti jalan, jembatan, dan sarana transportasi. Selain itu, Bappeda turut menyusun program pendidikan dan kesehatan, serta melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap dampak pembangunan terhadap lingkungan dan masyarakat. Dengan demikian, peran Bappeda sangat penting dalam mencapai pembangunan yang berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di tingkat



PEMERINTAH KABUPATEN NAGAN RAYA
KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS (KLHS)
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD)

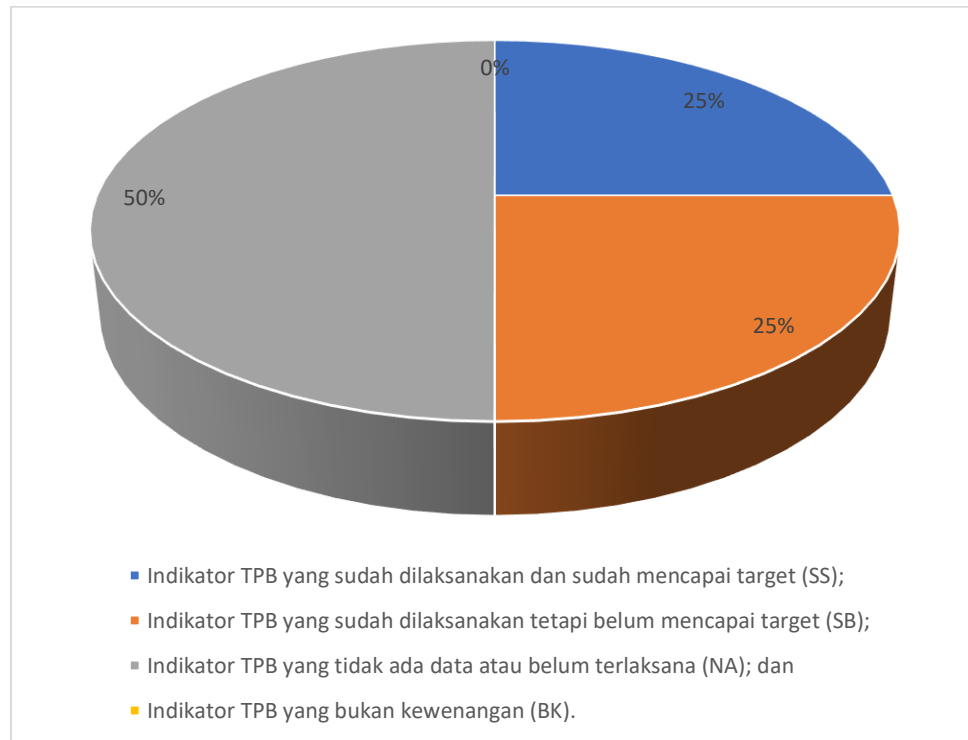
daerah. Hasil analisis capaian TPB pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) menunjukkan dari total 8 indikator TPB yang relevan dan menjadi kewenangan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda). Terkait pelaksanaan dalam upaya pencapaiannya, diketahui sebanyak 2 (25,00%) indikator sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target, 2 (25,00%) sudah dilaksanakan tetapi belum mencapai target, 4 (50,00%) indikator tidak ada data dan belum dilaksanakan dan 0 (0,00%) indikator TPB bukan kewenangan Kabupaten Nagan Raya. Lebih rinci seperti pada **Tabel 5.28**.

Tabel 5.28. Capaian Indikator TPB pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Nagan Raya, Tahun 2022.

Kategori Capaian	Jumlah	Persen
Indikator TPB yang sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target (SS);	2	25,00%
Indikator TPB yang sudah dilaksanakan tetapi belum mencapai target (SB);	2	25,00%
Indikator TPB yang tidak ada data atau belum terlaksana (NA); dan	4	50,00%
Indikator TPB yang bukan kewenangan (BK).	0	0,00%
Jumlah	8	100%

Sumber: Hasil Analisis, 2023

Berdasarkan **Tabel 5.28** hasil analisis data status pencapaian TPB/SDGs di Kabupaten Nagan Raya menunjukan hasil yang cukup menarik, Dimana cukup tingginya kategori dengan tidak ada data (na) yaitu 50% dari keseluruhan indikator yang menjadi kewenangan kabupaten. Salah satu penyebab cukup tingginya status na. ialah dimana manajemen pengelolaan data pelaksanaan TPB, khususnya di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) tidak terkelola dengan baik. Sedangkan kategori capaian lainnya masing-masing 2; 2 dan 0 indikator atau 25% ; 25% dan 0%. Persentasi tingkat capaian per kriteria seperti terlihat pada **Gambar 5.14**.



Gambar 5.14. Persentase Capaian Indikator TPB pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Nagan Raya
 (Sumber: Hasil Analisis, 2023)

Adapun capaian indikator TPB pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Nagan Raya secara lebih lengkap dan rinci dapat dilihat pada **Tabel 5.29** dibawah ini.

Tabel 5.29. Rekap Capaian Indikator TPB Pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Nagan Raya

No.	No. Indikator	Indikator TPB	Target Perpes 59/2017	Target Daerah 2022	Realisasi 2022	Kategori Capaian
1	1.a.1*	Proporsi sumberdaya yang dialokasikan oleh pemerintah secara langsung untuk program pemberantasan kemiskinan	meningkat			na
2	8.1.1*	Laju pertumbuhan PDB per kapita.	Meningkat		29,43	SB
3	8.1.1.(a)	PDB per kapita.	Meningkat menjadi lebih dari Rp 50 juta	47,10	65,30	SS
4	9.5.1*	Proporsi anggaran riset pemerintah terhadap PDB.	Meningkat			na



PEMERINTAH KABUPATEN NAGAN RAYA
KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS (KLHS)
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD)

No.	No. Indikator	Indikator TPB	Target Perpes 59/2017	Target Daerah 2022	Realisasi 2022	Kategori Capaian
5	10.1.1*	Koefisien Gini.	Menurun menjadi 0,36	0,212	0,24	SS
6	10.1.1.(a)	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur.	Menurun menjadi 7-8%		17,38	SB
7	11.3.2.(a)	Rata-rata institusi yang berperan secara aktif dalam Forum Dialog Perencanaan Pembangunan Kota Berkelanjutan.	Meningkat			na
8	17.18.1.(d)	Persentase indikator SDGs terpilah yang relevan dengan target.	Meningkat			na

Sumber: Hasil Analisis, 2023

Tabel 5.29 di atas terlihat bahwa ada dua Indikator TPB Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Nagan Raya yang sudah dilaksanakan tetapi belum tercapai yaitu nomor indikator 8.1.1* dan 10.1.1.(a). Masih adanya Gap antara target dan realisasi yang besar, maka untuk mencapai target dibutuhkan upaya-upaya tambahan tidak cukup dengan usaha biasa (*Business as Usual*).

5.1.16. Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah

Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah memiliki tugas pokok dalam menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah. Hasil analisis capaian TPB pada Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah menunjukkan belum teridentifikasi jumlah indikator TPB = 0 indikator yang relevan dan menjadi kewenangan Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah. Terkait pelaksanaan dalam upaya pencapaiannya, diketahui sebanyak 0 (00%) indikator sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target (SS), 0 (00%) sudah dilaksanakan tetapi belum mencapai target (SB), 0 (00%) indikator tidak ada data dan belum dilaksanakan (na) dan 0 (00%) indikator TPB bukan kewenangan Kabupaten Nagan Raya (BK).

5.1.17. Badan Pengelola Keuangan Daerah

Badan Keuangan memiliki tugas pokok dalam menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang perencanaan keuangan, pengelolaan pendapatan dan belanja negara, pengaturan dan pengawasan sektor keuangan, kebijakan moneter, pengaturan sistem pembayaran, pengelolaan utang negara, serta pembangunan infrastruktur keuangan untuk mendukung stabilitas ekonomi

dan pertumbuhan Pembangunan. Hasil analisis capaian TPB pada Dinas Pemberdayaan Perempuan menunjukkan dari total 2 indikator TPB yang relevan dan menjadi kewenangan Badan Keuangan. Terkait pelaksanaan dalam upaya pencapaiannya, diketahui sebanyak 2 (100,00%) dari indikator tersebut belum terlaksana (NA). Lebih rinci seperti pada **Tabel 5.30**.

Tabel 5.30. Capaian Indikator TPB pada Badan Keuangan Kabupaten Nagan Raya.

No	Kategori Capaian	Jumlah	Persen
1	Indikator TPB yang sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target (SS);	0	0,00%
2	Indikator TPB yang sudah dilaksanakan tetapi belum mencapai target (SB);	0	0,00%
3	Indikator TPB yang tidak ada data atau belum terlaksana (NA); dan	2	100,00%
4	Indikator TPB yang bukan kewenangan (BK).	0	0,00%
	Jumlah	2	100%

Sumber: Hasil Analisis, 2023

Berdasarkan **Tabel 5.30** hasil analisis data status pencapaian TPB/SDGs di Badan Keuangan menunjukkan hasil yang cukup menarik, Dimana cukup tingginya kategori dengan tidak ada data (na) yaitu 100.00% dari keseluruhan indikator yang menjadi kewenangan kabupaten. Salah satu penyebab cukup tingginya status na. ialah dimana manajemen pengelolaan data pelaksanaan TPB, khususnya di Badan Keuangan tidak terkelola dengan baik. Persentasi tingkat capaian per kriteria seperti terlihat pada **Gambar 5.15**.



Gambar 5.15. Persentase Capaian Indikator TPB pada Badan Keuangan Kabupaten Nagan Raya

(Sumber: Hasil Analisis, 2023)



PEMERINTAH KABUPATEN NAGAN RAYA
KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS (KLHS)
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD)

Adapun capaian indikator TPB pada Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Nagan Raya secara lebih lengkap dan rinci dapat dilihat pada **Tabel 5.31** dibawah ini.

Tabel 5.31. Rekap Capaian Indikator TPB pada Badan Keuangan Kabupaten Nagan Raya

No.	No. Indikator	Indikator TPB	Target Perpes 59/2017	Target Daerah 2022	Realisasi 2022	Kategori Capaian
1	10.3.1.(d)	Jumlah kebijakan yang diskriminatif dalam 12 bulan lalu berdasarkan pelarangan diskriminasi menurut hukum HAM Internasional.	Menurun/tidak ada			na
2	16.b.1.(a)	Jumlah kebijakan yang diskriminatif dalam 12 bulan lalu berdasarkan pelarangan diskriminasi menurut hukum HAM Internasional.	Menurun/tidak ada			na

Sumber: Hasil Analisis, 2023

Tabel 5.31 diatas terlihat bahwa tidak ditemukan Indikator TPB Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Nagan Raya yang belum belum mencapai target yaitu tidak ada realisasi kegiatan.

5.1.18. Dinas Perkebunan

Dinas Perkebunan memiliki tugas pokok dalam menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang Perkebunan. Hasil analisis capaian TPB pada Dinas Perkebunan menunjukkan belum teridentifikasi indikator TPB = 0 indikator yang relevan dan menjadi kewenangan Dinas Perkebunan. Terkait pelaksanaan dalam upaya pencapaiannya, diketahui sebanyak 0 (00%) indikator sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target (SS), 0 (00%) sudah dilaksanakan tetapi belum mencapai target (SB), 0 (00%) indikator tidak ada data dan belum dilaksanakan (na) dan 0 (00%) indikator TPB bukan kewenangan Kabupaten Nagan Raya (BK).

5.1.19. Dinas Kesehatan

Dinas Kesehatan memiliki tugas pokok dalam menyelenggarakan urusan pemerintah dalam bidang pelayanan kesehatan masyarakat, pengendalian penyakit menular, pelayanan kesehatan reproduksi, pengaturan dan pengawasan kesehatan lingkungan, pengawasan kualitas makanan dan minuman, pemberantasan penyakit tidak menular, penyediaan pelayanan kesehatan lanjutan, serta penyuluhan dan pendidikan kesehatan kepada masyarakat. Hasil analisis capaian TPB pada Dinas Pemberdayaan Perempuan menunjukkan dari total 44 indikator TPB yang relevan dan menjadi kewenangan Dinas Kesehatan. Terkait pelaksanaan

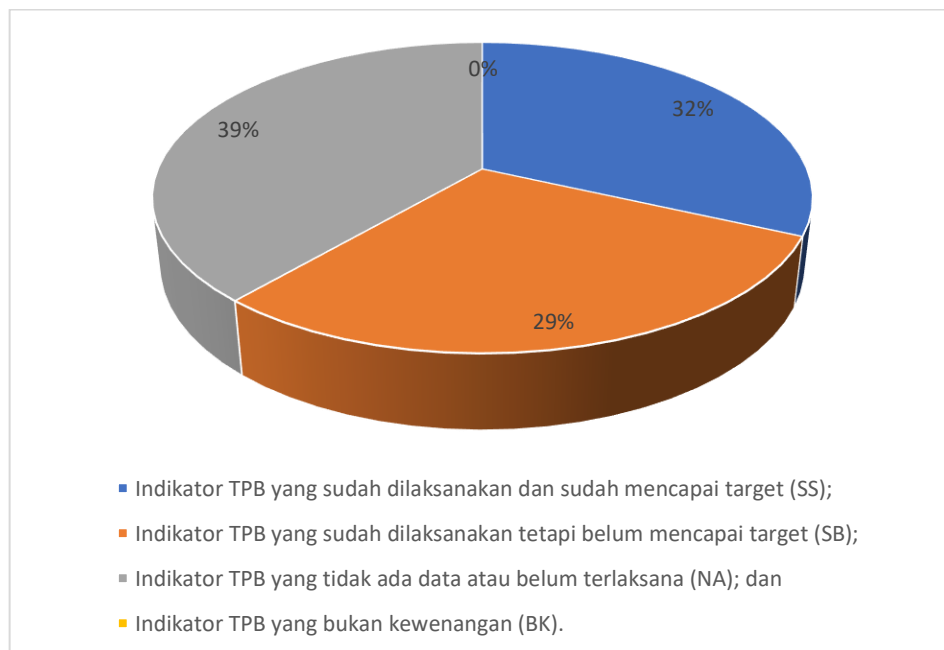
dalam upaya pencapaiannya, diketahui sebanyak 14 (31,82%) indikator sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target, 13 (29,55%) sudah dilaksanakan tetapi belum mencapai target, 17 (38,64%) indikator tidak ada data dan belum dilaksanakan dan 0 (0%) indikator TPB bukan kewenangan Dinas Kesehatan Kabupaten Nagan Raya. Lebih rinci seperti pada **Tabel 5.32**.

Tabel 5.32. Capaian Indikator TPB pada Dinas Kesehatan Kabupaten Nagan Raya.

No	Kategori Capaian	Jumlah	Persen
1	Indikator TPB yang sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target (SS);	14	31,82%
2	Indikator TPB yang sudah dilaksanakan tetapi belum mencapai target (SB);	13	29,55%
3	Indikator TPB yang tidak ada data atau belum terlaksana (NA); dan	17	38,64%
4	Indikator TPB yang bukan kewenangan (BK).	0	0,00%
Jumlah		44	100%

Sumber: Hasil Analisis, 2023

Berdasarkan **Tabel 5.32** hasil analisis data status pencapaian TPB/SDGs di Dinas Kesehatan menunjukkan hasil yang cukup menarik, Dimana sedikit tingginya kategori dengan tidak ada data (na) yaitu 38.64% dari keseluruhan indikator yang menjadi kewenangan kabupaten. Salah satu penyebab sedikit tingginya status na. ialah dimana manajemen pengelolaan data pelaksanaan TPB, khususnya di Dinas Kesehatan kurang terkelola dengan baik. Persentasi tingkat capaian per kriteria seperti terlihat pada **Gambar 5.16**.



Gambar 5.16. Persentase Capaian Indikator TPB pada Dinas Kesehatan Kabupaten Nagan Raya
(Sumber: Hasil Analisis, 2023)



PEMERINTAH KABUPATEN NAGAN RAYA
KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS (KLHS)
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD)

Adapun capaian indikator TPB pada Dinas Kesehatan Kabupaten Nagan Raya secara lebih lengkap dan rinci dapat dilihat pada **Tabel 5.33**.

Tabel 5.33. Rekap Capaian Indikator TPB pada Dinas Kesehatan Kabupaten Nagan Raya.

No.	No. Indikator	Indikator TPB	Target Perpes 59/2017	Target Daerah 2022	Realisasi 2022	Kategori Capaian
1	1.3.1(a)	Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan.	Meningkat menjadi 95%		171.926	SB
2	1.4.1(a)	Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan.	Meningkat menjadi 70%		N/A	na
3	1.4.1(b)	Persentase anak umur 12-23 bulan yang menerima imunisasi dasar lengkap.	Meningkat menjadi 63%			na
4	2.1.1(a)	Prevalensi kekurangan gizi (underweight) pada anak balita.	Menurun menjadi 17%	14	6,8	SS
5	2.2.1*	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah lima tahun/balita.	Menurun	18,4	9,2	SS
6	2.2.1(a)	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah dua tahun/baduta.	Menurun menjadi 28%	18,4	6,5	SS
7	2.2.2*	Prevalensi malnutrisi (berat badan/tinggi badan) anak pada usia kurang dari 5 tahun, berdasarkan tipe.	Menurun	7,5	5,2	SS
8	2.2.2(a)	Prevalensi anemia pada ibu hamil.	Menurun menjadi 28%	6%	6%	SS
9	2.2.2(b)	Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapatkan ASI eksklusif.	Meningkat menjadi 50%	50%	55%	SS
10	3.1.1*	Angka Kematian Ibu (AKI).	Menurun menjadi 306	141	141	SS
11	3.1.2*	Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih.	Meningkat menjadi 95%			na
12	3.1.2(a)	Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan.	Meningkat menjadi 85%	N/A	N/A	na
13	3.2.1*	Angka Kematian Balita (AKBa) per 1000 kelahiran hidup.	Menurun	2%	2%	SB
14	3.2.2*	Angka Kematian Neonatal (AKN) per 1000 kelahiran hidup.	Menurun	7%	7%	SB
15	3.2.2(a)	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup.	Menurun menjadi 24	18%	18%	SS
16	3.2.2(b)	Persentase kabupaten/kota yang mencapai 80% imunisasi dasar lengkap pada bayi.	Meningkat menjadi 95%	95%	66,6%	SB
17	3.3.1(a)	Prevalensi HIV pada populasi dewasa.	Menurun menjadi <0,5%	<0,5%	0,001	SS



PEMERINTAH KABUPATEN NAGAN RAYA
KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS (KLHS)
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD)

No.	No. Indikator	Indikator TPB	Target Perpes 59/2017	Target Daerah 2022	Realisasi 2022	Kategori Capaian
18	3.3.2(a)	Insiden Tuberkulosis (ITB) per 100.000 penduduk.	Menurun menjadi 245	351,35	222,1	SS
19	3.3.3*	Kejadian Malaria per 1000 orang.	Menurun	<1	0,063	SS
20	3.3.3(a)	Jumlah kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria.	Meningkat menjadi 300	100	100	SB
21	3.3.4(a)	Persentase kabupaten/kota yang melakukan deteksi dini untuk infeksi Hepatitis B. (kecamatan)	Meningkat	100	100	SB
22	3.3.5*	Jumlah orang yang memerlukan intervensi terhadap penyakit tropis yang terabaikan (Filariasis dan Kusta).	Menurun	17	12	SS
23	3.3.5(a)	Jumlah provinsi (kecamatan/kelurahan) dengan eliminasi Kusta.	Meningkat menjadi 34 provinsi	100	100	BK
24	3.3.5(b)	Jumlah kabupaten/kota (kecamatan/kelurahan) dengan eliminasi filariasis (berhasil lolos dalam survei penilaian transmisi tahap I).	Meningkat menjadi 35			na
25	3.4.1(a)	Persentase merokok pada penduduk umur ≤18 tahun.	Menurun menjadi 5,40%	9,4%	8,8%	SB
26	3.4.1(b)	Prevalensi tekanan darah tinggi.	Menurun menjadi 24,30%	31446	25000	SB
27	3.4.1(c)	Prevalensi obesitas pada penduduk umur ≥18 tahun.	Menurun	9,4%	8,8%	SS
28	3.4.2*	Angka kematian (insidens rate) akibat bunuh diri.	Menurun			na
29	3.4.2(a)	Jumlah kabupaten/kota yang memiliki puskesmas yang menyelenggarakan upaya kesehatan jiwa.	Meningkat menjadi 280	100%	100%	SB
30	3.5.1(e)	Prevalensi penyalahgunaan narkoba.	Menurun menjadi angka 0,02%	Tidak ada data terkait		na
31	3.5.2*	Konsumsi alkohol (liter per kapita) oleh penduduk umur ≥ 15 tahun dalam satu tahun terakhir.	Menurun	Tidak ada data terkait		na
32	3.7.2*	Angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR).	Menurun menjadi 38			na
33	3.7.2(a)	Total Fertility Rate (TFR).	Menurun menjadi 2,28	TIDAK ADA DI INDIKATOR LAPORAN DATA BULIN TERPILAH	TIDAK ADA DI INDIKATOR LAPORAN DATA BULIN TERPILAH	na
34	3.8.1(a)	Unmet need pelayanan kesehatan.	Menurun menjadi 9,91%			na



PEMERINTAH KABUPATEN NAGAN RAYA
KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS (KLHS)
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD)

No.	No. Indikator	Indikator TPB	Target Perpes 59/2017	Target Daerah 2022	Realisasi 2022	Kategori Capaian
35	3.8.2*	Jumlah penduduk yang dicakup asuransi kesehatan atau sistem kesehatan masyarakat per 1000 penduduk.	Meningkat			na
36	3.8.2(a)	Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).	Meningkat menjadi minimal 95%		171.926	SB
37	3.9.3(a)	Proporsi kematian akibat keracunan.	Menurun			na
38	3.a.1*	Persentase merokok pada penduduk umur ≥ 15 tahun.	Menurun	9,8%	8,8%	SS
39	3.b.1(a)	Persentase ketersediaan obat dan vaksin di Puskesmas.	Meningkat	100%	100%	SB
40	3.c.1*	Kepadatan dan distribusi tenaga kesehatan.	Meningkat	100%	84%	SB
41	5.3.1(b)	Angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR).	Menurun menjadi 38 tahun	TIDAK ADA DI INDIKATOR LAPORAN DATA BULIN TERPILAH	TIDAK ADA DI INDIKATOR LAPORAN DATA BULIN TERPILAH	na
42	6.2.1(a)	Proporsi populasi yang memiliki fasilitas cuci tangan dengan sabun dan air.	Meningkat			na
43	6.2.1(c)	Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM).	Meningkat	91		na
44	6.2.1(d)	Jumlah desa/kelurahan yang Open Defecation Free (ODF)/ Stop. Buang Air Besar Sembarangan (SBS).	Meningkat	0		na

Sumber: Hasil Analisis, 2023

Tabel 5.33 diatas terlihat bahwa ada tiga belas Indikator TPB Dinas Pemberdayaan Perempuan Nagan Raya yang sudah dilaksanakan tapi belum mencapai target yaitu nomor indikator 1.3.1(a), 3.2.1*, 3.2.2.*, 3.2.2.(b), 3.3.3.(a), 3.3.4.(a), 3.3.5.(a), 3.4.1.(a), 3.4.1.(b), 3.4.2.(a), 3.8.2.(a), 3.b.1.(a), dan nomor indikator 3.c.1.*. Masih adanya Gap antara target dan realisasi yang besar, maka untuk mencapai target dibutuhkan upaya-upaya tambahan tidak cukup dengan usaha biasa (*Business as Usual*).

5.1.20. Inspektorat

Inspektorat memiliki tugas pokok dalam menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan. Hasil identifikasi indikator TPB pada inspektorat menunjukkan hanya ada satu indikator TPB yang relevan dan menjadi kewenangan Inspektorat.

Inspektorat memiliki satu indikator yang berada pada TPB 16 dan dari 1 indikator tersebut belum dilaksanakan. Lebih rinci seperti disajikan pada **Tabel 5.34**.

Tabel 5.34. Capaian Indikator TPB pada Inspektorat

Kategori Capaian	Jumlah	Persen
Indikator TPB yang sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target (SS);	0	0.00%
Indikator TPB yang sudah dilaksanakan tetapi belum mencapai target (SB);	0	0.00%
Indikator TPB yang tidak ada data atau belum terlaksana (NA); dan	1	100.00%
Indikator TPB yang bukan kewenangan (BK).	0	0.00%
Jumlah	1	100%

Sumber: Hasil Analisis, 2023

Berdasarkan **Tabel 5.34** hasil analisis data status pencapaian TPB/SDGs di inspektorat menunjukkan status tidak ada data atau belum dilaksanakan (na) adalah 1 indikator (100,00%). Persentasi tingkat capaian per kriteria seperti terlihat pada **Gambar 5.17**.



Gambar 5.17. Persentase Capaian Indikator TPB pada Inspektorat Kabupaten Nagan Raya
(Sumber: Hasil Analisis, 2023)



PEMERINTAH KABUPATEN NAGAN RAYA
KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS (KLHS)
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD)

Adapun capaian indikator TPB pada Inspektorat Kabupaten Nagan Raya secara lebih lengkap dan rinci dapat dilihat pada **Tabel 5.35** dibawah ini.



PEMERINTAH KABUPATEN NAGAN RAYA
KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS (KLHS)
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD)

Tabel 5.35. Rekap Capaian Indikator TPB pada Inspektorat Kabupaten Nagan Raya.

No.	No. Indikator	Indikator TPB	Target Perpes 59/2017	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Kategori Capaian
1	16.5.1.(a)	Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK).	Meningkat menjadi 4,0	0	0	na

Sumber: Hasil Analisis, 2023

Tabel 5.35 diatas terlihat bahwa hanya ada satu indikator TPB urusan Inspektorat Kabupaten Nagan Raya yang tidak ada data atau belum dilaksanakan (na). Untuk dapat melaksanakan sesuai target, maka dibutuhkan upaya-upaya tambahan tidak cukup dengan usaha biasa (*Business as Usual*) selama ini.

5.1.21. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman memiliki tugas pokok dalam menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang kawasan permukiman dan bidang pengurusan hak-hak atas tanah dan penyuluhan pertanahan berdasarkan azas otonomi dan tugas perbantuan. Hasil analisis capaian TPB pada Dinas Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman menunjukkan dari total 9 indikator TPB yang relevan dan menjadi kewenangan Dinas Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman. Terkait pelaksanaan dalam upaya pencapaiannya, diketahui sebanyak 0 (0,00%) indikator sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target (SS), 2 (22,22%) sudah dilaksanakan tetapi belum mencapai target (SB), 7 (77,78%) indikator tidak ada data (na) dan belum dilaksanakan dan 0 (00,00%) indikator TPB bukan kewenangan Kabupaten Nagan Raya (BK). Lebih rinci disajikan pada **Tabel 5.36**.

Tabel 5.36. Capaian Indikator TPB pada Dinas PRKP

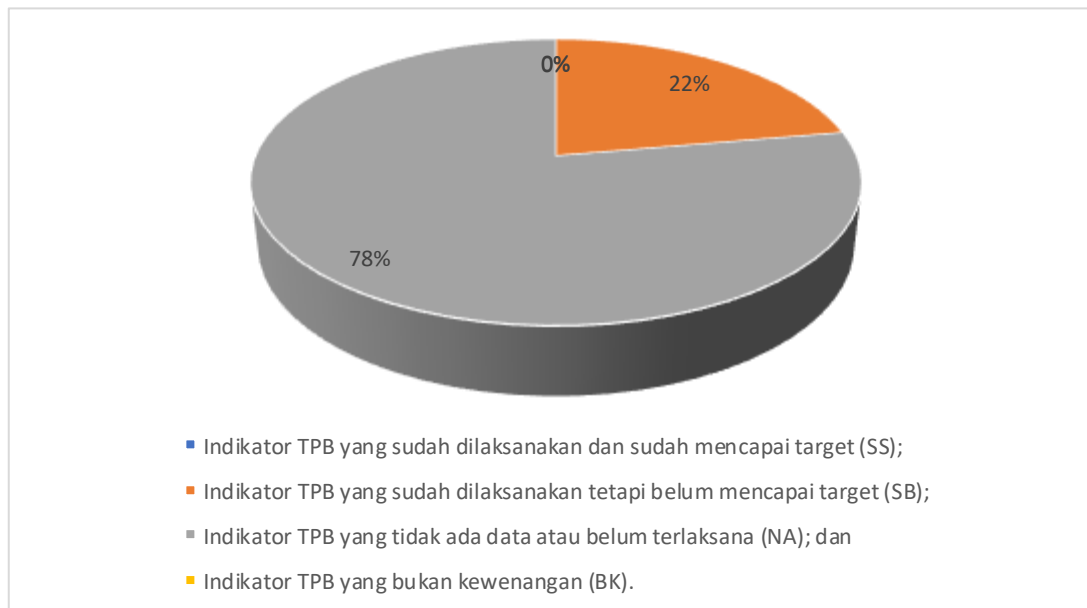
Kategori Capaian	Jumlah	Persen
Indikator TPB yang sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target (SS);	0	0.00%
Indikator TPB yang sudah dilaksanakan tetapi belum mencapai target (SB);	2	22.22%
Indikator TPB yang tidak ada data atau belum terlaksana (NA); dan	7	77.78%
Indikator TPB yang bukan kewenangan (BK).	0	0.00%
Jumlah	9	100%

Sumber: Hasil Analisis, 2023

Berdasarkan **Tabel 5.36** hasil analisis data status pencapaian TPB/SDGs di Dinas PRKP menunjukan hasil 2 (22,22%) pada Indikator TPB yang sudah dilaksanakan tetapi belum

mencapai target (SB), sedangkan TPB yang tidak ada data atau belum terlaksana (NA) menunjukkan Jumlah 7 (77,78 %).

Persentasi tingkat capaian per kriteria lebih rinci seperti terlihat pada **Gambar 5.18**.



Gambar 5.18. Persentase Capaian Indikator TPB pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Nagan Raya
(Sumber: Hasil Analisis, 2023)

Adapun capaian indikator TPB pada Dinas PRKP Kabupaten Nagan Raya secara lebih lengkap dan rinci dapat dilihat pada **Tabel 5.37**.

Tabel 5.37. Rekap Capaian Indikator TPB pada Dinas PRKP

No.	No. Indikator	Indikator TPB	Target Perpes 59/2017	Target Daerah 2022	Realisasi 2022	Kategori Capaian
1	1.4.1.(e)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan.	Meningkat menjadi 100%	80,04	80,04	SB
2	1.4.1.(f)	Persentase rumah tangga kumuh perkotaan.	Meningkat menjadi 18,6 juta			na
3	6.2.1.(b)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak.	Meningkat menjadi 100%		79,97	SB
4	11.1.1.(a)	Proporsi rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau.	Meningkat menjadi 3,7 juta rumah tangga			na
5		Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman				na
6		Jumlah rumah layak huni yang terbangun		909		na
7		Jumlah rumah tidak layak huni yang di rehab		331		na
8		Persentase akses air minum perpipaan		81,04		na
9		Persentase akses air minum non perpipaan		10		na

Sumber: Hasil Analisis, 2023

Dapat dilihat pada **Tabel 5.37** diatas bahwa terdapat 2 Indikator TPB yang sudah dilaksanakan dan sudah tercatat pada Dinas PRKP Nagan Raya yang sudah dilaksanakan tetapi belum mencapai target (SB). Namun masih adanya status na (tidak ada data) sebanyak 7 (77,78%) indikator. Hal ini menunjukkan manajemen pengelolaan data pelaksanaan TPB, khususnya di Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman tidak terkelola dengan baik.

5.1.22. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan memiliki tugas pokok dalam menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang Perpustakaan dan Kearsipan Hasil analisis capaian TPB pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan menunjukkan belum teridentifikasi jumlah indikator TPB atau total 0 indikator TPB yang relevan dan menjadi kewenangan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan. Terkait pelaksanaan dalam upaya pencapaiannya, diketahui sebanyak 0 (00%) indikator sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target (SS), 0 (00%) sudah dilaksanakan tetapi belum mencapai target (SB), 0 (00%) indikator tidak ada data dan belum dilaksanakan (na) dan 0 (00%) indikator TPB bukan kewenangan Kabupaten Nagan Raya (BK).

5.1.23. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu memiliki tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah. Hasil analisis capaian TPB pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu menunjukkan dari total 4 indikator TPB yang relevan dan menjadi kewenangan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Terkait pelaksanaan dalam upaya pencapaiannya, diketahui sebanyak 0 (0,00%) indikator sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target (SS), 0 (0,00%) sudah dilaksanakan tetapi belum mencapai target (SB), 5 (100,00%) indikator tidak ada data (na) dan belum dilaksanakan dan 0 (00,00%) indikator TPB bukan kewenangan Kabupaten Nagan Raya (BK). Lebih rinci disajikan pada **Tabel 5.38**.

Tabel 5.38. Capaian Indikator TPB pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kategori Capaian	Jumlah	Persen
Indikator TPB yang sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target (SS);	0	0.00%
Indikator TPB yang sudah dilaksanakan tetapi belum mencapai target (SB);	0	0.00%
Indikator TPB yang tidak ada data atau belum terlaksana (NA); dan	5	100.00%
Indikator TPB yang bukan kewenangan (BK).	0	0.00%
Jumlah	5	100%

Sumber: Hasil Analisis, 2023

Berdasarkan **Tabel 5.38** hasil analisis data status pencapaian TPB/SDGs di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu TPB yang tidak ada data atau belum terlaksana (NA) menunjukan Jumlah 5 (100,00 %).

Persentasi tingkat capaian per kriteria lebih rinci seperti terlihat pada **Gambar 5.19**.



Gambar 5.19. Persentase Capaian Indikator TPB pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Nagan Raya
(Sumber: Hasil Analisis, 2023)

Adapun capaian indikator TPB pada Dinas PMPTSP Kabupaten Nagan Raya secara lebih lengkap dan rinci dapat dilihat pada **Tabel 5.39**.

Tabel 5.39. Rekap Capaian Indikator TPB pada Dinas PMPT

No.	No. Indikator	Indikator TPB	Target Perpes 59/2017	Target Daerah 2022	Realisasi 2022	Kategori Capaian
1	8.10.1*	Jumlah kantor bank dan ATM per 100.000 penduduk dewasa	Meningkat			na
2	8.10.1.(a)	Rata-rata jarak lembaga keuangan (Bank Umum).	Mendekat			na
3		Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)		6		na
4		Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)		240		na
5		Kenaikan / penurunan Nilai Realisasi PMDN (milyar rupiah)		57,29		na

Sumber: Hasil Analisis, 2023

Dapat dilihat pada **Tabel 5.39** diatas bahwa terdapat (0) Indikator TPB yang sudah dilaksanakan dan sudah tercapai pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Nagan Raya yang sudah dilaksanakan. Namun masih adanya status na (tidak ada data) sebanyak 5 (100%) indikator. Hal ini menunjukkan manajemen pengelolaan data pelaksanaan



TPB, khususnya di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tidak terkelola dengan baik.

5.1.24. Dinas Perhubungan

Dinas Perhubungan memiliki tugas pokok dalam menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang Bidang Lalu Lintas Jalan, Bidang Angkutan Jalan, Bidang Jaringan Transportasi dan Perkeretaapian, Bidang Pelayaran. Hasil analisis capaian TPB pada Dinas Perhubungan menunjukkan dari total 8 indikator TPB yang relevan dan menjadi kewenangan Dinas Perhubungan. Terkait pelaksanaan dalam upaya pencapaiannya, diketahui sebanyak (0,00%) indikator sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target (SS), (0,00%) sudah dilaksanakan tetapi belum mencapai target (SB), 6 (75,00%) indikator tidak ada data (na) dan belum dilaksanakan dan 2 (25,00%) indikator TPB bukan kewenangan Kabupaten Nagan Raya (BK). Lebih rinci disajikan pada **Tabel 5.40**.

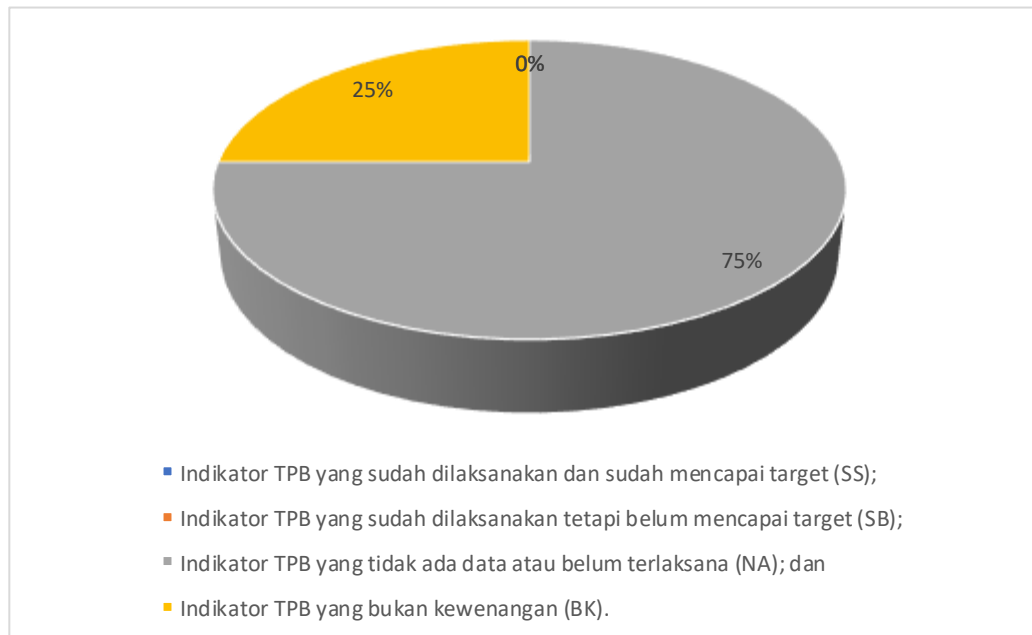
Tabel 5.40. Capaian Indikator TPB pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

Kategori Capaian	Jumlah	Persen
Indikator TPB yang sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target (SS);	0	0.00%
Indikator TPB yang sudah dilaksanakan tetapi belum mencapai target (SB);	0	0.00%
Indikator TPB yang tidak ada data atau belum terlaksana (NA); dan	6	75.00%
Indikator TPB yang bukan kewenangan (BK).	2	25.00%
Jumlah	8	100%

Sumber: Hasil Analisis, 2023

Berdasarkan **Tabel 5.40** hasil analisis data status pencapaian TPB/SDGs di Dinas Perhubungan menunjukan hasil (0,00%) pada Indikator TPB yang sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target (SS), sedangkan TPB yang tidak ada data atau belum terlaksana (NA) menunjukan Jumlah 6 (75,00 %).

Persentasi tingkat capaian per kriteria lebih rinci seperti terlihat pada **Gambar 5.20**.



Gambar 5.20. Persentase Capaian Indikator TPB pada Dinas Perhubungan Kabupaten Nagan Raya
 (Sumber: Hasil Analisis, 2023)

Adapun capaian indikator TPB pada Dinas Perhubungan Kabupaten Nagan Raya secara lebih lengkap dan rinci dapat dilihat pada **Tabel 5.41** dibawah ini.

Tabel 5.41. Rekap Capaian Indikator TPB pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

No.	No. Indikator	Indikator TPB	Target Perpes 59/2017	Target Daerah 2022	Realisasi 2022	Kategori Capaian
1	9.1.1.(b)	Panjang pembangunan jalan tol.	1000 Km (skala nasional)			BK
2	9.1.1.(c)	Panjang jalur kereta api.	Bertambah 3.258 km			na
3	9.1.2.(b)	Jumlah dermaga penyeberangan.	Meningkat			na
4	9.1.2.(c)	Jumlah pelabuhan strategis.	24 pelabuhan (skala nasional)			BK
5	11.2.1.(a)	Persentase pengguna moda transportasi umum di perkotaan.	Meningkat menjadi 32%			na
6	11.2.1.(b)	Jumlah sistem angkutan rel yang dikembangkan di kota besar.	ada			na
7	11.2.1.(a)*	Proporsi populasi yang mendapatkan akses yang nyaman pada transportasi publik				na
8	9.1.2*	Jumlah penumpang dan barang berdasarkan moda transportasi				na

Sumber: Hasil Analisis, 2023



Dapat dilihat pada **Tabel 5.41** diatas bahwa terdapat 0 Indikator TPB yang sudah dilaksanakan dan sudah tercapat pada Dinas Pendidikan Nagan Raya yang sudah dilaksanakan. Namun masih adanya status na (tidak ada data) sebanyak 6 indikator. Hal ini menunjukan manajemen pengelolaan data pelaksanaan TPB, khususnya di Dinas Perhubungan tidak terkelola dengan baik.

5.1.25. Dinas Syari'at Islam

Dinas Syari'at Islam memiliki tugas pokok dalam menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang Syari'at Islam. Hasil analisis capaian TPB pada Dinas Syariat Islam menunjukkan dari total 0 indikator TPB yang relevan dan menjadi kewenangan Dinas Syari'at Islam. Terkait pelaksanaan dalam upaya pencapaiannya, diketahui sebanyak 0 (00%) indikator sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target (SS), 0 (00%) sudah dilaksanakan tetapi belum mencapai target (SB), 0 (00%) indikator tidak ada data dan belum dilaksanakan (na) dan 0 (00%) indikator TPB bukan kewenangan Kabupaten Nagan Raya (BK).

5.1.26. Dinas Pendidikan

Dinas Pendidikan memiliki tugas pokok dalam menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang Kependidikan di daerah. Hasil analisis capaian TPB pada Dinas Pendidikan menunjukkan dari total 4 indikator TPB yang relevan dan menjadi kewenangan Dinas Pendidikan. Terkait pelaksanaan dalam upaya pencapaiannya, diketahui sebanyak 1 (5,88%) indikator sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target (SS), 3 (17,65%) sudah dilaksanakan tetapi belum mencapai target (SB), 13 (76,47%) indikator tidak ada data (na) dan belum dilaksanakan dan 0 (00,00%) indikator TPB bukan kewenangan Kabupaten Nagan Raya (BK). Lebih rinci disajikan pada **Tabel 5.42**.

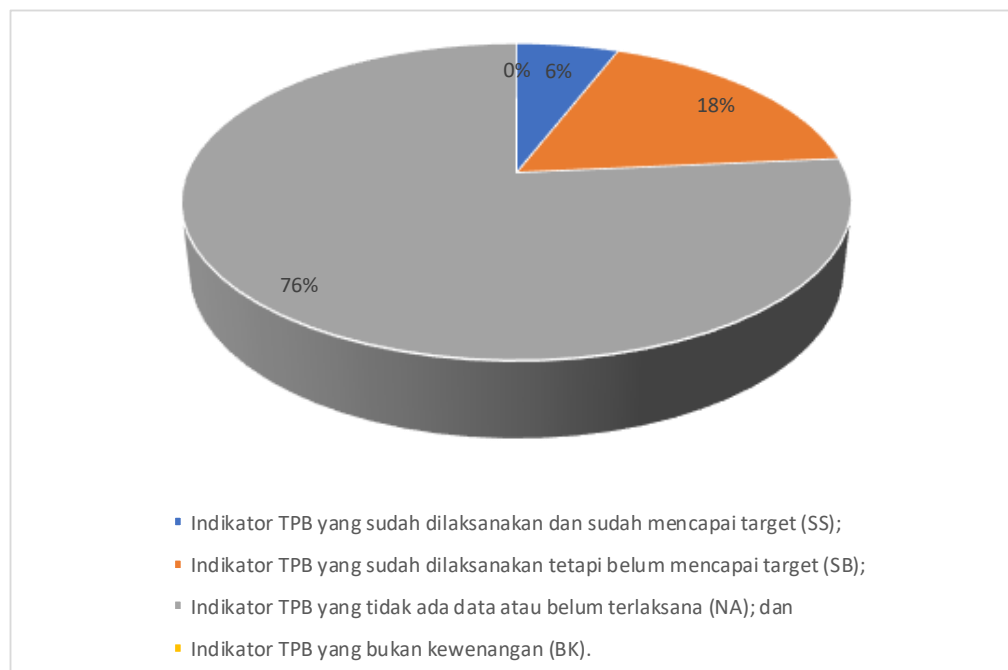
Tabel 5.42. Capaian Indikator TPB pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

Kategori Capaian	Jumlah	Persen
Indikator TPB yang sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target (SS);	1	5,88%
Indikator TPB yang sudah dilaksanakan tetapi belum mencapai target (SB);	3	17,65%
Indikator TPB yang tidak ada data atau belum terlaksana (NA); dan	13	76,47%
Indikator TPB yang bukan kewenangan (BK).	0	0,00%
Jumlah	17	100%

Sumber: Hasil Analisis, 2023

Berdasarkan **Tabel 5.42** hasil analisis data status pencapaian TPB/SDGs di Dinas Pendidikan menunjukkan hasil 1 (5,88%) pada Indikator TPB yang sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target (SS), sedangkan TPB yang tidak ada data atau belum terlaksana (NA) menunjukkan Jumlah 13 (76,47 %).

Persentase tingkat capaian per kriteria lebih rinci seperti terlihat pada **Gambar 5.21**.



Gambar 5.21. Persentase Capaian Indikator TPB pada Dinas Pendidikan Kabupaten Nagan Raya
(Sumber: Hasil Analisis, 2023)



PEMERINTAH KABUPATEN NAGAN RAYA
KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS (KLHS)
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD)

Adapun capaian indikator TPB pada Dinas Pendidikan Kabupaten Nagan Raya secara lebih lengkap dan rinci dapat dilihat pada **Tabel 5.43**.

Tabel 5.43. Rekap Capaian Indikator TPB pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

No.	No. Indikator	Indikator TPB	Target Perpes 59/2017	Target Daerah 2022	Realisasi 2022	Kategori Capaian
1	1.4.1.(g)	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/ sederajat.	Meningkat menjadi 94,78%	97	97,79	SS
2	1.4.1.(h)	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/ sederajat.	Meningkat menjadi 82,20%	85	82,06	SB
3	1.5.1.(d)	Jumlah daerah bencana alam/bencana sosial yang mendapat pendidikan layanan khusus. (SMAB= Sekolah/ Madrasah Aman Bencana)	Meningkat menjadi 450	na	na	na
4	4.1.1*	Proporsi anak-anak dan remaja: (a) pada kelas 4, (b) tingkat akhir SD/kelas 6, (c) tingkat akhir SMP/kelas 9 yang mencapai standar kemampuan minimum dalam: (i) membaca, (ii) matematika.	Meningkat	na	na	na
5	4.1.1.(a)	Persentase SD/MI berakreditasi minimal B.	Meningkat menjadi 84,20%	na	na	na
6	4.1.1.(b)	Persentase SMP/MTs berakreditasi minimal B.	Meningkat menjadi 81%	na	na	na
7	4.1.1.(d)	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/ sederajat.	Meningkat menjadi 114,09%	97,00	107,89	SB
8	4.1.1.(e)	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/ sederajat.	Meningkat menjadi 106,94%	85,00	83,62	SB
9	4.1.1.(g)	Rata-rata lama sekolah penduduk umur ≥15 tahun.	Meningkat menjadi 8,8 tahun	9,00	na	na
10	4.2.2.(a)	Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).	Meningkat menjadi 77,20%	na	na	na
11	4.5.1*	Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) perempuan/laki-laki di (1) SD/MI/ sederajat; (2) SMP/MTs/ sederajat; (3) SMA/SMK/MA/ sederajat; dan Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) perempuan/laki-laki di (4) Perguruan Tinggi.	Meningkat	na	na	na
12	4.6.1.(a)	Persentase angka melek aksara penduduk umur ≥15 tahun.	Meningkat menjadi 96,10%	98,50	na	na
13	4.6.1.(b)	Persentase angka melek aksara penduduk umur 15-24 tahun dan umur 15-59 tahun.	Meningkat	na	na	na
14	4.a.1*	Proporsi sekolah dengan akses ke: (a) listrik (b) internet untuk tujuan pengajaran, (c) komputer untuk tujuan pengajaran, (d) infrastruktur dan materi memadai bagi siswa disabilitas, (e) air minum layak, (f) fasilitas sanitasi dasar per jenis kelamin, (g) fasilitas cuci tangan (terdiri air, sanitasi, dan higienis bagi semua (WASH).	Meningkat	na	na	na
15	4.c.1*	Persentase guru TK, SD, SMP, SMA, SMK, dan PLB yang bersertifikat pendidik.	Meningkat	86,5	na	na
16	8.6.1*	Persentase usia muda (15-24 tahun) yang sedang tidak sekolah, bekerja atau mengikuti pelatihan (NEET).	Meningkat	na	na	na
17	11.4.1.(a)	Jumlah kota pusaka di kawasan perkotaan metropolitan, kota besar, kota sedang dan kota kecil.	ada	na	na	na

Sumber: Hasil Analisis, 2023



Dapat dilihat pada **Tabel 5.43** diatas bahwa terdapat 1 Indikator TPB yang sudah dilaksanakan dan sudah tercapat pada Dinas Pendidikan Nagan Raya yang sudah dilaksanakan. Namun masih adanya status na (tidak ada data) sebanyak 13 (76,47%) indikator. Hal ini menunjukkan manajemen pengelolaan data pelaksanaan TPB, khususnya di Dinas Pendidikan tidak terkelola dengan baik.

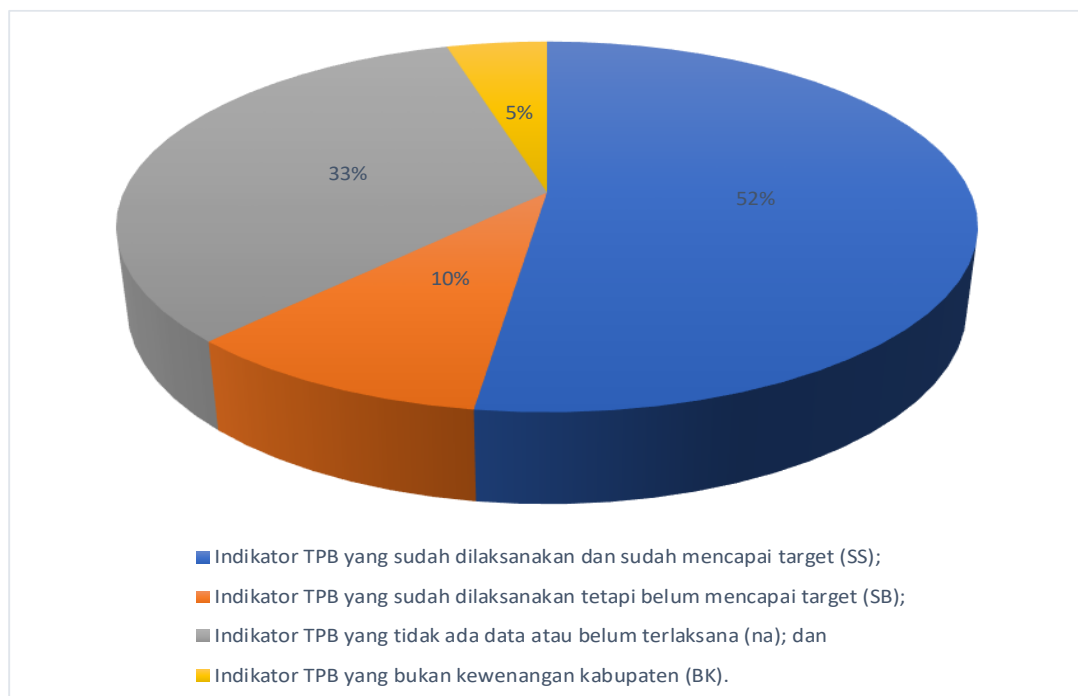
5.1.27. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik

Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik memiliki tugas pokok dalam menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang politik. Hasil analisis capaian TPB pada Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik menunjukkan belum ada atau 0 indikator TPB yang relevan dan menjadi kewenangan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik. Terkait pelaksanaan dalam upaya pencapaiannya, diketahui sebanyak 0 (00%) indikator sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target (SS), 0 (00%) sudah dilaksanakan tetapi belum mencapai target (SB), 0 (00%) indikator tidak ada data dan belum dilaksanakan (na) dan 0 (00%) indikator TPB bukan kewenangan Kabupaten Nagan Raya (BK).

BAB VI

PERUMUSAN ALTERNATIF SKENARIO DAN REKOMENDASI

Setelah dilakukan serangkaian analisis pada pembahasan BAB sebelumnya, didapatkan indikator TPB yang telah dilaksanakan dan telah mencapai target (SS) sebanyak 52% indikator, indikator TPB yang telah dilaksanakan tetapi belum mencapai target (SB) sebanyak 10% indikator, indikator TPB yang belum dilaksanakan atau belum tersedia data (na) sebanyak 33% indikator, dan indikator yang bukan merupakan kewenangan Kabupaten Nagan Raya (BK) sebanyak 5% indikator. Untuk pencapaian target, tentu saja arah kebijakan dan program yang telah dijalankan saat ini perlu dilanjutkan dan dipertahankan. Akan tetapi, ada beberapa indikator yang tidak akan tercapai, apabila hanya melanjutkan kebijakan dan program yang telah berjalan selama ini.



Gambar 6.1. Kategori Capaian Indikator TPB



Untuk itu diperlukan arah kebijakan dan program baru yang memerlukan inovasi atau memerlukan upaya tambahan untuk mencapai target yang telah ditentukan pada tahun 2030 dan tahun 2045. Memperhatikan lebih jauh kondisi pencapaian target saat ini diperkirakan penyebab belum tercapainya target TPB karena beberapa hal di bawah ini:

1. Target yang ditetapkan adalah target nasional sesuai Perpres No.59/2017, dan sulit dijangkau oleh kota/kabupaten.
2. Adanya perbedaan nomenklatur dalam indikator untuk pencapaian target.
3. Terlalu detailnya indikator yang terdapat dalam pencapaian TPB yang Sebagian sudah tercakup dalam indikator yang telah ada.
4. Terdapat indikator yang secara budaya dan pandangan hidup Masyarakat memerlukan penyesuaian kembali. Indikator tentang gender dan HAM yang merujuk kepada standar internasional perlu didiskusikan lebih saksama.

(Paser) Perumusan skenario menggunakan empat jenis pertimbangan diantaranya aspek daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, aspek anggaran pemerintah, aspek kontribusi mitra non-pemerintah dan kondisi teraktual yang kini di alami di suatu wilayah.

(BP) Skenario pembangunan berkelanjutan dirumuskan dari kondisi pencapaian TPB yang diproyeksikan dari analisis data, untuk menghasilkan kondisi dan alternatif target pencapaian TPB selama masa pencapaian TPB yang disesuaikan dalam jangka waktu masa berlakunya RPJPD. Pencapaian target TPB selama periode tersebut dilaksanakan dengan menyusun serangkaian alternatif skenario sebagai berikut:

- a. Alternatif skenario tanpa upaya tambahan, yaitu skenario yang disusun dengan mempertahankan TPB yang telah menyamai atau melampaui target nasional;
- b. Alternatif skenario dengan upaya tambahan, yaitu percepatan pencapaian target TPB dengan memperhatikan: Pencapaian target tanpa upaya tambahan;

Melihat kesenjangan (Gap) antara proyeksi capaian TPB tanpa upaya tambahan dengan target TPB tahun 2030. Target skenario tanpa upaya tambahan menjadi baseline untuk menentukan besaran intervensi yang harus dilakukan.

- Pencapaian target yang ditetapkan secara nasional; Sasaran strategis yang disusun beserta targetnya harus dapat berkontribusi pada pencapaian target TPB yang ditetapkan secara



nasional. Upaya tambahan merupakan bentuk intervensi untuk mencapai target dalam rangka mengurangi gap antara capaian TPB daerah dengan target TPB nasional.

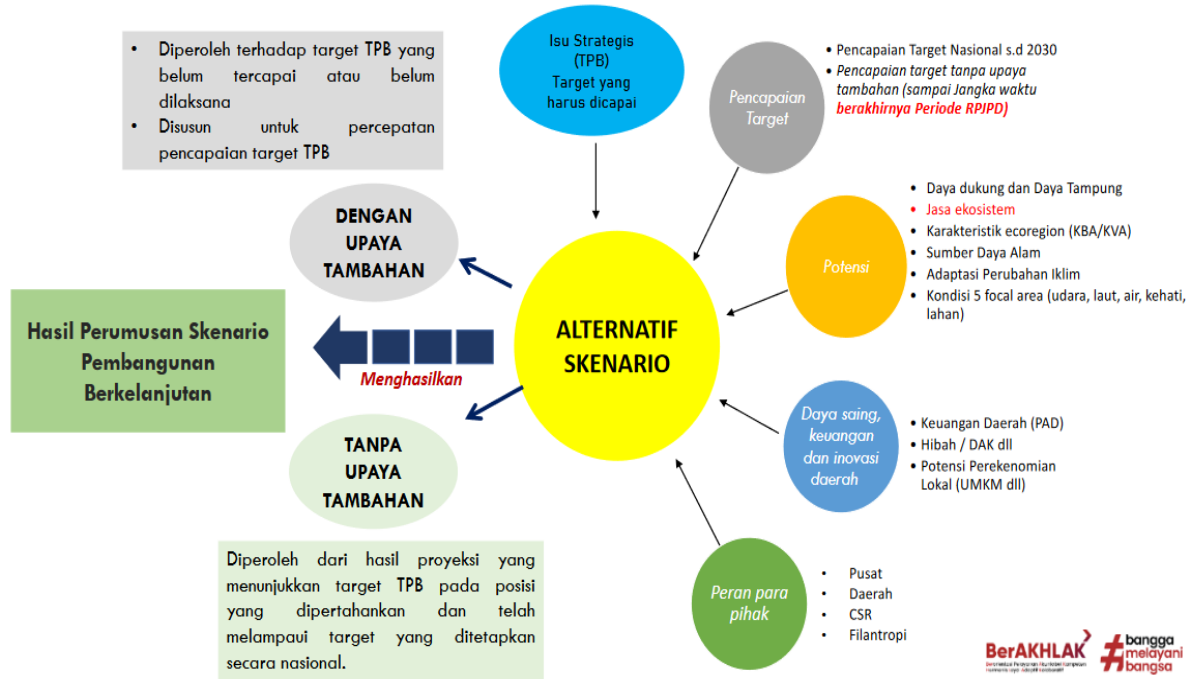
- Potensi, daya saing, dan inovasi daerah; Upaya tambahan memperhatikan rekomendasi terkait sasaran strategis pembangunan berkelanjutan. Rumusan sasaran strategis mempertimbangkan potensi, daya saing, dan inovasi daerah yang dapat dikembangkan sebagai sumber sumber pendanaan.

Alternatif proyeksi tanpa atau dengan upaya tambahan pada perumusan skenario pembangunan di atas, menjadi dasar dalam merumuskan rekomendasi yang berisi permasalahan, isu strategis, dan sasaran strategis daerah, dengan ketentuan :

- Rumusan permasalahan menggambarkan kendala dan tantangan dalam pencapaian TPB, serta menjelaskan penyebab terjadinya kesenjangan/gap antara proyeksi pencapaian TPB dan target capaian TPB secara nasional.
- Rumusan isu strategis menjelaskan isu utama pencapaian TPB sebagai upaya untuk menyelesaikan permasalahan pencapaian TPB.
- Sasaran strategis daerah merupakan kondisi pencapaian TPB yang disusun berdasarkan isu strategis dan permasalahan. Sasaran strategis dilengkapi dengan target capaian selama periode RPJMD. Dalam merumuskan sasaran strategis daerah, DDDT-LH menjadi salah satu pertimbangan.

Guna memudahkan proses penelaahan KLHS RPJPD, pemerintah daerah dapat melengkapi rekomendasi pencapaian TPB dengan menyusun strategi dan program strategis. Strategi merupakan upaya yang akan dilakukan oleh pemerintah daerah untuk mencapai sasaran strategis. Sedangkan program strategis berisikan rumusan program sebagai bentuk implementasi dari strategi. Dibawah ini merupakan Gambar rumusan alternatif skenario yang digunakan di Kabupaten Nagan Raya.

PERUMUSAN SKENARIO/ALTERNATIF



Gambar 6.2. Alur Rumusan Alternatif Skenario

6.1. Penentuan Isu Strategis TPB

6.1.1. Isu Strategis TPB

Perumusan isu strategis pembangunan berkelanjutan di KLHS Kabupaten Nagan Raya dilakukan melalui berbagai proses tahapan Hasil penjaringan isu-isu pembangunan dari berbagai stakeholder yang dihimpun melalui diskusi publik dengan melibatkan seluruh OPD yang ada di Kabupaten Nagan Raya;

1. Pengelompokan isu-isu strategis yang telah dihimpun melalui diskusi publik dalam tujuan pembangunan berkelanjutan;
2. Melakukan penapisan terhadap TPB prioritas di Kabupaten Nagan Raya dengan mempertimbangkan capaian indikator TPB yang didapatkan dari hasil evaluasi capaian masing-masing indikator TPB serta dengan mempertimbangkan realisasi anggaran masing-masing TPB di Kabupaten Nagan Raya.

Penjaringan isu-isu berkelanjutan dilakukan pada saat proses Uji Publik I yang melibatkan seluruh OPD dan stakeholder lainnya yang ada di Kabupaten Nagan Raya. Hasil



penjaringan isu-isu pembangunan berkelanjutan dapat dilihat pada **Tabel 6.1.** (sudah dibahas pada Bab IV).

Tabel 6.1. Isu PB Strategis Prioritas Kabupaten Nagan Raya

No	Isu PB Strategis
1	Masih terjadi pencemaran dan degradasi lingkungan Hidup. Masih rendah upaya pengelolaan dan upaya pemantauan lingkungan hidup.
2	Alih fungsi kawasan hutan dan lahan gambut menjadi kawasan Budidaya dan penurunan biodiversiti.
3	Masih tingginya Intensitas Terjadi Bencana Alam, dampak perubahan iklim (Banjir, Pasang Air Laut, Angin Badai Longsor, Kebakaran Hutan/Gambut, Erosi, Abrasi pantai, dll) dan Masih Belum Optimal Manajemen Mitigasi Kebencanaan (belum tersedianya jalur evakuasi untuk daerah rawan bencana).
4	Masih tingginya angka penyandang masalah kesejahteraan sosial, tingkat pengangguran, kemiskinan serta masih rendahnya angka IPM (Pendidikan dan Kesehatan).
5	Masih rendahnya daya saing daerah, infrastruktur dan belum optimalnya pemanfaatan SDA (darat dan laut).
6	Belum optimal pemanfaatan potensi kawasan wisata alam yang belum tertata dan Pengembangan kawasan industri berbasis komoditi unggulan daerah.

Sumber : FGD Pokja, 2023

6.1.2. Isu Pembangunan Daerah Strategis

Dalam pelaksanaan KLHS RPJPD, penting untuk memahami konten dan konteks dari sebuah daerah yang akan disusun KLHS-nya. Cara untuk memahami konten dan konteks ini secara singkat dan tepat adalah melalui penyusunan Isu Strategis Daerah. Isu Strategis Daerah/Isu Utama Pasal 16 Permendagri 07 Tahun 2018 menyatakan bahwa laporan KLHS RPJMD/RPJPD yang dimanfaatkan dalam penyusunan dokumen RPJMD/RPJPD digunakan untuk: a. gambaran umum kondisi daerah; b. permasalahan dan isu strategis daerah; c. tujuan; dan d. sasaran strategis. Pasal 18 Permendagri 07 Tahun 2018 menyatakan bahwa Permasalahan dan isu Strategis daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b berupa identifikasi isu Pembangunan Berkelanjutan.

Tabel 6.2. Isu Pembangunan Daerah Strategis Kabupaten Nagan Raya



PEMERINTAH KABUPATEN NAGAN RAYA
KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS (KLHS)
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD)

No.	Isu Pembangunan Daerah Strategis
1	Masih tingginya angka penyandang masalah kesejahteraan sosial, tingkat pengangguran, kemiskinan dan kemiskinan ekstrem.
2	Tingginya penduduk di Kabupaten Nagan Raya yang belum memiliki akses sanitasi layak (jamban sehat)
3	Optimalisasi Kemandirian Pangan
4	Perubahan alih fungsi lahan pertanian menjadi kegiatan industri atau Kawasan terbangun lainnya
5	Banyaknya sentra industri kecil pengolahan makanan di Kabupaten Nagan Raya namun belum mendapatkan perhatian yang maksimal
6	Peningkatan fasilitas kesehatan, kualitas, dan kuantitas tenaga kesehatan
7	Masih rendahnya akses masyarakat terhadap pelayanan dasar berupa Pendidikan
8	Masih rendahnya partisipasi perempuan pada kursi parlemen dan pemerintah daerah
9	Masih rendahnya aksesibilitas masyarakat dalam mendapatkan fasilitas sosial berupa air bersih.
10	Masih tingginya Intensitas Terjadi Bencana Alam, dampak perubahan iklim (Banjir, Pasang Air Laut, Angin Badai Longsor, Kebakaran Hutan/Gambut, Gempa Bumi, Erosi, Abrasi pantai, dll) dan Masih Belum Optimal Manajemen Mitigasi Kebencanaan (belum tersedianya jalur evakuasi untuk daerah rawan bencana).
11	Masih rendahnya pemenuhan kawasan RTH perkotaan di Kabupaten Nagan Raya
12	Kabupaten Nagan Raya belum memiliki dokumen strategi pengurangan resiko bencana
13	Terdapat Jumlah kasus pengaduan lingkungan terkait pencemaran limbah B3
14	Optimalisasi Tata Kelola Lingkungan Hidup, Pelestarian Hutan dan Penanganan Bencana.
15	Ketenagakerjaan, Penurunan Angka Pengangguran dan Perluasan Lapangan Kerja
16	Peningkatan Prasarana dan Sarana Budaya, Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga.
17	Masih rendahnya penciptaan lapangan kerja dalam mengurangi pengangguran.
18	Pertumbuhan Kabupaten Nagan Raya yang cukup pesat membutuhkan dukungan infrastruktur jalan yang memadai
19	Memiliki komoditi unggulan di berbagai sektor yang berpeluang untuk meningkatkan ekspor dan pemenuhan kebutuhan local daerah
20	Masih kurangnya kemampuan dalam membangun tata kelola pemerintahan yang baik.

Sumber : Hasil Analisis, 2023

Isu-isu strategis pembangunan Kabupaten Nagan Raya dirumuskan juga dengan memperhatikan Isu-isu strategis Nasional dan Isu-isu Strategis Aceh. Isu-isu strategis

pembangunan Kabupaten Nagan Raya yang diharapkan dapat diatasi dalam jangka waktu Tahun 2025-2045 yang akan datang yaitu sebagai berikut :

1. Belum optimalnya Penerapan Syariat Islam
2. Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang masih rendah
3. Produktivitas, Stabilitas dan Pertumbuhan Ekonomi yang belum optimal
4. Masih tingginya Angka Kemiskinan
5. Belum terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal, Transparan, dan Akuntabel
6. Belum Terwujudnya Pengelolaan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan
7. Belum mantapnya Infrastruktur yang menghubungkan antar wilayah.

6.2. Keterkaitan Isu Strategis dengan Pencapaian TPB

Guna menentukan TPB prioritas yang akan dirumuskan skenario capaian indikator TPB, maka dilakukan analisis keterkaitan untuk melihat bagaimana keterkaitan antara isu PB strategis dan Isu pembangunan daerah strategis dengan tujuan Pembangunan berkelanjutan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 6.3. Keterkaitan Isu-isu Strategis dengan TPB

Isu PB Strategis	Isu Pembangunan Daerah Strategis	Tujuan	TPB
1. Masih tingginya angka penyandang masalah kesejahteraan sosial, tingkat pengangguran, kemiskinan serta masih rendahnya angka IPM (Pendidikan dan Kesehatan).	Masih tingginya angka penyandang masalah kesejahteraan sosial, tingkat pengangguran, kemiskinan dan kemiskinan ekstrem.	Tujuan 1	Tanpa kemiskinan segala bentuk.
2. Masih terjadi pencemaran dan degradasi lingkungan Hidup. Masih rendah upaya pengelolaan dan upaya pemantauan lingkungan hidup.	Tingginya penduduk di Kabupaten Nagan Raya yang belum memiliki akses sanitasi layak (jamban sehat)		
3. Alih fungsi kawasan hutan dan lahan gambut menjadi kawasan Budidaya dan penurunan biodiversiti.	Optimalisasi Kemandirian Pangan	Tujuan 2	Tanpa Kelaparan, ketahanan pangan
4. Masih tingginya Intensitas Terjadi Bencana Alam, dampak perubahan iklim (Banjir, Pasang Air Laut, Angin Badai Longsor, Kebakaran Hutan/Gambut, Erosi, Abrasi pantai, dll) dan Masih Belum Optimal Manajemen Mitigasi	Perubahan alih fungsi lahan pertanian menjadi kegiatan industri atau Kawasan terbangun lainnya		
	Banyaknya sentra industri kecil pengolahan makanan di Kabupaten Nagan Raya namun belum mendapatkan perhatian yang maksimal	Tujuan 3	Kehidupan sehat dan sejahtera
	Peningkatan fasilitas kesehatan, kualitas, dan kuantitas tenaga kesehatan		



PEMERINTAH KABUPATEN NAGAN RAYA
KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS (KLHS)
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD)

Isu PB Strategis	Isu Pembangunan Daerah Strategis	Tujuan	TPB
Kebencanaan (belum tersedianya jalur evakuasi untuk daerah rawan bencana). 5. Masih tingginya angka penyandang masalah kesejahteraan sosial, tingkat pengangguran, kemiskinan serta masih rendahnya angka IPM (Pendidikan dan Kesehatan). 6. Masih rendahnya daya saing daerah, infrastruktur dan belum optimalnya pemanfaatan SDA (darat dan laut). 7. Belum optimal pemanfaatan potensi kawasan wisata alam yang belum tertata dan Pengembangan kawasan industri berbasis komoditi unggulan daerah.	Masih rendahnya akses masyarakat terhadap pelayanan dasar berupa Pendidikan	Tujuan 4	Pendidikan berkualitas Inklusif
	Masih rendahnya partisipasi perempuan pada kursi parlemen dan pemerintah daerah	Tujuan 5	Kesetaraan gender dan memberdayakan Perempuan.
	Masih rendahnya aksesibilitas masyarakat dalam mendapatkan fasilitas sosial berupa air bersih.	Tujuan 6	Air bersih dan sanitasi layak berkelanjutan
	Masih tingginya Intensitas Terjadi Bencana Alam, dampak perubahan iklim (Banjir, Pasang Air Laut, Angin Badai Longsor, Kebakaran Hutan/Gambut, Gempa Bumi, Erosi, Abrasi pantai, dll) dan Masih Belum Optimal Manajemen Mitigasi Kebencanaan (belum tersedianya jalur evakuasi untuk daerah rawan bencana).	Tujuan 13	Penanganan perubahan iklim dan dampaknya
	Masih rendahnya pemenuhan kawasan RTH perkotaan di Kabupaten Nagan Raya	Tujuan 11	Kota dan Permukiman berkelanjutan
	Kabupaten Nagan Raya belum memiliki dokumen strategi pengurangan resiko bencana		
	Terdapat Jumlah kasus pengaduan lingkungan terkait pencemaran limbah B3	Tujuan 12	Pola produksi dan konsumsi berkelanjutan
	Optimalisasi Tata Kelola Lingkungan Hidup, Pelestarian Hutan dan Penanganan Bencana.	Tujuan 13	Penanganan bencana
	Ketenagakerjaan, Penurunan Angka Pengangguran dan Perluasan Lapangan Kerja	Tujuan 8	Pertumbuhan ekonomi dan pekerjaan layak
	Peningkatan Prasarana dan Sarana Budaya, Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga.	Tujuan 15	Pelestarian dan pemanfaatan berkelanjutan ekosistem darat



PEMERINTAH KABUPATEN NAGAN RAYA
KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS (KLHS)
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD)

Isu PB Strategis	Isu Pembangunan Daerah Strategis	Tujuan	TPB
	Masih rendahnya penciptaan lapangan kerja dalam mengurangi pengangguran.	Tujuan 8	Lapangan kerja dan pertumbuhan ekonomi
	Pertumbuhan Kabupaten Nagan Raya yang cukup pesat membutuhkan dukungan infrastruktur jalan yang memadai	Tujuan 9	Infrastruktur, industri dan inovasi. Pertumbuhan ekonomi dan infrastruktur
	Memiliki komoditi unggulan di berbagai sektor yang berpeluang untuk meningkatkan ekspor dan pemenuhan kebutuhan local daerah	Tujuan 17	Kemitraan untuk mencapai tujuan pembangunan
	Masih kurangnya kemampuan dalam membangun tata kelola pemerintahan yang baik.	Tujuan 16	Perdamaian, keadilan dan kelembagaan yang kokoh

Sumber : Hasil Analisis, 2023

6.3. Penentuan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Prioritas

Penentuan tujuan pembangunan berkelanjutan prioritas dilakukan untuk analisis selanjutnya dengan mengelompokkan usulan isu strategis ke dalam lima kategori bidang, yaitu sosial, ekonomi, lingkungan, hukum, dan tata kelola administrasi daerah, dilakukan penapisan dengan menggunakan teknik pembobotan untuk mengevaluasi setiap TPB dalam setiap kategori. Kriteria yang digunakan dalam pembobotan ini mencakup:

1. Ketidaktercapaian indikator
2. Besaran perbandingan antara rencana anggaran dengan realisasi anggaran
3. Keterkaitan dengan elemen D3TLH dan jasa ekosistem

Pembobotan masing-masing kriteria dilakukan dengan menggunakan metode pembagian kelas interval dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 6.4. Pembobotan Kriteria yang Digunakan Untuk Menentukan TPB Strategis

Kriteria	Kelas Interval	
1. Ketidaktercapaian indikator TPB	1 = 0-40%	Rendah
	2 = 41%-60%	Sedang
	3 = 61% - 100%	Tinggi



PEMERINTAH KABUPATEN NAGAN RAYA
KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS (KLHS)
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD)

2. Perbandingan antara rencana anggaran dengan realisasi anggaran	3 = 0-40% 2 = 41%-60% 1 = 61% - 100%	Rendah Sedang Tinggi
3. Keterkaitan dengan elemen D3TLH dan jasa ekosistem	1 = 0-3 2 = 4-6 3 = 7-9	Rendah Sedang Tinggi

Tabel 6.5. Pembobotan Untuk Menentukan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Prioritas

No TPB	Nama TPB	Jumlah Indikator Tercapai (SS)	Jumlah Indikator Belum Tercapai (SB)	Jumlah Indikator Tidak Ada Data (na)	Total Indikator	Perbandingan Anggaran (Realisasi/Target)	% Indikator Belum Tercapai
1	Tanpa kemiskinan segala bentuk	15	6	3	24	100%	25.00%
2	Tanpa Kelaparan, ketahanan pangan	3	6	1	10	100%	60.00%
3	Kehidupan sehat dan sejahtera	18	7	4	29	100%	24.14%
4	Pendidikan berkualitas Inklusif	9	3	0	12	100%	25.00%
5	Kesetaraan gender dan memberdayakan perempuan	8	2	4	14	100%	14.29%
6	Air bersih dan sanitasi layak berkelanjutan	5	7	4	16	100%	43.75%
7	Menjamin akses energi yang terjangkau	0	0	0	0	100%	0.00%
8	Pertumbuhan ekonomi dan pekerjaan layak	10	6	3	19	100%	31.58%
9	Infrastruktur, industri dan inovasi	4	4	5	13	100%	30.77%
10	Mengurangi kesenjangan Intra antra negara	5	1	5	11	100%	9.09%
11	Kota dan pemukiman berkelanjutan inklusif	10	0	1	11	100%	0.00%
12	Pola produksi dan konsumsi berkelanjutan	2	0	3	5	100%	0.00%
13	Penanganan perubahan iklim dan dampaknya	2	0	0	2	100%	0.00%
14	Pemanfaatan SDA Kelautan dan Samudera	0	0	0	0	100%	0.00%
15	Pelestarian dan pemanfaatan berkelanjutan ekosistem darat	3	1	0	4	100%	25.00%
16	Perdamaian, keadilan dan kelembagaan yang kokoh	11	3	7	21	100%	14.29%
17	Kemitraan untuk mencapai tujuan pembangunan	6	4	5	15	100%	26.67%
	Jumlah	111	50	45	206		

Sumber : Hasil Analisis, 2023



PEMERINTAH KABUPATEN NAGAN RAYA
KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS (KLHS)
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD)

Tabel 6.6. Pembobotan Untuk Menentukan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Prioritas

No TPB	Nama TPB	Jumlah Indikator Tercapai (SS)	Jumlah Indikator Belum Tercapai (SB)	Jumlah Indikator Tidak Ada Data (na)	Total Indikator	Perbandingan Anggaran (Realisasi/Target)	% Indikator Belum Tercapai	Keterkaitan dengan D3TLH
1	Tanpa kemiskinan segala bentuk	15	6	3	24	100%	25.00%	13
2	Tanpa Kelaparan, ketahanan pangan	3	6	1	10	100%	60.00%	16
3	Kehidupan sehat dan sejahtera	18	7	4	29	100%	24.14%	12
4	Pendidikan berkualitas Inklusif	9	3	0	12	100%	25.00%	1
5	Kesetaraan gender dan memberdayakan perempuan	8	2	4	14	100%	14.29%	3
6	Air bersih dan sanitasi layak berkelanjutan	5	7	4	16	100%	43.75%	12
7	Menjamin akses energi yang terjangkau	0	0	0	0	100%	0.00%	0
8	Pertumbuhan ekonomi dan pekerjaan layak	10	6	3	19	100%	31.58%	11
9	Infrastruktur, industri dan inovasi	4	4	5	13	100%	30.77%	13
10	Mengurangi kesenjangan Intra antra negara	5	1	5	11	100%	9.09%	0
11	Kota dan pemukiman berkelanjutan inklusif	10	0	1	11	100%	0.00%	17
12	Pola produksi dan konsumsi berkelanjutan	2	0	3	5	100%	0.00%	20
13	Penanganan perubahan iklim dan dampaknya	2	0	0	2	100%	0.00%	0
14	Pemanfaatan SDA Kelautan dan Samudera	0	0	0	0	100%	0.00%	0
15	Pelestarian dan pemanfaatan berkelanjutan ekosistem darat	3	1	0	4	100%	25.00%	17
16	Perdamaian, keadilan dan kelembagaan yang kokoh	11	3	7	21	100%	14.29%	0
17	Kemitraan untuk mencapai tujuan pembangunan	6	4	5	15	100%	26.67%	0
	Jumlah	111	50	45	206			135

Sumber : Hasil Analisis, 2023

Tabel 6.7. Pembobotan Menentukan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Prioritas Tinggi.

No TPB	SS	SB	NA	Total Indikator	% Indikator Belum Tercapai	Perbandingan Anggaran (Realisasi/Target)	Keterkaitan dengan D3TLH	Bobot Tidak Tercapai	Bobot Anggaran	Bobot Keterkaitan dengan D3TLH	Total Bobot	Keputusan
1	15	6	3	24	25.00%	100%	13	2	3	2	7	Prioritas Tinggi
2	3	6	1	10	60.00%	100%	16	3	3	3	9	Prioritas Tinggi
3	18	7	4	29	24.14%	100%	12	2	3	2	7	Prioritas Tinggi
4	9	3	0	12	25.00%	100%	1	2	3	1	6	Prioritas Sedang
5	8	2	4	14	14.29%	100%	3	1	3	1	5	Prioritas Sedang
6	5	7	4	16	43.75%	100%	12	3	3	2	8	Prioritas Tinggi
7	0	0	0	0	0.00%	100%	0	1	3	1	5	Prioritas Sedang
8	10	6	3	19	31.58%	100%	11	2	3	2	7	Prioritas Tinggi
9	4	4	5	13	30.77%	100%	13	2	3	2	7	Prioritas Tinggi
10	5	1	5	11	9.09%	100%	0	2	3	1	6	Prioritas Sedang
11	10	0	1	11	0.00%	100%	17	1	3	3	7	Prioritas Tinggi
12	2	0	3	5	0.00%	100%	20	1	3	3	7	Prioritas Tinggi
13	2	0	0	2	0.00%	100%	0	1	3	1	5	Prioritas Sedang
14	0	0	0	0	0.00%	100%	0	1	3	1	5	Prioritas Sedang
15	3	1	0	4	25.00%	100%	17	2	3	3	8	Prioritas Tinggi
16	11	3	7	21	14.29%	100%	0	1	3	1	5	Prioritas Sedang
17	6	4	5	15	26.67%	100%	0	2	3	1	6	Prioritas Sedang
111	50	45	206				135					

Sumber : Hasil Analisis, 2023

Ket : Tota bobot 1 – 3 (rendah) ; 4-6 (sedang); 7-9 (tinggi)

Berdasarkan hasil pembobotan dengan diperoleh hasil berupa TPB prioritas tinggi di Kabupaten Nagan Raya, antara lain ; tujuan 1, tujuan 2, tujuan 3, tujuan 6, tujuan 8, tujuan 9, tujuan 11, tujuan 12, dan tujuan 15. Selanjutnya, pada masing-masing TPB prioritas dilakukan pengelompokan terhadap indikator-indikator yang belum memenuhi target nasional dan belum dilaksanakan (SB).

6.4. Skenario Pencapaian Indikator TPB Prioritas

Skenario peningkatan indikator TPB prioritas yang belum mencapai target dilakukan melalui perhitungan proyeksi capaian sampai tahun 2030 dengan mempertimbangkan trend capaian daLam kurun waktu 2016-2020. Target nasional ditentukan berdasarkan Perpres No. 59 Tahun 2017/ Perpres No. 18 Tahun 2020, sedangkan indikator dan satuan mengikuti tujuan pembangunan berkelanjutan. Perhitungan proyeksi capaian indikator dilakukan melalui dua tahap yakni proyeksi tanpa upaya tambahan (BAU) dan proyeksi dengan upaya tambahan. Seluruh indikator yang belum mencapai target pada TPB prioritas dilakukan proyeksi BAU untuk melihat proyeksi ketercapaian pada tahun 2030,



PEMERINTAH KABUPATEN NAGAN RAYA
KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS (KLHS)
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD)

apabila terdapat indikator yang masih belum mencapai target nasional setelah dilakukan proyeksi capaian, maka dilakukan proyeksi dengan upaya tambahan untuk mencapai target. Indikator TPB prioritas yang belum mencapai target adalah sebagai berikut.

Tabel 6.8. Indikator yang Belum Mencapai Target Nasional (SB) dalam TPB Prioritas (SD)

TPB	Nama TPB	No. Indikator	Nama Indikator	Kategori
1.	Mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuk dimanapun	1.2.1*	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur.	SB
		1.3.1.(a)	Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan.	na
		1.3.1.(b)	Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan.	na
		1.3.1.(d)	Jumlah rumah tangga yang mendapatkan bantuan tunai bersyarat/Program Keluarga Harapan.	SB
		1.4.1.(d)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak dan berkelanjutan.	SB
		1.4.1.(e)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan.	SB
		1.4.1.(k)	Persentase rumah tangga miskin dan rentan yang sumber penerangan utamanya listrik baik dari PLN dan bukan PLN.	na
2.	Menghilangkan Kelaparan, Mencapai Ketahanan Pangan dan Gizi yang Baik	2.2.2*	Prevalensi malnutrisi (berat badan/tinggi badan) anak pada usia kurang dari 5 tahun, berdasarkan tipe.	na
		2.2.2.(a)	Prevalensi anemia pada ibu hamil.	na
3	Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Sejahtera	3.1.1*	Angka Kematian Ibu (AKI).	SB
		3.1.2*	Proporsi perempuan pernah kawin umur 15- 49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya ditolong oleh tenaga kesehatan	na
		3.1.2.(a)	Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan.	SB
		3.2.1*	Angka Kematian Balita (AKBa) per 1000 kelahiran hidup.	SB
		3.2.2*	Angka Kematian Neonatal (AKN) per 1000 kelahiran	SB
		3.2.2.(b)	Persentase kabupaten/kota yang mencapai 80% imunisasi dasar lengkap pada bayi.	na
		3.3.1.(a)	Prevalensi HIV pada populasi dewasa.	SB
		3.3.2.(a)	Insiden Tuberkulosis (ITB) per 100.000 penduduk.	SB
		3.3.3*	Kejadian Malaria per 1000 orang.	na
		3.4.1.(b)	Prevalensi tekanan darah tinggi.	SB
		3.4.1.(c)	Prevalensi obesitas pada penduduk umur ≥ 18 tahun.	na



PEMERINTAH KABUPATEN NAGAN RAYA
KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS (KLHS)
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD)

TPB	Nama TPB	No. Indikator	Nama Indikator	Kategori
		3.a.1*	Persentase merokok pada penduduk umur ≥ 15 tahun.	na
		3.2.1*	Angka Kematian Balita (AKBa) per 1000 kelahiran hidup.	SB
		3.2.2*	Angka Kematian Neonatal (AKN) per 1000 kelahiran	SB
4	Menjamin Pendidikan yang Berkualitas	4.1.1.(b)	Persentase SMP/MTs berakreditasi minimal B.	na
		4.1.1.(d)	Angka Partisipasi Kasar (APK)	SB
		4.1.1.(e)	Angka Partisipasi Kasar (APKSMP/MTs/ sederajat.	SB
		4.1.1.(g)	Rata-rata lama sekolah penduduk umur ≥ 15 tahun.	SB
		4.2.2.(a)	Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).	SB
		4.5.1*	Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) perempuan/laki-laki di (1) SD/MI/ sederajat; (2) SMP/MTs/ sederajat; (3) SMA/SMK/MA/ sederajat; dan Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) perempuan/laki-laki di (4) Perguruan Tinggi.	SB
5	Mencapai Kesenjangan Gender dan Memberdayakan Kaum Perempuan	5.1.1*	Jumlah kebijakan yang responsif gender mendukung pemberdayaan perempuan.	SB
		5.5.1*	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di parlemen tingkat pusat, parlemen daerah dan pemerintah daerah.	SB
6	Menjamin Ketersediaan Air Bersih dan Sanitasi yang Berkelanjutan	6.1.1.(a)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak.	SB
		6.1.1.(c)	Proporsi populasi yang memiliki akses layanan sumber air minum aman dan berkelanjutan.	SB
		6.2.1(b)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak.	SB
		6.2.1.(f)	Proporsi rumah tangga yang terlayani sistem pengelolaan air limbah terpusat.	na
		6.2.1.(b)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak.	SB
		6.3.1.(b)	Proporsi rumah tangga yang terlayani sistem pengelolaan lumpur tinja.	SB
7	Menjamin Akses Energi yang Terjangkau, Andal, Berkelanjutan dan Modern		Bukan wewenang kabupaten	BK
8	Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan	8.1.1.(a)	Laju pertumbuhan PDB per kapita.	SS
		8.1.1(a)	PDB per kapita.	SS
		8.5.2*	Tingkat pengangguran terbuka berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur.	SB



PEMERINTAH KABUPATEN NAGAN RAYA
KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS (KLHS)
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD)

TPB	Nama TPB	No. Indikator	Nama Indikator	Kategori
		8.6.1*	Persentase usia muda (15-24 tahun) yang sedang tidak sekolah, bekerja atau mengikuti pelatihan (NEET).	na
		8.9.1 (a)	Jumlah wisatawan mancanegara.	na
		8.9.1. (b)	Jumlah kunjungan wisatawan nusantara.	SS
9	Membangun Infrastruktur Tangguh, Industri Berkelanjutan dan Inovasi	9.1.1 (a)	Kondisi Mantap Jalan (Kabupaten)	na
		9.2.1.(a)	Jumlah devisa sektor pariwisata.	na
10	Mengurangi Kesenjangan	10.1.1*	Koefisien Gini.	SB
		10.1.1(c)	Jumlah desa tertinggal.	SB
		10.4.(b)	Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang	na
		10.3.1.(d)	Jumlah kebijakan yang diskriminatif dalam 12 bulan lalu berdasarkan pelarangan	na
11	Menjadikan Kota dan Permukiman Inklusif, Aman, Tangguh & Berkelanjutan	11.1.1.(a)	Proporsi rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau.	SB
		11.5.1*	Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.	SB
		11.5.1(a)	Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI).	SB
		11.5.1.(c)	Jumlah sistem peringatan dini cuaca dan iklim serta	SB
		11.6.1(a)	Persentase sampah perkotaan yang tertangani.	SB
12	Menjamin Pola Produksi dan Konsumsi yang Berkelanjutan	12.4.1(a)	Jumlah peserta PROPER yang mencapai minimal ranking	na
		12.4.2(a)	Jumlah limbah B3 yang terkelola dan proporsi limbah B3 yang diolah sesuai peraturan perundangan (sektor industri)	na
		12.5.1(a)	Jumlah timbulan sampah yang didaur ulang.	na
13	Mengambil Tindakan Cepat untuk Mengatasi Dampak Perubahan Iklim	13.1.1*	Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat nasional dan daerah.	na
		13.1.2*	Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.	na
14	Melestarikan dan memanfaatkan secara berkelanjutan sumber daya kelautan dan samudera untuk pembangunan berkelanjutan		Bukan wewenang kabupaten	BK



PEMERINTAH KABUPATEN NAGAN RAYA
KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS (KLHS)
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD)

TPB	Nama TPB	No. Indikator	Nama Indikator	Kategori
15	Melindungi, Merestorasi dan Meningkatkan Pemanfaatan Berkelanjutan Ekosistem Daratan, Mengelola Hutan secara Lestari, Menghentikan Penggurunan, Memulihkan Degradasi Lahan, serta Menghentikan Kehilangan Keanekaragaman Hayati	15.1.1.(a)	Proporsi tutupan hutan terhadap luas lahan keseluruhan.	SB
		15.9.1.(a)	Dokumen rencana pemanfaatan keanekaragaman hayati.	SB
16	Menguatkan Masyarakat yang Inklusif dan Damai, Menyediaan Akses Keadilan untuk Semua, dan Membangun Kelembagaan yang Efektif, Akuntabel, & Inklusif di Semua Tingkatan	16.6.1(a)	Persentase peningkatan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	SS
		16.6.1(b)	Persentase peningkatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) Pemerintah Daerah	SS
		16.9.1*	Proporsi anak umur di bawah 5 tahun yang kelahirannya dicatat oleh lembaga pencatatan sipil, menurut umur.	SS
		16.9.1.(a)	Persentase kepemilikan akta lahir untuk penduduk 40% berpendapatan bawah.	na
		16.b.1.(a)	Jumlah kebijakan yang diskriminatif dalam 12 bulan lalu berdasarkan pelarangan diskriminasi menurut hukum HAM Internasional.	na
		16.7.1(a)	Persentase keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).	na
		16.9.1(b)	Persentase anak yang memiliki akta kelahiran.	SB
17	Menguatkan Sarana Pelaksanaan dan Merevitalisasi Kemitraan Global untuk Pembangunan Berkelanjutan	17.8.1*	Proporsi individu yang menggunakan internet.	na

6.5. Alternatif Skenario Capaian TPB Prioritas

Perumusan skenario merupakan alternatif proyeksi terhadap kondisi lingkungan hidup dan capaian tujuan pembangunan berkelanjutan dengan menggunakan analisis secara *Business As Usual* (BAU) terhadap tren perubahan kondisi lingkungan dan pencapaian target TPB pada tahun 2022 berdasarkan kinerja Kabupaten Nagan Raya yang telah dilakukan selama ini. Kondisi lingkungan hidup terutama terkait dengan status daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup serta jasa ekosistem di Kabupaten Nagan Raya. Proyeksi secara umum dilakukan dengan pendekatan linier atau dinamik atau BAU (*Business As Usual*) berdasarkan tren yang terjadi saat ini serta gap terhadap indikator dalam TPB nasional yang dituangkan di Perpres 59/2017 yang merupakan target sampai tahun 2030. Terdapat dua jenis alternatif skenario proyeksi pencapaian TPB yaitu :

- Alternatif proyeksi tanpa upaya tambahan diperoleh dari hasil proyeksi yang menunjukkan target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan pada posisi yang dipertahankan dan telah melampaui target yang ditetapkan secara nasional.
- Alternatif proyeksi dengan upaya tambahan disusun untuk percepatan pencapaian target tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Upaya tambahan disusun dengan memperhatikan:
(a) potensi, daya saing dan inovasi daerah; (b) daya dukung dan daya tampung daerah; (c) pertimbangan lain sesuai dengan kebutuhan daerah.

6.6. Proyeksi Capaian Indikator TPB

6.6.1. Metode Proyeksi Capaian Indikator TPB

Laporan KLHS RPJPD Kabupaten Nagan Raya ini menggunakan pendekatan “*System Dynamics*” yang menggunakan perspektif berdasarkan umpan balik informasi dan *delays* untuk memahami dinamika perilaku yang kompleks dari sistem fisika, sistem biologis dan sistem sosial. Asumsi utama dalam pendekatan “*System Dynamics*” adalah struktur fenomena proses pembuatan keputusan yang merupakan suatu kumpulan (*assembly*) dari struktur-struktur kausal yang melingkar dan tertutup (Stermen, 2000). Formulasi model dilakukan dengan menggunakan *software Veneta Simulation (Vensim PLE)*, yang dilanjutkan dengan simulasi. Menurut Muhammadi & E., (2001) simulasi adalah peniruan suatu gejala atau proses dan bertujuan untuk memahami gejala atau proses tersebut, membuat analisis dan peramalan/proyeksi perilaku yang akan terjadi dimasa depan. Dalam penyusunan KLHS

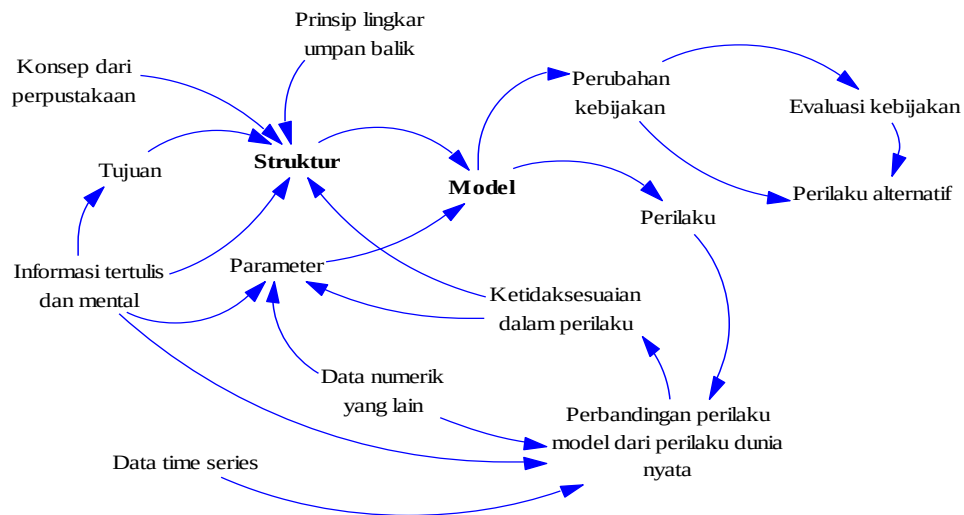


RPJPD/RPJMD terutama di Pulau Jawa sudah mulai menggunakan model sistem dinamik ini dalam melakukan proyeksi indikator TPB untuk selama 30 tahun kedepan. Jadi model sistem dinamik ini sangat handal dalam memberikan perkiraan/proyeksi melalui beberapa skenario kebijakan sehingga dapat mencapai target indikator TPB sesuai dalam Perpres 59/2017.

Penggunaan pendekatan *system dynamics* dalam kajian ini, didasari oleh keyakinan bahwa metodologi ini memiliki beberapa kelebihan dibandingkan dengan metode peramalan konvensional Lyneis, (2000). Kelebihan pendekatan ini dapat dijelaskan sebagai berikut: 1) Model sistem dinamik dapat memberikan perkiraan yang lebih handal dari pada model statistik, 2) Model sistem dinamik menyediakan cara untuk memahami penyebab perilaku, mendeteksi terhadap perubahan dini dalam struktur dan penentuan faktor-faktor yang meramalkan perilaku secara signifikan dan sensitif, dan 3) model sistem dinamik memungkinkan penentuan skenario yang masuk akal sebagai masukan untuk keputusan dan kebijakan.

Pengolahan dan analisis data menggunakan *software* Vensim PLE yang akan menghasilkan diagram sebab akibat, pembuatan diagram alir atau diagram sub model (*level* dan *rate*) dari sistem yang dikaji, tahapan pengembangan model dari sistem, pengujian asumsi model, dan tahapan simulasi. Pemodelan dalam *System Dynamics* adalah untuk meningkatkan pemahaman tentang suatu permasalahan, mengidentifikasi kebijakan sebagai solusi untuk keinginan kondisi yang layak di dalam sistem, serta dapat diimplementasikan sebagai suatu proses pembelajaran (Rodriguez-Ulloa & Paucar Caceres, 2007).

Data model mental, tulisan (literatur), dan numerik yang telah dikumpulkan diolah menjadi suatu rancangan model dengan menggunakan metodologi *system dynamics* (Gambar 1) yang akan menghasilkan diagram sebab akibat, pembuatan diagram alir atau diagram sub model (*level* dan *rate*) dari sistem yang dikaji, tahapan pengembangan model dari sistem, pengujian asumsi model, dan tahapan simulasi.



Gambar 6.3. Perancangan Model Sistem Dinamik (Tasrif, 2006)

Struktur fisik dan keputusan dalam model sistem dinamik dikembangkan dari hasil observasi dan wawancara berupa data model mental, data numerik, dan informasi tertulis, serta dalam model sistem dinamik juga dikembangkan dari data konseptual yang berasal dari kepustakaan dan dinas-dinas terkait yaitu RPJMD, RPJP, KLHS RTRW Kabupaten Nagan Raya dan Data dari Kantor BPS yang relevan. Kemudian, model tersebut disimulasikan berdasarkan beberapa skenario yang membandingkan antara perilaku dunia nyata dan perilaku model. Pengembangan skenario tersebut, didasarkan pada perubahan parameter dan/atau perubahan struktur model berupa kebijakan baru.

6.6.2. Proyeksi Capaian Indikator Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/ sederajat.

Tujuan 1 :

Pendidikan Berkualitas

Target :

Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah tanpa dipungut biaya, setara, dan berkualitas, yang mengarah pada capaian pembelajaran yang relevan dan efektif.

Nomor Indikator :

1.4.1.(h)*

Keterkaitan dengan D3TLH:

Tidak ada keterkaitan dengan D3TLH.



PEMERINTAH KABUPATEN NAGAN RAYA
KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS (KLHS)
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD)

Proyeksi Capaian Indikator TPB :

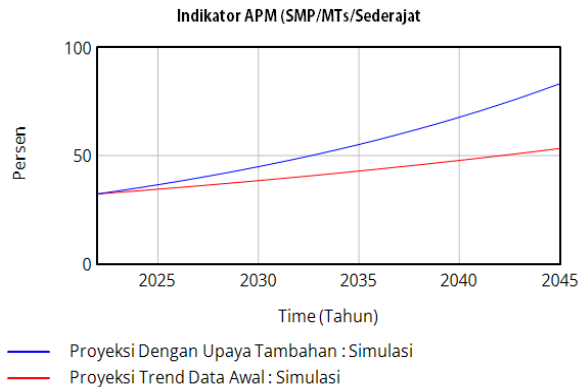
Tabel 6.9. Proyeksi Capaian Indikator TPB

No	Tahun	Proyeksi BAU	Proyeksi Dgn Upaya Tambahan	No	Tahun	Proyeksi BAU	Proyeksi Dgn Upaya Tambahan
1	2022	32,34%	32,34%	13	2034	41,99%	49,62%
2	2023	33,05%	33,70%	14	2035	42,91%	52,99%
3	2024	33,77%	35,11%	15	2036	43,85%	57,53%
4	2025	34,52%	36,59%	16	2037	44,82%	59,95%
5	2026	35,28%	38,13%	17	2038	45,80%	62,46%
6	2027	36,05%	39,73%	18	2039	46,82%	65,09%
7	2028	36,85%	41,39%	19	2040	47,85%	67,83%
8	2029	37,66%	43,13%	20	2041	49,98%	70,67%
9	2030	38,48%	44,95%	21	2042	49,97%	73,64%
10	2031	39,33%	46,83%	22	2043	51,07%	76,73%
11	2032	40,20%	48,83%	23	2044	52,19%	79,95%
12	2033	41,08%	50,85%	24	2045	53,34%	83,31%

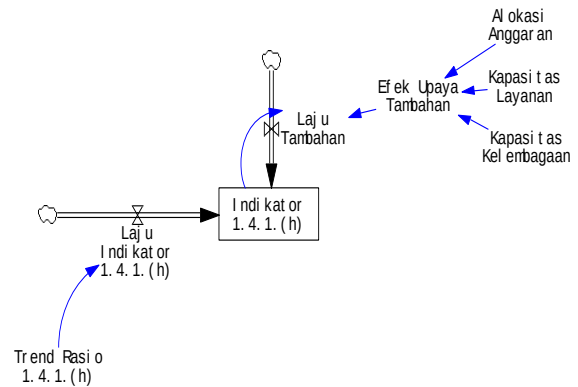
Jika dilihat pada tabel dimana pada tahun 2021: 2022: APM pada tahun ini adalah 32,34% baik dalam proyeksi BAU maupun dengan upaya tambahan. 2023-2045: Dari tahun 2023 hingga 2045, terjadi peningkatan secara bertahap dalam APM baik dalam proyeksi BAU maupun dengan upaya tambahan. Namun, penting untuk dicatat bahwa dalam proyeksi dengan upaya tambahan, peningkatan APM cenderung lebih signifikan dibandingkan dengan proyeksi BAU. Hal ini menunjukkan bahwa upaya tambahan yang diterapkan berhasil memberikan dampak positif yang lebih besar dalam meningkatkan partisipasi siswa pada jenjang SMP/MTs/ sederajat.

Perbedaan antara BAU dan Upaya Tambahan: Pada umumnya, proyeksi dengan upaya tambahan menunjukkan peningkatan yang lebih besar dalam APM dari tahun ke tahun dibandingkan dengan proyeksi BAU. Ini menunjukkan bahwa upaya tambahan seperti kebijakan pendidikan yang lebih inklusif, peningkatan aksesibilitas pendidikan, dan program-program khusus untuk meningkatkan partisipasi siswa memainkan peran penting dalam meningkatkan APM secara signifikan di masa depan.

Jadi, proyeksi capaian indikator APM SMP/MTs/ sederajat berdasarkan data tersebut memberikan gambaran tentang tingkat partisipasi siswa pada jenjang tersebut dalam beberapa tahun ke depan, baik dengan mempertimbangkan kondisi bisnis seperti biasa (BAU) maupun dengan upaya tambahan. Upaya tambahan yang diterapkan menunjukkan dampak positif yang lebih besar dalam meningkatkan APM dari tahun ke tahun.



Gambar 6.4. Proyeksi Data Awal dan Dengan Upaya Tambahan Indikator APM (SMP/MTs/Sederajat)



Gambar 6.5. Diagram Indikator APM (SMP/MTs/Sederajat)

Untuk memprediksi kondisi persentase penduduk miskin kabupaten Nagan Raya pada tahun 2030 maka perlu dilakukan proyeksi capaian berdasarkan data tahun sebelumnya. Proyeksi capaian ini dilakukan tanpa upaya tambahan atau dalam kondisi BAU (*Business Analysis Usually*) dan dengan Upaya tambahan. Hasil proyeksi tanpa upaya tambahan (BAU) menunjukkan kecenderungan yang terus naik, sampai tahun 2030 baru mencapai target Perpes 59/2017 sebesar 38,48%. Sedangkan hasil proyeksi dengan upaya tambahan menunjukkan kecenderungan yang terus naik yang lebih cepat dibandingkan tanpa upaya tambahan sampai tahun 2030 sudah tercapai target sebesar 44,95%, tahun ke tahun.

Isu Strategis:

Masih rendahnya Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/ sederajat di Kabupaten Nagan Raya;

Rekomendasi :

Sasaran	Strategi dan Arah Kebijakan Tambahan	Pelaksana
Dapat mencapai peningkatan yang signifikan dalam Dapat mencapai peningkatan yang signifikan dalam APM SMP/MTs/ sederajat	1. Peningkatan Aksesibilitas: Meningkatkan aksesibilitas pendidikan dengan memperluas jaringan sekolah dan meningkatkan infrastruktur pendidikan di daerah-daerah terpencil atau terpinggirkan. Ini termasuk pembangunan sekolah baru, peningkatan transportasi, dan penyediaan fasilitas pendukung seperti beasiswa dan bantuan biaya pendidikan ; 2. Program Beasiswa dan Bantuan Keuangan: Menyediakan program beasiswa dan bantuan keuangan untuk siswa dari keluarga berpenghasilan rendah atau daerah terpencil. Ini dapat membantu mengurangi hambatan finansial yang sering menjadi faktor utama dalam ketidakpartisipasian dalam pendidikan menengah.	Dinas Pendidikan



PEMERINTAH KABUPATEN NAGAN RAYA
KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS (KLHS)
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD)

	3. Peningkatan Infrastruktur Pendidikan: Melakukan investasi dalam infrastruktur pendidikan, termasuk pembangunan sekolah baru, perbaikan fasilitas fisik yang sudah ada, serta peningkatan aksesibilitas transportasi bagi siswa yang tinggal di daerah terpencil. 4. Pemberdayaan Komunitas Lokal: Melibatkan komunitas lokal dalam perencanaan dan implementasi kebijakan pendidikan. Ini termasuk memperkuat peran orang tua, pemimpin masyarakat, dan tokoh agama dalam mendukung pendidikan anak-anak mereka.	

6.6.3. Proyeksi Capaian Indikator Angka Partisipasi Kasar APK SMP/MTs/ sederajat.

Tujuan 1 :

Pendidikan Berkualitas

Target :

Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah tanpa dipungut biaya, setara, dan berkualitas, yang mengarah pada capaian pembelajaran yang relevan dan efektif.

Nomor Indikator :

4.1.1. (e)*

Keterkaitan dengan D3TLH:

Tidak ada keterkaitan dengan D3TLH.

Proyeksi Capaian Indikator TPB :

Tabel 6.10. Proyeksi Capaian Indikator TPB

No	Tahun	Proyeksi BAU	Proyeksi Dgn Upaya Tambahan	No	Tahun	Proyeksi BAU	Proyeksi Dgn Upaya Tambahan
1	2022	83,62%	83,62%	13	2034	103,58%	130,82%
2	2023	85,13%	86,80%	14	2035	105,45%	135,79%
3	2024	86,66%	90,10%	15	2036	107,34%	140,95%
4	2025	88,22%	93,52%	16	2037	109,28%	146,31%
5	2026	89,81%	97,07%	17	2038	111,24%	151,87%
6	2027	91,42%	100,62%	18	2039	113,25%	157,64%
7	2028	93,07%	104,59%	19	2040	115,28%	163,63%
8	2029	94,74%	108,57%	20	2041	117,36%	169,85%
9	2030	96,45%	112,69%	21	2042	119,47%	176,30%
10	2031	98,18%	116,97%	22	2043	121,62%	183,00%
11	2032	99,95%	121,42%	23	2044	123,81%	189,96%
12	2033	101,75%	126,03%	24	2045	126,04%	197,17%

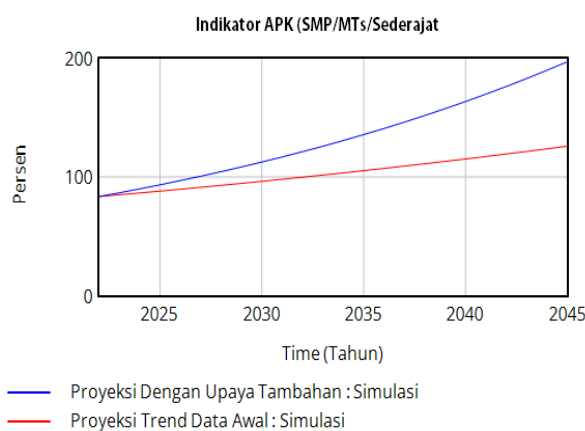
Jika dilihat pada tabel dimana Tren Peningkatan: Dari tahun 2022 hingga 2045, baik dalam skenario BAU maupun dengan upaya tambahan, terjadi peningkatan yang konsisten dalam APK untuk SMP/MTs/ sederajat. Hal ini mengindikasikan kemajuan dalam akses dan partisipasi siswa dalam pendidikan menengah di Indonesia. Dampak Upaya Tambahan, Dalam setiap tahun, proyeksi APK dengan upaya tambahan selalu lebih tinggi daripada proyeksi BAU. Ini menunjukkan bahwa upaya tambahan yang dilakukan berhasil meningkatkan partisipasi siswa dalam jenjang SMP/MTs/ sederajat secara signifikan.

Peningkatan yang Signifikan: Pada tahun 2045, misalnya, proyeksi APK dalam skenario BAU mencapai 126,04%, sedangkan dengan upaya tambahan mencapai 197,17%. Perbedaan yang signifikan ini menunjukkan bahwa upaya tambahan tersebut memiliki dampak yang besar dalam meningkatkan partisipasi siswa.

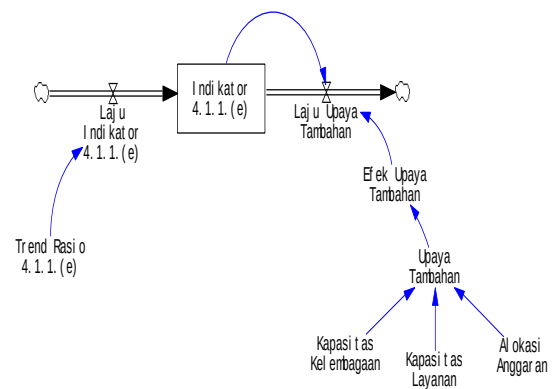
Kesempatan Pendidikan: Dengan adanya tren peningkatan APK, diharapkan bahwa lebih banyak siswa akan memiliki kesempatan untuk mengakses pendidikan menengah, yang dapat meningkatkan kualitas hidup mereka dan kontribusi mereka terhadap pembangunan negara.

Perhatian Terhadap Kualitas: Selain fokus pada peningkatan partisipasi, penting juga untuk memperhatikan kualitas pendidikan yang disediakan dalam jenjang SMP/MTs/ sederajat. Hal ini meliputi kualifikasi guru, kurikulum yang relevan, dan fasilitas pendidikan yang memadai.

Dengan terus menerapkan upaya tambahan yang efektif dan memperhatikan kualitas pendidikan, diharapkan bahwa peningkatan dalam APK untuk SMP/MTs/ sederajat akan berkelanjutan dan memberikan manfaat yang signifikan bagi pembangunan pendidikan.



Gambar 6.6. Proyeksi Data Awal dan Dengan Upaya Tambahan Indikator APK (SMP/MTs/Sederajat)



Gambar 6.7. Diagram Indikator APK (SMP/MTs/Sederajat)

Untuk memprediksi kondisi persentase Dapat mencapai peningkatan yang signifikan dalam Angka Partisipasi Kasar APK untuk SMP/MTs/ sederajat Nagan Raya pada tahun 2030 maka perlu dilakukan proyeksi capaian berdasarkan data tahun sebelumnya. Proyeksi capaian ini dilakukan tanpa upaya tambahan atau dalam kondisi BAU (Bisnis Analysis Usually) dan dengan Upaya tambahan. Hasil proyeksi tanpa upaya tambahan (BAU) menunjukkan kecenderungan yang terus menurun, sampai tahun 2030 baru mencapai target Perpes 59/2017 sebesar 100%. Sedangkan hasil proyeksi dengan upaya tambahan menunjukkan kecenderungan yang terus meningkat yang lebih cepat dibandingkan tanpa upaya tambahan sampai tahun 2030 sudah tercapai target sebesar 112,69%.

Isu Strategis :

Masih rendahnya Angka Partisipasi Kasar APK untuk SMP/MTs/ sederajat di Kabupaten Nagan Raya;



PEMERINTAH KABUPATEN NAGAN RAYA
KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS (KLHS)
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD)

Rekomendasi :

Sasaran	Strategi dan Arah Kebijakan Tambahan	Pelaksana
Dapat mencapai peningkatan yang signifikan dalam Angka Partisipasi Kasar APK untuk SMP/MTs/ sederajat	1. Peningkatan Aksesibilitas: Meningkatkan aksesibilitas pendidikan dengan memperluas jaringan sekolah dan meningkatkan infrastruktur pendidikan di daerah-daerah terpencil atau terpinggirkan. Ini termasuk pembangunan sekolah baru, peningkatan transportasi, dan penyediaan fasilitas pendukung seperti beasiswa dan bantuan biaya pendidikan ; 2. Program Beasiswa dan Bantuan Keuangan: Menyediakan program beasiswa dan bantuan keuangan untuk siswa dari keluarga berpenghasilan rendah atau daerah terpencil. Ini dapat membantu mengurangi hambatan finansial yang sering menjadi faktor utama dalam ketidakpartisipasian dalam pendidikan menengah. 3. Peningkatan Infrastruktur Pendidikan: Melakukan investasi dalam infrastruktur pendidikan, termasuk pembangunan sekolah baru, perbaikan fasilitas fisik yang sudah ada, serta peningkatan aksesibilitas transportasi bagi siswa yang tinggal di daerah terpencil. 4. Pemberdayaan Komunitas Lokal: Melibatkan komunitas lokal dalam perencanaan dan implementasi kebijakan pendidikan. Ini termasuk memperkuat peran orang tua, pemimpin masyarakat, dan tokoh agama dalam mendukung pendidikan anak-anak mereka.	Dinas Pendidikan

6.6.4. Proyeksi Capaian Indikator Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup.

Tujuan 1 :

Kehidupan sehat sejahtera

Target :

Pada tahun 2045 menurunnya angka kematian bayi per 1000 kelahiran hidup menjadi 24 atau setara dengan 2,4% (Target Perpes 59/2017)

Nomor Indikator :

3.2.1*(b)

Keterkaitan dengan D3TLH:

Indikator ini terkait dengan Jumlah bayi sampai usia 28 hari yang meninggal di suatu wilayah pada kurun waktu tertentu per 1000 kelahiran hidup di wilayah dan pada kurun waktu yang sama.

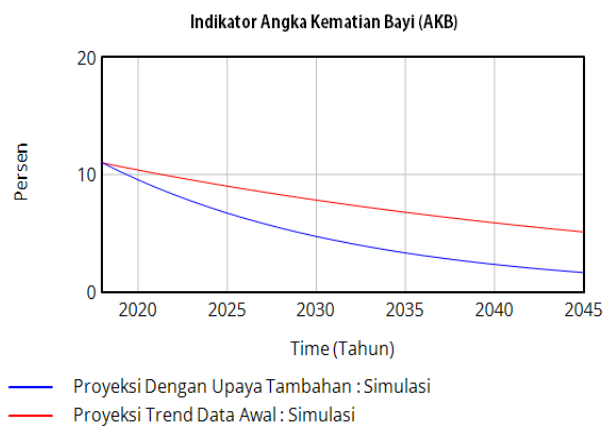
Proyeksi Capaian Indikator TPB :

Tabel 6.11. Proyeksi Capaian Indikator

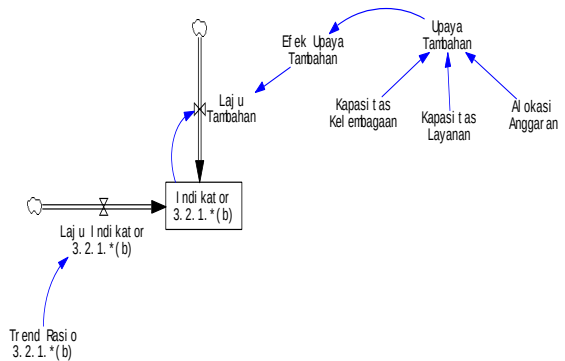
No	Tahun	Proyeksi BAU	Proyeksi Dgn Upaya Tambahan	No	Tahun	Proyeksi BAU	Proyeksi Dgn Upaya Tambahan
1	2018	11,00%	11,00%	15	2032	7.39%	4.10%
2	2019	10.69%	10.25%	16	2033	7.18%	3.82%
3	2020	10.39%	9.55%	17	2034	6.98%	3.56%
4	2021	10.10%	8.90%	18	2035	6.78%	3.32%
5	2022	9.81%	8.29%	19	2036	6.59%	3.09%
6	2023	9.54%	7.73%	20	2037	6.41%	2.88%
7	2024	9.27%	7.20%	21	2038	6.23%	2.68%
8	2025	9.01%	6.71%	22	2039	6.05%	2.50%

9	2026	8.76%	6.26%	23	2040	5.88%	2.33%
10	2027	8.51%	5.83%	24	2041	5.72%	2.17%
11	2028	8.28%	5.43%	25	2042	5.56%	2.02%
12	2029	8.04%	5.06%	26	2043	5.40%	1.89%
13	2030	7.82%	4.72%	27	2044	5.25%	1.76%
14	2031	7.60%	4.40%	28	2045	5.10%	1.64%

Capaian indikator angka Kematian bayi per 1000 kelahiran hidup sampai pada tahun 2021 adalah 2,75% Capaian ini belum mencapai target yang ditentukan dalam Perpres No. 59 Tahun 2017 sebesar 24 atau setara 2,4%. Untuk mengetahui capaian tahun 2018 s.d 2045 maka dilakukan proyeksi capaian berdasarkan baseline data tahun 2018. Hasil proyeksi BAU menunjukkan indikator ini baru dapat tercapai pada tahun 2040 sebesar 23 atau lebih kurang setara 2,33% dan memenuhi target perpres. Pencapaian ini dilakukan dengan upaya tambahan. Untuk memprediksinya di Kabupaten Nagan Raya pada tahun 2045 maka dilakukan proyeksi capaian berdasarkan data tahun sebelumnya.



Gambar 6.8. Proyeksi Data Awal dan Dengan Upaya Tambahan Indikator AKB Per 1000 Kelahiran Hidup



Gambar 6.9. Diagram Indikator AKB Per 1000 Kelahiran Hidup

Proyeksi capaian ini dilakukan tanpa upaya tambahan atau dalam kondisi BAU (*Bisnis Analysis Usually*) dan dengan Upaya tambahan. Hasil proyeksi tanpa upaya tambahan (BAU) menunjukkan kecenderungan yang terus menurun, sampai tahun 2045 mencapai target Perpres 59/2017 yaitu menurun sebesar 1,64%. Sedangkan hasil proyeksi dengan tanpa upaya tambahan hanya mencapai 5,10%. Dengan demikian terlihat pencapaiannya lebih cepat dilakukan dengan Upaya tambahan. Efek dari upaya tambahan tersebut berhubungan dengan alokasi anggaran sesuai dengan kebutuhan, selain itu kapasitas layanan dan kelembagaan juga perlu ditingkatkan.

Isu Strategis :

Masih tingginya angka Kematian bayi per 1000 kelahiran hidup

Rekomendasi :

Sasaran	Strategi dan Arah Kebijakan Tambahan	Pelaksana
Mengakhiri kematian bayi baru lahir yang dapat dicegah, karena itu berusaha untuk menurunkan Angka Kematian bayi setidaknya hingga 24 per 1000 Kelahiran Hidup	- Akselerasi pemenuhan akses pelayanan kesehatan ibu dan anak yang berkualitas - Mempercepat perbaikan gizi masyarakat - Meningkatkan pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan	Dinas Kesehatan Kabupaten Nagan Raya



6.6.5. Proyeksi Capaian Indikator Prevalensi Penduduk Dengan Kerawanan Pangan Sedang Atau Berat, Berdasarkan Pada Skala Pengalaman Kerawanan Pangan.

Tujuan 2. :

Tanpa kelaparan

Target :

Pada tahun 2030, menghilangkan kelaparan dan menjamin akses bagi semua orang, khususnya orang miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, termasuk bayi, terhadap makanan yang aman, bergizi, dan cukup sepanjang tahun

Pada tahun 2030, menghilangkan kelaparan dan menjamin akses bagi semua orang, khususnya orang miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, termasuk bayi, terhadap makanan yang aman, bergizi, dan cukup sepanjang tahun.

Nomor Indikator :

2.1.2*

Keterkaitan dengan D3TLH:

Indikator ini terkait dengan daya dukung pangan, maka berdasarkan Capaian Indikator Layanan Wajib Non-Dasar Ketersediaan Pangan Utama sudah lebih baik yaitu sudah tercapai 100% sejak tahun 2018 hingga tahun 2021. Namun demikian, indikator prevalensi penduduk dengan kerawanan pangan masih belum tercapai dengan realisasinya pada tahun 2022 sebesar 84.

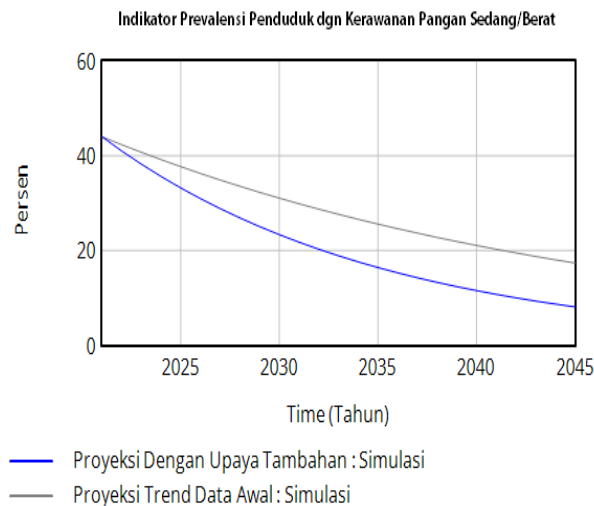
Proyeksi Capaian Indikator TPB :

Tabel 6.12. Proyeksi Capaian Indikator TPB

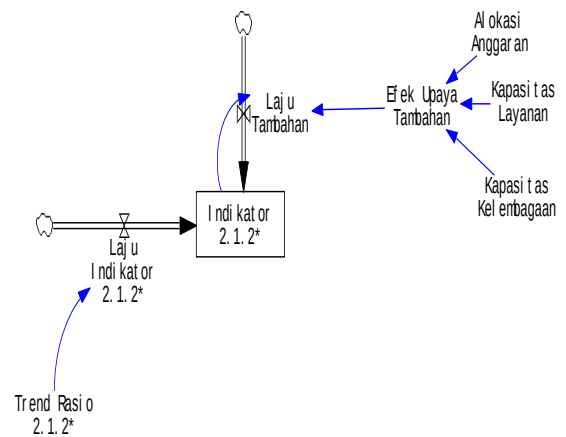
No	Tahun	Proyeksi BAU	Proyeksi Dgn Upaya Tambahan	No	Tahun	Proyeksi BAU	Proyeksi Dgn Upaya Tambahan
1	2021	44,00%	44,00%	13	2033	27,64%	18,90%
2	2022	42,33%	41,01%	14	2034	26,59%	17,61%
3	2023	40,72%	38,22%	15	2035	25,58%	16,42%
4	2024	39,17%	35,62%	16	2036	24,61%	15,30%
5	2025	37,68%	33,20%	17	2037	23,67%	14,26%
6	2026	36,25%	30,94%	18	2038	22,77%	13,29%
7	2027	34,87%	28,84%	19	2039	21,91%	12,39%
8	2028	33,55%	26,88%	20	2040	21,08%	11,54%
9	2029	32,27%	25,05%	21	2041	20,27%	10,76%
10	2030	31,05%	23,35%	22	2042	19,50%	10,03%
11	2031	29,87%	21,76%	23	2043	18,76%	9,35%
12	2032	28,73%	20,28%	24	2044	18,05%	8,71%
				25	2045	17,36%	8,12%

Menghilangkan kelaparan dan menjamin akses bagi semua orang, khususnya orang miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, termasuk bayi, terhadap makanan yang aman, bergizi, dan cukup sepanjang tahun. Pada tahun 2018 berada pada angka 51%, terjadi penurunan pada tahun 2020 menjadi 49% dan pada tahun 2021 menjadi 44%. Namun pada tahun 2022 terjadi peningkatan menjadi 84%. Fluktuasi capaian ini memperlihatkan bahwa program penurunan prevalensi penduduk dengan kerawanan pangan di Kabupaten Nagan Raya sudah dilaksanakan, namun belum mencapai target. Berdasarkan capaian indikator ini, maka diperlukan upaya untuk meningkatkan produksi pangan. Untuk memprediksinya di Kabupaten Nagan Raya pada tahun 2045 maka perlu dilakukan proyeksi capaian berdasarkan data tahun sebelumnya. Proyeksi capaian ini dilakukan tanpa upaya tambahan atau dalam kondisi BAU (Bisnis Analysis Usually) dan dengan Upaya tambahan. Hasil proyeksi tanpa upaya tambahan (BAU) menunjukkan kecenderungan yang terus menurun, sampai tahun 2045 mencapai target Perpes 59/2017 yaitu menurun sebesar 17,36%. Sedangkan hasil proyeksi dengan upaya tambahan

menunjukkan kecenderungan yang terus menurun yang lebih cepat dibandingkan tanpa upaya tambahan sampai tahun 2045 mencapai target penurunan sebesar 8,12%. Efek dari upaya tambahan tersebut berhubungan dengan alokasi anggaran sesuai dengan kebutuhan, selain itu kapasitas layanan dan kelembagaan juga perlu ditingkatkan.



Gambar 6.10. Proyeksi Data Awal dan Dengan Upaya Tambahan Indikator Prevalensi Penduduk dgn Kerawanan Pangan



Gambar 6.11. Diagram Indikator Prevalensi Penduduk dgn Kerawanan Pangan

Isu Strategis :

Masih tingginya prevalensi kerawanan pangan di Kabupaten Nagan Raya;

Rekomendasi :

Sasaran	Strategi dan Arah Kebijakan Tambahan	Pelaksana
Menurunnya Prevalensi penduduk dengan kerawanan pangan sedang atau berat	1. Sinergi lintas sektor dari pusat dan daerah serta kerja sama kemitraan antar pemangku kepentingan, yaitu pemerintah, swasta/BUMN, organisasi kemasyarakatan bidang pangan dan pertanian, para petani diperlukan dalam pembangunan sistem pangan berkelanjutan. 2. Fokus dan pendalaman pelaksanaan kebijakan dan program pembangunan ketahanan pangan dan gizi diperlukan dalam upaya pengentasan daerah rentan rawan pangan guna pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau Sustainable Development Goals (SDGs), terutama tujuan 1 (Tanpa Kemiskinan) dan tujuan 2 (Tanpa Kelaparan). 3. Pengembangan Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG) dengan membentuk Tim SKPG yang melibatkan instansi terkait dengan melaksanakan kegiatan sebagai berikut :	1. Dinas Kelautan, Perikanan dan Pangan Kabupaten Nagan Raya 2. Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Nagan Raya



PEMERINTAH KABUPATEN NAGAN RAYA
KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS (KLHS)
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD)

	• Peramalan situasi pangan dan gizi melalui pengembangan sistem isyarat dini (SIDI), termasuk peramalan ketersediaan pangan dan pemantauan pertumbuhan balita dan hasil pengamatan sosial ekonomi. • Kajian situasi pangan dan gizi secara berkala berdasarkan hasil survei khusus atau dari laporan tahunan. • Diseminasi hasil peramalan dan kajian situasi pangan dan gizi bagi perumus kebijakan. • Penyusunan peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan (Food Security and Vulnerability Atlas) periode 3-5 tahunan yang menggambarkan kondisi sampai tingkat desa/kecamatan sdebagai acuan dalam penentuan program. • Melaksanakan Pelatihan dan pembinaan pada masyarakat tentang menu pangan yang beragam, bergizi seimbang dan Aman (B2SA). • Melaksanakan Pelatihan dan pembinaan pada masyarakat untuk meningkatkan pendapatan dengan pelatihan olahan pangan berbahan baku lokal. • Melaksanakan Pembinaan dan pelatihan optimalisasi pemanfaatan pekarangan dengan budidaya tanaman sayuran, buah, umbi-umbian, peternakan kecil dan perikanan untuk ketersediaan pangan keluarga dan menambah pendapatan keluarga. • Melaksanakan pembinaan dan pelatihan diversifikasi tanaman pada kelompok tani, untuk meningkatkan pendapatan kelompok tani dengan optimalisasi lahan pertanian sehingga dapat menambah produksi yang akhirnya menambah pendapatan.	

6.6.6. Proyeksi Capaian Indikator Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/ sederajat.

Tujuan 1 :

Pendidikan Berkualitas

Target :

Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah tanpa dipungut biaya, setara, dan berkualitas, yang mengarah pada capaian pembelajaran yang relevan dan efektif.

Nomor Indikator :

4.1.1.*(d)

Keterkaitan dengan D3TLH:

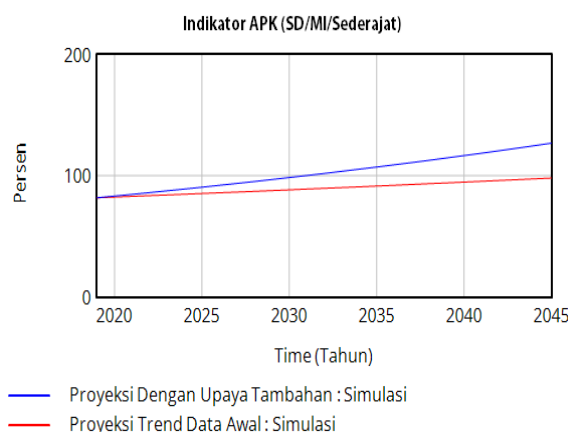
Tidak ada keterkaitan dengan D3TLH.

Proyeksi Capaian Indikator TPB :

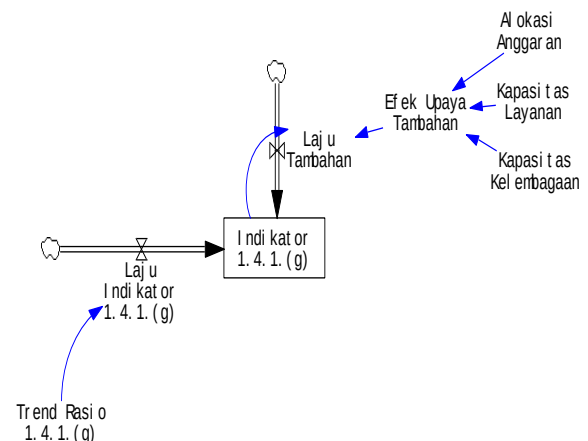
Tabel 6.13. Proyeksi Capaian Indikator TPB

No	Tahun	Proyeksi BAU	Proyeksi Dgn Upaya Tambahan	No	Tahun	Proyeksi BAU	Proyeksi Dgn Upaya Tambahan
1	2019	81,88%	81,88%	14	2032	89,65%	101,10%
2	2020	82,45%	83,27%	15	2033	90,27%	103,67%
3	2021	83,03%	84,68%	16	2034	90,91%	105,43%
4	2022	83,61%	86,12%	17	2035	91,54%	107,22%
5	2023	84,19%	87,59%	18	2036	92,18%	109,05%
6	2024	84,00%	89,08%	19	2037	92,83%	110,90%
7	2025	85,37%	90,59%	20	2038	93,48%	112,79%
8	2026	85,97%	92,13%	21	2039	94,13%	114,70%
9	2027	86,57%	93,70%	22	2040	94,79%	116,65%
10	2028	87,18%	95,29%	23	2041	95,46%	118,64%
11	2029	87,79%	96,91%	24	2042	96,12%	120,65%
12	2030	88,41%	98,56%	25	2043	96,80%	122,71%
13	2031	89,02%	100,23%	26	2044	97,47%	124,79%
				27	2045	94,79%	126,92%

Jika dilihat pada tabel dimana pada tahun Tahun 2019-2024: APK dalam skenario Proyeksi BAU dan Proyeksi Dengan Upaya Tambahan meningkat dari 81,88% pada tahun 2019 menjadi 89,08% pada tahun 2024. Ini menunjukkan adanya peningkatan signifikan dalam partisipasi peserta didik dalam jenjang SD/MI/ sederajat selama periode tersebut, terutama dengan adanya upaya tambahan. Tahun 2025-2045: APK terus mengalami peningkatan secara konsisten, baik dalam skenario BAU maupun dengan upaya tambahan. Pada tahun 2045, APK dalam skenario BAU mencapai 94,79%, sedangkan dengan upaya tambahan mencapai 126,92%. Perbedaan yang signifikan antara keduanya menunjukkan bahwa upaya tambahan yang dilakukan berhasil meningkatkan partisipasi peserta didik secara drastis.



Gambar 6.12. Proyeksi Data Awal dan Dengan Upaya Tambahan Indikator APK (SD/MI/Sederajat)



Gambar 6.13. Diagram Indikator APK (SD/MI/Sederajat).

Perbandingan dengan Upaya Tambahan: Dalam setiap tahun, APK dalam skenario dengan upaya tambahan selalu lebih tinggi dibandingkan dengan APK dalam skenario BAU. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan atau program-program tambahan yang diimplementasikan berhasil meningkatkan partisipasi peserta didik dalam jenjang SD/MI/ sederajat secara efektif.



PEMERINTAH KABUPATEN NAGAN RAYA
KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS (KLHS)
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD)

Tren Keseluruhan: Data menunjukkan tren positif dalam partisipasi peserta didik dalam jenjang SD/MI/ sederajat selama periode yang dianalisis. Peningkatan ini mencerminkan kemajuan dalam bidang pendidikan dan upaya pemerintah serta stakeholders lainnya untuk meningkatkan aksesibilitas dan kualitas pendidikan dasar di Indonesia. Peningkatan yang Signifikan: Terdapat peningkatan yang signifikan dari tahun ke tahun, terutama dalam skenario dengan upaya tambahan. Hal ini menunjukkan bahwa investasi dan perhatian yang diberikan terhadap pendidikan dasar memiliki dampak yang besar dalam meningkatkan partisipasi peserta didik.

Untuk memprediksi kondisi persentase Dapat mencapai peningkatan yang signifikan dalam Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/ sederajat Nagan Raya pada tahun 2030 maka perlu dilakukan proyeksi capaian berdasarkan data tahun sebelumnya. Proyeksi capaian ini dilakukan tanpa upaya tambahan atau dalam kondisi BAU (*Bisnis Analysis Usually*) dan dengan Upaya tambahan. Hasil proyeksi tanpa upaya tambahan (BAU) menunjukkan kecenderungan yang terus menurun, sampai tahun 2045 baru mencapai target Perpes 59/2017 sebesar 100%. Sedangkan hasil proyeksi dengan upaya tambahan menunjukkan kecenderungan yang terus meningkat yang lebih cepat dibandingkan tanpa upaya tambahan sampai tahun 2030 sudah tercapai target

Isu Strategis :

Masih rendahnya Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/ sederajat di Kabupaten Nagan Raya;

Rekomendasi :

Sasaran	Strategi dan Arah Kebijakan Tambahan	Pelaksana
Dapat mencapai peningkatan yang signifikan dalam Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/ sederajat	1. Peningkatan Aksesibilitas: Meningkatkan aksesibilitas pendidikan dengan memperluas jaringan sekolah dan meningkatkan infrastruktur pendidikan di daerah-daerah terpencil atau terpinggirkan. Ini termasuk pembangunan sekolah baru, peningkatan transportasi, dan penyediaan fasilitas pendukung seperti beasiswa dan bantuan biaya pendidikan; 2. Program Beasiswa dan Bantuan Keuangan: Menyediakan program beasiswa dan bantuan keuangan untuk siswa dari keluarga berpenghasilan rendah atau daerah terpencil. Ini dapat membantu mengurangi hambatan finansial yang sering menjadi faktor utama dalam ketidakpartisipasian dalam pendidikan menengah. 3. Peningkatan Infrastruktur Pendidikan: Melakukan investasi dalam infrastruktur pendidikan, termasuk pembangunan sekolah baru, perbaikan fasilitas fisik yang sudah ada, serta peningkatan aksesibilitas transportasi bagi siswa yang tinggal di daerah terpencil. 4. Pemberdayaan Komunitas Lokal: Melibatkan komunitas lokal dalam perencanaan dan implementasi kebijakan pendidikan. Ini termasuk memperkuat peran orang tua, pemimpin masyarakat, dan tokoh agama dalam mendukung pendidikan anak-anak mereka.	Dinas Pendidikan



PEMERINTAH KABUPATEN NAGAN RAYA
KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS (KLHS)
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD)

6.6.7. Proyeksi Capaian Indikator Persentase kabupaten/kota yang mencapai 80% imunisasi dasar lengkap pada bayi.

Tujuan 2 :

Menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan seluruh penduduk semua usia

Target :

Meningkatnya persentase kabupaten/ kota yang mencapai 80% imunisasi dasar lengkap pada bayi pada tahun 2045 menjadi 95% (2015: 71,2%).

Nomor Indikator :

3.2.2.(b)

Keterkaitan dengan D3TLH:

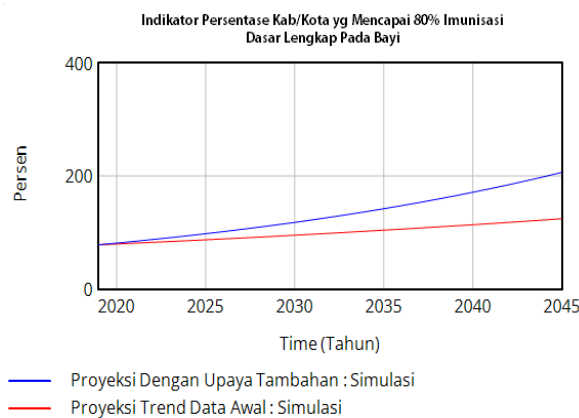
Indikator ini terkait dengan kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk mencapai 80% imunisasi dasar lengkap pada bayi. Persentase anak umur 12-23 bulan yang menerima imunisasi dasar lengkap. Pemberian imunisasi yang terlambat atau tidak lengkap kepada anak menjadi salah satu hambatan dalam upaya meningkatkan kekebalan anak.

Proyeksi Capaian Indikator TPB :

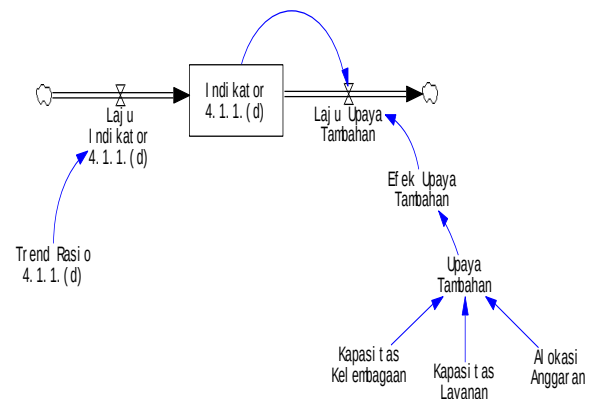
Tabel 6.14. Proyeksi Capaian Indikator TPB

No	Tahun	Proyeksi BAU	Proyeksi Dgn Upaya Tambahan	No	Tahun	Proyeksi BAU	Proyeksi Dgn Upaya Tambahan
1	2021	57,00%	57,00%	13	2034	81,62%	104,85%
2	2022	58,60%	59,74%	14	2035	83,90%	109,88%
3	2023	60,24%	62,60%	15	2036	86,25%	115,16%
4	2024	61,92%	65,61%	16	2037	88,67%	120,69%
5	2025	63,66%	68,76%	17	2038	91,15%	126,48%
6	2026	65,44%	72,06%	18	2039	93,70%	132,55%
7	2027	67,27%	75,52%	19	2040	96,33%	138,91%
8	2028	69,16%	79,14%	20	2041	99,02%	145,58%
9	2029	71,09%	82,94%	21	2042	101,80%	152,57%
10	2030	73,08%	86,92%	22	2043	104,65%	159,89%
11	2031	75,13%	91,09%	23	2044	107,58%	167,57%
12	2032	77,23%	95,47%	24	2045	110,59%	175,61%
13	2033	79,39%	100,05%	25			

Capaian indikator Meningkatnya persentase kabupaten/ kota yang mencapai 80% imunisasi dasar lengkap pada bayi pada tahun 2018 adalah 78,71%. Capaian ini belum mencapai target yang ditentukan dalam Perpres No. 59 Tahun 2017 sebesar 114,09%. Untuk mengetahui capaian tahun 2019 s.d 2045, maka dilakukan proyeksi capaian berdasarkan baseline data tahun 2019. Hasil proyeksi BAU menunjukkan indikator ini belum dapat memenuhi target yaitu meningkat. Dalam rangka percepatan pencapaian target indikator TPB maka dilakukan proyeksi dengan upaya tambahan. Hasil proyeksi dengan upaya tambahan menunjukkan target indikator dapat dipenuhi pada tahun 2030. Sementara di proyeksi capaian tanpa Upaya tambahan (BAU) pada 2041. Untuk mencapai target sesuai proyeksi dengan upaya tambahan diperlukan upaya-upaya skenario yang lebih pada tahun-tahun yang akan datang dikarenakan adanya Gap yang besar antara proyeksi BAU dan Proyeksi dengan Upaya Tambahan. Proyeksi capaian indikator ditunjukkan pada tabel dan gambar dibawah ini: Efek dari upaya tambahan tersebut berhubungan dengan alokasi anggaran sesuai dengan kebutuhan, selain itu kapasitas layanan dan kelembagaan juga perlu ditingkatkan.



Gambar 6.14. Proyeksi Data Awal dan Dengan Upaya Tambahan Indikator Persentase Kab/Kota yg Mencapai 80% Imunisasi Dasar Lengkap Pada Bayi



Gambar 6.15. Diagram Indikator Persentase Kab/Kota yg Mencapai 80% Imunisasi Dasar Lengkap Pada Bayi

Isu Strategis :

Masih rendahnya persentase kabupaten/ kota yang mencapai 80% imunisasi dasar lengkap pada bayi. Pemberian imunisasi yang terlambat atau tidak lengkap kepada anak menjadi salah satu hambatan dalam upaya meningkatkan kekebalan anak. Imunisasi

Rekomendasi :

Sasaran	Strategi dan Arah Kebijakan Tambahan	Pelaksana
Menjamin semua bayi mendapatkan imunisasi lengkap anak umur 12 – 23 bulan	- Memperkuat kapasitas pelayanan imunisasi pada setiap unit pelayanan Kesehatan - Mencapai cakupan kesehatan universal, termasuk perlindungan risiko keuangan, akses terhadap pelayanan kesehatan dasar yang baik, dan akses terhadap obat- obatan dan vaksin dasar yang aman, efektif, berkualitas, dan terjangkau bagi semua orang. - Meningkatkan secara signifikan pembiayaan kesehatan	Dinas Kesehatan



PEMERINTAH KABUPATEN NAGAN RAYA
KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS (KLHS)
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD)

6.6.8. Proyeksi Capaian Indikator Persentase merokok pada penduduk umur ≤ 18 tahun.

Tujuan 1 :

Menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan seluruh penduduk semua usia

Target :

Pada tahun 2045, mengurangi hingga sepertiga angka kematian dini akibat penyakit tidak menular, melalui pencegahan dan pengobatan, serta meningkatkan kesehatan mental dan kesejahteraan.

Nomor Indikator :

3.4.1.(a)

Keterkaitan dengan D3TLH:

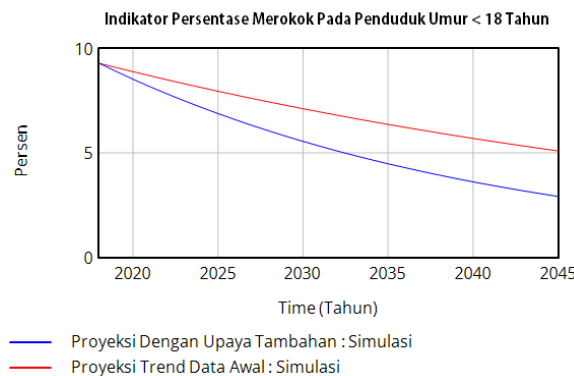
Indikator ini terkait dengan rokok merupakan benda beracun yang dapat memberikan efek santai atau tenang. Racun yang ada pada rokok bukan hanya berbahaya bagi perokok aktif maupun pasif namun juga bagi lingkungan hidup.

Proyeksi Capaian Indikator TPB :

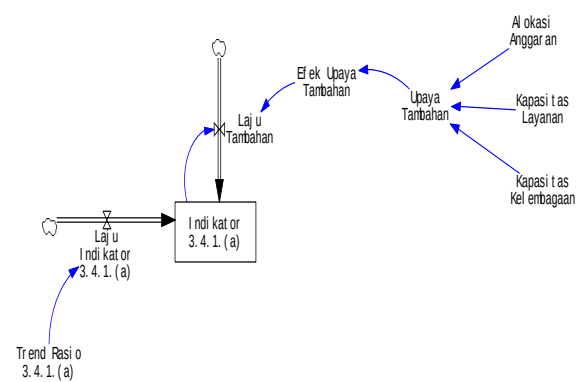
Tabel 6.15. Proyeksi Capaian Indikator TPB

No	Tahun	Proyeksi BAU	Proyeksi Dgn Upaya Tambahan	No	Tahun	Proyeksi BAU	Proyeksi Dgn Upaya Tambahan
1	2018	9,30%	9,30%	13	2032	6,81%	5,10%
2	2019	9,10%	8,91%	14	2033	6,66%	4,89%
3	2020	8,90%	8,54%	15	2034	6,51%	4,68%
4	2021	8,70%	8,18%	16	2035	6,37%	4,48%
5	2022	8,51%	7,83%	17	2036	6,23%	4,30%
6	2023	8,32%	7,50%	18	2037	6,09%	4,12%
7	2024	8,14%	7,19%	19	2038	5,96%	3,94%
8	2025	7,96%	6,89%	20	2039	5,83%	3,78%
9	2026	7,78%	6,60%	21	2040	5,70%	3,62%
10	2027	7,61%	6,32%	22	2041	5,58%	3,47%
11	2028	7,45%	6,06%	23	2042	5,45%	3,32%
12	2029	7,28%	5,80%	24	2043	5,33%	3,18%
13	2030	7,12%	5,56%	25	2044	5,22%	3,05%
14	2031	6,96%	5,32%	26	2045	5,10%	2,92%

Capaian indikator persentase merokok pada penduduk umur ≤ 18 tahun sampai pada tahun 2018 adalah 9,3%. Capaian ini belum mencapai target yang ditentukan dalam Perpres No. 59 Tahun 2017 yaitu Menurun menjadi 5,4%. Untuk mengetahui capaian tahun 2019-245 maka dilakukan proyeksi capaian berdasarkan baseline data tahun 2018 s/d 2022. Hasil proyeksi BAU menunjukkan indikator ini belum dapat memenuhi target yaitu Menurun. Dalam rangka percepatan pencapaian target indikator TPB maka dilakukan proyeksi dengan upaya tambahan. Hasil proyeksi dengan upaya tambahan menunjukkan target indikator dapat dipenuhi pada tahun 2033 yaitu 4,89%. Sementara di proyeksi capaian pada tahun 2045 adalah 2,92%. Untuk mencapai target sesuai proyeksi dengan upaya tambahan diperlukan upaya-upaya skenario yang lebih pada tahun tahun yang akan datang dikarenakan adanya Gap yang besar antara proyeksi BAU dan Proyeksi dengan Upaya Tambahan. Proyeksi capaian indikator ditunjukkan pada tabel dan gambar di bawah ini. Efek dari upaya tambahan tersebut berhubungan dengan alokasi anggaran sesuai dengan kebutuhan, selain itu kapasitas layanan dan kelembagaan juga perlu ditingkatkan.



Gambar 6.16. Proyeksi Data Awal dan Dengan Upaya Tambahan Indikator Persentase Merokok pada Penduduk Umur < 18 Tahun



Gambar 6.17. Diagram Indikator Persentase Merokok pada Penduduk Umur < 18 Tahun

Isu Strategis :

Masih tingginya persentase merokok pada penduduk umur ≤ 18 tahun.

Rekomendasi :

Sasaran	Strategi dan Arah Kebijakan Tambahan	Pelaksana
Mengurangi hingga sepertiga angka kematian dini akibat penyakit tidak menular, melalui pencegahan dan pengobatan, serta meningkatkan kesehatan mental dan kesejahteraan.	- Pengendalian penyakit tidak menular - Regulasi aturan larangan merokok di tempat-tempat umum - Pengawasan yang ketat terhadap pencegahan merokok pada anak	Dinas Kesehatan

6.6.9. Proyeksi Capaian Indikator Tingkat Pengangguran Terbuka Berdasarkan Jenis Kelamin Dan Kelompok Umur.

Tujuan 2 :

Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, Kesempatan Kerja yang Produktif dan Menyeluruh, serta Pekerjaan yang Layak untuk Semua

Target :

Pada tahun 2045, mencapai pekerjaan tetap dan produktif dan pekerjaan yang layak bagi semua perempuan dan laki-laki, termasuk bagi pemuda dan penyandang difabilitas, dan upah yang sama untuk pekerjaan yang sama nilainya.

Nomor Indikator :

8.5.2*

Keterkaitan dengan D3TLH:

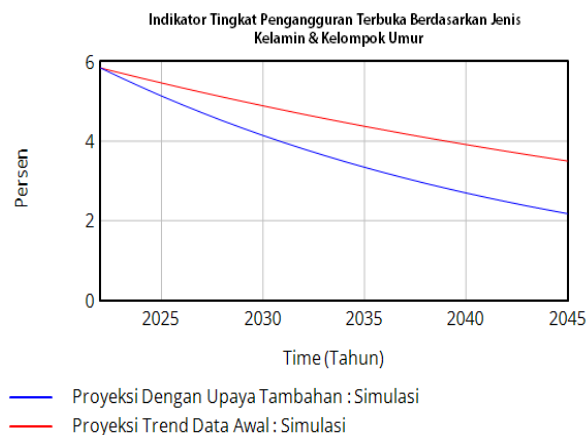
Indikator ini terkait dengan Tingkat Pengangguran Terbuka Berdasarkan Jenis Kelamin dan Kelompok Umur menurut Wilayah Administrasi

Proyeksi Capaian Indikator TPB :

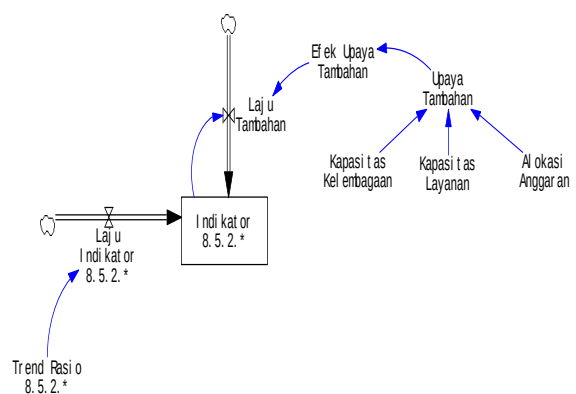
Tabel 6.16. Proyeksi Capaian Indikator TPB

No	Tahun	Proyeksi BAU	Proyeksi Dgn Upaya Tambahan	No	Tahun	Proyeksi BAU	Proyeksi Dgn Upaya Tambahan
1	2022	5,84%	5,84%	13	2034	4,47%	3,49%
2	2023	5,71%	5,59%	14	2035	4,37%	3,34%
3	2024	5,59%	5,36%	15	2036	4,28%	3,20%
4	2025	5,46%	5,13%	16	2037	4,18%	3,07%
5	2026	5,34%	4,92%	17	2038	4,09%	2,94%
6	2027	5,23%	4,71%	18	2039	4,00%	2,82%
7	2028	5,11%	4,51%	19	2040	3,91%	2,70%
8	2029	5,00%	4,32%	20	2041	3,83%	2,58%
9	2030	4,89%	4,14%	21	2042	3,74%	2,48%
10	2031	4,78%	3,97%	22	2043	3,66%	2,37%
11	2032	4,68%	3,80%	23	2044	3,58%	2,27%
12	2033	4,57%	3,64%	24	2045	3,50%	2,18%

Capaian indikator Tingkat pengangguran sampai pada tahun 2018 adalah 5,91%. Capaian ini belum mencapai target yang ditentukan dalam Perpres No. 59 Tahun 2017 yaitu Menurun. Namun terjadi penurunan dalam rentang 2019 s.d 2021, Sedangkan pada tahun 2022 terjadi peningkatan kembali menjadi 5,84 dan belum mencapai target perpres. Untuk mengetahui capaian tahun 2022 s.d 2045 maka dilakukan proyeksi capaian berdasarkan baseline data tahun 2022. Hasil proyeksi BAU menunjukkan indikator ini belum dapat memenuhi target yaitu Menurun. Dalam rangka percepatan pencapaian target indikator TPB maka dilakukan proyeksi dengan upaya tambahan. Hasil proyeksi dengan upaya tambahan menunjukkan target indikator dapat dipenuhi pada tahun 2023. Sementara diproyeksi capaian pada tahun 2045 adalah 2,18%. Proyeksi capaian indikator ditunjukkan pada tabel dan gambar dibawah ini. Efek dari upaya tambahan tersebut berhubungan dengan alokasi anggaran sesuai dengan kebutuhan, selain itu kapasitas layanan dan kelembagaan juga perlu ditingkatkan.



Gambar 6.18. Proyeksi Data Awal dan Dengan Upaya Tambahan Indikator Tingkat Pengangguran Terbuka



Gambar 6.19. Diagram Indikator Tingkat Pengangguran Terbuka



PEMERINTAH KABUPATEN NAGAN RAYA
KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS (KLHS)
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD)

Isu Strategis :

Masih tingginya Tingkat pengangguran

Rekomendasi :

Sasaran	Strategi dan Arah Kebijakan Tambahan	Pelaksana
Mencapai pekerjaan tetap dan produktif dan pekerjaan yang layak bagi semua perempuan dan laki-laki, termasuk bagi pemuda dan penyandang difabilitas, dan upah yang sama untuk pekerjaan yang sama nilainya.	• Pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi secara berkelanjutan; • Sektor ekonomi yang kokoh • Pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan • Penempatan dan perluasan kesempatan kerja • Pengembangan sektor Perkebunan • Peningkatan Penggunaan dan Pemasaran Produk lokal • Pengembangan perdagangan dalam negeri (program tambahan)	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

6.6.10. Proyeksi Capaian Indikator Persentase Peningkatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota)

Tujuan 1 :

Peningkatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Nagan Raya

Target :

Pada tahun 2028, Peningkatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah di Kabupaten Nagan Raya mencakup pengembangan sistem pelaporan yang transparan, pembentukan badan pengawas independen, penguatan evaluasi kinerja secara berkala, peningkatan keterlibatan masyarakat melalui informasi dan pelibatan aktif, serta penerapan sistem sanksi dan insentif. Langkah-langkah ini diharapkan dapat memastikan kinerja pemerintah daerah yang lebih efisien dan memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat Kabupaten Nagan Raya.

Nomor Indikator :

16.6.1.(b)

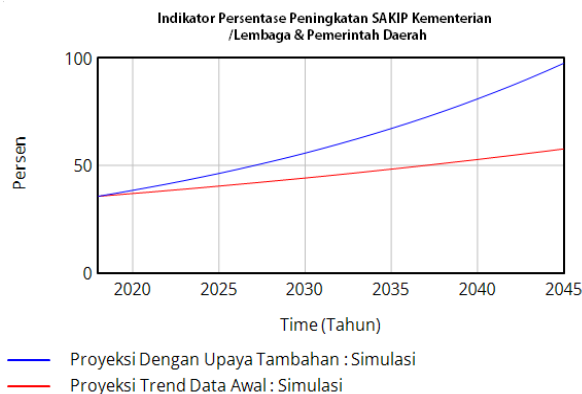
Keterkaitan dengan D3TLH:

Indikator ini terkait dengan peningkatan sistem akuntabilitas kinerja pemerintah daerah dalam konteks Kabupaten Nagan Raya berkaitan erat dengan daya dukung institusional, partisipasi masyarakat, dan kapasitas administratif pemerintah. Daya dukung institusional diperlukan untuk memastikan adopsi dan implementasi kebijakan yang diperlukan untuk meningkatkan akuntabilitas. Partisipasi masyarakat penting untuk memonitor dan memberikan masukan terhadap kinerja pemerintah, sementara kapasitas administratif pemerintah diperlukan untuk melaksanakan evaluasi kinerja, sistem pelaporan, dan tindakan perbaikan. Dengan demikian, indikator-indikator ini terkait dengan daya dukung institusional, partisipasi masyarakat, dan kapasitas administratif pemerintah dalam mencapai tujuan peningkatan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah.

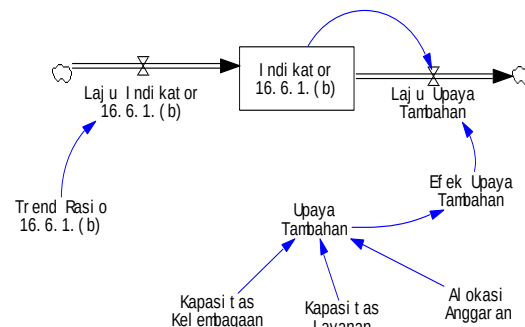
Proyeksi Capaian Indikator TPB :

Tabel 6.17. Proyeksi Capaian Indikator TPB

No	Tahun	Proyeksi BAU	Proyeksi Dgn Upaya Tambahan	No	Tahun	Proyeksi BAU	Proyeksi Dgn Upaya Tambahan
1	2018	35,66%	35,66%	13	2032	45,77%	60,11%
2	2019	36,30%	37,02%	14	2033	46,60%	62,39%
3	2020	36,96%	38,42%	15	2034	47,44%	64,76%
4	2021	37,62%	39,88%	16	2035	48,29%	67,23%
5	2022	38,30%	41,40%	17	2036	49,16%	69,78%
6	2023	38,99%	42,97%	18	2037	50,05%	72,43%
7	2024	39,69%	44,60%	19	2038	50,95%	75,18%
8	2025	40,40%	46,30%	20	2039	51,87%	78,04%
9	2026	41,13%	48,06%	21	2040	52,80%	81,01%
10	2027	41,87%	49,88%	22	2041	53,75%	84,09%
11	2028	42,62%	51,78%	23	2042	54,72%	87,28%
12	2029	43,39%	53,75%	24	2043	55,70%	90,60%
13	2030	44,17%	55,79%	25	2044	56,71%	94,04%
14	2031	44,97%	57,91%	26	2045	57,73%	97,61%



Gambar 6.20. Proyeksi Data Awal dan Dengan Upaya Tambahan Indikator Persentase Peningkatan SAKIP Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah



Gambar 6.21. Diagram Indikator Persentase Peningkatan SAKIP Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah

Untuk memprediksi peningkatan sistem akuntabilitas kinerja pemerintah Kabupaten Nagan Raya. Pada tahun 2018 berada pada angka 35,66%, Untuk memprediksinya di Kabupaten Nagan Raya pada tahun 2045 maka perlu dilakukan proyeksi capaian berdasarkan data tahun sebelumnya. Proyeksi capaian ini dilakukan tanpa upaya tambahan atau dalam kondisi BAU (Bisnis Analysis Usually) dan dengan Upaya tambahan. Hasil proyeksi tanpa upaya tambahan (BAU) menunjukkan kecenderungan yang terus meningkat, sampai tahun 2045 mencapai target Perpes 59/2017 yaitu meningkat sebesar 50%. Sedangkan hasil proyeksi dengan upaya tambahan menunjukkan kecenderungan yang terus meningkat yang lebih cepat dibandingkan tanpa upaya



PEMERINTAH KABUPATEN NAGAN RAYA
KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS (KLHS)
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD)

tambahan sampai tahun 2045 mencapai target pada tahun 2028 sebesar 51,78%. Efek dari upaya tambahan tersebut berhubungan dengan alokasi anggaran sesuai dengan kebutuhan, selain itu kapasitas layanan dan kelembagaan juga perlu ditingkatkan.

Isu Strategis :

Isu strategis dalam peningkatan sistem akuntabilitas kinerja pemerintah daerah di Kabupaten Nagan Raya mencakup transparansi dan akuntabilitas dalam pelaporan kinerja, partisipasi aktif masyarakat dalam pemantauan, penegakan hukum yang efektif terhadap pelanggaran, pengembangan kapasitas administratif, dan pembangunan budaya organisasi yang berorientasi pada kinerja. Tantangan ini melibatkan upaya untuk memperbaiki aksesibilitas informasi, membangun mekanisme partisipasi yang inklusif, menerapkan sanksi yang konsisten, meningkatkan keterampilan pegawai, serta memperkuat nilai-nilai integritas dan pelayanan masyarakat dalam struktur organisasi pemerintah daerah. Dengan mengatasi isu-isu ini, pemerintah daerah di Kabupaten Nagan Raya dapat meningkatkan efektivitas sistem akuntabilitas kerjanya dan meningkatkan kualitas layanan publik yang disediakan kepada masyarakat.

Rekomendasi :

Sasaran	Strategi dan Arah Kebijakan Tambahan	Pelaksana
Meningkatkan sistem akuntabilitas kinerja pemerintah daerah Kabupaten Nagan Raya	1. Peningkatan Alokasi Anggaran: Mengalokasikan anggaran secara efektif dan efisien sesuai dengan kebutuhan untuk mendukung upaya peningkatan sistem akuntabilitas kinerja pemerintah. Ini termasuk peningkatan anggaran untuk pelatihan pegawai, pengembangan infrastruktur, dan pengadaan teknologi informasi yang diperlukan. 2. Peningkatan Kapasitas Layanan: Melakukan peningkatan kapasitas layanan pemerintah, baik dari segi sumber daya manusia maupun infrastruktur, untuk memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat. Ini dapat mencakup pelatihan pegawai, pengadaan perangkat lunak dan perangkat keras yang diperlukan, serta perbaikan infrastruktur fisik. 3. Peningkatan Kelembagaan: Memperkuat kelembagaan pemerintah melalui reformasi kelembagaan dan peningkatan kinerja organisasi. Hal ini mencakup peningkatan transparansi, akuntabilitas, dan pengawasan dalam pelaksanaan kebijakan serta peningkatan koordinasi antarinstansi. 4. Pengembangan Sumber Daya Manusia: Melakukan pengembangan sumber daya manusia melalui pelatihan dan pendidikan yang berkelanjutan untuk meningkatkan kompetensi dan kualitas pegawai pemerintah. Ini akan membantu dalam meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan. 5. Penggunaan Teknologi Informasi: Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik.	1. Kantor Bupati Kabupaten Nagan Raya 2. Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Nagan Raya



6.6.11. Proyeksi Capaian Indikator Persentase Penduduk yang Hidup di Bawah Garis Kemiskinan Nasional, menurut Jenis Kelamin dan Kelompok Umur.

Tujuan 1 :

Tanpa kemiskinan segala bentuk dimanapun

Target :

Pada tahun 2030, mengurangi setidaknya setengah proporsi laki-laki, perempuan dan anak-anak dari semua usia, yang hidup dalam kemiskinan di semua dimensi, sesuai dengan definisi nasional.

Indikator TPB Dalam Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 Menurunnya tingkat kemiskinan pada tahun 2030 menjadi 7% - 8%.

Nomor Indikator :

1.2.1.*

Keterkaitan dengan D3TLH:

Indikator ini terkait dengan daya dukung air bersih. Berdasarkan hasil analisis D3TLH Kabupaten Nagan Raya, beberapa kualitas air sungai dalam kondisi tercemar (berdasarkan baku mutu air kelas II) dengan nilai daya tampung yang telah terlampaui oleh beban pencemaran eksisting, sehingga diperlukan penurunan beban pencemaran pada hampir semua segmen sebesar 25 hingga 80%. Dari hasil Analisis tersebut dapat dikatakan D3TLH tidak mencukupi.

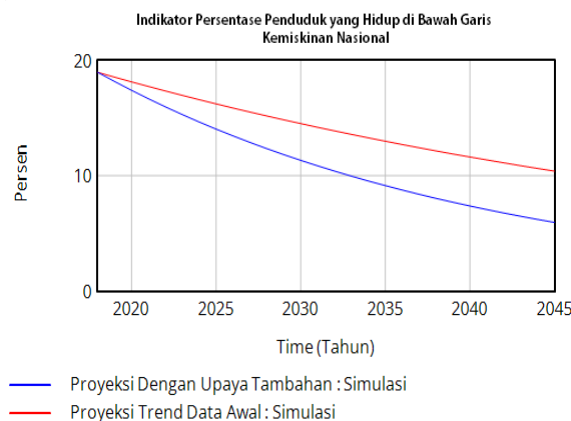
Proyeksi Capaian Indikator TPB :

Tabel 6.18. Proyeksi Capaian Indikator TPB

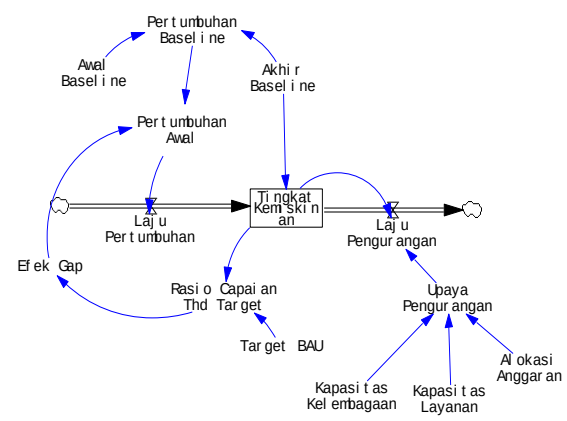
No.	Tahun	Proyeksi BAU	Proyeksi Dengan Upaya Tambahan	No.	Tahun	Proyeksi BAU	Proyeksi Dengan Upaya Tambahan
1	2018	18,97%	18,97%	16	2033	135,88%	996,67%
2	2019	185,53%	181,73%	17	2034	132,89%	954,81%
3	2020	181,45%	17,41%	18	2035	129,97%	914,71%
4	2021	177,45%	166,79%	19	2036	127,11%	876,29%
5	2022	173,55%	159,78%	20	2037	124,31%	839,48%
6	2023	169,73%	153,07%	21	2038	121,58%	804,23%
7	2024	166,00%	146,64%	22	2039	11,89%	770,45%
8	2025	162,35%	140,48%	23	2040	116,29%	738,09%
9	2026	158,77%	134,58%	24	2041	113,73%	707,09%
10	2027	155,28%	128,93%	25	2042	111,22%	677,39%
11	2028	151,86%	123,52%	26	2043	108,78%	648,94%
12	2029	148,52%	118,33%	27	2044	106,38%	621,69%
13	2030	145,26%	113,36%	28	2045	104,04%	595,57%
14	2031	14,21%	108,60%				
15	2032	138,94%	104,04%				

Pada tahun 2017 persentase kemiskinan Kabupaten Nagan Raya sebesar 19,34 persen. Tahun 2018 sampai dengan tahun 2020 di tingkat kemiskinan juga mengalami perubahan penurunan masing-masing di angka 18,97 persen, 17,79 persen dan 17,07. Begitu juga halnya untuk tahun 2021 tingkat kemiskinan terus mengalami penurunan dari tahun sebelumnya yaitu sebesar 18,23 persen hingga tahun 2022 mencapai 17,38%. Jika mengacu Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 yang menargetkan penurunan menjadi sebesar 7-8%, masih belum tercapai dengan gap berkisar diatas 10-11%. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa program pengentasan kemiskinan kabupaten Nagan Raya belum bisa mencapai target.

Untuk memprediksi kondisi persentase penduduk miskin kabupaten Nagan Raya pada tahun 2030 maka perlu dilakukan proyeksi capaian berdasarkan data tahun sebelumnya. Proyeksi capaian ini dilakukan tanpa upaya tambahan atau dalam kondisi BAU (*Bisnis Analysis Usually*) dan dengan Upaya tambahan. Hasil proyeksi tanpa upaya tambahan (BAU) menunjukkan kecenderungan yang terus menurun, sampai tahun 2030 baru mencapai target Perpes 59/2017 sebesar 7,51%. Sedangkan hasil proyeksi dengan upaya tambahan menunjukkan kecenderungan yang terus menurun yang lebih cepat dibandingkan tanpa upaya tambahan sampai tahun 2026 sudah tercapai target sebesar 7,38%, sudah sesuai target Perpes 59/2017 antara 7 - 8%.



Gambar 6.22. Proyeksi Data Awal dan Dengan Upaya Tambahan Indikator Persentase Penduduk yg Hidup di Bawah Garis Kemiskinan Nasional



Gambar 6.23. Diagram Indikator Persentase Penduduk yg Hidup di Bawah Garis Kemiskinan Nasional

Isu Strategis :

Masih tingginya jumlah penduduk miskin di Kabupaten Nagan Raya;
 Masih tingginya peserta Program Keluarga Harapan.

Rekomendasi :

Sasaran	Strategi dan Arah Kebijakan Tambahan	Pelaksana
Menurunnya tingkat kemiskinan penduduk; Meningkatnya kemandirian peserta Program Keluarga Harapan.	1. Meningkatkan keberlangsungan usaha mikro dan kecil dalam upaya menurunkan angka pengangguran dan penduduk miskin; 2. Menerapkan sistem dan Upaya perlindungan sosial yang tepat bagi semua. 3. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah rentan terhadap akses (kawasan tertinggal, terluar dan terdalam); 4. Meningkatkan dan memperluas jangkauan serta kualitas BUMGampong. 5. Menjamin masyarakat miskin dan rentan memiliki hak yang sama terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap pelayanan dasar, kepemilikan dan control atas tanah dan bentuk kepemilikan lain, warisan, sumber daya alam, teknologi baru, dan jasa keuangan yang tepat,	Dinas Sosial



6.7. Permasalahan Pencapaian Indikator TPB

Adapun aspek yang masih membutuhkan kerja keras dan perhatian penuh untuk Angka Kemiskinan pada tahun 2021 mencapai 18,23% meningkat dari tahun 2020 sebesar 17,7%. Demikian pula dengan jumlah rumah tidak layak huni yang direhab pada tahun 2021 tidak ada data sedangkan pada tahun 2020 terdapat 100 unit rumah yang berhasil direhab. Terkait Persentase masyarakat miskin yang mendapat pemberdayaan pada tahun 2021 hanya ada sebesar 0,05% dimana angka ini menurun drastis jika dibandingkan dengan tahun 2020 sebesar 2,61%. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Nagan Raya juga masih cukup tinggi dimana pada tahun 2020 sebesar 5,11% sedangkan tahun 2021 tidak ada data. Untuk Persentase PAD terhadap pendapatan masih belum memuaskan karena pada tahun 2021 hanya tercapai sebesar 4,44%. Pertumbuhan PDRB Kabupaten Nagan Raya tahun 2020 sebesar 3,54% namun capaian ini masih rendah jika dibandingkan dengan pertumbuhan tahun 2019 mencapai 6,77%. Untuk tahun 2021 tidak ada data pertumbuhan PDRB.

PDRB per kapita ADHB Kabupaten Nagan Raya sudah tercapai sesuai dengan target yang ditetapkan. Berdasarkan analisis data ditemukan bahwa capaian tahun 2020 mencapai Rp45,12juta melebihi target yang ditetapkan Rp45,01 juta. Realisasi tahun 2020 ini juga melebihi capaian tahun-tahun sebelumnya. Pada tahun 2018 PDRB per kapita ADHB dapat dicapai sesuai dengan target yakni Rp 42,14 juta dan tahun 2019 capaian PDRB per kapita ADHB Rp44,62 dimana capaiannya ini juga sesuai dengan target. Sasaran lain yang sudah tercapai adalah indeks gini ratio. Capaian tahun 2018, 2019, dan tahun 2020 sesuai dengan target yang ditetapkan secara berturut-turut 0,284%, 0,252%, dan 0,275%.

Aspek yang perlu mendapat perhatian serius dan kerja keras dalam perwujudannya adalah (1) produksi sektor pertanian padi dan palawija dan (2) produksi pertanian padi. Padahal dua sektor ini merupakan unggulan Kabupaten Nagan Raya jika melihat dimensi geografisnya. Untuk indikator produksi sektor pertanian padi dan palawija di Kabupaten Nagan Raya realisasi capaian tahun 2021 sebesar 181.200ton lebih rendah dari target yang direncanakan sebesar 195.000 ton.

Hal serupa juga ditemukan pada tahun 2020 dimana dari target 190.000 ton, hanya dapat direalisasikan sebesar 180.300 ton. Hal serupa juga ditemukan pada indikator produksi pertanian padi dimana tahun 2020 hanya dapat dicapai realisasi sebesar 127.500ton dari



target 155.000 ton. Demikian pula tahun 2021 dimana targetnya sebesar 160.000 hanya dapat direalisasikan 127.700 ton. Sedangkan tahun 2018 dan tahun 2019 capaiannya sesuai dengan target secara berturut-turut 130.582ton (2018) dan 180.278 (2019).

Capaian indikator Angka Partisipasi Kasar (APK) pada tingkat Pendidikan Dasar di Kabupaten Nagan Raya sudah tercapai dengan baik. APK SD/MI/Paket A untuk tingkat Pendidikan Dasar di Kabupaten Nagan Raya sebesar 79,30% tahun 2019 dan meningkat menjadi 101,53% tahun 2020 namun sedikit menurun pada tahun 2021 yakni sebesar 100%. Namun jika dibandingkan dengan kondisi awal di tahun 2017 capaian ini belum maksimal karena pada tahun 2017 APK SD/MI/Paket A mencapai 109,71%. Demikian pula dengan APK SMP/MTs/Paket B sebesar 100,39% pada tahun 2020 dan turun menjadi 100% pada tahun 2021.

Namun jika dilihat tren, maka terjadi peningkatan capaian dari tahun 2018 sebesar 98,27% dan 91,81% pada tahun 2019. Berbeda dengan indikator APK SMA/SMK/Paket C meskipun pada tahun 2019 sempat mengalami penurunan keberhasilan namun tahun 2020 capaiannya meningkat menjadi 95,49% dan melebihi target pada tahun 2021 sebesar 96,26%.

Tingginya dan tidak tercapainya AKB, AKI, dan rendahnya Angka Kelangsungan Hidup di Kabupaten Nagan Raya disebabkan oleh kurangnya pengetahuan ibu tentang tanda bahaya selama hamil, bersalin nifas dan bayi baru lahir, ANC yang belum maksimal serta kurangnya alokasi anggaran untuk menurunkan AKB, AKI, dan meningkatkan angka kelangsungan hidup.

Permasalahan lainnya masih rendahnya kesadaran masyarakat tentang Kesehatan ibu hamil dan kurang berfungsinya sistem deteksi dini ibu hamil yang berisiko tinggi dan sistem rujukan persalinan belum efektif di samping faktor medis lainnya. Rasio posyandu per satuan balita masih perlu diperhatikan karena capaian tahun 2020 adalah 13,97 per 1000 balita dan meningkat menjadi 14,80 per 1000 balita. Meskipun meningkat namun capaian yang dihasilkan belum memenuhi target yang telah ditetapkan.

Ketersediaan fasilitas pelayanan kesehatan di Kabupaten Nagan Raya saat ini sudah semakin meningkat terutama fasilitas pelayanan kesehatan dasar (puskesmas poliklinik, pustu). Tahun 2021 Rasio puskesmas, poliklinik, pustu per satuan penduduk target akan tercapai yaitu



PEMERINTAH KABUPATEN NAGAN RAYA
KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS (KLHS)
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD)

Puskesmas 0,08/1000 Penduduk, Poliklinik 0,05/1000 Penduduk, Pustu 0,29/1000 Penduduk, Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk 0,01/1000 Penduduk.

Rasio tenaga Kesehatan di Kabupaten Nagan Raya sudah tercapai melebihi target yang ditetapkan yakni untuk tahun 2021 adalah 0,41 per 1000 penduduk. Pada tahun 2021 rasio ketersediaan dokter umum 0,23 per 100.000 penduduk sama seperti pada tahun 2020. Untuk dokter spesialis rasionya adalah 0,11 per 100.000 penduduk. Sedangkan dokter gigi rasionya adalah 0,05 per 100.000 penduduk.

Rasio tenaga medis di Kabupaten Nagan Raya masih jauh dari target yang diharapkan. Pada tahun 2020 capaiannya hanya sebesar 0,51 per 1000 penduduk sedangkan target yang ditetapkan adalah 4,39 per 1000 penduduk. Pada tahun 2021 capaiannya juga tidak terlalu membanggakan karena hanya tercapai 0,68 per 1000 penduduk jauh dari target 4,89 per 1000 penduduk. Berdasarkan ketentuan WHO, rasio ideal dokter umum adalah 40/100.000 penduduk atau 1 orang dokter melayani 2.500 penduduk (1:2.500), Rasio dokter spesialis adalah 20/100.000 penduduk (1:5.000) yang artinya 1 orang dokter spesialis melayani 5.000 penduduk, demikian juga untuk dokter gigi rasio dokter gigi (1:9.000).

Indikator yang sangat memperhatikan adalah Cakupan Desa/kelurahan *Universal Child Immunization* (UCI), capaian sangat rendah dari 40,99% pada tahun 2019, turun menjadi 32,8% pada tahun 2020 dan memprihatinkan pada tahun 2021 dimana capaiannya hanya sebesar 23,42%. Hal ini memerlukan upaya keras untuk meningkatkan kinerja agar memberikan sosialisasi meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya imunisasi.

Balita dengan gizi buruk berdampak pada pertumbuhan dan perkembangannya. Gejala awal sering tidak jelas, hanya terlihat bahwa berat badan anak tersebut lebih rendah dibandingkan anak seusianya. Rata berat badannya hanya sekitar 60-80 persen dari badan ideal. Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan untuk kabupaten Nagan Raya sangat baik sudah mencapai 100% sesuai dengan target. Namun persentase anak usia 1 tahun yang diimunisasi campak, tahun 2021 sebesar 51,61%. Cakupan balita pneumonia yang ditangani lebih baik dari target yakni 27,12% pada tahun 2020 dan 25,8% pada tahun 2021, kinerja capaian sangat rendah yaitu hanya 60% pada tahun 2020 dan turun pada dan 25,8% pada tahun 2021.



Untuk cakupan penyakit belum menunjukkan hasil yang memuaskan Dimana pada tahun 2021 Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA hanya sebesar 39% di bawah target 50,36%, Tingkat prevalensi Tuberkulosis meningkat sebesar 100 per 100.000 penduduk dibandingkan target 86,65 per 100.000 penduduk, dan Tingkat kematian karena Tuberkulosis adalah 2,30 per 100.000 penduduk lebih besar dari target yakni 2,2 per 100.000 penduduk. Proporsi jumlah kasus Tuberkulosis yang terdeteksi dalam program DOTS tahun 2021 hanya sebesar 39% dibandingkan target 65,1%, Proporsi kasus Tuberkulosis yang diobati dan sembuh dalam program DOTS tahun 2021 sebesar 45,9% lebih rendah dibandingkan target 70,19%. Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD tahun 2021 adalah sebesar 100%, demikian pula dengan Angka kejadian Malaria dimana tidak ditemukan kejadian pada tahun 2020 dan 2021.

Indikator kesehatan dalam pelayanan yang sudah baik pada tahun 2021 yaitu cakupan kunjungan bayi (103,14%) dan cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan sarana kesehatan (100%). Sementara itu indikator Kesehatan yang masih perlu mendapat perhatian serius berdasarkan data tahun 2021 adalah Cakupan pembantu puskesmas (0,22%), Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani (20,45%), Cakupan pelayanan anak balita (68,93%), Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6 - 24 bulan keluarga miskin (78%). Sedangkan indikator kesehatan yang diharapkan dapat tercapai pada akhir periode PRJM meliputi Cakupan kunjungan Ibu hamil K4 (93%), Cakupan pelayanan nifas (90%), dan Persentase balita gizi buruk (0,06%).

Angka pendidikan yang ditamatkan Tamat SD Sederajat 98,83% pada tahun 2021 sedikit meningkat dari tahun 2020 sebesar 98,77%. Tamat SLTP sederajat tahun 2021 sebesar 95,25% juga meningkat dari tahun 2020 sebesar 93,56%. Untuk pendidikan yang ditamatkan baik untuk SD sederajat maupun SLTP sederajat masih perlu kerja keras karena capaian yang dihasilkan meskipun tren menunjukkan peningkatan namun dalam realisasinya masih jauh dari target yang diinginkan.

Untuk Angka yang ditamatkan Diploma I/II/III pada tahun 2020 sebesar 4,50% dan sedikit meningkat di tahun 2021 sebesar 5,25%. Demikian pula dengan pendidikan yang ditamatkan pada jenjang Diploma IV/S1, S2/S3 sebesar 60% pada tahun 2021 meningkat dibandingkan tahun 2020 sebesar 50%, tahun 2019 sebesar 50%, dan tahun 2018 sebesar 45%.



Sedangkan untuk pendidikan S2/S3 yang ditamatkan adalah tahun 2020 sebesar 2,50% dan mengalami peningkatan tahun 2021 menjadi 3,00%

Angka Partisipasi Murni (APM) masih jauh dari yang diharapkan sehingga masih perlu kerja keras untuk pencapaiannya. Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A tahun 2021 belum sesuai dengan target yang direncanakan bahkan jauh masih rendah jika dibandingkan tahun 2020 dan kondisi awal di tahun 2017. Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A tahun 2020 mencapai 95,27% sedikit melebihi target yang diharapkan yakni 95%. Namun pada tahun 2021 Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A turun menjadi 89,74%. Hal yang tidak berbeda juga ditemukan pada Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B dimana pada tahun 2020 capaiannya hanya sebesar 77,24% di bawah target sebesar 83%. Pada tahun 2021 capaian indikator ini semakin memuruk dimana hanya dapat dicapai sebesar 70,04% jauh di bawah target yakni 84%.

Angka Partisipasi Sekolah (APS) sudah mencapai target. Berdasarkan indikator Angka partisipasi sekolah (APS) SD/MI/Paket A pada tahun 2020 berhasil mencapai realisasi sebesar 96% dan meningkat pada tahun 2021 sebesar 97%. Demikian pula dengan Angka partisipasi sekolah (APS) SMP/MTs/Paket B dimana pada tahun 2020 realisasinya mencapai 84% dan meningkat pada tahun 2021 menjadi 85%. Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 mengalami peningkatan, yakni, pada tahun 2019 capaiannya sebesar 97,50% (target 97,50%), neningkat sebesar 98,12% pada tahun 2020 (target 85,50%), dan pada tahun 2021 mengalami peningkatan Kembali menjadi 98,73% dengan target 88,50%.

Berdasarkan hasil , maka capaian indikator urusan social belum menunjukkan hasil yang baik. Hanya aspek adanya regulasi santunan kematian yang sudah memenuhi tarhet sejak tahun 2018. Sedangkan aspek Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial hanya mampu ditangani sebesar 16,95% pada tahun 2020 dan 17,85% tahun 2021. Untuk Persentase PMKS yang tertangani dan Persentase PMKS skala yang memperoleh bantuan social untuk pemenuhan kebutuhan dasar tidak diketahui target dan capaiannya. Capaian Indikator Layanan Urusan Wajib Dasar Urusan Sosial dapat dilihat dalam

Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ada dua indikator menunjukkan sudah sesuai target meskipun tidak signifikan yaitu Proporsi kursi yang diduduki



perempuan di DPR sebesar 16,50% pada tahun 2021 sama seperti capaian tahun 2020. Di samping itu indikator Rasio KDRT juga berhasil diturunkan menjadi 0,10% pada tahun 2021. Sedangkan indikator Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah tidak memiliki data capaian tahun 2020 dan 2021.

Hasil capaian indikator yang positif untuk Urusan Lingkungan hidup adalah Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah ber HPL/HGB yakni 13% pada tahun 2020 dan meningkat menjadi 14% pada tahun 2021. Sedangkan indikator yang masih membutuhkan kerja keras untuk merujukkannya adalah Tersusunnya RPPLH Kabupaten/Kota, Terintegrasinya RPPLH dalam rencana pembangunan kabupaten/kota, dan Terselenggaranya KLHS untuk K/R/P Tingkat daerah kabupaten. Capaian Indikator Layanan Wajib Non-Dasar Urusan Lingkungan Hidup.

Untuk Rasio penduduk ber-KTP per satuan penduduk pada tahun 2020 mencapai 90,56% dan meningkat pada tahun 2021 yakni 93,79%. Rasio bayi berakta kelahiran pada tahun 2020 mencapai 88,74% dan meningkat pada tahun 2021 sebesar 89,37%. Untuk indikator Penerapan KTP Nasional berbasis NIK sudah dicapai sejak tahun 2018 hingga tahun 2021. Cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP) pada tahun 2020 sebesar 90,56% dan meningkat menjadi 93,79%. Capaian Indikator Layanan Wajib Non-Dasar Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Cakupan Layanan Telekomunikasi pada tahun 2020 dan 2021 berhasil direalisasikan sama yakni 95% meningkat dari tahun 2019 yang mencapai 85%. Demikian pula dengan Persentase penduduk yang menggunakan HP/telepon yang sejak tahun 2018 hingga 2021 dapat dicapai sebesar 85% lebih tinggi dari kondisi awal di tahun 2017 yang hanya sebesar 74%.

Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik tercapai pada tahun 2019 sebesar 242,56% dan meningkat menjadi 274,56% pada tahun 2020. Sedangkan pada tahun 2021 capaian panjang jaringan jalan dalam kondisi baik adalah 246,124% hanya sedikit di bawah target 286,56%. Untuk Rasio panjang jalan dengan jumlah penduduk sudah tercapai pada tahun 2019 rasionya adalah 0,163 dan masih tetap sama pada tahun 2020. Sedangkan pada tahun 2021 tercapai rasio 0,146 di atas target yakni 0,131. Satu-satunya indikator yang masih perlu mendapat perhatian adalah Jumlah sawah yang terlayani irigasi yakni dari target 17.597 ha



hanya tercapai 9.051 ha pada tahun 2019. Turun menjadi 5.700 ha pada tahun 2020 dan tahun 2021.

6.8. Arahan Kebijakan RPJPD Kabupaten Nagan Raya Tahun 2025-2045

Dengan mempertimbangkan skenario pencapaian TPB dan arahan rekomendasi maka dapat dirumuskan kata kunci visi Kabupaten Nagan Raya Tahun 2025–2045 adalah sebagai berikut :

Islami dimaknai sebagai kondisi kehidupan masyarakat Kabupaten Nagan Raya yang religius dengan menjalankan ajaran Syariat Islam secara kaffah baik dari segi Aqidah, Syariah maupun Akhlak dalam seluruh aspek kehidupan masyarakat.

Maju dimaknai sebagai kondisi masyarakat Kabupaten Nagan Raya cerdas, sehat dan sejahtera dari aspek perekonomian, memiliki keunggulan dalam berbagai sektor, mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi serta mampu bersaing pada tingkat nasional dan internasional dalam segala bidang.

Inovatif dimaknai sebagai kondisi masyarakat Kabupaten Nagan Raya yang mampu menjalankan kehidupan yang sarat dengan ide dan kreatif, mampu menyesuaikan dengan perkembangan masa untuk memberikan kemudahan-kemudahan dan nilai tambah dalam menjalani kehidupan yang lebih sejahtera.

Berkelanjutan dimaknai sebagai kondisi pembangunan Kabupaten Nagan Raya yang terus berkembang dengan menjaga keseimbangan pengelolaan Sumber Daya Alam, Kelestarian Lingkungan Hidup untuk kebutuhan generasi saat ini serta jaminan sumber daya untuk kehidupan yang sehat dan sejahtera bagi generasi yang akan datang.

“NAGAN RAYA ISLAMI, MAJU, INOVATIF DAN BERKELANJUTAN”

Rekomendasi untuk penyusunan Misi RPJPD Kabupaten Nagan Raya Tahun 2025 – 2045:

6.8.1. Misi Daerah Tahun 2025-2045

Untuk mewujudkan visi pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Nagan Raya Tahun 2025-2045, ditetapkan 6 misi sebagai berikut:

- 1. Mewujudkan Kehidupan Masyarakat yang Islami** melalui penerapan Syariat Islam dalam seluruh dimensi kehidupan dan menjadikan Syariat Islam sebagai pedoman dalam mencapai kebahagiaan dan kesejahteraan dunia dan akhirat.



2. **Mewujudkan Sumberdaya Manusia yang Berkualitas** yang sehat dan cerdas serta sejahtera melalui peningkatan derajat kesehatan, pendidikan yang berkualitas dan merata serta sejahtera lahir dan bathin. SDM unggul merujuk pada sumber daya manusia yang memiliki kemampuan dan kompetensi yang luar biasa. Ini dapat dilihat dari sejumlah faktor, termasuk pendidikan, pengalaman, kemampuan berpikir kritis, kemampuan berkomunikasi, dan kemampuan bekerja dalam tim. Untuk menuju Indonesia Emas 2045 diharapkan SDM di Kabupaten Nagan Raya unggul dan berdaya saing.
3. **Mewujudkan Perekonomian Daerah yang Tangguh Berbasis Potensi Unggulan dan Berorientasi pada Ekonomi Kerakyatan** dengan mengoptimalkan peran serta masyarakat melalui pengembangan investasi, UMKM dan peran serta masyarakat dalam berbagai aktivitas perekonomian. (BP) Transformasi struktural didefinisikan sebagai perubahan struktur ekonomi dari sektor tradisional yang memiliki produktivitas rendah menuju sektor ekonomi dengan produktivitas tinggi.
4. **Mewujudkan Kesejahteraan Sosial Masyarakat** dengan mengurangi jumlah penduduk miskin dan menghapus kemiskinan ekstrem, meningkatkan perlindungan sosial, perluasan lapangan pekerjaan, dan memperluas akses masyarakat untuk menikmati hasil pembangunan.
5. **Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Pemerintah yang Bersih serta Inovatif** dengan meningkatkan pelaksanaan prinsip-prinsip akuntabilitas, pencegahan korupsi, peningkatan kredibilitas, peningkatan kualitas layanan publik, keterbukaan informasi dan pengelolaan sumber daya secara efektif dan efisien.
6. **Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan dan Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup** dengan mewujudkan keseimbangan pengelolaan Sumber Daya Alam, pengelolaan lingkungan hidup secara berkelanjutan, peningkatan kearifan lokal untuk meningkatkan kualitas lingkungan, peningkatan regulasi terkait permasalahan pertanahan dan kehutanan serta mitigasi terhadap bencana.

Pertumbuhan penduduk yang terus-terus meningkat dikarenakan semakin tinggi data tarik kota tersebut, terutama apabila dilihat dari sektor ekonomi. Hal ini tentu saja meningkatkan akan tata ruang dan perencanaan kota, untuk fasilitas perumahan, ruang terbuka hijau, aktifitas perdagangan, jasa, dan lain sebagainya. Hal ini yang menyebabkan persaingan pemanfaatan ruang, apalagi di Kawasan yang memang sudah berkembang, persaingan akan lebih semakin ketat.

Rencana pembangunan di Kabupaten Nagan Raya sampai dengan Tahun 2045 diarahkan pada :

- 1) Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang unggul dan berdaya saing



PEMERINTAH KABUPATEN NAGAN RAYA
KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS (KLHS)
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD)

- 2) Mewujudkan Pelayanan Pendidikan yang Berkualitas
- 3) Mewujudkan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas
- 4) Mewujudkan ruang investasi menuju pertumbuhan ekonomi yang Berdaya Saing Tinggi.
- 5) Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif, transparan, akuntabel dan pelayanan publik yang berkualitas
- 6) Mewujudkan pemerataan Pembangunan yang berkualitas;
- 7) Mewujudkan Ketahanan energi, air, bencana dan pangan
- 8) Mewujudkan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang Aman, Tangguh dan Berkelanjutan.
- 9) Mewujudkan Kerukunan, Ketentraman, ketertiban dan Kenyamanan.



PEMERINTAH KABUPATEN NAGAN RAYA
KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS (KLHS)
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD)

Tabel 6.19. Arah Kebijakan dan Sasaran Pokok sesuai Tahapan Periode Pembangunan Tahun 2025 -2045

	Tahap I Tahun 2025-2029	Tahap II Tahun 2030-2034	Tahap III Tahun 2035-2039	Tahap IV Tahun 2040-2045
Arah Kebijakan	Penguatan Fondasi Transformasi	Percepatan Transformasi	Peningkatan Daya Saing	Terwujudnya Nagan Raya Unggul
	1. Transformasi Syariat Islam; 2. Transformasi Sosial; 3. Transformasi Ekonomi; 4. Transformasi Tata Kelola; dan 5. Pengelolaan Lingkungan Hidup Berkelanjutan.	1. Transformasi Pelaksanaan Syariat Islam. 2. Transformasi sosial 3. Transformasi Ekonomi 4. Transformasi Tatakelola 5. Pengelolaan Lingkungan Hidup Berkelanjutan.	1. Transformasi Pelaksanaan Syariat Islam 2. Transformasi sosial 3. Transformasi Ekonomi 4. Transformasi Tatakelola 5. Pengelolaan Lingkungan Hidup Berkelanjutan	1. Transformasi Pelaksanaan Syariat Islam 2. Transformasi Sosial 3. Transformasi Ekonomi 4. Transformasi Tata Kelola 5. Pengelolaan Lingkungan Hidup Berkelanjutan
Sasaran Pokok	Sasaran Pokok I : Penguatan Pelaksanaan Syariat Islam: Arah Kebijakan: 1. Peningkatan mutu dan kemandirian dayah/ pesantren melalui peningkatan manajemen yang profesional, pemberdayaan sumber daya ekonomi dayah, pembinaan aqidah, akhlak, penguatan peran dan fungsi masjid 2. Meningkatkan kualitas kehidupan beragama, meningkatkan Kualitas SDM yang cerdas dan sehat 3. Penguatan kapasitas tenaga pengajar dan santri melalui media pembelajaran berbasis teknologi informasi (IT)	Sasaran Pokok II : Optimalisasi pengelolaan ZIS Arah Kebijakan: 1. Penguatan fondasi kelembagaan dalam pengelolaan Zakat, Infaq dan Sadaqah (ZIS) dengan pelayanan yang mendukung pelaksanaan Syariat Islam. 2. Penguatan kelembagaan pengelola Zakat, Infaq dan Sadaqah (ZIS) yang menyasar peningkatan ibadah keagamaan dan pelayanan dasar.	Sasaran Pokok III : Peningkatan kualitas pendidikan: Arah Kebijakan: 1. Penguatan lembaga pendidikan formal dan non-formal melalui pemenuhan indikator standar pelayanan minimal dan standar nasional urusan pendidikan yang menjadi kewenangan pemerintah Kabupaten Nagan Raya 2. Penguatan dan peningkatan kapasitas pendidik, tenaga pendidik, dan anak didik baik pada lembaga formal maupun non-formal dalam rangka menurunkan angka putus sekolah baik jenang SD/MI, SMP/MTs, maupun SMA/MA	Sasaran Pokok IV : Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia : Arah Kebijakan: 1. Pelaksanaan sistem merit melalui reward dan punishment terkait dengan kinerja ASN di Kab. Nagan Raya dalam upaya peningkatan Indeks Profesional ASN (IP ASN) 2. Percepatan wajib belajar 13 tahun (1 tahun pra sekolah dan 12 tahun pendidikan dasar dan pendidikan menengah) 3. Meningkatkan Literasi masyarakat 4. Pelaksanaan penilaian kinerja ASN melalui sistem merit yang profesional dan terintegrasi



PEMERINTAH KABUPATEN NAGAN RAYA
KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS (KLHS)
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD)

	Tahap I Tahun 2025-2029	Tahap II Tahun 2030-2034	Tahap III Tahun 2035-2039	Tahap IV Tahun 2040-2045
	4. Meningkatkan nilai-nilai syariat Islam yang kaffah dalam kehidupan sehari-hari dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara lahir bathin 5. Terwujudnya kehidupan masyarakat Kabupaten Nagan Raya yang islami dalam seluruh dimensi kehidupan, menurunnya pelanggaran syariat islam, tumbuh kembangnya budaya islami dalam kehidupan sehari-hari, terwujudnya SDM yang islami, cerdas dan sehat 6. Meningkatkan kualitas SDM petugas Wilayatul Hisbah (WH) sebagai ujung tombak pelaksanaan pengawasan syariat islam.		3. Kualitas SDM Nagan Raya yang unggul dan handal serta berdaya saing 4. Tenaga Pendidik sekolah formal dan non-formal yang unggul dan bersaing dengan tenaga pendidik skala nasional dan regional 5. Peningkatan pengelolaan guru dan tenaga pendidikan 6. Peningkatan Akreditasi Sekolah PAUD dan Pendidikan Dasar 7. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat melalui peningkatan kualitas layanan bidang kesehatan baik di rumah sakit, puskesmas,ustu dan polindes 8. Peningkatan Kualitas dan pengelolaan tenaga kesehatan lainnya 9. Peningkatan akreditasi Fasilitas Kesehatan	melalui sistem informasi teknologi yang fair melalui IKU dan IKK yang terukur 5. Peningkatan akses pendidikan dasar, Penguatan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat dan pesantren/dayah, serta pengembangan sekolah berbasis asrama 6. Peningkatan peran dan fungsi perpustakaan baik tingkat kabupaten, kecamatan maupun tingkat desa serta peningkatan operasional perpustakaan keliling 7. Tenaga Pendidik sekolah formal dan non-formal yang unggul dan bersaing dengan tenaga pendidik skala nasional dan regional 8. Berkembangnya Sekolah-sekolah unggulan yang dapat bersaing 9. Kualitas SDM Nagan Raya yang unggul dan handal serta berdaya saing 10. Pemerataan penyediaan sarana dan prasarana pendidikan Luar biasa dan menengah yang memenuhi standar dan aman



PEMERINTAH KABUPATEN NAGAN RAYA
KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS (KLHS)
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD)

	Tahap I Tahun 2025-2029	Tahap II Tahun 2030-2034	Tahap III Tahun 2035-2039	Tahap IV Tahun 2040-2045
				bencana, dan sarana transportasi khusus peserta didik sesuai kondisi daerah;
Sasaran Pokok	Sasaran Pokok V : Perluasan lapangan kerja dan peningkatan skill tenaga kerja berkualitas : Arah Kebijakan: 1. Optimalisasi penyerapan tenaga kerja lokal sesuai dengan kompetensi, peningkatan kerjasama pelatihan dengan dunia usaha dan perguruan tinggi 2. Perluasan lapangan kerja peningkatan skill tenaga kerja, penguatan dan pengembangan kurikulum pendidikan menengah kejuruan/vokasi berbasis kondisi lokal, potensi, dan keunggulan daerah, serta meningkatkan keterkaitannya dengan dunia usaha dan dunia industri 3. Peningkatan skill tenaga kerja melalui peningkatan peran dan fungsi balai latihan kerja, kerjasama dengan dunia usaha serta peningkatan aktivitas umkm 4. Peningkatan kesempatan kerja dan kompetensi tenaga kerja melalui	Sasaran Pokok VI : Peningkatan PAD dengan mengoptimalisasi sumber - sumber PAD yang baru : Arah Kebijakan: 1. Peningkatan dan optimalisasi sumber-sumber pendapatan daerah melalui peningkatan Pajak dan Retribusi daerah sesuai dengan kewenangan serta penguatan UMKM melalui penguatan kelembagaan, SDM serta permodalan 2. Peningkatan PAD melalui sistem reward dan punishment terhadap wajib pajak yang sesuai dengan ketentuan 3. Pemanfaatan PAD dan dana lainnya untuk meningkatkan ekonomi rakyat melalui peningkatan produksi berbasis UMKM serta industri kecil 4. Peningkatan kesempatan kerja dan kompetensi tenaga kerja melalui transformasi ilmu pengetahuan dan pemanfaatan teknologi	Sasaran Pokok VII : Peningkatan ekonomi masyarakat dan penguatan pengelolaan UMKM : Arah Kebijakan: 1. Peningkatan dan optimalisasi sumber-sumber pendapatan daerah melalui peningkatan Pajak dan Retribusi daerah sesuai dengan kewenangan serta penguatan UMKM melalui penguatan kelembagaan, SDM serta permodalan 2. Peningkatan PAD melalui sistem reward dan punishment terhadap wajib pajak yang sesuai dengan ketentuan 3. Pemanfaatan PAD dan dana lainnya untuk meningkatkan ekonomi rakyat melalui peningkatan produksi berbasis UMKM serta industri kecil 4. Peningkatan kesempatan kerja dan kompetensi tenaga kerja melalui transformasi ilmu pengetahuan dan pemanfaatan teknologi	



PEMERINTAH KABUPATEN NAGAN RAYA
KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS (KLHS)
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD)

	Tahap I Tahun 2025-2029	Tahap II Tahun 2030-2034	Tahap III Tahun 2035-2039	Tahap IV Tahun 2040-2045
	transformasi ilmu pengetahuan dan pemanfaatan teknologi			
	Sasaran Pokok VIII : Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat : Arah Kebijakan: 1. Transformasi Ekonomi, dilaksanakan dengan Peningkatan Investasi melalui Hilirisasi produk perkebunan, penguatan UMKM, peningkatan pendapatan ril masyarakat) 2. Membuka lapangan kerja untuk menurunkan pengangguran 3. Percepatan Trasformasi Ekonomi dilakukan dengan Peningkatan Investasi melalui hilirisasi produk perkebunan sawit, peningkatan kuantitas dan kuanitas hasil produksi UMKM, perluasan kesempatan kerja melalui peningkatan ketrampilan tenaga kerja)	Sasaran Pokok IX : Peningkatan derajat kesehatan: Arah Kebijakan: 1. Peningkatan kesadaran pola hidup bersih dan sehat (PHBS). 2. Pengurangan kantong-kantong Kemiskinan 3. Penghapusan wilayah Kumuh, 4. Peningkatan akses sanitasi dan air bersih 5. Menurunkan prevalensi stunting 6. Peningkatan kualitas layanan Kesehatan 7. Peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga kesehatan profesional dan sarana prasarana kesehatan	Sasaran Pokok X : Tata kelola Pemerintahan yang Baik dan Pemerintah yang Bersih : Arah Kebijakan: 1. Transformasi Tata Kelola, dilaksanakan melalui peningkatan akuntabilitas dan profesionalisme pelayanan administrasi kependudukan yang mencakup keseluruhan masyarakat 2. Penguatan perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah yang transparan dan akuntabel serta meningkatkan pengawasan dalam pelaksanaan pembangunan daerah 3. Percepatan Transformasi Tata Kelola dilakukan melalui Optimalisasi kinerja Pejabat Fungsional, transformasi manual sistem ke digital sistem dalam segala aspek pelaksanaan pemerintahan, peningkatan kualitas SDM perencanaan,	Sasaran Pokok XI : Pelayanan pemerintahan yang inovatif : Arah Kebijakan: 1. Meningkatkan kerjasama penelitian dan pengembangan Inovasi Daerah dengan dunia usaha dan perguruan tinggi 2. Percepatan transformasi digital sektor prioritas 3. Aplikasi hasil - hasil riset dan inovasi daerah dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah 4. Percepatan digitalisasi pelayanan publik dan peningkatan respon terhadap laporan masyarakat



PEMERINTAH KABUPATEN NAGAN RAYA
KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS (KLHS)
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD)

	Tahap I Tahun 2025-2029	Tahap II Tahun 2030-2034	Tahap III Tahun 2035-2039	Tahap IV Tahun 2040-2045
	4. Meningkatkan jumlah usaha Mikro dan Kecil 5. Perluasan kesempatan kerja akses permodalan, serta pengembangan sektor ekonomi kreatif dan meningkatkan kegiatan kepariwisataan 6. Pengembangan kawasan transmigrasi 7. Penguatan kerja sama pengembangan riset dan inovasi terutama pada sektor-sektor pengembangan ekonomi produktif serta penguatan kerjasama riset dan inovasi dengan dunia usaha dan perguruan tinggi		- kerjasama antar lembaga, perguruan tinggi dan elemen masyarakat) 4. Peningkatan kapasitas fiskal daerah melalui intensifikasi pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah 5. Peningkatan Daya Saing dalam konteks transformasi Tata Kelola difokuskan pada peningkatan pelayanan publik melalui sistem birokrasi yang cepat dan mudah dan bebas korupsi 6. Penguatan potensi pembiayaan alternatif & kreatif daerah (antara lain pinjaman daerah, KPBUD, CSR, jasa ekosistem, dan sebagainya) 7. Peningkatan kualitas belanja daerah, optimalisasi pemanfaatan Transfer ke Kabupaten/kota (TKD)	5. Pengembangan riset dan inovasi tematik untuk mendukung pelaksanaan pengelolaan pemerintahan dan peningkatan pelayanan publik 6. Penyediaan sarana dan prasarana telekomunikasi dan akses digital (internet berkecepatan tinggi) untuk mendukung percepatan transformasi digital 7. Penguatan ekosistem riset dan inovasi IPTEK di daerah dalam rangka mendukung percepatan tumbuh kembangnya hasil - hasil riset dan inovasi yang dapat diaplikasikan untuk pengambilan kebijakan



PEMERINTAH KABUPATEN NAGAN RAYA
KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS (KLHS)
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD)

	Tahap I Tahun 2025-2029	Tahap II Tahun 2030-2034	Tahap III Tahun 2035-2039	Tahap IV Tahun 2040-2045
				8. Percepatan digitalisasi layanan publik dan pelaksanaan audit SPBE untuk penguatan aspek pemerintahan digital
	Sasaran Pokok XII : Pengelolaan lahan pertanian berkelanjutan serta perlindungan dan konservasi sumber daya alam: Arah Kebijakan: 1. Peningkatan ketahanan masyarakat terhadap bencana serta peningkatan mitigasi 2. Penegakan standar keandalan bangunan yang berketahanan bencana dan iklim 3. Penguatan infrastruktur dasar untuk mendukung perekonomian terutama pada wilayah perdesaan yang menghubungkan ke wilayah pusat perekonomian	Sasaran Pokok XIII : Percepatan penyelesaian konflik pertanahan serta kejelasan status tanah: Arah Kebijakan: 1. Penguatan dukungan infrastruktur kebijakan dan sosial masyarakat adat 2. Pemberdayaan masyarakat untuk menurunkan jumlah konflik tenurial 3. Optimalisasi pemanfaatan rumah <i>collaborative justice</i> dan mediator 4. Peningkatan kerja sama dengan masyarakat adat, perguruan tinggi, dan dunia usaha untuk	Sasaran Pokok XIV : Peningkatan kualitas lingkungan hidup: Arah Kebijakan: 1. Peningkatan kerjasama dengan unsur masyarakat adat, dunia usaha, perguruan tinggi dalam rangka menjaga kelestarian lingkungan hidup 2. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan Pengarusutamaan dan pelaksanaan Ekonomi Hijau 3. Peningkatan upaya pelestarian hutan lindung dan ekosistem alami 4. Menurunkan Kerusakan Kawasan Hutan dan Pemberdayaan masyarakat di kawasan penyangga dan penanggulangan konflik satwa liar	Sasaran Pokok XV : Peningkatan sarana infrastruktur yang menghubungkan wilayah pinggiran dengan pusat perekonomian: Arah Kebijakan: 1. Meningkatkan jumlah jalan dalam kondisi baik dan layak 2. Meningkatkan jumlah jalan baru yang dibuka 3. Menambah jumlah armada angkutan umum daerah.



PEMERINTAH KABUPATEN NAGAN RAYA
KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS (KLHS)
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD)

	Tahap I Tahun 2025-2029	Tahap II Tahun 2030-2034	Tahap III Tahun 2035-2039	Tahap IV Tahun 2040-2045
	4. Peningkatan kualitas desa dan masyarakat tangguh bencana 5. Penguatan kebijakan mitigasi, kesiapsiagaan, dan kontijensi bencana dan iklim	preventif konflik tenurial	5. Peningkatan koordinasi pencegahan dan penanganan kerusakan/kebakaran hutan dan lahan 6. Peningkatan koordinasi penanggulangan illegal Mining	

Skenario rekomendasi merupakan usulan rekomendasi untuk dimasukkan dalam dokumen RPJPD secara keseluruhan baik dari latar belakang RPJPD, isu strategis sebagai gambaran kondisi umum Kabupaten Nagan Raya, serta indikator kinerja daerah maupun indikator urusan dalam dokumen RPJPD Kabupaten Nagan Raya. Berdasarkan perumusan skenario dalam bab sebelumnya yang memprakirakan kondisi lingkungan hidup dan juga target indikator TPB yang belum tercapai dan belum menjadi indikator maka secara umum rekomendasi Skenario alternatif KLHS RPJPD terhadap arah kebijakan pembangunan jangka panjang Kabupaten Nagan Raya Tahun 2025-2045 ditampilkan pada **Tabel 6.11.**



PEMERINTAH KABUPATEN NAGAN RAYA
KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS (KLHS)
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD)

Tabel 6.20. Rekomendasi Umum Arah Kebijakan dan Skenario Alternatif

No	Isu Prioritas KLHS RPJPD	Rekomendasi KLHS RPJPD terhadap arah kebijakan	Indikator	Indikator TPB	Skenario Alternatif / Upaya Tambahan
1	Pelayanan Dasar (Sosial, Pendidikan dan Kesehatan)	Peningkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia (SDM) lokal yang akan menjadi modal dasar pembangunan, serta percepatan pengentasan kemiskinan	1. Indeks Pembanguana Manusia (IPM) 2. Indeks Pendidikan Angka Kematian Ibu (AKI). 3. Prevalensi stunting pada balita (%) 4. Prevalensi kekurangan gizi pada anak 5. Prevalensi malnutrisi anak pada usia kurang dari 5 tahun 6. Cakupan kepesertaan jaminan Kesehatan nasional (%) 7. Angka Partisipasi Kasar (APK) (%) 8. Tingkat kemiskinan (%) Indeks Gini 9. Tingkat Pengangguran Terbuka (%).	3.1.1* 2.2.1 2.2.1.(a) 2.2.2* 3.8.2.(a) 4.1.1.(d) 4.1.1.(e) 4.2.2.(a) 10.1.1* 10.1.1.(a)	1. Peningkatan layanan kesehatan untuk menangani masalah seperti malnutrisi, kematian ibu dan stunting, dan kekurangan gizi. 2. Pengembangan pendidikan khusus untuk memenuhi kebutuhan pembangunan daerah berbasis ekonomi sosial ekologi berkelanjutan. 3. Perluasan akses terhadap layanan air minum yang layak. 4. Peningkatan kebersihan lingkungan 5. Meningkatkan layanan jaminan sosial untuk kelompok masyarakat yang rawan 6. Menyediakan lapangan kerja bagi kelompok masyarakat miskin untuk mengurangi putus sekolah
2	Ekonomi Inklusif	Terwujudnya peningkatan kesejahteraan masyarakat secara merata yang berbasis pada kemandirian ekonomi	1. Laju pertumbuhan PDB per kapita 2. PDB per kapita 3. Persentase akses UMKM	8.1.1* 8.1.1.(a) 8.3.1.(c) 8.5.2*	1. Percepatan transformasi ekonomi yang berfokus pada potensi lokal 2. Peningkatan nilai tambah ekonomi lokal dengan mewujudkan
			4. Tingkat pengangguran terbuka (%) 5. Proporsi PDRB 6. Indeks ekonomi hijau 7. Laju pertumbuhan ekonomi	9.2.1*	kesejahteraan masyarakat yang bergantung pada ekonomi lokal yang berdaya saing 3. Pengembangan produksi sektor pertanian yang berbasis berkelanjutan 4. Pengembangan potensi perikanan dan



PEMERINTAH KABUPATEN NAGAN RAYA
KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS (KLHS)
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD)

3	Mitigasi kebencanaan dan adaptasi dampak perubahan iklim	Perencanaan tata ruang dengan mempertimbangkan risiko bencana	1. Persentase penurunan emisi GRK (%) 2. Prevelensi ketidakcukupan pangan 3. Proporsi populasi yang memiliki akses layanan sumber air minum aman dan berkelanjutan/Jumlah rumah tangga pengguna air	1.5.1.(a) 1.5.1.(b) 2.1.1* 6.1.1.(a) 6.1.1.(c)	1. Penyediaan dan penguatan infrastruktur pada kawasan permukiman di wilayah rentan terhadap bencana banjir dengan pembuatan kolam retensi
4	Pencemaran dan Kerusakan lingkungan hidup	Pengembangan pusat pertumbuhan baru dan	1. Indeks kualitas lingkungan hidup	6.2.1.(d) 6.3.2.(b)	1. Peraturan lingkungan yang lebih ketat
		optimalisasi kawasan strategis yang sudah terbangun, seperti pengembangan industri pengolahan terpadu ramah lingkungan berbasis komoditas unggulan;	2. Jumlah perusahaan yang menerapkan norma K3 3. Jumlah desa/kelurahan yang Open Defecation Free (ODF) 4. Persentase volume sampah yang ditangani 5. Rasio luas ruang terbuka hijau	8.8.1.(a) 11.6.1.(a) 11.7.1.(a)	2. Penetapan kawasan hutan yang dilindungi untuk mempertahankan keanekaragaman hayati, 3. Peningkatan sistem daur ulang dan pengelolaan limbah plastik.
5	Ketahanan potensi keanekaragaman hayati	Optimalisasi pemanfaatan sumber daya alam dengan memperhatikan kelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup	1. Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment) 2. Prevalensi penduduk dengan kerawanan pangan sedang atau berat, berdasarkan pada Skala Pengalaman Kerawanan Pangan. 3. Penetapan kawasan pertanian(rupiah per tenaga kerja) 4. Proporsi tutupan hutan terhadap luas lahan keseluruhan 5. Dokumen rencana pemanfaatan keanekaragaman hayati 6. Proporsi hewan ternak dan sejenisnya diklasifikasikan menurut Tingkat resiko	2.1.1* 2..1.2* 2.4.1 2.5.2 15.1.1.(a) 15.9.1.(a)	1. Perencanaan tata ruang dan kebijakan yang mempertimbangkan daya dukung, daya tampung, luasan hutan, dan perubahan iklim 2. Percepatan proses rehabilitasi dan reklamasi lahan pasca tambang 3. Pengadopsian cara pemanfaatan sumber daya alam dengan berkelanjutan 4. Percepatan upaya transformasi pemanfaatan sumber daya alam berkelanjutan di beragam sektor 5. Pengembangan perhutanan sosial yang dengan pemanfaatan hutan namun memperhatikan ekologi 6. Peningkatan upaya pelestarian hutan lindung



PEMERINTAH KABUPATEN NAGAN RAYA
KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS (KLHS)
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD)

6	Tata Kelola dan Hukum	Terwujudnya tranformasi tata kelola pemerintahan dan mendukung Stabilitas dan Kondusifitas untuk mendorong Nagan Raya yang Islami, maju dan berkelanjutan	1. Indeks reformasi birokrasi 2. Indeks pelayanan publik 3. Indeks inovasi daerah 4. Persentase peningkatan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) 5. Persentase nilai SAKIP 6. Jumlah penanganan pengaduan pelanggaran HAM 7. Indeks perilaku anti korupsi (IPAK)	16.5.1.(a) 16.6.1.(a) 16.6.1.(b) 16.10.1.(b)	1. Penguatan fondasi tata kelola pemerintah dalam upaya pembangunan Nagan Raya jangka panjang 2. Perbaikan secara signifikan kualitas tata kelola pemerintahan 3. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang berdampak terhadap percepatan kualitas pembangunan Nagan Raya secara signifikan 4. Terwujudnya kualitas tata kelola pemerintahan untuk mendorong Nagan Raya yang Islami, maju, dan berkelanjutan 5. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam proses kebijakan

Tabel 6.21. Pengintegrasian Rekomendasi KLHS dalam RPJPD Kabupaten Nagan Raya

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)	Isu Strategis KLHS	Rekomendasi KLHS	INTEGRASI DALAM RPJPD				
			Kondisi Umum Daerah	Permasalahan Terkait Pembangunan	Misi RPJPD	Tujuan dan Sasaran	Strategi dan Arah Kebijakan
1	2	3	4	5	6	7	8
Tujuan 1: Mengakhiri Kemiskinan dalam Segala Bentuk Dimanapun	1. Rendahnya kualitas dan kuantitas infrastruktur dan pelayanan dasar yang meliputi pendidikan, kesehatan, pemukiman, air bersih, keagamaan, ruang terbuka hijau, persampahan, pasar 2. Rendahnya ketersediaan SDM	1. Memperluas dan menyempurnakan pelaksanaan sistem jaminan sosial terutama jaminan kesehatan dan ketenagakerjaan; 2. Meningkatkan ketersediaan penyediaan pelayanan dasar yang disertai dengan peningkatan	Kabupaten Nagan Raya dalam pembangunan berwawasan kependudukan, hal ini disebabkan tingkat pendidikan, kemiskinan, fertilitas masih menjadi catatan garapan serius bagi pembangunan di	Kabupaten Nagan Raya selalu berada dibawah rata-rata nasional. Terlebih, pada tahun 2020-2021, akibat pandemic Covid-19 dan dampaknya, ekonomi Kabupaten Nagan Raya tertekan	Mewujudkan Perekonomian Daerah yang Tangguh Berbasis Potensi Unggulan dan Berorientasi pada Ekonomi Kerakyatan dengan mengoptimalkan peran serta	Tujuan 1.1 : Meningkatnya Perekonomian Daerah Sasaran 1.1.1: Meningkatnya Nilai Investasi Sasaran 1.1.2 : Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Industri dan Sektor	Meningkatkan penyerapan tenaga kerja lokal dan mengoptimalkan diversifikasi pangan lokal non-beras



PEMERINTAH KABUPATEN NAGAN RAYA
KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS (KLHS)
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD)

	yang berkualitas dan berdaya saing. 3. Kurangnya ketersediaan fasilitas/infrastruktur penunjang ekonomi, akses pemodalan dan hilirisasi produk 4. Belum optimalnya penerapan teknologi informasi untuk menunjang kegiatan ekonomi, sosial, lingkungan dan kegiatan pemerintahan 5. Meningkatnya risiko kejadian bencana alam akibat perubahan iklim, kerusakan kawasan lindung dan alih fungsi lahan. 6. Penurunan kualitas dan kuantitas DDDT-LH akibat pencemaran dari berbagai sumber	kualitas pelayanannya dan jangkauannya bagi masyarakat miskin dan rentan berupa pelayanan administrasi, kependudukan, pelayanan kesehatan, pendidikan, perlindungan sosial dan infrastruktur dasar; 3. Meningkatkan kemampuan penduduk miskin dalam mengembangkan penghidupan yang berkelanjutan melalui penguatan asset sosial penduduk miskin, peningkatan kemampuan berusaha dan bekerja penduduk miskin, dan peningkatan dan perluasan akses penduduk miskin terhadap modal.	Kabupaten Nagan Raya	sangat dalam turun mencapai 3,56% Dampak pandemic Covid-19 mungkin akan terus berlanjut selama beberapa tahun mendatang.	masyarakat melalui pengembangan investasi, UMKM dan peran serta masyarakat dalam berbagai aktivitas perekonomian.	Perdagangan terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah Tujuan 1.2 : Meningkatnya Pemenuhan Infrastruktur Wilayah Sasaran 1.2.1 : Meningkatnya Pemenuhan Infrastruktur Wilayah Tujuan 1.3 : Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat yang merata Sasaran 1.3.1: Menurunnya Angka Kemiskinan Sasaran 1.3.2 : Menurunnya Pengangguran	
Tujuan 2 : Menghilangkan Kelaparan, Mencapai Ketahanan Pangan dan Gizi Yang	1. Rendahnya kualitas dan kuantitas infrastruktur dan pelayanan dasar yang meliputi pendidikan, kesehatan,	1. Peningkatan produksi padi dan sumber pangan protein dari dalam negeri; 2. Peningkatan kelancaran distribusi	Keadaan ketenagakerjaan di Kabupaten Nagan Raya pada periode Agustus 2020 - Agustus 2022	Akses masyarakat terhadap rumah layak huni, sanitasi layak dan air minum layak masih di bawah	Mewujudkan Perekonomian Daerah yang Tangguh Berbasis Potensi Unggulan dan	Tujuan 1.1 : Meningkatnya Perekonomian Daerah Sasaran 1.1.1:	Meningkatkan penyerapan tenaga kerja lokal dan mengoptimalkan diversifikasi pangan lokal non-beras



PEMERINTAH KABUPATEN NAGAN RAYA
KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS (KLHS)
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD)

Baik, serta Meningkatkan Pertanian Berkelanjutan	pemukiman, air bersih, keagamaan, ruang terbuka hijau, persampahan, pasar 2. Rendahnya ketersediaan SDM yang berkualitas dan berdaya saing. 3. Kurangnya ketersediaan fasilitas/infrastruktur penunjang ekonomi, akses pemodalan dan hilirisasi produk 4. Belum optimalnya penerapan teknologi informasi untuk menunjang kegiatan ekonomi, sosial, lingkungan dan kegiatan pemerintahan 5. Meningkatnya risiko kejadian bencana alam akibat perubahan iklim, kerusakan kawasan lindung dan alih fungsi lahan. 6. Penurunan kualitas dan kuantitas DDDT-LH akibat pencemaran dari berbagai sumber	dan penguatan stok pangan dalam negeri; 3. Perbaikan kualitas konsumsi pangan dan gizi masyarakat; dan 4. Mitigasi gangguan iklim terhadap produksi pangan.	menunjukkan kondisi yang cukup menguatirkan. Hal itu tergambar dari meningkatnya tingkat pengangguran sedangkan disatu sisi jumlah angkatan kerja, jumlah penduduk bekerja mengalami peningkatan. Hal ini dirasakan akibat dampak Pandemi Covid-19 yang banyak mempengaruhi iklim tenaga kerja Kabupaten Nagan Raya akibat adanya PHK, <i>Work From Home</i> sampai ke pengurangan jam kerja pegawai.	nasional. Persentase rumah layak huni, persentase rumah tangga dengan akses sanitasi layak dan persentase rumah tangga dengan air minum layak tahun 2022 masih berada dibawah rata-rata nasional.	Berorientasi pada Ekonomi Kerakyatan dengan mengoptimalkan peran serta masyarakat melalui pengembangan investasi, UMKM dan peran serta masyarakat dalam berbagai aktivitas perekonomian.	Meningkatnya Nilai Investasi Sasaran 1.1.2 : Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Industri dan Sektor Perdagangan terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah Tujuan 1.2 : Meningkatnya Pemenuhan Infrastruktur Wilayah Sasaran 1.2.1 : Meningkatnya Pemenuhan Infrastruktur Wilayah Tujuan 1.3 : Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat yang merata Sasaran 1.3.1: Menurunnya Angka Kemiskinan Sasaran 1.3.2 : Menurunnya Pengangguran	



PEMERINTAH KABUPATEN NAGAN RAYA
KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS (KLHS)
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD)

Tujuan 3: Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia	1. Rendahnya kualitas dan kuantitas infrastruktur dan pelayanan dasar yang meliputi pendidikan, kesehatan, pemukiman, air bersih, keagamaan, ruang terbuka hijau, persampahan, pasar 2. Rendahnya ketersediaan SDM yang berkualitas dan berdaya saing. 3. Kurangnya ketersediaan fasilitas/infrastruktur penunjang ekonomi, akses pemodalan dan hilirisasi produk 4. Belum optimalnya penerapan teknologi informasi untuk menunjang kegiatan ekonomi, sosial, lingkungan dan kegiatan pemerintahan 5. Meningkatnya risiko kejadian bencana alam akibat perubahan iklim, kerusakan kawasan lindung dan alih fungsi lahan.	1. Akselerasi pemenuhan akses pelayanan kesehatan ibu, anak, remaja, dan lanjut usia yang berkualitas; 2. Mempercepat perbaikan gizi masyarakat; 3. Meningkatkan pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan; 4. Meningkatkan akses pelayanan kesehatan yang berkualitas; 5. Meningkatkan ketersediaan, keterjangkauan, pemerataan, dan kualitas farmasi dan alat kesehatan; 6. Meningkatkan pengawasan obat dan makanan; 7. Meningkatkan ketersediaan, penyebaran, dan mutu sumber daya manusia kesehatan; 8. Meningkatkan promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat;	Angka Harapan Hidup merupakan alat untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk pada umumnya, dan meningkatkan derajat kesehatan pada khususnya. Perkembangan Angka Harapan Hidup di Kabupaten Nagan Raya Tahun 2019- 2020 yaitu: 2019 (69,14) dan 2020 (69,22).	Angka Harapan Hidup yang rendah di suatu daerah harus diikuti dengan program pembangunan kesehatan, dan program sosial lainnya termasuk kesehatan lingkungan, kecukupan gizi dan kalori termasuk program pemberantasan kemiskinan.	Mewujudkan Kesejahteraan Sosial Masyarakat dengan mengurangi jumlah penduduk miskin dan menghapus kemiskinan ekstrem, meningkatkan perlindungan sosial, perluasan lapangan pekerjaan, dan memperluas akses masyarakat untuk menikmati hasil pembangunan.	Tujuan 1.1 : Meningkatnya Perekonomian Daerah Sasaran 1.1.1: Meningkatnya Nilai Investasi Sasaran 1.1.2 : Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Industri dan Sektor Perdagangan terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah Tujuan 1.2 : Meningkatnya Pemenuhan Infrastruktur Wilayah Sasaran 1.2.1 : Meningkatnya Pemenuhan Infrastruktur Wilayah Tujuan 1.3 : Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat yang merata	Pembangunan sosial dijalankan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak individu warga negara, dan menjamin akses masyarakat untuk mendapat pelayanan sosial



PEMERINTAH KABUPATEN NAGAN RAYA
KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS (KLHS)
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD)

	6. Penurunan kualitas dan kuantitas DDDT-LH akibat pencemaran dari berbagai sumber	9. Memperkuat manajemen, penelitian pengembangan dan sistem informasi; 10. Memantapkan pelaksanaan sistem jaminan sosial nasional (SJSN) bidang kesehatan; 11. Mengembangkan dan meningkatkan efektifitas pembiayaan kesehatan.				Sasaran 1.3.1: Menurunnya Angka Kemiskinan Sasaran 1.3.2 : Menurunnya Pengangguran	
Tujuan 4: Menjamin Kualitas Pendidikan yang Inklusif dan Merata Serta Meningkatkan Kesempatan Belajar Sepanjang Hayat untuk Semua	1. Rendahnya kualitas dan kuantitas infrastruktur dan pelayanan dasar yang meliputi pendidikan, kesehatan, pemukiman, air bersih, keagamaan, ruang terbuka hijau, persampahan, pasar 2. Rendahnya ketersediaan SDM yang berkualitas dan berdaya saing. 3. Belum optimalnya penerapan teknologi informasi untuk menunjang kegiatan ekonomi, sosial, lingkungan dan	1. Melaksanakan wajib belajar 12 tahun; 2. Meningkatkan akses terhadap layanan pendidikan dan pelatihan keterampilan melalui peningkatan kualitas lembaga pendidikan formal; 3. Memperkuat jaminan kualitas (<i>quality assurance</i>) pelayanan pendidikan; 4. Memperkuat sistem penilaian pendidikan yang komprehensif dan kredibel;	Angka partisipasi sekolah usia 16 - 18 tahun di Kabupaten Nagan Raya dalam lima tahun terakhir (tahun 2018 -2022) menunjukan nilai yang semakin meningkat. Meningkatnya APS usia 16 - 18 tahun ini merupakan gambaran semakin tingginya kesadaran masyarakat untuk mengenyam pendidikan yang lebih tinggi terutama jenjang SMA/SMK/MA.	Angka partisipasi sekolah usia 16 - 18 tahun di Kabupaten Nagan Raya dalam lima tahun terakhir (tahun 2016 - 2020) menunjukan nilai yang semakin meningkat. Meningkatnya APS usia 16 - 18 tahun ini merupakan gambaran semakin tingginya kesadaran masyarakat untuk mengenyam pendidikan yang	Mewujudkan Sumberdaya Manusia yang Berkualitas yang sehat dan cerdas serta sejahtera melalui peningkatan derajat kesehatan, pendidikan yang berkualitas dan merata serta sejahtera lahir dan bathin.	Tujuan 4.1: Meningkatnya kualitas SDM dan Kesejahteraan Masyarakat Sasaran 4.1.1 : Meningkatnya akses dan kualitas pendidikan Sasaran 4.1.2 : Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat Sasaran 4.1.3 : Meningkatnya kesejahteraan masyarakat	Peningkatan APS pada pendidikan menengah ini tidak terlepas dari banyaknya program yang diluncurkan oleh pemerintah dalam memudahkan mereka bersekolah, terutama bagi golongan yang kurang mampu dengan adanya program Bantuan Khusus Siswa Miskin (BKSM) maupun Program Indonesia Pintar.



PEMERINTAH KABUPATEN NAGAN RAYA
KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS (KLHS)
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD)

	kegiatan pemerintahan	5. Meningkatkan pengelolaan dan penempatan guru;	Pada tahun 2020 APS sebesar 92,13 persen dan terus meningkat hingga pada tahun 2021 menjadi 92,46 persen.	lebih tinggi terutama jenjang SMA/SMK/MA.			
Tujuan 5: Mencapai Kesenjangan Gender dan Memberdayakan Kaum Perempuan	1. Rendahnya ketersediaan SDM yang berkualitas dan berdaya saing. 2. Belum optimalnya penerapan teknologi informasi untuk menunjang kegiatan ekonomi, sosial, lingkungan dan kegiatan pemerintahan 3. Belum optimalnya penerapan dan penyelenggaraan e-gov dan tata kelola pemerintahan yang bersih, bermartabat dan bebas korupsi.	1. Peningkatan pemahaman dan komitmen tentang pentingnya pengintegrasian perspektif gender dalam berbagai tahapan, proses, dan bidang pembangunan, di tingkat nasional maupun di daerah; 2. Penerapan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG) di dalam berbagai bidang pembangunan, terutama di bidang pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, politik, ekonomi, dan hukum.	Sekolah Perempuan adalah wadah pembelajaran dan mengelola pengetahuan perempuan yang utamanya dikembangkan di komunitas-komunitas miskin pedesaan, perkotaan, pesisir dan kepulauan terpencil. Mereka belajar secara intensif setiap 1 atau 2 minggu sekali di rumah-rumah penduduk, lahan kosong, pinggir sungai, pinggir pantai, di kantor RW atau balai desa.	Masih sedikitnya tenaga kerja perempuan	Mewujudkan Kehidupan Masyarakat yang Islami melalui penerapan Syariah Islam dalam seluruh dimensi kehidupan dan menjadikan Syariah Islam sebagai pedoman dalam mencapai kebahagiaan dan kesejahteraan dunia dan akhirat.	Tujuan 5.1 : Meningkatnya pemberdayaan perempuan serta perlindungan perempuan dan anak Sasaran 5.1.1 : Meningkatnya pemberdayaan perempuan serta perlindungan perempuan dan anak	Peningkatan Indeks pemberdayaan gender dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan yang melibatkan lingkup pemerintah provinsi dan kabupaten/kota
Tujuan 6: Menjamin	1. Rendahnya kualitas dan kuantitas	1. Menjamin ketahanan air melalui	Kondisi daya dukung dan daya tampung	Kondisi daya dukung dan daya	4.2.6. Mewuj	Tujuan 2.1: Meningkatnya	Meningkatkan sarana dan prasarana



PEMERINTAH KABUPATEN NAGAN RAYA
KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS (KLHS)
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD)

Ketersediaan Serta Pengelolaan Air Bersih dan Sanitasi yang Berkelanjutan untuk Semua	infrastruktur dan pelayanan dasar yang meliputi pendidikan, kesehatan, pemukiman, air bersih, keagamaan, ruang terbuka hijau, persampahan, pasar 2. Kurangnya ketersediaan fasilitas/infrastruktur penunjang ekonomi, akses pemodalan dan hilirisasi produk 3. Meningkatnya risiko kejadian bencana alam akibat perubahan iklim, kerusakan kawasan lindung dan alih fungsi lahan. 4. Penurunan kualitas dan kuantitas DDDT-LH akibat pencemaran dari berbagai sumber	peningkatan pengetahuan, perubahan sikap dan perilaku dalam pemanfaatan air minum dan pengelolaan sanitasi; 2. Penyediaan infrastruktur produktif dan manajemen layanan melalui penerapan manajemen aset baik di perencanaan, penganggaran, dan investasi; 3. Penyelenggaraan sinergi air minum dan sanitasi yang dilakukan di tingkat nasional, provinsi, kabupaten/kota, dan masyarakat; 4. Peningkatan efektifitas dan efisiensi pendanaan infrastruktur air minum dan sanitasi.	untuk status air masih sangat bagus Status ambang batas air yang tinggi didukung oleh Kabupaten Nagan Raya dan Status ketersediaan air yang tinggi karena di Kabupaten Nagan Raya memiliki hutan yang luas sebagai kawasan lindung dalam penyediaan air. Kabupaten Nagan Raya juga memiliki banyaknya sungai-sungai besar yang sangat berpotensi untuk terjadinya banjir.	tampung untuk jasa penyediaan air bersih Kabupaten Nagan Raya berada pada kondisi tinggi-sangat tinggi.	udkan Pembangunan Berkelanjutan dan Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dengan mewujudkan keseimbangan pengelolaan Sumber Daya Alam, pengelolaan lingkungan hidup secara berkelanjutan, peningkatan kearifan lokal untuk meningkatkan kualitas lingkungan, peningkatan regulasi terkait permasalahan pertanahan dan kehutanan serta mitigasi terhadap bencana.	perekonomian daerah yang berkelanjutan Sasaran 2.1.1 : Meningkatnya pertumbuhan sektor unggulan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah Sasaran 2.2.2 : Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	dalam penyediaan air bersih dan layak untuk semua masyarakat Kabupaten Nagan Raya
Tujuan 7: Menjamin Akses Energi yang Terjangkau, Andal, Berkelanjutan dan	1. Rendahnya kualitas dan kuantitas infrastruktur dan pelayanan dasar yang meliputi pendidikan, kesehatan,	1. Meningkatkan peranan energi baru terbarukan dalam bauran energi; 2. Meningkatkan efisiensi dalam	Menjaga peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan lewat sumber daya	Meningkatnya pertumbuhan sektor unggulan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah	Mewujudkan Perekonomian Daerah yang Tangguh Berbasis Potensi Unggulan dan	Tujuan 2.1: Meningkatnya perekonomian daerah yang berkelanjutan	Pertumbuhan sektor pertanian, kehutanan dan perikanan; sektor pariwisata; sektor pertambangan



PEMERINTAH KABUPATEN NAGAN RAYA
KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS (KLHS)
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD)

Modern untuk Semua	pemukiman, air bersih, keagamaan, ruang terbuka hijau, persampahan, pasar 2. Kurangnya ketersediaan fasilitas/infrastruktur penunjang ekonomi, akses pemodalan dan hilirisasi produk 3. Belum optimalnya penerapan teknologi informasi untuk menunjang kegiatan ekonomi, sosial, lingkungan dan kegiatan pemerintahan	penggunaan energi dan listrik 3. Memanfaatkan potensi sumber daya air untuk PLTA.	energy yang tersedia. Pilar ekonomi berdasarkan hasil pencerminan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Nagan Raya	sehingga sering Sumber daya energi yang ada	Berorientasi pada Ekonomi Kerakyatan dengan mengoptimalkan peran serta masyarakat melalui pengembangan investasi, UMKM dan peran serta masyarakat dalam berbagai aktivitas perekonomian.	Sasaran 2.1.1 : Meningkatnya pertumbuhan sektor unggulan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah Sasaran 2.2.2 : Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	dan penggalian terhadap PDRB
Tujuan 8: Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, Kesempatan Kerja yang Produktif dan Menyeluruh, serta Pekerjaan yang Layak untuk Semua	1. Rendahnya kualitas dan kuantitas infrastruktur dan pelayanan dasar yang meliputi pendidikan, kesehatan, pemukiman, air bersih, keagamaan, ruang terbuka hijau, persampahan, pasar 2. Rendahnya ketersediaan SDM yang berkualitas dan berdaya saing. 3. Kurangnya ketersediaan fasilitas/infrastruktur	1. Mengoptimalkan kerjasama dengan memperhatikan dimensi sosial dan budaya; 2. Memperluas lapangan kerja; 3. Meningkatkan iklim investasi dan promosi ekspor; 4. Meningkatkan sinergi arah kebijakan industri; 5. Meningkatkan fleksibilitas pasar tenaga kerja serta	Secara umum Pertumbuhan ekonomi Nagan Raya secara umum menunjukkan cukup bagus. PDRB per kapita ADHB Kabupaten Nagan Raya sudah tercapai sesuai dengan target yang ditetapkan. Berdasarkan analisis data ditemukan bahwa capaian tahun 2020 mencapai	Perekonomian Kabupaten Nagan Raya sepanjang tahun 2020 tercatat pertumbuhan PDRB mengalami kontraksi sebesar minus 3,23%, lebih rendah dari tahun 2019 yang sebesar 6,77%.	Membangun ekonomi dan infrastruktur secara merata dan berkeadilan untuk mewujudkan pertumbuhan yang berkualitas dan inklusif	Tujuan 1.1 : Meningkatnya Perekonomian Daerah Sasaran 1.1.1: Meningkatnya Nilai Investasi Sasaran 1.1.2 : Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Industri dan Sektor Perdagangan terhadap Pertumbuhan Ekonomi	Ditingkatkannya akses dan kualitas jaringan jalan, rendahnya kualitas bangunan, belum optimalnya pemanfaatan ruang dengan aturan tata ruang, serta belum optimalnya kelayakhunian.



PEMERINTAH KABUPATEN NAGAN RAYA
KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS (KLHS)
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD)

	penunjang ekonomi, akses pemodalan dan hilirisasi produk 4. Belum optimalnya penerapan teknologi informasi untuk menunjang kegiatan ekonomi, sosial, lingkungan dan kegiatan pemerintahan 5. Meningkatnya risiko kejadian bencana alam akibat perubahan iklim, kerusakan kawasan lindung dan alih fungsi lahan.	pengembangan sistem kerja yang layak; 6. Pendalaman kapital dan pendidikan tenaga kerja; 7. Peningkatan partisipasi perempuan dalam tenaga kerja.	Rp45,12juta melebihi target yang ditetapkan Rp45,01 juta. Realisasi tahun 2020 ini juga melebihi capaian tahun-tahun sebelumnya. Pada tahun 2018 PDRB per kapita ADHB dapat dicapai sesuai dengan target yakni Rp42,14 juta dan tahun 2019 capaian PDRB per kapita ADHB Rp44,62 dimana capaiannya ini juga sesuai dengan target..			Daerah Tujuan 1.2 : Meningkatnya Pemenuhan Infrastruktur Wilayah Sasaran 1.2.1 : Meningkatnya Pemenuhan Infrastruktur Wilayah Tujuan 1.3 : Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat yang merata Sasaran 1.3.1: Menurunnya Angka Kemiskinan Sasaran 1.3.2 : Menurunnya Pengangguran	
Tujuan 9: Membangun Infrastruktur yang tangguh, meningkatkan industri inklusif dan berkelanjutan, serta mendorong inovasi	1. Rendahnya kualitas dan kuantitas infrastruktur dan pelayanan dasar yang meliputi pendidikan, kesehatan, pemukiman, air bersih, keagamaan, ruang terbuka hijau, persampahan, pasar 2. Rendahnya ketersediaan SDM	1. Memperluas konektivitas daerah; 2. Membangun sistem dan jaringan transportasi yang terintegrasi untuk mendukung investasi pada koridor ekonomi, kawasan industri khusus, kompleks industri, dan pusat-pusat	Kabupaten Nagan Raya memiliki banyak sumber daya alam yang menjadi komoditas unggulan daerah. Sawit, karet, kopi, perikanan merupakan komoditas unggulan yang berpengaruh cukup besar dalam perekonomian	Komoditas unggulan daerah belum memiliki nilai tambah yang baik, sehingga belum memberikan kontribusi yang optimal dalam pertumbuhan ekonomi	Membangun ekonomi dan infrastruktur secara merata dan berkeadilan untuk mewujudkan pertumbuhan yang berkualitas dan inklusif	Tujuan 1.1 : Meningkatnya Perekonomian Daerah Sasaran 1.1.1: Meningkatnya Nilai Investasi Sasaran 1.1.2 : Meningkatnya Pertumbuhan Sektor	Mengoptimalkan integrasi konektivitas intrawilayah dan antar- wilayah baik darat, laut dan udara dan hubungan internasional



PEMERINTAH KABUPATEN NAGAN RAYA
KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS (KLHS)
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD)

	yang berkualitas dan berdaya saing. 3. Kurangnya ketersediaan fasilitas/infrastruktur penunjang ekonomi, akses pemodalan dan hilirisasi produk 4. Belum optimalnya penerapan teknologi informasi untuk menunjang kegiatan ekonomi, sosial, lingkungan dan kegiatan pemerintahan 5. Meningkatnya risiko kejadian bencana alam akibat perubahan iklim, kerusakan kawasan lindung dan alih fungsi lahan.	pertumbuhan lainnya di wilayah non-koridor ekonomi; 3. Meningkatkan keselamatan dan keamanan dalam penyelenggaraan transportasi serta pertolongan dan penyelamatan korban kecelakaan transportasi; 4. Mengembangkan sarana dan prasarana transportasi yang ramah lingkungan dan mempertimbangkan daya dukung lingkungan; 5. Mempercepat implementasi <i>e-government</i> dengan mengutamakan prinsip keamanan, interoperabilitas dan <i>cost effective</i>; 6. Mendorong tingkat literasi dan inovasi TIK.	Kabupaten Nagan Raya.	Kabupaten Nagan Raya.		Industri dan Sektor Perdagangan terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah Tujuan 1.2 : Meningkatnya Pemenuhan Infrastruktur Wilayah Sasaran 1.2.1 : Meningkatnya Pemenuhan Infrastruktur Wilayah Tujuan 1.3 : Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat yang merata Sasaran 1.3.1: Menurunnya Angka Kemiskinan Sasaran 1.3.2 : Menurunnya Pengangguran	
Tujuan 10: Mengurangi Kesenjangan intra dan antar negara	1. Kurangnya ketersediaan fasilitas/infrastruktur penunjang ekonomi, akses pemodalan dan hilirisasi produk	1. Peningkatan penyerapan tenaga kerja miskin dan rentan produktif ke dalam sektor industri pengolahan unggulan;	Secara geografis, Kabupaten Nagan Raya terletak di sisi barat Pulau Sumatera, yang berbatasan langsung	Posisi Kabupaten Nagan Raya yang terisolir memerlukan upaya ekstra untuk membuka	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Pemerintah yang Bersih serta	Tujuan 3.1 : Meningkatnya kualitas layanan dan tata kelola pemerintahan	Pembukaan ruas jalan baru, keterhubungan dengan pelabuhan laut dan Bandara merupakan prioritas



PEMERINTAH KABUPATEN NAGAN RAYA
KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS (KLHS)
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD)

	2. Belum optimalnya penerapan teknologi informasi untuk menunjang kegiatan ekonomi, sosial, lingkungan dan kegiatan pemerintahan. 3. Meningkatnya risiko kejadian bencana alam akibat perubahan iklim, kerusakan kawasan lindung dan alih fungsi lahan.	2. Pengembangan aktivitas rantai pengolahan yang bersifat penambahan nilai (<i>value added</i>) untuk mendukung pengembangan ekonomi lokal dan komoditas unggulan berbasis agro industri; 3. Perbaikan rantai distribusi komoditas unggulan yang berpihak kepada petani kecil.	dengan Samudera Hindia. Kabupaten Nagan Raya juga dikelilingi oleh kawasan- kawasan hutan baik itu Hutan Lindung maupun Taman Nasional.	konektivitas baik dari sisi darat, laut maupun udara.	Inovatif dengan meningkatkan pelaksanaan prinsip-prinsip akuntabilitas, pencegahan korupsi, peningkatan kredibilitas, peningkatan kualitas layanan publik, keterbukaan informasi dan pengelolaan sumber daya secara efektif dan efisien.	Sasaran 3.1.1 : Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan Sasaran 3.1.2 : Meningkatnya kualitas pelayanan publik	untuk pengembangan ekonomi Kabupaten Nagan Raya
Tujuan 11: Menjadikan Kota dan Permukiman Inklusif, Aman, Tangguh dan Berkelanjutan	1. Rendahnya kualitas dan kuantitas infrastruktur dan pelayanan dasar yang meliputi pendidikan, kesehatan, pemukiman, air bersih, keagamaan, ruang terbuka hijau, persampahan, pasar 2. Rendahnya ketersediaan SDM yang berkualitas dan berdaya saing. 3. Kurangnya ketersediaan fasilitas/infrastruktur	1. Percepatan pemenuhan standar pelayanan perkotaan (SPP) untuk mewujudkan kota aman, nyaman, dan layak huni; 2. Pembangunan kota hijau yang berketahanan iklim dan bencana; 3. Pengembangan kota cerdas yang berdaya saing dan berbasis teknologi dan budaya lokal;	Pemerintah Kabupaten Nagan Raya untuk menyelenggarakan urusan pemerintah umum dan penataan ruang masih dihadapkan pada beberapa permasalahan mendasar.	Permasalahan urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang adalah Konektivitas daerah yang masih rendah, Masih banyak jalan provinsi dalam kondisi kurang baik, Masih banyak jaringan irigasi dalam kondisi kurang baik, dan Masih banyak rumah	Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan dan Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dengan mewujudkan keseimbangan pengelolaan Sumber Daya Alam, pengelolaan lingkungan hidup secara berkelanjutan, peningkatan	Tujuan 1.1 : Meningkatnya Perekonomian Daerah Sasaran 1.1.1: Meningkatnya Nilai Investasi Sasaran 1.1.2 : Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Industri dan Sektor Perdagangan terhadap Pertumbuhan Ekonomi	Meningkatkan akses dan kualitas jaringan jalan, rendahnya kualitas bangunan, belum optimalnya pemanfaatan ruang dengan aturan tata ruang, serta belum optimalnya kelayakhunian.



PEMERINTAH KABUPATEN NAGAN RAYA
KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS (KLHS)
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD)

	penunjang ekonomi, akses pemodal dan hilirisasi produk 4. Belum optimalnya penerapan teknologi informasi untuk menunjang kegiatan ekonomi, sosial, lingkungan dan kegiatan pemerintahan 5. Meningkatnya risiko kejadian bencana alam akibat perubahan iklim, kerusakan kawasan lindung dan alih fungsi lahan. 6. Penurunan kualitas dan kuantitas DDDT-LH akibat pencemaran dari berbagai sumber	4. Peningkatan kapasitas tata kelola pembangunan perkotaan.		tangga yang tidak terlayani pengolahan persampahan.	kearifan lokal untuk meningkatkan kualitas lingkungan, peningkatan regulasi terkait permasalahan pertanahan dan kehutanan serta mitigasi terhadap bencana.	Daerah Tujuan 1.2 : Meningkatnya Pemenuhan Infrastruktur Wilayah Sasaran 1.2.1 : Meningkatnya Pemenuhan Infrastruktur Wilayah Tujuan 1.3 : Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat yang merata Sasaran 1.3.1: Menurunnya Angka Kemiskinan Sasaran 1.3.2 : Menurunnya Pengangguran	
Tujuan 12: Mendorong perusahaan, terutama perusahaan besar dan transnasional, untuk mengadopsi praktek-praktek berkelanjutan dan mengintegrasikan informasi keberlanjutan	1. Rendahnya ketersediaan SDM yang berkualitas dan berdaya saing. 2. Kurangnya ketersediaan fasilitas/infrastruktur penunjang ekonomi, akses pemodal dan hilirisasi produk 3. Belum optimalnya penerapan teknologi	1. Inventarisasi dan sinkronisasi kebijakan sektor-sektor prioritas terkait dengan pola konsumsi dan produksi berkelanjutan; 2. Menggalakkan penggunaan teknologi bersih untuk meningkatkan efisiensi penggunaan	Pada tujuan pembangunan berkelanjutan di dalam Perpres 59 tahun 2017 yang bertujuan memastikan terlaksananya tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas kehidupan	Rendahnya pengendalian terhadap pemanfaatan SDA dan lemahnya integrasi informasi keberlanjutan	Memperkuat kelembagaan pemerintahan, mewujudkan birokrasi yang bersih, efektif dan profesional serta transformasi pelayanan publik	Tujuan 3.1 : Meningkatnya kualitas layanan dan tata kelola pemerintahan Sasaran 3.1.1 : Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan	Meningkatkan penegakan hukum dan pengendalian terhadap kelestarian lingkungan hidup yang sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan



PEMERINTAH KABUPATEN NAGAN RAYA
KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS (KLHS)
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD)

dalam siklus pelaporan mereka	informasi untuk menunjang kegiatan ekonomi, sosial, lingkungan dan kegiatan pemerintahan 4. Belum optimalnya penerapan dan penyelenggaraan e-gov dan tata kelola pemerintahan yang bersih, bermartabat dan bebas korupsi.	sumberdaya dan mengurangi limbah; 3. Penyebaran informasi ketersediaan produk ramah lingkungan bagi konsumen/ masyarakat mengenai manfaat produk tersebut; 4. Pengembangan standar produk ramah lingkungan yang terukur; 5. Pengembangan peraturan dan standar pelayanan publik dalam penerapan pola konsumsi berkelanjutan.	dari satu generasi ke generasi berikutnya. Pilar hukum dan tata kelola berdasarkan hasil pencermatan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Nagan Raya			Sasaran 3.1.2 : Meningkatnya kualitas pelayanan publik	
Tujuan 13: Mengambil Tindakan cepat untuk mengatasi perubahan Iklim dan Dampaknya	1. Rendahnya ketersediaan SDM yang berkualitas dan berdaya saing. 2. Belum optimalnya penerapan teknologi informasi untuk menunjang kegiatan ekonomi, sosial, lingkungan dan kegiatan pemerintahan 3. Meningkatnya risiko kejadian bencana alam akibat perubahan iklim,	1. Peningkatan pelibatan sektor baik di pusat maupun di daerah untuk melaksanakan kegiatan penurunan emisi dan pengalokasian pendanaannya; 2. Standarisasi kegiatan penurunan emisi di setiap sektor; 3. Meningkatkan kontribusi swasta dan masyarakat dalam penurunan emisi GRK;	Wilayah Kabupaten Nagan Raya memiliki potensi gempa bumi dan tsunami yang cukup tinggi. Kabupaten Nagan Raya berbatasan langsung dengan 2 (dua) Samudera dan dengan pertemuan 2 (dua) Lempeng Benua yaitu Lempeng Eurasia dan Lempeng Indo-Australia yang	Dampak perubahan iklim dan mitigasi bencana, sehingga meminimalisir kerugian ekonomi, memberi kenyamanan, dan berkelanjutan	Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan dan Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dengan mewujudkan keseimbangan pengelolaan Sumber Daya Alam, pengelolaan lingkungan hidup secara berkelanjutan,	Tujuan 2.1: Meningkatnya perekonomian daerah yang berkelanjutan Sasaran 2.1.1 : Meningkatnya pertumbuhan sektor unggulan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah Sasaran 2.2.2 : Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	penataan ruang yang meliputi perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, pengendalian dan pengawasan pemanfaatan ruang di Kabupaten Nagan Raya masih belum sepenuhnya memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan.



PEMERINTAH KABUPATEN NAGAN RAYA
KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS (KLHS)
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD)

	kerusakan kawasan lindung dan alih fungsi lahan. 4. Penurunan kualitas dan kuantitas DDDT-LH akibat pencemaran dari berbagai sumber 5. Belum optimalnya penerapan dan penyelenggaraan e-gov dan tata kelola pemerintahan yang bersih, bermartabat dan bebas korupsi	4. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan RAD-GRK dan adaptasi;	sewaktu-waktu dapat menimbulkan gempa bumi berpotensi tsunami.		peningkatan kearifan lokal untuk meningkatkan kualitas lingkungan, peningkatan regulasi terkait permasalahan pertanahan dan kehutanan serta mitigasi terhadap bencana.		
Tujuan 14: Melestarikan dan Memanfaatkan Secara Berkelanjutan Sumber Daya Kelautan dan Samudera untuk Pembangunan Berkelanjutan	1. Rendahnya ketersediaan SDM yang berkualitas dan berdaya saing. 2. Belum optimalnya penerapan teknologi informasi untuk menunjang kegiatan ekonomi, sosial, lingkungan dan kegiatan pemerintahan 3. Meningkatnya risiko kejadian bencana alam akibat perubahan iklim, kerusakan kawasan lindung dan alih fungsi lahan.	1. Peningkatan sarana dan prasarana dalam mendukung konektivitas laut; 2. Peningkatan SDM, Iptek, Wawasan dan Budaya Bahari; 3. Peningkatan pengawasan pemanfaatan sumber daya kelautan dan pengendalian kegiatan ilegal; 4. Pengelolaan pulau-pulau kecil, terutama pulau-pulau terluar. pemenuhan kebutuhan infrastruktur dasar;	Di bidang kelautan dan perikanan dapat dilihat dari Nilai Tukar Nelayan (NTN) yang belum mencapai 100 yaitu sebesar 99,25% pada tahun 2020. Selain itu menurunnya produksi perikanan tangkap dari yang semula 64 ribu ton pada tahun 2016 menjadi 38 ribu ton pada tahun 2019	Secara umum akar permasalahan, antara lain adalah Eksploitasi ruang laut yang berlebihan dan tingginya tingkat pencemaran mengakibatkan penurunan laju tangkapan (fish landing) dan kerusakan lingkungan wilayah pesisir, Masih rendahnya tingkat penguasaan teknologi oleh nelayan dan	Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan dan Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dengan mewujudkan keseimbangan pengelolaan Sumber Daya Alam, pengelolaan lingkungan hidup secara berkelanjutan, peningkatan kearifan lokal untuk meningkatkan	Tujuan 2.1: Meningkatnya perekonomian daerah yang berkelanjutan Sasaran 2.1.1 : Meningkatnya pertumbuhan sektor unggulan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah Sasaran 2.2.2 : Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Mengoptimalkan pelabuhan perikanan belum dimanfaatkan secara optimal dan masih terbatasnya pemenuhan sarana prasarana perikananbudidaya dan tangkap (lahan, kapal, dll), pemasaran hasil kelautan dan perikanan serta mengoptimalkan kapasitas pengelolaan zonasi wilayah pesisir, laut, dan pulau-pulau kecil 0-12 mil



PEMERINTAH KABUPATEN NAGAN RAYA
KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS (KLHS)
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD)

	4. Penurunan kualitas dan kuantitas DDDT-LH akibat pencemaran dari berbagai sumber 5. Belum optimalnya penerapan dan penyelenggaraan e-gov dan tata kelola pemerintahan yang bersih, bermartabat dan bebas korupsi	5. Peningkatan pengamanan pesisir dan konservasi perairan.		Pencemaran perairan umum dan laut;	kualitas lingkungan, peningkatan regulasi terkait permasalahan pertanahan dan kehutanan serta mitigasi terhadap bencana.		
Tujuan 15: Melindungi, Merestorasi dan Meningkatkan Pemanfaatan Berkelanjutan Ekosistem Daratan, Mengelola hutan secara lestari, Menghentikan Penggurunan, memulihkan Degradasi Lahan, serta Menghentikan Kehilangan Keragaman Hayati	1. Rendahnya ketersediaan SDM yang berkualitas dan berdaya saing. 2. Belum optimalnya penerapan teknologi informasi untuk menunjang kegiatan ekonomi, sosial, lingkungan dan kegiatan pemerintahan 3. Meningkatnya risiko kejadian bencana alam akibat perubahan iklim, kerusakan kawasan lindung dan alih fungsi lahan. 4. Penurunan kualitas dan kuantitas DDDT-LH akibat	1. Peningkatan instrumen penegakan hukum; 2. peningkatan efektivitas penegakan hukum; 3. peningkatan efektivitas dan kualitas pengelolaan hutan.	Sebahagian besar wilayah Kabupaten Nagan Raya terdiri dari kawasan hutan, baik hutan lindung, taman nasional, cagar alam, maupun hutan produksi. Namun demikian, keberadaan kawasan hutan itu sudah mulai terancam oleh kegiatan-kegiatan perkebunan dan perladangan penduduk maupun perusahaan yang mengkonversi hutan menjadi perkebunan. Keberadaan hutan juga belum memberikan kontribusi kepada	Laju kerusakan hutan Kabupaten Nagan Raya terus terjadi. Nagan mengalami kerusakan. Kerusakan hutan ini akibat industri ekstraktif disebabkan aktivitas perusahaan tambang, perkebunan kelapa sawit, geothermal, maupun Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dan Hutan Alam (IUPHHK-HA).	Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan dan Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dengan mewujudkan keseimbangan pengelolaan Sumber Daya Alam, pengelolaan lingkungan hidup secara berkelanjutan, peningkatan kearifan lokal untuk meningkatkan kualitas lingkungan, peningkatan	Tujuan 2.1: Meningkatnya perekonomian daerah yang berkelanjutan Sasaran 2.1.1 : Meningkatnya pertumbuhan sektor unggulan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah Sasaran 2.2.2 : Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Meningkatkan penegakan hukum dan pengendalian terhadap kelestarian lingkungan hidup yang sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan



PEMERINTAH KABUPATEN NAGAN RAYA
KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS (KLHS)
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD)

	pencemaran dari berbagai sumber 5. Belum optimalnya penerapan dan penyelenggaraan e-gov dan tata kelola pemerintahan yang bersih, bermartabat dan bebas korupsi		kesejahteraan penduduk.		regulasi terkait permasalahan pertanahan dan kehutanan serta mitigasi terhadap bencana.		
Tujuan 16: Memperkuat Masyarakat Yang Inklusif dan Damai Untuk Pembangunan berkelanjutan Menyediakan Akses Keadilan untuk Semua, dan Membangun Kelembagaan yang Efektif, Akuntabel, dan Inklusif di Semua Tingkatan	1. Rendahnya ketersediaan SDM yang berkualitas dan berdaya saing. 2. Belum optimalnya penerapan teknologi informasi untuk menunjang kegiatan ekonomi, sosial, lingkungan dan kegiatan pemerintahan 3. Meningkatnya risiko kejadian bencana alam akibat perubahan iklim, kerusakan kawasan lindung dan alih fungsi lahan. 4. Penurunan kualitas dan kuantitas DDT-LH akibat pencemaran dari berbagai sumber 5. Belum optimalnya penerapan dan	1. Mempromosikan proses pembangunan yang inklusif; 2. Menghormati hak-hak semua kelompok sosial-budaya, minoritas, masyarakat adat, agama; 3. Melestarikan seluruh budaya warisan dan sumber daya alam; 4. Menghormati hak-hak kaum marginal untuk menentukan dan mewujudkan aspirasi pembangunannya.	Angka partisipasi sekolah usia 16 - 18 tahun di Kabupaten Nagan Raya dalam lima tahun terakhir (tahun 2018 -2022) menunjukkan nilai yang semakin meningkat. Meningkatnya APS usia 16 - 18 tahun ini merupakan gambaran kesadaran masyarakat untuk mengenyam pendidikan yang lebih tinggi terutama jenjang SMA/SMK/MA. Pada tahun 2020 APS sebesar 92,13 persen dan terus meningkat hingga pada tahun 2021	Angka partisipasi sekolah usia 16 - 18 tahun di Kabupaten Nagan Raya dalam lima tahun terakhir (tahun 2016 - 2020) menunjukkan nilai yang semakin meningkat. Meningkatnya APS usia 16 - 18 tahun ini merupakan gambaran semakin tingginya kesadaran masyarakat untuk mengenyam pendidikan yang lebih tinggi terutama jenjang SMA/SMK/MA.	Mewujudkan Kesejahteraan Sosial Masyarakat dengan mengurangi jumlah penduduk miskin dan menghapus kemiskinan ekstrem, meningkatkan perlindungan sosial, perluasan lapangan pekerjaan, dan memperluas akses masyarakat untuk menikmati hasil pembangunan.	Tujuan 4.1: Meningkatkan kualitas SDM dan Kesejahteraan Masyarakat Sasaran 4.1.1 : Meningkatnya akses dan kualitas pendidikan Sasaran 4.1.2 : Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat Sasaran 4.1.3 : Meningkatnya kesejahteraan masyarakat	Peningkatan APS pada pendidikan menengah ini tidak terlepas dari banyaknya program yang diluncurkan oleh pemerintah dalam memudahkan mereka bersekolah, terutama bagi golongan yang kurang mampu dengan adanya program Bantuan Khusus Siswa Miskin (BKSM) maupun Program Indonesia Pintar.



PEMERINTAH KABUPATEN NAGAN RAYA
KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS (KLHS)
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD)

	penyelenggaraan e-gov dan tata kelola		menjadi 92,46 persen.				
Tujuan 17: Menguatkan Sarana Pelaksanaan dan Merevitalisasi Kemitraan Global untuk Pembangunan Berkelanjutan	1. Rendahnya ketersediaan SDM yang berkualitas dan berdaya saing. 2. Belum optimalnya penerapan teknologi informasi untuk menunjang kegiatan ekonomi, sosial, lingkungan dan kegiatan pemerintahan 3. Meningkatnya risiko kejadian bencana alam akibat perubahan iklim, kerusakan kawasan lindung dan alih fungsi lahan. 4. Penurunan kualitas dan kuantitas DDDT-LH akibat pencemaran dari berbagai sumber 5. Belum optimalnya penerapan dan penyelenggaraan e-gov dan tata kelola pemerintahan yang bersih, bermartabat dan bebas korupsi	1. Meningkatkan peran Kabupaten Nagan Raya di tingkat nasional; 2. Meningkatkan kerjasama dalam IMT-GT; 3. Meningkatkan promosi dan pemajuan demokrasi dan HAM;.	Secara geografis, Kabupaten Nagan Raya terletak di sisi barat Pulau Sumatera, yang berbatasan langsung dengan Samudera Hindia. Kabupaten Nagan Raya juga dikelilingi oleh kawasan- kawasan hutan baik itu Hutan Lindung maupun Taman Nasional.	Posisi Kabupaten Nagan Raya yang terisolir memerlukan upaya ekstra untuk membuka konektivitas baik dari sisi darat, laut maupun udara.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Pemerintah yang Bersih serta Inovatif dengan meningkatkan pelaksanaan prinsip-prinsip akuntabilitas, pencegahan korupsi, peningkatan kredibilitas, peningkatan kualitas layanan publik, keterbukaan informasi dan pengelolaan sumber daya secara efektif dan efisien.	Tujuan 3.1 : Meningkatnya kualitas layanan dan tata kelola pemerintahan Sasaran 3.1.1 : Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan Sasaran 3.1.2 : Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Pembukaan ruas jalan baru, keterhubungan dengan jaringan tol dan jalur kereta api Trans Sumatera, pengembangan pelabuhan laut dan Bandara merupakan prioritas untuk pengembangan ekonomi Kabupaten Nagan Raya

Sumber : Hasil Analisis, 2023



BAB VII

KESIMPULAN DAN SARAN

7.1. Kesimpulan

Kesimpulan yang didapatkan dari seluruh kegiatan KLHS RPJPD ini dapat dibagi menjadi empat bagian. Bagian pertama adalah simpulan terhadap Capaian TPB. Simpulan kedua adalah terkait isu permasalahan daerah termasuk di dalamnya konteks kondisi lingkungan hidup. Ketiga adalah rekomendasi strategi dan arah kebijakan berdasarkan tujuan TPB dan isu-isu strategis berdasarkan pilar.

1. Kajian Lingkungan Hidup Strategis untuk Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (KLHS RPJPD) Kabupaten Nagan Raya Tahun 2025-2045 mencatat dari total 220 indikator capaian yang relevan bahwa sudah dilaksanakan dan mencapai target sebanyak 116 indikator (53%), Sudah dilaksanakan namun belum mencapai target sebanyak 23 indikator (10%), belum ada data sebanyak 77 indikator (35%), dan terdapat juga 10% indikator TPB yang ternyata bukan merupakan kewenangan Kabupaten Nagan Raya.
2. Isu prioritas PB KLHS RPJPD Kabupaten Nagan Raya adalah 1) Masih terjadi pencemaran dan degradasi lingkungan Hidup; 2) Masih rendah upaya pengelolaan dan upaya pemantauan lingkungan hidup; 3) Alih fungsi kawasan hutan dan lahan gambut menjadi kawasan Budidaya dan penurunan biodiversiti. 4) Masih tingginya Intensitas Terjadi Bencana Alam, dampak perubahan iklim (Banjir, Pasang Air Laut, Angin Badai Longsor, Kebakaran Hutan/Gambut, Erosi, Abrasi pantai, dll) dan Masih Belum Optimal Manajemen Mitigasi Kebencanaan (belum tersedianya jalur evakuasi untuk daerah rawan bencana); 5) Masih tingginya angka penyandang masalah kesejahteraan sosial, tingkat pengangguran, kemiskinan serta masih rendahnya angka IPM (Pendidikan dan Kesehatan). 6) Masih rendahnya daya saing daerah, infrastruktur dan belum optimalnya pemanfaatan SDA (darat dan laut); 7) Belum optimal pemanfaatan potensi kawasan wisata alam yang belum tertata dan Pengembangan kawasan industri berbasis komoditi unggulan daerah.
3. Isu pembangunan daerah adalah 1) Belum optimalnya Penerapan Syariat Islam; 2) Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang masih rendah; 3) Produktivitas, Stabilitas dan Pertumbuhan Ekonomi yang belum optimal; 4) Masih tingginya Angka Kemiskinan; 5) Belum terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal, Transparan, dan Akuntabel; 6) Belum Terwujudnya Pengelolaan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan; 7) Belum mantapnya Infrastruktur yang menghubungkan antar wilayah.



PEMERINTAH KABUPATEN NAGAN RAYA
KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS (KLHS)
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD)

4. Strategi dan Arah Kebijakan berdasarkan : Tujuan 1: Mengakhiri Kemiskinan dalam Segala Bentuk Dimanapun; Tujuan 2 : Meningkatkan penyerapan tenaga kerja lokal dan mengoptimalkan diversifikasi pangan lokal non-beras ; Tujuan 3 Pembangunan sosial dijalankan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak individu warga negara, dan menjamin akses masyarakat untuk mendapat pelayanan sosial; Tujuan 4: Peningkatan APS pada pendidikan menengah ini tidak terlepas dari banyaknya program yang diluncurkan oleh pemerintah dalam memudahkan mereka bersekolah, terutama bagi golongan yang kurang mampu dengan adanya program Bantuan Khusus Siswa Miskin (BKSM) maupun Program Indonesia Pintar; Tujuan 5: Peningkatan Indeks pemberdayaan gender dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan yang melibatkan lingkup pemerintah provinsi dan kabupaten/kota; Tujuan 6: Meningkatkan sarana dan prasarana dalam penyediaan air bersih dan layak untuk semua masyarakat Kabupaten Nagan Raya; Tujuan 7: Pertumbuhan sektor pertanian, kehutanan dan perikanan; sektor pariwisata; sektor pertambangan dan penggalian terhadap PDRB; Tujuan 8: Ditingkatkannya akses dan kualitas jaringan jalan, rendahnya kualitas bangunan, belum optimalnya pemanfaatan ruang dengan aturan tata ruang, serta belum optimalnya kelayakhunian; Tujuan 9: Mengoptimalkan integrasi konektivitas intrawilayah dan antar- wilayah baik darat, laut dan udara dan hubungan internasional Tujuan 10: Pembukaan ruas jalan baru, keterhubungan dengan pelabuhan laut dan Bandara merupakan prioritas untuk pengembangan ekonomi Kabupaten Nagan Raya; Tujuan 11: Meningkatkan akses dan kualitas jaringan jalan, rendahnya kualitas bangunan, belum optimalnya pemanfaatan ruang dengan aturan tata ruang, serta belum optimalnya kelayak hunian; Tujuan 12: Meningkatkan penegakan hukum dan pengendalian terhadap kelestarian lingkungan hidup yang sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan; Tujuan 13: Penataan ruang yang meliputi perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, pengendalian dan pengawasan pemanfaatan ruang di Kabupaten Nagan Raya masih belum sepenuhnya memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan; Tujuan 14: Mengoptimalkan pelabuhan perikanan belum dimanfaatkan secara optimal dan masih terbatasnya pemenuhan sarana prasarana perikananbudidaya dan tangkap (lahan, kapal, dll), pemasaran hasil kelautan dan perikanan serta mengoptimalkan kapasitas pengelolaan zonasi wilayah pesisir, laut, dan pulau-pulau kecil 0-12 mil; Tujuan 15: Meningkatkan penegakan hukum dan pengendalian terhadap kelestarian lingkungan hidup yang sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan; Tujuan 16: Peningkatan APS pada pendidikan menengah ini tidak terlepas dari banyaknya program yang diluncurkan oleh pemerintah dalam memudahkan mereka bersekolah, terutama bagi golongan yang kurang mampu dengan



adanya program Bantuan Khusus Siswa Miskin (BKSM) maupun Program Indonesia Pintar. Tujuan; 17: Pembukaan ruas jalan baru, keterhubungan dengan jaringan jalur kereta api, pengembangan pelabuhan laut dan Bandara merupakan prioritas untuk pengembangan ekonomi Kabupaten Nagan Raya.

5. Penyusunan isu strategis menggunakan pertimbangan hasil rumusan skenario (indikator dengan upaya tambahan) dan masukan saran yang disepakati dari kegiatan konsultasi publik. Adapun Isu strategis dalam KLHS RPJPD Kabupaten Nagan Raya adalah:
- Pilar Sosial : (1) Penanggulangan kemiskinan; (2) Penanggulangan kesenjangan wilayah; (3) Peningkatan kualitas sumber daya manusia; (4) Peningkatan kualitas derajat kesehatan masyarakat; (5) Kedaulatan pangan untuk pemenuhan gizi masyarakat; (6) Kesenjangan gender dan pemberdayaan perempuan;
 - Pilar Ekonomi : (7) Daya saing ekonomi dan peningkatan kesempatan berusaha;
 - Pilar Lingkungan : (8) Keberlanjutan pembangunan dengan daya dukung lingkungan dan SDA;
 - Pilar Hukum dan Tata Kelola : (9) Peningkatan keamanan dan ketertiban lingkungan; (10) Tata kelola pemerintah untuk peningkatan pelayanan masyarakat;

7.2. Rekomendasi

Dibawah ini merupakan rekomendasi kepada pemerintah Kabupaten Nagan Raya.

7.2.1. Rekomendasi Berdasarkan Capaian TPB

- Untuk indikator TPB yang memiliki data sudah dilaksanakan dan sudah tercapai (SS), maka diharapkan dapat mempertahankan capaian dan mengembangkannya (business as usual) sesuai prinsip pembangunan berkelanjutan. Artinya, indikator ini tidak perlu upaya tambahan untuk mencapai Target.
- Untuk indikator TPB yang memiliki data sudah dilaksanakan namun belum tercapai target (SB), maka perlu dilakukan upaya melalui rekomendasi arah kebijakan dan sasaran pokok yang nantinya di turunkan kepada program-program, program dari rencana program OPD yang sesuai. Artinya, indikator ini perlu upaya tambahan untuk mencapai Target.
- Untuk indikator TPB yang belum/tidak memiliki data dan belum dilaksanakan (na), maka direkomendasikan untuk dilakukan kegiatan pengumpulan data yang sesuai dengan indikator TPB (termasuk disagregasinya). Artinya, indikator ini perlu upaya intervensi untuk mencapai Target.
- Indikator TPB yang belum mencapai target nasional dan belum dilaksanakan dan tidak ada data perlu menjadi perhatian karena merupakan gap/permasalahan di Kabupaten Nagan Raya.



7.2.2. Rekomendasi Secara Keseluruhan

- Perlunya inventarisasi (pengarsipan) data yang rapi, terintegrasi, dan sesuai dengan kebutuhan khususnya untuk diintegrasikan indikator TPB. Pengarsipan dengan sistem satu data ini diharapkan dapat mempermudah pengguna untuk mendapatkan data yang kredibel.
- Perlunya pendataan berupa identifikasi lokasi, jumlah, maupun satuan lainnya sesuai dengan indikator TPB untuk indikator TPB yang belum ada data dan TPB yang belum tercapai untuk mendapatkan pembaruan data.
- Perlunya memastikan prinsip pembangunan berkelanjutan dilaksanakan oleh pemerintah maupun oleh bantuan mitra pemerintah melalui program-program yang mendukung percepatan tercapainya indikator TPB.
- Pemerintah daerah diharapkan dapat menginventaris program/kegiatan non pemerintah (mitra pemerintah) seperti NGO, organisasi masyarakat, filantropi, pelaku usaha, akademisi, dan pihak terkait lainnya khususnya yang terkait dengan TPB agar kegiatan tersebut dapat terukur dan terhimpun dalam capaian TPB daerah. Hal ini juga dapat bermanfaat sebagai gambaran proporsi bantuan yang diterima pemerintah daerah apabila masih memerlukan kerja sama dengan pihak tersebut.



DAFTAR PUSTAKA

- Addis Ababa Action Agenda. (2015). Addis Ababa Action Agenda of the Third International Conference on Financing for Development Addis Ababa Action Agenda of the Third International Conference on Financing for Development Contents. In *United Nations* (pp. 1–68). United Nations Digital Library.
- Asdak, C. (2012). *Kajian Lingkungan Hidup Strategis: Jalan Menuju Pembangunan Berkelanjutan*. Gadjah Mada University Press.
- BPS Kabupaten Nagan Raya. (2023). *Kabupaten Nagan Raya Dalam Angka 2023*. BPS Kabupaten Nagan Raya.
- Christaller, W. (1933). *Central Places in Southern Germany*.
- Jasman, S., Ridawan, M., Darwis, S., & Syarif, E. (2023). *(Teori dan Aplikasi): Perencanaan Wilayah Destinasi*. Deepublish.
- John B. Parr. (2001). ON THE REGIONAL DIMENSIONS OF ROSTOW'S THEORY OF GROWTH. *RURDS*, 13(1), 1–18.
- Lyneis, J. M. (2000). System dynamics for market forecasting and structural analysis. *The MIT Press*.
- Muhammadi, A., & E., S. B. (2001). Analisis Sistem Dinamis (Lingkungan Hidup, Sosial, Ekonomi, Manajemen). *UMJ Press*.
- Nugroho, I., & Dahuri, R. (2004). *Pembangunan Wilayah: Perspektif Ekonomi, Sosial, dan Lingkungan*. LP3ES.
- Peraturan Presiden RI. (2009). *UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP* (Vol. 32, pp. 1–39).
- Peraturan Presiden RI. (2022). *PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 111 TAHUN 2022 TENTANG PELAKSANAAN PENCAPAIAN TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN* (Vol. 111, pp. 1–11).
- Rodriguez-Ulloa, & Paucar Caceres. (2007). An application of Soft System Dynamics Methodology(SSDM). *Journal of the Operational Research Society*, 58.
- Sendai Framework. (2015). Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015 - 2030. In *United Nations* (pp. 1–37). United Nations Digital Library.
- Sterman, John. (2000). *Business dynamics : systems thinking and modeling for a complex world*. Irwin/McGraw-Hill.
- Tasrif, M. (2006). Analisis Kebijakan Menggunakan Model System Dynamics. *Program Magister Studi Pembangunan. Institut Teknologi Bandung*.



LAMPIRAN

Lampiran 1.1. Sertifikat dan Biodata Tim Ahli

A. BIODATA TIM AHLI

1) Dr. Anwar Deli, SP, M.Si.

CURRICULUM VITAE



1. Nama Lengkap : Dr. Ir. Anwar Deli, SP, M.Si
2. Tempat/Tanggal Lahir : Aceh Barat, 24 September 1965
3. Jenis Kelamin : Laki-laki
4. Kebangsaan : Indonesia
5. Alamat Rumah : Komplek Perumahan Dosen dan Karyawan Unsyiah (BI)
Blok C No. 9 Sektor Timur Darussalam Banda Aceh 23111.
6. Identitas : KTP. No. 1171042409650001
7. Keahlian : Ekonomi Pertanian, Ekonomi Pembangunan, dan Lingkungan
8. Telepon/Handphone : HP. 08126910458
9. Alamat e-mail : anwar_deli@unsyiah.ac.id

10. Pendidikan Formal	: Sarjana (S1)	: Sosial Ekonomi Pertanian, Fakultas Pertanian Unsyiah, Banda Aceh Tamat 1994
	: Magister (S2)	: Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan, Pascasarjana Unsyiah, Banda Aceh Tamat 2001
	: Doktor (S3)	: Doktor Ilmu Ekonomi, Pascasarjana Unsyiah, Banda Aceh Tamat 2016
	: Pendidikan Profesi Insinyur	: Sertifikat Profesi Insinyur (Engineer), Program Profesi Insinyur Universitas Syiah Kuala (No. 239022022040028).
11. Sertifikat Kompetensi	: - KTPA - Asesor	- Sertifikat No. Reg: LHK.642.00088 2018 tanggal 21 Juni 2021. - Sertifikat Asesor Kompetensi No. Reg. MET. 000.008310 2022 Tanggal 16 Nopember 2022.
12. Sertifikat Pelatihan	: Auditor Lingkungan : TOT KLHS : KLHS : Dasar-Dasar Amdal	- Sertifikat Auditor Lingkungan No. 01/PSLH-UGM/AL-12/14 - Sertifikat TOT KLHS/KLHK/2017. - Sertifikat KLHS CENTER SQUAD No. 0 0 8 / 0 5 / p l t h / 2 0 2 0) Sertifikat No. ST. 1157/DDA/UGM-001/2019
13. Kursus/Pelatihan	:	- Lokakarya Pengembangan Profesi Berkelanjutan (PPB) bagi Pemegang Sertifikat Penyusun Dokumen Amdal,



PEMERINTAH KABUPATEN NAGAN RAYA
KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS (KLHS)
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD)

		Jakarta 21 – 22 Juni 2014. Lembaga Pengembangan Profesi INTAKINDO.
		- Pelatihan Auditor Lingkungan Angkatan ke-12 di Pusat Studi Lingkungan Hidup Universitas Gadjah Mada (PSLH UGM) yang dilaksanakan pada tanggal 19 – 24 Mei 2014.
		- Pelatihan Dasar Sistem Manajemen Mutu Terintegrasi (ISO 9001, 14001, SMK3, OHSAS), tahun 2016.
		- Pelatihan Training of Trainer KLHS untuk PSL Roll Out Medan yang dilaksanakan pada tanggal 06 – 10 Nopember 2017.
		- Pelatihan Dasar-Dasar Amdal Angkatan ke-127 di Pusat Studi Lingkungan Hidup Universitas Gadjah Mada (PSLH UGM) yang dilaksanakan pada tanggal 2 – 7 Desember 2019.
14. Organisasi	:	- Perhimpunan Ahli Sosial Ekonomi Pertanian (PERHEPPI)
		- PERTALINDO (Perkumpulan Tenaga Ahli Lingkungan Hidup Indonesia)

15. Pengalaman Pekerjaan yang Relevan (Jasa Konsultan)

1. Tahun 2023		
a. Nama Proyek	:	ANDAL SUTET 275 kV Pangkalan Susu – Arun dan GI
b. Lokasi Proyek	:	Provinsi Aceh – Provinsi Sumatera Utara
c. Pengguna Jasa	:	PT. PLN
d. Nama Perusahaan	:	PPLH_SDA USK
e. Posisi tugas	:	Anggota Tim Penyusun Amdal (KTPA)
f. Waktu Pelaksanaan	:	2022 - 2023
g. Bidang penugasan	:	Tenaga Ahli Sosial Ekonomi dan Sosial Budaya
h. Status Kepegawaian	:	Tenaga Ahli/ Kontrak Kerja
2. Tahun 2022		
a. Nama Proyek	:	Penyusunan AMDAL PLTA Lutueng 16 MW di Kec. Mane
b. Lokasi Proyek	:	Kabupaten Pidie
c. Pengguna Jasa	:	PT. Mega Tuah Raya/PT. Brantas Energi
d. Nama Perusahaan	:	PPLH_SDA USK
e. Posisi tugas	:	Ketua Tim Penyusun Amdal (KTPA)
f. Waktu Pelaksanaan	:	2021 - 2022
g. Bidang penugasan	:	Tenaga Ahli Sosial Ekonomi dan Sosial Budaya
h. Status Kepegawaian	:	Tenaga Ahli/ Kontrak Kerja



KLHS RPJPD KABUPATEN NAGAN RAYA TAHUN 2025-2045



PEMERINTAH KABUPATEN NAGAN RAYA
KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS (KLHS)
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD)

j. Pengguna Jasa	:	PT. Padang Palma Permai
k. Nama Perusahaan	:	PT. Padang Palma Permai
l. Posisi tugas	:	Anggota Tim Penyusun Amdal (ATPA)
m. Waktu Pelaksanaan	:	2018
n. Bidang penugasan	:	Tenaga Ahli Sosial Ekonomi dan Sosial Budaya
o. Status Kepegawaian	:	Tenaga Ahli/ Kontrak Kerja
8. Tahun 2018		
i. Nama Proyek	:	Penyusunan Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Tahun 2017 - 2022
j. Lokasi Proyek	:	Kabupaten Aceh Jaya
k. Pengguna Jasa	:	Kabupaten Aceh Jaya
l. Nama Perusahaan	:	DLH Kabupaten Nagan Raya
m. Posisi tugas	:	-
n. Waktu Pelaksanaan	:	Ketua Tim Penyusun
o. Bidang penugasan	:	2018
p. Status Kepegawaian	:	Tenaga Ahli Sosial Ekonomi dan Sosial Budaya Tenaga Ahli/ Kontrak Kerja
9. Tahun 2018		
q. Nama Proyek	:	Penyusunan Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Tahun 2017 - 2022
r. Lokasi Proyek	:	Kabupaten Nagan Raya
s. Pengguna Jasa	:	Kabupaten Nagan Raya
t. Nama Perusahaan	:	Bappeda Kabupaten Nagan Raya
u. Posisi tugas	:	-
v. Waktu Pelaksanaan	:	Ketua Tim Penyusun
w. Bidang penugasan	:	2018
x. Status Kepegawaian	:	Tenaga Ahli Sosial Ekonomi dan Sosial Budaya Tenaga Ahli/ Kontrak Kerja
10. Tahun 2017		
a. Nama Proyek	:	Penyusunan Amdal Rencana Penambangan Batubara
b. Lokasi Proyek	:	Kabupaten Aceh Barat
c. Pengguna Jasa	:	PT. Nirmala Coal Nusantara (PT. NCN)
d. Nama Perusahaan	:	PT. Nirmala Coal Nusantara (PT. NCN)
e. Posisi tugas	:	Anggota Tim Penyusun Amdal (ATPA)
f. Waktu Pelaksanaan	:	2017
g. Bidang penugasan	:	Tenaga Ahli Sosial Ekonomi dan Sosial Budaya
h. Status Kepegawaian	:	Tenaga Ahli/ Kontrak Kerja
i. Referensi	:	Bambang Yunarso
11. Tahun 2017		
a. Nama Proyek	:	Penyusunan DELH Rumah Sakit Teuku Umar Calang
b. Lokasi Proyek	:	Kota Calang Kabupaten Aceh Jaya
c. Pengguna Jasa	:	Rumah Sakit Teuku Umar Calang
d. Nama Perusahaan	:	PT. Ganesha



PEMERINTAH KABUPATEN NAGAN RAYA
KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS (KLHS)
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD)

e. Posisi Tugas	:	Anggota Tim Penyusun Amdal (ATPA)
f. Waktu Pelaksanaan	:	2017
g. Bidang Penugasan	:	Tenaga Ahli Sosial Ekonomi dan Sosial Budaya
h. Status Kepegawaian	:	Tenaga Ahli/ Kontrak Kerja
i. Referensi	:	-
12. Tahun 2016		
a. Nama Proyek	:	Penyusunan AMDAL PLTMH Kr. Isep
b. Lokasi Proyek	:	Kec. Beutong Kabupaten Nagan Raya Provinsi Aceh.
c. Pengguna Jasa	:	PT. Seunagan Energy
d. Nama Perusahaan	:	PT. Seunagan Energy
e. Posisi Tugas	:	Anggota Tim Penyusun Amdal (ATPA)
f. Waktu Pelaksanaan	:	2016
g. Bidang Penugasan	:	Tenaga Ahli Sosial Ekonomi dan Sosial Budaya
h. Status Kepegawaian	:	Tenaga Ahli/ Kontrak Kerja
i. Referensi	:	-
13. Tahun 2016		
a. Nama Proyek	:	Penyusunan Amdal Rencana Kawasan Industri Aceh (KIA)
b. Lokasi Proyek	:	Desa Ladong Kabupaten Aceh Besar
c. Pengguna Jasa	:	Dinas Perdagangan dan Industri Aceh
d. Nama Perusahaan	:	-
e. Posisi Tugas	:	Anggota Tim Penyusun Amdal (ATPA)
f. Waktu Pelaksanaan	:	2016
g. Bidang Penugasan	:	Tenaga Ahli Sosial Ekonomi dan Sosial Budaya
h. Status Kepegawaian	:	Tenaga Ahli/ Kontrak Kerja
i. Referensi	:	-
14. Tahun 2016		
a. Nama Proyek	:	Survey Sosekbud Rencana Pembangunan PLTA
b. Lokasi Proyek	:	Kec. Beutong Ateuh Banggalang Kab. Nagan Raya
c. Pengguna Jasa	:	PT. Richland Power Nagan Raya
d. Nama Perusahaan	:	PT. Richland Power Nagan Raya
e. Uraian tugas	:	Survey, Analisis dan Laporan
f. Waktu Pelaksanaan	:	2016
g. Posisi penugasan	:	Ketua Tim Survey
h. Status Kepegawaian	:	Tenaga Ahli/ Kontrak Kerja
15. Tahun 2016		
a. Nama Proyek	:	Survey Sosekbud Rencana Pembangunan PLTA
b. Lokasi Proyek	:	Kec. Darul Makmur Kab. Nagan Raya
c. Pengguna Jasa	:	PT. Richland Power Nagan Raya
d. Nama Perusahaan	:	PT. Richland Power Nagan Raya
e. Uraian tugas	:	Survey, Analisis dan Laporan



PEMERINTAH KABUPATEN NAGAN RAYA
KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS (KLHS)
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD)

f. Waktu Pelaksanaan	:	2016
g. Posisi penugasan	:	Ketua Tim Survey
h. Status Kepegawaian	:	Tenaga Ahli/ Kontrak Kerja
16. Tahun 2016		
a. Nama Proyek	:	Survey Sosekbud Rencana Pembangunan Waduk Irigasi
b. Lokasi Proyek	:	Kec. Kluet Tengah Kab. Aceh Selatan
c. Pengguna Jasa	:	PT. Aditya Engineering Consultant
d. Nama Perusahaan	:	PT. Aditya Engineering Consultant
e. Uraian tugas	:	Survey, Analisis dan Laporan
f. Waktu Pelaksanaan	:	2016
g. Posisi penugasan	:	Ketua Tim Survey
h. Status Kepegawaian	:	Tenaga Ahli/ Kontrak Kerja
17. Tahun 2015		
a. Nama Proyek	:	Penyusunan Amdal Rencana Penambangan Batubara
b. Lokasi Proyek	:	Kabupaten Nagan Raya
c. Pengguna Jasa	:	PT. Indonesia Pasifik Energy
d. Nama Perusahaan	:	PT. Indonesia Pasifik Energy
e. Posisi Tugas	:	Anggota Tim Penyusun Amdal (ATPA)
f. Waktu Pelaksanaan	:	2015
g. Bidang Penugasan	:	Tenaga Ahli Sosial Ekonomi dan Sosial Budaya
h. Status Kepegawaian	:	Tenaga Ahli/ Kontrak Kerja
i. Referensi	:	Achmad Yani Arief
18. Tahun 2015		
a. Nama Proyek	:	Penyusunan Amdal Rencana Pembangunan PLTA Meureubo 2
b. Lokasi Proyek	:	Kabupaten Aceh Barat
c. Pengguna Jasa	:	PT. Aceh Hydropower
d. Nama Perusahaan	:	PT. Aceh Hydropower
e. Posisi Tugas	:	Anggota Tim Penyusun Amdal (ATPA)
f. Waktu Pelaksanaan	:	2015
g. Bidang Penugasan	:	Tenaga Ahli Sosial Ekonomi dan Sosial Budaya
h. Status Kepegawaian	:	Tenaga Ahli/ Kontrak Kerja
i. Referensi	:	Lila Efendi
19. Tahun 2015		
a. Nama Proyek	:	Penyusunan DPLH Kebun Kelapa Sawit
b. Lokasi Proyek	:	Kabupaten Aceh Barat
c. Pengguna Jasa	:	CV. Betami
d. Nama Perusahaan	:	CV. Betami
e. Posisi tugas	:	Ketua Tim Penyusun
f. Waktu Pelaksanaan	:	2015



PEMERINTAH KABUPATEN NAGAN RAYA
KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS (KLHS)
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD)

g. Posisi penugasan	:	Tenaga Ahli Sosial Ekonomi	
h. Status Kepegawaian	:	Tenaga Ahli/ Kontrak Kerja	
i. Referensi	:	Ir. Yan Farid	
20. Tahun 2014			
a. Nama Proyek	:	Penyusunan Amdal Rencana Penambangan Batubara	
b. Lokasi Proyek	:	Kabupaten Aceh Barat	
c. Pengguna Jasa	:	PT. Indonesia Pasifik Energy	
d. Nama Perusahaan	:	PT. Indonesia Pasifik Energy	
e. Posisi Tugas	:	Anggota Tim Penyusun Amdal (ATPA)	
f. Waktu Pelaksanaan	:	2014	
g. Bidang Penugasan	:	Tenaga Ahli Sosial Ekonomi dan Sosial Budaya	
h. Status Kepegawaian	:	Tenaga Ahli/ Kontrak Kerja	
i. Referensi	:	Achmad Yani Arief	
21. Tahun 2014			
a. Nama Proyek	:	Penyusunan Amdal Rencana Pembangunan Jalan Kereta Api Ruas Cunda – Bireuen.	
b. Lokasi Proyek	:	Kabupaten Aceh Utara, Kota Lhokseumawe dan Kab. Bireuen	
c. Pengguna Jasa	:	Satker Pengembangan Perkeretaapian Aceh	
d. Nama Perusahaan	:	Satker Pengembangan Perkeretaapian Aceh	
e. Posisi Tugas	:	Anggota Tim Penyusun Amdal (ATPA)	
f. Waktu Pelaksanaan	:	2014	
g. Bidang Penugasan	:	Tenaga Ahli Sosial Ekonomi dan Sosial Budaya	
h. Status Kepegawaian	:	Tenaga Ahli/ Kontrak Kerja	
i. Referensi	:	Abdul Kamal, ST	
22. Tahun 2014			
a. Nama Proyek	:	Penyusunan Amdal Rencana Penambangan Batubara.	
b. Lokasi Proyek	:	Kabupaten Aceh Barat	
c. Pengguna Jasa	:	PT. Indonesia Pasific Energi	
d. Nama Perusahaan	:	PT. Indonesia Pasific Energi	
e. Posisi Tugas	:	Anggota Tim Penyusun Amdal (ATPA)	
f. Waktu Pelaksanaan	:	2014	
g. Bidang Penugasan	:	Tenaga Ahli Sosial Ekonomi dan Sosial Budaya	
h. Status Kepegawaian	:	Tenaga Ahli/ Kontrak Kerja	
i. Referensi	:	-	
23. Tahun 2014			
a. Nama Proyek	:	Penyusunan Upaya UKL-UPL Pabrik Kelapa Sawit.	
b. Lokasi Proyek	:	Kabupaten Nagan Raya Provinsi Aceh.	
c. Pengguna Jasa	:	PT. Raja Marga	
d. Nama Perusahaan	:	PT. Raja Marga	

e. Posisi Tugas	:	Ketua Tim Penyusun	
f. Waktu Pelaksanaan	:	2014	
g. Bidang Penugasan	:	Tenaga Ahli Sosial Ekonomi dan Sosial Budaya	
h. Status Kepegawaian	:	Tenaga Ahli/ Kontrak Kerja	
i. Referensi	:	-	
24. Tahun 2013			
a. Nama Proyek	:	Penyusunan Amdal Pabrik Karet	
b. Lokasi Proyek	:	Kabupaten Aceh Barat	
c. Pengguna Jasa	:	PT. Potensi Bumi Sakti	
d. Nama Perusahaan	:	PT. Potensi Bumi Sakti	
e. Posisi Tugas	:	Anggota Tim Penyusun Amdal (ATPA)	
f. Waktu Pelaksanaan	:	2013	
g. Bidang Penugasan	:	Tenaga Ahli Sosial Ekonomi dan Sosial Budaya	
h. Status Kepegawaian	:	Tenaga Ahli/ Kontrak Kerja	
25. Tahun 2013			
a. Nama Proyek	:	Penyusunan Upaya UKL-UPL Pabrik Kelapa Sawit.	
b. Lokasi Proyek	:	Kabupaten Aceh Timur	
c. Pengguna Jasa	:	PT. Alam Jaya Sakti	
d. Nama Perusahaan	:	PT. Alam Jaya Sakti	
e. Posisi Tugas	:	Ketua Tim Penyusun	
f. Waktu Pelaksanaan	:	2013	
g. Bidang Penugasan	:	Tenaga Ahli Sosial Ekonomi dan Sosial Budaya	
h. Status Kepegawaian	:	Tenaga Ahli/ Kontrak Kerja	
i. Referensi	:	Hanafiah	
26. Tahun 2012			
a. Nama Proyek	:	Penyusunan Upaya UKL-UPL Embung /Waduk Lhok Gajah	
b. Lokasi Proyek	:	Kabupaten Aceh Utara Provinsi Aceh.	
c. Pengguna Jasa	:	Dinas Pengairan Kabupaten Aceh Utara	
d. Nama Perusahaan	:	PT STADIA Consulting Engineers	
e. Posisi Tugas	:	Anggota Tim Penyusun	
f. Waktu Pelaksanaan	:	2012	
g. Bidang Penugasan	:	Tenaga Ahli Sosial Ekonomi dan Sosial Budaya	
h. Status Kepegawaian	:	Tenaga Ahli/ Kontrak Kerja	
i. Referensi	:	Dadan Rusli, ST	
27. Tahun 2012			
a. Nama Proyek	:	Penyusunan Renstra SKPD Provinsi Aceh 2012-2017	
b. Lokasi Proyek	:	Provinsi Aceh	
c. Pengguna Jasa	:	Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Aceh	
d. Nama Perusahaan	:	-	
e. Posisi Tugas	:	Ketua Tim Penyusun	
f. Waktu Pelaksanaan	:	2012	



PEMERINTAH KABUPATEN NAGAN RAYA
KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS (KLHS)
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD)

g. Bidang Penugasan	:	Anggota Tim	
h. Status Kepegawaian	:	Tenaga Ahli/ Kontrak Kerja	
28. Tahun 2012			
a. Nama Proyek	:	Kajian Lingkungan Penambangan Emas Kec. Geumpang	
b. Lokasi Proyek	:	Kabupaten Pidie, Provinsi Aceh	
c. Pengguna Jasa	:	Bapedal Aceh	
d. Nama Perusahaan	:	CV. Portalindo Karya Utama	
e. Posisi Tugas	:	Anggota Tim Penyusun	
f. Waktu Pelaksanaan	:	2012	
g. Bidang Penugasan	:	Tenaga Ahli Sosial Ekonomi dan Sosial Budaya	
h. Status Kepegawaian	:	Tenaga Ahli/ Kontrak Kerja	
29. Tahun 2012			
a. Nama Proyek	:	Penyusunan Amdal Kebun Karet	
b. Lokasi Proyek	:	Kabupaten Aceh Barat	
c. Pengguna Jasa	:	PT. Potensi Bumi Sakti	
d. Nama Perusahaan	:	PT. Potensi Bumi Sakti	
e. Posisi Tugas	:	Anggota Tim Penyusun Amdal (ATPA)	
f. Waktu Pelaksanaan	:	2012	
g. Bidang Penugasan	:	Tenaga Ahli Sosial Ekonomi dan Sosial Budaya	
h. Status Kepegawaian	:	Tenaga Ahli/ Kontrak Kerja	
30. Tahun 2012			
a. Nama Proyek	:	Penyusunan UKL-UPL Jalan Medan-Belawan	
b. Lokasi Proyek	:	Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara	
c. Pengguna Jasa	:	Balai Besar Jalan Wil. Sumut	
d. Nama Perusahaan	:	PT. Stadia Consulting Engineering, Jakarta	
e. Posisi Tugas	:	Anggota Tim Penyusun	
f. Waktu Pelaksanaan	:	2012	
g. Bidang Penugasan	:	Tenaga Ahli Sosial Ekonomi dan Sosial Budaya	
h. Status Kepegawaian	:	Tenaga Ahli/ Kontrak Kerja	
31. Tahun 2011			
a. Nama Proyek	:	Kajian Perencanaan Berbasis Kinerja/Renstra SKPD 2014-2017	
b. Lokasi Proyek	:	Provinsi Aceh	
c. Pengguna Jasa	:	Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Aceh	
d. Nama Perusahaan	:	CV. Poli Cipta Consultant	
e. Posisi Tugas	:	Ketua Tim Penyusun	
f. Waktu Pelaksanaan	:	2011	
g. Bidang Penugasan	:	Tenaga Ahli Sosial Ekonomi Pertanian	
h. Status Kepegawaian	:	Tenaga Ahli/ Kontrak Kerja	
32. Tahun 2011			
a. Nama Proyek	:	Penyusunan UKL-UPL Kebun Kelapa Sawit	

b. Lokasi Proyek c. Pengguna Jasa d. Nama Perusahaan e. Posisi Tugas f. Waktu Pelaksanaan g. Bidang Penugasan h. Status Kepegawaian	: Kabupaten Aceh Barat : PT. Pan Sumatera Agri : PT. Pan Sumatera Agri : Anggota Tim Penyusun : Oktober 2011-Desember 2011 : Tenaga Ahli Pertanian/Sosial Ekonomi Pertanian : Tenaga Ahli/ Kontrak Kerja	
33. Tahun 2011 a. Nama Proyek b. Lokasi Proyek c. Pengguna Jasa d. Nama Perusahaan e. Posisi Tugas f. Waktu Pelaksanaan g. Bidang Penugasan h. Status Kepegawaian	: Penyusunan UKL-UPL Pabrik Kelapa Sawit : Kabupaten Aceh Timur : PT. Anugerah Fajar Rezeki : PT. Anugerah Fajar Rezeki : Anggota Tim Penyusun : 2011 : Tenaga Ahli Sosial Ekonomi : Tenaga Ahli/ Kontrak Kerja	
34. Tahun 2011 a. Nama Proyek b. Lokasi Proyek c. Pengguna Jasa d. Nama Perusahaan e. Posisi Tugas f. Waktu Pelaksanaan g. Bidang Penugasan h. Status Kepegawaian	: Penyusunan UKL-UKP Penambangan Timah Hitam : Kabupaten Aceh Timur : Koperasi Atjeh Makmu : Koperasi Atjeh Makmu : Anggota Tim Penyusun : 2011 : Tenaga Ahli Sosial Ekonomi : Tenaga Ahli/ Kontrak Kerja	
35. Tahun 2011 a. Nama Proyek b. Lokasi Proyek c. Pengguna Jasa d. Nama Perusahaan e. Posisi Tugas f. Waktu Pelaksanaan g. Bidang Penugasan h. Status Kepegawaian	: Penyusunan KA-ANDAL Jalan Lingkar Subulussalam : Kota Subulussalam : Dinas Cipta Karya, Provinsi Aceh : PT. Multidelcon Internal : Anggota Tim Penyusun Amdal (ATPA) : 2011 : Tenaga Ahli Sosial Ekonomi : Tenaga Ahli/ Kontrak Kerja	
36. Tahun 2011 a. Nama Proyek b. Lokasi Proyek c. Pengguna Jasa d. Nama Perusahaan e. Posisi Tugas f. Waktu Pelaksanaan	: Penyusunan DPLH Pabrik Es Kristal : Kota Banda Aceh : CV. Muda Perkasa : CV. Muda Perkasa : Anggota Tim Penyusun : 2011	



PEMERINTAH KABUPATEN NAGAN RAYA
KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS (KLHS)
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD)

g. Bidang Penugasan	:	Tenaga Ahli Sosial Ekonomi	
h. Status Kepegawaian	:	Tenaga Ahli/ Kontrak Kerja	
37. Tahun 2011			
a. Nama Proyek	:	Penyusunan UKL-UKP Kebun Kakao	
b. Lokasi Proyek	:	Kabupaten Aceh Utara	
c. Pengguna Jasa	:	PT. Global Jaya Lestari	
d. Nama Perusahaan	:	PT. Global Jaya Lestari	
e. Posisi Tugas	:	Ketua Tim Penyusun	
f. Waktu Pelaksanaan	:	2011	
g. Bidang Penugasan	:	Tenaga Ahli Sosial Ekonomi	
h. Status Kepegawaian	:	Tenaga Ahli/ Kontrak Kerja	
38. Tahun 2011			
a. Nama Proyek	:	Penyusunan AMDAL Tambang Bijih Besi	
b. Lokasi Proyek	:	Kabupaten Aceh Jaya	
c. Pengguna Jasa	:	PT. Surya Tambang Perkasa	
d. Nama Perusahaan	:	PT. Surya Tambang Perkasa	
e. Posisi Tugas	:	Anggota Tim Penyusun Amdal (ATPA)	
f. Waktu Pelaksanaan	:	2011	
g. Bidang Penugasan	:	Tenaga Ahli Sosial Ekonomi	
h. Status Kepegawaian	:	Tenaga Ahli/ Kontrak Kerja	
39. Tahun 2011			
a. Nama Proyek	:	Penyusunan UKL-UKP Arena Pemandian Water Boom	
b. Lokasi Proyek	:	Kota Langsa	
c. Pengguna Jasa	:	PT. Virta Tirta	
d. Nama Perusahaan	:	PT. Virta Tirta	
e. Posisi Tugas	:	Ketua Tim Penyusun	
f. Waktu Pelaksanaan	:	2011	
g. Bidang Penugasan	:	Tenaga Ahli Sosial Ekonomi	
h. Status Kepegawaian	:	Tenaga Ahli/ Kontrak Kerja	
40. Tahun 2010			
a. Nama Proyek	:	Penyusunan KA-ANDAL Kolam Pelabuhan Lamteng	
b. Lokasi Proyek	:	Kabupaten Aceh Besar	
c. Pengguna Jasa	:	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informasi Aceh	
d. Nama Perusahaan	:	CV. Lima Mandiri Konsultan, Banda Aceh	
e. Posisi Tugas	:	Anggota Tim Penyusun	
f. Waktu Pelaksanaan	:	2010	
g. Bidang Penugasan	:	Tenaga Ahli Sosial Ekonomi	
h. Status Kepegawaian	:	Tenaga Ahli/ Kontrak Kerja	
41. Tahun 2010			
a. Nama Proyek	:	Penyusunan UKL-UPL Industri Pengolahan Ikan	



PEMERINTAH KABUPATEN NAGAN RAYA
KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS (KLHS)
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD)

b. Lokasi Proyek	:	Kabupaten Pidie Jaya
c. Pengguna Jasa	:	Aceh Development Fund (ADF)
d. Nama Perusahaan	:	CV. Lima Mandiri
e. Posisi Tugas	:	Anggota Tim Penyusun
f. Waktu Pelaksanaan	:	Juni 2010-Juli 2010
g. Bidang Penugasan	:	Tenaga Ahli Sosial Ekonomi
h. Status Kepegawaian	:	Tenaga Ahli/ Kontrak Kerja
42. Tahun 2010		
a. Nama Proyek	:	Penyusunan UKL-UPL Pabrik Es Balok
b. Lokasi Proyek	:	Kabupaten Pidie Jaya
c. Pengguna Jasa	:	Aceh Development Fund (ADF)
d. Nama Perusahaan	:	CV. Lima Mandiri
e. Posisi Tugas	:	Anggota Tim Penyusun
f. Waktu Pelaksanaan	:	2010
g. Bidang Penugasan	:	Tenaga Ahli Sosial Ekonomi
h. Status Kepegawaian	:	Tenaga Ahli/ Kontrak Kerja
43. Tahun 2010		
a. Nama Proyek	:	Penyusunan UKL-UPL Industri Asap Cair
b. Lokasi Proyek	:	Kabupaten Bireuen
c. Pengguna Jasa	:	Aceh Development Fund (ADF)
d. Nama Perusahaan	:	CV. Lima Mandiri
e. Posisi Tugas	:	Anggota Tim Penyusun
f. Waktu Pelaksanaan	:	2010
g. Bidang Penugasan	:	Tenaga Ahli Sosial Ekonomi
h. Status Kepegawaian	:	Tenaga Ahli/ Kontrak Kerja
44. Tahun 2010		
a. Nama Proyek	:	Penyusunan UKL-UPL Industri Kreatif Usaha Percetakan
b. Lokasi Proyek	:	Kabupaten Bireuen
c. Pengguna Jasa	:	Aceh Development Fund (ADF)
d. Nama Perusahaan	:	CV. Lima Mandiri
e. Posisi Tugas	:	Anggota Tim Penyusun
f. Waktu Pelaksanaan	:	2010
g. Bidang Penugasan	:	Tenaga Ahli Sosial Ekonomi
h. Status Kepegawaian	:	Tenaga Ahli/ Kontrak Kerja
45. Tahun 2010		
a. Nama Proyek	:	Penyusunan UKL-UPL Aspal Mixing Plant (AMP)
b. Lokasi Proyek	:	Kabupaten Simuleu.
c. Pengguna Jasa	:	PT. Flamboyan Huma Arta (PT. FHA)
d. Nama Perusahaan	:	PT. Flamboyan Huma Arta (PT. FHA)
e. Posisi Tugas	:	Anggota Tim Penyusun
f. Waktu Pelaksanaan	:	2010



PEMERINTAH KABUPATEN NAGAN RAYA
KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS (KLHS)
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD)

g. Bidang Penugasan	:	Tenaga Ahli Sosial Ekonomi	
h. Status Kepegawaian	:	Tenaga Ahli/ Kontrak Kerja	
46. Tahun 2010			
a. Nama Proyek	:	Penyusunan UKL-UPL Galian C PT. FHA	
b. Lokasi Proyek	:	Kabupaten Simueleu.	
c. Pengguna Jasa	:	PT. Flamboyan Huma Arta (PT. FHA)	
d. Nama Perusahaan	:	PT. Flamboyan Huma Arta (PT. FHA)	
e. Posisi Tugas	:	Anggota Tim Penyusun	
f. Waktu Pelaksanaan	:	2010	
g. Bidang Penugasan	:	Tenaga Ahli Sosial Ekonomi	
h. Status Kepegawaian	:	Tenaga Ahli/ Kontrak Kerja	
47. Tahun 2010			
a. Nama Proyek	:	Penyusunan UKL-UPL Galian C PT. GSM	
b. Lokasi Proyek	:	Kabupaten Simueleu.	
c. Pengguna Jasa	:	PT. Gunung Simbao Membangun (PT.GSM)	
d. Nama Perusahaan	:	PT. Gunung Simbao Membangun (PT.GSM)	
e. Posisi Tugas	:	Anggota Tim Penyusun	
f. Waktu Pelaksanaan	:	2010	
g. Bidang Penugasan	:	Tenaga Ahli Sosial Ekonomi	
h. Status Kepegawaian	:	Tenaga Ahli/ Kontrak Kerja	
48. Tahun 2010			
a. Nama Proyek	:	Penyusunan AMDAL Pembangunan Kebun dan Pabrik Kelapa Sawit.	
b. Lokasi Proyek	:	Kabupaten Aceh Jaya	
c. Pengguna Jasa	:	PT. Boswa Megalopolis	
d. Nama Perusahaan	:	PT. Boswa Megalopolis	
e. Posisi Tugas	:	Anggota Tim Penyusun	
f. Waktu Pelaksanaan	:	2010	
g. Bidang Penugasan	:	Tenaga Ahli Sosial Ekonomi	
h. Status Kepegawaian	:	Tenaga Ahli/ Kontrak Kerja	
49. Tahun 2009			
a. Nama Proyek	:	Penyusunan AMDAL Pembangunan Jalan Highway Lintas Timur Aceh Seksi 3-4.	
b. Lokasi Proyek	:	Aceh Utara-Aceh Timur-Aceh Tamiang	
c. Pengguna Jasa	:	Dinas Cipta Karya, Provinsi Aceh	
d. Nama Perusahaan	:	PT. Multidelcon Internal	
e. Posisi Tugas	:	Anggota Tim Penyusun	
f. Waktu Pelaksanaan	:	2009	
g. Bidang Penugasan	:	Tenaga Ahli Sosial Ekonomi	
h. Status Kepegawaian	:	Tenaga Ahli/ Kontrak Kerja	

LAMPIRAN 336



PEMERINTAH KABUPATEN NAGAN RAYA
KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS (KLHS)
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD)

2) Dr. Muhammad Abrar, S.E., M.Si.

CURRICULUM VITAE

DATA DIRI

Nama : Dr. Muhammad Abrar, SE. M.Si
Jenis Kelamin : Laki-laki
Tempat/Tanggal Lahir : Dayah Kleng / 2 August 1977
Pekerjaan : Dosen Tetap Fakultas Ekonomi
Universitas Syiah Kuala - Banda Aceh
Alamat Rumah : Jl. Seurune, No D49, Sektor Timur, Darussalam
Banda Aceh
Kantor : Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Universitas Syiah
Kuala
Darussalam - Banda Aceh 23111
Telp.0651 7410352 Fax. 0651 7552507
No HP : +628116808016
Email : muhammadabrar@usk.ac.id

PENDIDIKAN

No	Nama	Tahun keluar	Spesialisasi
1.	Pasca Sarjana Institut Pertanian Bogor (S3 Doktor)	2018	Ilmu Perencaana Pembangunan Wilayah dan Perdesaan
2.	Pasca Sarjan Universitas Syiah Kuala (S2 Magister)	2012	Ekonomi Regional
3.	Fakultas Ekonomi Universitas Syiah Kuala	2000	Sarjana Ekonomi Pembangunan

PENGALAMAN PEKERJAAN

1. Tenaga Ahli Dewan Perwakilan Aceh (DPRA) Pendampingan Panitia Kerja Pembahasan Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksaan Keuangan (LHP-BPK) Republik Indonesia Atas Laporan Keuangan Pemerintah Aceh Tahun anggaran 2022. (2023).
2. Tenaga Ahli Panitia Khusus Pembahas Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Gubernur Aceh Tahun 2022 (2023).
3. Tenaga Ahli Penyusun Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Aceh Tahun 2025-2045 (2023)
4. Tenaga Ahli Penyusun Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2025-2045 (2023)

5. Tenaga Ahli Penyusun Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Nagan Raya Tahun 2025-2045 (2023)
6. KLHS RPDD Kabupaten Bireuen Tahun 2025-2045 (2023)
7. Tenaga Ahli Penyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2025-2045 (2023)
8. Tenaga Ahli Penyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Simelue Tahun 2025-2045 (2023)
9. Tenaga Ahli Penyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2025-2045 (2023)
10. Tenaga Ahli Penyusun RPJPD Kabupaten Bireuen Tahun 2025-2045 (2023)
11. Tenaga Ahli Panitia Khusus Pembahas Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Gubernur Aceh Tahun 2022 (2023).
12. Tenaga Ahli Panitia Dadan Perencanaan Pembangunan Manusia (BPSDM) Aceh Tahun 2019-sampai dengan Sekarang.
13. Tenaga Ahli Dewan Perwakilan Aceh (DPRA) Pendampingan Panitia Kerja Pembahasan Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksaan Keuangan (LHP-BPK) Republik Indonesia Atas Laporan Keuangan Pemerintah Aceh Tahun anggaran 2021. (2022).
14. Tenaga Ahli Penyusun Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten Aceh Besar Tahun 2023-2026 (2022).
15. Tenaga Ahli Penyusun RPD Kabupaten Aceh Besar Tahun 2023-2026 (2022).
16. Tenaga Ahli Penyusun RPD Kabupaten Bireuen Tahun 2023-2026 (2022).
17. Tenaga Ahli Penyusun RPD Kabupaten Aceh Utara Tahun 2023-2026 (2022).
18. Tenaga Ahli Penyusun RPD Kabupaten Aceh Timur Tahun 2023-2026 (2022).
19. Tenaga Ahli Penyusun RPD Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2023-2026 (2022).
20. Tenaga Ahli Penyusun RPD Kabupaten Nagan Raya Tahun 2023-2026 (2022).
21. Konsultan Yayasan Aceh hijau, Penyusunan Roadmap * Universal Child Grant (USG) untuk empat Kabupaten/Kota (Aceh Jaya, Aceh Singkil, Simeulu dan Kota Sabang) (2021)
22. Tenaga Ahli Panitia Khusus Pembahas Rencana Qanun Aceh Tentang Qanun Komoditi Ekpor Aceh Pada DPRA (2021).
23. Tenaga Ahli Panitia Khusus Pembahas Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Gubernur Aceh Tahun 2020 (2021).
24. Tenaga Ahli Perubahan RPJMD Kabupaten Pidie Tahun 2018-2023 (2020).
25. Tenaga Ahli Panitia Khusus Pembahas Rencana Qanun Aceh Tentang Rencana Pembangunan Industri Aceh Pada DPRA (2020).
26. Tenaga Ahli Perubahan RPJMD Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2018-2023 (2021).
27. Tenaga Ahli Evaluasi RPJMD Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2018-2023 (2020).

28. Tenaga Ahli Perubahan RPJMD Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2018-2023 (2020).
29. Tenaga Ahli Perubahan RPJMD Kabupaten Bireuen Tahun 2018-2023 (2020).
30. Tenaga Ahli Perubahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Aceh Tamiang Tahun (2020).
31. Tenaga Ahli Panitia Khusus Pembahas Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Gubernur Aceh Tahun 2019 (2020).
32. Tenaga Ahli Pengembangan Sumberdaya Manusia dan Kerja Sama Pada Badan Pengembangan Sumberdaya Manusia Aceh (BPSDMA) (2019 – Sampai dengan Sekarang).
33. Tim Penyusun Program Kegiatan Pemberdayaan Ekonomi Dayah dan Pemberdayaan Ekonomi Dayah dan Pemberdayaan Ekonomi Santri Pada Dinas Pendidikan Dayah Aceh (2019).

PENGALAMAN ORGANISASI

1. Ikatan Ahli Perencanaan Indonesia (IAP) tahun 2004.
2. Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) Cabang Banda Aceh. Tahun 2000 s/d sekarang

Pengalaman Seminar

Pemakalah Seminar Ilmiah (*Oral Presentation*) dalam 5 Tahun Terakhir

No	Nama Pertemuan Ilmiah / Seminar	Judul Artikel Ilmiah	Waktu dan Tempat
1	BILSEL INTERNATIONAL TRUVA SCIENTIFIC RESEARCHES AND INNOVATION CONGRESS	Regional Development Planning With Leading Sector Analysis In Aceh Besar District	16-17 DESEMBER 2023 ÇANAKKALE / TÜRKİYE
2	BILSEL INTERNATIONAL TRUVA SCIENTIFIC RESEARCHES AND INNOVATION CONGRESS	Regional Development Strategy Based On Leading Economic Sectors In Pekanbaru, Riau, Indonesia	16-17 DESEMBER 2023 ÇANAKKALE / TÜRKİYE
3	BILSEL INTERNATIONAL TRUVA SCIENTIFIC RESEARCHES AND INNOVATION CONGRESS	The Effect Of Local Revenue And Regional Autonomy Funds On The Economic Growth Of Province Of Aceh, Indonesia	16-17 DESEMBER 2023 ÇANAKKALE / TÜRKİYE
4	BILSEL INTERNATIONAL TRUVA SCIENTIFIC RESEARCHES AND INNOVATION CONGRESS	Potential Sectors Of The Economy Of Aceh Jaya Regency	16-17 DESEMBER 2023 ÇANAKKALE / TÜRKİYE
5	The 4th International Conference on Agricultural Technology, Engineering, and Environmental Sciences	"Feasibility study of post-harvest handling of betel nut using a self-developed betel nut cutting machine" is accepted.	2022- BANDA ACEH



PEMERINTAH KABUPATEN NAGAN RAYA
KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS (KLHS)
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD)

Karya Buku dalam 5 Tahun Terakhir

No	Judul Buku	Tahun	Jumlah Halaman	Penerbit
1	METODE MATEMATIKA UNTUK ILMU EKONOMI	2023	170	BANDAR PUBLISHING
2	EKONOMI PRODUKSI	2021	178	BANDAR PUBLISHING
Dst.				

Perolehan HKI dalam 10 Tahun Terakhir

No.	Judul/Tema HKI	Tahun	Jenis	Nomor P/ID
1	Conduction SIM VI.1	2023	Program Komputer	EC00202387416, 30 September 2023
2	Pinang V.1	2022	Program Komputer	EC00202224663, 13 April 2022

Banda Aceh, 26 Februari 2024

Dr. Muhammad Abrar, SE, M.Si



PEMERINTAH KABUPATEN NAGAN RAYA
KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS (KLHS)
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD)

3) Dr. Firdus, S.Pd., M.Si

BIODATA

A. Identitas Diri

1.	Nama Lengkap (dengan gelar)	Dr. Firdus, S.Pd., M.Si
2.	Jenis Kelamin	Laki-laki
3.	Jabatan Fungsional	Lektor
4.	Pangkat/Golongan	Penata TK.I / IIIId
5.	NIP	196904061999031002
6.	NIDN	0006046901
7.	Tempat/Tanggal Lahir	Teupin Asan/6 April 1969
8.	Alamat Rumah	Jl. Seurune No. E5C Darussalam-Banda Aceh, Kode pos: 23111
9.	Email	firdus@usk.ac.id
10.	Nomor Telepon/ Hp	081360054615
11.	Alamat Kantor	Departemen Biologi, FMIPA USK, Jl. Syech Abdul Rauf No. 3 Darussalam Banda Aceh, Kode pos: 23111

B. Riwayat Pendidikan

Jenjang Pendidikan	S1	S2	S3
Nama PT	Universitas Abulyatama	Institut Pertanian Bogor	Universitas Syiah Kuala
Bidang Ilmu	Pend. Biologi	Biologi	Biologi
Tahun Masuk-Lulus	1988-1994	1997-2000	2015 - 2020

C. Riwayat Pekerjaan

No	Instansi/Unit Kerja	Tahun	Jabatan/Kedudukan
1	Departemen Biologi FMIPA USK	1999 sampai sekarang	Dosen
2	Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat (LPKM) USK	2005 sampai 2011	Anggota Komisi Pertimbangan
3	Yayasan Sains Nusantara	2005 - sekarang	Pendiri/Ketua Pembina
4	Pusat Studi Kelautan dan Perikanan (PSKP) Unsyiah	2005 - 2006	Perencanaan Program
5	Laboratorium Fisiologi Hewan Departemen Biologi FMIPA USK	2002 – 2005 2012 – 2015 2016 – 2020	Kepala Laboratorium
6	Laboratorium Fisiologi Departemen Biologi FMIPA USK	2020-2024	Kepala Laboratorium
7	Pusat Penelitian Lingkungan Hidup dan Sumberdaya Alam/Pusat Riset Lingkungan Hidup USK	2017 - Sekarang	Wakil Ketua Divisi Kelembagaan dan Administrasi
8	Pusat Riset Kopi dan Kakao Aceh USK	2018 - Sekarang	Sekretaris
9	Pusat Riset Sawit dan Kelapa USK	2023 - Sekarang	Anggota Divisi Riset dan Pengembangan



PEMERINTAH KABUPATEN NAGAN RAYA
KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS (KLHS)
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD)

D. Pengalaman Penelitian dalam 5 Tahun Terakhir
(Bukan Skripsi, Tesis, Disertasi)

No	Tahun	Judul Penelitian
1.	2015	Pengaruh Salinitas Terhadap Pertumbuhan Juvenil Ikan Kuwe (<i>Caranx ignobilis</i>)
2.	2016	Pengaruh Pemberian pakan dengan Kandungan Protein Berbeda Terhadap Pertumbuhan Juvenil Ikan Kuwe (<i>Caranx sp.</i>)
3.	2018	Pengaruh Pakan Bersuplemen Arang Aktif dari Sumber Berbeda Terhadap Pertumbuhan Juvenil Ikan Kuwe (<i>Caranx sp.</i>)
4.	2019	Suplementasi Arang Aktif Sekam Padi dalam Pakan Terhadap Pertumbuhan Ikan Kuwe (<i>Caranx ignobilis</i>)
5.	2020	Pemanfaatan Keong Mas (<i>Pomacea canaliculata</i>) sebagai Pakan Alternatif dalam Upaya Penyediaan Pakan untuk Budidaya Ikan Kuwe (<i>Caranx ignobilis</i>)
6	2021	Keanekaragaman, Kelimpahan, dan Sebaran Kerang (Bivalvia) di Perairan Kecamatan Teunom Kabupaten Aceh Jaya

E. Pengalaman Pengabdian Kepada Masyarakat dalam 5 Tahun Terakhir

No	Tahun	Judul
1.	2019	Pengembangan Usaha Masyarakat Pesisir melalui Pembudidayaan Lobster dalam Keramba Jaring Apung
2.	2019	Peningkatan Kuantitas dan Kualitas Garam Rakyat Desa Lam Ujong Kecamatan Baitussalam Kabupaten Aceh Besar dengan Terapan Teknologi Geomembran dan Tunnel
3.	2020	Pengolahan Limbah Buah-Buahan Menjadi Probiotik sebagai Suplemen Pakan Ternak Ruminansia dalam Upaya Pengembangan Sistem Peternakan Organik di Aceh Besar
4.	2021	Peningkatan Mutu Limbah Jerami Padi Sebagai Pakan Ternak melalui Amoniasi dan Fermentasi (Amofer) dalam Upaya Peningkatan Produktifitas Ternak Sapi di Desa Lampreh Kecamatan Ingin Jaya Kabupaten Aceh Besar
5.	2023	Pembuatan Silase Ransum Komplit untuk Meningkatkan Produktivitas Ternak Kambing Kacang di Desa Pasi Lamgarot Kecamatan Ingin Jaya Kabupaten Aceh Besar
6.	2023	Pengolahan Limbah Pertanian dan Perkebunan Menjadi Pakan Ternak dan Pupuk Kompos di Desa Pedekok Kecamatan Pegasing Kabupaten Aceh Tengah

F. Pengalaman Penulisan/Penyusunan Dokumen Lingkungan

Tahun	Nama Proyek	Lokasi	Pemrakarsa/Instansi	Jabatan
2018	Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Aceh Jaya	Aceh Jaya	Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Jaya	Anggota Tim/Tenaga Ahli
2018	UKL - UPL Stone Crusher dan Asphalt Mixing Plant (AMP)	Desa Alue Punti, Kecamatan Pasi Raya, Kabupaten Aceh Jaya	PT. Peutari Jaya Utama	Anggota Tim/Tenaga Ahli
2019	UKL - UPL Pembangunan Gedung Kantor Dinas	Banda Aceh	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan	Anggota Tim/Tenaga Ahli

	Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh (DPMPTSP)		Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Aceh	
2019	UKL – UPL Pembangunan Tambak Udang	Desa Keude Unga, Kecamatan Indra Jaya Kabupaten Aceh Jaya	PT. Swadaya Mitra Perkasa	Anggota Tim/Tenaga Ahli
2019	Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Aceh Besar	Aceh Besar	BAPPEDA Aceh Besar	Anggota Tim/Tenaga Ahli
2019	UKL – UPL <i>Stone Crusher</i>	Desa Jeulinga Barat Kecamatan Bandar Dua Kabupaten Pidie Jaya	CV. Fahdina Rizky	Anggota Tim/Tenaga Ahli
2020	DPLH Puskesmas Panga	Panga Aceh Jaya	Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Jaya	Anggota Tim/Tenaga Ahli
2020	DPLH Puskesmas Calang	Calang Aceh Jaya	Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Jaya	Anggota Tim/Tenaga Ahli
2020	DPLH Puskesmas Krueng Sabee	Krueng Sabee Aceh Jaya	Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Jaya	Anggota Tim/Tenaga Ahli
2020	DPLH Puskesmas Patek	Patek Aceh Jaya	Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Jaya	Anggota Tim/Tenaga Ahli
2020	DPLH Puskesmas Lageun	Lageun Aceh Jaya	Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Jaya	Anggota Tim/Tenaga Ahli
2021	UKL – UPL Pabrik Pengolahan Kelapa Sawit	Teunom Aceh Jaya	PT. Juliprima Kencana	Anggota Tim/Tenaga Ahli
2021	UKL – UPL Puskesmas Lhok Kruet	Lageun Aceh Jaya	Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Jaya	Anggota Tim/Tenaga Ahli
2021	UKL – UPL Klinik Pratama Blang Awe	Kec. Madat Aceh Timur	Klinik Pratama Blang Awe	Anggota Tim/Tenaga Ahli
2023	UKL – UPL Pabrik Pengolahan Kelapa Sawit	Desa Paku Kec. Simpam Mamplam Bireuen	PT. Alam Rimbun Perkasa	Anggota Tim/Tenaga Ahli
2023	DPLH Pabrik Pengolahan Kelapa Sawit	Cot Girek Aceh Utara	PT. Seuramoe Agro Persada	Anggota Tim/Tenaga Ahli

G. Publikasi Artikel Ilmiah dalam Jurnal dalam 5 Tahun Terakhir

No	Judul Artikel Ilmiah	Nama Jurnal	Vol./ Nomor/ Tahun
1	Gut and intestinal biometrics of the giant trevally, <i>Caranx ignobilis</i> , fed an experimental diet with difference sources of activated charcoal.	Journal F1000Research	Vol. 9, No.444: 2020
2	Supplementation of rice husk activated charcoal in feed and its effects on growth and histology of the stomach and intestines from giant trevally, <i>Caranx ignobilis</i> .	Journal F1000Research	Vol.9, No.1274: 2021
3	The comparative study on the osteocranium of red snappers <i>Lutjanus malabaricus</i> (Schneider, 1801) and <i>Lutjanus timorensis</i> (Quoy & Gaimard, 1824) harvested from Pulo Aceh Waters, Indonesia	Journal Zoologischer Anzeiger	Vol.307 2023
4	Diversity and distribution of fish in the Lokop river, Leuser Ecosystem Area, Indonesia	DEPIK Jurnal Ilmu-Ilmu Perairan,	Vol. 12 No.1: 2023



PEMERINTAH KABUPATEN NAGAN RAYA
KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS (KLHS)
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD)

		Pesisir dan Perikanan	
5	A comparative analysis of osteocranium morphology in <i>Lutjanus johnii</i> (Bloch, 1792) and <i>Lutjanus gibbus</i> (Forsskal, 1775) inhabiting different habitats	DEPIK Jurnal Ilmu-Ilmu Perairan, Pesisir dan Perikanan	Vol. 12 No.2: 2023
6	The Application of Asam Suntir as Feed Additives for Bacterial Infection Control of <i>Edwardsiella tarda</i>	Int.J.Trop.Biom ed.Res	Vol. 8 No.1: 2023
7	Pencemaran Logam Berat di Pelabuhan Indonesia	Jurnal Laot Ilmu Kelautan UTU	Vol.5 No.1 2023
8	Kontaminasi Logam Berat Air Sumur Warga akibat Air Lindi dari Tempat Pemrosesan Akhir (TPA)	Jurnal Teknologi Lingkungan Lahan Basah	Vol. 11.No.2 2023

H. Penghargaan yang Pernah Diraih (dari pemerintah, asosiasi atau institusi lainnya)

No	Jenis Penghargaan	Institusi Pemberi Penghargaan	Tahun
1.	Piagam Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya X	Presiden Republik Indonesia	2012
2.	Piagam Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya XX	Presiden Republik Indonesia	2020

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari ternyata dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi.

Banda Aceh, 02 Januari 2024

Dr. Firdus, S.Pd., M.Si
NIP. 196904061999031002

4) Dr. Lukman Hakim, S.P., M.P.



CURRICULUM VITAE

1. Nama Lengkap : Dr. Lukman Hakim, S.P., M.P.
2. Tempat/Tanggal Lahir : Banda Aceh, 03 November 1978
3. Jenis Kelamin : Laki-laki
4. Kebangsaan : Indonesia
5. Alamat Rumah : Jl. Teladan I, Lr. Damai No. 1, Desa Garot, Kecamatan Darul
Imarah, Kabupaten Aceh Besar.
6. Identitas : KTP. No. 1171090311780002
7. Keahlian : Ekonomi Pertanian dan Sistem Dinamik
8. Telepon/Handphone : HP. 081360402300
9. Alamat e-mail : lukman.hakim.sp.mp@usk.ac.id

10. Pendidikan Formal	:	Sarjana (S1)	:	Sosial Ekonomi Pertanian, Fakultas Pertanian Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh Tamat 2001
		Magister (S2)	:	Ekonomi Pertanian, Program Pascasarjana Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta Tamat 2004
		Doktor (S3)	:	Agribisnis, Program Pascasarjana Universitas Padjadjaran, Bandung Tamat 2016
11. Organisasi	:		-	Perhimpunan Ahli Sosial Ekonomi Pertanian (PERHEPPI)
12. Pengalaman Pekerjaan yang Relevan (Jasa Konsultan)				
I. Tahun 2022				
a. Nama Proyek	:	Penyusunan Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RTRW Tahun 2015 - 2035		
b. Lokasi Proyek	:	Kabupaten Nagan Raya		
c. Pengguna Jasa	:	Bappeda Kabupaten Nagan Raya		
d. Nama Perusahaan	:	-		
e. Posisi tugas	:	Tim Penyusun		
f. Waktu Pelaksanaan	:	2022		
g. Bidang penugasan	:	Tenaga Ahli Sosial Ekonomi dan Sosial Budaya		
h. Status Kepegawaian	:	Tenaga Ahli/ Kontrak Kerja		

A. Pengalaman Penelitian Dalam 5 Tahun Terakhir

No.	Tahun	Judul Penelitian	Sumber
1	2016	Entrepreneurial Orientation Model in Cluster Development of Agribusiness Potatoes in the Province of Aceh	RISTEKDIKTI
2	2016	Model Pengembangan Agroteknopreneurship pada Agribisnis Kentang di Kabupaten Bener Meriah	RISTEKDIKTI
3	2016	Model Kebijakan Publik Pada Pengembangan Klaster Agribisnis Kentang	RISTEKDIKTI
4	2017	Pemodelan Dinamika Sistem pada Manajemen Rantai Pasok Agribisnis Kentang Terpadu (Ketua)	DRPM RISTEKDIKTI
5	2017	Model Sistem Dinamik Pengembangan Klaster Agribisnis Kentang (Ketua)	DRPM RISTEKDIKTI
6	2018	Rekayasa Model Dinamika Sistem Manajemen Rantai Pasok Industri Kopi Arabika Gayo (Ketua)	PNBP PUU
7	2019	Model Kemitraan Setara Sebagai Alternatif untuk Meningkatkan Posisi Tawar Petani pada Rantai Pasok Cabai Merah di Kabupaten Bener Meriah (Ketua)	PNBP PL
8	2020	Rekayasa Model Sistem Dinamik Terhadap Kebijakan Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah di Kabupaten Aceh Besar (Ketua)	PNBP PUU
9	2020	Simulasi Dinamika Sistem Koperasi Generasi Baru sebagai Alternatif untuk Mengatasi Dampak Fluktuasi Harga pada Rantai Pasok Kentang di Kabupaten Bener Meriah (Anggota)	PNBP PL
10	2023	Produksi Dan Pengembangan Pakan Unggulan Dan Feed Additive Berbasis Sumberdaya Lokal Untuk Pengembangan Ternak Unggas Dan Penerapan Pembelajaran Teaching Factory (Anggota)	<i>Matching Fund</i> (Kedaireka) Tahun Anggaran 2023 Batch I Gelombang 3
11	2023	Model Pengembangan Usahatani Terpadu (<i>Integrated Farming</i>) Ubi Kayu di Kabupaten Aceh Besar (Ketua)	PTNBH PL

B. Pengalaman Pengabdian Kepada Masyarakat dalam 5 Tahun Terakhir

No.	Tahun	Judul Pengabdian Kepada Masyarakat	Sumber
1	2011	Penyuluhan Pertanian sebagai Subsistem Penunjang Pembangunan Agribisnis di Kabupaten Aceh Tengah (Pemateri)	Badan Penyuluhan dan Ketahanan Pangan A.Tengah
2	2016	Anggota Tim Penyusun AMDAL Kawasan Industri Aceh Dinas Perdagangan dan Industri Aceh.	Disperindag Aceh
3	2019	Penyuluhan “Value Chain di Kebun Kurma Lembah Barbate” Desa Data Makmur Kecamatan Blang Bintang Kabupaten Aceh Besar (Pemateri)	TIM Pengabdian

4	2020	Penyusunan Rencana Definitif Kelompok (RDK) dan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) pada Kelompok Tani Ingin Makmur, Desa Atong, Kecamatan Montasik, Kabupaten Aceh Besar (Pemateri)	TIM Pengabdian
5	2021	Koreksi RDK dan RDKK pada Kelompok Tani Cot Manyang dan Komitmen Petugas PPL, di Desa Data Makmur, Kecamatan Blang Bintang, Kabupaten Aceh Besar (Pemateri)	TIM Pengabdian
6	2022	Anggota Tim Tenaga Ahli Penyusunan Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Kabupaten Nagan Raya Tahun 2022	Pemda Nagan Raya
7	2023	Peningkatan produktivitas tanaman hortikultura melalui penguatan kelembagaan petani	Pengabdian Mandiri

C. Publikasi Artikel Ilmiah Dalam Jurnal dalam 5 Tahun Terakhir

No	Judul Artikel Ilmiah	Penerbit/Jurnal	Volume/Nomor/Tahun
1	Technology innovation of integrated farming system model in cassava agribusiness development in Aceh Besar regency	IOP Publising Ltd. Terindex scopus	Volume 1290, 2024 Published online: 10 January 2024 https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1755-1315/1290/1/012042/pdf
2	Pemodelan dinamika sistem ketersediaan ubi kayu di kabupaten Aceh Besar	Jurnal Agromix Sinta 2	Volume 14, Nomor 1 (2023), Halaman 48-59 https://jurnal.yudharta.ac.id/v2/index.php/AGROMIX/article/view/3155/2407
3	Rekayasa Model Pengembangan Klaster Agribisnis Sapi Aceh di Kabupaten Aceh Besar	Jurnal Agripet Sinta 2	Volume 22 Nomor 2 Oktober 2022 http://jurnal.unsyiah.ac.id/agripet
4	System dynamics modeling on new generation cooperative as an alternative to enhance bargaining position of potato farmers in Bener Meriah district	IOP Publising Ltd. Terindex scopus	Volume 922, 2021 Published online: 03 December 2021 https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1755-1315/922/1/012063/pdf
5	Alternative based farmer model for increasing red chili production in Bener Meriah, Aceh	IOP Publising Ltd. Terindex scopus	Volume 644, 2021 Published online: 03 February 2021 https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1755-1315/644/1/012050
6	System dynamics modeling of agricultural land conversion in Aceh Besar District	IOP Publising Ltd. Terindex scopus	Volume 667, 2021 https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1755-1315/667/1/012086/pdf
7	Palm sugar production from palm tree in	IOP Publising Ltd. Terindex	Volume 644, 2021 Published online: 03 February 2021

No	Judul Artikel Ilmiah	Penerbit/Jurnal	Volume/Nomor/Tahun
	gerenggam village environment, Aceh	scopus	https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1755-1315/644/1/012018
8	The System Dynamics Modeling of Gayo Arabica Coffee Industry Supply Chain Management	IOP Publisng Ltd. Terindex scopus	IOP Published 8 februari 2020 volume 425 (https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1755-1315/425/1/011001)
9	Specific Zone and Development Strategy of Local Coconut Plantation in Aceh Besar Regency	IOP Publisng Ltd. Terindex scopus	IOP Published 8 februari 2020 volume 425 (https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1755-1315/425/1/011001)
10	Feasibility Analysis of Waste Rice Cultivation (Oryza Sativa L.) on Optimal Sub Lands of West Aceh Regency, Indonesia	RJOAS	RJOAS, 11(83), November 2018 DOI https://doi.org/10.18551/rjoas.2018-11.35
11	Rancangbangun Model Kemitraan Sinergis dalam Pengembangan Klaster Agribisnis Kentang	Jurnal Ilmu-Ilmu Pertanian	Jurnal Ilmu-Ilmu Pertanian, Volume 24, Nomor 2, Desember 2017
12	Model Sistem Dinamik Pengembangan Klaster Agribisnis Kentang	Jurnal Agriseip	Jurnal Agriseip, Vol. 24, No. 1, Juni 2017 ISSN: 1411-3848
13	Pemodelan Dinamika Sistem pada Manajemen Rantai Pasok Agribisnis Kentang Terpadu	Jurnal MIMBAR	Jurnal MIMBAR, Vol. 33, No. 1st (June, 2017), pp. 1-10. Terakreditasi, SK Kemendikbud, No.040/P/2014

D. Pemakalah Seminar Ilmiah (Oral Presentation) dalam 5 Tahun Terakhir

No	Nama Pertemuan Ilmiah / Seminar	Judul Artikel Ilmiah	Waktu dan Tempat
1	5th International Conference on Agricultural Technology, Engineering, and Environmental Sciences (ICATES) 2023	Technology innovation of integrated farming system model in cassava agribusiness development in Aceh Besar regency	Published 2024 20-21 September 2023, Fakultas Pertanian, Universitas Syiah Kuala
2	5th International Conference on Agriculture and Bioindustry (ICAGRI) 2023	Behavior and performance of the integrated farming system model for cassava agribusiness development in Aceh Besar regency	11-12 Oktober 2023, Fakultas Pertanian, Universitas Syiah Kuala
3	4th International Conference on Agricultural Technology,	The system dynamics modeling of tenant rice farmer in Aceh Besar regency	10-11 Agustus 2022, Fakultas Pertanian,



PEMERINTAH KABUPATEN NAGAN RAYA
KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS (KLHS)
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD)

	Engineering, and Environmental Sciences (ICATES) 2022		Universitas Syiah Kuala
4	The 3 rd International Conference on Agricultural Technology, Engineering and Environmental Sciences (ICATES)	System dynamics modeling on new generation cooperative as an alternative to enhance bargaining position of potato farmers in Bener Meriah district	21-22 September 2021, Fakultas Pertanian, Universitas Syiah Kuala
5	The 3 rd International Conference on Agricultural Technology, Engineering and Environmental Sciences (ICATES)	System dynamics modeling on new generation cooperative as an alternative to enhance bargaining position of potato farmers in Bener Meriah district	21-22 September 2021, Fakultas Pertanian, Universitas Syiah Kuala
6	1 st International Conference on Agriculture and Bioindustry (ICAGRI)	The System Dynamics Modeling of Gayo Arabika Coffee Industry Supply Chain Management	24-26 October 2019, Hermes Palace Hotel, Banda Aceh, Indonesia.
7	Seminar Nasional FKPTPI	Pemodelan Sistem Produksi Hibrida Dalam Rantai Pasok Industri Kopi Arabika Gayo	2018, Banda Aceh, 02-03 Oktober 2018

E. Penghargaan dalam 10 Tahun Terakhir (dari pemerintah, asosiasi atau institusi lainnya)

No.	Jenis Penghargaan	Institusi Pemberi Penghargaan	Tahun
1	Satyalancana Karya Satya 10 Tahun	Presiden Republik Indonesia	2017

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari ternyata dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi.

Banda Aceh, 10-06-2024
 Anggota Tim Ahli,

Dr. Lukman Hakim, S.P., M.P.
 NIP. 197811032006041001



PEMERINTAH KABUPATEN NAGAN RAYA
KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS (KLHS)
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD)

5) Ir. Ali Afwanudin, S.Kel., M.Si.

CURRICULUM VITAE

1. Nama Personil : Ali Afwanudin, S.Kel., M.Si
2. Tempat / Tanggal Lahir : Subulussalam, 10 Februari 1994
3. Pendidikan
 - S1 : Ilmu Kelautan, Fakultas Kelautan dan Perikanan, Universitas Syiah Kuala, Indonesia (2017)
 - S2 : Magister Pengelolaan Sumberdaya Pesisir Terpadu, Universitas Syiah Kuala, Indonesia (2020)
4. Pendidikan Non Formal
 - Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RZWP3K Provinsi Aceh, 2018
 - Diklat Kompetensi Konservasi Laut, Unsyiah, Banda Aceh (2018)
 - Diklat Kompetensi Dasar-Dasar AMDAL A
5. Bidang Konsentrasi.
 - Ekologi Perairan
 - Kualitas Perairan
 - Sistem Informasi Geografis (GIS Pemetaan)
6. Pengalaman Kerja
 - 1). Tahun 2019
 - a. Nama Proyek : Environment Baseline Analysis (EBA) Andaman II
 - b. Lokasi Proyek : Offshore Utara Aceh (Bireuen, Aceh Utara, dan Kota Lhokseumawe), Provinsi Aceh
 - c. Pengguna Jasa : Premier Oil
 - d. Nama Perusahaan : PPLH-SDA Unsyiah
 - e. Uraian Tugas : Penyusun laporan
 - f. Waktu Pelaksanaan : April – November 2019
 - g. Posisi Penugasan : Asisten Ahli
 - h. Status Kepegawaian : Tidak tetap
 - 2). Tahun 2018
 - a. Nama Proyek : KLHS RZWP3K (Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil)
 - b. Lokasi Proyek : Provinsi Aceh
 - c. Pengguna Jasa : Kementrian Kelautan dan Perikanan
 - d. Nama Perusahaan : Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh
 - e. Uraian Tugas : Menganalisa data dan membuat laporan lingkungan strategis kelautan dan pesisir.
 - f. Waktu Pelaksanaan : April – Oktober 2018
 - g. Posisi Penugasan : Asisten Ahli Hidro-oseanografi
 - h. Status Kepegawaian : Kontrak Kerja
 - 3). Tahun 2020
 - a. Nama Proyek : Studi Amdal Rencana Pengembangan PLTA Lutueng 16 MW.
 - b. Lokasi Proyek : Kabupaten Pidie, Provinsi Aceh.
 - c. Pengguna Jasa : PT. Mega Tuah Raya
 - d. Nama Perusahaan : PPLH-SDA Unsyiah
 - e. Uraian Tuags : Membuat peta dalam kegiatan penyusudan Amdal.
 - f. Waktu Pelaksanaan : 2020- Sekarang
 - g. Posisi Penugasan : Operator GIS (Pemetaan)
 - h. Status Kepegawaian : Tidak Tetap



PEMERINTAH KABUPATEN NAGAN RAYA
KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS (KLHS)
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD)

- 4). Tahun 2020
- a. Nama Proyek : UKL-UPL Rencana Pembangunan Jetty Kuala Ceurape
 - b. Lokasi Proyek : Kabupaten Bireuen, Provinsi Aceh.
 - c. Pengguna Jasa : Dinas Pengairan Aceh.
 - d. Nama Perusahaan : PT. CITRATAMA
 - e. Uraian Tuags : Menganalisa data dan membuat laporan lingkungan UKL-UPL
 - f. Waktu Pelaksana : 2020- Sekarang
 - g. Posisi Penugasan : Tenaga Ahli Ekologi dan Pemetaan
 - h. Status Kepegawaian : Kontrak Kerja
- 5). Tahun 2019-2020
- a. Nama Proyek : UKL-UPL Pengeboran Sumur Eksplorasi Di Wilayah Kerja Andaman II Selat Malaka, Provinsi Aceh
 - b. Lokasi Proyek : Provinsi Aceh
 - c. Pengguna Jasa : Premier Oil Limited
 - d. Nama Perusahaan : PPLH-SDA Unsyiah
 - e. Uraian Tuags : Penyusun Laporan
 - f. Waktu Pelaksana : 2019-2020
 - g. Posisi Penugasan : Asisten Ahli
 - h. Status Kepegawaian : Tidak Tetap
- 6). Tahun 2020
- a. Nama Proyek : UKL-UPL Rencana Pembangunan Jetty Krueng Lageun Kabupaten Aceh Jaya
 - b. Lokasi Proyek : Kabupaten Aceh Jaya, Provinsi Aceh.
 - c. Pengguna Jasa : Dinas Pengairan Aceh.
 - d. Nama Perusahaan : PT. INDOTAMA ADYA CONSULTANT
 - e. Uraian Tuags : Menganalisa data dan membuat laporan lingkungan UKL-UPL
 - f. Waktu Pelaksana : 2020- Sekarang
 - g. Posisi Penugasan : Tenaga Ahli Ekologi dan Pemetaan
 - h. Status Kepegawaian : Kontrak Kerja
- 7). Tahun 2020
- a. Nama Proyek : Amdal Rencana Penambangan, Pengolahan dan Pemurnian Biji Besih dan Mineral Pengikutnya (DMP)
 - b. Lokasi Proyek : Kabupaten Aceh Selatan, Provinsi Aceh.
 - c. Pengguna Jasa : KSU. TIEGA MANGGIS
 - d. Nama Perusahaan : PT. INDOTAMA ADYA CONSULTANT
 - e. Uraian Tuags : Menganalisa data dan membuat laporan lingkungan UKL-UPL
 - f. Waktu Pelaksana : 2020- Sekarang
 - g. Posisi Penugasan : Operator GIS (Pemetaan)
 - h. Status Kepegawaian : Kontrak Kerja
- 8). Tahun 2020
- a. Nama Proyek : Studi Amdal Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Sabang
 - b. Lokasi Proyek : Kota Sabang
 - c. Pengguna Jasa : Dinas Kesehatan Kota Sabang
 - d. Nama Perusahaan : Pusat Penelitian Lingkungan Hidup dan Sumberdaya Alam - Unsyiah
 - e. Uraian Tuags : Ahli Pemetaan
 - f. Waktu Pelaksana : 2020- Sekarang
 - g. Posisi Penugasan : Asisten Ahli
 - h. Status Kepegawaian : Kontrak Kerja
- 9). Tahun 2020
- a. Nama Proyek : UKL-UPL Pembangunan Pengaman Pantai Anoi Itam Kota Sabang.
 - b. Lokasi Proyek : Kota Sabang
 - c. Pengguna Jasa : Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kota Sabang
 - d. Nama Perusahaan : Pusat Penelitian Lingkungan Hidup dan Sumberdaya Alam - Unsyiah
 - e. Uraian Tuags : Ahli Pemetaan
 - f. Waktu Pelaksana : 2020- Sekarang



PEMERINTAH KABUPATEN NAGAN RAYA
KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS (KLHS)
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD)

- g. Posisi Penugasan : Asisten Ahli
h. Status Kepegawaian : Kontrak Kerja

10). Tahun 2020

- a. Nama Proyek : UKL-UPL Pembangunan Pengaman Pantai Kuta Ateuch Kota Sabang.
b. Lokasi Proyek : Kota Sabang
c. Pengguna Jasa : Dinas Pkerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kota Sabang
d. Nama Perusahaan : Pusat Penelitian Lingkungan Hidup dan Sumberdaya Alam - Unsyiah
e. Uraian Tuags : Ahli Pemetaan
f. Waktu Pelaksana : 2020- Sekarang
g. Posisi Penugasan : Asisten Ahli
h. Status Kepegawaian : Kontrak Kerja

11). Tahun 2020

- a. Nama Proyek : Studi Amdal Rencana Pengembangan Lapangan Peusangan B, Selat Malaka Blok Lhokseumawe Provinsi Aceh.
b. Lokasi Proyek : Kota Lhokseumawe
c. Pengguna Jasa : ZARATEX. N.V
d. Nama Perusahaan : Pusat Penelitian Lingkungan Hidup dan Sumberdaya Alam - Unsyiah
e. Uraian Tuags : Ahli Pemetaan
f. Waktu Pelaksana : 2020- Sekarang
g. Posisi Penugasan : Asisten Ahli
h. Status Kepegawaian : Kontrak Kerja

Banda Aceh 08 Februari 2021

Ali Afwanudin, S.Kel., M.Si



PEMERINTAH KABUPATEN NAGAN RAYA
KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS (KLHS)
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD)

6. Ichsan Munandar, S.Kel.

BIODATA DIRI

A. Identitas diri

1.	Nama Lengkap (dengan gelar)	Ichsan Munandar, S.Kel
2.	Jenis Kelamin	Laki-laki
6.	Tempat dan Tanggal Lahir	Banda Aceh, 15 Mei 1999
7.	E-mail	ichsanmun15@gmail.com
8.	Nomor Telepon/HP	+6282290565774
10.	Nomor Telepon/Faks	-

B. Riwayat Pendidikan

Program	SARJANA	SMA
Nama Perguruan Tinggi	Universitas Syah Kuala	SMA NEGERI 1 SIMPANG KIRI KOTA SUBULUSSALAM
Bidang Ilmu	Ilmu Kelautan	IPA
Tahun Masuk	2017	2014
Tahun Lulus	2021	2017
Judul Skripsi/ Tesis/Disertasi	Indeks Kerentanan Pesisir Wilayah Aceh Besar Bagian Utara Ditinjau Dari Geomorfologi Pantai	-
Nama Pembimbing/ Promotor	1. Dr. Ir. Muhammad Irham, S.Si., M.Si 2. Maria Ulfah, S.Kel., M.Si	-

C. Keahlian

No.	Bidang
1.	Desain Grafis
2.	Sistem Informasi Geografis (SIG/Pemetaan)
3.	Microsoft Office (Word, Excel, Power Point)

D. Pelatihan dan Sertifikasi

No.	Bidang	Instansi	Tahun
1.	Pengolahan Hasil Perikanan (Klaster Pengemasan Produk Hasil Perikanan)	Lembaga Sertifikasi Profesi Kelautan dan Perikanan	2021
2.	Pemasangan Jaringan Komputer	Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BPVP) Kota Banda Aceh	2022



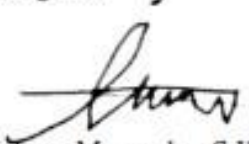
PEMERINTAH KABUPATEN NAGAN RAYA
KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS (KLHS)
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD)

E. Pengalaman Kerja

No.	Bidang	Instansi	Tahun
1.	Laboratorium Sistem Informasi Geografis	Fakultas Kelautan dan Perikanan, Universitas Syiah Kuala	2021

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari ternyata dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi.

Banda Aceh, 5 Juni 2024
Pengusul,


Ichsan Munandar, S.Kel.



PEMERINTAH KABUPATEN NAGAN RAYA
KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS (KLHS)
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD)

B. SERTIFIKAT TIM AHLI





Sertifikat

Nomor : 008/05/plth/2020

Diberikan Kepada :

Dr. Anwar Deli, SP, M.Si

Atas partisipasinya sebagai peserta pada
"PELATIHAN PENYUSUNAN KLHS"
Yang diselenggarakan pada tanggal 07 – 10 Mei 2020
Via Online



Makassar, 10 Mei 2020
Founder KLHS Center Squad

KLHS
CENTER
SQUAD
Green Planning Agency

[Signature]
SRI HIDAYAT, S.Si., M.Si





PEMERINTAH KABUPATEN NAGAN RAYA
KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS (KLHS)
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD)

MATERI WORKSHOP PENYUSUNAN KLHS

1. *Konsep Dasar dan Perkembangan Teori KLHS*
2. *Mekanisme Penyusunan KLHS RTRW, RDTR, dan Substansi KLHS RPJMD*
3. *Praktek Perumusan Isu PB, Isu Strategis dan Prioritas*
4. *Praktek Identifikasi Muatan KRP yang Berdampak/Berisiko*
5. *Pengenalan dan Pemanfaatan SIG dalam Penyusunan KLHS*
6. *Kajian Kerentanan, Resiko dan Dampak Perubahan Iklim*
7. *Pengenalan dan Pemanfaatan Sistem Dynamics*
8. *Pembuatan Model System Dynamic dalam Penentuan D3TLH*
9. *Identifikasi dan Analisis 17 Tujuan TPB*
10. *Praktek Pembuatan Status D3TLH Berbasis Jasa Ekosistem*
11. *Praktek Analisis Pengaruh KRP Terhadap 6 muatan dan Pemanfaatan Informasi D3TLH dalam Penyusunan*
12. *Analisis Proyeksi dan Skenario Pencapaian TPB*
13. *Praktek Penyusunan Alternatif dan Rekomendasi KLHS*
14. *Pendokumentasian, Pengintegrasian Dalam Dok.KRP, Penjaminan Kualitas dan Validasi KLHS*

Makassar, 10 Mei 2020
Founder KLHS Center Squad

**KLHS
CENTER
SQUAD**
Green Planning


SRI HIDAYAT, S.Si., M.Si



PEMERINTAH KABUPATEN NAGAN RAYA
KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS (KLHS)
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD)



SURAT TANDA TAMAT PELATIHAN

Nomor : ST. 6.709/T/A/Pusdiklat SDM LHK-X/2018

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan berdasarkan Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, serta ketentuan pelaksanaannya menyatakan bahwa :



Nama : ***Firdus S.Pd., M.Si***
Tempat/Tanggal Lahir : ***Teupin Asan, 6 April 1969***
Pangkat/Golongan : ***Penata Tk I (III/d)***
Instansi : ***FMIPA Unsyiah/PPLH-SDA Unsyiah***

LULUS

Pelatihan Dasar-Dasar Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) yang dilaksanakan oleh Pusat Penelitian Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam (PPLH-SDA) Universitas Syiah Kuala dari Tanggal 9 Oktober 2018 sampai dengan 12 Oktober 2018 di Banda Aceh yang meliputi 38 jam pelajaran.

Bogor, 12 Oktober 2018

Pt. Kepala Pusat
Pendidikan dan Pelatihan SDM
Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Ir. Sudayatna, M.Sc.
NIP. 19600610 198703 1 001





PEMERINTAH KABUPATEN NAGAN RAYA
KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS (KLHS)
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD)

KURIKULUM
DIKLAT DASAR – DASAR AMDAL
 Nomor : P. 2/Dik/PEPE/Dik-2/3/2016 Tanggal 24 Maret 2016

NO	MATA DIKLAT	JP
1.	Pengarahan Program Diklat	2
2.	Pengertian, Proses dan Manfaat AMDAL	4
3.	Identifikasi, Prakiraan, Evaluasi dan Mitigasi Dampak Lingkungan	8
4.	Kebijakan PPLH dan PSDA terkait dengan AMDAL	6
5.	Proses Penyusunan dan Penilaian AMDAL, serta Penerbitan Izin Lingkungan	8
6.	Pengawasan dan Penegakan Hukum (terkait dengan AMDAL)	2
7.	Etika Penyusun dan Penilai AMDAL	2
8.	Pengantar Sistem Informasi AMDAL	2
9.	Evaluasi	4
JUMLAH		38

Bogor, 12 Oktober 2018

Perangung Jawab
 Kepala Bidang Penyelenggaraan
 Diklat-Teknis,


 Ir. Ardi Sopandi, M.Sc.
 NIP. 19620403 198803 1 002



PEMERINTAH KABUPATEN NAGAN RAYA
KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS (KLHS)
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD)





SURAT TANDA TAMAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

NOMOR : 1458/DDA/UGM-001/2020

Kementerian Lingkungan Hidup berdasarkan Undang-Undang Lingkungan Hidup No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Keputusan Kepala Pusdiklat KLH Nomor : Kep-11/Pusdiklat/LH/11/2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Pendidikan dan/atau Pelatihan AMDAL, menyatakan bahwa :

	Nama	: <u>Ali Agwanudin, S.Kel, M.Si.</u>
	Tempat dan Tanggal Lahir	: <u>Kota Babulussalam, 10 Febuari 1994</u>
	Jabatan	: <u>Staff</u>
	Instansi	: <u>PPH-SDA Unsyiah</u>
	Kualifikasi	: <u>LULUS</u> <u>Bangat Baik</u>

Pada Pendidikan dan Pelatihan Dasar-Dasar AMDAL dan *Environment and Social Impact Assessment (ESIA)* Angkatan ke - 135 yang diselenggarakan oleh Pusat Studi Lingkungan Hidup Universitas Gadjah Mada (PSLH-UGM) pada tanggal 12 - 17 Oktober 2020 di Yogyakarta yang meliputi 53 Jam Pelajaran.

Yogyakarta, 17 Oktober 2020
 Kepala PSLH UGM

 Dr. M. Ramono Hadi, M.Sc.
 NIP. 196201021986021001

 Sertifikat ini dicetak di atas kertas hasil daur ulang



PEMERINTAH KABUPATEN NAGAN RAYA
KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS (KLHS)
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD)



DAFTAR MATA PELAJARAN
PELATIHAN DASAR-DASAR AMDAL DAN ESIA*)
ANGKATAN KE-135 ; TANGGAL 12 - 17 OKTOBER 2020

No.	MATA PELAJARAN	JAM PELAJARAN
1	Pengarahan Pelatihan Dasar-Dasar AMDAL dan <i>Environmental and Social Impact Assessment</i> (ESIA)	2
2	Pengertian dan Manfaat AMDAL dan UKL-UPL	2
3	Proses AMDAL dan UKL-UPL	2
4	Pengenalan Peran Multilateral Development Banks (MDB) dalam Pembangunan Berkelanjutan	2
5	Pengenalan ESF Bank Dunia dan 10 Standar Lingkungan dan Sosial (ESS) dan SPS ADB	2
6	Pengantar Keterkaitan antara AMDAL UKL-UPL dengan Sistem Perizinan	2
7	Kebijakan Terkait Penataan Ruang	2
8	PUU Sektor dan Daerah yang berkaitan dengan AMDAL, UKL-UPL, Izin Lingkungan dan Izin Usaha/dan atau Kegiatan serta Perizinan Lainnya	2
9	Penapisan Kegiatan Wajib OSS dan AMDAL	2
10	Penapisan Kewenangan Penerbitan Izin Lingkungan dan Pelingkupan	2
11	Pengantar Prakiraan dan Evaluasi Dampak	3
12	Proses Penyusunan AMDAL (KA)	2
13	Proses Penyusunan AMDAL (ANDAL, RKL-RPL)	2
14	Pengantar Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup	3
15	Perubahan Izin Lingkungan	2
16	Tata Laksana Penilaian AMDAL dan Penerbitan Izin Lingkungan	3
17	Pengawasan dan Penegakan Hukum (Evaluasi Kinerja Komisi Penilai, Evaluasi LPJP dan Personil, Sanksi Administrasi, Sanksi Pidana)	2
18	1. Integrasi Aspek Lingkungan dan Sosial dalam Dokumen Lelang dan Kontrak dengan Kontraktor 2. Identifikasi Prediksi dan Evaluasi serta Mitigasi Dampak dalam ESP Bank Dunia dan SPS ADB	2 2
19	Etika Penyusun dan Penilai AMDAL	2
20	Sistem Informasi AMDAL	7
21	Ujian Tertulis	1
22	Evaluasi Penyelenggaraan	
	TOTAL JAM PELAJARAN	53

*) Kurikulum ini sesuai dengan Keputusan Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan KLH No. Kep-11/Pusdiklat/LH/11/2012

Didukung oleh :



Koordinator Pelatihan PSLH UGM

Dr. Endang Astuti, M.Si.
NIP. 19681223 199702 2 001



PEMERINTAH KABUPATEN NAGAN RAYA
KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS (KLHS)
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD)





PEMERINTAH KABUPATEN NAGAN RAYA
KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS (KLHS)
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD)





PEMERINTAH KABUPATEN NAGAN RAYA
KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS (KLHS)
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD)



PEMERINTAH KABUPATEN NAGAN RAYA
KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS (KLHS)
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD)

Lampiran 1.2.



PEMERINTAH KABUPATEN NAGAN RAYA
KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS (KLHS)
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD)

Lampiran 1.3.

